AHMAD MANSUR SURYANEGARA

api sejarah

MAHAKARYA PERJUANGAN
ULAMA DAN SANTRI DALAM MENEGAKKAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Jilid Kedua

"Saya ikut bangga atas terbitnya buku ilmiah Api Sejarah, yang demikian tebal ini. Bukanlah prestasi yang entang saat sebuah buku ilmiah mampu sukses di pasaran. Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2 telah membuka tabir akan berbagai aspek sejarah yang masih gelap. Selamat dan terima kasih atas karya besar ini".

Prof. Dr. TAUFIK ABDULLAH
(Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, Peneliti Utama, Ketua LIPI 2000-2002)

*"Perhatikanlah Sejarahmu
untuk Hari Esokmu"*
(QS 59 : 18)

A. MANSUR SURYANEGARA

Ahmad Mansur Suryanegara

Jilid Kedua

Surya Dinasti

api sejarah 2

Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri
dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Suryanegara, Ahmad Mansur
Api Sejarah 2, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri
dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ahmad Mansur Suryanegara; Penyunting: Nia Kurniawati,
Anni Rosmayani, Rakhmat Gumilar; Cet. 1, Edisi Revisi
Bandung: Surya Dinasti, 2015
xxxviii + 597 hlm,; 17,5 x 26 cm

ISBN: 978-602-71237-0-0
ISBN: 978-602-71237-1-7

Cetakan I, Edisi Revisi, 19 Jumadil Akhir 1437 H/28 Maret 2016

Editor : Nia Kurniawati
Penata Letak : Anni Rosmayani
Desain Sampul : Rakhmat Gumilar

Penerbit Surya Dinasti
CV. Tria Pratama
Komplek Griya Bandung Asri 2 Blok B1 No. 16
Cipagalo - Bojongsoang - Bandung - Jawa Barat
Tel. +62 22 7533328, Fax. +62 22 7533328
e-mail: dinastisurya@gmail.com

Sumber: *Lukisan Karya S. Herman*, 2005

KATA PENGANTAR PENERBIT

API SEJARAH Jilid Kedua, Penerbit hadirkan kembali keharibaan Pembaca Yang Terhormat. Penerbit sadar Pembaca telah memiliki API SEJARAH cetakan lama. Tetapi karena adanya dorongan keinginan untuk mengkualitaskan sistem percetakannya, maka kami terbitkan API SEJARAH Jilid Kedua, edisi revisi hard cover.

Penerbit yakin edisi revisi sekarang ini akan lebih mengenakkan Pembaca Yang Terhormat dalam menelaah juang jihad Ulama dan Santri menegakkan NKRI.

Sepertinya suatu hal yang tidak dapat dipahami oleh Pembaca Yang Terhormat, bila Ulama dan Santri berpartisipasi aktif bela negara dan bangsa. Pandangan yang demikian itu terjadi sebagai dampak lanjut adanya *deislamisasi* penulisan sejarah.

API SEJARAH Jilid Kesatu dan Kedua, mengangkat sejarah juang jihad Ulama dan Santri sejak abad ke 7 M hingga masa Presiden RI ke 7. Berbagai halang dan rintangan yang dilalui oleh Ulama dan Santri betapapun beratnya juang jihad Ulama dan Santri, ujung perjuangannya menjadikan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI.

Ciri karya Ahmad Mansur Suryanegara dengan API Sejarahnya dalam sekapur sirih tidak hanya membicarakan aktor sejarah tapi juga mengenalkan Guru Besar Sejarah, Ketua Museum, Pustakawan dan Penerbit yang menjadikan hasil penulisan sejarah dapat dipublikasikan.

Selamat membaca dan menelaahnya. Terima kasih.

Bandung, 19 Jumadil Akhir 1437 H
28 Maret 2016 M

Penerbit
Surya Dinasti

ASEAN
2003
CERTIFICATE
Dipersembahkan oleh
International Human Resources
Development Program - HRDP
Sebagai
ASEAN BEST EXECUTIVE
AWARD
2003

Lukisan Presiden Soekarno
Karya : Basuki Bawono

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Hargailah Pahlawan!

Pahlawan sedjati tidak minta dipudji djasanja. Bunga mawar tidak mempropagandakan harumnja, tetapi harumnja dengan sendiri semerbak kekanan-kiri.

Tetapi:

Hanja bangsa jang tahu menghargai pahlawan-pahlawannja, dapat mendjadi bangsa jang besar.

Karena itu, hargailah pahlawan-pahlawan kita!

Merdeka!
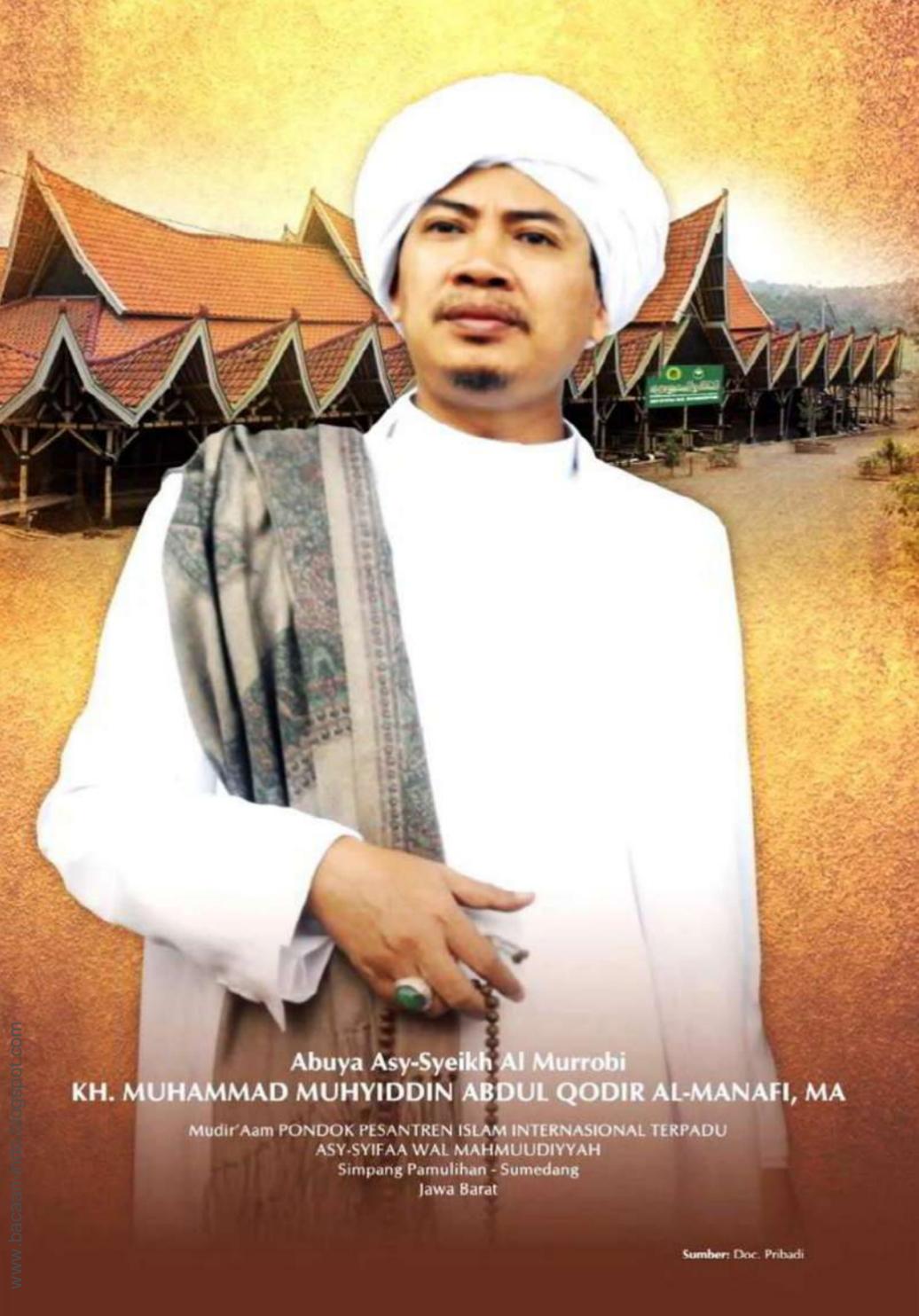
Soekarno —

Djokjakarta 10 Nop. '49

Lukisan tulisan tangan Presiden Soekarno
Karya : Dr. Abay D. Subarna

KEMERDEKAAN INDONESIA BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

A**PI SEJARAH 1** dan **2** yang hadir di tengah pembaca, mengingatkan kembali jasa akbar juang jihad Ulama dan Santri dalam keberhasilan mempertahankan eksistensi agama, bangsa, dan negara di nusantara Indonesia dalam menjawab tantangan penjajah Barat dengan gerakan pembinasaan (genocide) bangsa yang dijajah. Indonesia jadi selamat dan dapat terhindarkan dari pembinasaan bangsa seperti yang dilancarkan penjajah terhadap bangsa Indian di Amerika dan Aborigin di Australia. Tindakan menjajah dan membinasakan bangsa-bangsa yang melawan penjajah oleh Paus Alexander VI (1494) mereka namakan sebagai misi suci (mission sacre). Tidaklah salah bila sejarah mencatat pelopor pertama imperialisme di dunia terlahir dari ajaran Katolikisme, yang dijalankan pertama oleh Kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol sebagai pelaku penjajahnya. Kemudian diikuti lahirnya imperialisme yang bertolak dari dasar ajaran Protestanisme dan Calivinisme, dengan pelaku sejarahnya Kerajaan Protestan Anglikan Inggris, Kerajaan Protestan Belanda, Amerika Serikat. Kedatangan kedua imperialisme Katolik dan Protestan ini menjadikan Islam sebagai simbol nasionalisme Indonesia. Artinya gerakan cinta agama, bangsa dan negara serta anti imperialisme. Dan pelaku utama dan pelopor perlawanan terhadap penjajah adalah Ulama dan Santri. Karena Kerajaan Budha Sriwijaya dan Kerajaan Hindu Majapahit sudah tidak bisa lagi menampilkan peran sejarahnya.

Alhamdulillah, militansi Ulama dan Santri karena berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, walaupun ratusan tahun mendapatkan serangan imperialis, Ulama dan Santri pada akhirnya menjadikan Indonesia merdeka dan berdaulat. Lahirlah Republik Indonesia bertauhid sebagai negara yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di saat Republik Indonesia menemui kegagalan dalam perundingan Linggarjati (1946) yang dipimpin oleh Sutan Syahrir (Partai Sosialis Indonesia -PSI), dan Renville (1948) dipimpin oleh Amir Syari fuddin(PKI), serta Konferensi Meja Bundar (1949)

dipimpin oleh Mohammad Hatta (PNI), muncullah Mohmmad Natsir dari Partai Politik Islam Masyumi (1949) melalui Mosi Integral, berkat Rahmat Allah Yang Kuasa berhasil menguburkan RIS dan melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI (17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369) dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Mohammad Natsir. Kemudian diikuti dengan pengesahan Lambang Negara Garuda Pancasila, oleh Perdana Menteri Dr. Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Politik Islam Masyumi. Selain itu, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, NKRI diterima pula sebagai anggota Persatuan Bangsa Bangsa PBB. Indonesia diwakili oleh Mr. Mohammad Roem (Masyumi)

Kelanjutan sejarahnya berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dengan melalui Dekrit Presiden (1959) kembali ke UUD 1945. Karena perjuangan Dr.K.H. Idham Khalid dari Nahdlatul Ulama, Presiden Sukarno menyatakan dalam kembalinya ke UUD 1945, Piagam Jakarta (22 Juni 1945) menjiwai UUD 1945. Dengan demikian Piagam Jakarta yang pernah dihapuskan, lahir kembali dan berlaku kembali.

Di samping itu, juang jihad Ulama adan Santri di masa penjajahan Balatentara Jepang, lahirlah Tentara Pembela Tanah Air – Tentara Peta (3 Oktober 1943). Sekitar 68 Batalyon, Komandan Batalyonnya adalah Ulama. Di saat Proklamasi 17 Agustus 1945 Tentara Peta menjadi rahim yang melahirkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang disambut oleh bangsa Indonsia sebagai Anak Kandung Rakyat. Dan Barisan Ulama Sabilillah dan Lasykar Santri Hizbullah, sebagai Barisan Istimewa Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia. Sekalipun umat islam sebagai mayoritas, dan memiliki Lasykar Bersenjata dan Partai Politik Islam Indonesia Masyumi sangat besar pengaruhnya, tidak pernah melancarkan Kudeta seperti PKI di Cirebon (12 Februari 1946), di Yogyakarta (3 juli 1946) dan di Madiun (19 September 1948). Ulama dan Santri tetap setia kepada Presiden Sukarno, dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta Panglima Besar Soedirman. Maha Karya Perjuangan Ulama dan Santri Menegakkan NKRI hingga masa Presiden Jokowi, diangkat kembali sejarahnya oleh Ahmad Mansur Suryanegara dari Universitas Padjadjaran Bandung dalam **Api Sejarah 1** dan **2**. Perlu dibaca dan dikaji kembali.

Bandung 12 Rabiul Awwal 1437
12 Desember 2015

Pimpinan
Pondok Pesantren Islam Internasional Terpadu
Asy Syifa Wal Mahmuudiyyah
KH. M. Muhyiddin Abdul Qodir Al Manafi, MA

SEKAPUR SIRIH 2

ULAMA dan Santri memasuki abad ke-14 H/20 M dihadapkan pada turunnya rahmat Allah Yang Mahakuasa, yakni berakhirnya penjajahan politik atas bangsa dan negara Indonesia. Perang Doenia II (1939-1945 M) dan Perang Asia Timoer Raja (1941-1945 M), perang antarnegara imperialis Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Sekoetoe - Alied Forces yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Perancis melawan imperialis Barat dan Timur yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Poros - Axis Pact. Mereka dipimpin Jerman, Italia dan Djepang. Dampaknya, bangsa dan negara Indonesia yang baru terbebas dari penjajahan Keradjaan Protestan Belanda ditandai dengan adanya Kapitulasi Kalijati Subang, 8 Maret 1942. Kemudian menyusul terbebas dari penjajahan Kekaisaran Shinto Djepang yang ditandai dengan menyerahnya Djepang kepada Sekoetoe, 14 Agustus 1945, diikuti dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Proses terbebasnya dari penjajahan politik Barat dan Timur merupakan puncak keberhasilan perjuangan Ulama dan Santri yang berlangsung sejak 1511 M.

Kelahiran penjajahan Barat ditandai dengan adanya Perjanjian Tordesilas, 1494 M. Perjanjian yang dibuat Keradjaan Katolik Spanjol dan Keradjaan Katolik Portugis yang ditengahi oleh Paus Alexander VI memberikan kewenangan kepada mereka untuk menguasai dunia belahan barat dan dunia belahan timur. Paus Alexander VI meyakinkan bahwa kedua belahan dunia yang berada di luar Negara Gereja Vatikan merupakan terra nullius - wilayah tidak bertuan. Bangsanya dinilai sebagai bangsa biadab. Perjanjian Tordesilas merupakan awal lahirnya imperialisme Barat atau imperialis kuno. Untuk Asia Tenggara diawali dengan penyerangan Keradjaan Katolik Portugis ke Malaka (1511 M) sebagai pusat pasar milik umat Islam.

Prof. DR. MUMUH MUHSIN ZAKARIA, M.Hum

"Buku ini bagus karena sangat jarang ada buku sejarah yang laku dan didiskusikan di berbagai tempat. Padahal, kita tahu bahwa pelajaran sejarah sejak SD hingga perguruan tinggi tidak diminati. Kalau membaca karya sejarah yang ditulis oleh pakar sejarah atau profesor tidak akan betah lama membacanya. Beda dengan buku Pak Mansur ini, dibaca dan dimiliki masyarakat awam. Saya menyarankan kepada penerbit untuk diajukan ke Muri."

Sumber: www.unpad.ac.id

Di lain pihak, sejak 1494 M, antarkedua kerajaan imperialis sesama Katolik, Spanjol, dan Portoegis saling berperang memperebutkan wilayah jajahannya. Menyusul dengan adanya Marten Luther, 19 April 1529, lahirlah kekuatan tandingan yang menggunakan agama Protestan atau Calvinis sebagai landasan dasar pembenaran tindak imperialisme Protestan Barat. Perang Agama Katolik lawan Protestan diakhiri dengan membagi Eropa menjadi kerajaan-kerajaan kecil atas dasar agama masing masing. Dengan ketetapan, cujus regioejus religio atau one teritorial one faith satu wilayah satu agama. Dengan ketetapan itu, berarti antarkerajaan di Eropa tidak mengenal toleransi agama walaupun sama-sama salib. Berikutnya, menurut Mc Weber karena pengaruh etik Protestan mendorong lahirnya kapitalisme yang menjadikan imperialisme Protestan semakin kuat.

Di Indonesia, kedatangan kedua penjajah Barat tadi, selain mengembangkan wilayah jajahannya, juga dengan Mission Sacred - Misi Suci mengembangkan agama Katolik. Dengan Zending-nya mereka berusaha mengembangkan agama Protestan, sekaligus memasukkan budaya perang agama di Eropa ke Nusantara. Politik pengembangan agama yang dilakukan imperialis Barat dengan cara paksa dalam Sejarah Indonesia disebut politik kristenisasi.

Dampaknya, Islam berhadapan dengan keduanya. Pecahlah Perang Agama Segitiga, antara Katolik kontra Protestan dan Islam melawan keduanya. Dengan demikian, Islam menjadi simbol nasionalisme. Artinya, Islam bagi rakyat atau pribumi dijadikan landasan ajaran penentang imperialisme, kapitalisme, dan Politik Kristenisasi. Perlawanan ini memakan waktu yang sangat panjang. Akibat imperialis Barat, Keradjaan Protestan Belanda berhasil menciptakan sistem pemerintahan tidak langsung - indirect rule system. Menjadikan pangreh pradja dari Lurah hingga Bupati di P. Jawa, Penghoeloe di Sumatra Barat, Ole Balang di Aceh, pembantu setianya dalam menghadapi perlawanan Ulama dan Santri.

Adapun para Sultan dipaksa untuk menandatangani Korte Verklaring – Perjanjian Pendek, menyerahkan kedaulatannya ke VOC dan selanjutnya kepada pemerintah kolonial Belanda. Para Sultan dibenarkan tetap menyandang gelar Sultan, tetapi dihapuskan kekuasaan politik, ekonomi, dan militernya. Kekuasaan ekonomi dan pasarnya dialihkan ke Vreemde Oosterlingen - Bangsa Timur Asing: Cina, India, dan Arab, diberikan hak memegang monopoli dalam masalah pangan dan sandang pribumi. Selain itu, juga diberi kewenangan sebagai tax collector - penarik pajak.

Memasuki 1789 M, perang agama di Eropa, sesudah Protestant Revolution, 1775, berubah menjadi Revolusi Perancis. Pada awalnya bertujuan untuk menegakkan Liberte - Kemerdekaan, Egalite - Persamaan, Fraternite - Persaudaraan, untuk Perancis

Prof. DR. REIZA D. DIENAPUTRA, M.Hum.

"Peristiwa sejarah akan senantiasa ada dan terus berputar selama manusia sebagai aktor utamanya masih diberi amanah oleh Sang Pencipta Alam Semesta untuk tetap berkiprah di muka bumi ini. Bangunan kisah sejarah haruslah didasarkan atas sumber-sumber sejarah, baik tulisan, benda, lisan, dan visual. Tanpa sumber maka tidak ada kisah sejarah."

Sumber: www.unpad.ac.id

dari penindasan Raja Louis XIV, kaum bangsawan dan gerejawan. Dengan munculnya Napoleon Bonaparte, jalan sejarah Revolusi Perancis diubahnya menjadi media pembangkit kesadaran bangsa Perancis sebagai pelopor dan penggerak pembebasan seluruh kerajaan di Eropa dan Inggris dari penindasan raja-rajanya. Napoleon Bonaparte yang tadinya antiraja, mengangkat dirinya sebagai kaisar atau raja diraja.

Perubahan arah Revolusi Perancis ini mengancam eksistensi kerajaan-kerajaan di Eropa dan Inggris. Pecahlah Perang Napoleon, Eropa, dan Inggris berupaya membebaskan dari kekuasaan Kaisar Napoleon Bonaparte. Keradjaan Protestan Belanda ditiadakan, diangkatlah saudaranya, Louis Napoleon sebagai rajanya. Kemudian Daendels diangkat sebagai Goebernoer Djenderal untuk Pulau Jawa dengan tugas membubarkan VOC dan melawan serangan dari laut Keradjaan Protestan Anglikan Inggris.

Goebernoer Djenderal Daendels dalam mengaplikasikan tugas tadi, selain menjadikan Bandoeng sebagai Paris van Java, sesudah ibukota Batavia, juga membangun Pabrik Senjata di Ngawi dan Surabaya. Demi mempercepat gerak mobilitas serdadunya, dibangunlah jalan pertahanan darat dari Anyer hingga Panarukan. Namun, usaha ini tidak dapat bertahan lama (berlangsung pada 1808 sampai 1811 M). Dengan jatuhnya Napoleon Bonaparte, kekuasaan Perancis atas Pulau Jawa beralih ke Inggris di bawah Letnan Goebernoer Djenderal Raffles. Kemudian sejak 1816 M, Pulau Jawa diserahkan kembali pada Belanda.

Perlombaan antarKeradjaan Protestan Belanda dan Inggris dalam mencari tanah jajahan, menjadikan Amerika Serikat sebagai negara demokrasi berubah menjadi negara imperialis, dan berusaha mengembangkan kekuasaan jajahannya di Asia Tenggara maka terancamlah Belanda dan Inggris. Sebenarnya, mereka sebagai negara Protestan. Namun, dalam masalah politik jajahan, Belanda dan Inggris merasa terancam ketika Amerika Serikat mulai bekerjasama niaga dengan kaum Padri di Sumatra Barat ataupun Aceh. Untuk mengatasinya, antara Keradjaan Protestan Anglikan Inggris dan Keradjaan Protestan Belanda mengadakan kerjasama pertahanan dituangkan dalam Treaty of London (1824 M) isinya saling menukar wilayah jajahannya. Inggris menyerahkan Bengkulu yang berdampingan dengan Sumatra Barat pada Belanda. Sedangkan Belanda menyerahkan Malaka pada Inggris.

PROF. DR. DELIAR NOER

Pakar politik, Ketua Partai Umat Islam Indonesia - PUI, Sejarawan, Direktur Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat - LIPPM, Wakil Presiden Regional Islamic Da'wah Council - RIDC, Rektor IKIP Jakarta, dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, serta Ketua Umum Yayasan Umat Islam.

Sumber: Membincangkan Tokoh-Tokoh Indonesia (Mizan)

Selanjutnya, di wilayah Sumatra Barat terjadi Perang Padri antara Kaum Adat yang didukung Belanda melawan Kaum Padri. Perang ini terjadi selama dua periode, 1821-1825 M dan 1825-1837 M. Dengan cara ini, hubungan niaga Amerika Serikat dengan Kaum Padri berakhir. Di lain pihak dengan berhentinya Perang Padri (1821-1825 M), Perang Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830 M) dapat teratasi. Perang Diponegoro bukan karena adanya pengaruh Amerika Serikat seperti di Sumatra Barat. Melainkan sebagai akibat *Pangeran Diponegoro* membangkitkan kembali kehidupan Islami di kalangan istana dan masyarakat Jogyakarta. Kalangan bangsawan hidup dengan gaya Barat yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Perluasan wilayah jajahan, imperialisme dan kapitalisme, di Eropa sendiri berdampak nasib buruh kulit putih juga tertindas. Di Perancis, timbul *Revolusi Juli 1830* dan *Revolusi Februari 1848 M* yang mengadakan perubahan sistem politik dari kerajaan menjadi republik. Di Jerman, muncul gerakan *Revolusi Buruh Karl Marx*, 1848 M yang hampir senafas dengan Revolusi Perancis, menentang kekuasaan Gereja dan Monarchi. Revolusi ini bertujuan menegakkan ideologi komunisme melalui *conflict theory*, yaitu revolusi buruh proletar untuk menumbangkan kekuasaan kaum kapitalis atau borjuis. Kemudian melalui ajaran Marxisme dibangun *classless society* - masyarakat tanpa pemerintahan dan tanpa agama. Pengaruh revolusi ini di Rusia, menjadikan kaum buruh berhasil menumbangkan kekuasaan Tsar Nicolas II dan melahirkan pemerintahan Diktator Proletar di bawah Lenin. Seratus tahun kemudian di Indonesia, 1848-1948 M, terjadi Kudeta PKI Madiun, 19 September 1948, Amir Sjarifoeddin yang bergelar Soetan Goenoeng Soaloan dan Moeso mencoba mengaplikasikan ajaran Marxisme demi menumbangkan Kabinet Hatta. Kudeta ini kembali diulang oleh D.N.Aidit dengan G30S/PKI di Jakarta, 30 September 1965.

Puluhan ketiga abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda dalam upayanya melumpuhkan pengaruh Ulama di daerah pedalaman, setelah terusir dari wilayah pantai dan pelabuhan pindah ke pedalaman, membuat *Cultuur Stelsel* atau *Tanam Paksa* yang berlangsung selama 1830-1919 M. Tanam Paksa di perkebunan kopi, terlama hingga berakhirnya Perang Dunia I, berlangsung di Jawa Barat.

Melalui Tanam Paksa dipatahkanlah kekuasaan Ulama dalam bidang ekonomi dan pasar serta dialihkan monopolinya ke *Vreemde Oosterlingen* - Bangsa Timoer Asing, yaitu Cina, India, dan Arab. Para petani Muslim ditindas secara kejam di atas tanah sawah ladangnya sendiri. Para petani diwajibkan memproduksi kopi, gula, tembakau, sebagai komoditas untuk pasar Eropa. Sejak adanya Tanam Paksa hampir hilanglah perhatian para Ulama pada bidang kewirausahaan dan penguasaan pasar serta penguasaan maritim.

DR. KUNTOWIJOYO

Sejarawan profetik, Sastrawan, dan Guru Besar Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Karyanya: *Paradigma Islam interpretasi untuk Aksi, Identitas Politik Umat Islam, Khotbah Di Atas Bukit, Muslim Tanpa Masjid, Pengantar Ilmu Sejarah, Metodologi Sejarah, dan lainnya.*

Ketika pesantren masih kecil dengan sedikit Santri, pesantren sepenuhnya milik lembaga desa, tempat anak-anak belajar. Ketika pesantren sudah membesar, ia akan lepas dari desanya dan berdiri sendiri. Akhirnya, menjadi lembaga yang terasing dari desanya.

Sumber: *Paradigma Islam (Mizan)*

Melalui keuntungan dari hasil Tanam Paksa, Belanda memperkuat pertahanan penjajahannya di Nusantara. Tidak hanya membangun jalan darat peninggalan Goebernoer Djenderal Daendels dari Perancis. Namun juga, membangun jalan kereta api yang multifungsi. *Pertama*, sebagai jasa transportasi massa. *Kedua,* di bidang niaga sebagai pengangkut hasil Tanam Paksa. *Ketiga,* di bidang operasi militer sebagai *Benteng Stelsel*. Seluruh wilayah yang ada perlawanan para Ulama dan Santri dibuatkan jalan kereta api oleh Belanda yang berfungsi mempersempit ruang gerak perlawanan Ulama dan Santri serta memperlemah pengembangan Islam. *Keempat,* dalam kaitannya upaya menguatkan *Politik Kristenisasi,* digunakan melindungi gereja yang dibangun dekat dengan jalan kereta api atau stasiun kereta api.

Dengan laba Tanam Paksa, Bandung dijadikan sebagai Pusat Kereta Api, Pos Telegraf dan Telepon, Pekerjaan Umum, Geologi, Pabrik Senjata pindahan dari Ngawi dan Surabaya. Selain itu, di Bandung, Sukabumi dan Lembang dibangun pula Sekolah Militer dan Polisi. Demikian pula untuk melengkapi pertahanan udara, dibangun pula Pusat Penerbangan di Bandung. Untuk pertahanan daratnya, Bandung dijadikan sebagai Pusat Infanteri. Oleh karena itu, perencanaan melumpuhkan perlawanan Ulama dan Santri serta Sultan di seluruh Nusantara, Belanda mendirikan *Departement van Oorlog* - Gedung Perang di Bandung.

Abad ke-19 sebagai Abad Imperialisme Modern Barat. Hal ini terjadi sebagai dampak runtuhnya Imperialis Katolik Barat atau imperialisme kuno, 1870 M. Hal itu terjadi sebagai akibat keberhasilan perjuangan menegakkan Negara Kesatuan Italia di bawah Victor Emmanuel, yang mendapatkan dukungan rakyat Italia. Oleh karena itu, runtuhlah kekuasaan Paus atau Negara Vatikan di Roma, berarti berakhirlah masa imperialisme kuno di bawah dua kerajaan: Keradjaan Katolik Spanjol dan Portoegis. Disusul dengan dikuasainya Terusan Suez oleh Inggris, lemahlah kekuasaan Perancis di India, sebagai pendukung Negara Vatikan. Selanjutnya, dengan adanya peristiwa ini sejarawan Barat menuliskannya sebagai abad dimulainya imperialisme modern.

Dipimpin oleh dua kerajaan imperialis modern: Kerajaan Protestan Anglikan Inggris dan Keradjaan Protestan Belanda. Amerika Serikat yang dikenal sebagai Pendekar Demokrasi, dan menurut Crain Brinton terlahir dari *Protestan Revolution*, 19 April1775, setelah memiliki armada militer dan penguasaan maritim yang kuat, Amerika menyusul menjadi negara imperialis Barat dan ikut berlomba meluaskan wilayah jajahannya. Dalam keadaan ini, Keradjaan Protestan Belanda yang telah mendapatkan laba besar dari Tanam Paksa, segera membangun kerjasama penjajahan dengan Keradjaan Protestan Anglikan Inggris, *Treaty of London* (1870 M) untuk melapangkan jalan penyerangan ke Kesultanan Aceh yang telah mengadakan kontak niaga dengan Amerika Serikat.

ISMAN PASHA

Kepala Museum Konperensi Asia Afrika

HANS BAGUE JASSIN

Lahir di Gorontalo, 13 Juli 1917

Pengarang, Penyunting, Kritikus Sastra

Satu-satunya yang menerjemahkan kata "Al-Quran" menjadi "BACAAN MULIA".
Pada umumnya Al-Qur'an tidak diterjemahkan seperti di Al-Quran terjemahan berikut ini:
A. Yusuf Ali, THE HOLY QUR'AN;
Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al Hilalli, Ph.D. et.al., THE NOBLE QUR'AN;
J.M. Rodwell: THE KORAN.

PROF. DR. TAUFIK ABDULLAH

Sejarawan, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia, Peneliti, dan Ketua LIPI

Karyanya: *Islam di Indonesia Sepintas Lalu tentang Beberapa Segi, Islam dan Masyarakat Sejarawan dan Kesadaran Sejarah, Islam di Asia Tenggara, Sejarah Umat Islam Indonesia, Manusia dalam Kemelut Sejarah,* dan *Ensiklopedi tematis Dunia Islam Faktaneka dan Indeks.*

Sumber: www.cabiklunik.blogspot.com

Realisasi *Treaty of London*, pemerintah kolonial Belanda menciptakan Perang Aceh untuk mematahkan perlawanan Ulama dan Santri serta umat Islam Aceh di bawah pimpinan Teoekoe Tjik Di Tiro, Teoekoe Oemar dan Tjoet Nja Dhien. Untuk Sumatra Utara, diciptakan Perang Batak demi melumpuhkan perlawanan Ulama dan Santri yang dipimpin oleh Si Singamangaradja XII. Sampai di sini terlihat adanya perubahan tatanan politik di Eropa, Timur Tengah, dan India, yang berpengaruh besar terhadap perubahan politik di Indonesia. Melemahnya Kesultanan Turki di Timur Tengah dan Kesultanan Mongol di India, sangat besar pengaruhnya terhadap perjuangan menegakkan nasionalisme yang dipimpin para Ulama dan Santri di Indonesia dalam membendung banjir imperialisme Barat.

Memasuki abad ke-20 M, kedua kerajaan Perancis dan Jerman berupaya memperoleh hegemoni di Eropa. Persaingan mereka melahirkan Perang Dunia I (1914-1919 M). Perang ini diakhiri dengan Perjanjian Versailles, Kekaisaran Jerman dipermalukan Perancis dengan mempersempit wilayahnya. Akibatnya, di bawah Adolf Hitler, Jerman berupaya bangkit kembali dengan meluaskan *Lebensraum-Living Space,* Lahan Kehidupannya, dan merobek Perjanjian Versailes 1919 M. Jerman bersama Italia dan Jepang membangun pakta pertahanan, *Axis Pact* - Pakta Pertahanan Poros, untuk mengubah peta wilayah politik sedunia. Untuk kepentingan ini, Adolf Hitler membangkitkan kesadaran bangsanya sebagai keturunan bangsa Aria, *Deutschland Uber Alles* - Bangsa Jerman di atas segalanya. Berdasarkan sejarah, pada 800 M, seluruh Eropa Barat dan Timur adalah wilayah Jerman.

Fenomena ini diikuti Jepang yang mempropagandakan dirinya pada seluruh bangsa Asia bahwa Jepang adalah "Saudara Tua" sebagai pengubahan arti *Deutsch land Uber Alles*. Tidak hanya Eropa yang akan dikuasainya, bersama Italia di bawah Mussolini dan Kekaisaran Shinto Djepang di bawah Tenno Heika Hirohito, mereka berencana membagi dunia di bawah kekuasaannya.

Di Eropa melahirkan Perang Dunia II (1939-1945 M) dan di Asia melahirkan Perang Asia Timoer Raja atau Perang Pasifik (1941-1945 M). Dunia dijadikan arena perang perebutan wilayah oleh kekuatan Sekoetoe - *Allied Forces* sebagai kelompok imperialis Barat, melawan Poros - *Axis Pact* sebagai paduan kekuatan imperialis Barat dan Timur yang akan menjadikan tanah jajahan sebagai *Lebensraum* - Lahan Kehidupan.
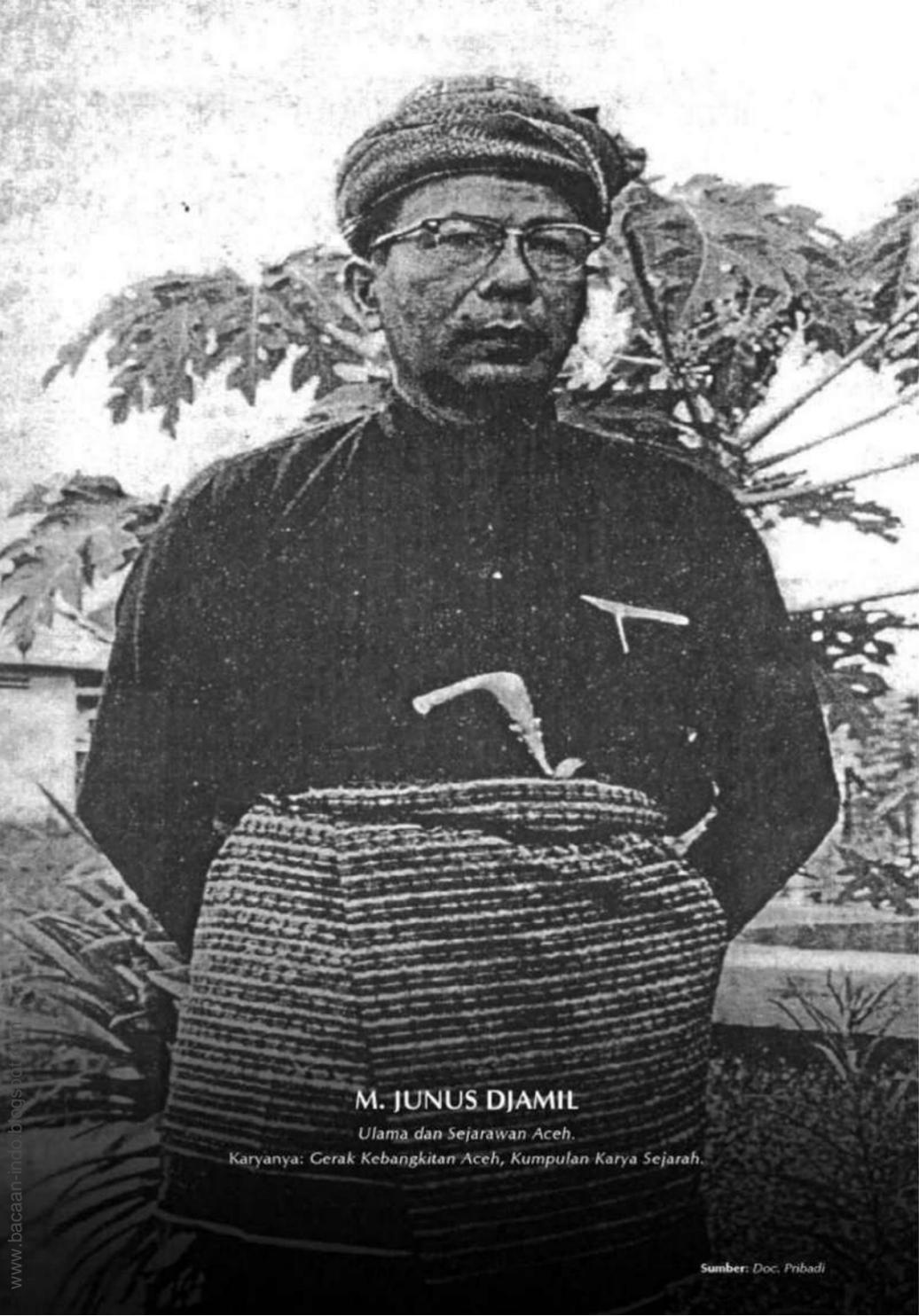
M. JUNUS DJAMIL

Ulama dan Sejarawan Aceh.

Karyanya: *Gerak Kebangkitan Aceh, Kumpulan Karya Sejarah.*

Sumber: *Doc. Pribadi*

DRS. H. IMANG SUMAWINATA, M.A.

Alumnus IAIN Suka Yogyakarta dan IAIN SGD Bandung
Pengamat Sejarah dari Lembaga Sejarah Universitas Islam Bandung
Ketua Jurusan Perbandingan Agama Universitas Islam Bandung
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al I'anah Cianjur
Ketua Komisi Ekonomi Syariah MUI Kabupaten Cianjur

Sumber: *Sabili No.14 Th.XV 15 Muharam 1429*

PROF. DR. DJOKO SURYO

Guru Besar Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada

Sumber: Doc. Pribadi

K.H. ACHMAD SIDDIQ

Sekretaris K.H. Wahid Hasjim
Ulama dan Pelaku Sejarah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bersifat agamis atau tidak bertentangan dengan agama. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah filosofi, cita-cita dasar bangsa Indonesia tentang negara yang bagaimana kita inginkan yang dirumuskan oleh Bapak Bangsa dalam bahasa yang penuh dengan nuansa keagamaan, bukan nuansa sekularistik. Jadi, bagaimana mungkin kita tafsirkan bahwa negara kita sekuler. Tindakan itu ahistoris dan tidak berpijak pada realitas sosial masyarakat.

Sumber: *Doc. Pribadi*

Para Ulama dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Pada satu pihak, kondisi Timur Tengah berpihak kepada Sekoetoe. Sedangkan propaganda Kaisar Hirohito setelah Kesultanan Turki runtuh menjadi Republik Sekular Turki, bersedia masuk Islam dan menjadi Khalifah pengganti Sultan Turki atau Raja Husein dari Arabia. Diikuti dengan adanya Pameran Budaya Islam dan pembangunan Masjid di Tokio serta mengundang Ulama dan pimpinan organisasi Islam ke Tokio dengan biaya dari Jepang. Di bawah kondisi ini timbul sikap politik Ulama yang menerima kehadiran Jepang sebagai "Saudara Tua".

Berakhirnya penjajahan Keradjaan Protestan Belanda, dipropagandakan oleh Balatentara Djepang sebagai berakhirnya pemerintahan Kristen di Indonesia. Para Ulama dihadapkan suatu pembaharuan besar di berbagai bidang yang terkait dengan usaha memenangkan Perang Asia Timoer Raya. Terutama Balatentara Djepang memercayakan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air kepada Ulama dan diangkat sebagai *Danyon* atau *Daidancho* dalam menghadapi serangan balik Amerika Serikat, Inggris, Cina dan Belanda atau America, British, Cina and Ducth - ABCD.

Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membangkitkan jiwa keprajuritan para pemuda yang diperjuangkan oleh Oemar Said Tjokroaminoto dalam *Congres National Centraal Syarikat Islam* di Bandung, 1916 M. Manfaatnya jasa perjuangan Ulama, menjadikan Tentara Pembela Tanah Air, sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia.

Balatentara Djepang tidak hanya memercayakan kepemimpinan Tentara Pembela Tanah Air kepada Ulama. Namun, P.M. Koiso, pada 7 September 1944, juga menyampaikan janji perkenan kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini sebagai jawaban terhadap tuntutan kemerdekaan Indonesia berdasarkan Islam yang diperjuangkan oleh K.H. Zainal Moestofa dari Pesantren Singaparna, Tasikmalaya, serta Kiai Srengseng dan Hadji Madrias dari Pesantren Indramayu.

Tuntutan K.H. Zainal Moestofa dan Janji P.M. Koiso belum terrealisasikan, bom atom yang dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki, pada 6 dan 9 Agustus 1945, menjadikan Perang Dunia II dan Perang Asia Timoer Raja berakhir. Ditandai dengan peristiwa menyerahnya Kaisar Hirohito, 14 Agustus 1945. Tiga hari sesudahnya, setelah Boeng Karno mendapatkan dukungan dari para Ulama, bersama Boeng Hatta merumuskan teks Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian dibacakan pada 9 Ramadhan 1364, Jumat Legi, 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Dengan berakhirnya masa penjajahan politik dari imperialis Barat dan Timur, para Ulama memercayakan kepemimpinan negara dan bangsa kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Sehari setelah Proklamasi, tepatnya

10 Ramadhan 1364, Sabtu Pahing, 18 Agustus 1945, para Ulama seperti Wahid Hasjim (Nahdlatoel Oelama), Ki Bagoes Hadikoesoema dan Kasman Singodimedjo (Persjarikatan Moehammadijah) bersama Teuku Mohammad Hasan (Aceh) merumuskan ideologi bangsa dan negara, *Pantjasila* dan konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945, untuk diserahkan kepada Drs. Mohammad Hatta dan dilanjutkan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia - PPKI untuk disahkan. Peran Ulama ini dalam penulisan Sejarah Indonesia ditiadakan.

Sikap lanjut para Ulama, mendukung dan menyambut Makloemat Wakil Presiden, 3 November 1945, dengan mendeklarasikan berdirinya Partai Islam Indonesia Masjoemi, 7 November 1945. Disertai dengan pernyataan, 60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap *Berdjihad Fi Sabilillah* melawan setiap penjajahan. Perang Di djalan Allah oentoek menentang tiap-tiap pendjadjahan. Disertai pula keputusan pembentukan *Barisan Sabilillah* dan *Hizboellah,* dinyatakan sebagai Barisan Istimewa Tentara Keamanan Rakjat - TKR.

Loyalitas Ulama dengan partai dan lasjkarnya terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, bertentangan dengan kelompok Sosialis dan Komunis yang pernah kerja sama dengan Sekoetoe pada masa pendudukan Balatentara Djepang, dengan Lasjkar Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo, mereka berupaya melancarkan kudeta, mematahkan peran Ulama dalam pemerintahan dan militer.

Pertama, dilakukan oleh kelompok Sosialis Soetan Sjahrir yang melakukan Kudeta Tak Berdarah, 16 Oktober 1945. Membatalkan seluruh keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat - KNIP, 22 Agustus 1945. Menggeser dan menggantikan pimpinan nasional yang pernah kerja sama dengan pemerintah Balatentara Djepang. Kecuali Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua, PKI di bawah Mohammad Joesoep dengan menggunakan Lasjkar Pesindo melancarkan Kudeta di Cirebon, 12 Februari 1946 dengan pertimbangan Rusia di bawah Stalin sebagai kelompok Sekoetoe dalam Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II berakhir, Belanda merasa berhak menerima kembali daerah jajahannya. PKI sebagai anggota Komintern berpihak kepada Sekoetoe, bersikap tidak membenarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka tanpa Belanda.

Ketiga, Kelompok Komunis Nasional di bawah pimpinan Datuk Tan Malaka, melancarkan kudeta terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Soetan Sjahrir, 3 Juli 1946. Menuntut testamen politik bahwa Presiden dan Wakil Presiden pernah berjanji akan menyerahkan kepemimpinan nasional kepada Tan Malaka.

MIRA SAFIRA

Presiden Direktur PT. Salamadani Pustaka Semesta

Penerbit yang menaruh perhatian besar mensosialisasikan hasil penelitian dan penulisan sejarah. Tanpa keberanian dan jiwa juang penerbit, hasil karya sejarawan akan tetap terbenam membisu tanpa pembaca.

Sumber: *Doc. Pribadi*

NIA KURNIAWATI

Pustakawan dari Pusat Data Redaksi Harian Umum Pikiran Rakyat.

Perpustakaan sebagai simbol kemartabatan suatubangsa. Sejumlah buku dan materi tulisan, dan penulis serta penerbit sebagai tolok ukur intelektualitas suatu bangsa. Perpustakaan sebagai sumber informasi data dan fakta dalam bentuk cetak atau elektronik yang telah dan sedang menyejarah di Indonesia masih belum menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Sumber: *Doc. Pribadi*

Keempat, PKI di bawah pimpinan Amir Sjarifoeddin dan Moeso, didukung oleh Pesindo dan Front Demokrasi Rakjat - FDR, melancarkan Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948 berupaya menumbangkan Kabinet Hatta. Dengan adanya Kudeta PKI di Madiun, Presiden Soekarno menyatakan PKI sebagai teroris.

Sebaliknya, segenap Soeltan dari sekitar 40 Kesoeltanan seluruh Indonesia, menyerahkan kedaulatannya kepada pimpinan nasional, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, 1 September 1946. Dalam masa Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M, para Ulama selalu mendukung perjuangan melalui diplomasi: Linggajati, Renville, KMB dan perjuangan gerilya yang dipimpin oleh Panglima Besar Soedirman. Tidak pernah terlintas berupaya menggunakan kekuatan militer dan lasjkar serta massa parpolnya untuk melakukan kudeta.

Setelah Perang Kemerdekaan 1945-1950 M selesai, loyalitas Ulama dan parpol Masjumi terhadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, ditampilkan oleh Mohammad Natsir dengan gagasan Mosi Integral, mengakhiri masa Republik Indonesia Serikat - RIS, dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI pada 1 Agustus 1950. Mohammad Natsir berasal dari Persatoean Islam - Persis, Jong Islamieten Bond - JIB, Partai Islam Indonesia - PII, dan Masjumi, meletakkan dasar pemikiran kesatuan bangsa dan negara.

Suatu prestasi pemikiran politik yang cemerlang di tengah terpecah belahnya negara dalam beberapa negara bagian yang berasal dari negara boneka penjajah Belanda. Bahkan, negara Republik Indonesia berada di bawah Republik Indonesia Serikat - RIS. Kemudian, Mohammad Natsir mengajak para pemberontak bersenjata yang bertujuan kudeta, seperti APRA, KNIL Andi Azis, RMS, serta NII untuk sama-sama membubarkan diri, dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI dengan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Berkat konsep pemikiran cemerlang ini dan disambut baik oleh segenap negara bagian dan Republik Indonesia, menjadikan Mohammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri.

Setelah Perang Dunia II berakhir dan melahirkan Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur atau Blok Demokrasi dan Komunis. Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1950 M, melahirkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan Konfrontasi Indonesia - Malaysia. Kelanjutan dari konsep Demokrasi Terpimpin, menjadikan PKI yang pada awalnya dicap sebagai *teroris* oleh Presiden Soekarno pada saat terjadinya Kudeta PKI di Madiun, mendapat kesempatan menduduki Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Front Nasional yang pernah didirikan pada masa Kudeta PKI di Madiun.

Dalam kondisi ini, PKI melancarkan Kudeta G 30 S, 30 September 1965 di

Jakarta. Dampaknya, partai politik dinilai tidak mampu menciptakan kesatuan bangsa. Di bawah Orde Baru, 1965-1997 M, Presiden Soeharto mengerdilkan partai politik menjadi dua: Partai Persatuan Pembangunan - PPP dan Partai Demokrasi Indonesia - PDI. Sebelum adanya kebijakan parpol itu, didahului dengan adanya demonstrasi KAMI dan KAPPI yang mayoritas aktivisnya berasal dari HMI, PMII, IMM, SEMMI, dan PII, IPM, Al-Wasliyah, IPNU, yang berdampak berakhirnya masa Orde Lama, dan Demokrasi Terpimpin, 1959-1965 M. Semua organisasi mahasiswa dan pelajar ini merupakan keorganisasian Santri di universitas, institut, dan sekolah.

Orde Baru yang memberikan kesempatan bagi kalangan militer memimpin negara, kembali ke UUD 1945 dan Pancasila, tidak dapat berlanjut lebih lama lagi. Pangkopkamtip dan Laksus membuat kebijakan yang menjauhi Ulama dan umat Islam. Terjadilah banyak pelanggaran kemudian dikoreksi kelompok Petisi 50 yang dipimin oleh Ali Sadikin dan Mohammad Natsir. Namun, masih mampu bertahan lama. Baru setelah Rusia terjadi gerakan Pembaharuan atau Perestroika dan demokratisasi atau Glasnost yang dipelopori oleh Gorbachev, 1987 M, menular ke Indonesia, 1997 M, pemerintahan Orde Baru dapat dilengserkan. Amien Rais, Ketua Pusat Muhammadiyah menjadi tokoh penggerak utama gerakan pembaharuan dan menghidupkan kembali Demokrasi serta Partai Politik. Kalangan Perwira Tinggi TNI dalam menjawab gerakan Reformasi ikut serta membangun partai politik. Dampak dari Orde Reformasi, muncul partai politik seperti jamur tersiram hujan. Ulama, Santri dan umat Islam dihadapkan pilihan pimpinan partai politik yang tidak satu lagi. Baik dari pimpinan sipil dan militer yang berlatar belakang dari keluarga Muslim. Demikian pula, lahirnya kelompok tengah, independen. Rakyat dan umat Islam mulai melihat banyak "pemimpin baliho" yang menampangkan wajahnya di pinggir jalan.

Semoga Allah Yang Mahakuasa mencurahkan kembali rahmat-Nya untuk bangsa dan negara Indonesia, seperti ketika para Ulama dan Santri serta bangsa Indonesia saat menghadapi situasi sulit pada masa pra dan pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364.

Bandung, 19 Jumadil Akhir 1437 H
28 Maret 2016

Ahmad Mansur Suryanegara
Penulis

DAFTAR ISI

GERBANG KELIMA

PERAN ULAMA DALAM PEMBANGUNAN ORGANISASI MILITER MODERN

Ulama di tengah Perang Antar Kerajaan imperialis

ULAMA dan **Santri indonesia** dihadapkan perubahan perebutan wilayah jajahan antarnegara imperialis Barat dan imperialis Timur yang berdampak melahirkan Perang Dunia II, 1939-1945 M, dan Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik yang melanda Indonesia mulai 1942 hingga 1945 M. Suatu peperangan tidak hanya mengandalkan perubahan sistem pengorganisasian kemiliteran dan pembinaan teritorial. Melainkan juga menuntut keberanian penggunaan senjata pemusnah, baik dilakukan oleh negara Pakta Pertahanan Poros - Axis Pact dalam memusnahkan orang Yahudi di Jerman maupun oleh negara pembela demokrasi Pakta Pertahanan Sekoetoe - Allied Pact,[1] dengan bom atom Amerika Serikat.

Bom Atom karya Einstein keturunan Yahudi, yang digunakan untuk merontokkan bangsa Jepang dengan segenap ekosistem di Hirosima, 6 Agustus 1945, dan Nagasaki, 8 Agustus 1945. Perang Dunia II yang demikian besar memakan korban jiwa, tidak mungkin terjadi, jika tanpa dukungan dari bankir Yahudi.

1 Pact, Pacto. Pakta artinya damai. Slogan Barat dikenal dengan *Sivis Pacem Para Bellum*. Dimaknai siapkan perang untuk membangun perdamaian. Oleh karena itu, kedua kelompok pelaku perang menggunakan nama Pakta. Bagi negara-negara Jerman, Italia dan Jepang disebut sebagai Pakta Pertahanan Poros – *Axist Pact*. Dan bagi kelompok negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina, Belanda, Turki, sebagai Pakta Pertahanan Sekutu – *Allied Forces*. Sesudah Perang Dunia II (1939-1945 M) dalam era Perang Dingin - *Cold War* muncullah dari pihak Barat a.l.: *North Atlatic Treaty Organization - NATO, South East Treaty Organization - SEATO, Australia, New Zealand, United States - ANZUS.*

Dampak adanya dukungan bankir Yahudi dan pakar atom Yahudi, Amerika Serikat lebih berani daripada Jerman dalam penggunaan senjata pemusnah. Nazi Jerman hanya membinasakan orang-orang Yahudinya. Tidak dimusnahkan fauna dan flora atau lingkungan hidupnya karena orang Yahudi tinggal di Jerman. Amerika Serikat menampakkan pada bangsa-bangsa di dunia, prestasinya meremukkan wajah fisik kota dan memusnahkan penghuni kota secara massal dicapai dalam waktu relatif singkat. Sampai hari ini, tidak ada satu bangsa pun yang sanggup menandingi prestasi dan keberanian Amerika Serikat menghancurkan bangsa lain baik terhadap bangsa Indian ataupun Jepang. Bagi Amerika Serikat sebagai pemenang perang, tidak pernah dituntut tindak pemusnahan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

> Tidak hanya penghuni kota yang sehat, yang sakit, yang tua renta, bayi yang masih dalam kandungan pun musnah bersama ibunya. Segenap penduduk sipil dan militer, dokter, juru rawat, pasien, dan karyawan, sekolahan bersama anak sekolahnya, musnah. Rumah sakit tinggal tembok reruntuhannya, dijadikan *Monumen Pemusnahan Manusia* oleh Amerika Serikat.

Apabila bangsa Jepang tidak mau menyerah dapat dipastikan seluruh bangsa Jepang akan mengalami nasib sama dengan bangsa Indian, lumpuh tiada daya. Andaikata negara Jepang tidak menyerah akan dilumpuhkan dan dijadikan negara bagian dari negara demokrasi Amerika Serikat.

Sebenarnya bangsa Jepang masih dapat terselamatkan dari ancaman bom atom, kalau tergolong sebagai bangsa Kulit Putih. Terselamatkan seperti bangsa Jerman dan Italia, keduanya sebagai bangsa Kulit Putih. Yang membuat Hirosima dan Nagasaki tidak terselamatkan dari upaya pemusnahan karena letak geografis Jepang berada jauh dari benua Eropa ataupun Amerika Serikat. Debu radio aktif dari bom atom tidak mungkin sampai pada dua benua Kulit Putih tersebut.

Sebaliknya kalau dijatuhkan di Berlin, tidak mungkin karena sebagian Berlin Barat dan Timur telah diduduki Tentara Sekoetoe. Demikian pula letak geografis Italia dengan Roma dekat dengan Eropa yang termasuk wilayah bangsa Kulit Putih. Karena itu, terhindarlah dari upaya pemusnahan. Selain itu, disebabkan juga Jerman dan Italia telah menyerah lebih dahulu.

Ternyata perang melahirkan perubahan sejarah yang aneh dan di luar perhitungan para pelaku perang. Perang Dunia II menjadikan Rusia Komunis di bawah Diktator Proletar Stalin menjadi kuat karena mendapat pinjaman senjata dari Amerika Serikat untuk mematahkan Jerman dan Jepang. Demikian pula Mao Ze Dong Komunis menjadi kuat dengan senjata dari Amerika Serikat semula untuk melawan Jepang.

Namun, dikembangkan untuk menumbangkan Nasionalis Chiang Kai Shek dan mengusirnya dari daratan Cina lari ke Taiwan. Kemudian Ho Chi Minh Komunis di Vietnam Utara dan Kim Il Sung Komunis dari Korea Utara menjadi kuat karena dipersenjatai Sekoetoe untuk mengusir Fasisme Jepang.

Bagi Amerika Serikat dan Inggris, negara-negara komunis tersebut dalam Perang Dunia II dinilai sebagai the second front – fron kedua. Perang Dingin – Cold War muncul sebagai kelanjutan dari Perang Dunia II, 1939-1945 M, dan Perang Asia Timur Raya, 1941-1945 M setelah usai. Perang Dingin menguntungkan Jepang, dijadikan basis pertahanan Amerika Serikat dan diselamatkan pula keruntuhan ekonominya dalam membendung arus komunis dari Cina, Korea, Vietnam, dan Rusia.

Di bawah kondisi perang yang berkesinambungan tersebut, para Ulama dan Santri memilih jawaban yang tetap terhadap tantangan zamannya.

> Pertama, selalu waspada terhadap tantangan pemerintah kolonial Belanda dengan Politik Kristenisasinya, walaupun di tengah situasi Perang Dunia I, 1914-1919 M.
>
> Kedua, meniadakan internal conflik yang ditimbulkan oleh Sneevliet dengan ideologi komunisnya yang melahirkan PKI, 1920 M.
>
> Ketiga, tantangan Perang Dunia II, 1939-1945 M, serta Perang Asia Timur Raya, 1941-1945 M, dengan Pendudukan Balatentara Djepang di Indonesia, 1942-1945 M, yang menuntut pembentukan TentaraPembela Tanah Air- Peta, 1943 M. Di balik itu, pimpinan PKI yang dibuang ke Boven Digul Papua, dipindahkan ke Australia bekerjasama dengan Keradjaan Protestan Belanda menolak Proklamasi 17 Agustus 1945.
>
> Keempat, kelompok sekuler koperatif lainnya yang melancarkan perlawanan kelanjutan terhadap Ulama dan umat Islam, sesudah Perang Dunia II.
>
> Kelima, tantangan Keradjaan Protestan Belanda yang mencoba kembali menjajah Indonesia, Ulama menjawab dengan membangun Barisan Sabililah dan Tentara Allah atau Hizboellah dan sebagai Barisan Istimewa dari Tentara Nasional Indonesia.

Di bawah ini perlu penulis komparasikan kembali pilihan jawaban Ulama. Terutama sekali di bawah kondisi perang yang mendesak. Ulama memilih jawaban dengan mencoba membangkitkan kembali semangat juang keprajuritan generasi muda Indonesia melalui organisasi kesenjataan modern.

Perang Dampak Politik Jalan Buntu

Pada Perang Dunia I, 1914-1919 M, Keradjaan Protestan Belanda netral tidak berpihak pada kedua blok yang sedang berperang. Di satu pihak disebut sebagai Blok Sekutu terdiri dari negara Perancis, Inggris, Rusia, Amerika Serikat, Belgia, Italia, dan Jepang. Di pihak lain, disebut Blok Sentral terdiri dari negara Jerman, Austria, Kesultanan Turki, dan Bulgaria. Mengapa terjadi pecah perang antarnegara imperialis Barat?

Perang dapat terjadi kalau politik menemui jalan buntu. Selanjutnya, Carl von Clausewitz dalam *On War* menyatakan *war is a clash between major interest* - perang terjadi benturan antar kepentingan utama dan politik merupakan rahim. Sebenarnya perang terjadi jauh sebelumnya merupakan embrio yang sangat kecil, tersembunyi dalam rahim, tumbuh berkembang secara terus menerus, lahirlah sebagai bayi yang besar. Pecahlah perang dengan terang-terangan.

Selain itu, Carl von Clausewitz juga menjelaskan bahwa *war as an instrument of politics* - perang sebagai instrumen politik. Lalu, apa yang dimaksud dengan politik. Carl von Clausewitz menambahkan *politics as an objective interests of the government and of the citizens as modified by ambitions, personal interests, and vanities* – politik sebagai tujuan dari interes pemerintah dan warga negara yang diubah oleh ambisi-ambisi, kepentingan pribadi, dan opini pribadi yang berlebihan.

Setiap negara yang terlibat dalam perang, dapat dipastikan secara politik mempunyai kepentingan tertentu. Adapun terbentuknya kedua blok tersebut diikat dengan kesamaan atau perbedaan kepentingan sehingga kepentingan tersebut menentukan statusnya sebagai lawan atau kawan. Dalam politik berlaku adagium, *there is no permanent friend and enemy. But there is permanent interest.*

Dapat dilihat Jepang, dalam upayanya memperoleh tanah jajahan Jerman di Samudra Pasifik, dalam Perang Dunia I, berpihak pada Blok Sekoetoe. Sebaliknya pada Perang Dunia II, Jepang berpihak pada *Axis Pact* - Jerman melawan *Allied Forces* - Sekoetoe. Demikian pula Kesultanan Turki pada Perang Dunia I berpihak pada Kekaisaran Jerman. Kemudian pada Perang Dunia II menjadikan Republik Sekuler Turki berpihak pada Sekoetoe dan Austria dalam Perang Dunia I berpihak pada Jerman. Akan tetapi, pada Perang Dunia II tidak berpihak pada Jerman karena Jerman mencaplok Austria.

Efek Peringatan 100 Tahun Kemerdekaan

Di bawah kondisi Eropa yang sedang terlibat dalam perang antarnegara imperialis, para Ulama dan pimpinan Centraal Sjarikat Islam mencoba memanfaatkannya,

sekaligus memanfaatkan kesadaran Keradjaan Protestan Belanda yang baru merayakan seratus tahun Keradjaan Protestan Belanda pada 1813-1913 M dari penjajahan Kekaisaran Perancis. Perayaan tersebut juga dirayakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia dengan biaya bangsa Indonesia yang sedang dijajahnya. Ketika Kerajaan Protestan Belanda merayakan makna kemerdekaan dan anti penjajahan, para Ulama memanfaatkannya untuk menuntut kemerdekaan Indonesia.

> Pertama, Ulama dan pimpinan organisasi politik Islam memelopori menuntut Pemerintah Sendiri, Zelfbestuur, Self Government, dan Indonesia Berparlemen sebagai keputusan National Congres Centraal Sjarikat Islam di Bandung, 17-24 Juni 1916. Bertujuan memperjuangkan Indonesia Merdeka dan tegaknya pemerintahan yang demokratis dengan adanya Parlemen.
>
> Kedua, mencoba membangun organisasi kesenjataan modern melalui Indie Weerbaar Actie. Bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat juang keprajuritan pemuda.

Tuntutan Indie Weerbaar itu dapat dipahami kalau ditolak karena Kerajaan Protestan Belanda tidak terlibat dalam Perang Dunia I. Penolakannya berlanjut terhadap usul kesediaan umat Islam dalam milisi dienstplicht untuk menghadapi Perang Dunia II. Keradjaan Protestan Belanda terlibat dalam Perang Dunia II pada 1939-1945 M. dan telah diduduki Jerman pada 10 Mei 1940. Pemerintah kolonial Belanda menghadapi Perang Asia Timur Raya pada 1941-1945 M. Namun karena takut akan digunakan menumbangkan pemerintah kolonial Belanda maka upaya umat Islam untuk berpartisipasi dalam pembentukan organisasi kemiliteran modern tetap ditolak.

Sikap pemerintah kolonial Belanda yang demikian ini terjadi karena pimpinan partai-partai non religius dan sekuler, seperti Partai Indonesia Raja - Parindra, Gerakan Rakjat Indonesia - Gerindo, Partai Persatoean Indonesia - Parpindo, serta partai non-Islam, yaitu Partai Kristen dan Partai Katolik dengan politik asosiasinya berpihak dan memertahankan penjajahan pemerintah kolonial Belanda dan Keradjaan Protestan Belanda.

Sikap Partai Kristen dan Katolik

Sikap Partai Kristen atau Katolik yang demikian, menurut Mr. A. K. Pringgodigdo, sebagai akibat kedua partai tersebut dipimpin oleh orang Belanda. Tidak mungkin berpihak pada gerakan kebangkitan kesadaran nasional yang sikapnya anti

imperialis Belanda. Dijelaskan bahwa *Christelijke Ethische Partaij* - C.E.P pada akhir 1930 berganti nama menjadi *Christelijk Staatkundige Partij* -C.S.P yang dipimpin oleh C.C. van Helsdingen. Sedangkan *Indische Katholieke Partij* - I.K.P didirikan November 1918 dipimpin oleh P. Kerstens.

> Ditambahkan selanjutnya, terdapat juga organisasi yang dipimpin orang Belanda, *Politik Economische Bond* - P.E.B didirikan pada 1919. Pimpinannya yang terkenal adalah E.A.J.N. Engelenberg. P.E.B. ini merasa kuat karena didukung golongan *ambtenar* yang ingin naik pangkat menjadi Boepati.

Ketiga organisasi, C.S.P, I.K.P, dan P.E.B dipimpin orang-orang Belanda, tidak sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang ingin menegakkan kembali kedaulatan bangsa dan negara Indonesia,[2] bebas dari penjajahan Belanda. Oleh karena itu, ketiga organisasi tersebut hanya mendapat dukungan dari ketiga organisasi Parindra, Gerindo, dan Parpindo yang memiliki strategi dan sikap yang sama. Ketiga organisasi itu juga dipimpin para prijaji dan intelektual yang berpendidikan Barat tanpa mengalami pendidikan pesantren.

Menghadapi politik pecah belah pemerintah kolonial Belanda, umat Islam Indonesia dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya, 1941-1945 M, menjadi terselamatkan karena para Ulama dan pimpinan partai politik Islam berhasil menyatukan wawasan gerak juangnya dalam wadah Madjlis Islam A'la Indonesia sejak 15 Rajab 1356, Selasa Wage, 21 September 1937.

> Suatu prestasi kejuangan dari umat Islam yang luar biasa. Berhasil menyatukan gerak juang Oelama Ahli Soennah Wal Djamaah dengan Oelama Wahabi. Bersama pimpinan partai politik Islam: Partai Sjarikat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia dalam satu wadah Madjlis Islam A'la Indonesia. Suatu majelis yang dinilai sebagai organisasi Islam tertinggi daripada organisasi anggotanya.

Dapat dibayangkan betapa kerasnya suasana debat *furu'* dan *khilafiah* antara Oelama Wahabi dengan Oelama Ahli Soennah Wal Djamaah. Hampir terlupakan kerusakan keimanan dan ketauhidan di kalangan rakyat, sebenarnya sebagai dampak dari penindasan pemerintah kolonial Belanda dengan para pembantu setianya dari kalangan Prijaji, dan Boepati melalui sistem Tanam Paksa, 1830-1919 M. Juga terlupakan bahwa proses perpecahan antarUlama dan pimpinan partai politik Islam,

2 Mr. A.K. Pringgodigdo, 1960. *Op.Cit.*, hlm.29-30.

untuk Naik Haji dan larangan bagi Soeltan dan Boepati yang akan Naik Haji[4] karena jika terjadi kontak Islam Indonesia dengan Islam Timur Tengah akan memperkuat gerakan kebangkitan kesadaran politik Islam yang dipelopori oleh Ulama.

Siapa sebenarnya *Homo Soem* penulis artikel tersebut? Dapat dibaca dari dialog antara Dr.Soetomo dengan K.H.Mas Mansoer yang dimuat dalam *Madjalah Pengandjoer* No 6 Tahun II, Djuli 1938. *Homo Some* sebenarnya adalah Dr. Soetomo, pendiri Boedi Oetomo, 20 Mei 1908.

Ketiga, penghinaan terhadap Rasulullah saw dilakukan oleh *Harian Hoa Kiao* yang mengangkat artikel Oei Boe Thai dan J.J. Ten Berge pada 25 April 1931. Semula artikel ini tidak mendapat tanggapan dari umat Islam karena bertuliskan huruf Cina dan Bahasa Mandarin. Namun, setelah majalah *Pembela Islam* dari *Persatoean Islam* menjelaskan isinya terjadi protes keras umat Islam.

Keempat, Parindra yang dipimpin oleh Dr. Soetomo dengan medianya *Madjalah Bangoen*, 15 Oktober 1937, mengangkat dan mendukung artikel Siti Soemandari yang melancarkan penghinaan kepada Rasulullah saw. Tulisan ini mendukung Ordonansi Perkawinan, 1937 M, yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang bertentangan dengan Sjariah Islam. Penghinaan terhadap Rasulullah saw dalam *Majalah Bangoen*, 15 Oktober 1937 tersebut juga sebagai reaksi Parindra, sebulan setelah berdirinya Madjlis Islam A'la Indonesia, 15 Rajab 1356, Selasa Wage, 21 September 1937.

Perlu dicacat mengapa Dr. Soetomo berani melakukan penghinaan terhadap Rasulullah saw secara berulang kali. Menurut pengakuan Dr. Soetomo kepada K.H. Mas Mansoer bahwa segenap benda di alam raya merupakan penjelmaan Tuhan dan manusia sebagai penjelmaan Tuhan yang paling akhir.

Secara hakikat, menurut Dr. Soetomo tidak membenarkan terhadap keyakinan adanya pemisahan antara Kholik dengan makhluk. Oleh karena itu, manusia sebagai penjelmaan Tuhan, tidak perlu melakukan shalat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Adapun yang diutamakan adalah bertingkah laku *rahman rahim sesama manusia*. Akan tetapi, bagaimana sikapnya terhadap Rasulullah saw?

Walaupun Rasulullah saw juga manusia, bertolak dari pandangan *Djawanisme* atau *Kedjawen*, menjadikan Boedi Oetomo dan Parindra melalui medianya: *Djawa Hisworo, Swara Oemoem, Bangoen*, berani melancarkan penghinaan terhadap Rasulullah saw.

4 H. Aqib Suminto, 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES. Jakarta, hlm. 204-205, bahwa jumlah peserta Naik Haji meningkat terus. Sampai dengan 1928 mencapai jumlah 43.028 orang. Jumlah ini merupakan nomor dua terbanyak selama masa kolonial Belanda.

Semestinya kalau Dr.Soetomo konsekuen dengan keyakinannya bahwa manusia diyakini sebagai penjelmaan Tuhan maka harus disayangi. Kalau demikian keyakinan Dr. Soetomo, apakah mungkin buletin dan majalahnya berani melancarkan penghinaan terhadap Rasulullah saw?

Sepuluh Sistem Penindasan

Selain adanya tantangan seperti tadi, Ulama dihadapkan pula dengan tantangan dari masa VOC hingga pemerintah kolonial Belanda, berupa:

(1) Korte Verklaring, menghapuskan kekuasaan politik Islam;
(2) Monopoli, menghapuskan hak pemasaran bagi umat Islam;
(3) Kewajiban kerja rodi dan pembayaran berbagai macam pajak;
(4) Regeringsreglement, penghalang hak berkumpul dan berorganisasi umat Islam. Bagi umat Islam, kalau mendirikan organisasi diwajibkan mendapatkan Badan Hukum dengan batasan waktu 29 tahun;
(5) Ordonansi Agama, melarang aktivitas agama non-Protestan;
(6) Ordonansi Guru, penghambat kebebasan pengajaran;
(7) Ordonansi Sekolah Liar, penghambat aktivitas sekolah swasta;
(8) Ordonansi Haji melarang Pangreh Pradja, Soeltan, Ambtenar, melaksanakan Haji dan mempersulit umat Islam dalam pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Haji;
(9) Ordonansi Perkawinan, sistem pencatatan pernikahan yang bertentangan dengan sistem perkawinan berdasarkan syariah Islam;
(10) Menghapuskan segenap hak usaha umat Islam di bidang niaga, transportasi darat, laut, dan udara.

Tantangan ini menumbuhkan kesadaran kesamaan sejarah pada kalangan umat Islam, terutama Ulama di seluruh Nusantara Indonesia. Tumbuhnya kesadaran kesamaan lawan - common enemy, yakni penjajah Belanda dengan pembantu-pembantu setianya. Menurut istilah Harry J. Benda menjadikan umat Islam sangat sadar terhadap penindasan pemerintah Kristen dengan politik Kristenisasinya.

Di bawah tumbuhnya kesadaran ini, debat furu' dan khilafiah antarUlama menjadi berkurang. Para Ulama dan pimpinan partai politik Islam menjelang Perang Dunia II, 1939-1945 M, dapat duduk bersama dalam satu majelis: Madjlis Islam A'la Indonesia, 15 Rajab 1356 H, Selasa Wage, 21 September 1937 M. Menjadikan Ulama bersikap konsisten dalam perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajahan Kristen: Keradjaan Protestan Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda.

Sampai dengan pecahnya Perang Asia Timur Raya, 1941-1945, Ulama tidak tergoyahkan terbawa hanyut oleh sikap politik kelompok Pribumi nonreligius dan sekuler anti Islam: Parindra, Gerindo, Parpindo. Apalagi dengan Partai Kristen serta Partai Katolik yang dipimpin oleh orang-orang Belanda yang berpihak kepada penjajah Belanda. Para Ulama dan pimpinan partai politik Islam dalam Madjlis Islam A'la Indonesia - M.I.A.I dapat menentukan kesatuan sikap politiknya, mandiri, tidak lagi bergantung kepada Saudi Arabia, Mesir, dan Turki sekuler yang berpihak kepada Sekoetoe.

Pembatasan Persenjataan

Bagi Kekaisaran Shinto Djepang sebagai negara *super power* - Adikuasa Asia tidak hanya ingin menandingi pemerintah kolonial Belanda. Namun juga, Keradjaan Protestan Anglikan Inggris dan Amerika Serikat. Keduanya menawarkan pembatasan persenjataannya dengan rumusan 5:5:3. Artinya, Amerika Serikat dan Keradjaan Protestan Anglikan Inggris dibenarkan memiliki armada tempurnya dengan kekuatan 525.000 ton. Sebaliknya, Kekaisaran Shinto Djepang diizinkan memiliki armada tempurnya berkekuatan 315.000 ton.

Tentu, Kekaisaran Shinto Djepang menolak rumusan tersebut. Kemudian disusul dengan Konferensi Laut di London, 1936 M, dengan rumusan semakin besar 10:10:7. Pertemuan politik ini pun menemui jalan buntu[5] karena Kekaisaran Shinto Djepang tetap menolak rumusan tersebut. Apabila politik menemui jalan buntu maka Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik tidak dapat dihindari lagi.

Jawaban Ulama terhadap Propaganda Jepang

Perang Asia Timur Raya diawali dengan penyerbuan Pearl Harbour, 7 Desember 1941, yang berada di Lautan Pasifik. Namun, sasaran perang Keradjaan Shinto Djepang tidak terbaca secara jelas, berlanjut menyerang ke arah Amerika Serikat. Melainkan lebih difokuskan untuk menguasai Asia Pasifik sebagai sasaran utamanya yang akan dijadikan *Lebensraum- Living Space* - Lahan Kehidupannya.

Untuk memenuhi tujuan itu, Keradjaan Shinto Djepang harus berhadapan dengan Amerika Serikat penjajah Filipina, Perancis penjajah Indo Cina, Inggris penjajah India, Pakistan, Birma-Myanmar, dan Sri Langka, dan Belanda penjajah Indonesia, serta Cina yang ingin dikuasainya.

5 A. Mansur Suryanegara. *Politik Seberang Lautannya Amerika Serikat*. Surat Kabar *Merdeka*. Jumat, 21 Oktober 1983. Periksa pula, *Batas Pertahanan Amerika Serikat Di Timur Tengah*. Majalah *Panji Masyarakat*. 11 Rabi'ul Awwal 1411, 30 September 1990.

Perang Asia Timur Raya, 1941-1945 M, menjadikan Jepang berhadapan dengan ABCD Front atau dengan America, British, Cina, Dutch - Amerika, Inggris, Cina, Belanda dan Australia. Akibat Perancis telah diduduki oleh Jerman, dan dibentuklah pemerintahan Vichy, September 1940, yang berpihak kepada Hitler. Perubahan pemerintahan ini, menjadikan Perancis mengizinkan Jepang membangun pangkalan militernya di Indo Cina serta menjadikan Perancis tidak berpihak kepada ABCD Front.

Setelah Jepang membangun pangkalan militernya di Indo Cina maka Jepang juga menuntut agar pemerintah kolonial Belanda mengizinkan Jepang untuk membangun pangkalan militernya di Indonesia, Juni 1941. Tentu, tuntutan Jepang itu, tidak mungkin diizinkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena merasa kuat, mendapat dukungan dari Gerindo, Parindra, Parpindo, Partai Keristen dan Partai Katolik. Diikuti tindakan pembekuan aktiva Jepang di Indonesia serta penghentian ekspor dari Indonesia ke Jepang. Apakah benar pemerintah kolonial Belanda, dapat memertahankan eksistensinya dari serangan kilat Balatentara Dai Nippon?

Sebenarnya tidak seorang pun jenderal ataupun politisi yang dapat memastikan kapan perang dimulai dan berakhir. Seperti yang dinyatakan oleh Carl von Clausewitz, perang seperti embrio yang sangat kecil dalam rahim. Kemudian berkembang dan pecahlah menjadi besar. Oleh karena itu, sebelum perang pecah membesar, disiapkan dan diawali terlebih dahulu dengan propaganda. Apa sebenarnya propaganda? [6]

> Adolf Hitler dalam Mein Kampf[7], menjelaskan tentang apa dan bagaimana nilai propaganda. Fungsi propaganda bukanlah sebagai sesuatu kebohongan dalam latihan keilmiahan individual. Melainkan sebagai suatu upaya untuk memanggil atensi massa terhadap fakta, proses, kepentingan, dan yang lainnya. Melalui propaganda digunakan untuk membangkitkan dan mendorong semangat yang mengendor.
>
> Dalam hal ini, yang paling signifikan, propaganda bekerja untuk membentuk visi obyeknya. Seninya untuk menjadikan setiap individu yakin yang dipropagandakan adalah fakta yang benar. Propaganda bukan hanya untuk membangkitkan rasa ketertarikan massa melalui pendidikan. Bukan pula hanya dengan pendidikan.

6 Pihak *Axis Fact* – Pakta Poros, Jerman, Italia dan Jepang menggunakan istilah *leadership and propaganda*. Pihak *Allied Forces* - Sekoetoe, Amerika Serikat, Inggris, Perancis menggunakan istilah *managerial and promotion*. Perang tidak hanya saling berlomba menciptakan senjata baru. Namun, perang juga melahirkan istilah yang tidak mau menggunakan istilah yang dipakai oleh lawannya dan disebutnya sebagai *language war* – perang bahasa.

7 Adolf Hitler, 1996. *Mein Kampf.* Diterjemahkan oleh Ralph Manheim. Pimlico. London, hlm.161.

Melainkan menjadikan pendidikan dan ilmu yang membangkitkan jiwa juang. Oleh karena itu, sasaran utama selain inteleknya, secara psikologis yang utama adalah *the heart of the broad masses* - memengaruhi kalbu massa yang luas. Untuk tujuan itu, perlu disimplikasikan dan terus direpitisasikan atau diulang-ulang karena massa lebih sering lupa.

Strategi propaganda Jerman, untuk bangsanya sendiri, menanamkan kesadaran ras Jerman sebagai ras Aria yang mulia. Dikembangkan semboyan, *Deutschland uber alles* - bangsa Jerman di atas segalanya, sekaligus membangkitkan kesadaran wilayah, dipropagandakan dengan menggunakan Peta Bumi. Dalam pandangan geopolitik[8] bahwa wilayah Jerman dengan batas sejarah tahun 800 M meliputi seluruh Eropa dan menolak keputusan Perjanjian Versailles, 1919 M yang mempersempit batas wilayah Jerman. Peta Dunia pun diubahnya menjadi wilayah *Lebensraum, Living Space*, Lahan Kehidupan yang direncanakan akan dikuasai oleh Jerman, Italia, dan Jepang.

Balatentara Djepang memahami bahwa obyeknya, Asia dan Pasifik, bangsanya memiliki kultur yang ragam. Untuk Indonesia, disiapkan propaganda yang diarahkan untuk mengubah opini Ulama dan umat Islam Indonesia agar menaruh simpati kepada Keradjaan Shinto Djepang.

Propaganda tersebut diawali sejak 1935 M, di Kobe didirikan masjid yang pertama di Jepang. Kemudian disusul dengan mendirikan masjid di *Tokio,*1938 M. Diikuti dengan mendirikan Perserikatan Islam Jepang – *Dai Nippon Kaikyo Kyokai,*1938 M. Di pimpin oleh Jenderal Senjuro Hayashi yang dikenal sebagai *Bapak Islam Jepang*. Demikian penjelasan Harry J. Benda, dalam *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit*. Untuk menarik perhatian pimpinan umat Islam Timur Tengah, pembukaan *Masjid Kobe* tersebut diundanglah, Pangeran Husein dari Yaman.

Di samping itu, menurut penjelasan Harry J. Benda, pada 5-29 November 1939, Jepang mengadakan *Pameran Islam* di Tokio. Pameran ini diadakan sebulan setelah penyerbuan Jerman ke Polandia, September 1939. Arah tujuan pameran ini adalah umat Islam Indonesia. Karena itu, diundanglah pimpinan Madjlis Islam A'la Indonesia. Seluruh biaya akomodasi dan transportasi di tanggung oleh panitia pameran.

Dalam upayanya menanggapi undangan di atas, Madjlis Islam A'la Indonesia menentukan utusannya terdiri dari: Abdoel Kahar Moezakkir, Mr Kasmat, Faried Ma'roef, Machfoed Siddiq, dan Abdoellah Al Moedi. Undangan pameran ini merupakan peristiwa pertama pemindahan pandangan umat Islam Indonesia.

8 Ahmad Mansur Suryanegara, *Geopolitik, I-III.* Harian ABADI, Senin - Rabu, 22-24 Februari 1970, 26-28 Dzulhijjah 1390.

Teralihkan dari Timur Tengah ke negeri matahari terbit.[9] Selama berada di Jepang, para Ulama dan pimpinan partai politik Islam diberlakukan terhormat. Sangat jauh dari perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang selalu bersikap menindas Ulama atau pimpinan partai Islam.

Harry J. Benda menambahkan meskipun dari segi agama, Jepang tidak mungkin berhasil menjadikan negaranya sebagai pusat dunia Islam. Namun, dalam propagandanya disebut adanya kesamaan antara ajaran Shinto dan Islam. Bahkan, dalam propagandanya sangat berani menyatakan bahwa Kaisar Hirohito akan beralih agama memeluk agama Islam. Strategi propaganda ini, sangat menyentuh perasaan umat Islam.

Kekaisaran Shinto Djepang mengikuti apa yang diputuskan oleh Kongres Al Islam Indonesia - KAII atau Kongres Moeslimin Indonesia dari Madjlis Islam A'la Indonesia. Antara lain, tentang Bendera Merah Putih. Oleh karena itu, Jepang mempropagandakan pula dukungannya terhadap pengibaran Bendera Merah Putih.

Pengaruhnya dapat dilihat pada perkembangan sikap para pimpinan partai politik Islam dan Ulama. Apalagi setelah Balatentara Djepang mampu membuktikan menaklukkan pemerintah kolonial Belanda dalam Kapitulasi Kalijati, 8 Maret 1942. Peristiwa runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda oleh Balatentara Djepang, menurut penuturan Harry J. Benda, rakyat merasa benar-benar terbebas dari penjajahan pemerintahan Kristen yang berabad-abad menindas umat Islam.[10]

Apalagi disertai dengan pembebasan Dr.Abdoel Karim Amroellah dari pembuangannya di Sukabumi. Diikuti pembebasan pimpinan nasional lainnya Ir. Soekarno dari Bengkulu, Mohammad Hatta, dan Soetan Sjahrir dari Banda, menjadikan hati rakyat terbuka terhadap kehadiran Balatentara Djepang.

Sebelumnya, Jepang telah melancarkan serangannya ke Cina. Diikuti ke Korea, Manchuria, dan Siberia, 1938 M. Dilanjutkan penyerangan ke Kanton, Hainan, Sinnan, Februari 1939 dan Spratley pada 10 Maret 1939.

---

9 Dengan adanya Kekasairan Shinto Jepang mengadakan pendekatan terhadap Ulama dan pimpinan partai Islam maka pimpinan Parindra yang ditugasi mengimbangi Islam, mengadakan pendekatan terhadap Jepang. Memprogramkan menyekolahkan generasi muda ke Jepang. Melalui tindakannya ini, Parindra bersikap ganda, di satu pihak menganjurkan rakyat agar tetap setia kepada pemerintah kolonial Belanda. Di lain pihak menampakkan pro Jepang dalam mengimbangi umat Islam yang sedang didekati oleh Jepang.

10 Harry J. Benda, 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae. Disunting oleh Alfian. Pustaka Jaya. Jakarta, hlm. 139.

Rakyat sangat terkejut, seminggu setelah pendudukan Jakarta, di Masjid Kwitang hadir tentara Jepang dengan seragam tentara ikut berjamaah shalat. Selanjutnya, diikuti hadirnya Kolonel Horie bersama tentara Jepang yang beragama Islam Muhammad Abdul Munaim Inada[11]yang memberikan pidatonya dalam bahasa Jepang. Walaupun sukar dipahami, tetapi kehadirannya di masjid menjadikan rakyat merasa dekat dengan Jepang.

Propaganda Balatentara Djepang jauh lebih terarah kepada Ulama. Terutama diarahkan kepada Ulama di desa-desa. Propaganda ini jauh lebih berhasil daripada propaganda Jerman atas Ulama di Timur Tengah. Walaupun berita pembinasaan Yahudi sangat dipahami oleh Ulama di Timur Tengah. Namun, Jerman gagal dalam pendekatan keagamaannya. Lebih menampilkan kekuatan militernya daripada dukungannya dan penghormatan terhadap Islam. Di rasakan oleh umat Islam pembinasaan Yahudi, bukan untuk membantu umat Islam dalam menghadapi lawan ajaran agamanya, melainkan hanya permasalahan rasial. Meniadakan bangsa Yahudi karena agamanya mengajarkan bahwa bangsa Yahudi sebagai bangsa yang terpilih. Keyakinan bangsa Yahudi ini sangat bertentangan dengan berupaya membangkitkan kesadaran bangsa Jerman dalam propagandanya *deutschland uber alles*.

Balatentara Djepang sangat takut, kegagalan Jerman juga teralami di Indonesia. Apalagi di Timur Tengah, Sekoetoe berhasil menjadikan umat Islam tidak berpihak pada Pakta Pertahanan Poros - *Axist Pact*. Oleh karena itu, strategi propaganda Balatentara Djepang diarahkan kepada Ulama di desa. Pilihan ini tentu bertolak dari kepentingan perangnya.

Pertama, perang sangat memerlukan dukungan logistik. Desa-desa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa sebagai penghasil pangan. Demikian pula perkebunan berada dalam wilayah desa. Banyak *desa perdikan* yang di pimpin oleh Ulama.

Kedua, Ulama desa umumnya tidak menjadi pimpinan partai politik Islam. Lebih terkonsentrasi pemikirannya dan aktivitasnya menangani masalah ritual Islam daripada pembicaraan masalah kekuasaan politik atau kedaulatan Islam.

Ketiga, kehidupan desa masih kuat rasa solidaritasnya. Tidak terpengaruh dengan kehidupan kebaratan seperti di kota besar. Kehidupan desa masih murni, bersikap gotong royong. Dalam masa perang sangat diperlukan sikap kerja sama.

11 Ibid., hlm. 142.

Keempat, gerakan perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat, dari kalangan penganut tasawuf, banyak terjadi di desa-desa. Terutama sekali di Jawa. Jiwa tempur terbentuk melalui ajaran Islam yang mudah dikembangkan kalau diarahkan lawannya adalah penjajah Kristen.

Kelima, dari sisi geopolitik dan teritorial, letak desa dan hutan lindung di sekitarnya berada jauh dari pantai. Merupakan basis suplai pertahanan yang sangat strategis, baik populasi ataupun kondisi lingkungan alamnya. Desa-desa di Jawa bercirikan dekat dengan gunung, hutan, sungai, ladang, dan sawah.

Politik pendekatan kepada Ulama di desa ini oleh Harry J. Benda disebut sebagai Nippon's Islamic Grass Roots Policy. Pendekatan ini hanya akan berhasil kalau pimpinan dan sistem kepartaian diubah. Walaupun dalam propagandanya tidak disebut-sebut tentang rencana pemerintah Balatentara Djepang yang akan membubarkan seluruh partai politik yang didirikan pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia.

Serangan Jepang terhadap ABDA

Perang kilat yang dilancarkan oleh Balatentara Djepang sejak pemboman atas Pearl Harbour Hawai, menumbangkan satu persatu pertahanan America, British, Cina, Dutch - ABCD Front. Baik darat ataupun di laut. Sedang di udara, Jepang menggunakan sistem kamikaze dengan jibakunya. Serangan Jepang benar-benar meruntuhkan moril tentara Amerika Serikat sekalipun. Filipina jajahan Amerika Serikat dapat dikuasai oleh Jepang.

Gerakan penyerangan Jepang dimulai seperti halnya penyerangan Jerman. Dengan motonya Berlin-Roma-Tokio bergerak dalam satu poros k arena pakta pertahanannya mereka namakan Axis Pact - Pakta Pertahanan Poros. Diawali dengan kerjasama Jerman - Jepang dalam gerakan Anti Commintern Pact – Pakta Anti Komunis Internasional, 1936 M. Andaikata Jerman hanya bermusuhan dengan Rusia dan tidak melancarkan serangan ke negara-negara Eropa, pakta ini sangat menguntungkan negara imperialis dan kapitalis Barat yang anti komunis.

Akan tetapi, setelah Jerman membalik mengadakan perjanjian Non Aggression Pact dengan Rusia, 21 Agustus 1940, setelah menduduki Keradjaan Protestan Belanda, 10 Mei 1940. Kemudian menyerang Perancis dan membentuk pemerintahan Vichy dan di Asia Tenggara berdampak Jepang diizinkan membangun pertahanan

militernya di Indo Cina wilayah jajahan Perancis menjadikan Eropa dan Asia benar-benar telah terlibat dalam perang. Dari sini, Indo Cina, jalan masuk ke Nusantara Indonesia sudah sangat dekat.

Jepang sebagai negara *superpower* Asia melancarkan perangnya ke arah Cina, Korea, Manchuria, dan Siberia, 1938 M. Dilanjutkan dengan penyerangan ke Kanton, Hainan, Sinnan, Februari 1939. Diteruskan dengan menduduki Spratley, 30 Maret 1939. Sejalan dengan Jerman yang mengadakan kerjasama *Non Aggression Pact* dengan Rusia, 21 Agustus 1940, Jepang menyusul mengadakan kerjasama dengan Rusia, *Non Aggression Pact*, April 1941.[12] Tentu perjanjian ini, bagi Jepang sebagai persiapan pengamanan penyerangannya ke Pearl Harbour, Hawai, 8 Desember 1941. Sebagai pembuka Perang Asia Timoerr Raja atau disebut oleh Sekoetoe sebagai Perang Pasifik.

> Nama-nama perang ini dengan menyebut nama wilayah: Asia Raya atau Pasifik dan di Eropa disebut Perang Dunia. Mengingatkan motivasi perang dari kelompok *Axis Pact* – Pakta Pertahanan Poros, adalah mencari *Lebensraum, Living Space* atau Lahan Kehidupan. Suatu istilah yang diangkat dari pandangan geopolitik,[13] perang bertujuan perluasan wilayah jajahannya guna menambah ruang kehidupan bagi populasi mereka yang semakin membengkak jumlahnya.

12 Perjanjian *Non Aggression Pact Jerman -Rusia* (21 Agustus 1940) berakhir hanya sampai Juni 1941. Jerman melancarkan serangan *Drang Nach Osten* – bergerak ke arah Timur dengan menduduki *hearthland* atau Rusia.

13 Rudolf Kjellen dari Universitas Uppsala Swedia, mendefinisikan *Geopolitik* dengan mengikuti pendapat F. Ratzel, *geopolitics as the theory of the state as geographic organism or phenomenon in space, i.e. as land, territory, area or most especially as country* - geopolitik sebagai suatu teori negara yang menilai negara sebagai organisme atau fenomena wilayah yakni daratan, teritorial, area atau yang lebih spesifik adalah negara. Sedangkan Karl Haushofer sebagai pakar Geopolitik dari Universitas Munich Jerman, memadukan pendapat kedua pakar geopolitik tersebut teori daratannya MacKinder sehingga berpendapat Jerman perlu menguasai daratan *heartland* meliputi daratan Jerman dan Rusia. Menurut pendapat Mac Kinder, *who rules the hearthland, commands the world island. Who rules the world island commands the world* - siapa yang menguasai wilayah jantung, akan menguasai benua. Yang menguasai benua akan menguasai seluruh dunia. Bertolak dari pendapat ini, Jerman melancarkan penyerangan dan penguasaan ke wilayah Rusia disebut *Drang Nach Osten* – bergerak ke arah timur. Periksa, Charles D. Tarlton, *The Political Geography, Symmetry and A Semmtery as Elements of Federation. A Theoritical Speculation.*

Setelah Jepang berhasil menguasai Cina, Korea, dan Rusia bagian timur dalam upayanya menguasai Asia Tenggara[14] mengadakan Konferensi Kemaharajaan, 6 September 1941. Diputuskanlah pembentukan Tentara Umum Selatan atau Tentara Selatan – Nampo Gun di bawah pimpinan Jenderal Terauchi Hisaichi. Tentara Selatan ini membawahi kesatuan pimpinan dan wilayah operasinya:

Tentara Ke-Empat Belas dipimpin oleh Letnan Jenderal Hamma Masaharu untuk Filipina. Tentara Ke-Lima Belas di pimpin oleh Letnan Jenderal lida Shojiro untuk Thailand, Birma atau Myanmar. Tentara Ke-Enam Belas dipimpin oleh Letnan Jenderal Imamura Hitoshi untuk Indonesia. Tentara Ke-Dua Puluh Lima dipimpin oleh Letnan Jenderal Yamashita Tomoyuki untuk Malaya atau Malaysia.

Tentara Selatan ini mempunyai Divisi Udara yang terdiri dari:

Divisi Udara Ketiga dipimpin Letnan Jenderal Sugowara Michio.
Divisi Udara Kelima dipimpin oleh Letnan Jenderal Obata Eiryo.
Divisi Udara Ke-Dua Puluh dipimpin oleh Letnan Jenderal Tanaka.

Dari sini tergambar bagaimana upaya Jepang sebagai negara imperialis Timur akan menggenggam Asia Tenggara. Disiapkan tentara penyerang untuk membalikkan penjajah Barat di Asia Tenggara: Perancis di Indo Cina. Inggris di Malaya atau Malaysia, Birma atau Myanmar, Singapura. Amerika Serikat di Filipina. Belanda di Indonesia. Dengan kata lain, untuk sampai ke Indonesia, Jepang menghadapi kekuatan penghalang: America, British, Cina, dan Dutch-ABCD.

Setelah Jepang berhasil membom Pearl Harbour, 8 Desember 1941, dua hari kemudian berhasil menenggelamkan armada laut Inggris, Prince of Wales dan Repulse, 10 Desember 1941, oleh serangan 51 pesawat pembom dan torpedo dari armada laut Jepang. Dua hari kemudian, Jepang berhasil mendarat di P. Luzon Filipina, 12 Desember 1941. Disusul dengan jatuhnya P. Guam, 13 Desember 1941, juga jajahan Amerika Serikat.

Diikuti dengan jatuhnya P. Wake, 15 Desember 1941, Serawak 16 Desember 1941, dan P. Penang, 17 Desember 1941. Hanya memakan waktu sembilan hari, Jepang mampu menunjukkan prestasi serangannya dalam melumpuhkan imperialis Barat di Asia Tenggara.

---

14 Istilah Asia Tenggara atau *South East Asia* muncul pada masa Perang Dunia II. Semula terdiri dari Indo Cina atau India Belakang wilayah jajahan Perancis. India Belanda atau Indonesia wilayah jajahan Belanda. Filipina wilayah jajahan Amerika Serikat. Malaya, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah sebagai jajahan Inggris. Thailand sebagai wilayah *Euffer State* - Daerah Penjangga, bebas dari penjajahan Barat. Birma wilayah jajahan Inggris.

Penyerangan Jepang ini diarahkan merebut pelabuhan pertahanan imperialis Barat. Tidakkah kejayaan imperialis Barat terletak pada penguasaan maritimnya. Seperti yang diungkapkan oleh Walter Raleigh: *who ever commands the sea, commands the riches of the world, and consequently the world it self* - siapa yang menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia dan konsekuensinya akan menguasai dunia itu sendiri. Oleh karena itu, hanya dengan merebut kekuasaan lautnya atau pelabuhannya, imperialis Barat akan dapat dipatahkan dominasinya.

Jepang untuk sementara dapat menghancurkan pertahanan lawan. Namun, apakah Jepang mampu menguasai kemauan lawan - *enemy's will?*. Ternyata serangan tersebut membangkitkan terbentuknya kerjasama pertahanan antara America, British, Dutch, Australia – ABDA. Pertahanan lautnya dipimpin oleh Admiral Hart. Daratnya dipimpin oleh Heinter Poorten. Pembentukan kesatuan pertahanan yang mendadak di tengah kelemahan Pakta Pertahanan Sekoetoe, memungkinkan Jepang dengan mudah menerobosnya.

ABDA mencoba menahan serangan Jepang yang akan ke Indonesia. Dengan membagi pertahanannya. British -Inggris mencoba memertahankan Asia Tenggara belahan barat: Sumatra dan Malaysia serta Singapora. Dutch-Belanda di belahan tengah Asia Tenggara disentralkan di Laut Jawa. Sedangkan America - Amerika Serikat mengambil bagian fron belakang dengan mengambil posisi Asia Tenggara belahan timur, di Bali dan Indonesia Timur.

Sistem pertahanan Amerika Serikat, memilih Bali sebagai dampak dari kekalahannya di Luzon dan Guam. Oleh karena itu, Amerika Serikat menempatkan dirinya di fron belakang yang lebih dekat dengan Australia. Penempatan di fron belakang, sebagai ciri Amerika Serikat di setiap kerjasama pertahanan di mana pun. Negara Sekoetoe lainnya selalu ditempatkan di fron terdepan.

Sebaliknya, Jepang di bawah pimpinan Admiral Kurita dari Davao Filipina melancarkan serangan guritanya ke Indonesia. Diarahkan terlebih dahulu ke Tarakan yang memiliki tambang minyak. Diikuti dengan penyerangan ke Balikpapan, Banjarmasin, pada Januari dan Februari 1942. Kota-kota ini semuanya dilihat dari Davao sebagai wilayah barat.

Setelah Menado didudukinya berlanjut menyerang Kendari, Ujung Pandang atau Makasar, dan Bali. Semua kota ini sebagai wilayah tengah dari Davao Filipina. Selanjutnya, serangan Jepang diarahkan ke wilayah timur dari Davao. Diserangnya Ambon, diteruskan ke Timor Kupang dan Timor Dili. Serangan Jepang dilancarkan dari laut dan udara menjadikan pertahanan ABDA tidak berdaya menahannya.

Pengaruhnya pertahanan darat dan laut Dutch - Belanda di wilayah tengah, lumpuh total. Tentara Ke-Enam Belas di bawah pimpinan Letnan Jenderal Immamura dan Mayor Jenderal Maruyama Masao mendarat di Bojonegara, sekarang dalam Provinsi Banten. Divisi Ke-Tiga Puluh Delapan di bawah pimpinan Kolonel Shoji mendarat di Eretan Indramayu Jawa Barat. Kemudian, diikuti dengan penyerangan ke bandara militer Kalijati Subang, Jawa Barat. Sedangkan Divisi Empat Puluh Delapan mendarat di Kragan, Jawa Tengah. Dari sini, bergerak ke Cilacap dan Jawa Timur.

Dengan memerhatikan tempat-tempat pendaratan di atas, Jepang sangat memahami wilayah mana yang terbuka. Tidak melalui Jakarta, Semarang dan Surabaya karena ketiga tempat tersebut terdapat pertahanan Belanda yang cukup kuat. Jepang memerhitungkan tidak melakukan pendaratan di Jawa Timur, karena dekat dengan pertahanan Amerika Serikat di Bali.

Untuk pendaratan ini, Tentara Ke-Enam Belas didukung oleh satuan Angkatan Laut yang dipimpin oleh Laksamana Madya Kondo Nobutake yang membawahi Armada Kesatu, Kedua, Ketiga dan Ke-Sebelas. Khusus untuk pengangkutan Tentara Ke-Enam Belas dipimpin oleh Laksamana Madya Takahashi Ibo. Serangan Jepang yang sistemik, menjadikan Belanda berperang sendirian saat memertahankan Laut Jawa, di bawah pimpinan Laksamana Madya Karel Doorman. Tanpa mendapatkan bantuan dari Inggris, Amerika dan Australia. Akibatnya mudah dilumpuhkan dan ditenggelamkan armada perang Laksamana Madya Karel Doorman.

Dengan serangan tersebut, Jepang berhasil menjadikan ABDA, dalam teori perang Carl von Clausewitz disebut sebagai enemy collapse - lawannya yang dirontokkan. Penghancuran kekuatan persenjataannya dan dikuasainya teritorinya - the destruction of his armed forces and the conquest of his territory. Dampaknya, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Keradjaan Protestan Belanda, Jenderal Hein ter Poorten, bersama Goebernoer Djenderal Tjarda van Starkenbrgh Stachouwer, menyerahkan Indonesia tanpa syarat kepada Letnan Jenderal Immamura, dalam Kapitulasi Kalijati Subang, Jawa Barat, 8 Maret 1942 M atau 20 Safar 1361 H. Sejak peristiwa penyerangan ke Pearl Harbour, Hawai, 8 Desember 1941, dan peristiwa Kapitulasi Kalijati Subang, Jawa Barat, 8 Maret 1942, maka setiap 8 Maret diperingati sebagai Hari Kemenangan Perang Asia Timur Raya atau Hari Pembangunan Asia Timur Raya.

Kemenangan Jepang yang dicapai dengan serangan dadakan dan kedatangannya hanya dengan naik sepeda. Diikuti dengan mendatangi masjid-masjid oleh tentara Jepang Islam. Menurut Harry J. Benda, menjadikan rakyat Indonesia menyambut kedatangan tentara Jepang sebagai pembebas rakyat dari penindasan pemerintahan penjajah Kristen.

Dibuktikan dengan tindakan tentara Jepang Islam masuk ke Masjid Kwitang Jakarta, menunjukkan diri bahwa Jepang sebagai Saudara Tua bangsa Indonesia. Sikap bersahabat ini, sebenarnya hanya sebagai propaganda awal pendudukan tentara Jepang di Indonesia. Selanjutnya dalam memenangkan perangnya, melakukan penindasan sebagaimana yang pernah dilakukan penjajah Barat sebelumnya.

Meiji Restorasi

Perlu diperhatikan, tindakan Jepang dengan mendekati umat Islam dan para Ulama dipersiapkan untuk mendapatkan simpati dari umat Islam di Timur Tengah, seperti halnya Jerman yang mendemonstrasikan sikap anti Yahudi. Kebangkitan negara Jepang yang semula sebagai *closed country* - negara yang tertutup, setelah mengalami pemaksaan oleh Commodor Perry, 1854 M, berubah menjadi *opened country* - negara terbuka. Selanjutnya, negara Jepang menjadi *imitation country* - negara peniru Barat.

Jepang menyadari ketinggalannya pada bidang organisasi militer modern daripada negara-negara Barat. Jepang dalam pembangunan angkatan darat mencontoh negara Jerman. Dalam angkatan laut, meniru Keradjaan Protestan Anglikan Inggris. Proses kemajuan Jepang dicapai setelah Kaisar Meiji berhasil menumbangkan kekuasaan Tokugawa. Diubahnya Jepang sebagai negara modern. Pembaharuannya disebut sebagai Meiji Restorasi,1867-1912 M. Ibukota Edo pun diganti dengan Tokio.

Modernisasi tidak mungkin menjadikan Jepang sebagai negara maju, kalau tanpa disertai pembaruan pendidikan dan agama. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia disebut *bummeikaika* – gerakan memperadabkan bangsa Jepang. Melalui pendidikan, Jepang mengadakan pembaruan sistem berpikir bangsa Jepang. Ditinggalkannya segenap ajaran ketakhayulan dan feodalisme.[15]

Melalui berbagai strata pendidikan diubahlah tradisionalisme menjadi berkehidupan modern. Pembangun pendidikan tinggi maju dengan pesat. Didirikan berbagai universitas: The Imperial University, Keio University, Doshisha University, dan Waseda University. Kehadiran universitas ini semuanya sebagai pembangkit kultur modern.

15 Di Indonesia dalam Kebangkitan Kesadaran Nasional juga mengutamakan pemberantasan keyakinan terhadap ajaran takhayul melalui gerakan dakwah. Dipelopori oleh Persjarikatan Moehammadijah, Al-Irsjad, Persatoean Islam, Nahdlatoel Oelama, dan Nahdlatoel Wathan. Strategi Nahdaltoel Oelama dalam pemberantasan takhayul, lebih mengutamakan memberantas buku-buku sumber tersebarnya ajaran takhayul. Diikuti dengan pembangunan sistem pendidikan dan pesantren, pemikiran feodalisme kehilangan pendukungnya.

Tokoh pembaharuan sistem pendidikan adalah Fukuzawa Yukichi, 1834-1901 M. Pembaruan di bidang politik dipelopori oleh Nakoe Chomin, 1847-1901 M, dan Ukei Emori, 1854-1892 M. Kedua tokoh yang menjadikan bangsa Jepang tetap memelihara kehidupan tradisi lama tetapi dimodernisasikan dengan ilmu dan teknologi Barat.

Jepang sebagai murid Barat[16], meniru perkembangan negara Barat, akhirnya juga meniru menjadi negara imperialis. Keberhasilan pembangunan industri militernya menjadikan Jepang memiliki persenjataan yang kuat. Langkah lanjutnya mencoba mempraktikkan ketiga landasan teori kekuatan militer darat, laut dan udara guna menelan Asia Timur Raya[17] akan dijadikan Lebensraum, Living Space, Lahan Kehidupan perluasan wilayah jajahan Jepang. Indonesia dijadikan sasaran utamanya dan dipelajari jauh sebelum perang dimulai, sekitar 1920 M. Bersamaan dengan kebangkitan Jerman setelah ditumbangkan oleh Perancis dalam Perang Dunia I, 1914-1919 M.

> Negara-negara imperialis Barat dan Timur dalam upayanya menguasai dunia menganut tiga teori:
>
> Pertama, Walter Raleigh yang lebih mengutamakan penguasaan lautan atau maritim. Dari teori ini, Kerajaan Protestan Anglikan Inggris dapat mengembangkan penjajahan mendunia karena penguasaan lautnya. Demikian pula Keradjaan Protestan Belanda mengutamakan pembinaan armada perangnya di lautan.[18] Diikuti oleh Amerika Serikat yang di bangkitkan oleh Protestan Revolution 19 April 1775, berubah menyusul menjadi negara imperialis setelah mengaplikasikan teori penguasaan lautan, pengaruh dari pandangan A.T. Mahan dalam The Influence of Sea Power Upon History - Pengaruh Kekuatan Lautan Atas Sejarah.[19]
>
> Kedua, Sir Harold Mackinder, 1861-1949 M, Guru Besar Geografi Universitas Oxford. Pada 1919 M, teorinya lebih mengutamakan teori penguasaan daratan guna mengkonter teori lautan di atas. Menyatakan dengan penguasaan large

16 Guy Wint (ed). 1966. *Asia A Hand Book*. Frederick A.Praeger. New York, hlm. 175 Jepang disebut oleh Richard Storry, *Japan as Pupil of the West – Jepang sebagai Murid Barat.*

17 Penyebutan Asia, Asia Tenggara dan Jepang menjadi Asia Timur menggunakan dasar mata angin dunia dari Greenwich. Artinya, benua Asia terletak di sebelah timur Inggris. Khusus untuk wilayah Korea, Cina, dan Jepang dari Inggris disebut sebagai *The Far East* – Timur Jauh.

18 Keradjaan Protestan Anglikan Inggris sejak masa *East Indian Company* berupaya menguasai pintu-pintu laut perniagaan: Gibraltar, Malta, Aden, Socotra, Singapora, Hongkong. Keradjaan Protestan Belanda sejak *Verenigde Oost Compagnie* berupaya menguasai jalan laut niaga Afrika Selatan, Ceylon, Jakarta, Makasar, dan Ambon.

19 Amerika Serikat setelah kuat armada lautnya berubah menjadi negara imperialis menjajah Karibia, Alaska, Panama, Hawaii, P. Guam, Jepang, dan Filipina.

space of location - wilayah daratan yang luas dapat menguasai dunia.[20] Adapun wilayah daratan yang luas yang dimaksudkan adalah penggabungan wilayah daratan Rusia dan Jerman. Wilayah ini disebutnya sebagai *the pivot region of the world's politics* - wilayah poros dunia politik. Kemudian, istilah ini diganti menjadi *heartland* - daerah jantung.

Perubahan istilah ini karena adanya perubahan wawasannya tidak lagi hanya bertumpu pada daratan, tetapi penggabungan antara daratan dengan lautan. Diteorikan penguasaan Jerman sebagai *inner cressent* - bulan sabit dalam, dan atas Timur Tengah sebagai wilayah lautan atau *outer cressent - bulan sabit luar.* Kedua wilayah ini dinilai pula sebagai *heartland. Rusia* diteorikan sebagai *pivot area* - wilayah poros. Dari teori ini, kemudian timbullah pemahaman dengan istilah *Pivot area and Heartland.* [21]

Ketiga, Nicolas Spykman. 1944. *The Geography of The Peace*, mengembangkan teori di atas dengan menyatakan bahwa *heartland and the marginal seas* – daerah jantung dan daerah tepian laut, sebagai *rimland* – daerah pinggir yang menjadi *buffer zone of conflict* – daerah penyangga konflik. Daerah pinggir yang dimaksud oleh Nicolas Spykman adalah Eropa dan Asia yang mengelilingi Jerman dan Rusia. Dengan cara bagaimana penguasaan atas a *vast buffer zone conflict* – wilayah luas penyangga konflik yang sangat luas. Dijawab oleh Alexander P.de Seversky dalam *Air Power Key To Survival* - Kekuatan Udara Kunci Kesuksesan. Dari teori ini, Amerika Serikat mengutamakan pertahanan udaranya - *air power*. Dikuatkan pula dengan teori Amery tentang *off shore theory* menjadikan *a vast buffer zone conflict* sebagai pangkalan pertahanan udaranya.

---

20 Untuk penguasaan daratan yang luas melahirkan transportasi darat, Kereta Api. Di Rusia dibangun jalan kereta api membentang hingga dari Mukden. Di Indonesia dibangun jalan Kereta Api oleh pemerintah kolonial Belanda berfungsi sebagai Benteng Stelsel, tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan transportasi ekonomi, tetapi juga pemenuhan kepentingan militernya merupakan gurita guna mempersempit wilayah gerakan perlawanan Ulama dan Santri.

21 Teori Poros dan Jantung – *Pivot Area and Heartland*, memengaruhi politik Jerman membangun Pakta Pertahanan Poros – *Axis Pact* antara Adolf Hitler – Jerman, Mussolini Italia, dan Kaisar Hirohito Jepang. Dalam Perang Dunia II, 1939-1945 M, Jerman melancarkan serangannya yang dikenal dengan *Drang Nach Osten* – bergerak ke arah timur dengan menduduki Rusia. Padahal, dalam Perang Dunia I, 1914-1919 M, Kekaisaran Jerman dengan Uni Soviet Komunis mengadakan perjanjian tidak saling serang menyerang 1918 M. Dalam Perang Dunia II, 1939-1945 M, juga diadakan *Non Aggression Pact* antar Jerman –Rusia, 21 Agustus 1940. Disusul antara Jepang Rusia dengan *Non Aggresion Pact*, Juli 1941. Tetapi pada Juni 1941 terjadi pelaksanaan gerakan *Drang Nach Osten* Jerman menyerang Rusia dalam upaya merealisasi *Pivot Theory McKinder*. Serangan Jerman terhadap Rusia, sangat menguntungkan politik kapitalis Barat. Jerman terjebak oleh *Pivot Theory McKinder* dari Oxford University.

Dari teori-teori geopolitik tersebut: penguasaan lautan, daratan, dan udara, menjadikan negara-negara imperialis modern Barat dan Timur berupaya menjajah dunia. Pecahlah Perang Dunia II, 1939-1945 M, tidak dapat dihindari. Asia Afrika dan Timur Tengah, terutama yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam dijadikan obyek perluasan wilayah jajahannya.

> Menurut Carl von Clausewitz, perang tidak dapat diprediksikan kesudahannya. Misalnya, pada Perang Dunia II, 1939-1945 M, melahirkan Indonesia Merdeka, walaupun bangsa Indonesia tidak memiliki senjata pemusnah seperti yang dimiliki Amerika Serikat. Dalam proses mencapai kemerdekaan, ternyata bagaimanapun juga Indonesia harus memiliki organisasi modern militer.
>
> Di bawah kondisi Perang Asia Timoer Raja, 1941-1945 M, Balatentara Djepang di Indonesia menuntut bantuan dari Ulama dalam perang menghadapi serangan balik Sekoetoe. Namun, dalam propagandanya bukan Balatentara Djepang yang membutuhkannya. Melainkan dikondisikan seperti Ulama yang menuntut dibentuknya Tentara Pembela Tanah Air. Dengan pembalikkan kebutuhan itu, Balatentara Djepang akan memikulkan segenap tanggung jawab dananya kepada Ulama dan umat Islam. Mengapa demikian?

Perlu disadari, negara-negara Barat sebenarnya negara imperialis, tetapi menyebutnya sebagai negara demokrasi. Negara Jepang sebagai murid negara-negara imperialis Barat, akibatnya mencontoh pula sistem imperialisme Barat. Ikut serta dalam perlombaan mencari jajahan dengan memperkuat militer dan persenjataannya. Secara politis, propaganda Jepang sepintas juga ingin mengembangkan slogan Revolusi Perancis fraternite - persaudaraan, equalite - persamaan dan liberte - kemerdekaan sesama bangsa Asia. Dengan membahasakan dirinya sebagai Saudara Tua. Hal ini sekali lagi sebagai terjemahan dari Deutschland uber alles – Jerman sebagai bangsa yang teratas di segenap bangsa-bangsa di dunia . Kemudian, oleh Jepang dialih bahasakan menjadi Saudara Tua. Dengan pengertian bahwa Jepang sebagai bangsa yang lebih tua kedudukannya di seluruh ras dan etnis dari bangsa-bangsa Asia. Dengan demikian, Jepang sebagai Saudara Tua akan diterima sebagai pemimpin, pelindung, dan cahaya yang menerangi jalan kehidupan bangsa-bangsa Asia. Tidakkah di Asia dalam struktur keluarga, adik harus hormat kepada saudara yang lebih tua.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

KAPITULASI KALIDJATI

Walaupun Goebernoer Djendral Tjarda van Starkenborgh menolak melakukan penyerahan Indonesia karena mentaati perintah P.M. Prof. Gebrandy dari London. Namun, Djenderal Ter Porten bersedia melakukan penandatanganan penyerahan Indonesia tanpa syarat kepada Djendral Hitoshi Imamura pada 8 Maret 1942 atau 20 Safar 1361.

Tjarda dan Ter Porten merasakan betapa pedihnya di Penjara Sukamiskin Bandung. Penjara yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenjarakan para Ulama dan para pejuang kemerdekaan Indonesia, berbalik memenjarakan pembangunnya.

Dari Sukamiskin, dia dipindahkan ke Jakarta, Singapira, Taiwan, dan Manchuria. Mirip dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam memindahkan tempat pembuangan para Ulama. Tjarda dan Ter Porten merasakan bagaimana rasanya kalau kehilangan kemerdekaan.

Perang Dunia II dan Perang Asia Timoer Raja,
perang antara imperialis, membuka pikiran dan kesadaran penjajah terhadap betapa pedihnya menjadi bangsa yang terjajah.

Kelanjutannya, setelah pendudukan, Jepang tampak jelas sebagai imperialis yang diselubungi dengan nama gerakan Nipponisasi mencoba mengubah kultur Asia menjadi kultur Jepang di segala bidang. Dipaksakan untuk menghormat setiap jumpa dengan tentara Jepang. Tidak dibenarkan berambut panjang harus gundul seperti tentara Jepang. Dilarang berbahasa Belanda atau Inggris, diwajibkan menggantikan istilah Barat dengan bahasa Jepang. Dalam masalah bahasa Arab, Balatentara Dai Nippon tidak melarang berbahasa Arab. Melainkan agar Al-Qur'an dan Hadits diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.

Pembinaan teritorial Balatentara Djepang di indonesia

Setelah Balatentara Djepang berhasil menyeret Goebernoer Djenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Keradjaan Protestan Belanda Djenderal Ter Poorten dalam Kapitulasi Kalijati, 8 Maret 1942 atau 20 Safar 1361, membagi wilayah Indonesia menjadi dua daerah kekuasaan militer:

Pulau Jawa dikuasai oleh Angkatan Darat Tentara Ke-Enam Belas berpusat di Jakarta dan Sumatra dikuasai oleh Angkatan Darat Tentara Ke-Dua Puluh Lima dengan pusatnya di Bukittingi. Sebaliknya, Indonesia Timur termasuk Kalimantan dikuasai oleh Angkatan Laut Tentara Ke-Sembilan Belas berpusat di Ujung Pandang atau Makasar. Kedua angkatan darat dan laut ini di bawah komando Jenderal Terauchi yang berkedudukan di Dalat Saigon.

Balatentara Djepang memahami Pulau Jawa sebagai sentral kekuasaan penjajah Belanda dalam penguasaannya atas Indonesia. Perlakuan Angkatan Darat Tentara Ke-Enam Belas terhadap Ulama, pimpinan partai politik dan organisasi non religius sangat beda dengan tindakan Angkatan Laut Tentara Ke-Sembilan Belas di Luar Jawa. Misalnya, Angkatan Laut di Kalimantan Barat bertindak sangat keras menindas secara fisik terhadap keluarga Sultan dan cendekiawan serta rakyat pendukungnya.[22]

Nipponisasi dilaksanakan juga di bidang pemerintahan Balatentara Dai Nippon. Dalam upaya mensosialisasikan Nipponisasi di bidang pemerintahan, dikenalkan pembaruan istilah sistem pemerintahannya:

22 Ahmad Mansur Suryanegara et.al. 1970. *Tandjungpura Eerdjuang*. Sedjarah Kodam XII/ Tanjungpura Kalimantan Barat. Sendam XII/Tandjungpura. Pontianak, hlm. 93 Angkatan Laut Jepang melancarkan pembantaian terhadap keluarga Sultan, cendekiawan, dan rakyat sejumlah 1543 orang.

KOLONEL HORIE

Kepala Kantor Urusan Agama Sumubu

Sumber: Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan

GUNSEIKAN
MAYOR JENDERAL SESABORO OKAZAKI

Maret 1942- Mei 1943

Perhatikan seragam dan topi, tanpa pangkat, tanda jasa, dan pedang samorai.

Sumber: Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan

Gunseikanbu - pemerintahan pusat militer dipimpin oleh Gunseikan - Kepala Staf Tentara dengan fungsinya mengendalikan pemerintahan militer. Pemerintahan Tentara Ke-Enam Belas, dikenal dengan kode Osamu. Panglimanya disebut Gunseikan atau disebut juga sebagai Saiko Shikikan. Aktivitas pemerintahan dilaksanakan oleh Gunseikan.

Kedua penjabat pemerintahan di atas, memiliki kewenangan membuat undang-undang dan peraturan. Apabila dikeluarkan oleh Saiko Shikikan disebut Osamu Shirei. Apabila dikeluarkan oleh Gunseikan disebut Osamu Kanrei.

Selama pendudukan Balatentara Djepang terjadi tiga kali pergantian Saiko Shikikan:

Pertama, Letnan Jenderal Hitoshi Immamura, 8 Maret-November 1942.
Kedua, Letnan Jenderal Kumashiki Harada, November 1942-April 1945.
Ketiga, Letnan Jenderal Yasiuchi Nagano, April-September 1945.

Jabatan Gunseikan mengalami pergantian tiga kali pula:

Pertama, Mayor Jenderal Sesaburo Okasaki, Maret-Mei 1942.
Kedua, Mayor Jenderal Shinsichiro Kokubu, Mei 1942-Mei 1943.
Ketiga, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, November 1944 - September 1945.

Guna memperlancar tata kerja Gunseikan, dibantu oleh delapan departemen:

Naimubu	-	Departemen Dalam Negeri
Sihoobu	-	Departemen Kehakiman
Keimubu	-	Departemen Kepolisian
Zaimubu	-	Departemen Keuangan
Sangyoobu	-	Departemen Perekononian
Kootubu	-	Departemen Lalu Lintas
Sendenbu	-	Departemen Propaganda
Saiko Hoom	-	Mahkamah Agung
Saiko Kensatu	-	Kejaksaan Umum
Shumubu	-	Departemen Urusan Agama

Berdasarkan Undang-undang No 27 dan 28, Pulau Jawa Madura dibagi atas 17 Syuu - Keresidenan dan dua buah Kooti - Daerah Istimewa: Kasoenanan Soerakarta dan Kesoeltanan Ngajogjakarta Hadiningrat .

Adapun ke-17 *Syuu* atau *Keresidenan* di Pulau Jawa adalah:

Jawa Barat terjadi perubahan nama kota:
Bantam diganti menjadi *Banten Syuu*. Buitenzorg diganti menjadi *Bogor Syuu*. Batavia diganti menjadi *Jakarta Syuu* atau *Tookobetsu - Daerah Khusus Ibukota*. Preanger diganti menjadi *Priangan Syuu*. Cheribon diganti menjadi *Cirebon - Syuu*.

Jawa Tengah tanpa pergantian nama kotanya:
Semarang Syuu, Pekalongan Syuu, Banyumas Syuu, Pati Syuu, Kedu Syuu.

Jawa Timur tanpa pergantian nama kotanya:
Surabaya Syuu, Malang Syuu, Bojonegoro Syuu, Kediri Syuu, Besuki Syuu, Madura Syuu, Madiun Syuu.

Untuk Pulau Jawa pemerintah Balatentara Djepang mengangkat *Majelis Pembesar Syuu* atau semacam Residen yang membawahi Kabupaten oleh:

Sicho Tookebetsu /Gubernur DKI Jakarta- *S. Tsukamoto*
Syuuchokan/Residen Priangan Jabar- *K. Matsui*
Syuuchokan/Residen Bogor Jabar- *K. Tamate*
Syuuchokan/Residen Banten Jabar- *H. Watanabe*

Syuuchokan/Residen Pekalongan Jateng- *T. Tokonami*
Syuuchokan/Residen Pati Jateng- *M. Nakamura*

Syuuchokan/Residen Surabaya Jatim- *M. Jasuoka*
Syuuchokan/Residen Malang Jatim- *M. Tanaka*
Syuuchokan/Residen Kediri Jatim- *E. Kihara*
Syuuchokan/Residen Madiun Jatim- *M. Takemasa*

Perubahan pemerintahan kota seperti di atas, yang berbeda dengan pembagian pada masa pemerintah kolonial Belanda, disesuaikan dengan sistem kerahasiaan dalam suasana perang. Seperti halnya markas Jenderal Terauchi tidak di kota Saigon, melainkan di Dalat, sebuah kota kecil di luar Saigon.

Dengan adanya pembagian pemerintahan di Pulau Jawa seperti di atas dengan perbandingan 4:2:4, besar kemungkinan dengan dasar perhitungan serangan Sekoetoe lebih banyak dari arah Pasifik dan Australia. Karena itu, Jawa Timur dibagi menjadi 4 *Syuuchokan*. Sedangkan Jawa Tengah dinilai cukup dipimpin 2 *Syuuchokan*.

Diperhitungkan serangan langsung Sekoetoe ke Jawa Tengah akan melampaui pertahanan Balatentara Djepang di Makasar. Di Jawa Tengah terdapat pula Kesoenanan di Surakarta dan Kesoeltanan di Jogjakarta yang tidak dihapuskan eksistensinya. Untuk Jawa Barat terdapat dalam 3 Syuchokan dan Sicho Tokubetsu karena pusat pemerintahan Balatentara Djepang di Jawa Barat dan Jakarta.

Pembagian di atas akan berbeda dengan pusat-pusat penempatan Tentara Pembela Tanah Air di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Perbedaan tersebut tidak luput dari pehitungan strategi geopolitik Balatentara Djepang dalam menghadapi serangan balik Sekoetoe dan pengawasan terhadap Tentara Pembela Tanah Air - Peta yang dipimpin oleh Ulama. Masalah pembentukan Tentara Pembela Tanah Air, penulis bahas lebih luas dalam Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta Di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan.

Sistem Pemerintahan tidak Langsung

Perubahan tatanan wilayah dengan pembaharuan namanya, penghilangan nama Belanda, digantikan dengan nama Indonesia, memberikan gambaran kelengkapan kesiapan penataan wilayah setelah pendudukan. Kebijaksaan Balatentara Djepang di bidang bahasa: Pertama, meniadakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda. Kedua, membantu mengembangkan bahasa Indonesia. Ketiga, mensosialisasikan bahasa dan huruf Jepang.

Dengan luasnya daerah pendudukan, Balatentara Djepang kekurangan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, memanfaatkan dan melanjutkan sistem pemerintahan tidak langsung - indirect rule system. Banyak digunakan kembali para Boepati atau Regent dari kalangan Parindra. Di luar struktur pemerintahan dibentuk Tonari Gumi - Rukun Warga.

Balatentara Djepang juga memanfaatkan teori Nicollo Machiavelli terhadap Boepati atau Regent mantan tangan kanan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa pendudukan, mereka merasa salah dan ketakutan. Menurut teori Nicollo Machiavelli agar memanfaatkan rasa bersalah dan takut mantan lawannya. Orang-orang yang merasa salah dan takut akan menjadi kawan yang setia, kalau dijadikan kawan. Oleh karena itu, para Boepati atau Regent tersebut diangkat menjadi pembantu pemerintahan Balatentara Djepang.

SANI LUPIAS ABDURRAHMAN

Shodanco DAI I Tasikmalaya Pengawal Daidanco KH. Sutalaksana
Perhatikan Uniform Perwira Tentara Pembela Tanah Air - Tentara PETA
dari Topi, Seragam Tanda Pangkat, Pedang Samorai hingga Sepatu Lars

Karir Militer

Ass II OPS ketika Kudeta PKI di Madiun berhasil membebaskan 1000 TNI yang ditawan PKI
AssLog OPS di Makasar dalam operasi penangkapan Kahar Muzakkar
Ass II OPS Hasanuddin, AssLog AKABRI U/Darat Magelang
Danyon a.l. Beruang Merah, Taruna, 11 April, 306/Guntur

Karir Sipil

Bupati Bandung, Ass EkBank Prov Jabar, Ketua ITWIL Prov. Jabar
Ketua Koni Jabar, Ketua Optip Jabar
Ketua Yayasan Tentara Pembela Tanah Air - Yapeta Jawa Barat

Sumber: Dokumen Pribadi

Kebaikan Balatentara Djepang mengampuni kesalahannya, yang diterima oleh para Boepati atau Regent sebagai anugerah. Dampaknya, para Boepati atau Regent akan sangat loyal pada pemerintahan Balatentara Djepang. Loyalitasnya akan dimanfaatkan untuk mengawasi aktivitas Ulama dan pimpinan partai politik Islam.

Deparpolisasi dan Deormasisasi

Balatentara Djepang tidak menghendaki adanya partai politik yang didirikan pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional. Oleh karena itu, dikeluarkanlah perintah pembubaran segenap organisasi sosial politik-deparpolisasi dan deormasisasi. Sampai saat pendudukan, partai politik yang masih eksis adalah Partai Sjarikat Islam Indonesia - P.S.I.I. dan Partai Islam Indonesia - P.I.I. serta Partai Indonesia Raja - Parindra. Dengan adanya larangan aktivitas parpol itu, Partai Sjarikat Islam Indonesia - P.S.I.I mengumumkan pembubarannya pada 2 Mei 1942. Disusul oleh Partai Islam Indonesia - P.I.I pada 20 Mei 1942.

Tindakan Balatentra Jepang ini, jelas menunjukkan rasa takutnya terhadap partai politik Islam. Namun, di satu pihak, Balatentara Djepang menyadari dalam menghadapi serangan balik dari Sekoetoe sangat memerlukan bantuan Ulama dan Santri yang memiliki latar belakang sejarah yang diperjuangkan secara konsisten, antipenjajah Kristen.

Shumubu – Kantor Oeroesan Agama

Realisasi propaganda Islamnya Jepang yang dilakukan pada masa pra pendudukan, segera diikuti pada minggu akhir bulan pendudukan. Akhir Maret 1942, membentuk Kantor Oeroesan Agama - Shumubu dengan ketuanya Kolonel Horie. Dr.Karim Amroellah setelah dibebaskan dari pembuangan di Sukabumi diangkat sebagai penasihatnya.

Tidak heran kalau hal ini berpengaruh besar terhadap sikap politik Buya Hamka yang memercayai Balatentara Djepang benar-benar berpihak pada perjuangan umat Islam. Dalam aktivitas dakwahnya, menganjurkan agar umat Islam ikut berpartisipasi aktif memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Shumubu didirikan akhir Maret 1942, beberapa hari setelah adanya Kapitulasi Kalijati Subang, 8 Maret 1942. Pembentukan Shumubu terealisasikan dalam waktu relatif singkat. Pertanda Balatentara Djepang, jauh sebelum pendaratan telah menyiapkan sistem penataan teritorial dan pengelolaan potensi Ulama dan Santri serta umat Islam pada umumnya. Baik potensi manusianya dan potensi materi kekayaannya serta keberaniannya melawan penjajah Barat.

Semula dalam pembinaan *Shumubu*, yang akan digunakan sebagai media pembinaan Ulama desa, akan lebih berhasil kalau dipimpin langsung oleh tentara Jepang. Tetapi kenyataannya Kolonel Horie mengalami kegagalan. Kesalahan Balatentara Djepang dalam menciptakan *social change* - perubahan sosial di kalangan umat Islam di kota ataupun di pedesaan, salah memilih pimpinannya atau *change agent* - pelaku pengubahnya. Kolonel Horie tidak dikenal oleh umat Islam. Menentukan pembantunya bukan dari mantan pimpinan organisasi Islam atau Ulama. Tidak mungkin berhasil mengubah masyarakat Islam dengan tanpa menyertakan Ulama sebagai pelaku pengubahnya - *change agent*.

Kemudian, Kolonel Horie mengadakan reorganisasi *Shumubu* dengan mengangkat Dr. Hoesein Djajadiningrat sebagai ketua *Shumubu* pada Oktober 1943. Balatentara Djepang masih menilai Islam dan Ulama sebagai ancaman penjajahannya. Oleh karena itu, pengangkatan Ketua *Shumubu* atau *Shumubucho*, bukan figur Ulama yang memiliki massa besar. Melainkan Dr. Hoesein Djajadiningrat, sebagai prijaji yang pernah bekerja sebagai Asisten Penasihat Masalah Pribumi untuk pemerintahan kolonial Belanda.

Dr. Hoesein Djajaningrat sebagai ambtenar pemerintah kolonial Belanda tidak berpengalaman menggerakkan massa. Sedangkan Balatentara Djepang berencana memobilisasikan segenap potensi Ulama desa. Dapat dipastikan usaha Balatentara Djepang mengalami kegagalan, apalagi di tengah suasana rakyat sedang ketakutan adanya peperangan. Dalam suasana ketakutan, rakyat pada umumnya mendekati pemimpin yang dinilai selalu dekat dengan Allah, yakni Ulama. Kalangan Prijaji yang menduduki jabatan sebagai Pangeh Pradja, ambtenar, diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda agar bersikap menjauh dari rakyat jelata.

Di bawah kegagalan ini, Balatentara Djepang mengadakan reorganisasi *Shumubu*, dengan mengangkat K.H. Hasjim Asj'ari sebagai Ketua *Shumubu*. Dalam praktik pelaksanaannya, dikuasakan kepada putranya, Wahid Hasjim. Dengan pertimbangan dalam upaya memobilisasi masyarakat desa, memerlukan Ulama yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat desa. Kemudian, ditentukan pengalihan kekuasaan yang dipercayakan Balatentara Jepang dari K.H. Hasjim Asj'ari kepada Wahid Hasjim.

Sebenarnya, Choedratoes Sjeich Rois Akbar K.H. Hasjim Asj'ari melakukan perlawanan tanpa kekerasan dengan menampakkan tidak mau bekerjasama. Tidak mau membantu upaya memenangkan Perang Asia Timur Raya karena Balatentara Djepang menjalankan kebijakan deparpolisasi dan deormasisasi terhadap parpol dan ormas Islam. Namun, meminta bantuan kepada Ulama dan umat Islam. Termasuk Nahdlatoel Oelama yang dipimpin oleh K.H. Hasjim Asj'ari, dibekukan aktivitas organisasinya.

Prof. Dr. BUYA HAMKA dan Dr. ABDOEL KARIM AMROELLAH

Dr. Abdoel Karim Amroellah dibebaskan oleh Balatentara Djepang dari pembuangan di Sukabumi untuk diajak kerjasama memenangkan Perang Asia Timoer Raja. Namun, beliau menolak gerakan Nipponisasi penghormatan kepada Tenno Heika Kaisar Putra Dewa Matahari di Tokio. Dinilai bertentangan dengan aqidah Islam yang berkiblat ke arah Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah.

Sumber: Doc. Pribadi

Pembentukan Tiga A

Selain itu, Balatentara Djepang menjalankan kebijakan *check and balance* - keseimbangan politik. Dibentuklah organisasi pengimbang *Shumubu*, yakni Tiga A - Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Dari ketiga pengertian Nippon dari Tiga A ini, sebenarnya Balatentara Djepang tidak beda dengan *Deutschland uber alles* – Jerman di atas segala bangsa. Pengertian ini, dialih bahasakan oleh Jepang di Asia menyebutnya sebagai Pemimpin-*Leader,* Pelindung-*Protector* dan Cahaya- *Light of Asia*. Dengan kata lain, Jepang mengklaim dirinya paling atas di antara seluruh ras bangsa Asia.

Tiga A dipimpin oleh Shimizu bersama Samsoedin tidak mampu memobilisasikan potensi umat Islam. Hal ini terjadi sebagai akibat Tiga A dipimpin oleh Samsoedin - Parindra yang tidak memiliki akar di kalangan umat Islam sebagai mayoritas rakyat Indonesia. Apalagi Parindra menurut M.C. Ricklefs sebagai partai sekuler dan anti Islam.[23] Hal ini dapat terjadi karena Balatentara Djepang sebagai penjajah dengan sengaja, menggunakan orang-orang mantan pimpinan Parindra yang berhaluan sekuler dan anti Islam sebagai pengimbang gerakan Islam.

Organisasi baru untuk umat Islam buatan Balatentara Djepang merupakan bagian dari *Tiga A* adalah *Persiapan Persatoean Oemmat Islam - P.P.O.I* dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso ketua Partai Sjarikat Islam Indonesia - P.S.I.I. Istilah persiapan persatuan memberikan pengertian bahwa Balatentara Djepang berupaya menunda terbentuknya kesatuan dan persatuan umat Islam.

Dapat dipahami kalau Balatentara Djepang juga merasa takut seperti penjajah Barat terdahulu. Juga merasa tidak aman sebagai penjajah, kalau rakyat atau umat Islam kompak bersatu. Pembuatan wadah baru, *Persiapan Persatoean Oemmat Islam* hanya sebagai penyaluran aktivitas mantan pimpinan orsospol Islam setelah pembubaran ormas dan orpol Islam. Oleh karena itu, secara struktural *Persiapan Persatoean Oemmat Islam* merupakan bagian dari *Tiga A*. Dengan kata lain,

23 Pada umumnya, umat Islam tidak memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Parindra. Walaupun Parindra sebagai partai sekuler dan anti Islam, tetapi umat Islam menghargai nama pemimpin Parindra dan menerimanya untuk dijadikan nama jalan atau nama gedung yang bersejarah lainnya. Apakah hal ini terjadi, menurut Boeng Karno dalam *Dibawah Bendera Revolusi*, sebagai akibat Ulama kurang *feeling*-nya terhadap sejarah sebagai tulisan. Tidak mampu menangkap makna api sejarahnya.

Shimitzu bersama Samsoedin dari Partai Indonesia Raja – Parindra[24], mengawasi aktivitas Persiapan Persatoean Oemmat Islam yang dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso.

Dapat dibayangkan sikap Abikoesno Tjokroasoejoso terhadap Samsoedin Parindra. Padahal, pada masa menjelang akhir kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, Parindra menganjurkan agar rakyat tetap setia atau bekerjasama dengan penjajah Belanda. Setelah Kapitulasi Kalijati, 8 Maret 1942, tiba-tiba berbaliklah orang-orang Parindra bekerjasama dengan Balatentara Djepang dan ditugasi mengawasi aktivitas Abikoesno Tjokrosoejoso dalam memim pin P.P.O.I.

Kebijakan Islamnya Balatentara Djepang, disebut oleh Harry J. Benda, Nippon's Islamic Grass Roots Policy, suatu kebijakan lebih bertumpu pendekatan kepada Kiai dan Ulama desa. Sepintas sangat beda tujuannya kalau dibandingkan dengan sistem Tanam Paksa, 1830-1919 M, yang menjadikan desa sebagai sumber tenaga kerja, komoditi pasar dunia dan dana bagi pemerintah kolonial Belanda dan Keradjaan Protestan Belanda. Seolah-olah program Balatentara Djepang berbalik akan memajukan kehidupan Ulama dan umat Islam di desa-desa yang tertindas oleh pemerintah Kristen Belanda. Namun, dalam praktik lanjutnya tidak beda. Dapat dikatakan setali tiga uang.

Ulama desa ditindas dengan berbagai kewajiban menyerahkan hasil buminya. Di bawah penindasan Balatentara Djepang itu, justru dari Ulama desa timbul perlawanan bersenjata. Sebelum penulis bahas masalah pemberontakan Ulama, terlebih dahulu penulis lanjutkan masalah kebijakan Balatentara Djepang kepada Ulama desa tanpa melalui pendekatan pimpinan ormas dan orpol yang pernah ada sebelumnya.

---

24 M.C. Ricklefs, 1991. *Op.Cit.*, hlm. 287 menjelaskan bahwa Partai Indonesia Raja – Parindra, Desember 1935, merupakan peleburan dari Boedi Oetomo, Persatoean Bangsa Indonesia, sebagai partai moderat dan pada dasarnya berbau Jawa. Partai ini dipimpin oleh Dr. Soetomo yang bersikap konservatif dan sekuler serta anti Islam. Pandangan Parindra dan Dr. Soetomo itu tidak pernah dituliskan dalam Sejarah Indonesia pada masa pemerintahan Orla dan Orba.

W. WONDOAMISENO

Diangkat oleh Balatentara Djepang sebagai Ketua pada 1363 H/1944 M, Madjlis Islam A'la Indonesia yang pernah didirikan pada 1356 H/1937 M. Pengangkatan karena Balatentara Djepang tidak lagi mampu menghadapi serangan balik Sekoetoe di semua fron. Mereka berharap agar umat Islam tetap membantu memenangkan Perang Asia Timur Raya, sekaligus bertujuan sebagai peredam agar para Ulama dan mantan pimpinan partai politik tidak berpihak pada gerakan protes Pesantren Soekamanah Tasikmalaya dan Lohbener Indramayu Cirebon.

Sumber: *www.ency.tcv.pl*

> Setelah secara de facto parpol Islam telah dibubarkan, Balatentara Jepang tetap berupaya memisahkan Ulama dari pimpinan partai politik Islam. Disertai kerjasama dengan Samsoedin, mantan pimpinan Parindra dalam Tiga A dalam mengawasi aktivitas Ulama dan mantan pimpinan partai politik Islam. Kenyataannya, kerjasama dengan mantan pimpinan Parindra, tidak berhasil memobilisasikan rakyat. Apalagi, setelah invasi Jepang di wilayah Pasifik dihentikan di Guadalkanal oleh Sekoetoe, 7 Agustus 1942, Balatentara Djepang mencoba mengubah kebijakan teritorialnya dengan lebih mendekat kepada Ulama yang benar-benar berpengaruh besar di kalangan rakyat.
>
> Tambahan lagi setelah Sekoetoe berhasil menembak jatuh pesawat Admiral Isoroku Yamamoto oleh Letnan Thomas Lanphier dalam pertempuran udara di atas Pulau Bougenville, 18 April 1943. Diikuti dengan direbutnya Pulau Gilberts di perairan Australia. Selanjutnya, adanya peristiwa yang menjadikan Kekaisaran Shinto Djepang semakin merasa terancam, setelah Kepulauan Aleutian, Pulau Allu dan Pulau Kiska jatuh kembali kepada Sekutu. Dampaknya, jalan ke Tokyo, ibukota Kekaisaran Shinto Djepang, sudah semakin dekat.

Di bawah kondisi itu, Gunseikan Mayor Jenderal Shinsichiro Kokubu, Maret 1942-Mei 1943, setelah jatuhnya Guadalkanal, 7 Agustus 1942, pada 4 September 1942 melalui Tiga A, diadakan pertemuan dengan Ulama dan mantan pimpinan partai politik Islam di Hotel des Indes di Jakarta. Belum pernah Ulama diundang dalam pertemuan dengan pimpinan negara dan mengambil tempat di hotel pada masa penjajahan pemerintah kolonial Belanda.

Dalam pertemuan ini, Balatentara Djepang mengizinkan Ulama, pada 4 September 1942, menghidupkan kembali Madjlis Islam A'la Indonesia - M.I.A.I yang pernah didirikan pada 15 Rajab 1356 - 21 September 1937, dengan W. Wondoamiseno sebagai ketuanya. Dengan dihidupkannya kembali Madjlis Islam A'la Indonesia – M.I.A.I yang didirikan oleh Persjarikatan Moehammadijah, Nahdlatoel Oelama, Persatoean Islam dan Al-Irsjad serta organisasi pendukung lainnya, Partai Sjarikat Islam Indonesia - P.S.I.I dan Partai Islam Indonesia - P.I.I otomatis sebagai organisasi pendiri secara tidak langsung diperlonggar untuk mengadakan aktivitas organisasinya.

Senin 13 Sept. 2603 — No. 217

Asia-Raya

Poesat persoerat kabaran di Djawa

Tahoen ke II — Halaman 1

Kaoem Moeslimin Indonesia toeroet meminta berdirinja Barisan Pendjaga Poelau Djawa

Kaoem Bangsawan djoega berbangkit membela Tanah Air

Dipersembahkan Kehadapan Padoeka Jang Moelia SAIKO SIKIKAN Jang bersemajam di Djakarta

Kami sekalian jang bertanda tangan dibawah ini:

1. K. H. M. Mansoer
2. K. H. R. Adnan
3. Dr. H. A. K. Amaroellah
4. Goeroe H. Mansoer
5. Goeroe H. Cholid
6. K. H. Abdoel Madjid
7. Goeroe H. Jacoeb
8. K. H. Djoenaidi
9. Hadji Muchtar
10. H. Moh. Sodri

Keamoenanja bertempat tinggal di Djakarta memberanikan diri mempersembahkan soerat permohonan ini, karena kami sekalian jakin akan kemoerahan hati Padoeka Jang Moelia, akan bersoedi oentoek memberikan perhatian terhadap soerat persembahan kami sekalian ini;

Adapoen jg. mendorongkan kami sekalian memberanikan diri, jaitoe sebagaimana P. J. M. telah ma'loemi, bahwa pendoedoek Poelau Djawa hampir seloeroehnja terdiri dari oemmat Islam;

Kaoem Moeslimin Indonesia, choesoesnja jang berada di Djawa, 350 tahoen lamanja telah menderita kesengsaraan karena tindasan dan tekanan, pendjadjahan Imperialisme Barat;

Berkah meletoesnja peperangan di Asia Timoer Raja menghabiskan riwajat pendjadjahan itoe dan menghidoepkan kembali djiwa dan semangat kaoem Moeslimin Indonesia jang telah tertindas kekoeatan angkara moerka Imperialisme Barat itoe;

Semangat kaoem Moeslimin hidoep kembali karena pertolongan Allah S. W. T., dengan Balatentara Dai Nippon sebagai sebabnja;

Kaoem Moeslimin Indonesia bersjoekoer kehadirat Allah S. W. T. dan berterima kasih sesoenggoeh-soenggoehnja kepada Balatentara Dai Nippon;

Politik Pemerintah Belanda jang [illegible] bangsa Indonesia [illegible] dengan pelbagai [illegible] daja — dan berhasil djoega — [illegible] semangat kaoem Moeslimin [illegible] Indonesia; [illegible] pertolongan jang diberikan oleh [illegible] Dai Nippon diertai [illegible] jang [illegible] membangkitkan kembali [illegible] kaoem Moeslimin Indonesia [illegible] jang besar [illegible] dengan [illegible] kaoem [illegible] Indonesia, akan tetapi [illegible] apa jang [illegible] kaoem Moeslimin Indonesia [illegible] perboeat; [illegible] tahoen lamanja, [illegible] dan toentoetan dari [illegible]

hal-hal jang menghalangi kemadjoean bangsa kita. Sekarang oleh kebidjaksanaan Pemerintah Dai Nippon bangsa kita sedang madjoe dengan pesatnja kearah Kemakmoeran Bersama di Asia Timoer Raja.

Tetapi kemadjoean itoe akan terhenti setengah djalan kalau kemenangan achir tidak tertjapai oleh pihak bangsa-bangsa Asia. Karena itoe moedah [illegible] permohonan tersebut disambut dengan gembira oleh rakjat oemoemnja.

Nasihat

JAMAMOTO SOMOEBOETJO KAKKA.

Pada hari ini, poekoel 10.30, [illegible] orang wakil dari Oemmat Islam telah datang di Goenseikanboe oentoek menjampaikan soerat pada P. J. M. Saiko Sikikan. Kedatangan itoe diterima oleh Djenderal-major Jamamoto Somoeboetjo, sedang soeratnja mengenai permohonan pembentoekan Barisan Pembela Islam. Isi soerat itoe kita moeat dilain bagian.

Lebih djaoeh Jamamoto Somoeboetjo Kakka memberi nasihat dan menjatakan, bahwa sedjak Balatentara Nippon mendarat dipoelau Djawa, oemmat Islam bangsa Indonesia [illegible] menganjoerkan [illegible] pertjaja mempertjajai. Sikap itoe sangat dihargai oleh Pemerintah Balatentara. [illegible] dan permohonan itoe akan disampaikan dengan segera kepada Saiko Sikikan, agar soepaja Barisan Pembela Islam itoe dapat segera dibentoek.

Dalam waktoe peperangan ini, kata Jamamoto Somoeboetjo, soal agama dan semangat adalah soal-soal jang penting. Berhoeboeng dengan itoe, toean-toean sekalian sebagai wakil oemmat Islam, haroes bekerdja giat-giatnja membangkitkan semangat berdjoeang oentoek membela tanah air sendiri.

Sekolah Opsir

KEINGINAN pendoedoek oentoek membantoe sekeras-kerasnja pembentoekan Barisan Soekarela atau Tentara Kebangsaan, ternjata makin meloeas dan makin tebal. Soeara gembira dan sambоetan baik terdengar dari mana-mana. Ada jang hanja dengan mengemoekakan pernjataannja dengan soerat, karangan ataupoen dengan lisan. Tetapi ada poela jang [illegible] menjediakan oeang, jang kiranja dipergoenakan kalau tjita dan kehendak pendoedoek itoe dikaboelkan oleh Pemerintah.

Sri Padoeka Solo-Ko misalnja telah menitahkan [illegible] menjediakan oeang sedjoemlah f 10.000 boeat menjokong Barisan itoe kalau nanti didadakannja. Hal ini semoea soenggoeh menggembirakan. Dan kita sekali lagi toeroet mengharap agar soepaja permintaan oemoem itoe lekas dapatlah dilaksanakan.

Kitapoen toeroet menjetoedjoei pendapatan oemoem, bahwa keinginan jang loeas dari pendoedoek oentoek [illegible] menoendjoekkan djasa dalam hal pembelaan negeri itoe, soedah tentoe karena pendoedoek djoega merasa perloe menoendjoekkan rasa terima kasih atas pemberian beberapa kesempatan kepada pendoedoek oentoek toeroet mengambil bagian dalam Pemerintahan. Dan kita jakin, bahwa makin besar tanggoeng djawab atas pemerintahan negeri diberikan kepada pendoedoek, tentoe makin besar poela rasa gembira itoe, poen makin besar poela kerelaan dan keinginan pendoedoek oentoek berkorban dan mempersembahkan harta-djiwanja oentoek kepentingan negara.

Dalam toelisan sambоetan kita atas keinginan mengadakan Barisan Soeka Rela atau Tentara Kebangsaan itoe dengan beberapa patah kata kita telah memadjoekan pengharapan agar soepaja lekaslah dapat djoega didirikan sekolah² opsir disini. Sebab opsir² itoelah jang nanti mendjadi djiwa dan toelang poenggoeng tentara. Apalagi karena sekarang ternjata, bahwa makin banjak fihak jang mengharapkan tidak hanja didirikannja Tentara Soeka Rela belaka, tetapi dibentoeklah soenggoeh² soeatoe Tentara Kebangsaan, Balatentara Indonesia. Oentoek tentara jang demikian soedah tentoe tidak boleh tidak, haroes ada pemimpin-pemimpinnja, opsir² bangsa kita sendiri, dari jang rendahan sampai jang tinggi.

Menoeroet pendapat kita, sebenarnja patoet sekali kita bangsa Indonesia mendirikan sebоeah monoemen, tanda peringatan, bagi Saudara Toea kita, bagi Balatentara Dai Nippon, jang dalam waktoe jang pendek sekali menoeroet djalan sedjarah, telah dapat memberikan atau menjiptakan begitoe banjak keadaan² baroe dalam negeri kita, jang dapat menambah kepertjajaan kita pada diri sendiri, poen menambah kepertjajaan, bahwa kita memang djoega sanggoep bangsa jang dapat toeroet memberikan bantoean baik, oentoek menjoesoen Asia Timoer Raja.

Dan menilik besarnja hadjat pendoedoek Djawa akan mengadakan Tentara Kebangsaan itoe, poen menilik sangat perloenja kita ekasi dapatlah membantoe sekoeat-koeatnja Saudara Toea kita dalam peperangannja sekarang, maka tanda peringatan, monoemen jang sebaik-baiknja pada waktoe ini bagi kita tidak ada lain daripada mendirikan sebоeah SEKOLAH MILITER, Sekolah Opsir, atas biaja pendoedoek sendiri, tetapi jang [illegible] [illegible] Pemerintah. [illegible] apakah jang [illegible] oentoek pendidikan opsir tentara itoe. Akan tetapi pendoedoek dapat menjoembang [illegible]. Dan kita pertjaja djikalau [illegible] sekarang tetap berkobar-kobar, maka [illegible] biaja oentoek [illegible] sekolah opsir Indonesia itoe dapat kita kumpoelkan beramai-ramai.

Djikalau Pemerintah mengizinkannja, maka dapatlah nanti dibentoek seboeah panitia oentoek rentjana ini jang terdiri dari pemoeka² kita.

Lain dapatlah kita serahkan kepada pendoedoek oemoemnja, oentoek menghadiahkan tiap-tiap orang jang dapat disediakan oentoek menjokong [illegible] itoe.

Bagaimana kita: Seboeah sekolah opsir Indonesia [illegible]!

W.

Tjiang Kai Sjek mesti insaf!

Asia Timoer kini dipimpin Nippon kearah

Sumber: *Doc. Pribadi*

Dalam pertemuan ini, Balatentara Djepang mengizinkan Ulama, pada 4 September 1942, menghidupkan kembali Madjlis Islam A'la Indonesia - M.I.A.I yang pernah didirikan pada 15 Rajab 1356 - 21 September 1937, dengan W. Wondoamiseno sebagai ketuanya. Dengan dihidupkannya kembali Madjlis Islam A'la Indonesia – M.I.A.I yang didirikan oleh Persjarikatan Moehammadijah, Nahdlatoel Oelama, Persatoean Islam dan Al-Irsjad serta organisasi pendukung lainnya, Partai Sjarikat Islam Indonesia - P.S.I.I dan Partai Islam Indonesia - P.I.I otomatis sebagai organisasi pendiri secara tidak langsung diperlonggar untuk mengadakan aktivitas organisasinya.

Di samping itu, sesudah jatuhnya Guadalkanal oleh Sekoetoe, 7 Agustus 1942, tiga bulan kemudian, pada 7 Desember 1942, Balatentara Djepang mengadakan pertemuan dengan 32 Ulama dari perwakilan Ulama dari Pulau Jawa, di Jakarta. Pada pertemuan ini, Jepang memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Ulama. Diizinkanlah para Ulama untuk masuk ke istana. Penghormatan yang demikian tinggi, tidak pernah diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tentu ditargetkan dengan penghormatan tersebut, diharapkan para Ulama semakin sadar betapa pentingnya kehadiran Balatentara Jepang sebagai "Saudara Tua" membebaskan umat Islam dari penindasan penjajahan pemerintah Kristen.

Sumber: Almanak

Gedung MIAI di Jakarta, tempat latihan Ulama, Jalan Imamura No. 1 - Jakarta.

Disusul dengan pertemuan 59 Ulama dengan Balatentara Jepang dari seluruh Jawa di Bandung, pada permulaan 1943.[25] Namun, pada pertemuan ini terjadi ketegangan akibat penolakan Dr. Abdoel Karim Amroellah melakukan *saikeirei* atau penghormatan kepada Tenno Heika ke arah Tokio. Penolakan ini karena Dr. Abdoel Karim Amroellah memandang *seikeirei* sebagai *ruku* ke Tokio. Berarti sebagai penyembahan terhadap Tenno Heika yang diyakini dalam ajaran Shinto sebagai Anak Dewa Matahari. Jelas hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Tidakkah Fir'aun mengaku juga sebagai Keturunan Dewa Ra atau Dewa Matahari.

Balatentara Djepang tidak memahami keyakinan Ulama bahwa Islam bukan sebatas sebagai ajaran ritual semata. Melainkan Islam sebagai *way of life*. Dengan pengertian Islam sebagai landasan petunjuk keseluruhan tingkah laku kehidupan umat Islam. Demikianlah penjelasan oleh Abdoel Kahar Moezakkir dari Perserikatan Moehammadijah dalam pertemuan Ulama dengan Balatentara Djepang yang diselenggarakan pada pertengahan Oktober 1943. Pertemuan ini dilatar belakangi adanya serangan Sekoetoe di Papua New Guinea yang terjadi pada pertengahan 1943.

Upaya menghidupkan kembali Madjlis Islam A'la Indonesia - M.I.A.I, 4 September 1942, disertai pertemuan Ulama di Jakarta, Desember 1942, dan Bandung, pertengahan Oktober 1943, di atas menurut Harry J. Benda menimbulkan rasa iri hati mantan pimpinan organisasi non religi. Hal ini terjadi sebagai dampak dari sikap pimpinan Gerindo, Sartono, A.K. Gani, Amir Sjarifoedin dan pimpinan Parindra, serta Partai Kristen dan Katolik, yang anti Jepang dan menganjurkan rakyat agar tetap setia kepada pemerintah kolonial Belanda.

Sebenarnya, Balatentara Djepang sebagai penjajah, tidak berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan politiknya tidak mungkin tanpa menciptakan *balance of politic* – politik keseimbangan, antara organisasi nasional Islam dan organisasi non religius. Bahkan, Balatentara Djepang juga melancarkan politik *divide and rule* antara organisasi Islam Nahdlatoel Oelama, Persjarikatan Oelama, Matla'oel Anwar di satu pihak dengan Persjarikatan Moehammadijah, Persatoean Islam, Al-Irasjad di lain pihak, seperti yang pernah dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sekalipun organisasi ini sudah dilarang melakukan aktivitas organisasinya. Namun, mantan pimpinannya tetap dipecahkan wawasan dan pemikirannya. Demikian pula dilakukan pula *divide and rule* antara *Shumubu* – Kantor Oeroesan Agama dengan Persiapan Persatoean Oemat Islam –P.P.O.I dan Madjlis Islam A'la Indonesia – M.I.A.I yang diberi hak hidup kembali.

25 Pertemuan Ulama dengan Balatentara Djepang di Bandung diselenggarakan setelah pembentukan Tentara Pembela Tanah Air - Peta yang didirikan pada 3 Oktober 1943.

Disusul dengan dikembangkannya politik divide et impera, dibangunlah Poesat Tenaga Rakjat - Poetera, 8 Maret 1943, enam bulan setelah Madjlis Islam A'la Indonesia didirikan kembali. Tujuannya didirikan Poetera adalah untuk mengimbangi dan mengawasi Ulama dan umat Islam. Adapun Poetera dipimpin oleh Boeng Karno dari Partai Nasional Indonesia - PNI, Boeng Hatta dari Pendidikan Nasional Indonesia – P.N.I Baroe, Ki Hadjar Dewantara dari Taman Siswa dan K.H. Mas Mansoer dari Persjarikatan Moehammadijah. Keempat pimpinan Poetera ini disebut sebagai Empat Serangkai. Mengapa Balatentara Djepang mengangkat K.H. Mas Mansoer dalam Poetera?

Pengangkatan K.H. Mas Mansoer dari Persjarikatan Moehammadijah dalam Poetera tentu Balatentara Djepang mencoba mempraktikkan kesimpulan dari hasil penelitian Snouck yang menyatakan setiap priode baru dalam perkembangan sejarah peradaban mengharuskan adanya suatu organisasi keagamaan yang mengambil bagian mengadakan revisi umum dalam perbendaharaan sejarah tersebut. Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari proses tersebut.

Dari rumusan ini, tidak mungkin Poetera sebagai organisasi non agama, akan berhasil memobilisasikan rakyat, kalau tanpa adanya kesertaan Ulama di dalamnya. Walaupun sudah ada Ki Hadjar Dewantara pimpinan aliran Kebatinan Seloso Kliwon atau Taman Siswo. Namun, Balatentara Djepang dapat memastikan akan menemui kegagalan seperti yang dialami oleh pemerintah kolonial Belanda yang menggunakan Boedi Oetomo, Persatoean Bangsa Indonesia, dan Partai Indonesia Raja dalam mengimbangi gerakan Islam yang tampil sebagai gerakan anti imperialis Barat.

> Oleh karena itu, Balatentara Djepang menyertakan seorang Ulama dalam kepemimpinan Poetera, yaitu K.H. Mas Mansoer dari Persjarikatan Moehammadijah. Sekaligus bertujuan pula untuk membelah kekuatan Ulama dari Persjarikatan Moehammadijah dengan Nahdlatoel Oelama yang memimpin Kantor Oeroesan Agama dan Madjlis Sjoero Moeslimin Indonesia - Masjoemi. [26]

26 Sesudah Proklamasi, 17 Agutus 1945 dengan adanya Makloemat X 3 November 1945 oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, umat Islam Indonesia hanya dalam waktu empat hari kemudian berhasil mendirikan Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi pada 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364 di Jogyakarta. Jadi, terdapat dua periode Masjoemi. Pertama, pada masa pendudukan Balatentara Jepang (1944 M / 1363 H). Kedua, pada masa Republik Indonesia sebagai Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi, 1945 M / 1364 H.

TENNO HEIKA HIROHITO

Pada saat Kemal Pasha mengubah Kesultanan Turki menjadi Republik Sekuler Turki, 1924 M, *Tenno Heika* Hirohito dari Kekaisaran Shinto Djepang mempropagandakan dirinya memeluk Islam dan menjadikan dirinya sebagai Khalifah pengganti Sultan Turki. Sasaran propagandanya adalah Ulama dan Santri Indonesia.

Para Ulama dan Santri ditargetkan agar bersedia bangkit menjadi pendukung utama pelaksanaan *Nippon Islamic Grass Root Policy* - Kebijakan Islam Nippon terhadap Ulama dan Santri di desa-desa, bersama Dai Nippon memenangkan Perang Asia Timoer Raja melawan Sekoetoe, yakni Amerika, Inggris, dan Belanda.

Sumber: *www.wikimedia.org*

Menjadi pertanyaan, mungkinkah upaya Balatentara Djepang dalam menggerakkan Ulama dan umat Islam berhasil sukses, dengan cara membubarkan organisasi sosial pendidikan dan partai politik yang pernah dipimpinnya? Jawabannya, menurut M.C. Ricklefs, K.H. Mas Mansoer tidak dapat aktif dalam Poetera. Besar kemungkinannya karena kondisi kesehatannya terganggu.[27]

Demikian pula Ki Hadjar Dewantara lebih mengonsentrasikan pemikirannya terhadap Taman Siswa yang menghadapi berbagai kesukaran di zaman Perang Pasifik. Kenyataan ini menjadikan Poetera hanya diberi hak hidup sampai Januari 1944. Dengan kata lain, hanya berumur sepuluh bulan.

Secara terbuka, Balatentara Djepang melalui Sendenbu – Departemen Penerangan, berupaya meningkatkan kesadaran para Ulama terhadap bahaya penjajahan Barat atau penjajah Kristen: Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Namun, tidak pernah menampakkan bahwa sebenarnya Kekaisaran Shinto Djepang juga sebagai penjajah Timur atau penjajah Shinto. Malahan, Sendenbu dalam propagandanya, menyatakan setelah Kesultanan Turki ditumbangkan oleh Kemal Pasha, 1924 M, Kaisar Jepang akan masuk Islam dan Tokio akan dijadikan pusat kekhalifahan Islam baru di Asia. Sendenbu dari sebelum pendudukan, menjadikan Ulama dan umat Islam target memenangkan Perang Asia Timoer Raja.

Depolitisasi Ulama dan Deislamisasi Politik

Gerakan memobilisasikan Ulama dengan umat Islam, ditingkatkan setelah Sekoetoe melancarkan serangan balik yang dirasakan melemahkan kedudukan pertahanan Balatentara Djepang. Perlu dicatat, bagaimanapun juga upaya peningkatan memobilisasikan Ulama dan umat Islam, tidak berhasil karena Balatentara Djepang tetap berpijak pada kebijakan dasarnya, depolitisasi Ulama, deislamisasi politik dan depolitisasi Islam .

Dengan pengertian Balatentara Djepang berupaya menciptakan Ulama yang tuna politik - depolitisasi Ulama. Dengan menciptakan pemikiran politiknya dijauhkan dari pengaruh Islam - deislamisasi politik. Sebaliknya, gerakan Islam dipisahkan dari gerakan politik - depolitisasi Islam. Sebagai penjajah, Balatentara Djepang tidak lepas seluruh kebijakan politiknya dari motivasi divide and rule. Untuk tujuan ini, Balatentara Djepang menempuh cara:

27 K.H. Mansoer kesehatannya semakin memburuk ketika ditangkap oleh tentara NICA dan pada 25 April 1946, wafat dalam tahanan tentara NICA.

Pertama, semula tetap meniadakan segenap orsospol yang didirikan pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional. Kemudian, dalam masa konsolidasi *Saiko Shikikan* di Jawa, Letnan Jenderal Kumashiki Harada, pada 1 Agustus 1943, setelah organisasinya dibubarkan memberikan kesempatan aktif kembali mantan pimpinan orsospol, duduk dalam *Chuo Sangi In* - Dewan Penasihat Pusat di Jakarta. Di daerah dibangun pula, *Syuu Sangi Kai* - Dewan Penasihat Daerah.

Pembentukan Dewan Penasihat ini, tidak beda fungsinya dengan *Volksraad* - Dewan Rakyat, 1918-1942 M. Wakil-wakil yang duduk dalam dewan tersebut tidak lagi menamakan dirinya sebagai wakil dari orsospol yang pernah dipimpinnya. Melainkan menjadi Wakil Kota.

Dengan kata lain, Balatentara Djepang menjalankan kebijakan teritorial *deparpolisasi* dan *deormasisasi.* Dibubarkannya segenap parpol dan ormas. Kemudian, pimpinan dan anggota *Chuo Sangi In* ataupun *Chuo Sangi Kai,* diangkat bukan sebagai wakil orpol dan ormas, diubah menjadi Wakil Kota Bergaji.

Dra. Arniati Presedyawati Herkusumo menuturkan uang jabatan untuk *Gicho* atau Ketua *Chuo Sangi In* f.6000,-/tahun. Wakil Ketua f.4.800,-/tahun. Ditambah dengan uang sidang setiap sidang f.15,-/hari. Uang penginapan f.30,-/malam. Bagi anggota dewan yang menggunakan jasa transportasi kereta api, digratiskan, dan kelas satu.

Praktik pelaksanakan *deparpolisasi* dan *deormasisasi* menjadikan Boeng Karno bukan sebagai Wakil PNI melainkan sebagai Wakil Kota Jakarta. Ki Bagoes Hadikoesoemo bukan Wakil Persjarikatan Moehammadijah, melainkan sebagai Wakil Kota Jogjakarta, dan K.H. Mas Mansoer dari Persjarikatan Moehammadijah, serta Mr. Sartono dari Gerindo sebagai Wakil Jakarta *Tokubetu Si.* Demikian pula, Otto Iskandardinata tidak mewakili Pagoejoeban Pasoendan, melainkan Wakil Kota Bandung.

Berdasarkan Osamu Seirei 36/2603 yang dikeluarkan oleh *Saiko Shikikan,* dibentuklah *Chuo Sangi In* dengan anggotanya terdiri atas: 23 wakil diangkat oleh Saiko Shikikan, 18 wakil dipilih oleh *Syuu Sangi Kai* dan *Tokubetsu Si,* masing-masing seorang wakil, serta dua orang wakil per wakilan Kooti. Seluruhnya, *Chuo Sangi In* berjumlah 43 orang wakil. Dibuka pada 17 Oktober 1943. Dengan Ir. Soekarno sebagai *Gicho* – Ketua, dan R.M.A.A. Koesoemo Oetojo dan dr. Boengaran sebagai *Huku Gicho* - Wakil Ketua.[28]

28 Dra. Arniati Prasedyawati Herkusumo.1984. *Chu Sangi In, Dewan Pertimbangan Pusat, Pada Masa Pendudukan Jepang.* PT Rosda Jayaputra. Bandung, hlm. 45.

Dengan semakin terdesaknya posisi Balatentara Djepang di Pasifik dan guna memperoleh dukungan dari segenap rakyat Indonesia di P. Jawa, dikeluarkannya perintah penambahan jumlah anggota Chuo Sangi In dari 47 wakil menjadi 60 wakil, pada 7 November 1944.

Guna melancarkan kerja Dewan Penasihat atau Dewan Pertimbangan ini, Ir. Soekarno sebagai Gicho - Ketua, membagi kerja Chuo Sangi In dalam empat Bunkakai (Panitia Kecil):

Bunkakai Pertama diketuai oleh Otto Iskandardinata.
Dengan tugas membahas dan memperkuat dan melindungi Tentara Pembela Tanah Air.

Bunkakai Kedua diketuai oleh R.P. Pandji Saroso.
Dengan tugas pengerahan tenaga kerja untuk kepentingan perang dan masyarakat.

Bunkakai Ketiga diketuai oleh Mr. Sartono.
Dengan tugas meneguhkan susunan penghidupan rakyat.

Bunkakai Keempat diketuai oleh R.M.A.A. Koesoemo Oetojo.[29]
Dengan tugas memperbanyak produksi.

Dari nama-nama tokoh di atas, terbaca strategi pembinaan teritorial Balatentara Djepang, menganut teori Nicollo Macheavelli bahwa orang-orang tadinya sebagai lawan, kalau diangkat menjadi kawan kerja dengan memberikan kedudukan yang terhormat mereka akan bersikap sangat patuh karena merasa bersalah dan takut.

Di atas, terbaca nama-nama tokoh yang terlibat dalam selebaran Mr. Sartono setelah melakukan perebutan kepemimpinan Madjelis Rakjat Indonesia dari Abikoesno Tjokrosoejoso, 16 November 1941. Kemudian, melalui selebaran menganjurkan agar rakyat tetap setia kepada pemerintah kolonial Belanda dan Keradjaan Protestan Belanda, 13 Desember 1941. Selain Mr. Sartono sebagai pendukung pemerintah kolonial Belanda dan Keradjaan Protestan Belanda, juga anti Jepang. Namun, mengapa diangkat sebagai anggota Chuo Sangi In? Tentu, dalam pandangan Balatentara Djepang, mereka dimanfaatkan berdasarkan teori Nicollo Macheavelli, kesadaran rasa salah dan takutnya akan berbalik menjadi pembantu setia Balatentara Djepang.

29 Periksa Ahmad Mansur Suryanegara, 1995. *Op.Cit*, hlm. 132-133 dapat dibaca secara lengkap nama anggota-anggota dan perwakilan kotanya, dari tiap-tiap *Bunkakai*.

Dari teori perang, Carl von Clausewitz dalam *On War*, mengingatkan kalau tentara dalam kondisi terjepit serangan lawan tidak dapat dipersamakan dengan tembok menjelang runtuh dan dapat dipastikan akan menjadi puing yang berkeping-keping dan hancur. Perang sebagai *the realm of uncertainty time* - situasi yang tiada kepastian, menang atau kalahnya. Suatu kekalahan masih dapat diubah menjadi kemenangan kalau tentara yang sedang terkepung mampu mengorganisasikan, memanfaatkan dan mengerahkan segenap tenaga rakyat secara maksimal maka selamatlah dari keruntuhan.

Dari teori perang Carl von Clausewitz ini, terbaca mengapa alasan Balatentara Djepang membangun *Chuo Sangi In* dan *Syuu Sangi Kai* serta *Jawa Hokokai*. Kemudian, dijadikan motor penggerak pengerahan tenaga dan pembangkit kemampuan produksi segala sesuatu yang berkaitan dengan logistik pendukung perang. Tambahan lagi diikuti dengan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air - Peta. Dari sini, Balatentara Djepang akan dapat melepaskan dirinya dari jepitan atau kepungan Tentara Sekoetoe.

Selain itu, membentuk organisasi imbangan antar tokoh organisasi non agama diangkat dalam bidang legislatif dan eksekutif dengan organisasi nasionalis Islam diangkat dalam bidang militer. Dengan tujuan, selain untuk mensukseskan perangnya, sekaligus dijadikan media untuk pelaksanaan *divide and rule*. Pelaksanaan politik *divide and rule* dapat dibaca dalam hal pembentukan organisasi baru:

Shumubu - Kantor Oeroesan Agama yang dipimpin oleh Kolo nel Horie dan Tiga A yang dipimpin oleh Shimitzu dan Samsoedin dari Partai Indonesia Raja - Parindra, keduanya digunakan untuk mengimbangi organisasi *Persiapan Persatoean Oemat Islam* yang dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso mantan pimpinan Partai Sjarikat Islam Indonesia - P.S.I.I.

Antara Poesat Tenaga Rakjat - Poetera, Maret 1943 - Januari 1944, yang dipimpin Ir. Soekarno mantan pimpinan Partai Nasional Indonesia - PNI, Drs. Mohammad Hatta mantan pimpinan Pendidikan Nasional Indonesia - P.N.I Baroe, dan Ki Hadjar Dewantara mantan pimpinan Taman Siswa, serta K.H. Mas Mansoer mantan pimpinan Persjarikatan Moehammadijah, digunakan untuk mengimbangi Madjlis Islam A'la Indonesia – M.I.A.I yang diberi hak aktif kembali dan dipimpin W. Wondoamiseno mantan pimpinan Partai Sjarikat Islam Indonesia - P.S.I.I. Juga untuk mengimbangi Madjlis Sjoera Moeslimin Indonesia - Masjoemi, 1363 H/1944 M yang dipimpin oleh Wahid Hasjim, mantan pimpinan Nahdlatoel Oelama.

Dengan pembentukan organisasi baru itu, Balatentara Djepang di Pulau Jawa mencoba mengubah tujuan perjuangan organisasi sosial politik yang didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan cita-citanya menegakkan Indonesia

Merdeka, digantikan dengan semangat kebersamaan oleh Balatentara Djepang dengan tujuan memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Ditanamkan semangat Nipponisasi dalam segala aspek kehidupan, bertujuan mengubah budaya mayoritas bangsa Indonesia, yakni umat Islam dengan budaya Nippon sebagai dasar pembaharuan budayanya. Di bawah suasana perang yang tiada kepastian – the realm of uncertainty, menuntut serba cepat untuk terciptanya pembaharuan segenap sikap umat Islam Indonesia menjadi benar-benar berpihak kepada Balatentara Djepang.

Tujuan ini tidak dapat dilaksanakan dengan tanpa dukungan kalangan Ulama sebagai cendekiawan Muslim yang benar-benar memiliki massa rakyat. Dengan pengalaman sejarahnya, Ulama berani menciptakan perubahan besar budaya rakyat, dengan tanpa ketergantungan dana atau subsidi dari pemerintah kolonial Belanda. Sangat berbeda dengan sikap mental kalangan intelektual produk pendidikan Barat yang disiapkan untuk tidak mampu mandiri dan dicetak sebagai ambtenar atau pegawai yang setia melaksanakan perintah penjajah kolonial Belanda.

Menghadapi realitas situasi Indonesia itu, pilihan Balatentara Djepang jatuh pada Ulama di antara pimpinan bangsa Indonesia. Diikuti dengan gerakan Nipponisasi, sebagai upaya Balatentara Djepang untuk menjadikan Ulama Tuna Politik - Depolitisasi Ulama. Maksudnya, sebagai upaya menciptakan kondisi kesadaran partisipasi aktif Ulama-ulama desa agar tidak lagi bercita-cita memperjuangkan Indonesia Merdeka.

Karena itu, walaupun Ulama berpartisipasi dalam masalah eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kenegaraan pada umumnya, tetapi Balatentara Djepang tetap berupaya menciptakan deislamisasi politik. Dengan kata lain, gerakan para Ulama dalam partisipasinya membela tanah air dan bangsa, dihilangkan kesadaran sejarahnya dengan dijauhkan dari upaya membangkitkan kembali kekuasaan politik Islam atau kesultanan yang pernah dibangun pada masa jayanya.

Bagaimanapun juga, perang menurut Carl von Clausewitz, memerlukan pimpinan yang memiliki the idea of a rapid and accurate decision - ide yang cepat dan pengambilan keputusan yang cepat sekaligus memahami masalah an evalution of time and space - evaluasi waktu dan ruang. Kedua masalah ini oleh Carl von Clausewitz diistilahkan sebagai coup d' oeil. Maksudnya tidak lain adalah pimpinan yang memiliki kecerdasan tinggi.

Dalam pandangan Balatentara Djepang, di Indonesia yang memiliki kemampuan dan berkualitas itu adalah Ulama karena dengan pengalaman sejarahnya dalam perlawanan bersenjata terhadap pemerintah kolonial Belanda, menjadikan Ulama sebagai sosok pemimpin yang memiliki ide pengambil keputusan yang cepat dan akurat - the idea of a rapid and accurate decision.

Pengalaman perlawanan bersenjata yang dimiliki para Ulama pendahulunya yang berlangsung berabad-abad, merupakan kualitas sikap konsisten Ulama, benar-benar anti penjajah Barat. Dalam pelaksanaan ibadahnya, ajaran Islam menjadikan Ulama benar-benar memahami pemanfaatan masalah nilai ruang dan waktu.[30]

Selain itu, Carl von Clausewitz juga menyatakan dalam perang memerlukan sosok pimpinan yang mampu membangkitkan kesadaran berani bertanggung jawab. Balatentara Djepang dalam mempraktikkan teori perang ajaran Carl von Clausewitz dalam *On War*, memilih Ulama yang dinilai sebagai sosok pimpinan yang memiliki *mental habit* - kebiasaan mentalnya, *the courage to accept responsibility* - dorongan berani bertanggung jawab. Dengan istilah lain disebut pula sebagai *courage d'esprit*.

Balatentara Djepang juga memahami pada masa Perang Dunia I, 1914-1919 M, para Ulama melalui *National Congres Centraal Sjarikat Islam* di Bandung, 17-24 Juni 1916, menuntut agar Keradjaan Protestan Belanda mengadakan *Indie Weerbaar* - Pertahanan Indonesia dengan melatih para pemuda dalam organisasi kesenjataan modern.

Saat itu, pimpinan Central Sjarikat Islam menyadari perlawanan terhadap penjajah Belanda, tidak hanya dengan satu cara diplomasi melalui tuntutan di Parlemen yang sedang diusulkan pembentukannya. Melainkan juga harus disiapkan dengan perlawanan bersenjata oleh para pemuda yang terlatih dalam sistem perlawanan organisasi kesenjataan modern. Tujuan utamanya adalah membangkitkan kembali jiwa keprajuritan pemuda. Disadari sedalam-dalamnya oleh pimpinan Centraal Sjarikat Islam tidak mungkin Indonesia Merdeka atau *Zelfbestuur* pelaksanaannya tanpa memiliki tentara. Negara yang merdeka harus memiliki tentara.

Untuk tujuan ini, diperjuangkan saat Indonesia masih terjajah, atau pada saat Keradjaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membangkitkan kesadaran tentang nilai kemerdekaan dengan memperingati seratus tahun terbebas dari penjajahan Perancis. Di bawah situasi ini, *National Congres Centraal Sjarikat Islam Congres-Natico* di Bandung, 1916 M, memutuskan memanfaatkan kondisi Perang Dunia I untuk mengusulkan *Zelfbestuur* dan pembentukan *Indie Weerbaar*.

30 Perhatikan jadwal waktu shalat dengan perubahan menit-menitnya. Demikian pula pada waktu menentukan posisi bulan pada Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Masalah letak derajat bulan dan matahari serta detik waktunya, dijadikan dasar penentuan awal bulan dan akhir bulan Ramadhan, serta perubahan waktu shalat dan *imsak* serta berbuka shaum. Hal ini pertanda Ulama dengan Ilmu Falaknya memiliki kesadaran waktu yang sangat tinggi. Sekaligus memiliki kesadaran wilayah atau masalah ruang.

Dapat dipastikan pemerintah kolonial Belanda memahami bahayanya kalau Indie Weerbaar, Indonesia Parlemen dan Zelfbestuur - Pemerintahan Sendiri benar-benar dibentuk. Oleh karena itu, usul keputusan National Congres Centraal Sjarikat Islam–Natico ditolaknya. Usul pembentukan parlemen dibelokkan dengan pembentukan Volksraad. Perjuangan Ulama, 1916 M, tersebut diperhatikan pula oleh Jepang. Pada saat Perang Dunia I, 1914-1919 M, Jepang masih berpihak kepada Sekoetoe. Selesai perang, Jepang memperoleh tanah jajahan Jerman di Pasifik.

Langkah lanjutnya, Kekaisaran Shinto Djepang berbalik meninggalkan Sekoetoe dan berpihak kepada Jerman dan Italia yang membangun Axis Pact. Dengan target bukan hanya pulau-pulau kecil di Samodra Pasifik, melainkan seluruh Asia Raya di bawah genggamannya. Untuk tujuan itu, Kekaisaran Shinto Djepang perlu mendidik tentaranya memahami sejarah negara-negara Asia Pasifik yang akan dikuasainya. Terutama sejarah perjuangan Ulama di Indonesia.

Balatentara Djepang sangat memerhatikan sejarah Ulama dan upayanya membentuk organisasi kesenjataan modern yang gagal di atas. Kemudian diteruskan oleh Madjlis Islam A'la Indonesia pada saat Keradjaan Protestan Belanda terlibat dalam Perang Dunia II, 1939-1945 M, di Eropa dan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia menghadapi Perang Asia Timoer Raja, 1941-1945 M. Saat itu, Madjlis Islam A'la Indonesia – M.I.A.I membahas tentang milisi dienstplicht. Pembahasannya diserahkan pada Nahdlatoel Oelama dan Persjarikatan Moehammadijah tentang hukum melibatkan diri dalam perang antar negara imperialis.

Pada akhirnya, setelah adanya tindakan kudeta pimpinan Madjelis Rakjat Indonesia oleh Mr. Sartono dari Gerindo bersama pimpinan Parindra, 16 November 1941, dan diikuti dengan adanya selebaran yang isinya menganjurkan agar rakyat Indonesia tetap setia kepada pemerintah kolonial Belanda, 13 Desember 1941, Madjlis Islam A'la Indonesia memutuskan tidak membenarkan kalau umat Islam melibatkan dalam milisi dienstplicht karena kalau mati dalam perang membela penjajah Keradjaan Protestan Belanda, bukan mati syahid. Diputuskan pula keluar dari Gapi dan Madjelis Rakjat Indonesia pimpinan Mr. Sartono yang berpihak pada pemerintah penjajah.

Dengan memerhatikan perjalanan sejarah ini, Balatentara Djepang memihak kepada Ulama karena dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, sejak masa penjajah Keradjaan Katolik Portugis di Malaka, 1511 M, sampai memasuki periode Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia, di bawah penjajahan Keradjaan Protestan Belanda, terbaca Ulama selalu tampil sebagai pelopor perlawanan bersenjata dan pembangkit gerakan kesadaran nasional. Dengan pengertian nasionalisme sebagai gerakan cinta agama, tanah air dan bangsa, serta antiimperialisme.

Balatentara Djepang juga melihat segenap gerakan Ulama dalam periode Kebangkitan Kesadaran Nasional selalu ditandingi gerakannya oleh organisasi: Kebatinan, Komunis, Kristen, Katolik dan Sekuler:

Resume di bawah ini menunjukkan gerakan perjuangan Ulama sampai menjelang Pendudukan Balatentara Djepang, dengan peristiwanya sebagai berikut:

(a) Pembangkit kesadaran ekonomi nasional, melalui Sjarikat Dagang Islam di Surakarta yang dipimpin oleh Hadji Samanhoedi, 16 Oktober 1905. Ditandingi oleh Tirto Adhi Soerjo dengan Sarekat Dagang Islamiyah didirikan di Bogor, 5 April 1909 M, yang mendapat dukungan Asisten Residen Bogor, C.J. Feith dan diangkat sebagai pelindung. Dibantu pula oleh Asisten Residen Ciamis Van Zutphen, Kontrolir Ciamis Weiffenbach dan Bupati Ciamis, R.A. Koesoemabrata.

(b) Pembangkit kesadaran pers nasional melalui Taman Pewarta, 1902-1915 M, yang dapat eksis selama 13 tahun. Ditandingi oleh Tirto Adhi Soerjo dengan media cetaknya, *Me dan Prijaji*, 1909-1912 M, *Soenda Berita*, 1903-1904 M, *Poetri Hindia*, 1909 -1911 M, walaupun mendapat bantuan dana dari Boepati, Controleur, dan mendapat hadiah uang dari Ratoe Wilhelmina[31], tetapi media cetak yang dipimpinnya tetap berumur pendek.

Timbul pertanyaan, apakah mungkin media cetak mendapat bantuan dari Boepati, Controleur, dan Keradjaan Protestan Belanda, kalau isi di dalamnya menentang penjajahan? Tentu karena mendukung penjajah.

(c) Pembangkit kesadaran berpolitik nasional melalui *National Congres Centraal Sjarikat Islam* di Bandung, 17-24 Juni 1916, yang dipimpin oleh Oemar Said Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, dan Wignjadisastra.

Pelopor pertama mensosialisasikan istilah *nasional*, penuntut pertama *Zelf bestuur* - Pemerintahan Sendiri, dan *Indonesia Berparlemen* serta *Indie Weerbaar* - Pertahanan Indonesia. Usaha ini *dikonter* oleh Boedi Oetomo melalui media cetaknya, *Djawi Hisworo*, menghina Rasulullah saw.

(d) Pembangkit gerakan sosial pendidikan:

- *Persjarikatan Moehammadijah,* 1330 H/1912 M oleh K.H. Achmad Dachlan, di Jogjakarta.
- *Taswiroel Afkar*, 1332 H/1914 M dan *Nahdlatoel Wathan,* 1334 H/1916 M oleh K.H. Wahab Chasboellah dan K.H. Mas Mansoer, di Surabaya, Jawa Timur.

31 Keradjaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda selalu memberikan bintang kehormatan atau sejumlah uang pada organisasi atau perorangan yang berjasa membantu penjajahannya. Tidak pernah ada organisasi Islam yang anti penjajahan Belanda mendapat bintang kehormatan bagi pemimpinnya.

- Persjarikatan Oelama, 1333 H/1915 M oleh K.H. Abdoel Halim, di Maja, Jawa Barat. Kemudian, bersama K.H. Achmad Sanoesi dikembangkan menjadi Persatoean Oemat Islam.
- Matlaoel Anwar,1334 H/1916 M oleh K.H. M. Jasin di Menes, Banten. Setelah didirikan Nahdlatoel Oelama disebut Matlaoel Anwar lil NO.
- Persatoean Islam, 1341 H/1923 M, oleh K.H. M. Joenoes, K.H. Zamzam, K.H. Tojib bin H. Samsudin. Dengan Guru Utama Toean A. Hassan di Bandung, Jawa Barat.
- Nahdlatoel Oelama, 1344 H/1926 M oleh K.H. Hasjim Asj'ari di Surabaya, Jawa Timur.
- Pergerakan Tarbijah Islam, 1346 H/1928 M, oleh Sjech Soelaiman Ar-Rasoeli di Minangkabau, Sumatra Barat.
- Djamiatoel Al-Washlijah, 1348 H/1930 M oleh Sjech Mohammad Joenoes dan Sjech Djafar Hasan di Medan, Sumatra Utara.
- Nahdlatoel Wathan, 1352 H/1934 M oleh K.H. Moehammad Zainoeddin Abdoel Madjid di Pancor, Lombok.

Setiap ada gerakan sosial pendidikan Islam, dapat dipastikan selalu lahir organisasi tandingannya. Misalnya sepuluh tahun kemudian Persjarikatan Moehammadijah ditandingi Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara, 1922 M. Taman Siswa sebagai kelanjutan dari perkumpulan kebatinan Seloso Kliwon. Karena itu, menurut M.C. Ricklefs, dalam Sejarah Modern Indonesia, Taman Siswa menolak gerakan Islam pembaharu oleh Persjerikatan Moehammadijah.

Menurut Sartono Kartodirdjo, gerakan pembaharuan sosial pendidikan Islam di Jawa Barat, ditandingi oleh Igama Djawa Pasoendan - Agama Djawa Soenda didirikan oleh Madrais di Cigugur Kuningan, 1925 M. Sikapnya bersetia pada Sri Maha Baginda Poetri Ratoe Gouvernement Belanda, 1925 M.

(e) Pembangkit organisasi partai politik pertama, Partai Sjarikat Islam, 1923 M, dalam Kongres Nasional Centraal Sjarikat Islam di Madiun,1923 M. Penentang pertama ideologi Komunisme yang diimpor oleh Sneevilet yang dikembangkan oleh Samaoen dan Darsono di Semarang, Jawa Tengah, menjadi Perserikatan Kommunis di India, 23 Mei 1920 .

Dengan adanya Partai Syarikat Islam, 1923 M, PKI menandinginya dengan mengubah Perserikatan Kommunis di India menjadi Partai Kommunis di India, 1924 M dan mendirikan Sarekat Rakjat -SR, 1924 M, guna menandingi Sjarikat Islam-SI.

(f) R. Sjamsoeridjal pendiri pertama *Jong Islamieten Bond* – JIB, 1 Januari 1925 M, penentang gerakan etnis Jawa anti Islam, Tri Koro Dharmo sebagai gerakan Pemoeda Djawa dari Boedi Oetomo dengan Djawanisme. Agenda Kongres *Jong Islamieten Bond*, 23-27 Desember 1927, membicarakan Islam dan Tjita2 Persatoean Indonesia, Islam dan Kebangsaan. Dikonter oleh Kongres Boedi Oetomo di Surakarta, 6-9 April 1928, dengan keputusannya menolak pelaksanaan tjita2 persatoean Indonesia.

(g) Pelopor pertama pengguna istilah *Indonesia*, Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Ketua Indische Vereniging, diubahnya menjadi Perhimpoenan Indonesia, 1925 M. Pelopor mendirikan wadah kesatuan juang, antara Dr. Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Sjarikat Islam Indonesia, dengan Ir. Soekarno dari Perserikatan Nasional Indonesia, baru lima bulan didirikan 4 Juli 1927, keduanya bersikap *non koperasi*, membentuk Permoefakatan Perhimpoenan2 Politik Kebangsaan Indonesia - P.P.P.K.I pada akhir Desember 1927.

Boedi Oetomo yang bersikap *koperatif*, bergabung dalam P.P.P.K.I. Oleh karena itu, hanya bertahan sampai dengan Kongres Boedi Oetomo, 6-9 April 1928, dan mengambil keputusan seperti di atas. Praktis keluar dari P.P.P.K.I.

Pengaruh perubahan *Indische Vereniging* menjadi Perhimpoenan Indonesia, setelah Dr. Soekiman Wirjosandjojo kembali ke Indonesia melahirkan penggunaan nama *Indonesia* di kalangan umat Islam:

(1) Comite Persatoean Indonesia,1344 H/1926 M.
(2) PartaiSjarikat Islam Indonesia,1344 H/1926 M.
(3) National Indonesische Padvinderij,1345 H/1927 M.
(4) Madjlis Oelama Indonesia,1346 H/1928 M.
(5) Partai Islam Indonesia - PARRI,1351 H/1932 M.
(6) Partai Islam Indonesia - PII,1357 H/1938 M.
(7) Madjlis Islam A'la Indonesia -MIAI,1356 H/1937 M.

Penggunaan istilah Indonesia di atas, ditandingi oleh Dr. Soetomo setelah membubarkan Boedi Oetomo, 1931 M, mendirikan Persatoean Bangsa Indonesia, 1931 dan Partai Indonesia Raya, 1935.

(h) Madjlis Oelama Indonesia - MOI,[32] sebagai hasil keputusan *National Congres Partai Sjarikat Islam Indonesia* di Jogjakarta, 26-29 Januari 1928, Kamis Pon-

32 Amelz, 1952. *Op.Cit*, hlm. 177 pembentukan Madjlis Oelama Indonesia hasil dari *National Congres Partai Sjarikat Islam Indonesia*, 26-29 Januari 1928, di Jogyakarta dan adanya usaha H.O.S. Tjokroaminoto menulis Tafsir Al-Quran. Mr. A.K. Priggodigdo, 1960. *Op.Cit.*, hlm. 55 Madjlis Oelama Indonesia, dalam rapatnya di Kediri, mengizinkan H.O.S.Tjokroaminoto melanjutkan penulisan Tafsir Al-Quran asal di bawah pengawasan MOI.

Ahad Legi, 2-5 Sya'ban 1346, sebagai realisasi usul Hadji Agoes Salim. MOI menggunakan istilah Indonesia, sepuluh bulan sebelum Kongres Pemoeda 28 Oktober 1928. MOI[33] didirikan dalam upaya membangun wadah musyawarah antar ulama memecahkan perbedaan pengertian masalah furu' dan khilafiyah.

(i) Membangun wadah kesatuan juang antarorganisasi Islam, Madjlis Islam A'la Indoneia - M.I.A.I pada 15 Rajab 1356 atau 21 September 1937 sebagai reaksi terhadap Ordonansi Perkawinan, 1937 M, bikinan pemerintah kolonial Belanda. Dikonter oleh Parindra melalui Madjalah Bangoen, mendukung Ordonansi Perkawinan dan melancarkan penghinaan terhadap Rasulullah saw.

(j) Mendirikan Gaboengan Politik Indonesia - GAPI dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dari Partai Sjarikat Islam Indonesia pada Mei 1939 dan menyelenggarakan Kongres Rakjat Indonesia pada 23-25 Desember 1939. Kemudian, Kongres Rakjat Indonesia diubah menjadi Madjelis Rakjat Indonesia pada 13-14 September 1941, didukung oleh M.I.A.I, GAPI, P.V.P.N dan tetap dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso.

Akan tetapi, pada 16 November 1941, Mr. Sartono dari Gerindo, mengadakan kudeta pimpinan Madjelis Rakjat Indonesia. Kemudian, pada 13 Desember 1941 mengeluarkan selebaran agar rakyat Indonesia tetap setia pada pemerintah kolonial Belanda dan Keradjaan Protestan Belanda. Tindakan Mr. Sartono itu, dinilai oleh M.I.A.I sebagai tindakan melestarikan penjajahan. Kemudian, M.I.A.I keluar dari GAPI dan Madjelis Rakjat Indonesia pimpinan Mr. Sartono.

Balatentara Djepang memahami sekali tentang sikap para Ulama yang konsisten hingga pecahnya Perang Dunia II, para Ulama tetap menentang penjajah pemerintah kolonial Belanda dan Keradjaan Protestan Belanda. Demikian pula Balatentara Djepang memahami realitas di P. Jawa terjadi dua perbedaaan sikap nasional antara Prijaji Islam dengan Prijaji Kedjawen.

Adapun pimpinan Prijaji etnis Jawa yang beragama Islam dan memimpin organisasi Islam, antara lain:

(1) H. Samanhoedi – Sjarikat Dagang Islam.
(2) H.O.S. Tjokroaminoto, Soerjopranoto Abikoesno Tjokrosoejoso,
W. Wondoamiseno, S.M. Kartosoewirjo – Partai Sjarikat Islam Indonesia.
(3) K.H. Achmad Dachlan, K.H. Mas Mansoer, Ki Bagoes Hadikoesoemo – Persjarikatan Moehammadijah.

33 Pada masa Orde Baru muncul kembali Madjelis Ulama Indonesia - MUI, dimulai di Bandung, oleh Dr. K.H. E.Z. Muttaqien. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, dipimpin oleh Prof. Dr. Buya Hamka.

(4) K.H. Hasjim Asj'ari, Wachid Hasjim, K.H. Abdoel Wahab Chasboellah – Nahdlatoel Oelama.
(5) Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kahar Moezakkir - Partai Islam Indonesia.
(6) Raden Sjamsoeridjal – *Jong Islamieten Bond*.

Sepanjang perjalanan sejarahnya, semua Prijaji Islam di atas selalu bersikap konsekuen anti penjajah.

Sikap itu bertentangan dengan Prijaji Kedjawen antara lain: Dr. Soetomo, Dr. Radjiman Wedijodiningrat dari Boedi Oetomo. Sedangkan K.R.M.H Woerjaningrat pengganti pimpinan Parindra setelah Dr. Soetomo wafat, 1938 M, tetap bersikap sekuler dan anti Islam sesuai dengan garis ideologi Djawanisme yang diwariskan oleh Dr.Soetomo. Pada umumnya, pimpinan dan anggota Prijaji Kedjawen berpendidikan Barat tanpa mengenal pendidikan Pesantren dan menjabat sebagai Boepati, Polisi, atau *ambtenar* – pegawai pemerintah kolonial Belanda.

Balatentara Djepang memahami kedua pola Prijaji ini. Dipelajarinya pula pertentangan pandangannya, jauh sebelum pendudukan. Diketahuinya gerakan di bawah tanah anti Jepang pimpinan Amir Sjarifoeddin beragama Kristen dari Gerindo yang mendapatkan dana dari van Mook sejumlah f.25.000. Perlu diperhatikan pula pimpinan PKI dipindahkan dari Digul ke Australia, akibat Rusia berpihak pada Sekoetoe.

Tidak lepas pula dari perhatian Balatentara Djepang terhadap Boeng Karno yang pernah dibuang di Flores dan Bengkulu. Demikian pula perjalanan sejarah Boeng Hatta dan Boeng Sjahrir pernah dibuang ke Boven Digul dan Banda. Demikian pula, Dr. Abdoel Karim Amroellah dibuang ke Sukabumi. Kemudian dibebaskannya dari pembuangan dan diajak bekerjasama memobilisasi rakyat.

Balatentara Djepang sebagai penjajah, tentu memanfaatkan pertentangan antara pimpinan: organisasi Islam, Kebatinan, Sekuler, Kristen, dan Katolik, serta pertentangan ideologi pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia. Dimanfaatkan untuk melaksanakan politik *divide and rule* sebagaimana yang telah dipraktikkan pemerintah kolonial Belanda.

Hanya bedanya Balatentara Djepang dalam masa pendudukan, berupaya keras agar memperoleh dukungan sepenuhnya dari Ulama dalam usahanya memenangkan Perang Asia Timoer Raja melawan Sekoetoe di dalamnya terdapat Keradjaan Protestan Belanda. Perang ini menuntut pembentukan Tentara Pribumi yang dipimpin oleh pribadi yang berjiwa anti penjajah Barat.

Di bawah kenyataan sejarah perlawanan bersenjata di Indonesia terhadap penjajah Barat selalu digerakkan oleh Ulama maka Balatentara Djepang dalam membangun Tentara Pribumi dengan nama Tentara Pembela Tanah Air dalam menghadapi serangan balik Tentara Sekoetoe dipercayakan Daidancho atau Komandan Batalyonnya kepada Ulama. Mengapa penjajah selalu membangun Tentara Pribumi dalam mengukuhkan politik penjajahannya?

Pembentukan tentara Pembela tanah Air - Peta

Setiap penjajah dalam upayanya mempertahankan eksistensinya, selalu membangun Tentara Pribumi. Termasuk pada masa VOC di Indonesia, dan EIC di India. Artinya membangun tentara yang diangkat dari rakyat jajahannya. Demikian pula pada masa pendudukan Balatentara Djepang berusaha untuk memperkuat pertahanannya menghadapi seragan balik Sekoetoe dengan membangun Tentara Pribumi. Menurut Nugroho Notosusanto, sebelum pembentukan Tentara Pribumi, ditugaskan kepada Kolonel Susumu Nishiura mempelajari terlebih dahulu bagaimana Perancis menggunakan Tentara Pribumi bangsa Maroko dalam mempertahankan jajahannya.[34]

Selanjutnya, Nugroho Notosusanto menjelaskan untuk merealisasikan upaya pembentukan Tentara Pribumi ini diserahkan kepada Beppan, Seksi Khusus Dinas Intelijen. Dicobanya terlebih dahulu dengan membangun Pusat Latihan Pemuda - Seinen Dojo di Tangerang dan dilatihlah 50 pemuda, Januari 1943. Semula dipimpin oleh Mayor Kuriya, Kepala Intelijen Tentara Keenam Belas. Kemudian digantikan oleh Kapten Maruzaki. Pelaksanaan selanjutnya dipimpin oleh Letnan Satu Yanagawa. Adapun para pemuda yang dilatih tersebut, antara lain:

Soeprijadi[35], Jonosewojo, Soeprapto, Daan Mogot, Zoelkifli Loebis, Abdoellah Saleh, Moetakat Hoerip[36], Kemal Idris, Oemar Wiranatakoesoemah,[37]Amir Mahmoed[38], Mansoer, Soebito, Roekminto Hendraningrat.

---

34 Nugroho Notosusanto, 1971. *The Feta Army In Indonesia 1943-1945.* Department of Defence and Security Centre For Armed Forces History. Jakarta, hlm. 6

35 Soeprijadi dikenal sebagai pemimpin Pemberontakan Tentara Peta di Blitar.

36 Moetakat Hoerip pemenang pencipta lambang Panji-panji atau *Daidanki* Tentara Peta.

37 Oemar Wirahadikoesoemah sebagai Wakil Presiden RI pada masa Orde Baru..

38 Amir Mahmoed sebagai Pangdam III Jayakarta dan Menteri Dalam Negeri masa Orde Baru.

Sumber: *Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan*

ABDUL MUNIAM INADA

Ceramah Maulid Nabi Muhammad saw di Masjid Kwitang, Jakarta, 24 April 1943. Balatentara Djepang dalam rangka mendapatkan dukungan dari Ulama dan umat Islam Indonesia agar dapat memenangkan Perang Asia Timur Raya, menugaskan Abdul Muniam Inada, Muslim Jepang.

Hasil dari latihan *Seinen Dojo* ini, pada Juni 1943 didemonstrasikan di depan Jenderal Inada. Dari sini, Balatentara Djepang yakin, perlunya segera direalisasikan pembentukan Tentara Pribumi. Menurut Nugroho Notosusanto berdasarkan keputusan bersama antara Beppan dan pimpinan Tentara Jepang yang beragama Islam, Mohammad Abdul Muniam Inada, Abdul Hamid Ono, serta Letnan Satu Yanagawa diputuskan dibentuk Tentara Pembela Tanah Air - Peta yang Islami dan dipimpin *Daidancho* - Komandan Batalyon oleh Ulama.

Perang Asia Timur Raya yang memakan dana yang sangat besar, tidak mungkin Balatentara Djepang dalam membangun Tentara Pribumi dengan biaya yang besar dibebankan kepada Kekaisaran Shinto Djepang sendiri. Untuk mengalihkan tanggung jawabnya, Balatentara Djepang mengondisikan pembentukan Tentara Pribumi sebagai tuntutan Ulama dan diberi nama organisasi kesenjataannya tidak seperti membantu Balatentara Djepang dalam menghadapi perangnya. Melainkan membela tanah air sendiri sehingga diberi nama Tentara Pembela Tanah Air - Peta.

Tuntutan Ulama tersebut disiarkan dalam surat kabar Asia Raja, pada Senin 13 September 2603, No.217 Tahoen II dimuat di halaman depan: Kaoem Moeslimin Indonesia toeroet meminta berdirinja Barisan Pendjaga Poelau Djawa. Adapun Ulama Jakarta dan sebagai penuntut segera didirikannya Barisan Pendjaga Poelau Djawa di atas adalah:

1. K.H.M. Mansoer
2. K.R.H. Adnan
3. Dr. H.A.K. Amaroellah
4. Goeroe H.Mansoer
5. Goeroe H.Cholid
6. K.H. Abdoel Madjid
7. Goeroe H. Jacoeb
8. K.H. Djoenaidi
9. Hadji Mochtar
10. H. Moh. Sodri

Kesepuluh Ulama yang tinggal di Jakarta ini memberanikan diri mengajukan surat permohonan kepada Saiko Shikikan Letnan Jenderal Kumshiki Harada. Dengan dasar ide bahwa penduduk mayoritas Poelau Djawa adalah Islam. Ditekankan pula bahwa:

> Kaoem Moeslimin Indonesia, choesoesnja jang berada di Poelau Djawa, 350 tahoen lamanja telah menderita kesengsaraan karena tindasan dan perasan pendjadjahan imperialisme Barat.
>
> Selanjutnya ditambahkan:
>
> Semangat kaoem Moeslimin hidoep kembali karena pertolongan Allah S.W.T. dengan Balatentara Dai Nippon sebagai sebabnja. Kaoem Moeslimin Indonesia bersjoekoer kehadirat Allah S.W.T. dan berterima kasih sesoenggoeh-soenggoehnja kepada Balatentara Dai Nippon.[39]

Kemudian sepuluh Ulama wakil umat Islam ini datang menyampaikan usulannya kepada Saiko Shikikan Letnan Jenderal Kumashiki Harada, November 1942-April 1945, di Jakarta, dan diterima oleh Jenderal Mayor Yamamoto Somubucho Kakka. Dalam suratnya, sepuluh Ulama tersebut menyebutkan nama Barisan Pendjaga Poelau Djawa adalah Barisan Pembela Islam. Nama ini muncul karena mayoritas penduduk asli Pulau Jawa adalah Islam.

---

39 Pernyataan Sepuluh Ulama sebagai gambaran rasa bahagia karena cita-citanya akan membangun organisasi kesenjataan modern yang diperjuangkan sejak Kongres Nasional Centraal Sjarikat Islam di Bandung pada 17-24 Juni 1916, *Indie Weerbaar*, ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda dan Keradjaan Protestan Belanda, tetapi oleh Pemerintah Balatentara Djepang akan segera terwujud.

Dalam pertemuan ini, Jenderal Mayor Yamamoto Somubucho Kakka menyatakan bahwa sejak Balatentara Dai Nippon mendarat di Pulau Jawa, umat Islam Indonesia menunjukkan sikap saling memercayai. Sikap ini sangat dihargai oleh Pemerintah Balatentara Dai Nippon. Oleh karena itu, surat permohonan tentang pembentukan *Barisan Pembela Islam* akan segera disampaikan kepada *Saiko Shikikan* Letnan Jenderal Kumashiki Harada.

Seperti halnya pemerintah kolonial Belanda, tidak mungkin membentuk serdadunya dengan nama Tentara Islam karena serdadunya dibangun atas dasar etnis: Jawa, Batak, Menado dan Ambon dan lain-lainnya. Balatentara Djepang tidak berbeda dengan cara pemerintah kolonial Belanda, berdasarkan Osamu Seirei No 44, *Saiko Shikikan* Letnan Jenderal Kumashiki Harada pada 3 Oktober 2603, memutuskan Tentang Pembentoekan Pasoekan soeka-rela oentoek membela Tanah Djawa, antara lain disebutkan dalam Pasal 1:

> Mengingat semangat jang berkobar-kobar serta djoega memenoehi keinginan jang sangat dari 50 djoeta di Djawa, jang hendak membela tanah airnja dengan sendiri, maka Balatentara Dai Nippon membentoek *Tentara Pembela Tanah Air* ja'ni pasoekan soeka-rela oentoek membela Tanah Djawa dengan pendoedoek asli, ialah berdiri atas dasar tjita-tjita membela Asia Timoer Raja bersama-sama.

Dari Pasal 1 Osamu Seirei No 44 di atas, terbaca *Saiko Shikikan* Letnan Jenderal Kumashiki Harada dalam melaksanakan tuntutan Sepuluh Ulama dengan membelokkan nama *Barisan Pembela Islam* diubah menjadi *Tentara Pembela Tanah Air*. Dari isi Osamu Seirei No 44, terbaca pula strategi *deislamisasi* nama *Tentara Pembela Tanah Air*. Tuntutan Ulama namanya *Barisan Pembela Islam* diubah istilah *Barisan* menjadi *Tentara*, nama *Islam* diganti menjadi*Tanah Air*. Sedangkan nama *Pembela* tidak ada perubahan.

Walaupun demikian, apakah mungkin dapat dilaksanakan secara murni *deislamisasi Tentara Pembela Tanah Air* bila *Daidanki* atau *Panji-panji Tentara Pembela Tanah Air* dalam bentuk *Bulan Bintang Putih* yang diletakkan di tengah lambang *Matahari Terbit Merah*. Tidakkah dengan lambang *Daidanki* yang Islami, berarti Balatentara Djepang tetap mempercayakan sepenuhnya pimpinan Tentara Pembela Tanah Air kepada Ulama karena dengan kharismanya, Ulama terbukti mampu memobilisasi santri dan rakyat yang mayoritas beragama Islam. Diharapkan dapat memenangkan Perang Asia Timur Raya - *Dai Toa No Sensho*.

Pataka Tentara Pembela Tanah Air atau *Daidanki* sebenarnya dibuat oleh Moetakat Hoerip. Dalam penjelasannya, Moetakat Hoerip sebagai pemenang pembuatan

lambang yang disayembarakan pada saat itu. Moetakat Hoerip mendengar adanya sayembara Daidanki dari Kapten Yanagawa, pada saat Moetakat Hoerip sebagai pelatih calon perwira.[40]

Dengan adanya Osamu Seirei No 44, Beppan segera membentuk Jawa Bo-oei Giyugun Renseitai - Korps latihan Perwira Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air Jawa di Bogor. Nama Jepangnya kemudian diganti menjadi Jawa Bo-oei Giyugun Kanbu Kyoikutai dengan arti sama.

Di sinilah, para Ulama dilatih sebagai calon Daidancho atau Komandan Batalyon. Balatentara Djepang sangat yakin terhadap kebijakannya mengangkat Ulama sebagai Daidancho - Komandan Batalyon karena Ulama sebagai intelektual Muslim. Perang yang penuh tantangan memerlukan pimpinan yang cerdas. Karena itu, telah dipertimbangkan akan dapat diwujudkan loyalitas Ulama dan Jepang terbina atas dasar mutual trust and confidence - saling memercayai dan meyakini. Diharapkan loyalitas, kepercayaan dan keyakinan bersama akan membentuk kekuatan moral yang menjadi penyebab utama tercapainya battle winning-kemenangan peperangan.

Kemenangan peperangan diperoleh tidak hanya dengan modal keberanian semata dan energi peperangan. Melainkan tercapai karena union of spirit - semangat kemanunggalan yang diwujudkan dalam loyalitas. Kesatuan individu-individu yang loyal akan menggandakan kesatuan kekuatan. Dalam hal ini, Ulama dapat dilihat dari keberhasilannya membangun loyalitas yang tinggi para Santri yang dipimpinnya.

Kesemuanya ini perlu disiapkan karena dalam teori perang Tentara Pembela Tanah Air - Peta akan menghadapi iklim peperangan - the climate of war yang penuh bahaya, tidak adanya kepastian, dan perubahan mendadak. Oleh karena itu, perang sangat memerlukan pribadi yang memiliki jiwa kemiliteran staunchness – setia, dan strength of character - karakter yang kukuh. Dalam hal ini, Ulama diyakini oleh Balatentara Djepang juga mampu membangun strength of will - kekuatan kemauan tentara yang dipimpinnya.

40 Moetakat Hurip, *Penjelasan Perihal Panji-Panji Vaandel (Daidanki) Tentara Suka Rela Pembela Tanah Air*, dalam *Majalah Peta*. Agustus 1990.

MR. KASMAN SINGODIMEDJO

dari Perserikatan Moehammadijah

Satu-satunya Sardjana Hukum - Mr yang diangkat menjadi *Daidancho* - Komandan Batalyon Tentara Pembela Tanah Air - Peta untuk *Da Ichi Daidan* Jakarta, Penerima Pataka - *Daidanki* Tentara Pembela Tanah Air - Peta dari *Saiko Sikikan*. Mr. Kasman Singodimedjo atas nama *Djawa Bo-oei Guyuugun Daidancho*, menyambut Amanah *Saiko Sikikan*, a.l:

... bersoempah akan berdjoeang sebagai Pembela Tanah Air dengan sekoeatanja dan akan menoendjoekkan djasa dalam hal menghantjoer loeloehkan moesoeh djahat jaitoe Amerika, Inggris, dan Belanda serta kami sekalian akan teroes melindoengi kehormatan dan kemoelijaan, kebesaran serta keadilan Pandji Pandji Daidanki dengan semangat berkobar kobar sampai titik darah penghabisan. (Domei)

Di kalangan Perwira Muda, menurut A.H. Nasution dalam *Tentara Nasional Indonesia, Djilid I*, Mr. Kasman Singodimedjo sebagai Panglima Besar. Namun, kehendak sejarah ternyata Soedirman *Daidancho* - Komandan Batalyon III *Daidan* Kroya diangkat sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, 15 Desember 1945. Selain itu, sejarah mencatat Boeng Dirman juga dari keluarga besar Perserikatan Moehammadijah.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Guna memperoleh dukungan masyarakat Islam, Balatentara Djepang memandang perlu untuk mensosialisasikan Tentara Pembela Tanah Air - Peta yang baru dilatih selama lima bulan, dari 3 Oktober 1943 hingga 8 Februari 1944. Atas dasar kepentingan ini, diadakan upacara pemberian Daidanki atau Pataka Tentara Pembela Tanah Air - Peta di Istana Jakarta pada 8 Februari 2604/1944, Selasa Kliwon, 12 Safar 1363, oleh Saiko Shikikan Letnan Jenderal Kumashiki Harada kepada Daidancho Mr. Kasman Singodimedjo.[41]

Lambang Daidanki karya Moetakat Hurip, menyimbolkan upaya penciptaan the union of spirit antara umat Islam dengan Jepang. Dilambangkan dalam bentuk Bulan Bintang Putih di tengah Matahari Terbit dengan pancaran sinar merah warnanya. Diletakkan atas dasar warna hijau, dengan tepian berwarna ungu atau coklat. Kedua warna ini melambangkan tanah air - unggu atau coklat, dan yang subur - hijau. Pada saat upacara pemberian Pataka Daidanki tersebut, Saiko Shikikan Jenderal Kumashiki Harada, November 1942-April 1945, menyampaikan pesannya antara lain:

> Kini saja memberikan Daidanki kepada Djawa Bo-oei Giyugun. Sebenarnja Daidanki ini saja berikan sebagai panji-panji perdjoangan jang memperlambangkan kehormatan, kemoeljaan, dan keadilan Daidan masing-masing dalam Giyugun. Oleh karena itu, pradjoerit sekalian hendaknja memberontak dan memperkoeat keprajoeritan sebagai wadja, mempertinggi dan mengobar kobarkan semangat pasti menang oentoek meroentoehkan moesoeh kita.

Mr.Kasman Singodimedjo atas nama Djawa Bo-oei Giyugun Daidancho, menyambut amanat Saiko Shikikan Jenderal Kumashiki Harada:

> ... bersoempah akan berdjoang sebagai Pembela Tanah Air dengan sekoeatnja dan akan menoendjoekkan djasa dalam menghantjoerkan loeloeh moesoeh djahat, jaitoe Amerika, Inggris, dan Belanda serta kami sekalian akan teroes melindoengi kehormatan dan kemoeljaan, kebenaran serta keadilan Pandji Pandji Daidanki dengan semangat berkobar kobar sampai titik darah penghabisan (Domei).[42]

---

41 Di sisi lain, penyerahan *Daidanki* Tentara Pembela Tanah Air - Peta kepada *Daidancho* Mr. Kasman Singodimedjo, pada 8 Februari 1944, dari kepentingan Balatentara Jepang bertujuan pula sebagai upaya antisipasi mencegah pecahnya gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah Singaparna Tasikmalaya. Tetapi gagal, terbukti sepuluh hari kemudian, 18 Februari 1944, benar-benar terjadi gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Hadji Zainal Moestofa.

42 Periksa *Tjahaja*, Rebo 9 Nigatu 2604, No 36 Tahoen Ke III. Periksa pula, Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman. 1982. *Hidup Itu Berjuang. Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Bulan Bintang. Jakarta, hlm. 57 menjelaskan *Daidanki* yang berlambangkan Bulan Bintang Putih di tengah Matahari Terbit Merah, memberikan pengertian sebagai lambang keberanian, kebenaran, keadilan, dan kesucian.

Sumber: *Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan*

DEFILE TENTARA PEMBELA TANAH AIR - PETA

Jakarta, 8 Februari 1944

Penyerahan *Daidanki* - Panji-Panji Tentara Pembela Tanah Air - Peta
dari *Saiko Shikikan* Jenderal Kumashiki Harada kepada *Daidancho Tokubetsu* - Komandan
Batalyon Tentara Peta Jakarta Mr. Kasman Singodimedjo.
Perhatikan *Daidanki* Tentara Pembela Tanah Air - Peta.
Berbentuk Bulan Bintang Putih dasar dalam bulatan Matahari Merah bercahaya ke segala
penjuru. Di celah celah pancaran cahaya berwarna hijau, tepi *Daikanki* berwarna cokelat.
Memberikan gambaran, pendekatan Balatentara Djepang kepada Ulama agar bersedia
bersama Balatentara Djepang memenangkan Perang Asia Timoer Raja.

Sumber: *Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan*

Walaupun Tentara Pembela Tanah Air - Peta telah menyatakan sumpah tersebut, tetapi Balatentara Djepang telah menyiapkan sistem pemecah belah yang bertujuan mencegah terbentuknya kesatuan dari keseluruhan gerakannya. Diciptakan struktur mandiri di setiap wilayah. Dengan kata lain, setiap batalyon atau daidan, tidak ada kerjasama satu dengan lainnya bersifat horisontal. Diberikan kewenangan untuk bertindak sendiri-sendiri dalam mempertahankan wilayahnya.[43]

Kendati demikian disadarkan bahwa Tentara Pembela Tanah Air - Peta di bawah bimbingan Bo-oei Giyugun Shidobu. Secara harfiah Bo-oei artinya pertahanan. Giyugun artinya Tentara Sukarela. Shidobu, shido artinya bimbingan, dan bu artinya kantor, di bawah bimbingan Balatentara Djepang Kapten Yanagawa. Pembimbing dari bangsa Indonesia adalah Hadji Agoes Salim, Soetan Perang Boestami, dan Oto Iskandardinata. Di samping itu, adanya tanggung jawab Markas Besar Tentara Ke-Enam Belas urusan Tentara Pembela Tanah Air - Peta, di bawah pengawasan Mayor Jenderal Sato Kotoku.

Tindakan Balatentara Djepang ini, mengakui Ulama dan umat Islam sebagai powerful forces - kekuatan bangsa yang luar biasa besarnya. Dengan cara memasuki kehidupan spiritual umat Islam untuk dimanfaatkan memenangkan perang. Selanjutnya, menurut Mohammad Abdul Aziz dalam Japan's Colonialism and Indonesia, sebenarnya Balatentara Djepang tidak menginginkan terbentuknya kesatuan umat Islam. Tetapi, hanya ingin memudahkan kerjasamanya. Tidak dengan melalui orsospol lagi, melainkan memanfaatkan Tentara Pembela Tanah Air - Peta guna memobilisasi Ulama di desa-desa.

Oleh karena itu, tujuan Balatentara Djepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air - Peta adalah: Pertama, menanamkan semangat Nippon melalui organisasi kesenjataan modern. Kedua, memanfaatkan loyalitas Ulama yang memiliki skill and fighting forces – ketrampilan dan kekuatan juang. Ketiga, meningkatkan rasa kebencian Ulama terhadap Sekoetoe. Keempat, menanamkan keyakinan Perang Asia Timur Raya sebagai Perang Suci. Kelima menumbuhkan kepercayaan bahwa Jepang benar-benar sebagai Saudara Tua.

---

43 Ahmad Mansur Suryanegara, "*Sejarah Fendudukan dan Politik Jepang di Indonesia*", *Panji Masyarakat,* No. 145, Tahun Ke-XVI, 25 Februari 1974, 22 Muharram 1394 dan No. 146. Tahun Ke XVI, 1 Maret 1974, 7 Shafar 1394 H. Periksa pula, Ahmad Mansur Suryangera, "*Mentuna Politikkan Ummat Islam Indoneia*". *Panji Masyarakat.* No. 180 Tahun Ke XVII, 1 Agustus 1975, 23 Rajab 1395 H dan No 181 Tahun Ke XVIII, 15 Agustus 1975, 7 Sya'ban 1395 H. Balatentara Djepang menyadari bahwa potensi umat Islam merupakan *powerful forces* yang berperan besar dalam perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat. Potensi umat Islam ini, akan dibentuk menjadi tenaga pendukung perang, dengan cara dikondisikan dalam *vacuum of ideology* - kosong tiada berideologi. Di bawah kondisi umat Islam "tuna politik" diubah menjadi sangat sadar terhadap tujuan politik perang Jepang, agar politik Jepang dirasakan menjadi miliknya sendiri.

Untuk tujuan itu, dibentuklah 69 *Batalyon Tentara Pembela Tanah Air-Peta*. Nugroho Notosusanto menjelaskan jumlah personilnya 38.000 orang. Dengan jumlah senapan 17.218 pucuk, karaben 1.550 pucuk. Jumlah senjata seluruhnya 18.768 pucuk. Ditambah dengan meriam, mortir, tank, dan jeep. Dari perbandingan jumlah senjata dan personil di atas tergambar rasionya 2 personil memiliki 1 senjata.[44]

Di tengah tuntutan perang yang sangat mendesak, waktu latihan untuk menjadi *Daidancho* hanya dilatih selama dua bulan. Sedangkan *chudancho* dan *shodancho* dilatih dari Oktober hingga Desember 1943.[45] Pendeknya waktu latihan dan sedikitnya materi yang dilatihkan, terbaca rasa takutnya Balatentara Djepang kalau latihannya menjadikan bangkitnya kesadaran cinta tanah air dan dapat dipastikan akan berbalik melawan.

Secara politis pembentukanTentara Pembela Tanah Air - Peta akan memengaruhi strategi serangan balik Sekoetoe. Tidak mungkin berani masuk langsung dari Australia ke Indonesia. Pandangan ini ternyata benar. Sekoetoe lebih mengutamakan menyelamatkan Papua jajahan Inggris dan jajahan Amerika Serikat, yakni Filipina. Hal ini akibat 69 Batalyon Tentara Pembela Tanah Air - Peta ditempatkan dalam 18 keresidenan di P. Jawa dan keresidenan Madura serta keresidenan Bali.

Nugroho Notosusanto menjelaskan di P. Jawa dan Madura, Balatentara Djepang menempatkan 66 *Daidan*, dan *Bali 3 Daidan* Tentara Pembela Tanah Air - Peta dengan struktur:

> Setiap *Daidan* - Batalyon beranggotakan 535 personil, dipimpin oleh *Daidancho* - Komandan Batalyon dengan pangkat *Mayor*. Setiap *Daidan* terdiri 4 - *Chudan* - kompanyi dipimpin oleh *Chudancho*, dengan pangkat *Kapten*.
>
> Setiap *Chudan* terdiri dari 3 *Shodan* - peleton. Setiap *Shudan* dipimpin oleh *Shodancho* - Komandan Peleton.
>
> Setiap *Shudan* - Peleton terdiri dari *Bundan* - Regu. Setiap regu beranggotakan *11 Giyuhei* - Prajurit.

---

44 Nugroho Notosusanto dalam *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, berhasil menyebutkan nama kota-kota penempatan Tentara Pembela Tanah Air setelah dilatih, serta jumlah senjatanya, namun tidak menyebutkan secara jelas nama-nama *Daidancho* - Komandan Batalyon yang diangkat dari tokoh rakyat, pemimpin partai, pimpinan agama serta pamong praja.

45 Jenderal TNI (Purn) Umar Wirahadikusumah, Sesepuh Yayasan Peta, pada 18 Desember 1996, dalam *Sambutan Hari Wisuda Angkatan I Perwira Peta di Bogor, 18 Desember 1943* menjelaskan berhasil dibentuk *Perwira sekitar 2.500 Perwira* dari Jawa, Madura, Bali dan Sumatera. Selain itu, dijelaskan pula terbentuknya sekitar 80 Balatyon dengan 38.000 personil Tentara Pembela Tanah Air - Peta.

Dari kepangkatan Tentara Pembela Tanah Air - Peta di atas, terbaca tidak memiliki kepangkatan Perwira Tinggi dan Perwira Menengah seperti Balatentara Djepang. Adapun Perwira Tinggi Jepang terdiri dari:

Jenderal – Taisyo, Letnan Jenderal – Cuyo, Mayor Jenderal – Syasyo.

Perwira Menengah terdiri dari:
Kolonel – Taisa, Letnan Kolonel – Chusa dan Mayor – Syoa.

Dengan ditiadakannya kepangkatan Perwira Tinggi dan Perwira Menengah dalam struktur kepangkatan Tentara Pembela Tanah Air - Peta menjadikan posisinya dan aktivitasnya akan selalu di bawah pengawasan dan komando Perwira Tinggi Jepang.

Di samping Balatentara Djepang membangun Tentara Pembela Tanah Air - Peta, juga membangun pasukan khusus untuk perkantoran pusat yang penting, serta organisasi paramiliter - bukan militer, antara lain:

Keibodan	- Barisan Bantuan Polisi
Seinendan	- Barisan Pemuda
Gokutotai	- Barisan Pelajar
Jibakutai	- Barisan Berani Mati
Suishitai	- Barisan Pelopor
Boeihanbu	- Dinas Perlindungan Bahaya Udara
Tsusin Tokubetsu Tai	- Pasus Pos Telegrap dan Telepon[46]

Balatentara Djepang selama pendudukan menggerakkan segenap lapisan rakyat agar berperan serta dalam gerakan bela negara. Di tengah suasana perang, rakyat umumnya dihinggapi rasa takut. Dengan digerakkan dalam organisasi semi militer seperti di atas, akan timbul rasa keberanian melawan common enemy - musuh bersama, yakni Sekoetoe sebagai penjajah Barat.

46 Meiji Restorasi (1867-1912) sebagai awal reformasi negara Jepang, tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan modernisasi teknologi komunikasinya. Pada 1869 Jepang mulai membangun komunikasi telegrafik. Diikuti dengan pembangunan kantor pos pada 1871. Pemerintah kolonial Belanda, mendirikan Kantor Pusat PTT di Bandung. Oleh karena itu, Balatentara Djepang, membangun *Tsusin Tokubetsu Tai* di Bandung dipimpin oleh Soetoko.

Sumber: *google.images.com*

TENTARA PEMBELA TANAH AIR - PETA

Kebangkitan Jiwa Keprajuritan

Oemar Said Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, Agoes Salim, Wignjadisastra, dalam National Congres Centraal Sjarikat Islam di Bandung, 1334 H/1916 M, memutuskan perlunya membangkitkan kembali jiwa keprajuritan generasi muda untuk dilatih dalam organisasi kesenjataan. Dengan cara mengusulkan pada pemerintah kolonial Belanda agar dibentuk *Indie Werbaar* - Pertahanan Indonesia dalam menghadapi Perang Dunia I. Namun usul ini ditolak.

Sebaliknya pemerintahan Balatentara Jepang dalam upaya mensukseskan Perang Asia Timoer Raja, membuka kesempatan kepada pemuda untuk menjadi Tentara Pembela Tanah Air - Peta. Kebijakan lanjutnya sangat mengejutkan. Ulama diangkat sebagai Komandan Batalyon atau Danyon.

Pengertian penjajah Barat atau Sekoetoe dari kepentingan Perang Asia Timur Raya dalam propanganda Balatentara Djepang adalah Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan Perancis, Spanyol, dan Portugis jarang disebutkan karena Portugis sudah dikuasai wilayah Timor Timur-nya, dan Perancis sudah diduduki Indo Cina-nya. Sedangkan Spanyol tidak berkuasa lagi di Filipina. Perancis, Spanyol dan Portugis hampir dilupakan pernah berusaha menjajah salah satu wilayah Indonesia.

Di bawah ini, penulis menyampaikan nama-nama Komandan Batalyon bersama Kepala Staf Tentara Pembela Tanah Air - Peta serta menempatan zona pertahanannya berdasarkan pemikiran strategi perang Balatentara Djepang.

nama-nama Daidancho **- Komandan Batalyon,** Daidan Fukkan Shodancho **- Kepala Staf Batalyon tentara Pembela tanah Air - Peta:**

Jawa Barat terbagi dalam zona pertahanan:

Keresidenan Banten

Batalyon I Labuhan
Danyon/Daidancho : K.H. Tb Achmad Chatib
Kastaf/Shodancho : Soehadisastra

Batalyon II Kondangsari Malimping
Danyon/Daidancho : E. Ojong Temaja
Kastaf/Shodancho : MB Soetman

Batalyon III Cilegon Serang
Danyon/Daidancho : K.H. Sjam'oen[47]
Kastaf/Shodancho : Zainoel Falah

Batalyon IV Pandeglang
Danyon/Daidancho : Oeding Soejatmadja
Kastaf/Shodancho : Moestaram

Keresidenan Jakarta

Batalyon I Harmoni
Danyon/Daidancho : Mr. Kasman Singodimedjo
Kastaf/Shodancho : F. Moefraeni Moekmin

47 K.H.Sjam'oen sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 diangkat sebagai Komandan Batalyon Tirtayasa

Batalyon II Purwakarta

Danyon/*Daidancho* : Soerjodipoero

Kastaf/*Shodancho* : Moersid

Keresidenan Bogor

Batalyon I Jampang Kulon

Danyon/*Daidancho* : R.H. Abdoellah bin Noeh[48]

Kastaf/*Shodancho* : Hoesen Aleksah

Batalyon II Pelabuhan Ratu

Danyon/*Daidancho* : H.M. Basoeni

Kastaf/*Shodancho* : Moelja

Batalyon III Sekolah Pertanian Sukabumi

Danyon/*Daidancho* : Kafrawi

Kastaf/*Shodancho* : Machmoed

Batalyon IV Cibeber, Cianjur

Danyon/*Daidancho* : Rd. Goenawan Resmipoetro

Kastaf/*Shodancho* : M.Ishak Djoearsa

Keresidenan Priangan

Batalyon I Tasikmalaya

Danyon/*Daidancho* : K.H. Soetalaksana

Kastaf/*Shodancho* : Abdoellah Saleh

Batalyon II Pangandaran

Danyon/*Daidancho* : K.H. Pardjaman

Kastaf/*Shodancho* : K. Hamid

Batalyon III Bandung

Danyon/*Daidancho* : Ilyas Sasmita

Kastaf/*Shodancho* : Permana

48 R.H. Abdoellah bin Noeh adalah Pembina Pesantren Al-Ihya, Bogor.

ILJAS SASMITA

Komandan Batalyon - Daidancho III Bandung

Perhatikan seragam Tentara Peta dan kelengkapan senjatanya
serta Pedang Samorai

Dokumen Tb. Ganjar Angkawi Djaja Jakarta

Sumber: Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan

Batalyon IV Cimahi
Danyon/*Daidancho* : K.R. Aroedji Kartawinata
Kastaf/*Shodancho* : Soeparjadi

Batalyon V Garut
Danyon/*Daidancho* : R. Sofyan Iskandar
Kastaf/*Shodancho* : Katamsi Soetisna

Keresidenan Cirebon

Batalyon I Cirebon
Danyon/*Daidancho* : Abdoelgani Soerjokoesoemo
Kastaf/*Shodancho* : Roekman

Batalyon II Majalengka/Indramayu
Danyon/*Daidancho* : R.Zaenal Asikin Joedibrata
Kastaf/*Shodancho* : Soearman

Jawa Tengah dibagi dalam zona pertahanan:

Keresidenan Pekalongan

Batalyon I Pekalongan
Danyon/*Daidancho* : K.H. Iskandar Idris
Kastaf/*Shodancho* : Ajoeb

Batalyon II Tegal
Danyon/*Daidancho* : K.H. Doerjatman
Kastaf/*Shodancho* : Soemardjono

Keresidenan Banyumas

Batalyon I Cilacap
Danyon/*Daidancho* : R. Soetirto
Kastaf/*Shodancho* : R. Hartojo

Batalyon II Sumpyuh
Danyon/*Daidancho* : R. Soesalit
Kastaf/*Shodancho* : Zaelan Asikin

Batalyon III Kroya
Danyon/*Daidancho* : Soedirman
Kastaf/*Shodancho* : Soepardjo Roestam

Batalyon IV Banyumas

Danyon/Daidancho	:	Isdiman/Gatot Soebroto
Kastaf/Shodancho	:	Sarengat

Keresidenan Kedu

Batalyon I Gombong

Danyon/Daidancho	:	R. Abdoel Kadir/R. Bambang Soegeng
Kastaf/Shodancho	:	R. Soetrisno
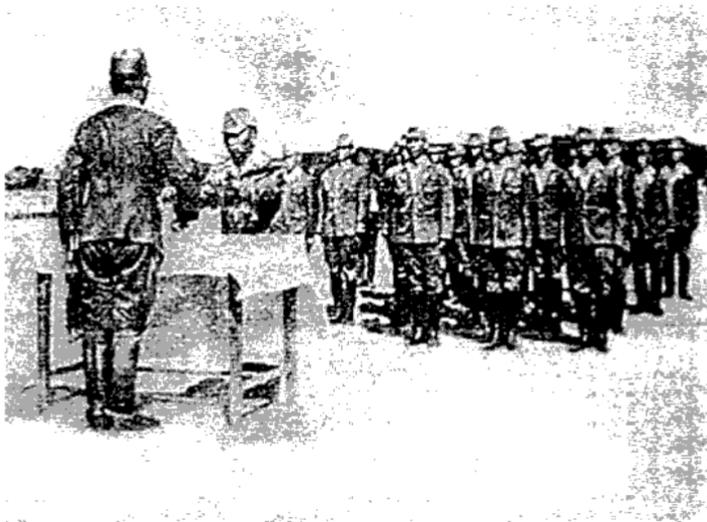
Sumber: Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan

Upacara Pelantikan Danyon ii

Dainji Daidancho Ninresiki, terdiri dari 18 orang, di Lapangan Ikada Jakarta, pada 10 Agustus 1944. Paling ujung kanan adalah Panglima Besar Soedirman. Sayang Marimato Takeshi tidak menyebutkan Tentara Jepang yang dilantiknya, dan siapa yang maju ke depan sebagai wakil dari 18 Daidancho .

Batalyon II Magelang

Danyon/Daidancho	:	Moehamad Soesman
Kastaf/Shodancho	:	Soegiardjo/Soepangkat

Batalyon III Gombong
Danyon/*Daidancho* : Djoko Koesoemo
Kastaf/Shodancho : Slamet

Batalyon IV Purworejo
Danyon/*Daidancho* : Moekahar Ronohadikoesoemo
Kastaf/*Shodancho* : Tjiptoroso

Keresidenan Semarang

Batalyon I Mrican Semarang
Danyon/*Daidancho* : R.Oesman dan Soetrisno Soedomo
Kastaf/*Shodancho* : Soejadi

Batalyon II Weleri/Kenal
Danyon/*Daidancho* : R. Soedijono Taroeno Koesoemo
Kastaf/*Shodancho* : Soeparman Soemahamidjaja

Keresidenan Pati

Batalyon I Pati
Danyon/*Daidancho* : Koesmoro Hadidewo
Kastaf/*Shodancho* : -

Batalyon II Rembang
Danyon/*Daidancho* : Holan Iskandar
Kastaf/*Shodancho* : Soekardi

Batalyon III Jepara
Danyon/*Daidancho* : Prawiro Atmodjo
Kastaf/*Shodancho* : Soekardji

Daerah Istimewa Jogyakarta

Batalyon I Wates
Danyon/*Daidancho* : D. Martodjomeno
Kastaf/*Shodancho* : Soedjiono

Batalyon II Bantul
Danyon/*Daidancho* : Mochamad Saleh
Kastaf/*Shodancho* : Soepardi Pardi Pranoto
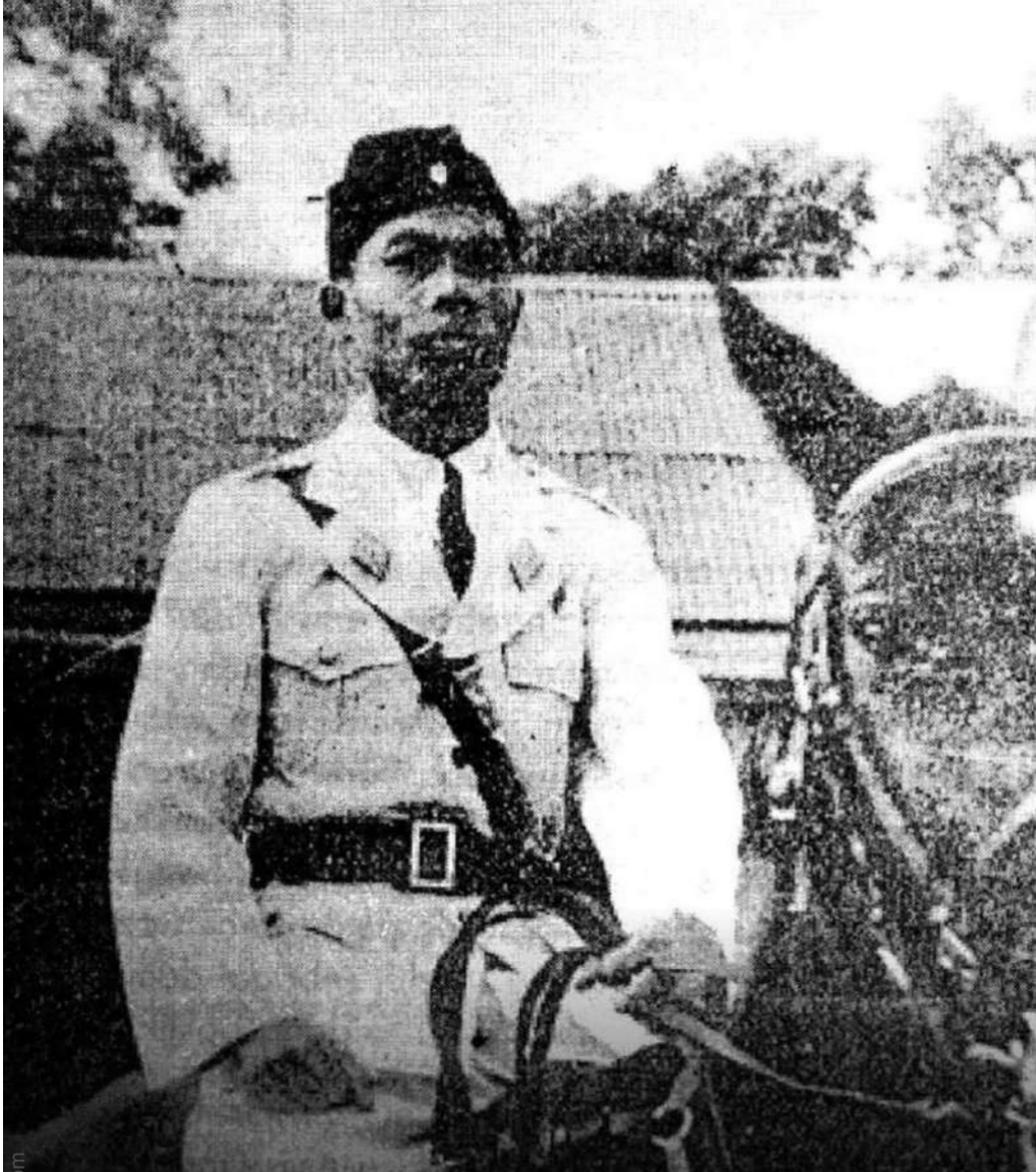
JENDERAL SOEDIRMAN

Setelah selesai mengikuti pendidikan dan latihan Perwira PETA di Bogor, Soedirman langsung diangkat menjadi salah satu Daidancho (Danyon) PETA di Kresidenan Banyumas, pernah memberontak dan melucuti Tentara Jepang di daerah tersebut. Kemudian, setelah peristiwa Palagan Ambarawa (15 Desember 1945) diangkat menjadi Panglima Besar dan Bapak TNI - ABRI. (Repro: APK 1945 - 1950)

Sumber: :Repro APK 1945-1950

Batalyon III Pingit

Danyon/*Daidancho* : Soendjojo Poerbokoesoemo

Kastaf/*Shodancho* : Darjatmo[49]

Batalyon IV Wonosari

Danyon/*Daidancho* : Moeridan Noto

Kastaf/*Shodancho* : Noedi

Keresidenan Surakarta

Batalyon I Manahan

Danyon/*Daidancho* : R.M. Moeljadi Djojomartono[50]

Kastaf/*Shodancho* : Soeprapto Soekawati

Batalyon II Wonogiri

Danyon/*Daidancho* : K.H. Idris

Kastaf/*Shodancho* : Boediman

Jawa Timur dibagai dalam zona pertahanan:

Keresidenan Madiun

Batalyon I Madiun

Danyon/*Daidancho* : Agoes Tojib

Kastaf/*Shodancho* : Soemardjo

Batalyon II Pacitan

Danyon/*Daidancho* : Akoeb Goelangge

Kastaf/*Shodancho* : R. Soebagijo

Batalyon III *Ponorogo*

Danyon/*Daidancho* : M. Soedjono

Kastaf/*Shodancho* : Soedijat

Keresidenan Kediri

Batalyon I Tulung Agung

Danyon/*Daidancho* : Soediro

Kastaf/*Shodancho* : Toeloes

49 Darjatmo Ketua DPR/MPR RI masa Orde Baru.

50 R.M. Moeljadi Djojomartono Menteri Sosial dan Ketua Partai Muslimin Indonesia - Parmusi.

CHUDANCHO SOEHARTO

Berdasarkan informasi Morimoto Takeshi mantan pelatih penembak mortir Tentara PETA Angkatan kedua di Bogor, dalam bukunya jawa Bo-ei Giyugun Shi, Nampo Guinsei Kankei Sirio atau Sejarah Tentara Pembela Tanah Air, data sejarah yang berkaitan dengan pemerintahan Balatentara Jepang di Wilayah Selatan, diterbtkan 1992, dijelaskan:

1. Soeharto setelah mengikuti latihan perwira tentara PETA di Bogor, ditempatkan di Daichi Daidan Jogjakarta dengan pangkat Shodancho.
2. Dari Jogjakarta di pidahkan ke Daini Chiku Sireibu di Madiun dengan pangkat Chudancho, sebagai Kyoiku Shunim atau penanggung jawab pendidikan.
3. Sejak Orde Baru diangkat oleh MPR sebagai Presiden Republik Indonesia dan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan nasional.

Sumber: www.kepustakaan-presiden.pnri.go.id

Batalyon II Blitar

Danyon/*Daidancho* : Soerachmad

Kastaf/*Shodancho* : Soekandar

Batalyon III Sukorame Kediri

Danyon/*Daidancho* : A. Joedodiprodjo dan Soejoto Djojopoernomo

Kastaf/*Shodancho* : Mashoedi Soedjono

Keresidenan Bojonegoro

Batalyon I Babat Bojonegoro

Danyon/*Daidancho* : Maskoer dan Soedirman

Kastaf/*Shodancho* : Oetojo Oetomo

Batalyon II Bancar

Danyon/*Daidancho* : Masri

Kastaf/*Shodancho* : R. Rachmat

Batalyon III Tuban Kota

Danyon/*Daidancho* : Soemadi Sastroatmodjo

Kastaf/*Shodancho* : Soemardjo

Keresidenan Surabaya

Batalyon I Gunung Sari Surabaya

Danyon/*Daidancho* : Dr. Soetopo

Kastaf/*Shodancho* : Masdoeki Aboedardja

Batalyon II Sidoarjo

Danyon/*Daidancho* : R. Moehamad Mangoen Diprodjo

Kastaf/*Shodancho* : Bambang Joewono

Batalyon III Mojokerto

Danyon/*Daidancho* : Katamhadi

Kastaf/*Shodancho* : Oesman

Batalyon IV Gresik

Danyon/*Daidancho* : K.H. Cholik Hasjim dan Drg. Moestopo

Kastaf/*Shodancho* : Jondat Modjo

Keresidenan Malang

Batalyon I Gondang Legi

Danyon/*Daidancho* : K. Iskandar Soelaeman

Kastaf/*Shodancho* : Soemarto

Sumber: Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan

Bung Karno sedang berlatih hormat senjata sebagai Angkatan Pertama Jakarta Shu Daichi Daidan , dilatih langsung oleh Tentara Jepang. Menurut Penjelasan Morimoto Takeshi.

Batalyon II Lumajang

Danyon/*Daidancho* : M. Soejo Adikoesoemo

Kastaf/*Shodancho* : S. Hardjo Hoedojo

Batalyon III Pasuruan

Danyon/*Daidancho* : Arsjid Kromodihardjo

Kastaf/*Shodancho* : Slamet Batalyon IV Malang Kota

Batalyon IV Malang Kota

Danyon/*Daidancho* : Imam Soedja'i

Kastaf/*Shodancho* : Soekardani

Batalyon V Probolinggo

Danyon/*Daidancho* : Soedarsono

Kastaf/*Shodancho* : Soemitro

Keresidenan Besuki

Batalyon I Kencong Jember

Danyon/*Daidancho* : Soewito dan Soediro

Kastaf/*Shodancho* : Soekarto

Batalyon II Bondowoso

Danyon/*Daidancho* : Ki Tahiroeddin Tjokro Atmodjo

Kastaf/*Shodancho* : Rosadi

Batalyon III Benculuk Banyuwangi

Danyon/*Daidancho* : Soekotjo

Kastaf/*Shodancho* : Imam Soekarto

Batalyon IV Jember

Danyon/*Daidancho* : Soerodjo dan Astiklah

Kastaf/*Shodancho* : Soebandi

Batalyon V Sukowidi Banyuwangi Kota

Danyon/*Daidancho* : R. Oesman Soemodinoto

Kastaf/*Shodancho* : Soedarmin

Balatentara Djepang memisahkan pengorganisasian *Tentara Pembela Tanah Air - Peta* di Madura dan Bali terlepas dari Pulau Jawa:

Keresidenan Madura

Batalyon I Pamekasan
Danyon/Daidancho : K.H.R. Amin Dja'far
Kastaf/Shodancho : R. Moeh. Saleh

Batalyon II Bangkalan
Danyon/Daidancho : Roeslan Tjakraningrat
Kastaf/Shodancho : Hafiloedin

Batalyon III Batang-Batang
Danyon/Daidancho : Abdoel Madjid
Kastaf/Shodancho : Ach. Basoeni

Batalyon IV Ambunten – Sumenep
Danyon/Daidancho : Hamid Moedhari
Kastaf/Shodancho : Soeroso

Batalyon V Ketapang
Danyon/Daidancho : Troenodjojo
Kastaf/Shodancho : Mochamad Sabirin

Keresidenan Pulau Bali

Batalyon I Negara
Danyon/Daidancho : I Made Poetoe
Kastaf/Shodancho : I.W. Moedana

Batalyon II Tabanan
Danyon/Daidancho : I.G. Ng. Gedepoegeng
Kastaf/Shodancho : I.B. Tongka

Batalyon III Klungkung
Danyon/Daidancho : A.A. Made Agoeng
Kastaf/Shodancho : I Made Geria

Pembentukan Tentara Pembela Tanah Air – Peta di atas sebagai realisasi dari perjuangan sepuluh Ulama yang mengajukan usulan kepada Saiko Shikikan Letnan Jenderal Kumashiki Harada, pada 12 September 1943 di Jakarta:

K.H.M. Mansoer	Dr. H.A. K. Amaroellah
K.R.H. Adnan	Goeroe H. Mansoer
Goeroe H. Cholil	K.H. Abdoel Madjid
Goeroe H. Jacoeb	K.H. Djoenaedi
Hadji Mochtar	H.Moh. Sodri

Akan tetapi, dalam penulisan *Sejarah Tentara Pembela Tanah Air - Peta dalam Sejarah Indonesia*, akibat dari strategi penulisan yang bertolak dari *deislamisasi* Sejarah Indonesia maka nama-nama Ulama tersebut ditiadakan. Hanya ditulis bahwa Tentara Pembela Tanah Air - Peta didirikan oleh pemerintah Balalentara Djepang sebagai perwujudan dari surat permohonan yang dituliskan dengan darah Gatot Mangkoepradja mantan pimpinan Partai Nasional Indonesia - P.N.I. Menurut Nugroho Notosusanto dalam penelitian Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat, tidak pernah menemukan adanya surat permohonan yang dituliskan dengan darah Gatot Mangkoepradja tersebut.

Dengan terbentukya Tentara Pembela Tanah Air - Peta pada 3 Oktober 1943, Ahad Pahing, 3 Syawwal 1362, merupakan pilihan jawaban yang tepat dalam upaya pembentukan negara Indonesia Merdeka karena tidak mungkin suatu negara yang merdeka tidak memiliki tentara. Tidakkah pada masa berdirinya kekuasaan politik Islam atau kesultanan, Soeltan Jogjakarta menyandang gelar *Senapati Ing Alaga Sajjidin Panatagama Cholifah Rasoeloellah saw Ing Tanah Djawa*. Mungkinkah *Senopati Ing Alaga* - Panglima Perang tidak memiliki lasykar atau tentara?

Oleh karena itu, dengan terbentuknya Tentara Pembela Tanah Air - Peta, menempatkan Ulama dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sebagai pelopor pembangun organisasi kesenjataan modern yang pertama. Pengertian ini akan dapat dipahami kalau kelanjutan sejarah perjuangan Tentara Pembela Tanah Air - Peta, menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia - TNI, 5 Oktober 1945, Jumat Kliwon, 29 Syawwal 1364.

Tentang perubahan nama Barisan Pembela Islam menjadi Tentara Pembela Tanah Air - Peta, tidak dimasalahkan oleh para Ulama karena K.H. Wahab Chasboellah dan K.H. Mas Mansoer di Surabaya telah mendirikan Nahdlatoel Wathon - Kebangkitan Tanah Air, 1916 M. Demikian pula bagi Persjarikatan Moehammadijah menamakan gerakan Pramukanya, Hizboel Wathon - Pengawal Tanah Air. Kepeloporan Ulama dalam perjuangannya menanamkan kesadaran cinta terhadap tanah air - *wathon* - *patria*, tidak dituliskan secara eksplisit dalam penulisan

Sejarah Indonesia. Dampaknya terkesan yang disebut patriot adalah mereka bukan dari kalangan Ulama dan Santri.

Tentara Pembela Tanah Air - Peta dan situasi perang, mengubah gaya hidup dan sistem berorganisasi para Ulama dan Santri. Semula terbudaya bersikap resisten - menolak terhadap penjajah Barat, berganti menjadi berpartisipasi aktif dalam perang dengan gerakan perubahan serba cepat dan disiplin kemiliteran. Berbusana seragam dan berpangkat militer, menumbuhkan kebanggaan tersendiri. Semangat keprajuritan pemuda selama penjajahan Belanda terpendam menjadi bangkit dan membentuk kesadaran diri sebagai pengawal bangsa dan negara serta agama.

Tidak terdengar lagi perdebatan masalah furu' dan khilafiyah antar Ulama. Perang mengubah aktivitas Ulama sebagai Daidan cho, terbingkai oleh Osamu Seirei No 44, 3 Oktober 1943, dengan ketentuan dan kewajiban:

Pertama, TentaraPembela Tanah Air - Peta terdiri dari warga negara asli, artinya Islam.

Kedua, Tentara Pembela Tanah Air - Peta dilatih oleh tentara Jepang.

Ketiga, Tentara Pembela Tanah Air - Peta bukan milik organisasi apapun, langsung di bawah Panglima Tentara Jepang.

Keempat, Tentara Pembela Tanah Air - Peta sebagai tentara teritorial yang berkewajiban mempertahankan wilayah - syuu.

Kelima, Tentara Pembela Tanah Air - Peta siap tempur melawan Tentara Sekoetoe.

Kelima hal di atas, menjadikan kesibukan Ulama - Daidancho tersadarkan lawannya bukan lagi sesama Muslim yang berbeda mazhab. Sebagaimana yang pernah dikondisikan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam membelah kesatuan Ulama melalui mempertajam kesadaran perbedaan pandangan mazhab yang dianutnya. Di bawah pemerintah Balatentara Djepang karena perang menjadi diluaskan orientasi para Ulama tentang wilayah berubah lebih mengglobal. Disadarkan lawan imperialisnya, tidak hanya Keradjaan Protestan Belanda, melainkan juga Amerika Serikat dan Inggris.[51]

51 Uni Soviet Rusia tidak disebut-sebut sebagai musuh, karena telah terikat dalam Perjanjian Non Agresi antar Rusia – Jepang, 13 April 1941. Kemudian pada 8 Agustus 1945, Rusia baru menyatakan perang terhadap Jepang, setelah Hirosima, 6 Agustus 1945, dibom atom oleh Amerika Serikat. Rusia menyerbu Manchuria dan Korea Utara, hingga batas garis lintang 38 derajat.

Pendudukan Balatentara Djepang, 1362-1364 H/1942-1945 M sekalipun dalam waktu relatif singkat, tetapi terjadilah perubahan besar. Ulama semakin diperluas perannya sebagai *change agent* - pelaku perubahan sosial. Ditambah tidak hanya menciptakan perubahan sosial melalui ekonomi pasar, pendidikan, sosial budaya dan politik. Melainkan bertambah perannya menciptakan perubahan sosial dengan menumbuhkan kesadaran bela negara: masalah ketahanan, pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian dalam perjalanan sejarah Indonesia di abad ke-20 M, untuk pertama kalinya di Indonesia terbentuk kesatuan pandang dan kerjasama antara Ulama dan tentara dalam wadah organisasi kesenjataan modern, Tentara Pembela Tanah Air - Peta. Peristiwa ini merupakan langkah awal dihidupkannya kembali pengertian *dwi fungsi khalifah* sebagai: *senopati ing alaga* - panglima perang. Sekaligus berfungsi sebagai *sajjidin panatagama* - sebagai Ulama penata kehidupan berbangsa dan bernegara yang beragama.

Balatentara Djepang apa pun upayanya, tidak luput dari tujuan perangnya sebagai anggota dari *Axis Pact* yakni perluasan wilayah untuk dijadikan lahan kehidupan - *Lebensraum*. Demikian pula pembentukan Tentara Pembela Tanah Air - Peta bukanlah *defencive battle* - bertahan semata-mata dengan pengertian sebagai *waiting* - menunggu terhadap serangan Sekoetoe. Melainkan dibentuk sekaligus *in readiness for action* - siap untuk melakukan penyerangan terhadap Sekoetoe. Akan tetapi, akibat biaya penyerangan sangat tinggi maka dipilih strategi - *the defensive form of warfare is instrinsically stronger than the offensive* - bentuk bertahan dalam peperangan lebih kuat daripada menyerang.

Dari teori perang, Balatentara Djepang menciptakan *militia* lebih bertujuan *defence than of attack* - bertahan daripada menyerang. Pembentukan Tentara Pembela Tanah Air - Peta sebagai *a people in arms* - rakyat yang persenjatai atau *home guard* - pembela tanah air. Ditargetkan pula terbentuknya *common interest* - kepentingan yang sama, antara Balatentara Djepang dengan Ulama, yakni memenangkan perang.

Dengan terbentuknya kesadaran *common interest and common enemy* melawan Sekoetoe, akan berdampak terciptanya di garis belakang *coexist peacefully* - kerja sama penuh kedamaian.

Secara teori, strategi perang di atas memang tepat sekali. Namun, kenyataan di lapangan faktor ekonomi dalam perang, Balatentara Jepang menemui kegagalan dalam pembinaan dan pemenuhannya kebutuhan ekonomi. Negara manapun terpenuhinya kebutuhan ekonominya karena adanya hubungan niaga dengan negara lain.

Perang Asia Timur Raya dan Perang Dunia II, memutuskan kontak niaga dengan negara lain. Praktis, kebutuhan ekonomi rakyat tidak terpenuhi. Di bidang pangan berdampak kelaparan. Di bidang kebutuhan sandang, menjadikan rakyat sangat menderita, compang camping busananya. Mereka menggunakan pakaian berbahan karet dan karung goni sebagai busananya.

Di bawah kondisi itu, apakah memungkinkan dalam teori perang akan dapat diciptakan, voluntary partisipation in the war by the whole population with physical strength, its wealth, and its loyalty - partisipasi sukarela dalam menghadapi peperangan dari segenap rakyat dengan kekuatan fisik, kekayaan, dan loyalitasnya, akan diperoleh Balatentara Djepang? Jawabannya berkebalikan, pecahlah protes sosial dan pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air.

GERBANG KEENAM

PERAN ULAMA DALAM GERAKAN PROTES SOSIAL DAN PEMBERONTAKAN TENTARA PEMBELA TANAH AIR

Pengaruh Perut Lapar terhadap Perubahan Politik

ULAMA dan Santri memasuki tahun 1363 H/1944 M menghadapi tantangan yang sangat berat. Balatentara Djepang mencoba menggenggam seluruh wilayah Asia Timur Raya, dengan personil milter yang sangat kecil jumlahnya dan mesin perang darat, laut, dan udara yang tidak memadai untuk mempertahankannya. Dampak dari kelemahan pertahan satu persatu wilayah yang akan dijadikan Lebensraum – Lahan Kehidupan Baru, Guam, Saipan, Tinian dari Kepulauan Karolin, Filipina mulai terlepas dan kembali ke tangan Sekoetoe. Terputuslah hubungan Indonesia dengan Tokio pada Juni, Juli, dan Agustus 1944. Dampaknya terpikullah beban yang sangat berat bagi Ulama, dijadikan tumpuan Balatentara Djepang dalam upaya memenangkan perangnya.

Perang membutuhkan pangan atau beras serta logistik lainnya. Ulama desa diwajibkan menyerahkan padi miliknya. Perang membutuhkan dana untuk pem bangunan kembali mesin perang yang rusak. Umat Islam diwajibkan menyerahkan harta emas intannya. Perang membutuhkan tenaga kerja pembangunan. Dampaknya, rakyat dijadikan obyek kerja paksa atau romusha.

Selain itu, perang menyebabkan terputusnya hubungan niaga antar negara. Dalam pengadaan beras sebagai makanan pokok, pada masa penjajahan pemerintah kolonial Belanda, masih perlu impor beras dari Thailand. Bagaimana dampaknya bila hubungan niaga dengan Thailand dalam masalah pangan putus? Bahaya kelaparan mewabah di Pulau Jawa. Dalam kebutuhan sandang, masih bergantung dengan produk sandang dari India dan Cina serta luar negeri lainnya. Perang Asia Timur Raya dan Perang Dunia II berdampak masalah sandang pangan menjadi langka. Bagaimana jadinya bila masalah sandang pangan yang merupakan kebutuhan pokok umat Islam, menjadi langka? Berbagai penyakit menerpa segenap keluarga.

K.H. ZAINAL MOESTOFA

Penggerak Gerakan Protes Sosial Pesantren Sukamanah Tasikmalaya,
diikuti oleh Pesantren Lohbener dan Srengseng Indramayu Jawa Barat
dengan tujuan menuntut Indonesia Merdeka berdasarkan Islam.
Dijawab oleh P.M. Koiso, 8 September 1944, Jumat Pon, 19 Ramadhan 1363,
Indonesia Merdeka pada kemudian hari berdasarkan Islam.

Sumber: *Doc. Pribadi*

Keluarga Tentara Pembela Tanah Air Peta yang dipimpin oleh para Ulama, tidak dapat menghindar dari bencana kelaparan dan kekurangan sandang. Bila perut lapar, ternyata politik pun jadi semakin memburuk – empty belly makes bad politic. Dalam kondisi ini, ledakan gerakan protes sosial dari desadesa yang dipimpin oleh Ulama desa di Jawa dan pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air – Peta kerja sama dengan Ulama, tidak dapat dicegah lagi.

Gerakan Protes Sosial Ulama di Sukamanah Tasikmalaya

Hunger as a weapon of war – kelaparan sebagai senjata untuk melumpuhkan lawan dalam peperangan, demikian pendapat Josue de Castro dalam The Geography of Hunger. Kebenaran teori yang dikemukakan oleh Josue de Castro ini tidak hanya dijalankan oleh Sekoetoe pada abad ke20 M, juga abad ke17 M terjadi di Indonesia. Dilakukan VOC dalam menghentikan serangan Soeltan Agoeng dan Dipati Oekoer dengan membakar lumbunglumbung padi gudang logistiknya. Demikian pula yang dilakukan VOC terhadap Soeltan Hasanoeddin menutup jalan niaga laut Makasar dengan Cina dan India.

Balatentara Djepang sangat memahami perlunya memerhatikan masalah pangan dalam masa Perang Asia Timur Raya. Dibentuklah Beikoku Tyuoo Kobaisyo Kantor Pusat Urusan Pembelian Beras dan Beikoku Toosei Kai Kantor Pengendalian Penjualan dan Pembelian Beras. Selain itu, dibentuk pula Kumiai Renmei Koperasi Persatuan Desa, dipimpin oleh Syomin Kumiai Sodandyo Jawatan Penerangan Koperasi dan Peragangan.

Didirikan di Jawa Barat meliputi kota: Serang, Jakarta, Bogor, Bandung, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Cirebon. Di Jawa Tengah meliputi kota: Purwokerto, Brebes, Pekalongan, Semarang, Magelang, dan Jogjakarta. Di Jawa Timur meliputi kota: Surabaya, Kediri, Malang, dan Jember.

Sistem kerja koperasi tadi, tidak dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Penyerahan padi seharusnya diikuti pembelian dengan harga yang wajar atau dengan pergantian materi lain yang diperlukan oleh para petani. Realitasnya para petani dikenakan kewajiban menyerahkan hasil padinya semata tanpa pergantian apapun. Menurut Surat Kabar Tjahaya, Rabo, 12 Itigatu 2604, No 11, Tahoen Ke III, penyerahan padi tersebut didasarkan Amanat Syuuchokan kepada rakyat Priangan Syuu.

Malpraktik pelaksanaan amanat *Syuuchokan* di atas, penyerahan padi tanpa pergantian apapun, memicu timbulnya protes sosial di kalangan petani. Di Jawa Barat, seperti terulang kembali sejarah pemaksaan penyerahan padi dari para petani, mirip dengan peristiwa Hadji Hasan Cimareme Garut, 1337 H/1919 M. Gerakan protes sosial petani merupakan malpraktik pelaksanaan *Nippon's Islamic Grass Root Policy* - Kebijakan Islam Balatentara Djepang terhadap Ulama Desa. Diperkirakan Ulama Desa yang dijauhkan dari pengaruh pimpinan parpol Islam, akan mudah diperalat oleh Balatentara Djepang. Kenyataan di lapangan, justru berbalik timbul protes sosial dipimpin oleh Ulama Desa dari kalangan Nahdlatoel Oelama.

Pecahlah protes sosial petani Muslim setelah tampilnya seorang Ulama, K.H. Zainal Moestofa dari Sukamanah Tasikmalaya. Menurut Mr. Kasman Singodimedjo *Daidancho* Tentara Pembela Tanah Air - Peta Jakarta, peristiwa itu terjadi tepat pada 18 Februari 1944.[1] Namun, tanggal ini bertentangan dengan prasasti di Taman Makam Pahlawan Sukamanah, dituliskan 25 Februari 1945.

> Bila benar terjadi pada 18 Februari 1944, maka peristiwa tersebut pecah pada Jumat Kliwon, 22 Safar 1363. Apabila 25 Februari 1944 maka peristiwanya pecah juga pada Jumat Pahing, 29 Safar 1363. Dengan demikian, Balatentara Djepang bersama Polisi Pribumi menyerang pada saat berjamaah Shalat Jumat.
>
> Pada Jumat, K.H. Zainal Moestofa sedang bersama dengan segenap Santri dan para pendukungnya. Itulah sebabnya serangan tersebut dapat menangkap dan membantai para Santri dan Ulama lainnya. Ternyata pengorbanan harta dan jiwa Ulama dan Santri, tidaklah sia-sia. Terjawab tetap pada 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, Indonesia Merdeka.

K.H. Zainal Moestofa sebagai pimpinan Pesantren Cimerah Sukamanah, dari Nahdlatoel Oelama. Gerakan protes sosialnya tidaklah bermotifkan menuntut padi yang telah dirampas oleh Balatentara Djepang. Melainkan lebih cenderung sebagai gerakan perlawanan politik. Mengapa? K.H.Zainal Moestofa menyadarkan para santri dan petani, tidak mungkin terjadi perampasan padi, apabila Indonesia tidak dijajah. Oleh karena itu, K.H. Zainal Moestofa memberi kualitas mutu motivasi atau *nawaitu* gerakannya, menuntut kemerdekaan Indonesia.

1 Gerakan protes sosial ini tidak diberitakan dalam media apapun. Termasuk Surat Kabar *Tjahaya* yang dipimpin oleh Oto Iskandardinata. Tentu hal ini sebagai upaya Balatentara Djepang melokalisasikan perlawanan Ulama agar tidak menyebar atau menular ke seluruh 20.834 desa - *ku* dan 79 kabupaten - *ken* di Pulau Jawa-Madura yang sedang menderita kelaparan.

Gerakan perlawanan politiknya, tidak menargetkan menang karena para santrinya hanya dipersenjatai dengan pedang bambu atau tulang sapi, dalam mempertahankan pesantrennya dari serangan Balatentara Djepang. Motivasi perlawanannya tidak lain berangkat dari kesadaran dan keyakinan, betapa besar dosanya sebagai Ulama dan santri bila melihat kezaliman tidak melancarkan perlawanan. K.H. Zainal Moestofa sangat sadar bahwa lawannya Balatentara Djepang memiliki organisasi persenjataan modern. Oleh karena itu, orang tua santri disadarkan agar merasa bahagia apabila putranya gugur sebagai syuhada bersama K.H. Zainal Moestofa.

> Selain itu, diajarkan pula kepada santri atau pengikut lainnya, bila tertangkap oleh Balatentara Djepang dan diinterogasi, agar mengatakan "ditipu K.H. Zainal Moestofa untuk menegakkan Indonesia Merdeka". Dengan mengatakan ditipu kiai, diharapkan santrinya yang tertangkap tidak disiksa secara kejam oleh Kempetai Balatentara Djepang.

Balatentara Djepang yang sebelumnya telah kehilangan dua orang prajurit Jepang yang dibunuh di pesantren[2], melancarkan serangan besar besaran. Pesantren dikepung oleh Balatentara Djepang dan Polisi Pribumi serta digunakan pula tank yang disiapkan di sepanjang jalan dari Pesantren Sukamanah hingga kota Tasikmalaya. Demikian penjelasan Dr. K.H. E.Z. Muttaqien sebagai santri dari Pesantren Sukamanah, kepada penulis.[3]

Male Wiranatakoesoemah kepada penulis menjelaskan persiapan penyerangan yang besar karena menurut perintah Balatentara Djepang kepada pihak Polisi Pribumi ditugaskan untuk melawan tentara Amerika Serikat yang mendarat dengan terjun payung dan telah membunuh Tentara Jepang di Pesantren Sukamanah. Perintah itulah yang menjadikan Polisi Pribumi berani menyerang Pesantren.

Betapa hebatnya keberanian Santri menghadang serangan Balatentara Djepang, dan Polisi Pribumi bersenjata lengkap dan berat walaupun para Santri hanya

2 Jenazah kedua prajurit Jepang tersebut dikuburkan di komplek Pesantren Sukamanah. Sekarang sudah tidak ada karena diminta oleh pemerintah Jepang untuk dipindahkan ke makam tentara korban Perang Asia Timur Raya di Jepang.

3 Dr. K.H. E. Z. Muttaqien ketika masih sebagai santri Pesantren Sukamanah, ditugasi oleh K.H. Zainal Moestofa untuk menyampaikan surat kepada K.H. Achmad Sanoesi Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi. Tetapi ketika di Stasiun Kereta Api Bandung ditangkap oleh Jepang dan dibawa ke Markas *Kempetai* di Rumah Sakit Bungsu sekarang. Pada saat itu, terjadi suatu keajaiban, mampu dengan cepat ditelannya surat untuk K.H. Ahmad Sanoesi. Andaikata sampai ketahuan oleh *Kempetai*, K.H. Achmad Sanoesi akan mengalami penangkapan dan penyiksaan. Andaikata surat tersebut sampai ke tangan K.H. Achmad Sanoesi, akan terjadi pula solidaritas protes sosial di Pesanten Gunung Puyuh Sukabumi. Demikian penjelasan Dr. K.H. E.Z. Muttaqien, Rektor Universitas Islam Bandung kepada penulis.

bersenjatakan pedang bambu dan tulang sapi. Keberaniannya tumbuh karena telah diyakinkan oleh Kiai, perang bukan untuk mencari kemenangan. Melainkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan diajarkan pula betapa indahnya gugur sebagai *syuhada* melawan Balatentara Djepang penyembah Dewa Matahari, akan ditempatkan oleh Allah di surga dan memperoleh rezeki yang mulia.

Perlawanan dengan persenjataan yang tak seimbang, memungkinkan dalam relatif singkat, K.H. Zainal Moestofa dan 21 pimpinan pesantren lainnya ditangkap. Berikutnya, Kiai dan para pimpinan pesantren mendapat penyiksaan yang menyedihkan. Kampus pesantrennya dihancurkan, kitab-kitab dibakar. Gugurlah 85 santrinya sebagai *syuhada* menyertai Kiai dan pimpinan pesantren.

> Secara sepintas Balatentara Djepang dalam teori perang berhasil melakukan *destruction of enemy's forces* - penghancuran kekuatan lawannya. Tetapi apakah mampu mematahkan *enemy's will* - kemauan lawannya. Carl von Clausewitz secara teori perang mengingatkan bahwa tidak ada kekuatan fisik militer apapun dapat menghancurkan kemauan bangsa yang berjuang ingin memerdekakan negara dan bangsanya.
>
> Penyerbuan *Balatentara Djepang* bersama Polisi Pribumi ke Pesantren Sukamanah, persis seperti nasehat Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje terhadap serdadu Belanda, agar melancarkan *ruthless operation* – operasi tanpa belas kasih dalam menindas gerakan perlawanan bersenjata Ulama dan Santri. Akibat Balatentara Djepang sebagai murid Barat, maka ditirunya sistem penjajah Barat: menangkap, dan menggantung Ulamanya, serta membakar habis pesantrennya.

Untuk dapat melaksanakan operasi tanpa belas kasih ini, tidak mungkin menggunakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta karena Batalyon I Tasikmalaya dipimpin oleh *Daidancho* K.H. Soetalaksana dan Batalyon II Pangandaran dipimpin oleh *Daidancho* K.H. Pardjaman. Kedua Komandan Batalyon atau *Daidancho* tersebut adalah Ulama dari Persjarikatan Moehammadijah. Tidak mungkin berhasil operasi menggempur perlawanan pesantren yang dipimpin oleh Ulama. Oleh karena itu, digunakan Polisi Pribumi.[4]

4 Male Wiranatakoesoemah dalam pengakuannya kepada penulis, merasa menyesal seumur hidup. Karena merasa ibadahnya belum benar, sebagai Polisi Pribumi, ditugaskan oleh Balatentara Jepang untuk menangkap K.H.Zainal Moestofa dan menghancurkan pesantrennya. Terbayang betapa besar dosanya, mengikat Kiai dan menyeretnya dari pesantren hingga jalan besar. Kemudian, melemparkannya ke bawah truk dan selanjutnya diserahkan kepada *Kempetai*. Penyesalannya lebih dalam lagi, setelah Kiai yang pernah ditangkapnya, K.H. Zainal Moestofa diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Untuk meredakan perasaan sesalnya yang dalam, ia curhat kepada Dr. K.H. E.Z. Muttaqien, Rektor Unisba, dan mantan Santri Pesantren Sukamanah, menanyakan bagaimana caranya tobat yang sebaik-baiknya.

Adapun santrisantri yang tertangkap, disiksa, dan diinterogasi oleh Kempetai. Jawabnya ditipu oleh Kiai dan hoyong merdeka, dalam bahasa Sunda artinya ingin merdeka. Tidak ada seorang santri pun yang menjawab ingin menuntut padinya yang dirampas oleh Balatentara Djepang. Melainkan hanya menyatakan jihad menuntut Indonesia Merdeka.

Demikian pula jawaban K.H. Zainal Moestofa dari Nahdlatoel Oelama, tetap menyatakan motivasinya adalah untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Kolonel A.H. Nasution dalam TNI Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan K.H. Zainal Moestofa, Kiai Emas dan yang lainnya bercitacita membangun kebahagiaan rakyat dalam negara Islam yang bebas dari kekuasaan asing.[5]

> Umumnya, dalam penulisan Sejarah Indonesia, akibat adanya deislamisasi dalam penulisannya, hanya dituliskan K.H. Zainal Moestofa dan Kiai Emas memberontak melawan Balatentara Djepang yang menindas para petani Sukamanah Tasilmalaya. Namun, tidak dituliskan gerakan protes sosialnya menuntut Indonesia Merdeka berdasarkan Islam.

Balatentara Dai Nippon sebagai penjajah, tidak mungkin mau mendengar tuntutan para Ulama Indonesia Merdeka berdasarkan Islam. Oleh karena itu, Mahkamah Tentara Jepang Kriegsgericht menjatuhkan hukuman mati kepada K.H. Zainal Moestofa bersama 21 Syuhada:

Kiai Domon	Kiai Aip Abdoel Hakim	Kiai Nadjamoeddin
Kiai A.Hidajat	Hadji Hafid	Saefoeddin
Sarkasih	Hambali	I. Sjahroni
Adoeng Karim	Tahri	Samsoedin
Hoesein	Endin	Oemar
Abdoel Rozaq	Asikin	Achmad
Namri Amma	Hoedori	

5 Kolonel A.H. Nasution, 1963. *Tentara Nasional Indonesia*. Djilid 1. Tjetakan Kedua. Ganaco N.V. Bandung, hlm. 88.

Sumber: *Doc. Rosad Amidjaja*

Gerakan Protes Sosial Pesantren Sukamanah yang dipimpin oleh K.H. Zainal Moestofa, bukan karena menuntut pengembalian padi yang dirampas Balatentara Djepang. Melainkan terpanggil untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Diserbu Tentara Jepang dan dibantu Polisi Pribumi dengan persenjataan yang kuat dan pasukan tank. Akibatnya secara fisik puluhan Santri dan pimpinan Pesantren bersama K.H. Zainal Moestofa gugur sebagai *syuhada*. Kemauan merebut kembali kemerdekaan, tidak dapat terpadamkan oleh keganasan pemilik senjata. Betapa mahalnya nilai kemerdekaan, hanya dengan harta dan darah para *Syuhada* dapat merebutnya. Pesantren Sukamanah adalah satu-satunya pesantren di Jawa Barat yang memiliki makam pahlawan nasional.

Sumber: *Doc. Rosad Amidjaja*

Kuburan Tentara Jepang yang dibinasakan oleh Santri di dekat Pesantren. Sekarang sudah tidak ada, diambil dan dipindahkan oleh pemerintah Jepang.

Perlawanan politik K.H. Zainal Moestofa hanya terjadi di sebuah Pesantren di desa Cimerah Sukamanah dan hanya sehari dapat diselesaikan secara sistem persenjataan teknik sistek. Namun, tuntutannya ingin Indonesia merdeka menegakkan negara Islam yang bebas dari penjajahan asing, tidak dapat dipadamkan melalui serangan fisik militer. Walaupun saat itu sistem pemberitaan baik melalui media teknik radio Bandung Hoso Kyoku ataupun surat kabar Tjahaya, dikuasai oleh Balatentara Djepang, tetapi berita gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah menjalar ke Indramayu.

Gerakan Protes Sosial di Lohbener, Indramayu

Gerakan protes sosial Pesantren Cimerah Sukamanah ternyata membangkitkan semangat perlawanan Ulama di Indramayu. Tidak takut dengan serangan Blietzkrieg serangan kilat Balatentara Djepang yang diikuti dengan pembantaian santri dan penangkapan ulamanya. Dapat dipahami bila di wilayah pedesaan Indramayu, akan mudah bangkit semangat perlawanannya. Indramayu dikenal sebagai wilayah yang kurang subur. Bahaya kelaparan, wabah penyakit, dan berbagai penderitaan tak dapat dihindari. Hasil sawah ladangnya disita oleh Balatentara Djepang.

Padahal saat Balatentara Djepang mendarat di P. Jawa melalui salah satu gerbang pendaratannya adalah Eretan Indramayu. Kedatangan Balatentara Djepang disambut oleh para petani sebagai tentara pembebas dari penjajahan Barat. Namun, mengapa setelah pendudukan justru para petani ditindas oleh Balatentara Djepang?

Semestinya dengan adanya Nippon's Islamic Grass Roots Policy lebih memerhatikan nasib petani dan Ulama dari desadesa Indramayu. Tetapi realitasnya justru sebaliknya, terjadi kembali penindasan terhadap petani Indramayu seperti penjajah Belanda dengan Tanam Paksa, 18301919 M.

Para Ulama tidak tahan lagi melihat rakyat petani Muslim menderita. Secara massal terserang wabah penyakit, kelaparan, dan busananya pun menyedihkan dengan karung goni. Oleh karena itu, pada 30 Juli 1944, Ahad Pon, 9 Syawwal 1363, pecahlah protes sosial dipimpin oleh:

Hadji Madrijas	Kiai Moekasan
Hadji Kartiwa	Kiai Koesen
Kiai Srengseng	

Perlawanan politik K.H. Zainal Moestofa hanya terjadi di sebuah Pesantren di desa Cimerah Sukamanah dan hanya sehari dapat diselesaikan secara sistem persenjataan teknik sistek. Namun, tuntutannya ingin Indonesia merdeka menegakkan negara Islam yang bebas dari penjajahan asing, tidak dapat dipadamkan melalui serangan fisik militer. Walaupun saat itu sistem pemberitaan baik melalui media teknik radio Bandung Hoso Kyoku ataupun surat kabar Tjahaya, dikuasai oleh Balatentara Djepang, tetapi berita gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah menjalar ke Indramayu.

Gerakan Protes Sosial di Lohbener, Indramayu

Gerakan protes sosial Pesantren Cimerah Sukamanah ternyata membangkitkan semangat perlawanan Ulama di Indramayu. Tidak takut dengan serangan Blietzkrieg serangan kilat Balatentara Djepang yang diikuti dengan pembantaian santri dan penangkapan ulamanya. Dapat dipahami bila di wilayah pedesaan Indramayu, akan mudah bangkit semangat perlawanannya. Indramayu dikenal sebagai wilayah yang kurang subur. Bahaya kelaparan, wabah penyakit, dan berbagai penderitaan tak dapat dihindari. Hasil sawah ladangnya disita oleh Balatentara Djepang.

Padahal saat Balatentara Djepang mendarat di P. Jawa melalui salah satu gerbang pendaratannya adalah Eretan Indramayu. Kedatangan Balatentara Djepang disambut oleh para petani sebagai tentara pembebas dari penjajahan Barat. Namun, mengapa setelah pendudukan justru para petani ditindas oleh Balatentara Djepang?

Semestinya dengan adanya Nippon's Islamic Grass Roots Policy lebih memerhatikan nasib petani dan Ulama dari desadesa Indramayu. Tetapi realitasnya justru sebaliknya, terjadi kembali penindasan terhadap petani Indramayu seperti penjajah Belanda dengan Tanam Paksa, 18301919 M.

Para Ulama tidak tahan lagi melihat rakyat petani Muslim menderita. Secara massal terserang wabah penyakit, kelaparan, dan busananya pun menyedihkan dengan karung goni. Oleh karena itu, pada 30 Juli 1944, Ahad Pon, 9 Syawwal 1363, pecahlah protes sosial dipimpin oleh:

Hadji Madrijas — Kiai Moekasan
Hadji Kartiwa — Kiai Koesen
Kiai Srengseng

Para Ulama ini menyadari penderitaan rakyat terjadi karena dijajah. Oleh karena itu, bertekad sama dengan K.H. Zainal Moestofa ber*jihad fi sabilillah* membangun Indonesia bebas dari penjajahan, berdasarkan Islam.

Gerakan protes sosial ini dilancarkan setelah para Ulama dan Santri selesai shaum Ramadhan dan selesai menjalankan shaum enam hari bulan Syawwal. Pemilihan waktu yang demikian, dengan harapan bila gugur dalam menegakkan kebenaran, gugur sebagai Syuhada.

> Menurut Kolonel A.H.Nasution, dalam *Tentara Nasional Indonesia*, Djilid I, Balatentara Djepang dan Polisi tidak mudah memadamkan gerakan protes sosial yang dipimpin oleh para Ulama. Memakan waktu berbulan - bulan melakukan penye rangan, baru berhasil menangkap para Ulama Indramayu dari Nahdlatoel Oelama.

Setelah ditangkap, kemudian mengalami nasib yang sama, ditembak mati. Tindakan Balatentara Djepang dalam menghadapi gerakan perlawanan Ulama dan Santri memilih sistem yang tidak beda dengan apa yang dinasihatkan oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje yakni operasi militer tanpa belas kasih. Namun, eksekusi penembakan ini dilaksanakan setelah diumumkannya Janji Kemerdekaan Di Kelak Kemudian Hari, 7 September 1944, Kamis Pahing, 18 Ramadhan 1363, dari Perdana Menteri Koiso. Apakah benar Balatentara Djepang mampu mematikan semangat juang Ulama dan Santri yang bercita-cita membangun Indonesia merdeka berdasarkan Islam?

Cita-cita Ulama dan Santri ini terjadi sebagai jawaban terhadap penindasan Kekaisaran Shinto Djepang setelah berkuasa, berusaha mengembangkan *Nipponisasi* dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, mematikan Islam melalui *Politik Shintonisasi*.

Janji Kemerdekaan Sebagai Sistem Persenjataan Sosial

Gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah, 18 Februari 1944, Jumat Kliwon, 22 Safar 1363, dan Indramayu, 30 Juli 1944, Ahad Pon, 9 Syawwal 1363, seperti mudah dipatahkan dengan sistem persenjataan teknik - sistek: *physical destruction* - dirusakkan kekuatan fisiknya. Diserbu, dibakar habis pesantrennya. Namun, kehancuran fisik ini menurut Carl von Clausewitz dalam teori pertempuran, justru akan *recover* - membangkitkan, *restore* - mengembalikan, dan *courage* - mendorong semangat untuk melanjutkan perlawanan.

Apakah mungkin Balatentara Djepang dengan sistek benarbenar berhasil memadamkan kemauan Santri dan Ulama dari pesantren Nahdlatoel Oelama yang ingin menegakkan Indonesia Merdeka berdasarkan Islam? Secara teori perang, kemenangan yang diperoleh dengan pembantaian slaughter, dan pertumpahan darah, menimbulkan horryfying spectacle kekacauan yang meluas dan perlawanan semakin serius karena Ulama dari Nahdlatoel Oelama, bukan hanya di Sukamanah dan Indramayu. Dapat dipastikan cepat atau lambat akan mendapat dukungan dari keluarga Nahdlatoel Oelama seluruh Nusantara. Di manamana akan terjadi perlawanan bersenjata dari berbagai Pesantren Nahdlatoel Oelama. Dampaknya, Balatentara Djepang akan mengalami nasib sama seperti Jerman kehilangan dukungan dari Ulama negaranegara Timur Tengah yang berpihak kepada Sekoetoe.

Antisipasi Pra Gerakan Protes Sosial

Sebenarnya, Balatentara Djepang sudah mengetahui akan adanya upaya Pesantren Sukamanah akan melancarkan gerakan jihad fi sabilillah menegakkan Indonesia Merdeka dari penjajahan Jepang. Oleh karena itu, Balatentara Djepang mengantisipasinya dengan beberapa pendekatan:

> Pertama, melancarkan consensus strategy - strategi konsensus dengan menarik upaya strategi deormasisasi yang pernah melarang aktivitas Nahdlatoel Oelama, dicabutnya dengan memberikan izin Nahdlatoel Oelama menghidupkan kembali organisasinya pada Januari 1944.
>
> Kedua, mengadakan Latihan Ulama yang pertama diselenggarakan di gedung Madjlis Sjoero Moeslimin Indonesia - Masjoemi, Jalan Immamura No 1 Jakarta, pada 1 Februari 1944. Dihadiri oleh: Syuumubucho Jakarta dan Kiai Hadji Mohammad Adnan dari Mahkamah Tinggi Islam, Hadji Agoes Salim, Kiai Hadji Achmad Sanoesi dari Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi.
>
> Dalam Latihan Ulama ini dibicarakan masalah: Kesehatan, Sikap Barat dan Yahudi terhadap Islam, Sikap Balatentara Djepang terhadap Islam, Tentara Pembela Tanah Air - Peta, Badan Kebaktian Penduduk - Jawa Hokokai. Dari pokok pembicaraan dalam Latihan Ulama, dipropagandakan tentang sikap simpati Balatentara Djepang terhadap Islam. Sebaliknya, ditanamkan kesadaran tentang sikap negatif Barat dan Yahudi terhadap Islam. Diharapkan dengan diadakannya Latihan Ulama, para Ulama di P. Jawa dan Madura tetap membantu dengan harta dan tenaga, guna memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Ketiga, Persatoean Oemat Islam Indonesia - P.O.I.I pimpinan K.H. Abdoel Halim di Majalengka, dan Al Ittihadijatoel Islamijah pimpinan K.H. Achmad Sanoesi di Sukabumi, pada 1 Februari 1944 diizinkan mengaktifkan kembali organisasinya.

Keempat, mengadakan pertemuan Ulama di desa-desa Garut: Wanaraja, Karangpawitan, Tarogong, Samarang, Bayongbong, dan Cisurupan, 7 Januari 1944. Pertemuan ini, dihadiri oleh Kiai Hadji Moesaddad dari Nahdlatoel Oelama dan Moestafa Kamil dari Partai Sjarikat Islam Indonesia. Dilanjutkan ke Tasikmalaya, 8 Januari 1944, Ciamis 9 Januari 1944, dan Sumedang 11 Januari 1944. Wilayah ini semuanya tidak begitu jauh posisinya dan melingkari wilayah Pesantren Sukamanah Singaparna Tasikmalaya, kecuali Sumedang.

Tujuannya menjelaskan bahwa penyerahan padi dari petani mendapatkan ganti rugi dengan pembayaran f.4,-/kwintal dibayar kontan. Ditambah dengan tekstil, dan minyak tanah serta korek api. Jumlah penyerahan hanya 10% dari hasil panen.[6] Kenyataannya janji pergantian dari penyerahan padi ini, hanya propaganda kosong tanpa bukti. Petani dipaksa tidak hanya 10%, melainkan seluruh hasil panennya. Para petani mogok tidak mau memotong padinya. Kemudian, dilakukan sendiri oleh Balatentara Djepang. Dampaknya menumbuhkan semangat anti Jepang yang meluas di kalangan rakyat pedesaan. Rakyat semakin berpihak kepada Ulama.

Balatentara Djepang menyadari upaya antisipasinya gagal. Pecahlah gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah Tasikmalaya pada 18 Februari 1944, Jumat Kliwon, 22 Safar 1363. Bermuatan motivasi politik, menuntut kemerdekaan. Walaupun ditindas dengan kejam, namun menyusul Pesantren Lohbener Indramayu pada 30 Juli 1944, Ahad Pon, 9 Syawwal 1363, berani melancarkan perlawanan terhadap Balatentara Djepang.

Keduanya melancarkan gerakan *jihad fi sabilillah* menuntut Indonesia Merdeka berdasarkan Islam. Upaya *Nippon's Islamic Grass Roots Policy* dengan tujuan depolitisasi Ulama Desa ternyata gagal. Padi yang dirampas Balatentara Djepang, tidak dituntutnya. Melainkan menurut Kolonel A.H. Nasution dalam *Tentara Nasional Indonesia*, Djilid I, justru menuntut kemerdekaan Indonesia berdasarkan Islam.

---

6 Surat Kabar *Tjahaja*, Djoemat, 14 Itigatu 2604. No.3 Tahoen Ke III, 18 Moeharam 1363 H. Periksa, Prof. Soedjito Sosrodihardjo, SH. MA. 1972. *Perubahan Struktur Masjarakat di Djawa*. Karya. Jogyakarta, hlm 47 menjelaskan pada masa penjajahan Belanda, harga padi f.3.25/kwintal untuk padi cere dan padi bulu f.3.60/kwintal. Apabila pemerintah Balatentara Djepang mengganti harga padi f.1.60/kwintal berarti menurunkan harga pembelian 50%.

K.H. HABIB USMAN BIN HUSEIN ALAYDARUS
Pendiri Yayasan Assalaam Bandung

Habib lebih menyukai dan memilih tinggal di Jalan Sasakgantung Bandung Selatan, bersama Pribumi Sunda dan umat Islam lainnya daripada tinggal bersama penjajah Belanda di Bandung Utara.
Menolak status dari pemerintah kolonial Belanda sebagai Vreemde Oosterlingen Bangsa Asing Timur: Cina, India, Arab yang harus domisili di wilayah penjajah Belanda di Bandung Utara, dan menjauhi Pribumi Islam.
Memimpin doa bersama dalam Rapat Akbar di Lapangan Tegallega Bandung menyambut perkenan kemerdekaan dari P.M. Koiso, Indonesia Merdeka Berdasar Islam Di Kelak Kemudian Hari, 8 September 1944, Jumat Pon, 19 Ramadhan 1363.

DR. K.H.Habib Syarief Muhammad HU
Penerus
Ketua Yayasan Assalaam Bandung

Sumber: Doc.Pribadi

JANJI KEMERDEKAAN DI KELAK KEMUDIAN HARI PERDANA MENTERI KOISO 8 Kugatsu 2604

Pemerintahan Balatentara Djepang dikejutkan oleh pelaksanaan **Nippon Islamic Grass Root** Policy yang berdampak terjadinya: Gerakan Protes Pesantren Sukamanah Tasikmalaya yang dipimpin oleh K.H. Zainal Moestofa, Kiai Emas, Kiai Damon, Kiai Aip Abdoel Hakim, Kiai Nadjamoedin. Kiai Achmad Hidajat, Hadji Hafid pada 18 Februari 1944, diteruskan oleh Ulama Nahdlatoel Oelama Indramayu, Cirebon dipimpin oleh Hadji Madrijas, Hadji Kartiwa, Kiai Srengseng, Kiai Kusen, 30 Juli 1944. Kedua Gerakan Protes Pesantren ini bertujuan memperjuangkan kebahagiaan rakyat di dalam negera Islam yang bebas dari kekuasaan asing.

Dalam upayanya membendung pengaruh Gerakan Protes Pesantren terhadap kalangan politisi dan para Ulama, Komandan Batalyon Daidancho Tentara Pembela Tanah Air Peta, selain dilaksanakan sistem persenjatan teknik sispertek, Blitzskrieg Strategy, penangkapan kiai dan penghancuran pesantren, juga dilaksanakan sistem persenjataan sosial sispersos. Perdana Menteri Koiso dalam Sidang Istimewa Teikoku Gikai ke 85, 7 September 1944, mengumumkan Janji Kemerdekaan Di Kelak Kemudian Hari.

Pengumuman ini disosialisasikan oleh Saiko Sikikan tepat Tanggal Pembangoenan Asia Timoer Raja di Jakarta, 8 September 1944 bertepatan dengan 20 Ramadhan 1363. Diikuti dengan diizinkannya pengibaran Merah Putih, dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Di samping itu, Nahdlatoel Oelama, Perserikatan Moehammadijah, Persatoean Oemat Islam, Allttihadijaoel Islamijah, Persatoean Islam diizinkan aktif kembali.

Periksa: Tjahaja, Djoemat, 8 Kugatsu 2604, 20 Poeasa 1363, Hari Pembangoenan Asia Timoer Raja dan pidato Perdana Menteri Koiso di Sidang Istimewa Teikoku Gikai ke85.

Sumber: www.wikipedia.com

Derap Langkah Prajurit Tentara PETA

Oleh karena itu, jawaban Keradjaan Shinto Jepang melalui Perdana Menteri Koiso, terhadap tuntutan kemerdekaan para Ulama dari Pesantren Sukamanah Singaparna Tasikmalaya dan Lohbener Indramayu, memberikan Janji Kemerdekaan Indonesia kelak pada kemudian hari, disampaikan pada 7 September 1944[7], Kamis Pahing, 18 Ramadhan 1363.

Janji Kemerdekaan dari Perdana Menteri Koiso tersebut diumumkan oleh *Saiko Shikikan* Letnan Jenderal Kumashiki Harada, 8 September 1944, bertepatan dengan Jumat Pon, 19 Ramadhan 1363 H.[8] Diikuti dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih dan diizinkan pula menyanyikan Lagu Indonesia Raya. Janji kemerdekaan tersebut dimuat dalam surat kabar *Tjahaja*:

> Berhoeboeng dengan keadaan terseboet, maka disini dioemoemkan bahwa Dai Nippon T. memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia kelak kemoedian hari soepaja dengan djalan demikian moega-moega kemakmoeran segenap bangsa Indonesia jang kekal dan abadi dapat dipertahankan setegoeh-tegoehnja.[9]

Dampaknya, di Bandung diadakan Rapat Besar pada 13 September 1944 menyambut Perkenan Indonesia akan Merdeka di Kooa Undoozya Tegallega dihadiri oleh 10.000 pengunjung. Ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh K.H. Habib Oesman dari Assalam Bandung.

Di Jakarta, Wachid Hasjim sebagai Ketua Masjoemi, menyambut Perkenan Indonesia akan merdeka, mengadakan Rapat Besar di Taman Raden Saleh, pada 13-14 September 1944. Dijelaskan Islam sebagai agama kemerdekaan. Dalam rapat ini, K.H. Abdoel Moekti berbicara mengenai Islam dan Kemerdekaan. Diingatkan perjalanan sejarah Islam masuk ke Nusantara Indonesia, hingga berdirilah kesultanan yang merdeka. Namun, setelah penjajah Barat datang umat Islam kehilangan kemerdekaannya. Diikuti oleh Hadji Abdoel Kahar Moezakkir dari *Shumubu*,

---

7 Janji Kemerdekaan 7 September 1944 ini dipengaruhi pula kekalahan Italia dan Jerman di Eropa. Sekoetoe berhasil menjadikan Italia menyerah 1 Mei 1944, membebaskan Normandia, 6 Juni 1944, Perancis, 24 Agustus 1944, dan Belgia, 2 September 1944.

8 Janji Kemerdekaan di kelak Kemudian Hari, diumumkan 8 September 1944, Jumat Pon, 19 Ramadhan 1363, di Jakarta. Setahun kemudian, bertepatan pula di bulan Ramadhan, direbut dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364 di Jakarta. Jayakarta atau Jakarta didirikan pada 22 Ramadhan 933 atau 22 Juni 1527. Bagi umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia, Ramadhan sebagai bulan penuh berkah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

9 *Tjahaja*, Djoemat, 8 Kagatsu 2604, No. 216 Tahoen Ke III, 20 Poeasa 1363 H. Tepat Hari Pembangoenan Asia Timoer Raja, berisikan pidato Perdana Menteri Koiso di Sidang Istimewa *Teikoku Gikai* ke-85 dan *Tjahaja*, Rebo, 13 Kugatsu 2604, 25 Poeasa 1363 H, memberitakan adanya Rapat Besar Menjamboet Indonesia Merdeka.

menyerukan segenap Ulama dan pemuda agar menyusun kekuatan dan siap berjuang meruntuhkan penjajah sebagai lawanlawan Islam. Guna menegakkan Agama Allah dan mempertahankan Tanah Air Islam.

Madjlis Sjoero Moeslimin Indonesia Masjoemi pada 25 Syawwal 1363 atau 12 Oktober 1944 mengadakan rapat yang dihadiri selain pengurus, dihadiri pula oleh pimpinan pusat Persjarikatan Moehammadijah, Nahdlatoel Oelama, Persatoean Oemat Islam Indonesia P.O.I.I, dan Persjerikatan Oemat Islam P.O.I.

> Dalam rapat ini diputuskan antara lain:
> Menjiapkan oemat Islam Indonesia, soepaja tjakap dan tjoekoep menerima Kemerdekaan Indonesia dan Kemerdekaan Agama Islam. Hal ini bertolak dari pengertian bahwa Kemerdekaan Indonesia berarti Kemerdekaan Kaoem Moeslimin Indonesia. Dan Kemerdekaan Indonesia adalah salah satoe sjarat jang penting goena tertjapainja Kemerdekaan Oemat Islam Indonesia, oentoek mendjalankan Sjariat Agamanja dengan semestinja.[10]

Melihat sambutan para Ulama dan umat Islam terhadap Janji Kemerdekaan Di Kelak Kemudian Hari 7 September 1944, Kamis Pahing, 18 Ramadhan 1363, demikian besar, maka Balatentara Djepang baru berani melaksanakan hukuman tembak mati terhadap semua pelaku gerakan protes sosial dari Pesantren Sukamanah Tasikmalaya dan Pesantren Lohbener Indramayu, pada Oktober 1944 di Jakarta secara rahasia. Bumi Nusantara bersimbah darah Ulama dan Santri tumpah terkena terjangan peluru penjajah Fasisme Jepang, rela gugur sebagai syuhada dalam membela kemerdekaan Indonesia berdasarkan Islam.

Balatentara Djepang sangat khawatir apabila Nahdlatoel Oelama solider terhadap gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah Tasikmalaya dan Pesantren Lohbener Indramayu. Selain dengan mengumumkan Janji Kemerdekaan Di Kelak Kemudian Hari, 7 September 1944, Kamis Pahing, 18 Ramadhan 1363, segera dicegahnya kebangkitan solidaritas setelah K.H. Zainal Moestofa dan para Ulama Indramayu, pada Oktober 1944 dengan melalui sistem persenjataan sosial yang lain, K.H. Maskoer dari Nahdlatoel Oelama diangkat sebagai pimpinan Markas Tertinggi Hizboellah dan Zainoel Arifin sebagai Panglima Lasjkar Hizboellah pada19 Desember 1944.

Nahdlatoel Oelama dan Ansor beralih atensinya pada pembangunan organisasi semimiliter, Lasjkar Hizboellah. Dalam waktu relatif singkat, terdaftar 400.000

10 Panitia. 1377 H-1958 M. *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar.* Kementerian Agama. Djakarta, hlm. 337-341.

Pemoeda Ansor dan keluarga Nahdliyin, dan yang telah mendapatkan kesempatan dilatih sejumlah 50.000 orang. Dari jumlah yang terlatih ini, berarti Nahdlatoel Oelama memiliki 50 batalyon Lasjkar Hizboellah. Tempat latihannya di Cibarusa Bogor, Jawa Barat. Walaupun massa terbesar Nahdlatoel Oelama terkonsentrasi di Jawa Timur.

Janji Kemerdekaan walaupun tidak jelas ketentuan waktunya, di kelak kemudian hari, berfungsi sebagai sistem persenjataan sosial - sisos Balatentara Djepang, berhasil mengalihkan perhatian dan meredam gerakan solidaritas Ulama dan Santri dari seluruh Pesantren Nahdlatoel Oelama di P. Jawa terhadap gerakan protes sosial di Sukamanah Tasikmalaya dan Lohbener Indramayu. Apalagi dengan diberikannya kesempatan Nahdlatoel Oelama untuk membangun 50 Batalyon Lasjkar Hizboellah, 19 Desember 1944. Hal ini menambah jumlah organisasi kesenjataan modern yang dipimpin oleh Ulama, 69 Batalyon Tentara Pembela Tanah Air - Peta, 3 Oktober 1943.

Sumber: *A.H.Nasution, TNI, Jilid I*

LASYKAR HIZBULLAH

Pada awalnya dibentuk pada masa pendudukan Tentara Jepang (19 Desember 1944)
sebanyak 50.000, kemudian menjadi benteng Pembela Proklamasi
17 Agustus 1995 - 9 Ramadhan 1364.

Janji Kemerdekaan diikuti dengan diizinkannya mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih dan diizinkan pula menyanyikan Indonesia Raya. Kebijakan ini disambut gembira oleh para Ulama karena Merah Putih warna Bendera Rasulullah saw yang telah membudaya di tengah mayoritas bangsa Indonesia.[11] Semua ini untuk sementara menjadikan Ulama yakin keberpihakan Balatentara Djepang terhadap perjuangan umat Islam Indonesia dalam menegakkan Indonesia Merdeka berdasarkan Islam.

Kebijakan Balatentara Djepang ini, sebenarnya dilatarbelakangi adanya:

Pertama, serangan balik Sekoetoe semakin memasuki perairan Indonesia. Sekoetoe telah berhasil merebut New Guinea 24 April 1944, Morotai 15 September 1944, P. Leyte Filipina 25 Oktober 1944. Dapat dikatakan hubungan Tokio Jakarta menjadi terancam.

Kedua, bertolak dari pertimbangan geostrategi, Provinsi Jawa Barat sebagai inti dari seluruh provinsi di Indonesia, dan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Balatentara Djepang berada di Jawa Barat. Gerakan protes sosial yang terjadi di Jawa Barat merupakan tikaman dari belakang yang akan mematikan Balatentara Djepang yang sedang menghadapi kekalahan di seluruh fron di Pasifik dan Asia Tengara.

Sebenarnya, Balatentara Djepang pernah menghadapi gerakan protes sosial dari Ulama Aceh yang dipimpin oleh Abdul Jalil, 1942 M. Berakibat jatuh korban 90 tentara Jepang, dan 300 rakyat Aceh. Diikuti di Pontianak, 1943 M, dengan korban mencapai 1614 terdiri dari keluarga Sultan, cendekiawan dan rakyat. Tidak terberitakan berapa jumlah korban tentara Jepang di Kalimantan Barat. Semua ini hanya dikisahkan sebagai gambaran perbedaan sistem pembinaan teritorial antara Angkatan Laut Jepang di Luar Jawa dengan Angkatan Darat Jepang di P. Jawa. Akibat gerakan protes ini terjadi saat Balatentara Djepang masih berjaya dalam awal perangnya, 1942-1943 M maka tidak mendapat tanggapan dari Singapora dan Tokio.

11 Imam Muslim dalam *Kitab Al Fitan*, Jilid X, hlm. 340 antara lain *Rasulullah saw* bersabda: *Sesungguhnya Allah memperlihatkan dunia kepadaku. Dan diperlihatkan pula timur dan baratnya. Allah juga menganugerakan kepadaku warna yang sangat indah: Merah Putih*. Kemudian dibudayakan oleh umat Islam Indonesia dalam bentuk menyambut kelahiran dan pemberian nama bayi yang baru lahir, dengan membuat Bubur Merah Putih. Lambang warna darah ibu yang merah dalam rahim yang dikonsumsi oleh bayi selama 9 bulan 10 hari (QS 96: 2) dan warna putih darah ibu sesudah lahir atau Asi selama 20 bulan 20 hari (QS 46: 15). Demikian pula digunakan sebagai prakata, Sekapur Sirih artinya kapur dan sirih membentuk warna Merah dan Seulas Pinang artinya warna bagian dalam pinang adalah Putih. Demikian pula pada saat membangun rumah, di bagian atas kerangka atap dikibarkan Bendera Merah Putih sebagai doa agar mendapat Safa'at dari Rasulullah saw.

Upaya Antisipasi Melalui Tentara Pembela Tanah Air - Peta

Balatentara Djepang menyadari eksistensi pesantren di Pulau Jawa, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan dan bukan hanya sebagai *farmers training institute* - lembaga pelatihan pertanian. Melainkan pesantren juga berfungsi sebagai *an indigenous basis for rising anti foreign* – basis pembangkit gerakan anti penjajah asing.

Terbukti dengan pecahnya gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah pada 18 Februari 1944/2604, Jumat Kliwon, 22 Safar 1363. Disusul dengan gerakan protes sosial di Pesantren Lohbener Indramayu pada 30 Juli 1944 /2604, Ahad Pon, 9 Syawwal 1363. Tidak memperjuangkan masalah padi yang dirampas, melainkan sebagai resolusi politik dalam bentuk *jihad fi sabilillah* yang dipimpin Ulama dan menuntut Indonesia Merdeka berdasarkan Islam. Dari kenyataan tuntutan politik ini, terpaksa dijawab secara politik oleh Perdana Menteri Koiso dengan Janji Kemerdekaan Di Kelak Kemudian Hari, pada 7/8 September 1944/2604, Kamis Pahing/Jumat Pon, 18/19 Ramadhan 1363.

> Jawaban ini, memberikan pengertian makna betapa besarnya gerakan protes sosial atau gerakan *jihad fi sabilillah* yang dilancarkan oleh Ulama bersama Santri dari pesantren-pesantren di desa-desa kecil Sukamanah dan Loh bener, namun pengaruhnya mampu menggoyahkan Kaisar Hirohito dan Perdana Menteri Koiso di Tokio, serta Jenderal Terauchi di Dalat Saigon dan *Saiko Shikikan* Letnan Jenderal Harada di Jakarta, melahirkan keputusan politik berupa Janji Kemerdekaan.
>
> Perhatian besar ini karena protes sosial tersebut terjadi di Jawa Barat. Dan Jawa Barat memiliki geostrategi sebagai inti seluruh provinsi di Nusantara Indonesia. Jawa Barat merupakan barometer politik untuk Nusantara Indonesia. Artinya, segenap perubahan dan peristiwa sejarah yang terjadi di Jawa Barat akan cepat menular - *contagious* ke provinsi lainnya.

Lalu, apa yang diusahakan oleh Balatentara Djepang dalam mengantisipasi dan menjauhkan Tentara Pembela Tanah Air - Peta agar tidak berpihak kepada gerakan protes sosial dari kalangan Ulama dan Santri dan agar tetap berpihak tujuan perangnya?

Latihan Kyoikutai

Sebulan sebelum terjadinya gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah Tasikmalaya, 18 Februari 1944, Jumat Kliwon, 22 Safar 1363, Balatentara Djepang mengadakan upaya antisipasi untuk Tentara Pembela Tanah Air Peta. Dengan tujuan membelok kan perhatiannya dari penderitaan rakyat di sekitarnya, dan agar tetap konsisten memenangkan tujuan perangnya. Serta dijauhkan dari pengaruh gerakan politik Ulama Desa yang bersikap resisten terhadap pemerintahan Balatentara Djepang.

Sebagai catatan: Balatentara Djepang dalam upaya penguasaan teritorial dan mengendalikan aktivitas Ulama, secara geostrategi dibagi dalam dua kategori wilayah:

Ulama Desa didekati dengan Nippon's Islamic Grass Root Policy - untuk dijauhkan dari pengaruh ajaran dan gerakan politik - depolitisasi Ulama Desa, yang pernah menerima ajaran politik dari kalangan politisi Partai Sjarikat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia pada masa Gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia dan sesudahnya.

Mengaktifkan Ulama Kota melalui pendekatan deparpolisasi dan deormasisasi. Pertama, diaktifkan dalam perwakilan Chuo Sangi In dan Chuo Sangi Kai sebagai Wakil Kota yang digaji. Kedua, diangkat menjadi Daidancho - Komandan Batalyon Tentara Pembela Tanah Air - Peta. Kemudian menyusul diaktifkan dalam Lasjkar Hizboellah. Ketiga, diaktifkan dalam organisasi baru buatan Balatentara Djepang, yakni Masjoemi dan Jawa Hokokai - Kebaktian Rakyat di P. Jawa.

Tentara Pembela Tanah Air Peta pada 18 Januari 1944, sebulan sebelum terjadinya gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah Singaparna Tasikmalaya yang menuntut Indonesia Merdeka berdasarkan Islam[12], mengadakan latihan baru, Bo-ei Giyugun Kanbu Kyoikutai.

Secara harfiah arti Bo-ei - pertahanan. Giyugun - tentara sukarela. Kanbu - pemimpin. Kyoiku - pendidikan atau instruksi. Tai - satuan pendidikan. Jadi, maknanya Pusat Latihan Kepemimpinan Tentara Sukarela. Latihan ini dipimpin oleh Kapten Yanagawa. Dengan adanya kepergian Kapten Yanagawa ke Jepang, pimpinan digantikan sementara oleh Kapten Yamazaki Hajime dan Letnan Ito.

12 Gerakan protes sosial yang dipimpin oleh K.H. Zainal Moestofa akhirnya menjadi terbuka. Proses persiapan pengorganisasiannya, hampir tidak mengenal kerahasiaan. Dengan adanya pembunuhan terhadap dua prajurit Jepang, segenap aktivitas di Pesantren Sukamanah Tasikmalaya diketahui oleh Balatentara Djepang.

> Dari latihan *Kyoikutai* ini dalam Februari 1944 terlatih 70 taruna. Bulan Maret 1944 terlatih 50 taruna. Diikuti pula kursus penyegaran bagi *Daidancho*. Khusus untuk Priangan *syuu*, setelah Kapten Yanagawa kembali dari Jepang, diadakan latihan untuk *Shodancho* dan *Chudancho* serta *Daidancho* selama masing-masing empat, tiga, dan dua bulan.

Setelah Balatentara Djepang bersama Polisi Pribumi berhasil memadamkan secara sistem persenjataan teknik terhadap gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah Singaparna Tasikmalaya, pada 1 April 1944 diadakan lagi latihan *Kyoikutai* untuk Tentara Pembela Tanah Air - Peta. Kemudian, diperbesar jumlah pengikutnya hingga 200 taruna. Pada 10 April 1944 diikuti 400 taruna. Pada 10 Mei 1944 dilatih 81 *Chudancho*. Pada 10 Juni 1944 dilatih 20 *Daidancho*. Latihan ini sebagai peningkatan dari latihan pertama, *Rensetai*, ditingkatkan lebih sulit dan berat dalam *Kyoikutai*.

Sosialisasi Tentara Pembela Tanah Air - Peta

Balatentara Djepang merasa yakin terhadap loyalitas Ulama sebagai *Daidancho* Tentara Pembela Tanah Air - Peta dan juga para pemuda Indonesia mampu menampakkan jiwa keprajuritan dan dapat diandalkan. Keberhasilan pembinaan Tentara Pembela Tanah Air - Peta melalui latihan *Rensetai* hingga *Kyoikutai* selama lima bulan, dari 3 Oktober 1943 hingga 8 Februari 1944 perlu dimasyarakatkan.

Sosialisasi dilaksanakan dalam upacara militer di Lapangan Ikada Gambir Merdeka Selatan Jakarta[13], di hadapan *Saiko Shikikan* Jenderal Kumashiki Harada, November 1942-April 1945, pada 8 Februari1944,[14] diserahkan Daidanki - Pataka Tentara Pembela Tanah Air - Peta kepada *Daidancho* Mr. Kasman Singodimedjo.[15]

> Peristiwa ini sangat mengejutkan dan menakjubkan Ulama yang semula hanya sebagai Da'i, berubah status sosialnya sebagai *Daidancho* - Komandan Batalyon dari organisasi kesenjataan modern. Berseragam militer dan bersenjata serta menyandang samurai. Apalagi Mr. Kasman Singodimedjo satu-satunya Sarjana Hukum alumnus *Recht Hoogeschool* sebagai *Daidancho* - Komandan Batalyon

---

13 Lapangan Ikada pada masa pendudukan Jepang terdapat di Lapang Monas Jakarta. Dibongkar karena dibangun Monumen Nasional dengan Patung Pangeran Diponegoro yang sedang memacu kuda, menghadap ke arah Istana Merdeka.

14 Pemilihan tanggal 8 pada masa pendudukan Jepang, disebut Hari Pembangunan, sebagai peringatan diserahkannya Indonesia tanpa syarat oleh pemerintah kolonial Belanda kepada Balatentara Djepang di Kapitulasi Kalijati Subang Jawa Barat.

15 Peristiwa ini dari sisi kepentingan Balatentara Djepang sebagai upaya mengantisipasi terhadap gerakan protes sosial yang benar-benar terjadi pada 18 Februari 1944 di Pesantren Sukamanah Tasikmalaya.

dari Daerah Khusus Jakarta. Dipercayakan menerima Daidanki Pataka Tentara Pembela Tanah Air - Peta. Di dalamnya terdapat lambang Bulan Bintang. Menurut Kan Po yang diangkat oleh Harry J. Benda, Bulan Bintang sebagai symbol honored by inhibitants of Jawa - lambang yang dihormati oleh penduduk P. Jawa. [16]

Suatu prestasi perjuangan Ulama dan Santri, menjadikan bangsa dan negara Indonesia pada abad ke20, berhasil memiliki organisasi kesenjataan modern. Walaupun saat itu, masih dalam kondisi terjajah. Puncak keberhasilan perjuangan Ulama dan Santri terbaca dua tahun kemudian, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia, pada 5 Oktober 1945, Jumat Kliwon, 29 Syawwal 1364.

Tentara Peta Barisan Rakyat yang Dipersenjatai

Seperti di atas, penulis bicarakan bahwa Tentara Pembela Tanah Air Peta dalam teori perang dinilai sebagai people in arms - barisan rakyat yang dipersenjatai dengan tugasnya defence than of attack mempertahankan daripada menyerang. Dengan pengertian defence yang pertama berarti waiting menunggu. Kedua, readiness for action - siap beraksi bila datang serangan lawan.

Akan tetapi, status Tentara Pembela Tanah Air Peta hanya sebagai a reservoir of strength - cadangan kekuatan. Apabila terjadi serangan Sekoetoe, Balatentara Djepang yang berhak menghadapinya. Baru kemudian, menyusul Tentara Pembela Tanah Air Peta. Rencana ini menjadikan kepangkatan dan fasilitas Tentara Pembela Tanah Air Peta tentu jauh di bawah Balatentara Djepang.

Misalnya Batalyon I Jampang Kulon dengan Danyon R.H. Abdoellah bin Noeh dan Kastaf Hoesen Aleksah. Semestinya sebagai tentara harus mempunyai billet atau tempat akomodasi tentara atau markas. Kenyataannya tidak ada. Sampai dengan hal yang sangat pokok itu, ternyata Balatentara Djepang tidak mau tahu, bagaimana cara pengadaaan dan pendanaannya. Padahal Jampang Kulon saat itu, selain berstatus sebagai desa terbelakang, juga jauh dari Sukabumi. Jampang Kulon tidak memiliki

16 Bulan Bintang disimbolkan dalam Keris sebagai senjata. Pada tangkainya terdapat bulatan yang ada permatanya disebut *Kartika* artinya Bintang. Pada Sarung Keris bagian atasnya berbentuk Bulan Sabit disebut *Sasi* artinya Bulan. Maksud dari *Kartika Sasi* pada Keris adalah lambang Bulan Bintang. Penyandang Keris Kartika Sasi, pada pewayangan di bagian Kanan Dalang, atau Kaum *Yamin* – Golongan Kanan. Sebagai kelompok kecil hanya berjumlah lima, disebut *Fandawa*. Selalu menang karena penyandang *Keris Kartika Sasi* dan berpedoman *Kalima(h) Sa(ha) da(h)* - Kalima Sada atau Kalimah Syahadat. Oleh karena itu, Kan Po menyebutkan Bulan Bintang sebagai lambang yang dihormati oleh penduduk Jawa yang beragama Islam.

transportasi yang memadai untuk berhubungan dengan Sukabumi atau Bogor. Bagaimana caranya apabila benar-benar terjadi serangan Sekoetoe dari Laut Selatan.

Apakah mungkin di desa terbelakang terdapat perumahan rakyat yang dapat menampung satu batalyon tentara? Selain itu, tanggung jawab siapa makan atau logistik lainnya untuk satu batalyon di desa terpencil? Pemilihan Jampang Kulon desa terpencil dijadikan zona pertahanan Batalyon I, apakah karena sejarahnya pernah dijadikan wilayah binaan pengkaderan Partai Sjarikat Islam Indonesia yang dipimpin langsung oleh H.O.S. Tjokroaminoto? Atau karena posisi Jambang Kulon dekat Laut Selatan? Jawabannya dirahasiakan.

Kesulitan dan penderitaan Tentara Pembela Tanah Air - Peta yang ditempatkan pada zona pertahanan itu, sama penderitaannya dengan yang ditempatkan di kota-kota kecil seperti Blitar Jawa Timur, Cilacap Jawa Tengah, dan di Pangalengan Jawa Barat karena ditempatkan di desa-desa kecil miskin sebagai zona pertahanannya, menjadikan Tentara Pembela Tanah Air - Peta, dapat melihat langsung penderitaan rakyat yang tertindas oleh Balatentara Djepang. Kenyataan ini membangkitkan motivasi untuk memberontak.

Sumber: *Doc. Prihadi*

PERTEMUAN PENULIS DENGAN Dr. SOEPARMAN SOEMAHAMIDJAJA

Dari kanan ke kiri: Dr. Mursalin Dahlan, Penulis, Dr. Soeparman Soemahamidjaja, dan Drs.Daswis Jasben, meminta kesediaan Penulis untuk menuliskan Sejarah Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan yang belum pernah dituliskan dalam Sejarah Indonesia.

Menurut Thomas Clary, Seni Perang Jepang The Japanese Art of War, dijelaskan dalam strategi perang Jepang, mengajarkan apabila dalam posisi lemah, dianjurkan untuk menggunakan fasilitas lawan. Jika sudah merasa kuat, berbalik dengan menggunakan ilmu dan fasilitas musuh untuk melawannya. Dengan strategi dan taktik seni perang Jepang, Tentara Pembela Tanah Air Peta melancarkan pemberontakan.

Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta

Rencana pemberontakan di atas, dimatangkan oleh kondisi perut rakyat yang lapar, membuat memburuknya kondisi politik empty belly makes bad politic. Perut rakyat yang kosong tidak dapat dibujuk dengan janji politik tanpa kepastian waktunya. Di tengah ketidak berdayaan rakyat yang tertindas, dan semakin kejamnya penindasan Balatentara Djepang, tepat setahun setelah gerakan protes sosial di Pesantren Sukamanah, 18 Februari 1944, Jumat Kliwon, 22 Safar 1363, muncullah Soeprijadi dari Blitar, 15 Februari 1945, Kamis Pon, 2 Rabiul Awwal 1364.

Kemudian diikuti Koesaeri dari Cilacap, 21 April 1945, Sabtu Pon, 8 Jumadil Awwal 1364, dan Amar Soetisna dari Pangalengan Bandung Selatan, 4 Mei 1945, Jumat Legi 21 Jumadil Awwal 1364. Ketiganya dari Tentara Pembela Tanah Air Peta memimpin pemberontakan terhadap Balatentara Djepang, menuntut pelaksanaan Janji Kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso, 7 September 1944, Kamis Pahing, 18 Ramadhan 1363.

Tepat setahun setelah gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah Tasikmalaya, 18 Februari 1944, Jumat Kliwon, 22 Safar 1363, Tentara Pembela Tanah Air Peta Blitar di bawah pimpinan Soepriyadi, melancarkan perlawanan bersenjata terhadap Balatentara Djepang, 15 Februari 1945, Kamis Pon, 2 Rabiul Awwal 1364.

Nugroho Notosusanto menjelaskan sasaran pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air Peta Blitar tidak melawan Daidancho yang terdiri dari para Ulama. Melainkan sasaran serangannya adalah rumahrumah Shidokan, Kempetei, dan Hotel Sakura, sebagai tempat tinggal pimpinan Balatentara Djepang. Serangan ini dipimpin oleh Shodancho Soeprijadi dan Moeradi dengan dukungan Kiai Ngabdoellah Sirodj dan Kiai Hadji Mohammad Cholil.

Balatentara Djepang segera menindaknya dengan sistem persenjataan teknik sistek dipimpin oleh Kolonel Katagari. Dengan bantuan pasukan lapis baca dan serangan udara, serta menggunaan pula tenaga Tentara Pembela Tanah Air Peta yang tidak terlibat dalam pemberontakan. Besar kemungkinannya dari Batalyon I Tulungagung di bawah Danyon Soediro.

Hasilnya tertangkaplah 55 Tentara Pembela Tanah Air - Peta Blitar. Beda perlakuannya terhadap para Ulama pimpinan gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah dan Lohbener Indramayu yang diselesaikan melalui Makamah Militer dan secara rahasia.

> Pada 16 April 1945 di depan Mahkamah Militer di Jakarta diadili: 2 *Chudancho*, 8 *Shodancho*, 33 *Bundancho*, 12 *Giyuhei*. Adapun bentuk hukuman: 6 orang pidana mati, 3 orang pidana seumur hidup, 6 orang pidana 15 tahun, 6 orang pidana 10 tahun, 17 orang pidana 7 tahun, 7 orang pidana 4 tahun, 3 orang pidana 3 tahun, dan 7 orang pidana 2 tahun.

Menurut penjelasan Mr. Kasman Singodimedjo, yang dijatuhi hukuman mati adalah Dokter Ismangil - *Chudancho*, Moeradi - *Shodancho*, Soeparjono dan Soedarmono - *Budancho*, Mangkoewidjaja - *Bundancho*, dan Soedarmo - *Bundancho*. Bagaimana nasib Kiai Ngabdoellah Sirodj dan Kiai Hadji Mohammad Holil? Tidak ditemukan kembali keterangan sejarahnya. Diperkirakan senasib dengan Soeprijadi.

Di tengah pengadilan Mahkamah Militer, dihadirkan pula: Mr. Kasman Singodimedjo *Daidancho* Jakarta, Soediro *Daidancho* Tulungagung. Dari pimpinan masyarakat lainnya Boeng Karno, Otto Iskandardinata, Abikoesno Tjokrosoejoso, Soepomo, dan Kahar Moezakkir. Dengan cara menghadirkan para politisi dan *Daidancho*, Balatentara Djepang memperlihatkan nasib akhir bagi para pemberontak. Dengan cara ini, Balatentara Djepang, berupaya menumbuhkan rasa takut dan jera.

> Benarkah dengan mengikuti teori perang, *the destruction of his armed forces and the conquest of his territory* - penghancuran kekuatan militernya dan penaklukan wilayahnya, Balatentara Djepang berhasil menaklukkan *enemy's will* - kemauan musuhnya dan menjadi takut dan jera? Ternyata, kekuatan rakyat terjajah yang ingin merdeka, tidak mungkin dapat dipadamkan dengan kekuatan militer.

Memang tidak ditemukan letak makam Soeprijadi dan 55 orang lainnya diseret ke Mahkamah Militer, 16 April 1945, diadili. Enam orang di antaranya dijatuhi hukuman mati. Benarkah dengan dilaksanakannya keputusan Mahkamah Militer, dapat memadamkan Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta di kota lainnya? Ternyata lima hari kemudian, 21 April 1945, pecahlah pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta di Cilacap.

Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta Cilacap

Di tengah pengadilan Mahkamah Militer Balatentara Djepang terhadap para pelaku pemberontak Tentara Pembela Tanah Air Peta Blitar, pecahlah gerakan solider dari Tentara PembelaTanah Air Peta di Cilacap, pada 21 April 1945, Sabtu Pon, 8 Jumadil Awwal 1364. Hal ini terjadi sebagai dampak tidak semua pemberontak dari Blitar tertangkap. Kemudian lolos dan menyampaikan berita nasib kawankawannya yang dijatuhi hukuman mati dan lainnya, serta berupaya membangkitkan rasa solidaritas kawan seperjuangannya di Cilacap.

Di tengah derita rakyat yang terbuka, datang berita pemberontakan, menjadikan Shodando Koesaeri bersama kawankawannya Soewab , Wasiroen, Hadi, Mardijno, Sarjono, Wirjosoeharto, Taswan Djoemiran, dan Soehoed, bangkit melancarkan perlawanan bersenjata terhadap Balatentara Djepang.

Seperti halnya di Blitar, Shodancho Koesaeri terlebih dahulu mengadakan kerja sama dengan Ulama dan Santri. Pilihannya jatuh pada Kiaii Boegel, 60 tahun, dari Desa Lebeng, Kasugihan, Cilacap. Shodancho Koesaeri berusaha mendapatkan dukungan dari Kiai Djoehdi dari Rawolo Purworejo, dan Kiai Mohammad Sidik dari Banjarnegara.

Segera Shodancho Koesaeri mengerahkan 215 Tentara Pembela Tanah Air Peta untuk menjadikan Gunung Sandil Cilacap sebagai basis pertahanannya. Pada 21 April 1945, Sabtu Pon, 8 Jumadil Awwal 1364, melancarkan perlawanan terhadap Balatentara Djepang. Tuntutan utamanya adalah menagih Janji Kemerdekaan. Gerakan perlawanannya selain solidaritas terhadap pemberontakan di Blitar, juga dipicu oleh realitas kehidupan rakyat yang benarbenar terindas oleh penjajah Balatentara Dai Nippon.

Balatentara Djepang melancarkan sitem persenjataan teknik sistek, seperti yang dilakukan terhadap pemberontakan di Blitar, dan menggunakan bantuan Batalyon III Kroya yang dipimpin oleh Daidancho Soedirman.[17] Beda dengan penyerangan terhadap pemberontak Blitar, Daidancho Soedirman bersedia membantu dengan syarat: Pertama, segenap Tentara Pembela Tanah Air Peta dan para Kiai dan Santri yang menyerah, tidak akan disiksa. Kedua, rakyat pendukung pemberontak, tidak dibantai.

---

17 *Daidancho* Soedirman, sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, diangkat sebagai Panglima Besar TNI pada 15 Desember 1945, setelah Lasjkar Hizboellah dan Sabilillah bersama TNI berhasil melumpuhkan serangan Tentara Sekoetoe Inggris dan Nica di Palagan Bojongkosan Sukabumi, Jawa Barat, 9 Desember 1945 dan Palagan Ambarawa Jawa Tengah, 14 Desember 1945.

SOEPRIJADI

Soeprijadi, pahlawan PETA di Blitar, diangkat sebagai
Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Republik Indonesia yang pertama, tetapi tidak diketahui
nasibnya dan tidak ada kabar beritanya.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*
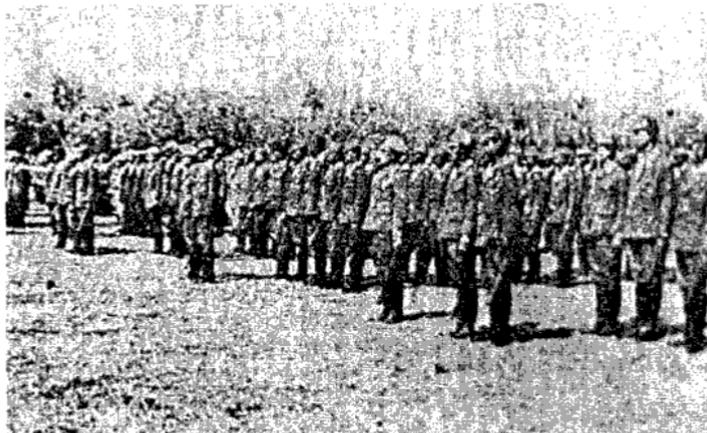
Sumber: Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan

UPACARA PELANTIKAN DAINIJI KANBU

di Jakarta diikuti oleh **Daidancho**, **Chudancho**, dan **Shodancho.**

Tiaptiap prajurit Peta
diberi tanda!
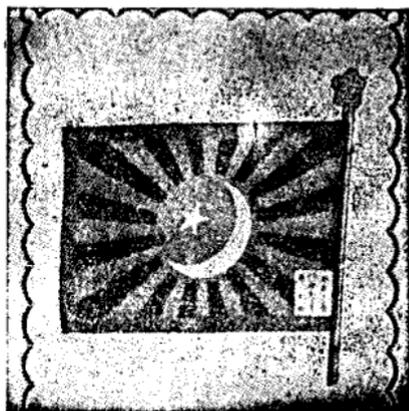
Sumber: Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan

DAIDANKI Pandji Pasukan Tentara Peta
adalah lambang keadilan dan kemuliaan dalam usaha
mempertahankan tanah tumpah darah
dan menghancurkan musuh kita:
Amerika dan Inggris.
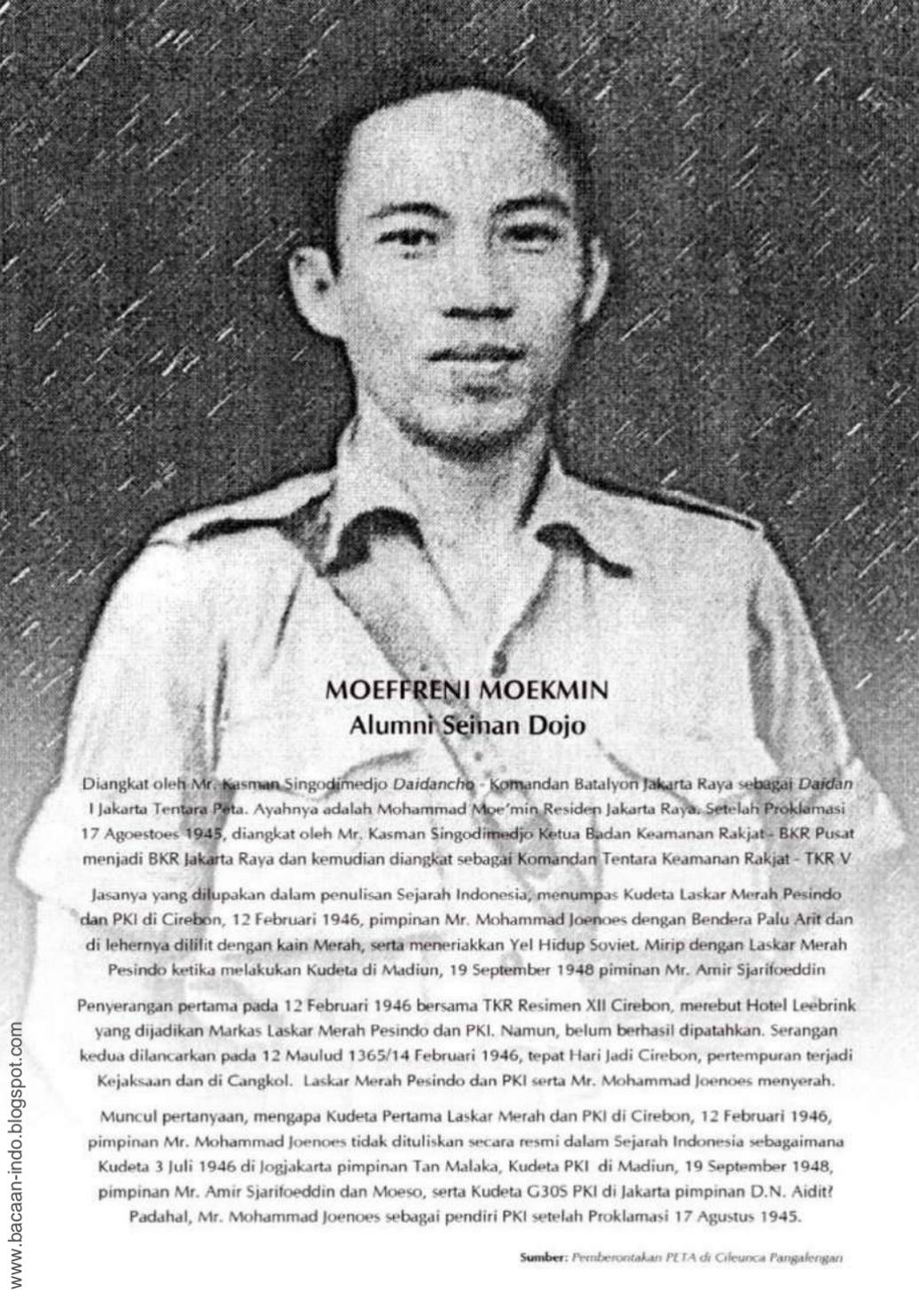
MOEFFRENI MOEKMIN
Alumni Seinan Dojo

Diangkat oleh Mr. Kasman Singodimedjo *Daidancho* - Komandan Batalyon Jakarta Raya sebagai *Daidan* I Jakarta Tentara Peta. Ayahnya adalah Mohammad Moe'min Residen Jakarta Raya. Setelah Proklamasi 17 Agoestoes 1945, diangkat oleh Mr. Kasman Singodimedjo Ketua Badan Keamanan Rakjat - BKR Pusat menjadi BKR Jakarta Raya dan kemudian diangkat sebagai Komandan Tentara Keamanan Rakjat - TKR V

Jasanya yang dilupakan dalam penulisan Sejarah Indonesia, menumpas Kudeta Laskar Merah Pesindo dan PKI di Cirebon, 12 Februari 1946, pimpinan Mr. Mohammad Joenoes dengan Bendera Palu Arit dan di lehernya dililit dengan kain Merah, serta meneriakkan Yel Hidup Soviet. Mirip dengan Laskar Merah Pesindo ketika melakukan Kudeta di Madiun, 19 September 1948 piminan Mr. Amir Sjarifoeddin

Penyerangan pertama pada 12 Februari 1946 bersama TKR Resimen XII Cirebon, merebut Hotel Leebrink yang dijadikan Markas Laskar Merah Pesindo dan PKI. Namun, belum berhasil dipatahkan. Serangan kedua dilancarkan pada 12 Maulud 1365/14 Februari 1946, tepat Hari Jadi Cirebon, pertempuran terjadi Kejaksaan dan di Cangkol. Laskar Merah Pesindo dan PKI serta Mr. Mohammad Joenoes menyerah.

Muncul pertanyaan, mengapa Kudeta Pertama Laskar Merah dan PKI di Cirebon, 12 Februari 1946, pimpinan Mr. Mohammad Joenoes tidak dituliskan secara resmi dalam Sejarah Indonesia sebagaimana Kudeta 3 Juli 1946 di Jogjakarta pimpinan Tan Malaka, Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, pimpinan Mr. Amir Sjarifoeddin dan Moeso, serta Kudeta G30S PKI di Jakarta pimpinan D.N. Aidit? Padahal, Mr. Mohammad Joenoes sebagai pendiri PKI setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sumber: *Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan*

Dengan adanya persyaratan ini, Shodancho Koesaeri bersama kawannya karena menyerah bersama Kiai Boegel, tidak disiksa seperti para pemberontak Blitar. Kemudian, dipenjarakan di Jakarta. Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air Peta Cilacap, ditangani dengan serius oleh Balatentara Djepang karena Cilacap selain merupakan pelabuhan yang mengarah ke Laut Selatan atau Australia, juga terdapat minyak yang sangat diperlukan untuk menjalankan mesin perangnya.

Selain itu, Balatentara Djepang baru kehilangan Iwo Jima pa da 17 Maret 1945 dan Okinawa pada 12 April1945. Bila tidak segera terselesaikan, barangkali dampaknya akan memudahkan Tentara Sekoetoe masuk dari pelabuhan Cilacap Jawa Tengah.

Pemberontakan Tentara Peta di Pangalengan Bandung Selatan

Sekitar tiga belas hari kemudian, 4 Mei 1945, Jumat Legi, 21 Jumadil Awwal 1364, pecahlah pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air Peta di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan, dipimpin oleh Bundancho Amar Soetisna. Beda dengan kedua pemberontakan sebelumnya, yang terjadi di Blitar Jawa Timur dan Cilacap Jawa Tengah. Kedua jauh dari Jakarta pusat pemerintahan pusat di P. Jawa Balatentara Djepang.

Sedangkan pemberontakan di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan, selain tidak jauh dari Jakarta, dilancarkan pula oleh Batalyon IV Cimahi di bawah Daidancho K.R. Aroedji Kartawinata dari Partai Sjarikat Islam Indonesia. Tentu, pemberontakan ini akan segera mendapat tanggapan dari para politisi di Jakarta yang sangat menyulitkan Balatentara Djepang.

Pemberontakan ini tidak beda dengan gerakan protes sosial Pesantren Sukamanah Tasikmalaya, 18 Februari 1944, Pesantren Lohbener Indramayu, 30 Juli 1944, yang dilanjutkan oleh pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air Peta di Blitar, 15 Februari 1944 dan Cilacap, 21 April 1944, menagih Janji Kemerdekaan di Kelak Kemudian Hari, 7 September 1944.[18]

Kedudukan Cimahi dalam masa pemerintahan kolonial Belanda sebagai pusat konsentrasi serdadu Belanda. Demikian pula Balatentara Djepang juga memanfaatkannya sebagai concentration of forces di Cimahi. Termasuk untuk Tentara Pembela Tanah Air Peta.

18 Oemar Bahsan, 1955. *Tjatatan ringkas tentang: Feta ("Femtela Tanah Air") dan Feristiwa Rengasdengklok.* Melati Bandung, hlm. 15 menuturkan adanya pengaruh semangat perjuangan: para pahlawan Tengku Umar, Diponegoro, perdjoangan Sjarikat Islam, dan di Djawa Barat chususnja oleh pemberontakan tahun '26 dan '27 di Tjiamis dan Banten, serta api pemberontakan di Singaparna ('43) dan peristiwa Blitar (Februari '45) terhadap Peta Jawa Barat.

JENDERAL TNI. PURN. H. PONIMAN

Setelah selesai mengikuti pendidikan dan latihan Perwira di Bogor, pemuda *Shodancho* Poniman ditempatkan di *Daiyon Daidan* (Batalyon IV) PETA Cimahi, menduduki jabatan *Dai I Shodancho* (Komandan Peleton I) dalam *Dai I Chudan* (Kompi I). Selama tugas di Pangalengan menjadi salah seorang pelaku peristiwa pemberontakan terhadap tentara Jepang. Akibatnya, ikut diinterogasi secara kasar oleh *Kempeitai* (Polisi Tentara Jepang) yang dikenal ganas. Sebagai hukuman maka Kompi I termasuk *Shodancho* Poniman ada di dalamnya, diberi tugas berat untuk membuat *jinci-jinci* (Benteng-benteng pertahanan) di Kalijati sampai Proklamasi 17-8-1945. Pada waktu peristiwa pengakuan kedaulatan Negara RI pada 27 Desember 1949, ikut serta memimpin satu kompi TNI dalam upacara penaikan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Terakhir menduduki jabatan sebagai KASAD dan MENHANKAM RI.

Sumber: *Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan*

Di samping itu, Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta di Pangalengan Bandung Selatan tersebut terjadi pada 4 Mei 1945. Terjadi setelah Birma direbut kembali oleh Inggris di bawah Lord Louis Mountbatten, pada 30 April 1945. Menyusul Rusia di bawah Zhukov, berhasil menguasai Berlin Timur pada 1 Mei 1945. Kemudian, Jerman menyerah pada 7 Mei1945. Dengan demikian, Balatentara Djepang menghadapi kesendirian dari Axis Pact - Pakta Pertahanan Poros. Diawali Italia yang menyerah pada 1 Mei 1944, Jerman menyerah pada 7 Mei 1945, satu persatu dipatahkan oleh Allied Forces - Sekoetoe.

Di bawah kondisi Perang Dunia II di Eropa, 1939 -1945 M itu, memasuki pertengahan kedua tahun 1945 Perang Asia Timur Raya, 1941-1945 M, bagi Balatentara Djepang baik Indonesia, Asia Tenggara, Pasifik, dan di Tokio sedang menghadapi phase of confusion tahap kacau balau. Dalam teori perang Carl von Clausewitz disebut condition of disarray and weakness kondisi yang semrawut dan lemah.

Tidaklah mengherankan, bila pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air Peta yang dipimpin oleh Bundancho Bintara Amar Soetisna selaku Sikihancho Kastaf Kompi I di Pangalengan Bandung Selatan, 4 Mei 1945, mendapat perhatian serius dari Jenderal Terauchi di Dalat Saigon dan Jenderal Itagaki Seishiro di Singapura. Selain itu, sebelumnya telah diadakan konsolidasi Saiko Shikikan Letnan Jenderal Kumashiki Harada, November 1942 April 1945, digantikan oleh Letnan Jenderal Yasiuchi Nagano, AprilSeptember 1945.

Perhatian besar dari Balatentara Djepang karena Bandung sebagai kota pertahanan kedua sesudah Jakarta. Di Bandung terdapat pusatpusat: Kereta Api, Pesawat Terbang, Pos Telegraf dan Telepon, Pekerjaan Umum dan Listrik. Di Bandung terdapat Gedung Perang. Selain itu, Cimahi dan Lembang merupakan pusat militer Angkatan Darat dan Kepolisian.

BUNDANCHO AMAR SOETISNA

Bundancho (Bintara) Amar Soetisna selaku *Sikihancho* (Kastaf) Kompi I PETA di Pangalengan, mengenakan *uniform* dan pedang Sikihancho, adalah pelaku utama yang menggerakan pemberontakan terhadap tentara Jepang. Akibatnya mendapat hukuman yang berat dan korban. Sampai sekarang tidak diketahui dimana pusaranya.

Sumber: *Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan*

Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air Peta di Pangalengan berada di kaki Gunung Malabar dan terdapat Stasiun Radio[19] yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda yang memiliki gelombang besar hingga mencapai Keradjaan Protestan Belanda. Apabila stasiun radio ini dikuasai oleh pemberontak akan tersiarkan kekalahan pihak Axis Pact. Terutama akan membangkitkan gerakan perlawanan bersenjata terhadap Balatentara Djepang.

Oleh karena itu, Balatentara Djepang segera melancarkan sistem persenjataan teknik sistek yang berdampak Bundancho Amar Soetisna tertangkap dan mendapat penyiksaan Kempetai di Bandung. Tempat penyiksaannya dilakukan di Sekolah Saint Aloysius Bandung. Sama halnya dengan Shodancho Soeprijadi dari Blitar, hilang tak tentu makamnya. Demikian pula Bundancho Amar Soetisna gugur sebagai syuhada dan tidak diketahui pusaranya.

Pemberontakan Tentara Pembela Tanah AirPeta memang dilakukan di kota kecil: Blitar, Cilacap, dan Pangalengan Bandung. Namun, yang dilawannya adalah Balatentara Djepang sebagai anggota dari Axis Pact: Jerman, Italia, dan Jepang. Nilai kesejarahannya bukan sebagai peristiwa sejarah lokal local history . Melainkan sebagai international history bagian dari Perang Asia Timur Raya dan Perang Dunia II.

Oleh karena itu, atas inisiatif Dr Soeparman Soemahamidjaja dan Jenderal TNI Purnawirawan H. Poniman, sebagai Dai I Shodancho Komandan Peleton I dalam Dai I Chudan Kompi I dari Tentara Pembela Tanah Air Peta sebagai salah seorang dari pelaku pemberontak yang selamat, menuturkan peristiwanya kepada penulis karena sampai 1996, dalam Sejarah Indonesia tidak pernah dituliskan tentang Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air Peta di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan, 4 Mei 1945.[20]

---

19 Team Peneliti Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 1978. Sumber Untuk Penulisan Sejarah Radio Di Indonesia. Proyek Penelitian dan Pengembangan Penerangan Departemen Penerangan Republik Indonesia. Bandung, hlm. 14-15 menjelaskan tentang stasiun radio yang dibangun di Bandung: Radio Malabar, Nederlansch Indische Radio Omroep Maatschappij - Nirom, van Wingan, Goldberg, Lyuks, PMY. Bogor, Sukabumi, Cirebon: Nirom. Ketiga-tiganya sebagai stasiun relay. Jakarta terdapat dua organisasi perradioan milik Belanda dan Pribumi. Adapun milik Belanda adalah Bata viase Radio Vereeniging - BRV, Nirom, van Migan, Golberg, Lyuks. Sedangkan milik Pribumi: Vereniging voor Oosterse Radio - VORO. Di Jawa Barat terdapat 15 stasiun radio, terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada masa penjajahan, pemancar milik Belanda membentuk organisasi gabungan: Federative van Radio Omoep Vereningen in Nederlandsch Indie - FROV. Organisasi gabungan radio milik Pribumi: Perikatan Perkoempoelan Radio Ketimoeran -PPRK

20 Periksa, Ahmad Mansur Suryanegara. 1996. *Pemberontakan Tentara Peta di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan*. Yayasan Wira Patria Mandiri. Jakarta.

ARUDJI KARTAWINATA

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Eskeutif
Partai Sjarikat Islam Indonesia - P.S.I.I.

Daidancho - Komandan Batalyon IV Tentara Peta *Daidan* Cimahi Kompi I dari Batalyon IV Tentara Peta memberontak Terhadap Balatentara Jepang di Pengalengan Bandung Selatan

Menteri Muda Pertahanan Kabinet Amir Sjarifoeddin
Ketua DPR RI

Sumber: *Doc. Pribadi*

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai

Dengan Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air Peta, 4 Mei 1945, Jumat Legi, 21 Jumadil Awwal 1364, di Pangalengan Bandung, guna meredam solidaritas kalangan politisi di Jakarta, Panglima Tentara Wilayah KeTujuh Jenderal Itagaki Sishiro di Singapora, melancarkan sistem persenjataan sosial politik sisospol dengan memberikan izin Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan BPOPK dibentuk pada 1618 Mei 1945. Dari nama ini dalam bahasa Jepangnya tanpa disebut dengan Indonesia. Dalam Janji Kemerdekaan tidak disebut kapan kemerdekaan akan diberikan, hanya disebutkan Di Kelak Kemudian Hari. Demikian pula penamaan Dokuritsu Zyunbi linkai Panitia Persiapan Kemerdekaan tidak juga disebutkan Indonesia.

Balatentara Djepang sebagai penjajah dan di tengah perang, dalam menyampaikan tujuan politiknya menggunakan bahasa yang kontras. Tidak dengan bahasa langsung straight forward, sederhana simple, dan pendekatan langsung direct approach. Menurut teori perang Carl von Clausewitz, menggunakan teori cunning kelicikan. Dengan pengertian, deceit, which also conceals its purpose menggunakan bahasa yang penuh tipu daya, yang menyembunyikan tujuannya.

Selain itu, menggunakan stratagem permits mengizinkan sesuatu yang bertentangan dengan fakta sebenarnya. Apabila posisi militer dalam kondisi weak - lemah, komandan perang pasti menggunakan cunning juggles. Maksudnya cunning kelicikan yang digunakan untuk menciptakan perubahan, agar terjadi ketenteraman kembali yang mendatangkan rasa kepuasan to change the arrangement of something constantly in order to achieve a satisfactory result .

Balatentara Djepang yang sedang terpojokkan dalam perangnya, melancarkan bahasa politiknya[21] yang dipenuhi cunning kelicikan. Dengan stratagem permits mengizinkan bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya seperti benarbenar akan menerima kemerdekaannya dari Jepang. Padahal dengan cunning kelicikan ini, dikondisikan agar bangsa Indonesia mengubah apa yang pernah dilakukan yakni gerakan protes sosial yang digerakkan oleh Ulama dan perlawanan bersenjatanya yang dipimpin oleh Tentara Pembela Tanah Air Peta bersama Ulama, menjadi gerakan damai yang menguntungkan Balatentara Djepang. Oleh karena itu, Saiko Shikikan melancarkan cunning juggles berupa:

21 Carl von Clausewitz. 1976. *Op.Cit.* hlm. 605 menyatakan bahwa *war is only branch of political activity, that it is in no sense autonomous* - perang sebagai bagian dari aktivitas politik, namun tidak berarti dengan pengertian berdiri sendiri. Dengan pengertian perang sebagai kesatuan dari kepentingan politik.

Berdiri : *Shodancho* Astika Legino Syarif selaku Komandan Seksi 3 - Kompi I PETA di Pangalengan, mengenakan *uniform* lapangan dan memegang Samurai, dituduh ikut terlibat mendalangi pemberontakan dan pembunuhan terhadap tentara Jepang, apalagi sebagai perwira piket pada malam terjadinya itu, harus memikul tanggung jawab. Akibatnya, mendapat hukuman serta siksaan yang sangat berat, akhirnya korban. Sampai sekarang tidak diketahui dimana makamnya. Duduk : *Shodancho* Karsadjan Kosasih, komandan seksi 3 Kompi III Bat. IV PETA Cimahi, mengenakan *uniform* upacara dan memegang Samurai.

Sumber: *Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan*

Pertama, Janji Kemerdekaan, 7 September 1944, disebutkan Di Kelak Kemudian Hari, tanpa kepastian waktunya dan tanpa penyebutan Indonesia.

Kedua, Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai - Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan - B.P.O.P.K, 16 Mei 1945, tanpa menyebutkan kemerdekaan untuk Indonesia.

Ketiga, Dokuritsu Zyunbi Iinkai -Panitia Persiapan Kemerdekaan, 7 Agustus 1945, tanpa menyebutkan Indonesia.[22]

Dengan kedua keputusan politik ini ditargetkan agar Ulama dan Tentara Pembela Tanah Air Peta, diharapkan mengubah caranya dalam memperjuangkan tuntutan Indonesia Merdeka. Menghentikan perlawanan bersenjata dan mengubahnya dengan mengikuti cara kalangan politisi melalui debat politik dalam Dokuritsu Zyun bi Tyoosakai Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan dan Dokuritsu Zyunbi Iinkai Panitia Persiapan Kemerdekaan.

Apabila dibaca dari teori perang Carl von Clausewitz, bahasa janji politik Saiko Shikikan itu, sebagai strategi bahasa yang bermuatan di dalamnya deceit - penipuan. Dengan dihentikannya serangan bersenjata dari Balatentara Djepang sendiri, kemudian dilancarkan the art of skillfully exploiting force for a larger purpose - seni mengeksploitasi kekuatan secara ilmiah operasional, di dalamnya memiliki maksud yang sangat luas. Ditargetkan hasilnya dapat mengubah cara tuntutan politik lawannya dengan ide dan keyakinan baru dan cara ini disebut sebagai cunning juggles.

Diaplikasikan pada sidangsidang Dokuritsu Zyunbi Tyoo Sakai melalui para pelaku politiknya yang membawa pesan tersembunyi cryptical message dari Balatentara Djepang, yaitu deislamisasi politik. Dimulailah Sidang Perdana pada 29 Mei 1945. Pada Sidang Perdana ini, Wakil Ketua R.M.A.A. Koesoemo Oetojo digantikan Drs.Mohammad Hatta.[23]

Hampir separuh dari jumlah anggota Chuo Sang In, menjadi anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan BPOPK , dari 60 anggotanya, tidak termasuk Ketua dan Wakil, menurut Abdoel Kahar Moezakkir hanya 15 wakil dari golongan nasionalis Islam.

22 Dalam penulisan Sejarah Indonesia sering diterjemahkan dengan menambahkan *Indonesia*. Misalnya *Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai* menjadi Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan *Dokuritsu Zyunbi Iinkai* menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Padahal dalam bahasa Jepangnya tanpa Indonesia.

23 Periksa, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia - BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia - PPKI, 28 Mei 1945-22 Agustus 1945.
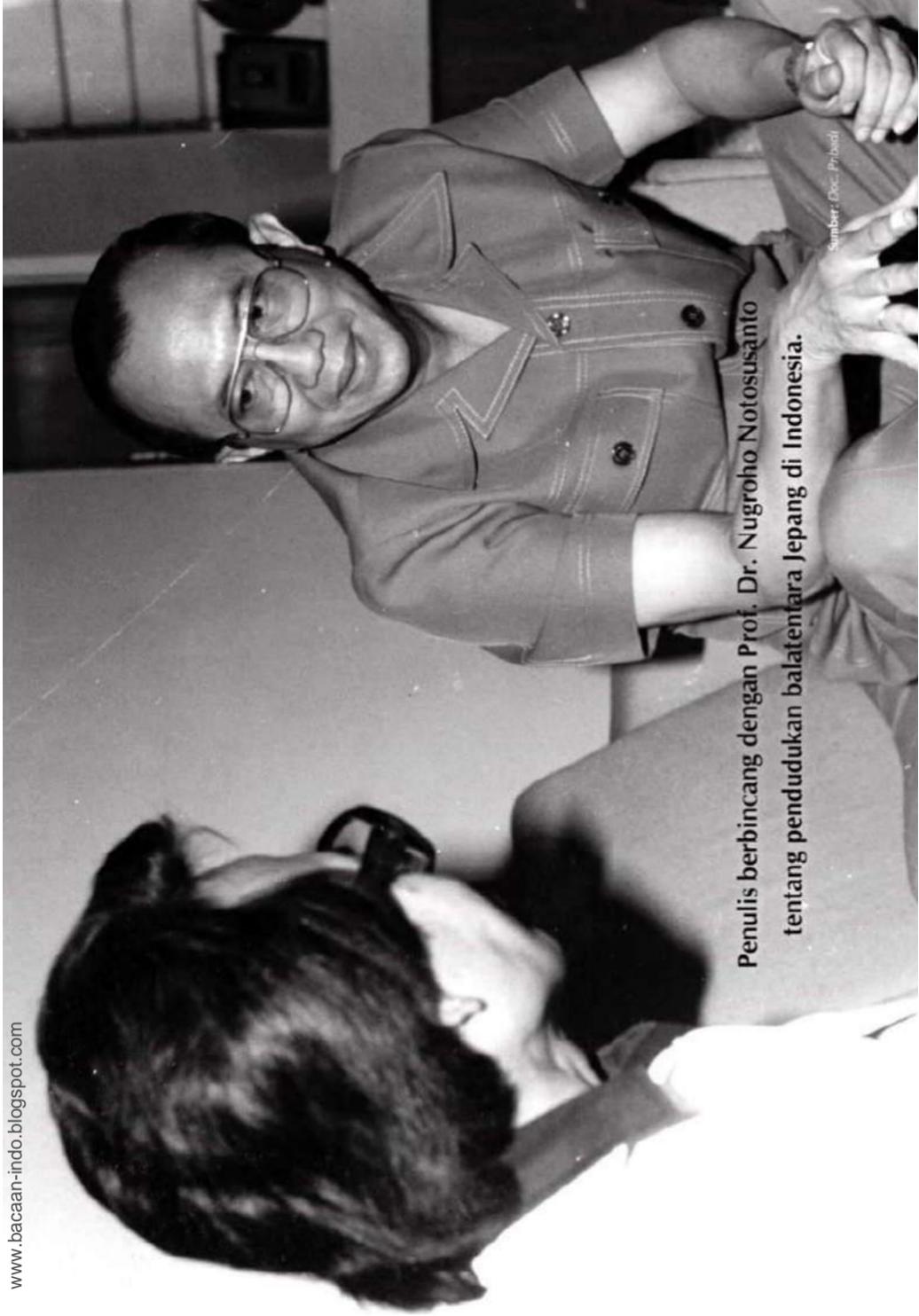
Penulis berbincang dengan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto tentang pendudukan balatentara Jepang di Indonesia.

Sumber: *Doc. Pribadi*

Selain itu, terbaca pula strategi Balatentara Djepang dengan deislamisasi politiknya, selain diperkecilnya jumlah perwakilan Ulama di dalamnya, juga diangkatnya Ketua dan Wakil Ketuanya dari kalangan Kedjawen yang pernah menolak pelaksanaan cita cita persatuan Indonesia dan sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial Belanda. Dari strategi ini, Balatentara Djepang mempercayakan Ketua kepada Dr. Radjiman Wedijodingrat mantan ketua Boedi Oetomo[24] dan Wakil Ketua kepada R.P. Soeroso mantan Ketua P.V.P.N.

Adapun 15 anggota dari nasionalis Islam, menurut Deliar Noer dalam Partai Islam Di Pentas Nasional adalah:

Abikoesno Tjokrosoejoso	Partai Sjarikat Islam Indonesia
K.H. Achmad Sanoesi	Persatoean Oemat Islam Sukabumi
Kiai Hadji Abdoel Halim	Persatoean Oemat Islam Majalengka
Ki Bagoes Hadikoesoemo	Persjarikatan Moehammadijah
Kiai Hadji Mas Mansoer	Persjarikatan Moehammadijah
Abdoel Kahar Moezakkir	Persjarikatan Moehammadijah
R.R. Wongsokoesoemo	Mantan Parindra dari Masjoemi
Hadji Agoes Salim	Penjedar
R. Samsoedin	Parindra dan POI Sukaboemi
Dr. Soekiman Wirjosandjojo	Partai Islam Indonesia
Kiai Hadji Wahid Hasjim	Nahdlatoel Oelama
Ny.Soenarjo Mangoenpoespito	Mantan JIBDA dari Aisjijah
Abdoel Rachman Baswedan	Partai Arab Indonesia
Abdoel Rahim Pratalykrama	Residen Kediri [25]

---

24 Balatentara Djepang memilih Dr.Radjiman Wedijodiningrat sebagai Ketua *Dokuritsu Zunby Tyoosakai* karena mengetahui latar belakangnya pernah sebagai Ketua Boedi Otomo. Sedangkan, Boedi Oetomo dalam kongresnya di Solo 6-9 April 1928, menolak pelaksanaan tjita2 persatoean Indonesia. Kemudian Boedi Oetomo berfusi dalam Partai Indonesia Raya yang dipimpin oleh Dr. Soetomo, *bersikap sekuler dan anti Islam. Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* sebagai *cunning jugglers* Balatentara Djepang ditargetkan gagal. Bertolak dari motivasi *cunning jugglers*, dengan bantuan Dr. Radjiman sebagai Ketua, Balatentara Djepang mengharapkan tuntutan Indonesia Merdeka berdasar Islam dapat digagalkan.

25 Deliar Noer, 1420/2000. *Partai Islam Di Pentas Nasional. Kisah Dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Mizan. Bandung, hlm. 32 menjelaskan *Abdoel Rahim Pratalykrama* adalah *Residen Kediri*, afiliasinya tidak diketahui. H. Endang Saifuddin Anshari, 1401 H/1981 M. *Op.Cit.*, hlm. 35 menjelaskan bahwa *Pratalykrama* yang mengusulkan agar Kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia hendaknya orang Indonesia yang asli, berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan beragama Islam.

Melalui badan inilah dibicarakan tentang dasar negara dan bentuk negara. Sebenarnya sebagai tindak lanjut dari Janji Kemerdekaan Indonesia Di Kelak Kemudian Hari, 7 September 1944, sebagai jawaban Perdana Menteri Koiso terhadap tuntutan gerakan protes:

> *Pertama*, Ulama Sukamanah Singaparna Tasikmalaya, 18 Februari 1944, dan Indramayu, 30 Juli 1944, menuntut Indonesia Merdeka berdasar Islam.
>
> *Kedua*, tuntutan dari Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta di Blitar, 15 Februari 1945, di Cilacap, 21 April 1945, dan Pangalengan Bandung Selatan, 4 Mei 1945.

Sidang *Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai* terbagi dalam dua periode. *Pertama*, pada 29 Mei -1 Juni 1945, membicarakan masalah ideologi negara. *Kedua*, pada 10-14 Juni 1945 membicarakan konstitusi negara.

Pada Sidang Perdana, di hari ketiga pembicara yang terakhir dan sangat terkenal, Ir Soekarno, pada 1 Juni 1945, pemikiran tentang *Philosofische grondslag* atau Landasan dasar falsafah negara yang diusulkannya adalah Pantjasila.[26] Terdiri dari (1) kebangsaan; (2) internasionalisme; (3) mufakat; (4) kesejahteraan; dan (5) ketuhanan. Jadi, dalam pidato tersebut belum tersusun urutannya menjadi Lima Sila seperti Pancasila yang berlaku hingga sekarang.

Pada pidato tersebut, Ir. Soekarno sekaligus memberikan petunjuk bagaimana caranya bila umat Islam benar-benar ingin memenangkan usahanya untuk memberlakukan Syariat Islam:

> Djikalau memang rakjat Indonesia rakjat jang bagian besarnja rakjat Islam, dan djikalau memang Islam disini agama jang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakjat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakjat itoe, agar soepaja mengerahkan sebanjak moengkin oetoesan-oetoesan Islam kedalam Badan Perwakilan ini.
>
> Ibaratnja Badan Perwakilan Rakjat 100 orang anggotanja, marilah kita bekerdja sekeras-kerasnja, agar soepaja 60, 70, 80, 90 jang doedoek dalam perwakilan rakjat ini orang Islam, pemoeka–pemoeka Islam. Dengan sendirinja hoekoem-hoekoem jang keloear dari Badan Perwakilan Rakjat itoe, hoekoem Islam poela.

26 Ir. Soekarno dalam Sidang Pertama ini menjelaskan nama Pantja Sila. Arti Sila adalah asas atau dasar. Di atas dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.

Malahan saja jakin, djikalau hal jang demikian itoe njata terdjadi, baroelah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidoep didalam djiwa rakjat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% oetoesan adalah orang Islam, pemoeka-pemoeka Islam. Maka saja berkata, baroe djikalau demikian, hidoeplah Islam Indonesia, dan boekan Islam jang hanja diatas bibir sadja.

Pada umumnya bagian pidato tadi tidak dikutip kembali. Akibatnya, pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila, tidak tergambarkan adanya petunjuk di dalamnya bagaimana cara memenangkan Hukum Islam agar berlaku di Indonesia secara Parlementer.

Drs. Mohammad Hatta menyangkal keras, bila Lima Sila Pancasila seperti sekarang adalah dari pemikiran Mr. Mohammad Yamin dalam pidatonya dalam Sidang Pertama Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai. Ditandaskan bahwa Mohammad Yamin tidak berbicara sebagaimana yang dituliskannya, Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam bukunya, Mohammad Yamin tidak menuliskan pembicaraan para pemuka nasionalis Islam karena Mohammad Yamin[27] memang menolak dasar negara adalah Islam. Dari bukunya tersebut nampaknya menjadi strategi dasar deislamisasi dalam penulisan Sejarah Indonesia.

Sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai berlangsung di tengah Perang Dunia II di Eropa sudah berakhir. Italia menyerah kepada Sekutu pada 1 Mei 1944, dan Jerman pada 7 Mei 1945. Tinggal Balatentara Djepang di Indonesia atau Asia Tenggara yang masih mampu bertahan dalam sisa waktu menghadapi akhir Perang Asia Timur Raya.

Perangperang ini memberikan bentukan pikiran para anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk tidak mempertahankan perbedaan ideologi. Demikian pula para Ulama dan para politisi nasionalis Islam, serta nasionalis netral agama. Status para pimpinan dan anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai diangkat oleh Balatentara Djepang, tidak mewakili organisasi yang pernah dipimpin pada masa gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia. Melainkan sebagai Wakil Kota. Oleh karena itu, dalam menghadapi perbedaan konsep dasar negara dan bentuk negara, di bawah ancaman bayonet Balatentara Djepang berupaya mencari titik temu konsensus dari segenap perbedaan pandangannya.

27 Mr. A.K. Pringgodigdo, 1960. Op.Cit., hlm. 129 Mr. Mohammad Yamin sebagai pribadi yang tidak disukai umum karena Mohammad Yamin tidak terlahir dari kebutuhan politik. Oleh karena itu, Mohammad Yamin dipecat oleh Gerindo. Sejak Kongres Pemuda, 28 Oktober 1928, ia menolak keras terhadap upaya fusi organisasi kepemudaan daerah. Kemudian setelah dipecat mendirikan Partai Persatoean Indonesia, 21 Juli 1939 dan menjalin kerjasama dengan pemerintah kolenial Belanda.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Pidato Ir Soekarno 1 Juni 1945/2605 di depan
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai
Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan

Pidato Ir Soekarno 1 Juni 1945/2605 di depan
Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai
Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan

Pembentukan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai BPOPK, 1618 Mei 1945, tanpa menyebutkan nama Indonesia, sebagai jawaban Balatentara Djepang terhadap Pemberontakan Tentara Peta di Blitar, 15 Februari 1945, Cilacap, 21 April 1945, dan Pengalengan Bandung, 4 Mei 1945, yang menagih Janji Kemerdekaan Di kelak Kemudian Hari berdasarkan Islam, 7 September 1944, oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso, dalam menjawab gerakan Protes Sosial Pesantren Sukamanah, dan Indramayu.

Sidang BPOPK terbagi dalam dua periode. Pertama, 29 Mei1 Juni 1945, membicarakan masalah ideologi negara. Kedua, 1014 Juni 1945, membicarakan masalah konstitusi negara. Pada sidang perdana, Ir. Soekarno bicara tentang Philosophie gronslag atau Landasan Dasar Falsafah Negara, diusulkannya Pantjasila. Terdiri dari Kebangsaan (2) Internasionalisme (3) Mufakat (4) Kesejahteraan, dan (5) Ketuhanan.

Dalam pidato ini, 1 Djuni 1945, Ir. Soekarno memberikan petunjuk bagaimana caranya agar supaya Hukum Islam berlaku di Indonesia; Ibaratnja Badan Perwakilan Rakjat 100 orang anggotanja, marilah kita bekerdja sekeras-kerasnja agar soepaja 60, 70, 80, 90, jang doedoek dalam perwakilan ini orang Islam, pemoeka-pemoeka Islam. Dengan sendirinya hoekoem-hoekoem jang keloear dari Badan Perwakilan Rakjat itoe, Hoekoem Islam poela.

Presiden Soekarno jang menjatakan 1 Djuni 1945 sebagai Hari Lahirnja Pantjasila. Walaupun demikian, Presiden Soekarno tidak membenarkan bahwa Bung Karnolah sebagai pentjipta Pantjasila. Pernjataan Presiden Soekarno ketika diberi gelar Doctor Honoris Causa dari Univeristas Gadjah Mada, 19 September 1951, "Pantjasila jang Tuanku Promotor sebutkan sebagai djasa saja itu, bukanlah djasa saja. Karena saja dalam hal Pantjasila itu sekadar menjadi "perumus" dari perasaanperasaan jang telah lama terkandung bisu dalam kalbu rakjat Indonesia. Saja sekadar menjadi "pengutara" daripada keinginankeinginan dan isi djiwa bangsa Indonesia turun temurun. Pantjasila itu sudah lama tergurat dalam djiwa bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut Harian Pikiran Rakjat, 2 Agustus 1963, menurunkan Tjuplikan pernjataan Presiden Soekarno:

Saja bukan komunis dalam arti kata jang lazim itu. Saja Pantja Sila! Saja hanja bekerdja untuk Rakjat Indonesia dan saja bekerdja keras untuk itu.

Pada akhirnya disimpulkan oleh Prof. Dr. Soepomo tentang masih adanya dua perbedaan pendapat antara keinginan Indonesia Merdeka berdasar Islam dan bukan negara Islam. Dan Mohammad Yamin dalam *Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945*, Djilid I, menuliskan pernyataan Prof. Dr. Soepomo tersebut:

> Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh Tuan Mohammad Hatta ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan agama dan urusan Islam, dengan perkataan lain, bukan negara Islam. [28]

Pandangan Mohammad Hatta adalah wajar jika beda dengan dasar pemikiran Ulama karena Balatentara Djepang sedang berupaya menjadikan para pemimpin nasionalis netral agama sebagai pengimbang kebangkitan Ulama. Pada saat itu, kebijakan Balatentara Djepang memperlihatkan seperti ingin memajukan Islam dan dekat dengan Ulama.

> Hakikat kebijakan Balatentara Djepang tersebut hanya didasarkan kepentingan memenangkan perangnya. Balatentara Djepang sangat memerlukan keberanian Ulama melawan penjajah Barat, seperti yang diperlihatkan perlawanannya pada masa penjajahan Keradjaan Protestan Belanda.
>
> Balatentara Djepang menghendaki semangat juang dan pengorbanan harta dan jiwa umat Islam yang dipimpinnya untuk mensukseskan Perang Asia Timur Raya. Di balik semua itu, Balatentara Djepang berusaha keras agar umat Islam Indonesia tidak terpengaruh oleh kondisi sikap politik Saudi Arabia yang berpihak kepada Sekoetoe Amerika Serikat dan Inggris.

Di lain pihak, mengapa para pemuka Islam tetap berkeinginan untuk mendirikan Negara Islam? Hal ini diakibatkan di Nusantara Indonesia, sebelum pendudukan Balatentara Djepang, telah pernah berdiri sekitar 40 Kesultanan atau kekuasaan politik Islam.

> Menurut Harry J. Benda, untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, para Ulama dikondisikan oleh kebijakan Balatentara Djepang agar berpihak pada

28 Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin, sekalipun namanya Islami dan berlatar budaya Sumatera Barat, tetapi akibat berpendidikan Barat, dan di bawah penindasan Balatentara Djepang pandangan politiknya tidak menghendaki Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Sebaliknya, Mr.Kasman Singodimedjo dan Ki Bagoes Hadikoesoemo, namanya berasal dari budaya Jawa, tetapi tidak masuk golongan sosialis dan tetap konsisten sebagai pejuang Islam yang berusaha keras agar Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Pada masa Orde Baru menjelang hari-hari akhirnya, Mohammad Hatta mencoba mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia.

upaya perangnya dengan menjanjikan membebaskan para Ulama dan umat Islam Indonesia dari penindasan penjajah pemerintah Kristen.

Untuk kepentingan itu pula, Tenno Heika, 1942 M, dipropagandakan akan memeluk agama Islam dan akan menggantikan kedudukan Khalifah Turki yang telah ditiadakan oleh Kemal Pasha, 1924 M. Dipropagandakan dari Tokio bersama Balatentara Djepang membangun Islam Indonesia.

Bahasa propaganda Balatentara Djepang itu bermuatan sentimen agama, sangat mudah dicerna masyarakat desa. Betapa kejamnya dan lamanya penjajah Kristen Belanda melakukan penindasannya, sangat dirasakan kaum petani desa yang pada umumnya mengaku beragama Islam. Oleh karena itu, pada awal pendaratan, Balatentara Djepang disambut sebagai pembebas dan penyelamat rakyat. Kelanjutannya disadari bahwa Balatentara Djepang juga sebagai penjajah yang tidak menghendaki kemajuan umat Islam Indonesia. Berupaya deislamisasi politik meniadakan konsep politik dari ajaran Islam, dan depolitisasi Ulama dan Santri berupaya menjauhkan Ulama dan Santri sebagai decision makers pembuat kebijakan politik. Untuk mengondisikannya, Balatentara Djepang menjalankan Politik Shintonisasi atau Politik Nipponisasi terhadap segenap aspek kehidupan umat Islam Indonesia.

Walaupun adanya dampak dua perbedaan kebijakan Balatentara Djepang tadi, pada persidangan Juni 1945, 38 anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai berhasil menemukan solusi dengan memutuskan mengangkat Panitia Sembilan. Menurut Deliar Noer, para anggota terdiri dari empat nasionalis Islam dan lima dari nasionalis netral agama:

Agoes Salim	Soekarno [29]
Abikoesno Tjokrosoejoso	Mohammad Hatta[30]
Abdoel Kahar Moezakkir	Mr. A.A. Maramis
Wahid Hasjim	Achmad Soebardjo
	Mohammad Yamin

29 Departemen Penerangan, 1962. *Makin Lama Makin Tjinta. Muhammadijah Setengah Abad, 1912-1962*, hlm. 160 memuat dokumen Soerat Pengangkatan Goeroe Dalam Persjarikatan Moehammadijah Daerah Benkoelen, oleh Dewan Pengadjaran Moehammadijah (Dep. Moehammadijah) di atas nama Consul Hoofbestuur Moehammadijah Daerah Benkoelen, tentang pengangkatan Moehammad Marzoeqie Dja'war sebagai guru Persjarikatan Moehammadijah Daerah Benkoelen, 1 Januari 1941. Ditandatangani oleh Soekarno sebagai Vorsitter.

30 Drs. Mohammad Hatta sebagai Ketua Dewan Kurator Sekolah Tinggi Islam - STI bersama Mohammad Natsir sebagai Sekretaris. Sekolah Tinggi Islam - STI didirikan pada 27 Rajab 1364/8 Juli 1945 dan Abdoel Kahar Moezakkir sebagai Ketua STI, pada masa Pendudukan Balatentara Djepang. Setelah pindah dari Jakarta ke Jogyakarta lebih dikenal dengan nama Universitas Islam Indonesia - UII.

Dari pertemuan Panitia Sembilan menghasilkan perumusan *Preambule* yang terkenal dengan nama *Piagam Djakarta* atau *Djakarta Charter*, 22 Juni 1945, Jumat Kliwon, 11 Rajab 1364. Oleh Mohammad Yamin *Preambule* atau Pembukaan UUD 1945 dinamakan dengan *Djakarta Charter* 22 Juni 1945.

Tentu nama ini dipengaruhi oleh nama Jakarta secara historis dibangun oleh Fatahillah atau Faletehan bersama Sjarif Hidajatoellah atau Soenan Goenoeng Djati, 22 Juni 1527/22 Ramadhan 933, dan istilah *charter* diangkat dari Atlantic Charter, 14 Agustus 1941 dari Persatuan Bangsa Bangsa - PBB.

> Menurut Deliar Noer, dari keterangan A. Kahar Moezakkir sebenarnya A.A. Maramis walaupun dari perwakilan Kristen menyetujui 200% terhadap *Preambule* atau Piagam Djakarta. Persetujuan ini terjadi karena Ketoehanan tidak dituliskan dengan Jang Maha Esa. Jadi, tidak bertentangan dengan keyakinan Trinitas ajaran Kristen. Sedangkan, Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek2-nya, diberlakukan untuk umat Islam saja. Tidak untuk seluruh bangsa Indonesia. Artinya umat Kristen dan Katolik tidak terkena Sjariat Islam.

Oleh karena itu, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Kiai Hadji Achmad Sanoesi pada pertemuan, 14 Juli 1945, Sabtu Pahing, 3 Rabiul Awwal 1357, meminta 7 kata-kata: Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek2-nja, diganti menjadi *Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan Sjariat Islam*. Diusulkan agar dihapuskan kata-kata *bagi pemeloek2-nya*. Dengan penghapusan ini, Syariah Islam menjadi berlaku untuk segenap bangsa Indonesia.

Usulan penghapusan sebagian atau seluruhnya dari tujuh kata-kata tersebut ditolak. Diingatkan oleh Ir. Soekarno bahwa Piagam Djakarta sebagai hasil kompromi dan persetujuan dari Panitia Sembilan. Antara lain Ir. Soekarno mengatakan:

> Padoeka Toean Ketoea, kami Panitya Perantjang mengetahoei bahwa anggota Jang Terhormat Sanoesi minta perkataan "bagi pemeloek-pemeloeknja" ditjoret. Sekarang ternjata bahwa anggota Jang Terhormat Hadikoesoemo minta djoega ditjoretnja. Tetapi kami berpendapat, bahwa kalimat-kalimat ini seloeroehnja berdasar kepada Ke-Toehanan, soedahlah hasil kompromis di antara doea pihak. Sehingga dengan adanja kompromis itoe, perselisihan di antara kedoea pihak hilang.
>
> Setiap kompromis berdasar pada memberi dan mengambil, *geven* dan *nemen*. Ini soeatoe kompromis jang berdasar memberi dan mengambil. Bahkan kemarin di dalam Panitya soal ini ditindjaoe lagi sedalam-dalamnja. Di antara lain-lain, sebagai Toean-Toean Jang Terhormat mengetahoei, dengan Toean Wachid Hasjim dan Agoes Salim di antara anggota Panitya, kedoea-doeanja Islam.

> Pendek kata inilah kompromis jang sebaik-baiknja. Djadi Panitya memegang tegoeh akan kompromis jang dinamakan oleh anggota Jang Terhormat Mohammad Yamin "Djakarta Charter" jang disertai perkataan Toean anggota Jang Terhormat Soekiman, Gentlemen Agreement, soepaja ini dipegang tegoeh di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Saja berharap Padoeka Toean Jang Moelia, rapat besar soeka membenarkan Panitya itoe.[31]

Satu kenyataan yang tidak dapat dihindari, para Ulama dan para politisi Islam, dalam perjuangan nasionalnya membebaskan Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan menegakkan Syariah Islam berhadapan dengan kalangan nasionalis netral agama, Kedjawen, dan Kristen, Katolik, serta penjajah Balatentara Djepang.

Benturan kepentingan dengan semua pihak ini, menjadikan lahirnya konsensus bersama, Piagam Djakarta. Sampai dengan 22 Juni 1945, Jumat Kliwon, 11 Rajab 1364 dengan terbentuknya Piagam Djakarta yang juga dinamakan oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo sebagai Gentlement Agreement, merupakan salah satu tahapan keberhasilan perjuangan politik Ulama dan Santri serta Tentara Pembela Tanah Air Peta, dalam mewujudkan janji Balatentara Djepang, Indonesia Merdeka berdasar Islam, 7 September 1944, Kamis Pahing, 18 Ramadhan 1363, terbentur pula dengan strategi penjajah Balatentara Dai Nippon yang sejalan dengan tuntutan kalangan politisi netral agama.

Artinya perjuangan Ulama dalam menegakkan nasionalisme Islam terbentur dengan realitas strategi deislamisasi politik Balatentara Djepang dalam menciptakan Chuo Sangi In dan Dokuritsu Zyun bi Tyoosakai di dalamnya jumlah wakil Ulama atau kalangan politisi Islam, menurut Abdoel Kahar Moezakkir hanya 15 wakil. Berarti hanya 25% dari 62 seluruh wakil. Demikian pula menurut Deliar Noer, jumlah wakil nasionalis Islam dalam Panitia Sembilan hanya 4 orang, lebih kecil dari wakil nasionalis netral agama berjumlah 5 orang.

Hal yang sama terjadi pula perwakilan nasionalis Islam dalam Panitia Ketjil Perantjang Oendang Oendang Dasar terdiri dari Hadji Agoes Salim dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo. Menghadapi perwakilan nasionalis netral agama terdiri dari: Soepomo (Ketua), Wongsonegoro, Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, dan Singgih. Dapatlah dipahami jika hasil rantjangan Oendang Oendang Dasar tidak sejalan dengan yang diidealitaskan oleh para wakil nasionalis Islam.[32]

---

31 Prawoto Mangkusasmito, 1970. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Projeksi*. Hudaya. Djakarta, hlm. 18-19

32 Periksa lebih lanjut, Endang Saifuddin Anshari, 1401 H/1991 M. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. dan Deliar Noer. 1420 H/ 2000 M. *Partai Islam Di Pentas Nasional.*
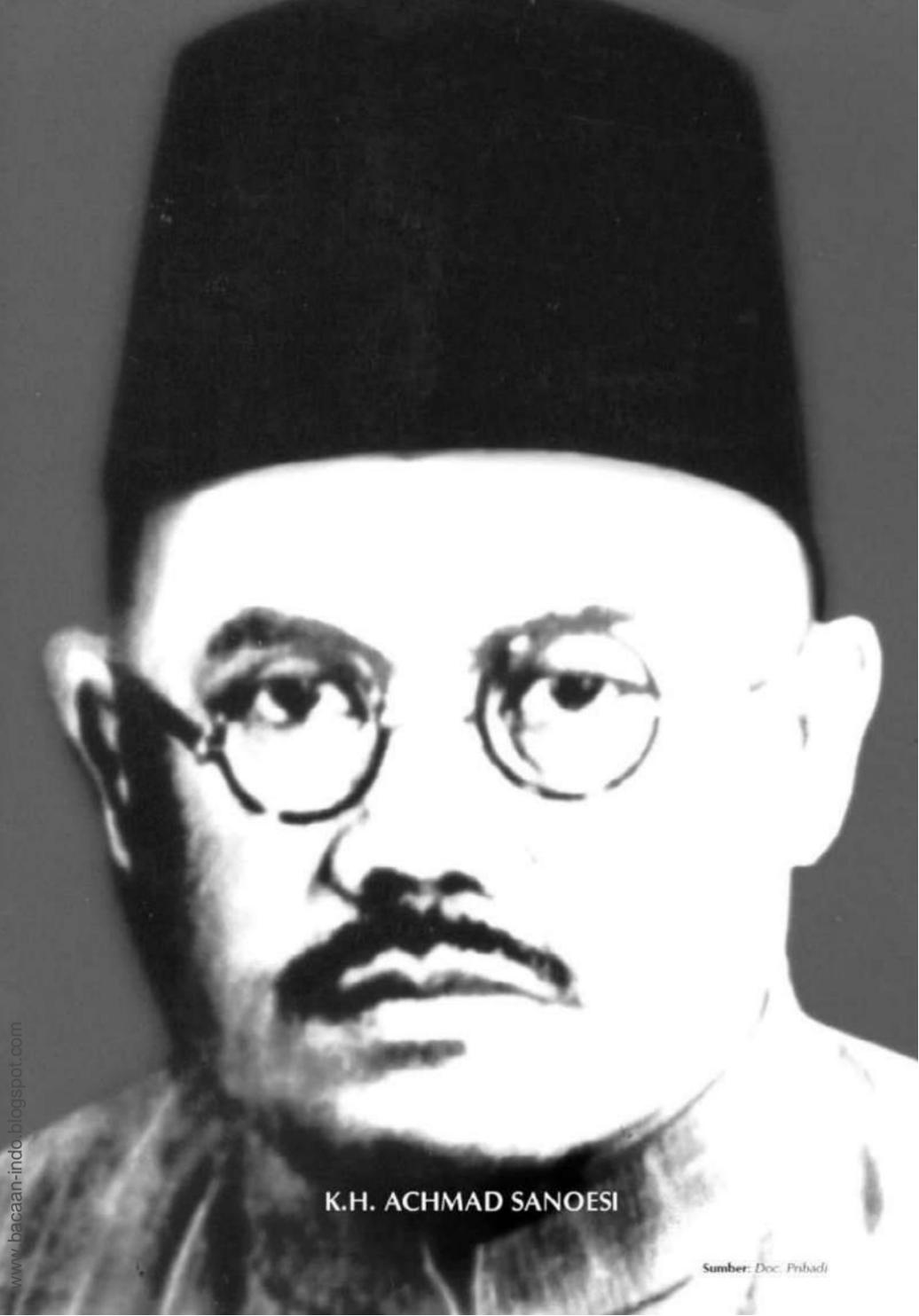
K.H. ACHMAD SANOESI

Sumber: *Doc. Pribadi*

K.H. ACHMAD SANOESI

Pendiri Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi

Santri dari Pesantren Selajambe Cisaat pimpinan K.H. Moehammad Anwar
Pesatren Soekamantri Cisaat pimpinan K.H. Moehammad Siddik
Pesantren K.H. Djenal Aris dan K.H. Hafidz Sukaraja
Pesantren Ciajag Cianjur Pesantren Gudang Tasikmalaya pimpinan K.H. Sudja'i
Pesantren Gentur Cianjur pimpinan K.H. Achmad Satibi
Pesantren Keresek & Bumiasih Garut
Makkah,19091915, berguru ke Sjech Ali Maliki, Sjech Ali Thajjib, Sjech Saleh Bafadal,
H.M. Djoenaedi, H. Moechtar

Kembali ke Sukabumi
Menjadi pimpinan Pesantren Cantayang dan Gunung Walat. Ketika K.H. Asnawi Banten ditangkap dibuang ke Cianjur, 1927 M, K.H. Achmad Sanoesi dibuang ke Batavia Centrum,1927 M.

Mendirikan AlIttihadiyatul Islamijah AII, 1931 M
dan Pergoeroean Sjamsoel Oeloem di Gunung Puyuh, 1932 M. Bersama K.H. Abdul Halim dan K.H. Achmad Sanusi membangun Persatoean Oemmat Islam Indonesia.

Barisan Islam Indonesia, 1937 M, Chuo Sangi Kai Bogor, 1943 M, Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdakaan BPOPK, 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, 1945. Bersama Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. Achmad Sanoesi dalam Sidang BPOPK mengusulkan hasil perumusan Panitia Sembilan, yakni Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Ketuhanan dengan mendjalankan sjariah Islam bagi pemeluk2nja agar diubah menjadi Ketuhanan, dengan mendjalankan sjariah Islam. Usulnya ditolak oleh Ir Soekarno, karena Piagam Djakarta merupakan hasil kesepakatan bersama Panitia Sembilan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364 menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat – KNIP .

Karya Tulis
Raudhatul Irfan fi Ma'rifati Al-Qur'an Tarjamah AlQur'an,
Tamsyiyyatul Muslimin Majalah Tafsir AlQur'an.

Tidak beda dengan pembentukan *Dokuritsu Zyunbi Iinkai - Panitia Persiapan Kemerdekaan* pada 7 Agustus 1945 beranggotakan 21 pemimpin terdiri dari:

> 12 wakil Pulau Jawa, 3 wakil Pulau Sumatra, 2 wakil Pulau Sulawesi, 1 wakil Pulau Kalimantan, 1 wakil Kepulauan Sunda Kecil, 1 wakil Kepulauan Maluku, dan 1 wakil Komunitas Cina.

Dengan terbentuknya *Dokuritsu Zyunbi Iinkai* - Panitia Persiapan Kemerdekaan,[33] *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* - Panitia Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan, dibubarkan. Adapun susunan Panitia Persiapan Kemerdekaan adalah:

Ir. Soekarno - Ketua	K.H. Wahid Hasim
Drs. Mohammad Hatta	Ki Bagoes Hadikoesoemo
Mr. Soepomo	dr. Mohammad Amir
dr. Radjiman Wedijodiningrat	Mr. Abdoel Abbas
K.H.P. Poerbojo	Mr.Teuku Mohammad Hasan
R.P. Soeroso	A.A. Hamidan
M. Soetardjo	dr. Sam Ratoelangi
Soerjomihardjo	Andi Pangeran
I Goesti Ketoet Poedja	Oto Iskandardinata
Abdoel Kadir	Mr. Latoehahary

Yap Tjwan Bing[34]

Sayangnya, Mr. Kasman Singodimedjo tidak menjelaskan siapa yang diangkat menjadi wakil dari pulau-pulau mana yang disebutkan di atas. Tidak pula menjelaskan mantan pimpinan organisasi massa atau partai politik apa sebelumnya. Dari George Mc Turnan Kahin, dalam *Nationalism and Revolution In Indonesia* dapat dibaca siapa dan perwakilan dari pulau mananya.

---

33 *Dokuritsu Zyubi Iinkai* dalam bahasa Jepang aslinya tidak mnyebutkan *Indonesia*. Dalam penulisan *Sejarah Indonesia* ditambahkan terjemahannya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan *Indonesia*. Demikian pula untuk *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*, tanpa *Indonesia* pada teks asli Jepangnya.

34 George Mc. Turnan Kahin. 1970. *Op.Cit.*, hlm. 127 menjelaskan Dr.Mohammad Amin, Mr. Teuku Mohammad Hasan, Mr. Abdoel Abas - Wakil P. Sumatra. Dr. G.S.S.J. Ratu Lagie, Andi Pangeran - Wakil P. Sulawesi. A.A.Hamidan - Wakil P. Kalimantan. Mr. I. Goesti Ketoet Poedja - Wakil Kepulauan Sunda Kecil. Mr. J. Latuharhary - Wakil Kepulauan Maluku. Drs. Yap Tjuan Bing - Wakil Komunitas Cina. K.R.T Radjiman Wediodiningrat, R.Otto Iskandar Dinata, Ki Abdoel Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, B.K.P.A.Soerjohamidjojo, B.P.H. Poerbojo, M.Soetardjo Kartohadikoesoemo, R.P. Soeroso, Prof. R. Soepomo, Abdoel Kadir - Wakil P. Jawa ditambah Ir. Soekarno - Ketua dan Mohammad Hatta - Wakil Ketua.

Ketimpangan dan kesedikitan jumlah perwakilan Islam seperti di atas, terpaksa diterima Ulama dan politisi Islam karena sedang di bawah penindasan Balatentara Djepang dengan strategi dasarnya deislamisasi politik dan depolitisasi Ulama.

Perjuangan Ulama dan para pemuka politik Islam dihadapkan kenyataan sejarah, bahwa Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai - Badan Penjelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan, pada 17 Djuli 1945, menutup sidang kedua, selesailah dan diterima dengan sebulatbulatnya: Pemboekaan dan Oendang-Oendang Dasar Repoeblik Indonesia.

GERBANG KETUJUH

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN PROKLAMASI

Resoloesi Djihad 60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia

ALLAH YANG MAHA KUASA melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada bangsa dan negara Indonesia memperoleh kemerdekaan ipoleksosbudhankam dan agama. Terbebas dari segala bentuk penjajahan yang diciptakan oleh imperialis Barat Katolik dan Protestan ataupun imperialis Timur Kekaisaran Shinto Djepang, pada 9 Ramadhan 1364, Jumat Legi, 17 Agustus 1945. Puncak keberhasilan dari perjuangan yang panjang, diawali sejak zaman Wali Sanga kemudian oleh para Ulama dan Santri dalam menjawab tantangan imperialis Barat Katolik Portugis, 1511 M, pelaksana keputusan Perjanjian Tordesilas, 1494 M, yang direstui oleh Paus Alexander VI. Dengan slogan Gold, Gospel untuk Glory, mematahkan jalur niaga laut Islam dengan menduduki Malaka, pusat pasar umat Islam, dan Kalapa, 1522 M sesudah penguasaan Kalkuta India.

Serbuan atas pelabuhan Kalapa berhasil direbut kembali oleh Sjarif Hidajatoelah atau Soenan Goenoeng Djati bersama menantunya Fatahillah atau Faletehan. Kemenangan gemilang ini disyukuri dengan menggantikan nama pelabuhan Kalapa menjadi Fat-han Mubina (QS 48: 1) - Kemenangan Paripurna atau Jayakarta. Terjadi pada 22 Ramadhan 933 H atau 22 Juni 1527. Selanjutnya, Jayakarta lebih dikenal sebagai Jakarta.

Namun, seratus tahun kemudian datang serbuan imperialis Protestan Belanda menduduki Jayakarta, 1619 M. Mengapa terjadi demikian? Hal ini terjadi sebagai akibat dari pengaruh munculnya gerakan Protestanisme, 19 April 1529 di Jerman, yang dipelopori oleh Marten Luther. Diikuti dengan Reformasi di Jenewa yang dirintis John Calvin. Melahirkan aliran Calvinisme. Semula merupakan gerakan

Reformasi Agama. Namun, berikutnya berubah menjadi Reformasi Politik. Gerakan Nasionalisme Protestan berjuang membebaskan Eropa dari penjajahan Katolik.

Pecahlah perang agama antarsesama penganut Salib: Katolik kontra Reformasi melawan Protestan Reformasi. Semula hanya sebagai perang agama. Kemudian berubah menjadi gerakan nasional. Artinya, gerakan membebaskan Eropa dari penjajahan Katolik. Karena itu, ciri gerakan nasional di Eropa adalah antikatolik atau *anticlerical*. Dampaknya berdasar Perdamaian Augsburg (1555 M), melahirkan keputusan *cujus regio, ejus religio* – setiap raja dapat memilih agamanya. Eropa dipecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil atas dasar agama Katolik dan Protestan.

Jadi, kerajaan-kerajaan di Eropa dibangun atas dasar ketidakmampuan bertoleransi terhadap perbedaan agama walaupun sesama Salib. Dengan latar belakang pemahaman agama dan politik benua Eropa dan Inggris itu, mereka berangkat ke Asia Afrika dan Amerika untuk menjajah agama, bangsa, dan negara di benua Asia Afrika dan Amerika. Dengan kata lain, Barat mengekspor budaya Perang Agama ke Asia dan Afrika.

Kelanjutannya kerajaan-kerajaan baru Protestan atau Calvinis di Eropa dan Inggris, setelah merdeka dari penjajahan Katolik, berubah juga menjadi kerajaan imperialis. Karakter tidak mampu bertoleransi terhadap perbedaan agama, walaupun antarsesama Salib, menjadi sikap dan karakter penjajah Barat. Mereka beragama untuk pecah belah sesama Barat. Mereka juga atas nama agama menjajah Asia Afrika dan Amerika.

Akibatnya, pada abad ke-17 M, Asia Afrika dan Amerika berhadapan dengan gelombang baru imperialis Barat Protestan dari Marten Luther atau Calivinisme dari John Calvin, memperebutkan tanah jajahan dengan imperialis Katolik: Portugis, Spanyol, dan Perancis. Dengan armada perangnya, dirusakkanlah sistem niaga yang damai di Asia Afrika dan Amerika. Digantikan dengan sistem penjarahan dan perampokan serta pemusnahan ras - *genocide*, atas nama *mission sacre* - missi suci. Bangsa Indian musnah dan bangsa Afrika ditargetkan sasaran penangkapan untuk dijadikan budak belian. Dari fakta sajarah ini, imperialisme Barat yang memperalat agama Katolik dan Protestan yang dipolitikkan menjadikan tindakannya sangat bertentangan dengan perikeadilan dan perikemanusiaan.

Kedatangan kedua imperialis Barat Katolik dan Protestan ini, menurut J.C. van Leur dalam *Indonesian Trade and Society*, menjadikan Indonesia terlibat dalam Perang Agama Segitiga karena Perang Agama antar Salib di Eropa diekspor ke

Indonesia. Islam sebagai Pribumi melawan imperialis Barat Katolik dan Protestan. Mereka menjadikan Nusantara Indonesia sebagai arena Perang Agama antarsesama Salib. Dapat juga dikatakan sebagai perang antar imperialis Barat Katolik lawan Protestan.

> Oleh karena itu, tantangan kedua imperialisme Barat Katolik dan Protestan ini dijawab oleh Ulama dan Santri dengan membangkitkan kesadaran nasionalisme Indonesia yang didasari oleh ajaran Islam. Dengan pengertian nasionalisme sebagai gerakan anti imperialisme. Akibat imperialisme Barat dibangun atas dasar agama Katolik dan Protestan yang anti Islam maka gerakan nasionalisme Indonesia juga dilandasi oleh ajaran Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia.
>
> Akibat imperialisme Barat ingin menjajah agama, tanah air dan bangsa Indonesia maka gerakan nasional Indonesia menanamkan dan membangkitkan kesadaran cinta agama, tanah air dan bangsa. Selain itu, karena imperialisme Barat memaksakan Politik Kristenisasi maka nasionalisme Indonesia tidak hanya anti clerical - anti Katolik. Melainkan juga anti Protestanisme penjajahan.

Jawaban lanjut, Ulama di abad ke-17 M, melancarkan perlawanan bersenjata terhadap invasi imperialisme Protestan Belanda yang menguasai Jayakarta, 1619 M. Di seluruh Nusantara, Ulama membangkitkan kesadaran nasionalisme sebagai gerakan anti imperalisme, tetapi dihambat oleh sebagian kalangan Prijaji di P. Jawa atau Oelebalang dan Penghoeloe di Luar P. Jawa yang berpihak pada pemerintah kolonial Belanda. Mereka diangkat sebagai Boepati atau ambtenar atau jabatan lainnya.

Berbagai sumber kekuatan dan kekuasaan umat Islam, dipatahkan pemerintah kolonial Belanda. Dirusakkannya jiwa wirausahawannya dengan dipindahkannya hak monopoli dagang kepada Vreemde Oosterlingen Cina, India, dan Arab. Terutama Kekuasaan Politik Islam atau Kesultanan dikerdilkan melalui Korte Verklaring - Perjanjian Pendek, para Sultan hanya bergelar Sultan tetapi tanpa kekuasaan politik dan ekonomi. Digaji oleh pemerintah kolonial Belanda.

Akibatnya, perjuangan membangkitkan kesadaran Nasionalisme yang dipimpin oleh Ulama dan Santri membebaskan Nusantara Indonesia dari penjajahan Kerajaan Protestan Belanda berproses panjang. Baru berakhir ketika pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Balatentara Dai Nippon, 8 Maret 1942. Namun, tidaklah berarti perjuangan melawan penjajah berakhir. Bergantilah gerakan nasionalisme yang dipimpin oleh Ulama, 1363 H/1944 M, dan Tentara Pembela Tanah Air -

Peta,1364 H/1945 M, melancarkan perlawanan bersenjata terhadap imperialis Timur, Balatentara Dai Nippon pelaksana konsep penjajahan Kekaisaran Shinto Djepang.

Berkat perjuangan para Ulama yang berkesinambungan dan *istiqamah*, berakhirlah penjajahan politik Barat dan Timur, pada 9 Ramadhan 1364, Jumat Legi, 17 Agustus 1945, lahirlah bangsa Indonesia yang merdeka. Anugerah Kemerdekaan ini, terjadi pada Puluhan Pertama Ramadhan sebagai Puluhan Rahmat Allah, 9 Ramadhan 1364 H. Oleh karena itu, kemerdekaan Indonesia terlimpah untuk segenap bangsa Indonesia, dirumuskan dalam Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 sebagai berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Benar, Repoeblik Indonesia telah berdiri. Namun, pendaratan Tentara Sekoetoe dan Nica, 29 September 1945, di Tanjung Priok Jakarta, tidak memahami Atlantic Charter, 14 Agustus 1941. dan Djakarta Charter, 22 Juni 1945, mencoba kembali menjadikan Indonesia sebagai tanah jajahannya. Reaksi Moektamar Oemmat Islam melahirkan Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi, mempelopori menjawab tantangan ini dengan:

> *Resoloesi Djihad, 60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap Berdjihad Fi Sabilillah. Perang didjalan Allah oentoek menentang tiap-tiap pendjadjahan* pada 1 Dzulhijjah 1364 H, Rabo Pon, 7 November 1945.
>
> *Resoloesi Djihad* tersebut sebagai kelanjutan *Resoloesi Djihad Nahdlatoel Oelama*, 22 Oktober 1945, Senin Pahing, 15 Dzulqaidah 1364 H yang dirumuskan di kantor Pengoeroes Besar Ansor Nahdlatoel Oelama - PB ANO, Jalan Bubutan VI/2 Surabaya.

Dengan digunakannya kantor PB ANO tersebut, memberikan pengertian bahwa ANO berpartisipasi aktif pula dalam menjawab pendaratan Tentara Sekoetoe dan Nica. Dengan kata lain, ANO juga merealisasi langkah lanjut berdirinya Gerakan Pemoeda Islam Indonesia - G.P.I.I di Jakarta, 3 Oktober 1945. Bagi ANO tidak merasa asing terhadap G.P.I.I karena didirikan atas inisiatif Anwar Harjono, santri dari Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur.

Pra Proklamasi Pendekatan Boeng Karno Terhadap Ulama

Boeng Karno sebagai tokoh pemimpin yang memiliki kepribadian yang unik. Di tengah kesibukannya di bidang politik, menyempatkan pula untuk mendekati Ulama tasawuf. Mengapa di tengah Perang Asia Timoer Raja mendekati Ulama?

Dalam teori perang Carl von Clausewitz, On War bahwa perang melahirkan kondisi tanpa ada kepastian dan tidak mudah diduga - not easlily detectable, menjadikan setiap orang dihinggapi feeling of fear - rasa takut. Timbullah upaya memperkuat self confidence - keyakinan dirinya atau moral staminanya. Upaya ini, terutama dilakukan para komandan perang karena kemenangan - victory, salah satu faktor penentunya, sangat bergantung pada karakter dan bakat dari victorious commander - komandan pemenang.

Untuk Indonesia, sering dikerjakan para pimpinan politik dengan mendekati Ulama untuk menumbuhkan rasa tenang, yakin, dan berani. Bahkan, kalau dekat dengan Ulama Mukasyafah mendapatkan keterangan tentang kepastian datangnya hari kemenangan - victory day dan kemerdekaan – freedom yang diharapkan.

Oleh karena itu, sebelum Proklamasi, menurut Dr. R. Soeharto dalam Saksi Sejarah menyatakan bahwa Boeng Karno datang ke Sjech Moesa seorang Ulama Mukasyafah yang berusia 80 tahun di Sukanegara Cianjur Selatan. Seorang Ulama yang dikenal oleh Boeng Karno melalui petunjuk R.A.A. Wiranatakoesoemah, Bupati Cianjur dan Bandung serta nantinya menjadi Menteri Dalam Negeri.

K.H. Abdoel Moekti pimpinan Persjarikatan Moehammadijah Madiun. Dari K.H. Abdoel Moekti, Boeng Karno mendapatkan kepastian waktu yang baik untuk Proklamasi pada 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364. Apabila tidak diproklamasikan pada tanggal tersebut hanya akan menemui hari yang demikian bahagia itu, 300 tahun yang akan datang.[1]

Boeng Karno juga berupaya mendapat keterangan tentang kepastian datangnya hari kemerdekaan dan dukungan dari Ulama Besar dari Pesantren Tebuireng Jombang, Choedratoes Sjeich Rais Akbar K.H. Hasjim Asj'ari. Dari beliau diperoleh kepastian, tidak perlu takut tentang Proklamasi karena Choedrotoes Sjeich Rais Akbar K.H. Hasjim Asj'ari sudah menghubungi pimpinan Angkatan Laut Jepang di Surabaya dan memberitahukan pula setuju kalau Boeng Karno sebagai Presiden Repoeblik Indonesia.

Boeng Karno juga menugaskan Dr. R. Soeharto untuk menghadap ke Drs. Sosrokartono kakak R.A. Kartini, "paranormal" yang tinggal di Jalan Pungkur 19 Bandung. Dari Drs Sosrokartono diperoleh informasi tidak perlu ragu lagi, Indonesia pasti merdeka. Walaupun prosesnya melalui banyak kesulitan. Drs.Sosrokartono menurut Ir. Haryoto Kunto dalam Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, disebut sebagai seorang yang weruh sakdurunge winarah – tahu sebelum diberitahu.

---

1 K.H. Abdoel Moekti pada 1967 dalam *Seminar Sejarah Perjuangan Umat Islam Indonesia* di Gedung PII Menteng Jakarta, menunjukkan kepada penulis tentang kesaksian dengan tanda tangannya beberapa tokoh yang hadir dalam Proklamasi yang membenarkan bahwa penentu Proklamasi pada 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan adalah K.H. Abdoel Moekti.

Panggilan Jenderal Terauchi Ke Dalat

Sebelum menerima panggilan Jenderal Terauchi ke Dalat Saigon, Dr. R. Soeharto juga menuturkan bahwa pada Juli 1945, Boeng Karno bersama Boeng Hatta dan Mr Achmad Soebardjo, pergi ke Singaraja Bali untuk mengadakan pertemuan dengan Laksamana Shibata dari Kaigun atau Angkatan Laut Jepang yang mengusai daerah Luar Jawa. Berkat kemahiran diplomasi Boeng Karno, menjadikan Laksamana Shibata sesudah Proklamasi justru memberian bantuan senjata. Mengapa justru berpihak pada Repoeblik Indonesia?

Sebenarnya, berita kekalahan Balatentara Djepang di Samodra Pasifik dan di Asia Tenggara telah diketahui oleh sementara pimpinan nasional. Jatuhnya Saipan, 15 Juni 1944, diikuti dengan tenggelamnya kapal tempur Yamat, 6 April 1945, di Kepulauan Ryukyu, dan jatuhnya Iwo Jima, 19 Februari 1945, yang berjarak 600 mil, Okinawa, 21 Juni 1945, berjarak 700 mil dari Tokio, menjadikan ibu kota Tokio terbuka untuk diserang dari pulau-pulau tersebut. Jenderal Terauchi sendiri di Asia Tenggara menghadapi posisi tersulit karena Rangoon jatuh ke tangan Sekoetoe, Mei 1945, berjarak hanya 300 mil dari Dalat.

Puncak waktu berakhirnya kekuasaan Balatentara Djepang sudah dapat diperhitungkan. Dengan menyerahnya Jerman, 7 Mei 1945, didahului dengan gerakan invasi Rusia yang sangat cepat memasuki Eropa maka Amerika Serikat mencoba mempercepat proses berakhirnya Perang Asia Timoer Raja atau Perang Pasifik. Dua buah bom atom diledakkan atas kota Hirosima, 6 Agustus 1945, disusul dengan Nagasaki, 9 Agustus 1945. Kesempatan ini digunakan Rusia menyatakan perang pada Jepang, 8 Agustus 1945, segera menduduki Manchuria. Kekalahan Balatentara Jepang di seluruh fron dan dampak dua bom pemusnah Amerika Serikat diledakan di kedua kota tersebut, menjadikan Kaisar Hirohito pada 14 Agustus 1945 menyatakan menyerah kepada Sekoetoe.

Sebelum terjadi penyerahan tersebut, Jenderal Terauchi di Dalat mengundang Boeng Karno, Boeng Hatta dan Dr.Radjiman Wedijodiningrat, pada 10 Agustus 1945. Menurut Dr. R. Soeharto, di sini Boeng Karno melaporkan susunan *Dokuritsu Zyunbi Iinkai* - Panitia Persiapan Kemerdekaan yang dibentuk pada 7 Agustus 1945, Selasa Legi, 28 Sya'ban 1364.

Terdiri atas: 12 wakil dari P. Jawa, 3 wakil Sumatra, 2 wakil Sulawesi, 1 Wakil Kalimantan, 1 wakil dari Nusa Tenggara, 1 wakil dari Maluku, 1 wakil dari golongan Cina. Jadi, tidak ada perwakilan ormas atau orpol. Melainkan perwakilan wilayah dan etnis Cina. Sama seperti yang dituturkan Mr. Kasman Singodimedjo, dalam *Hidup Itu Berjuang 75 Tahun Kasman Singodimedjo.*

> Kalau kita perhatikan tanggal 7 Agustus 1945, pembentukan Dokuritsu Zyunbi Iinkai - Panitia Persiapan Kemerdekaan, terjadi sesudah bom atom diledakkan di atas Hirosima, 6 Agustus 1945. Panggilan Jenderal Terauchi ke Dalat pada 10 Agustus 1945, berarti terjadi sesudah bom atom dijatuhkan di Nagasaki , 9 Agustus 1945.

Di bawah kondisi kritis tersebut, Mr. Teoekoe Mohammad Hasan dan Dr. Amir, 12 Agustus 1945, diberangkatkan Balatentara Djepang ke Singapora. Dengan tujuan akan dipertemukan dengan Boeng Karno, Boeng Hatta, Dr. Radjiman dari Dalat, sekaligus akan mengadakan pembicaraan dengan Ibrahim Yacoob dan Boerhanoeddin dari Kesatoean Rakjat Indonesia Semenandjong - K.R.I.S. Para pimpinan nasional ini di Singapora, 13 Agustus 1945, diterima oleh Panglima Balatentara Djepang, Jenderal Itagaki.

Apa yang dibicarakan dengan Jenderal Itagaki, Dr.R.Soeharto tidak menjelaskannya. Namun, Joginder Singh Jessy, 1961, dalam History of Malaya[2], menjelaskan bahwa Malaya atau Malaysia dan Singapora dalam pernyataan perkenan kemerdekaan dari Balatentara Djepang dimasukan sebagai wilayah Indonesia.[3] Untuk kepentingan penyatuan wilayah tersebut, Kesatoean Rakjat Indonesia Semenandjoeng akan mengirimkan delapan delegasinya ke Indonesia pada saat pengumuman perkenan kemerdekaan dari Balatentara Djepang, pada 24 Agustus 1945.

Paginya, terbang ke Jakarta, tiba menjelang zuhur, pada 14 Agustus 1945. Jadi, bertepatan dengan tanggal menyerahnya Kaisar Hirohito kepada Sekoetoe. Penyerahan ini menjadikan seluruh hasil pembicaraan dengan Jenderal Terauchi di Dalat dan Jenderal Itagaki di Singapora, menjadi batal.

Dengan pengertian tanggal Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak lagi sebagaimana ditentukan oleh Jenderal Terauchi, 24 Agustus 1945, dan makna kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Balatentara Djepang. Sedangkan Malaya atau Malaysia, Singapora, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau sekitarnya, tidak menjadi wilayah Republik Indonesia sebagaimana rancangan Jenderal Itagaki. Wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan India Belanda.

Sebelum membicarakan masalah Proklamasi, di bawah ini penulis bicarakan terlebih dahulu masalah Penculikan Ir. Soekarno bersama keluarga dan Mohammad

2 Prawoto Mangkusamito, 1970. *Op.Cit.*, hlm. 23.

3 Ibid, h. 23 dijelaskan bahwa dalam salah satu rapat *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai*, diputuskan bahwa wilayah Indonesia meliputi: Daerah bekas Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya.

Hatta, 15 Agustus 1945, Rabu Wage, 7 Ramadhan 1364, oleh pemuda-pemuda kiri dan Tentara Peta Soekarni, di bawah pimpinan Wikana.

Penculikan

Di Jakarta, sejak adanya Pendudukan Balatentara Djepang timbul gerakan di bawah tanah anti Jepang. George Mc Turnan Kahin dalam *Nationalism and Revolution In Indonesia*, menyebutkan M. Natsir dan Sjafroeddin Prawiranegara sebagai kelompok intelektual Islam tergolong pelaku gerakan di bawah tanah anti Jepang. Sedangkan Wikana dari golongan komunis anti Jepang.

George Mc Turnan Kahin banyak menuliskan peran Komunis daripada Islam pada masa menjelang Proklamasi sehingga dikoreksi kesalahan faktanya oleh Mr. Achmad Soebardjo Djojohadisoerjo dalam *Lahirnya Republik Indonesia; Suatu Tinjauan dan Kisah Pengalaman*.

Dr. R. Soeharto menyatakan di Jakarta timbul beberapa kelompok pemuda anti Jepang. Ada yang bekerja untuk membantu penjajah Belanda dan ada yang bekerja untuk Sekoetoe. Ada pula bekerja demi kepentingan komunis internasional. Terdapat pula pemuda komunis nasionalis di bawah pimpinan Tan Malaka. Adapun yang terbanyak dari anti Jepang, bekerja untuk kepentingan nasional.

Sayangnya, Dr. R. Soeharto tidak menjelaskan nama-namanya siapa yang bekerja dalam gerakan di bawah tanah, dan untuk siapa kerjanya. Mr. Kasman Singodimedjo, menyebutkan kelompok anti Jepang dari Tentara Peta dengan sebutan gerombolan Soekarni, dan dari pemuda komunis disebutnya gerombolan Wikana.

> Repoeblik Indonesia yang baru berdiri, menghadapi pelaksanaan keputusan Perjanjian Posdam yang dibuat antara Amerika Serikat, Perancis, Rusia, dan Inggris antara lain berisi persetujuan bahwa negara penjajah yang bergabung dalam Pakta Pertahanan Sekoetoe diberi hak untuk menerima kembali menguasai negara jajahannya. Adapun yang tidak dibenarkan oleh Perjanjian Posdam bila mencari jajahan baru.
>
> Akibat Uni Soviet Rusia ikut serta membuat Perjanjian Posdam, dan PKI Sibar di bawah pimpinan Sardjono yang masih di Australia dan sebagai anggota Komunis Internasional - Komintern menginduk ke Rusia maka dampaknya Rusia dan PKI berdasarkan Perjanjian Posdam tersebut menyetujui Keradjaan Protestan Belanda menjajah kembali Indonesia. Dengan demikian, PKI Sibar dibawah Sardjono sebagai anggota Komintern menolak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan bekerja sama dengan Keradjaan Protestan Belanda.

Apakah karena pengaruh kondisi politik internasional itu, terjadinya penculikan Boeng Karno dan Boeng Hatta, bersama Iboe Fatmawati serta Goentoer yang masih bayi, pada 15 Agustus 1945 ke Rengasdengklok oleh Soekarni? Penculikan yang dipimpin oleh Wikana dan Chaeroel Saleh, dilaksanakan oleh Tentara Peta dipimpin oleh Soekarni. Menurut keterangan Boeng Hatta selama ditawan di rumah seorang Cina bernama I Song, Rengas dengklok, tidak terjadi perundingan ataupun pembicaraan lain.

Apakah penculikan ini sebagai rekayasa Tan Malaka dari komunis nasional mencoba mengambil kepemimpinan nasional Dwi Tunggal Soekarno Hatta? Sejarah membuktikan, pengguna sistem penculikan dalam memenangkan program politiknya adalah pihak komunis. P.M. Soetan Sjahrir diculik oleh Tan Malaka dalam peristiwa Kudeta, 3 Juli 1946.

Selain fakta Kudeta, 3 Juli 1946, menurut Dr. R. Soeharto, Tan Malaka, menuntut dirinya ditunjuk sebagai waris tunggal bila Boeng Karno dan Boeng Hatta dibunuh atau ditawan oleh Jepang atau Belanda.[4] Boeng Karno dan Boeng Hatta didesak agar memberikan Testamen Politik. Isinya penyerahan kekuasaan kepada Tan Malaka. Namun, kedua Proklamator menolaknya.

> Proses penculikan, terjadi di rumah Boeng Karno Jalan Pegangsaan Timur 56, tengah malam, dipimpin oleh Soekarni berseragam Tentara Peta dengan pistol dan pisau panjang, serta pemuda lain dengan mengacungkan pedang terhunus ke arah Boeng Karno, memaksa agar Proklamasi malam itu juga,15 Agustus 1945. Boeng Karno menolaknya. Karena menemui jalan buntu, kemudian diamankan dengan menculiknya ke Rengasdengklok.
>
> Boeng Karno, Fatmawati dan Goentoer yang masih bayi, bersama Boeng Hatta, diangkut dengan naik truck terbuka ke Rengasdengklok, bersama 20 Tentara Peta karena di Jakarta di bawah pimpinan Wikana dan Chaeroel Saleh akan terjadi pemberontakan besar melawan Balatentara Djepang. Ternyata, di Rengasdengklok tidak pernah terjadi pembicaraan apa pun. Keduanya, Boeng Karno dan Boeng Hatta tidak pernah diajak bicara. Pemberontakan besar di Jakarta pun tidak pernah terjadi.
>
> Pada keesokan harinya, datanglah Mr. Achmad Soebardjo menjemput Boeng Karno, Iboe Fatmawati, Goentoer, Boeng Hatta di Rengasdengklok, untuk kembali ke Jakarta. Menurut penuturan Boeng Hatta, dalam perjalanan Soekarni menampakkan rasa ketakutannya yang luar biasa. Petani kurus kaum marhaen

4 Dr. R. Soeharto, 1982. *Op.Cit.*, hlm. 33.

yang sedang membakar sampah jerami, asap pembakaran jerami yang terlihat dari jauh, dikatakan revolusi rakyat sudah mulai meletus.

Demikian pula pada saat pembacaan Proklamasi, menurut Boeng Hatta, Soekarni pinjam baju karena tidak berani mengenakan seragam Tentara Pembela Tanah Air-Peta. Sebelumnya di rumah Maeda, malam menjelang 17 Agustus 1945, ketika diberikan kesempatan untuk ikut serta menandatangani Teks Proklamasi menolaknya.

Peristiwa Penculikan dan Proklamasi, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, timbul lima versi penulisan. **Versi pertama**, Oemar Bahsan, 1955. *Tjatatan Ringkas tentang: Peta ("Pembela Tanah Air") dan Peristiwa Rengasdengklok*. Diterbitkan oleh NV Melati Bandung. Berisikan kesibukan pembagian tugas antar Tentara Pembela Tanah Air - Peta di Rengasdengklok. Penjagaan atas Boeng Karno, Boeng Hatta dan Iboe Fatmawati, serta Goentoer diserahkan kepada *Syodancho* Affan. Pertentangan pandangan antar Oemar Bahsan dengan dr. Tjipto. Kedatangan Boeng Karno dan Boeng Hatta disambut teriakan prajurit dengan: Hidup Boeng Karno dan Boeng Hatta. Indonesia sudah Merdeka dan Djepang sudah mati.

Kedua pemimpin diculik bersama *I*boe Fatmawati serta Goentoer, ditempat di rumah *I Song*. Di buku ini, tidak terdapat keterangan adanya perundingan tentang rencana Proklamasi antar Boeng Karno dan Boeng Hatta dengan Soekarni, Oemar Bahsan dan Dr. Tjipto. Hanya dijelaskan bahwa rencana pemberontakan besar terhadap Jepang di Jakarta akan dimulai dari Rengasdengklok.

Sementara isinya yang lain dikonter oleh Kasman Singodimedjo, 1982, dalam *Hidup Itu Berjuang 75 Kasman Singodimedjo*. Menolak tuduhan Oemar Bahsan bahwa Kasman Singodimedjo sebagai *Dandancho* bersikap sehidup semati dengan Jepang, walaupun sudah mendengar Jepang menyerah kepada Sekoetoe.

Padahal di Bandung, di hadapan 20 Daidancho, Mr. Kasman Singodimedjo mengajak untuk tidak menyerahkan senjata kepada Balatentara Djepang. Bagi yang akan menghalangi akan ditembak oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Dalam perjalanannya dari Bandung ke Jakarta, singgah ke Purwakarta, menginstruksikan agar tidak menyerahkan senjata kepada Balatentara Djepang.

Versi kedua, Cindy Adams, 1965. *Sukarno, An Autobiogra phy As Told To Cindy Adams*, diterbitkan oleh The Bobbs Merrill Co. Inc. Diterjemahkan dalam Bahasa Jepang, Cina, dan negara-negara Asia Afrika. Dalam bahasa Indonesia ditebitkan oleh P.T. Gunung Agung, 1966, menjadi *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat*.

Dalam masalah Penculikan, Boeng Karno melontarkan kritik kerasnya kepada Soetan Sjahrir yang tidak mau terus terang dalam berjuang untuk Repoeblik

Indonesia. Sekaligus mengingatkan sikap Soekarni yang diperintah oleh Wikana, tidak memahami masalah Proklamasi dengan Indonesia yang terancam Jepang dan Sekutu. Juga menuturkan di Rengasdengklok, tidak terjadi pembicaraan tentang Proklamasi, ditempatkan rumah yang ada babinya. Boeng Karno tidak mau didikte pemuda agar Proklamasi pada tengah malam.

> Boeng Karno menuturkan bahwa sejak dari Saigon, sudah merencanakan Proklamasi pada 17 Agustus 1945 karena diyakini angka 17 merupakan angka keramat. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadhan. Shalat seharinya terdiri 17 Rakaat, dan dipilihnya hari yang mulia, Jumat Legi.

PROKLAMASI.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen

Atas nama bangsa Indonesia.
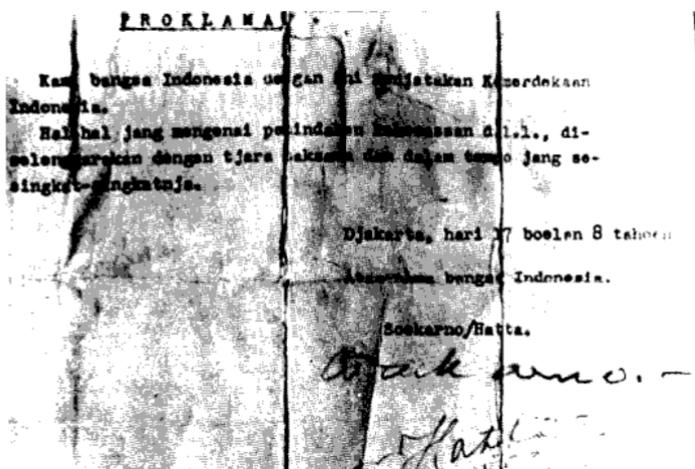
Soekarno/Hatta.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

TEKS PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 YANG OTENTIK

Ditandai dengan hasil pengetikan Sajoeti Melik
dan Atas Nama bangsa Indonesia, tidak terdapat coretan,
serta ditanda tangani oleh Proklamator Soekarno Hatta,
Djakarta, hari 17, boelan 8, tahoen 05.

Adapun teks proklamasi yang ditulis tangan Boeng Karno di atas sebuah kertas,
terdapat coretan, dan disebutkan Wakil2 bangsa Indonesia,
serta tidak terdapat tanda tangan kedua Proklamator
oleh Nugroho Notosusanto dinilai bukan Teks Proklamator yang otentik
Djakarta, 17-8-'05.

Versi ketiga, Adam Malik, 1970, *Riwayat Proklamasi Agustus 1945*, diterbitkan Widjaya, Djakarta. Berisikan koreksi penuturan Boeng Karno kepada Cindy Adams. Walaupun Adam Malik tidak ikut pada proses penculikan Ke Rengasdengklok, tetapi dikisahkan sikap heroiknya Soekarni. Berjuang agar Proklamasi bukan hadiah dari Jepang.

Selain itu, Adam Malik dari Partai Murba, menuturkan bahwa Proklamasi Agustus 1945, merupakan kerja keras kaum Murba di bawah pimpinan Tan Malaka yang dikenal sebagai komunis nasional. Oleh karena itu, judul bukunya, Proklamasi tidak disebut dengan17 Agustus 1945. Melainkan hanya *Proklamasi Agustus 1945*.

Versi keempat, Mohammad Hatta, 1970. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Penerbit Tintamas, Djakarta. Menuturkan Boeng Karno menolak paksaan Wikana agar malam itu segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan menyerahkan lehernya, sambil menyatakan, "Ini leher saja, seretlah saja kepodjok itu, dan sudahilah njawa saja malam ini djuga, djangan menunggu sampai besok."

Boeng Hatta juga menuturkan tentang sikap ketakutan Soekarni yang berlebihan dalam perjalanan ke Jakarta setelah datangnya Mr. Achmad Soebardjo. Karena itu, penculikan Boeng Karno, Boeng Hatta, Fatmawati, dan Goentoer oleh Boeng Hatta disebutnya sebagai "Fantasi Revolusi dan Rengasdengklok" dari kalangan pemuda yang dipimpin oleh Wikana.

Selain itu, Boeng Hatta juga menyatakan penculikan ke Rengasdengklok sebagai kebangkrutan politik yang dilaksanakan tanpa perhitungan dan berdasarkan sentimen belaka. Terutama sekali isi tulisan Boeng Hatta, koreksi besar terhadap tulisan Adam Malik yang tidak ikut dalam peristiwa penculikan ke Rengasdenglok.

Versi kelima, Mohamad Roem, 1970. *Pentjulikan, Proklamasi, dan Penilaian Sedjarah*. Penerbit "Hudaya " Djakarta dan "Ramadhani" Semarang, merupakan rangkuman tulisan Cindy Adams, Mohammad Hatta, dan Mr. Kasman Singodimedjo serta Mr. Achmad Soebardjo memberikan koreksi terhadap tulisan George Mc Turnan Kahin tidak membenarkan tentang pengaruh Jepang komunis terhadap pemuda Indonesia.

Selain itu, Mohamad Roem mengangkat Dokumen No. 11172I CRVO yang memuat perbedaan pendapat mengenai perizinan untuk membacakan Proklamasi 17 Agustus 1945, antara Laksamana Maeda dan Jenderal Nishimura.

Peristiwa Rengasdengklok ternyata tanpa memerlukan *desire test* - tes kemauan, telah muncul sendiri dipermukaan kemauan kelompok kiri dari Tentara Pembela Tanah Air - Peta dari kelompok Soekarni yang terpengaruh Wikana dan Soetan Sjahrir. Mereka menjadi pengimbang kekuatan Ulama sebagai *Daidancho* Tentara Peta.

Sekaligus terbaca pula kekuatan pemuda aliran komunis nasional - Wikana dan sosialis - Soetan Sjahrir yang merencanakan pemberontakan dengan menggunakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta dan Heiho, tetapi tanpa perhitungan hanya bersadarkan sentimen belaka yang berseberangan dengan dasar perencanaan para Proklamator. Perbedaan cara dan kepentingan itu, pada saat itu hanya melahirkan ketegangan urat syaraf dan berdampak penundaan penyusunan teks Proklamasi.

Problema penculikan berakhir karena kehadiran Mr. Achmad Soebardjo dari Kaigun - Angkatan Laut dan sebagai penasehat dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menjemput Boeng Karno, Boeng Hatta, Iboe Fatmawati, serta Goentoer, kembali ke Jakarta.

Perundingan Teks Proklamasi 17 Agustus 1945

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, kendatipun mendapat halangan Jenderal Nishimura dari Angkatan Darat Jepang, tetapi malam menjelang 17 Agustus 1945 mendapat bantuan dari Laksamana Maeda dari Angkatan Laut Jepang. Sebenarnya, Laksamana Maeda pada masa berkuasanya tidak ikut menyebarkan Djandji Kemerdekaan Di Kelak Kemoedian Hari dari Perdana Menteri Koiso, 7 September 1944, Kamis Pahing, 18 Ramadhan 1363, karena wilayah kekuasaan Kaigun di luar Jawa dan Sumatra.

> Walaupun demikian, pada malam 17 Agustus 1945, justru Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya untuk dijadikan arena perundingan tentang bunyi teks Proklamasi yang akan dibacakan hari esok. Namun, para pembesar Balatentara Jepang tidak ikut serta.

Menurut Mr. Achmad Soebardjo, pukul 03.00 pagi waktu Sahur Ramadhan[5] teks Proklamasi didiktekan oleh Boeng Hatta, dan ditulis dengan tangan Boeng Karno, kalimat pertama diambil dari Preambule atau Piagam Djakarta 22 Juni 1945:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia . Semula Boeng Karno merasa cukup dengan teks tersebut. Atas usul Boeng Hatta ditambahkan dengan kalimat kedua: Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

5 Boeng Hatta makan sahur di rumah Laksamana Maeda, karena tidak ada nasi maka makan roti, telur, dan ikan sardines. Periksa Mr. Achmad Soebardjo Djojohadisoerjo. 1972. *Lahirnya Republik Indonesia: Suatu Tinjauan dan Kisah Pengalaman*. Kinta. Djakarta, dan Mohammad Hatta. 1982. *Mohammad Hatta Memoir*. Tintamas Jakarta.

Setelah selesai, Teks Proklamasi ditawarkan kepada hadirin apakah setuju atau tidaknya. Ternyata secara serentak menyatakan setuju. Oleh karena itu, ditawarkan pula agar seluruhnya yang hadir ikut serta menanda tanganinya, seperti Proklamasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Juga penandatanganan teks Proklamasi ditawarkan kepada enam pemuda.

Namun atas usul Sajoeti Melik, agar Teks Proklamasi hanya ditanda tangani oleh Boeng Karno dan Boeng Hatta. Usul ini diterima secara aklamasi. Kemudian, Teks Proklamasi yang akan dibacakan, diketik terlebih dahulu oleh Sajoeti Melik dan selanjutnya ditanda tangani oleh kedua Proklamator.[6]

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Proklamasi 17 Agustus 1945, dilupakan oleh sebagian umat Islam, terjadi pada 9 Ramadhan 1334 H, Jumat Legi. Jatuh pada Puluhan Pertama Ramadhan sebagai Puluhan Rahmat Allah Yang Mahakuasa. Setiap 9 Ramadhan, umat Islam tidak mengadakan Syukuran Kemerdekaan Indonesia. Umumnya, menyambutnya tanpa dihubungkan dengan pengertian Ramadhan sebagai puncak keberhasilan perjuangan Ulama dan Santri membebaskan bangsa, negara, dan agama dari penjajahan Barat dan Timur.

6 Teks Proklamasi yang dinilai sebagai fakta sejarah yang otentik adalah yang diketik oleh Sajoeti Melik dan telah ditandatangani oleh kedua Proklamator Soekano-Hatta, dengan atas nama bangsa Indonesia.

Setelah selesai pada jam 5 pagi, para peserta saksi penulisan Teks Proklamasi meninggalkan rumah Laksamana Maeda. Pada paginya, sekitar jam 7 sudah terkumpul rakyat yang bersenjata bambu runcing dan senjata tajam lainnya, menunggu dibacakannya Teks Proklamasi, di depan rumah kediaman Boeng Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Garnisun Tentara Pembela Tanah Air - Peta, sejumlah tujuh puluh prajurit, dan lima perwira, siap menghadapi segala kemungkinan, kalau Balatentara Djepang mencoba menggagalkannya. Oleh karena itu, ditutuplah jalan yang menuju Pegangsaan Timur 56.

Peran Tentara Pembela Tanah Air - Peta mengamankan proses pembacaan Proklamasi pada 17 Agusatus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364 dan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia - PPKI, 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364, dalam penulisan Sejarah Indonesia sering tidak dituliskan seperti yang dituturkan oleh Proklamator dalamBung Karno Penjambung Lidah Rakjat.

Pembacaan dan Penyiaran Teks Proklamasi

Boeng Karno menjelang pembacaan Teks Proklamasi kondisi kesehatan fisiknya terganggu. Baring di kamarnya, ditunggui oleh Iboe Fatmawati dan Dr. R. Soeharto. Pagi itu, Boeng Hatta belum juga datang. Boeng Karno didesak oleh para pemuda, untuk segera membacakannya. Namun, Boeng Karno menolaknya karena sangat kenal dengan sikap Boeng Hatta selalu tepat waktu. Ternyata benar, Boeng Hatta hadir pukul 10 kurang 5 menit.

Tepat pukul 10.00 pagi, 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, dibacakanlah Teks Proklamasi oleh Boeng Karno[7], dihadapan para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan rakyat, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan upacara yang sangat sederhana, tanpa ada protokoler.

Bendera Merah Putih hasil penyambungannya dengan mesin jahit tangan oleh Iboe Fatmawati, dan dikibarkan di tiang bambu oleh Chudancho Latief Hendraningrat

7 Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945 Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, Ir. Soekarno lebih senang di panggil dengan Boeng Karno. Arti Boeng adalah Sahabat atau Saudara. Seperti halnya Rasulullah saw memanggil kawan dekatnya dengan Sahabat. Naamun, pascaproklamasi dan diangkat sebagai Presiden RI, secara resmi panggilannya menjadi Padoeka Jang Moelia Presiden RI Soekarno. Demikian pula Boeng Hatta menjadi Padoeka Yang Moelia Wakil Presiden Mohammad Hatta. Kelanjutannya oleh MPRS selain diberikan kewenangan sebagai Presiden Seumur Hidup, juga disebut sebagai Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi Republik Indonesia Soekarno.

yang berseragam Tentara Pembela Tanah Air - Peta.[8] Kemudian, diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Adapun bunyi Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang singkat singkatnya.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno/Hatta

Setelah selesai dibacakan, Boeng Karno menjelaskan ada seorang mahasiswa menggunakan roneo milik Jepang, memperbanyak Teks Proklamasi. Kemudian disebarkan ke seluruh penjuru kota Jakarta. Terutama ditempelkan pada media transportasi umum kereta api, trem, dan kendaraan lainnya disebarkanlah berita Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada teks Proklamasi di atas masih menggunakan Tahun Jepang, 2605 atau 05.

Pemancar Radio Malabar dan Bandoeng *Hoso Kyoku*

Setibanya di Bandung, berita ini disiarkan melalui Pemancar Radio Malabar, pemancar yang berkauatan tinggi dan mampu tersiar keluar negeri oleh Sakti Alamsjah, Sam Amir, Darja, hingga dapat didengar di luar negeri. Mahasiswa Indonesia di Baghdad yang pertama mendengar adalah Imron Rosjadi SH. Dari sini, kemudian berita Proklamasi dikembangkan ke mahasiswa di Mesir.

Akibatnya, Mohammad Abdul Mounim, Konsul Jenderal Mesir di Bombay, yang bertindak atas nama Raja Farouk dari Mesir, menyampaikan keputusan Dewan Gabungan Negara-negara Arab berisikan anjuran pada negara-negara anggota gabungan Liga Arab untuk mengakui Repoeblik Indonesia. Mesir sebagai

8 *Chudancho* Latief Hendraningrat berani tetap mengenakan busana seragam Tentara Pembela Tanah Air - Peta. Berbeda dengan Soekarni, sangat ketakutan tidak berani mengenakan seragamnya, dan pinjam baju dan celana Boeng Hatta. Demikian penuturan Mohammad Hatta dalam *Sekitar Proklamasi*.

negara pertama yang mengakui kemerdekaan Repoeblik Indonesia. Keputusan ini disampaikan kepada Presiden Soekarno di Jogyakarta pada 14 Maret 1947. Kemudian diikuti oleh Lebanon, Juni 1947, Suriah dan Irak, Juli 1947, Afghanistan, September 1947, dan menyusul Saudi Arabia, November 1947[9]

Ternyata, Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, diakui pertama kalinya oleh negara-negara Islam Timur Tengah. Sebaliknya, sampai 1947, tidak ada satu pun negara-negara penjajah Eropa Barat atau dari negara komunis Eropa Timur yang bersedia mengakuinya. Apalagi Keradjaan Protestan Belanda baru mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah HUT Ke-60 Republik Indonesia.

Proses penyiaran Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui Pemancar Radio Malabar diikuti dengan Bandung Hoso Kyoku, tidak semudah yang dibayangkan oleh generasi sekarang. Selama Perang Asia Timur Raya dan pendudukan Balatentara Djepang, radio milik rakyat, gelombang luar negerinya disegel, dilarang menyetel penyiaran dari radio Sekoetoe.

Prestasi penyiaran dan pengulangan penyiaran yang dilakukan oleh Sakti Alamsjah, Sam Amir, dan Darja yang menjadikan dunia mengetahui Indonesia Merdeka, merupakan tindak kejuangan heroik yang berisiko tinggi, hidup atau mati. Berkat keberhasilan kejuangannya, Sekoetoe pun menjadi tahu Hindia Belanda bukan lagi menjadi daerah jajahan Keradjaan Protestan Belanda. Telah berubah menjadi Repoeblik Indonesia.

Sang Merah Putih Berkibar di Gedung Bank Jabar

Selain itu, di Bandung terjadi pula gerakan penyebaran berita Proklamasi diluar Radio Bandung Hoso Kyoku dan Pemancar Radio Malabar oleh Bary Loekman, 1922-2007 M, dengan berani menuliskan Teks Proklamasi dengan kapur tulis di papan tulis, di depan Vorking berhadapan dengan Gedung PLN Jalan Asia Afrika.

Bary Loekman berani pula mengibarkan Sang Merah Putih milik K.H. Isa Anshary di Gedung Dennis, sekarang Bank Jabar. Walaupun tulisan Teks Proklamasi di papan tulis tersebut dihancurkan oleh Balatentara Djepang. Namun, tindakan Balatentara Djepang itu tidak dapat menghentikan tersebarnya berita Proklamasi di tengah rakyat. Tampak di mana-mana rakyat dan para pemuda sangat gembira dan siap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

9 Periksa, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945- 1949*, hlm. 136

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Pada gambar di atas tampak utusan Mesir itu sedang disambut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Negara Mesir kemudian menjadi Republik dan sekarang bernama Republik Arab Mesir.

Menyusul Sang Merah Putih dikibarkan di Stasiun Kerta Api Bandung. Diikuti gerbong kereta api yang berangkat dari Bandung ke segenap penjuru stasiun di P. Jawa, dipenuhkan coretan aspirasi kemerdekaan: *Merdeka atau Mati, To be or not to be. Sekali Merdeka Tetap Merdeka.*

Bandung sebagai Pusat PTT mengeluarkan Kartu Pos dengan lambang Bendera Merah Putih di bawahnya ditulis: *Kami cinta damai. Tetapi kami lebih cinta kemerdekaan.*

Kemudian, di rumah rakyat dikibarkan pula Sang Merah Putih. Di kantor-kantor, dan sekolah, serta murid-murid sekolah mengenakan lencana Merah Putih setiap ke sekolah. Betapa besarnya jasa media elektronik radio dalam menyebarkan Proklamasi dapat menjangkau jauh hingga ke luar negeri. Demikian pula peran media transportasi kereta api dan lainnya, dalam mobilitas gerakan para pemuda dalam mengobarkan semangat Proklamasi.

KI BAGOES HADIKOESOEMO

Ketua Pengurus Besar Persjarikatan Moehammadijah, 1942-1953; Ketua Majelis Tabligh, 1922; Ketua Majelis Tarjih, 1926; Anggota Chuo Sang In, 1943

Ki Bagoes Hadi Koesoemo diterima oleh Tenno Heika di Tokio bersama Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta, 16 November 1943. Kemudian, Ir. Soekarno mendapat Bintang Kun Nito Zuiho - Sho Ratna Suci Kelas Dua. Sedangkan Ki Bagoes Hadi Koesoemo dan Drs. Mohammad Hatta memperoleh Bintang Kun Santo Zuiho - Sho Ratna Suci Kelas Tiga Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia – PPKI.

Perumus pertama sesudah Proklamasi, ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364 bersama Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Teuku Mohammad Hasan, Drs. Mohammad Hatta.

Sumber: Doc. Pribadi

Peran Jakarta sebagai ibu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Bandung sebagai Pusat PTT dan Kereta Api, sangat besar jasanya dalam mengembangkan berita Proklamasi ke seluruh Nusantara dan luar negeri. Jawa Barat dalam awal sejarah Proklamasi menjadi inti provinsi penegak kedaulatan Republik Indonesia.

Berikutnya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia mengakhiri imperialisme di atas dunia, seperti yang tertera dalam Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 maka Bandung menjadi arena lahirnya Dasa Sila Bandung dalam Konferensi Asia Afrika, 24 April 1955. Sekaligus Bandung sebagai kota yang dijadikan arena terakhir Konferensi Islam Afrika Asia, 15 Maret 1965. Di sini, Presiden Soekarno diangkat menjadi *the Champion of Freedom and Islam* - Pendekar Kemerdekaan dan Islam.

> Penulis sampai hari ini, belum menemukan alasan mengapa pada saat Konferensi Islam Asia Afrika diubah menjadi Konferensi Islam Afrika Asia. Apakah hal ini sebagai persiapan akan diselenggarakannya Ulang Tahun Ke-10 Konferensi Asia Afrika di Aljazair, 1955-1965 M, agar mendapatkan dukungan posistif dari umat Islam Afrika maka Konferensi Islam diubah menjadi Afrika Asia.

Makna Proklamasi bagi Umat Islam

Perjuangan membebaskan Indonesia dari penjajah Barat: Keradjaan Katolik Portugis dan Keradjaan Protestan Belanda serta penjajah Timur Kekaisaran Shinto Djepang, akhirnya sampai pada puncak keberhasilannya. Proklamasi terjadi pada 17 Agustus 1945, Jumat Legi, tepat pada 9 Ramadhan 1364, pukul 10.00 pagi.

> Dalam keyakinan umat Islam, peristiwa sejarah Proklamasi yang terjadi pada 9 Ramadhan 1364 di hari Jumat Legi, merupakan anugerah yang tiada hingga dari Allah Yang Maha Kuasa yang menjadikan berakhirnya penjajahan Barat dan Timur atas bangsa dan negara Indonesia.

Peristiwa ini merupakan salah satu wujud dari firman Allah: *li yudhiru 'alad dini kullihi* - Allah memenangkan Islam di atas agama-agama penjajah semuanya. *Wa kafa billahi syahidan* - Cukup Allah sebagai saksinya (QS 48: 28). Namun, tidaklah berarti dengan keberhasilan Proklamasi, hilanglah segenap lawan Ulama. Melainkan justru Ulama dihadapkan tantangan baru yang semakin berat karena sudah menjadi kodrat sejarah Ulama, setiap langkah amal juangnya, sampai kapan pun dan di manapun dipastikan akan bertemu dengan tantangan baru.

K.H. ABDOEL WAHID HASJIM

1332 - 1373 H / 1914 - 1953 M

Sumber: www.wikipedia.com

K.H. ABDOEL WAHID HASJIM

Santri Alumni Pesantren
Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pesantren Siwalan, Panji Sidoarjo
Pesantren Lirbojo Kediri
Makkah Mukaramah

Ketua Madjlis Islam A'la Indonesia - MIAI
Ketua Jawatan Agama Pusat - Sumubucho 1362-1364 H/1942-1945 M
Ketua Masjoemi, 1362-1364 H/1943-1945 M
Anggota *Dokuritzu Tjoosakai Zumby* - BPUKI, 1364 H/1945 M

Saksi sejarah pembacaan Proklamasi 17 Agustus 1945,
Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, di Pegangsaan Timur Jakarta

Perumus pertama Pantjasila dan UUD 1945
sehari sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, dalam pertemuan
10 Ramadhan 1364, Sabtu Pahing, 18 Agustus 1945
bersama Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. Kasman Singodimedjo,
Mr.T. Mohammad Hasan, Drs. Mohammad Hatta
Untuk diserahkan dan disahkan oleh PPKI
pada hari dan tanggal yang sama.

Pimpinan Lasjkar Hizboellah bersama Panglima K.H. Zainul Arifin
Penasihat Panglima Besar Djendral Soedirman

Menteri Agama pertama, usia 31 Tahun, sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945
Penggagas pertama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di bawah Depag
setelah Sekolah Tinggi Islam - STI dan Universitas Islam Indonesia - UII Swasta.

Pendiri pertama Partai Nahdlatul Ulama, 1372 H/1952 M
di Muktamar Nahdlatul Ulama Palembang

> Sayangnya, peristiwa Proklamasi yang demikian akbar maknanya, sebagai puncak kemenangan perjuangan Ulama dan Santri, sikap umat Islam pada setiap 9 Ramadhan, tidak menjadikannya sebagai tanggal dan bulan syukuran kemerdekaan, terbebasnya bangsa dan negara Indonesia dari penjajahan Barat dan Timur.
>
> Barangkali hal ini terjadi, diakibatkan adanya kebijakan Deislamisasi Kalender, maka Proklamasi merasa cukup hanya diperingati pada setiap tanggal 17 bulan Agustus dan tahun Masehi saja.[10]

Padahal, Proklamasi benar-benar terjadi pada Puluhan Pertama Ramadhan sebagai Puluhan Rahmat Allah dan terjadi pada ra janya hari, Hari Jumat. Dalam Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945, dirumuskan kemerdekaan Indonesia sebagai berkat rachmat Allah Jang Maha Koeasa. Apalagi menurut Presiden Soekarno kepada Cindy Adams, menuturkan gagasan pemilihan tanggal 17 karena angka 17 sebagai sebagai tanggal keramat. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadhan dan Boeng Karno shalat setiap harinya 17 Rakaat.

Kemudian sebagai fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri, Teks Proklamasi dituliskan oleh Proklamator dan diketik oleh Sajoeti Melik, serta ditandatangani kedua Proklamator pada waktu makan sahur shaum Ramadhan 1364. Boeng Hatta menuturkan makan sahur di rumah Laksamana Maeda. Kemudian Teks Proklamasi dibacakan pada saat Proklamator menjalankan ibadah shaum.

> Kalau demikian kenyataan sejarahnya, apakah salah ataukah bid'ah jika umat Islam pada setiap 9 bulan Ramadhan, sebagai mayoritas bangsa Indonesia, menjadikan tanggal 9 Ramadhan sebagai tanggal syukuran umat Islam menerima anugerah nikmat kemerdekaan Republik Indonesia dari Allah Yang Maha Kuasa, selain diperingati setiap 17 Agustus?

---

10 Perhatikan setiap Congres Persjarikatan Moehammadijah sebagai organisasi pembaharu Islam di masa penjajahan Belanda, salah satu ciri pembaharuan Islamnya tidak menggunakan tanggal, bulan Komariyah dan tahun Hijrah Nabi. Dibiasakan pada poster, plakat, spandoek, menggunakan tanggal, bulan, tahun Masehi. Perhatikan pula Kalender Muhammadijah 2007, tanggal bulan Komariyah dan Tahun Hijrah dicetak sangat kecil. Sebaliknya tanggal, bulan, dan tahun Masehi dicetak jauh lebih besar kelipatan sekian ratus kali daripada tanggal, bulan Komariyah dan Tahun Hijrah.

Perumusan Dasar Negara dan Oendang-Oendang Dasar 1945

Paginya, 18 Agustus 1945, atau Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364, diadakan pertemuan awal untuk merumuskan dasar ideologi bangsa dan negara, Pantjasila, serta konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945:

Wachid Hasjim	-	Nahdlatoel Oelama
Ki Bagoes Hadikoesoemo	-	Persjarikatan Moehammadijah
Kasman Singodimedjo	-	Persjarikatan Moehamamdijah
Mohammad Hatta	-	Sumatra Barat
Teoekoe Mohammad Hasan	-	Aceh [11]

Nama perwakilan di atas menurut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak atas nama organisasi, melainkan pertemuan tiga wakil Umat Islam dari P. Jawa dan dua wakil dari Sumatra.

> Pada pertemuan ini, dibicarakan tentang perubahan sila pertama Pantjasila dalam Piagam Djakarta, 22 Juni 1945, Jumat Kliwon, 11 Rajab 1364, yakni Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek2-nja.

Perubahan ini semula ditolak baik oleh Wachid Hasjim maupun oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo. Seperti penolakan yang dilakukan oleh Boeng Karno dalam Rapat Pleno *Dokuritsu Zyunbi Tyoo Sakai* pada 14 Juli 1945, sesudah penanda tangan Piagam Djakarta, ketika K.H. Achmad Sanoesi dan Ki Bagoes Hadikoesoemo, yang tidak menjadi Panitia Sembilan mengusulkan agar kata-kata bagi pemeloek2-nja dihapuskan dan menjadi Ketoehanan dengan kewadjiban mendjalankan Sjariat Islam.

Usul ini ditolak oleh Boeng Karno dengan alasan karena sudah disetujui oleh seluruh Panitia Sembilan. Namun, mengapa sekarang, artinya pada 18 Agustus 1945, Boeng Hatta berubah malah mengusulkan untuk penghapusan tujuh kata pada Piagam Djakarta yang telah disetujui Panitia Sembilan.

Diharapkan dengan diadakannya pertemuan khusus kelima wakil di atas akan mudah menjadikan Ki Bagoes Hadikoesoemo menyetujuinya. Ternyata, walaupun telah dilakukan pendekatan oleh K.H. Wachid Hasjim, tetapi menemui jalan buntu dan tetap ditolaknya. Artinya, Ki Bagoes Hadikoesoemo tidak bersedia adanya perubahan: Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek2-nja.

11 Mohammad Hatta, 1982. *Op.Cit.*, hlm. 459.

Mr. KASMAN SINGODIMEDJO

Komandan Batalyon - **Daidancho** Tentara Pembela Tanah Air (Peta) Jakarta.
Penerima Daidanki - Panji-Panji Tentara Pembela Tanah Air di Jakarta.
Perumus ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364, bersama K.H.Wahid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. Teuku Mohammad Hasan, Drs Mohammad Hatta sebelum disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah.

Sumber: Doc. Pribadi

Kemudian disusul dengan pendekatan berikutnya oleh Mr. Kasman Singodimedjo kepada Ki Bagoes Hadikoesoemo dengan bahasa Jawa halus. Antara lain dikemukakan oleh Mr. Kasman Singodimedjo, di sini penulis sampaikan dalam bahasa Indonesia:

> Kyai, kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara dan masih banyak yang harus ditetapkan siapa Presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana?

Dingatkan pula bahwa Indonesia sedang terjepit dua kekuatan penjajah yang memiliki persenjataan modern: Balatentara Djepang dan Sekoetoe. Di bawah kondisi darurat, kita sekarang perlu segera merumuskan Dasar Negara dan Oendang-Oendang Dasar. Enam bulan nantinya akan dibuat Oendang-Oendang Dasar yang sempurna.

> Kemudian, disarankan kepada Ki Bagoes Hadikoesoemo bahwa kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini sementara mengalah, yakni menghapus tujuh kata termaksud, demi Kemenangan cita-cita kita bersama, yakni tercapainya Indonesia Merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil makmur, tenang tenteram diridhai Allah.

Pendekatan Mr. Kasman Singodimedjo ini ternyata berhasil menjadikan Ki Bagoes Hadikoesoemo menyetujuinya penghapusan tujuh kata. Dengan syarat, Ketuhanan ditambahkan dengan Yang Maha Esa. Usul ini diterima oleh keempat Ulama dan pemimpin Islam.[12] Kemudian, dilaporkan kepada Drs. Mohammad Hatta.

Dari peristiwa persetujuan inilah menjadikan lahirnya perumusan yang pertama Dasar Negara Pantjasila dan Oendang-Oendang Dasar 1945 sehari sesudah Proklamasi, yakni pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1945.

> Hasil dari perumusan para Ulama ini kemudian diserahkan kepada, dan untuk disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada hari dan tanggal yang sama. Drs. Mohammad Hatta menilai kesediaan empat pemimpin Islam menyetujui dihilangkannya kalimat yang penting tujuh kata dari Piagam Djakarta, sebagai pertanda para Ulama benar-benar lebih mementingkan nasib dan persatuan bangsa seluruhnya.

12 Kasman Singodimedjo, 1982. *Op.Cit.*, hlm. 129.

Sekaligus sejarah mencatat, Drs Mohammad Hatta sejak dalam BPUPKI tidak menyetujui Indonesia Merdeka sebagai negara Islam. Drs Mohammad Hatta berhasil menjadikan keempat pimpinan nasional diatas, menyetujui dihapuskannya tujuh kata-kata dari Sila Pertama Pantjasila dalam Piagam Djakarta. Hal ini dijalankan, walaupun Drs Mohammad Hatta saat itu sedang menjalankan shaum Ramadhan, tetapi karena sedang tertekan oleh Fasisme Jepang dan ancaman Tentara Sekoetoe maka dibuatlah kondisi politik yang melahirkan ideologi Pantjasila dan konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945, yang diciptakan secara bersama dengan Ulama.

Dengan disahkannya Pemboekaan dan Oendang-Oendang Dasar 1945 maka bangsa Indonesia menjadi satu-satunya bangsa yang berani melawan keputusan Paus Alexander VI, Perjanjian Tordesilas 1494, yang membagi dunia menjadi dua wilayah jajahan. Dunia belahan timur sebagai wilajah jajahan Keradjaan Katolik Portoegis dan belahan Barat sebagai wilayah jajahan Keradjaan Katolik Spanjol.

Demikian pula berani melawan imperialisme modern yang ditegakkan oleh Keradjaan Protestan Anglikan Inggris dan Keradjaan Protestan Belanda atau penjajah Barat lainnya, sejak 1870 M. Sekaligus juga berani melawan segenap upaya perluasan penjajahan Kekaisaran Shinto Dai Nippon yang akan menjadikan Asia Timoer Raja sebagai wilayah jajahannya.

Bangsa Indonesia dalam Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945, merumuskan bahwa kemerdekaan hak segala bangsa. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Digariskannya pula tekad bangsa Indonesia bahwa "kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itoe, maka penjajahan di atas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemanoesiaan dan peri-keadilan." Perumusan yang berani, benar-benar sangat menantang. Berangkat dari sinilah, menjadikan lahirnya gagasan Konferensi Asia Afrika di Bandung 24 April 1955 yang melahirkan Dasa Sila Bandung.

Selain itu, tidak ada bangsa di Asia Tenggara atau Asia Afrika pada umumnya, menyatakan proklamasi kemerdekaannya dengan bahasa nasional seperti bangsa Indonesia dengan Bahasa Indonesia. Umumnya, mereka menggunakan bahasa penjajahnya. Tidak demikian halnya dengan bangsa Indonesia telah memiliki Bahasa Indonesia.

Mr. TEUKU MOHAMMAD HASAN

Perumus pertama ideologi Pancasila dan konsitusi UUD 1945, sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364 bersama Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. Kasman Singodimedjo pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364, untuk diserahkan hasil rumusannya diserahkan kepada Drs.Mohammad Hattta dan untuk disahkan oleh PPKI pada hari dan tanggal yang sama.

Menteri Pendidikan dan Kebudajaan pada Kemeterian Pemeritah Darurat Republik Indonesia.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Secara historis, seperti yang penulis tuturkan pada bab sebelumnya, bahasa Indonesia semula sebagai bahasa para dai yang berprofesi sebagai wirausahawan di pasar. Digunakannya sebagai bahasa komunikasi niaganya dengan sebutan Bahasa Melayu Pasar yang dituliskan dengan Huruf Arab Melayu, di tengah keragaman Bahasa Daerah dan Bahasa Asing.

Perkembangan lanjutnya, Bahasa Melayu Pasar di Pesantren dijadikan Bahasa Ilmu. Dengan terbentuknya kekuasaan politik Islam atau kesultanan, meningkat fungsinya menjadi Bahasa Resmi Kesultanan dan Bahasa Diplomasi. Mengapa bahasa Melayu Pasar tumbuh berubah menjadi Bahasa persatuan, Bahasa Indonesia?

Menurut Bousquet, 1938 M, pemerintah kolonial Belanda tetap mempertahankan penjajahannya, dengan membodohkan dan menciptakan umat Islam memiliki jiwa inferiority complex - rasa rendah diri. Dengan cara mencegah umat Islam mampu berbahasa Belanda. Dikhawatirkan bila umat Islam mampu berbahasa Barat, akan tumbuh rasa superiority complex.

> Reaksi umat Islam terhadap kebijakan penjajah tersebut, menjadikan bahasa Indonesia sebagai senjata kejiwaan yang dahsyat - terrible psychological weapon dalam mengekspresikan aspirasi perjuangan nasional.

Perjuangan para Ulama, pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364, berhasil pula merumuskan dalam Oendang-Oendang Dasar 1945, Bab XV Pasal 35, Sang Merah Putih sebagai warna Bendera Rasulullah saw[13] dijadikan Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Demikian pula, Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Di samping itu, suatu prestasi perjuangan yang luar biasa dalam Bab XI, Pasal 29 walaupun judulnya Agama namun isinya butir satu masalah dasar negara: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.[14] Baik Wachid Hasjim ataupun Ki Bagoes Hadikoesoemo memaknai Ketuhanan Yang Maha Esa bila dikaitkan dengan judul Bab XI Pasal 29 adalah Agama, maka agama yang mengajarkan Ke-esaan Allah atau Tauhid adalah Islam.

Pada butir kedua, peran negara sebagai pelindung seluruh agama dan pelaksanaan ibadahnya yang dianut oleh tiap-tiap pendu duk. Dengan demikian, pada Bab XI Pasal 29 butir dua, para Ulama pendahulu merumuskan kepentingan politik Islam dengan Syariatnya, terumuskan dalam bahasa yang tersirat.

---

13 Imam Muslim, *Kitab Al Fitan*, Jilid X, hlm. 340

14 Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005. *Undang -Undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahuan 1945 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, hlm. 9.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Dr. Anwar Harjono SH, Piagam Djakarta kerap kali diindentikkan dengan ide Negara Islam. Padahal sepanjang sejarah, belum pernah ada satu partai Islam pun yang mencantumkan tujuannya untuk membentuk Negara Islam.

> Selanjutnya dijelaskan, apa yang disebut dengan Piagam Dja karta, sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah perumusan Pancasila yang pertama kali oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dalam sejarah persiapan pembentukan Republik Indonesia.

Pada waktu itu, perumusan tersebut diakui oleh Dr Soekiman Wirjosandjojo sebagai *Gentlemen Agreement* antara pemimpin-pemimpin nasionalis Islam dengan pemimpin nasionalis netral agama lainnya. Adapun dihapuskannya tujuh kata pada Piagam Djakarta, terjadi di luar konsensus Panitia Sembilan. Hanya sebagai pelaksanaan pesan dari Laksamana Maeda, jadi karena faktor luar.

> Sayangnya, proses sejarah itu, tidak dituliskan dalam Sejarah Indonesia secara terbuka. Bahkan, sebaliknya terjadi peniadaan peran Ulama dalam proses melahirkan Indonesia memiliki Dasar Negara Pantjasila dan Oendang-Oendang Dasar 1945.
>
> Dengan kata lain, sebagian penulis menyatakan Ulama tidak ada perannya sama sekali dalam perumusan Pantjasila sebagai dasar negara. Padahal, realitas sejarahnya mungkinkah tanpa persetujuan para Ulama, terjadi perumusan Pantjasila dalam Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 seperti yang dimiliki bangsa Indonesia hingga sekarang.

Dr. Anwar Harjono, SH. sebagai Ketua pertama Gerakan Pemoeda Islam Indonesia - GPII yang didirikan pada 2 Oktober 1945, menegaskan sepanjang menyangkut Pancasila sebagai dasar negara, sejak diproklamasikannya kemerdekaan tidak ada satu partai Islam pun yang ragu-ragu menyatakan penerimaannya.

> Selanjutnya ditandaskan, penerimaan itu tidak dilakukan sebagai taktik. Umat Islam menerima Pancasila adalah karena pertimbangan-pertimbangan yang asasi, yakni karena asas Islam dapat menerima Pancasila.[15] Mengapa?

15 Dr. Anwar Harjono SH. 1969. *"Membentuk Idjma (Konsensus) Nasional untuk Melaksanakan Pembangunan Indonesia dengan Djiwa Segar"*, naskah tidak diterbitkan, hlm. 7

Mohammad Natsir dalam Capita Selecta, Djilid 2, pada Ramadhan 1373/Mei 1954, menyatakan:

Dalam pangkuan Al-Quran, Pantjasila akan hidup subur.
Di mata seorang Muslim, perumusan Pantjasila bukan kelihatan apriori sebagai satu "barang asing" jang berlawanan dengan adjaran Al-Quran. Ia melihat dalamnya satu pentjerminan dari sebagai jang ada pada sisinja. Tapi ini tidak berarti bahwa Pantjasila itu sudah identik atau meliputi semua adjaran2 Islam. Pantjasila memang mengandung tudjuan2 Islam, tetapi Pantjasila itu bukanlah berarti Islam. Kita berkejakinan jang akan kundjung kering, bahwa diatas tanah dan iklim Islamlah, Pantjasila akan hidup subur. Sebab Iman ke pertjajaan kepada Tuhan Jang Maha Esa itu tidak dapat di tumbuhkan dengan se-mata2 hanja dengan kata2 dan istilah "Ketuhanan Jang Maha Esa" itu saja didalam perumusan Pantjasila itu.

Selanjutnya ditambahkan:

Berlainan soalnja, apabila sila Ketuhanan Jang Maha Esa itu hanja sekadar buah bibir, bagi orang2 jang djiwanja sebenarnja sceptis dan penuh ironi terhadap agama; bagi orang ini dalam ajunan langkahnja jang pertama ini sadja Pantjasila itu sudah lumpuh. Apabila sila pertama ini, jang hakikatnja urat-tunggal bagi sila2 berikutnja, sudah tumbang, maka seluruhnja akan hampa, dan amorph, tidak mempunyai bentuk jang tentu. Jang tinggal adalah kerangka Pantjasila jang mudah sekali dipergunakan untuk penutup tiap2 langkah perbuatan jang tanpa sila, tidak berkesusilaan sama sekali. [16]

Dapat kita ikuti lebih lanjut penjelasan Perdana Menteri Ir. H. Djuanda, juga sebagai pimpinan Persjarikatan Moehammadijah, dalam menjawab pertanyaan anggota DPR Ahad Sjaichu, sehubungan dengan Dekrit 5 Juli 1959 bahwa perkataan:

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD 1945, dapat diberikan arti Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi umat Islam, sehingga dengan dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan bagi para pemeluk agama Islam yang disesuaikan dengan Syariat Islam.

---

16 M. Natsir. 1957. *Capita Selecta*. Djilid 2. Dihimpunkan oleh D.P. Sati Alimin. Pustaka Pendis. Djakarta, hlm. 144- 150.

OTTO ISKANDARDINATA

Wajah Otto Iskandardinata pada 1943 dalam *Almanak Asia Timur Raja 2603*. Pimpinan Pagoeyoeban Pasoendan yang nasionalis, tidak eksklusif, pendukung gerakan menolak Ordonasi Perkawinan (1937) bikinan penjajah yang bertentangan dengan Islam. Merangkap sebagai pimpinan Surat Kabar *Sipatahoenan*. Berpartisipasi aktif dalam Majelis Rakyat Indonesia bersama MIAI dan GAPI yang menuntut Indonesia Berparlemen. Diangkat sebagai Ketua *Bunkakai* Pertama dalam *Chuo Sangi In*. Ketua Pusat Pimpinan Tata Usuha Pembantu Prajurit Peta, dan sebagai pimpinan redaksi Suraf Kabar *Tjahaja*. Dalam Sidang PPKI (18 Agustus 1945) berinisiatif menjadikan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pencipta Pekik Merdeka pada 1 September 1945.

Sumber: *Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan*

Penjelasan tentang ideologi Pancasila dengan ajaran Islam seperti yang dijelaskan oleh Dr. H.Anwar Harjono dari Gerakan Pemoeda Islam Indonesia -GPII dan Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masjoemi, dan mantan Perdana Menteri yang pertama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Ir H. Djuanda dari Persjarikatan Moehammadijah dan Perdana Menteri, kurang dipahami semua pihak yang belum mempelajari sikap pimpinan Islam terhadap ideologi Pancasila.

> Demikian pula akibat deislamisasi penulisan Sejarah Indonesia tentang lahirnya ideologi Pantjasila, menjadi terbaca tidak seorang pun dari Ulama atau pimpinan organisasi Islam, berperan utama dalam perumusan ideologi Pantjasila dan Oendang-Oendang Dasar 1945, pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364, sebelum pengesahan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia - P.P.K.I dibekas gedung Raad van Indie di Pejambon, Kementerian Kehakiman.[17]

Mungkinkah tanpa persetujuan Ulama, antara lain Wachid Hasjim-Nahdlatoel Oelama, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Mr. Kasman Singodimedjo dari Persjarikatan Moehammadijah, dan Teoekoe Mohammad Hasan dari perwakilan umat Islam Sumatra, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mampu mengesahkan ideologi Pantjasila, konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta penentuan batas wilayah dan penetapan delapan Provinsi negara Repoeblik Indonesia dalam waktu persidangan yang relatif sangat pendek?

Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden RI

Langkah yang ditempuh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364, selain memutuskan Pemboekaan dan Batang Toeboeh Oendang-Oendang Dasar 1945, juga berhasil memutuskan:

Pertama, atas usul Otto Iskandardinata dari Pagoejoeban Pasoendan, mengangkat Boeng Karno sebagai Presiden dan Boeng Hatta sebagai Wakil Presiden, secara aklamasi disetujui. Selain itu, juga diusulkan Pekik Merdeka sebagai Pekik Perjuangan.

---

17 Prawoto Mangkusasmito, 1970. Op.Cit., hlm. 37.

Presiden Soekarno menetapkan:

Sejak 1 September 1945, kita memekikkan pekik "Merdeka". Dengoengkan teroes pekik itoe, sebagai dengoengan Djiwa Jang Merdeka!
Djiwa Merdeka jang berdjoeang dan bekerdja!
Berdjoeang dan Bekerdja!
Boektikan itoe!

Kedua, wilayah Nusantara Indonesia ditetapkan batasnya adalah *Nederland Indie* bekas jajahan Keradjaan Protestan Belanda. Dalam bahasa populernya: di barat Sabang, di timur Merauke, di utara Kepulauan Talaud dan selatan P. Rote. Wilayah Nusantara Indonesia sangat luas.

Untuk memahami betapa luasnya batas Sabang sampai Merauke; kalau Sabang - Merauke dipindahkan dengan skala yang sama maka Merauke berada di Baghdad Irak. Sedangkan Sabang ada di Greenwich London. Artinya, Nusantara Indonesia membentang panjang dari Timur Tengah melewati Eropa dan berhenti di wilayah Inggris Raya. Oleh karena itu, posisi Kepulauan Talaud ada di Jerman dan P. Rote berada di Aljazair. Selain itu, hanya Indonesia satu-satu negara yang memiliki luas laut terbesar di dunia.

Untuk dapat memahami luas tanah air Indonesia dengan memerhatikan perbedaan waktu: Waktu Indonesia Timur - WIT berbeda 2 jam lebih dahulu daripada Waktu Indonesia Barat - WIB. Waktu Indonesia Tengah - WITA berbeda 1 jam daripada Waktu Indonesia Barat - WIB. Dengan demikian, matahari untuk menyinari seluruh Nusantara Indonesia harus terbit tiga kali.

Wilayah Nusantara Indonesia yang luas itu hanya dibagi menjadi 8 Propinsi dengan nama-nama baru:

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatra
5. Kalimantan
6. Sulawesi
7. Maluku
8. Sunda Kecil

Demi untuk mengatur negara RI yang luas itu, segera dibentuk Kabinet Repoeblik Indonesia yang dikenal sebagai Kabinet Presidential dan dipimpin oleh Presiden, berumur dua bulan setengah, pada 31 Agustus-14 November 1945:

Menteri Luar Negeri	-	Mr. Achmad Soebardjo
Menteri Dalam Negeri	-	R.A.A. Wiranata Koesoema
Menteri Kehakiman	-	Professor Soepomo
Menteri Keamanan Rakjat	-	Soeprijadi/Soeljodikoesoemo
Menteri Kemakmuran	-	Ir. Soerachman
Menteri Keuangan	-	Dr. Samsi
Menteri P dan K	-	Ki Hadjar Dewantara
Menteri Sosial	-	Mr. Iwa Koesoema Soemantri
Menteri Penerangan	-	Mr. Amir Sjarifoedin
Menteri Kesehatan	-	Dr. Boentaran Martoatmodjo
Menteri Perhubungan	-	Abikoesno Tjokrosoejoso
Menteri Negara	-	Dr. Amir
Menteri Negara	-	Wachid Hasjim
Menteri Negara	-	Mr. Sartono
Menteri Negara	-	Mr. A.A. Maramis
Menteri Negara	-	Otto Iskandar Dinata
Menteri Negara	-	Soekardjo Wirjopranoto

Di samping itu, juga diangkat para Gubernur:

Mr. Mohammad Teuku Hasan	untuk	Sumatra
Ir. Pageran Noor	untuk	Kalimantan
Dr. Sam Ratoe Langie	untuk	Sulawesi
Mr. Latuharary	untuk	Maluku
Mr. Poedja	untuk	Sunda Kecil

Menyusul pengakatan sebagai Gubernur pada 6 September 1945:

R. Soetardjo	untuk	Jawa Barat
R.P. Soeroso	untuk	Jawa Tengah
R.M Soerjo	untuk	Jawa Timur
Soewirjo	untuk	Wali kota Jakarta. [18]

Dari kementerian di atas, porsi untuk Ulama hanya menempati Menteri Negara Wachid Hasjim. Tidak pula disebut dengan jelas sebagai Menteri Agama. Sedangkan dari partai politik Islam hanya seorang, Abikoesno Tjokrosoejoso sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum.

18 Dr. R. Soeharto, 1982. *Op.Cit.*, hlm..29.

Selain itu, betapa besarnja jasa dan pengaruhnya Persjarikatan Moehammadijah, 1330 H/1912 M dalam perjuangan mencerdaskan bangsa melalui organisasi sosial pendidikan, dibandingkan dengan Taman Siswa yang lahir sepuluh tahun kemudian, 1922 M, dan menolak gerakan pembaharuan Islam. Pada masa Gerakan Kebangkitan Nasional Indonesia, melarang guru Taman Siswa berpartisipasi aktif dalam gerakan nasional. Namun, mengapa justru Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai Menteri P dan K?

Ki Bagoes Hadikoesoemo sebagai Ketua Persjarikatan Moehammadijah yang sangat berjasa dalam perubahan sila pertama Pantjasila produk perumusan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* dan Panitia Sembilan yang disebut Piagam Djakarta. Hasil persetujuannya terhadap perubahannya, melahirkan Pantjasila dalam Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai falsafah dasar negara, dan konstitusi negara pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364. Namun, Ki Bagoes Hadikoesoemo sama sekali tidak mendapatkan kedudukan dalam kementerian di atas. Padahal, Boeng Karno sendiri sebagai anggota Pengoeroes Madjlis Pengadjaran Daerah Benkoelen Persjarikatan Moehammadijah sejak 1938.

Demikian pula, K.H. Abdoel Kahar Moezakkir sebagai Ketua Sekolah Tinggi Islam - S.T.I yang didirikan pada 27 Rajab 1364 - 8 Juli 1945 di Jakarta dan juga sebagai Panitia Sembilan. Walaupun Drs Mohammad Hatta sebagai Dewan Kurator Sekolah Tinggi Islam - STI, pada saat menjadi Wakil Presiden tidak juga mengusulkan KH. Abdoel Kahar Moezakkir sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah realitas kementerian dengan menteri seperti di atas, berangkat dari strategi deislamisasi kabinet dalam menghadapi Sekoetoe?

Demikian pula dalam masalah kedudukan gubernur atau walikota. Mayoritasnya diduduki oleh orang Parindra atau P.V.P.N dan tidak seorang pun dari Partai Sjarikat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia yang memperoleh pembagian kedudukan sebagai gubernur atau walikota. Padahal, pernyataan PNI - Baroe yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir, ketika ada Petisi Soetardjo menilai petisi tersebut sebagai pengchianatan terhadap rakjat dan memboenoeh daja joeang rakjat.

Walaupun realitas sejarahnya begitu, R. Soetardjo Kartohadikoesoemo justru diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat. Demikian pula R.P. Soeroso Ketua P.V.P.N. yang dinilai sebagai organisasi pegawai yang setia kepada pemerintah kolonial Belanda, namun R.P. Soeroso diangkat sebagai Gubernur Jawa Tengah, 6 September 1945.

Apalagi setelah Kabinet Sjahrir I, 14 November 1945-12 Maret 1946, terbentuk, melahirkan Makloemat Presiden No.1, 1946, berisikan keputusan pembekuan aktivitas sekitar 40 kekuasaan politik Islam atau kesultanan di seluruh Nusantara Indonesia, kecuali Kesoeltanan Djogjakarta.

> Apakah ini semuanya sebagai strategi berikutnya dari dihapuskannya tujuh kata dari Piagam Djakarta maka Ulama dan pemimpin parpol Islam serta para Sultan, dipatahkan dan disingkirkan keberadaannya dari semua pos pemerintahan. Dikondisikan pula, agar semua Ulama dan pemimpin partai politik Islam, menjadi aktif di sektor swasta. Baik pesantren dan sekolah, dari madrasah hingga perguruan tinggi Islam, seluruhnya menjadi swasta. Padahal, Ulama dan Santri sebagai patriot dan nasionalis sejati dalam melawan penjajahan Barat atau imperialis Timur.
>
> Apakah hal ini terjadi, barangkali sebagai dampak adanya ajaran kalau Ulama melibatkan diri dalam pemerintahan sebagai Ulama Syu.' Apakah akibatnya para Ulama lebih merasa bahagia jika terlibat langsung memimpin Perang Sabil melawan pendaratan Sekoetoe dan Nica, dalam Perang Kemerdekaan, 1364-1369 H/1945-1950 M, daripada menduduki posisi kepamongprajaan atau perkantoran lainnya.

Pengangkatan Menteri, Gubernur dan Walikota dipilih dari orang-orang yang pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia menampilkan bersikap anti Islam dan menampakkan kesetiaaan pada pemerintah kolonial Belanda. Apakah hal ini merupakan strategi politik Soetan Sjahrir (1909-1966 M) dan Amir Sjarifoeddin (1907-1948 M) agar dapat dilihat Tentara Sekoetoe Keradjaan Inggris Protestan Anglikan dan NICA yang mendarat di Jakarta pada 29 September 1945 bahwa Negara Repoeblik Indonesia bukan negara Islam dan menteri-menterinya terdiri dari orang-orang yang pada masa pendudukan Jepang, tetap bekerja sama dengan Sekoetoe dan penjajah Belanda.

Misalnya, orangnya van Mook yang pernah mendapat dana sebanyak f 25.000 untuk mendanai gerakan bawah tanah anti Jepang, yaitu Mr.Amir Sjarifoeddin. Dalam Kabinet Presidential, 2 September-14 November 1945, diangkat menjadi Menteri Penerangan. Bahkan, pada masa Kabinet Sjahrir I, 14 November1945-12 Maret 1946, Mr. Amir Sjarifoeddin mendapat kedudukan sebagai Menteri Keamanan Rakjat dan Menteri Penerangan. Demikian pula pada Kabinet Sjahrir II, 12 Maret-2 Oktober 1946, Mr. Amir Sjarifoeddin sebagai Menteri Pertahanan. Mengapa dipilih strategi ini?

Pendaratan Tentara Sekoetoe

Tentara Sekoetoe Inggris pada 29 September 1945 mendarat di Tanjung Priok Jakarta menggunakan kapal penjelajah Cumberland. Terdiri dari tiga divisi Tentara Sekoetoe dari *South East Asia Command - SEAC* yang diberi nama *Alied Forces Netherland East Indies - AFNEI* di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Adapun yang dimaksud dengan tiga divisi tersebut adalah:

> *Pertama, 23th Indian Division*, di bawah pimpinan Mayor Jenderal D.C. Hawthorn untuk Jawa Barat.
>
> *Kedua, 5th Indian Division*, di bawah pimpinan Mayor Jenderal E.C. Mansergh untuk Jawa Timur.
>
> *Ketiga, 26th Indian Division*, di bawah pimpinan Mayor Jenderal H.M. Chambers untuk Sumatra.

Di dalamnya menyusup tentara Keradjaan Protestan Belanda dengan nama *Netherlands Indies Civil Administration* - NICA. Kemudian diikuti pula datangnya Letnan Goebernoer Djenderal van Mook (1942-1948 M) pada 5 Oktober 1945. Tepat pada saat terbentuknya Tentara Keamanan Rakjat - TKR.

Kudeta Tidak Berdarah

Di bawah ancaman Tentara Sekoetoe itu, kalangan Sosialis dan Kiri, Soetan Sjahrir, 36 Tahun, dan Amir Sjarifoeddin, 38 Tahun, menurut Chaeroel Saleh melancarkan kudeta tidak berdarah, 16 Oktober 1945, menurunkan pimpinan nasional yang berbau Jepang, digantikan oleh pimpinan yang berbau Sekoetoe dan Belanda. Peristiwa ini disebut oleh Benedict R.O.G. Anderson dalam *Java in a Time of Revolution, Occupation and Resistance* 1944-1946 disebutnya sebagai *a silent coup*.

Kudeta tersebut, menurut Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin segenap pimpinan yang mempunyai latar belakang kerjasama dengan Balatentara Djepang harus digantikan dengan pimpinan gerakan bawah tanah yang bekerjasama dengan Sekoetoe dan penjajah Belanda. Oleh karena itu, diubahlah ketiga keputusan produk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 22 Agustus 1945, yaitu:

(1) Komite Nasional Indonesia
(2) Partai Nasional Indonesia
(3) Badan Keamanan Rakjat - BKR. [19]

Komite Nasional Indonesia Poesat - KNIP yang dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo, 29 September 1945, mantan Daidancho Tentara Pembela Tanah Air - Peta Jakarta, berdasar Makloemat Wakil Presiden X dibentuklah BP KNIP yang dipimpin oleh Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin, 16 Oktober 1945.

Anggotanya terdiri dari: Mr. Soewandi, Mr. Sjafroeddin Prawiranegara, K.H. Wachid Hasjim, Mr. R. Hendromartono, Dr. R.M. Soenario Kolopaking, Dr. A. Halim, Soebadio Sastrosatomo, Mr. Tan Ling Djie, Soepeno, S. Mangoensarkoro, Adam Malik, Dr. Tadjaloedin, dan Soedarsono.

Dari nama-nama tadi, betapa kuatnya pengaruh golongan Sosialis Soetan Sjahrir. Dengan melalui a silent coup atau kudeta tak berdarah. Ulama tersingkirkan dalam BP KNIP hanya terwakili oleh dua orang wakil: Mr. Sjafroeddin Prawiranegara dan K.H. Wachid Hasjim dan berkedudukan hanya sebagai anggota. Dengan terbentuknya BP KNIP, Mr. Kasman Singodimedjo tersingkirkan, baik dari kepemimpinan KNIP dan BKR. Kemudian diangkat sebagai Jaksa Agung, pengganti Mr. Gatot sebagai Jaksa Agung pertama.

Peristiwa Kudeta Tak Berdarah, 16 Oktober 1945, yang dilakukan oleh Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin, walau pun saat itu belum mendirikan partai politik secara resmi, kelompok Sosialis yang mendapat dukungan dari Barat, dan bantuan Wakil Presiden berhasil menggeser dan menurunkan pimpinan politik Islam dan Ulama, terutama dari kedudukan kementerian yang strategis dan penguasaan organisasi kesenjataannya.

Kabinet Presidential dan Sistem Multi Partai Politik

Kabinet Presidential, 2 September-14 November 1945, 40 hari, digantikan dengan Kabinet Parlementer diawali dengan Kabinet Sjahrir I, 14 November-12 Maret 1946, dengan menteri-menteri dari orang-orang yang tidak pernah kerjasama dengan Balatentara Djepang. Namun, orang-orang menunjukkan loyalitas dan kerjasamanya dengan Sekoetoe dan Belanda.

19 Ben Anderson, 198. *Revolusi Pemuda*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, hlm. 127 menjelaskan adanya dua kelompok dalam pembentukan organisasi kesenjataan. *Pertama*, Otto Iskandardinata lebih cenderung menyetujui dibentuknya organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan. *Kedua*, Major Oerip Soemohardjo, kelompok progresif mantan Tentara Peta, Heiho, KNIL menghendaki dibentuk Tentara Nasional. Periksa lebih lanjut R.H.A. Saleh, 2000. *".... Mari Bung, Rebut Kembali"*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, hlm. 102-118.
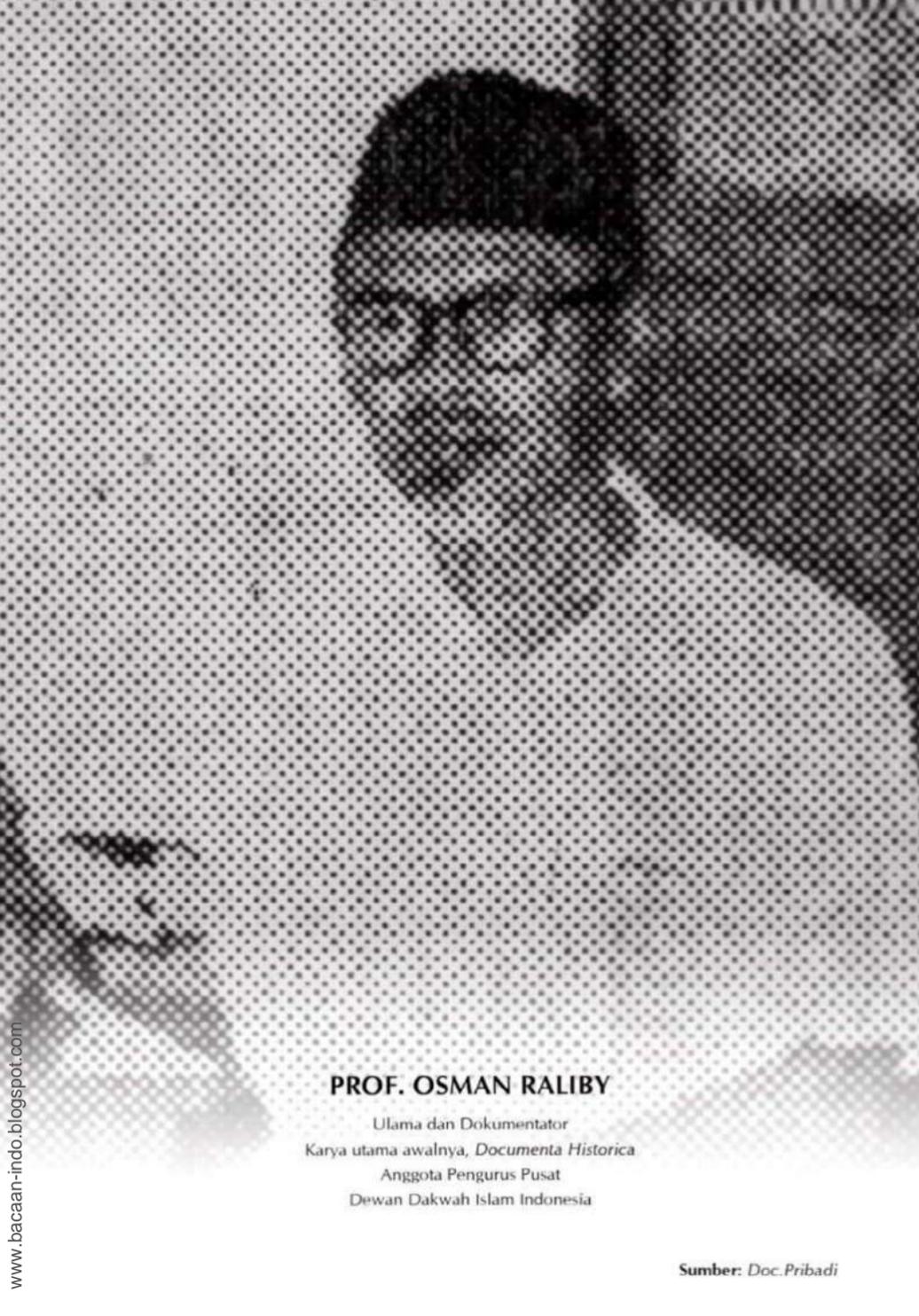
PROF. OSMAN RALIBY

Ulama dan Dokumentator
Karya utama awalnya, *Documenta Historica*
Anggota Pengurus Pusat
Dewan Dakwah Islam Indonesia

Sumber: *Doc.Pribadi*

Sejalan dengan makna Kabinet Parlementer, pengangkatan menterinya disesuaikan dengan dukungan partai politik dalam KNIP. Demi memenuhi tujuan tersebut maka sistem satu partai: Partai Nasional Indonesia, melalui Makloemat 3 November 1945 Wakil Presiden, digantikan dengan Sistem Multi Partai.

Muncullah partai politik, ada yang menggunakan nama lama pada masa Gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia atau nama baru dengan pengertian belum pernah dikenal oleh rakyat pada masa Gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia atau belum pernah didirikan pada masa Pendudukan Balatentara Djepang, 1942-1945M.

Adapun tanggal berdirinya partai politik di bawah ini, walau pun pernah didirikan pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia, ataupun telah didirikan pada masa Pendudukan Balatentara Dai Nippon, tetapi menggunakan tanggal hari lahir atau hari jadinya, sesudah 3 November 1945:

(1) Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi - Madjlis Sjoero Moeslimin Indonesia, dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo, 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364. Namanya memang bermula dari Masjoemi yang pernah didirikan masa Pendudukan Balatentara Djepang, 1943 M.

Namun pada 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364 berubah menjadi satu-satunya partai politik Islam Indonesia. Mendapat dukungan dari sejumlah organisasi politik dan sosial pendidikan, antara lain: Partai Sjarikat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, Persjarikatan Moehammadijah, Nahdlatoel Oelama, Persjarikatan Oelama, Persatoean Islam, Nahdlatoel Wathan.

Dengan susunan pengurus:
Ketoea : Dr. Soekiman Wirjosandjojo
Ketoea Moeda I : R. Abikoesno Tjokroasoejoso
Ketoea Moeda II : Wali Al Fatah

Panitera I : S.M. Kartosoewirjo
Panitera II : Prawoto Mangoensasmito

Badan Keoeangan
Ketoea : Mr. R.A. Kasmat
Anggauta : R. Prawirojoewono
: H. Abdulhamid B.K.N.

Dr. SOEKIMAN WIRJOSANDJOJO

Ketua *Indische Vereniging*,1925 M, di Belanda, Pelopor penggunaan istilah Indonesia sebagai pengganti India, Hindia Belanda atau Hindia Timur. *Indische Vereniging* diubahnya menjadi Perhimpunan Indonesia yang berpengaruh melahirkan Comite Persatoean Indonesia 1926 M, Madjlis Oelama Indonesia, 1928 M. Pendiri Partai Islam Indonesia - PARII atau P.I.I yang bertujuan membangun Pemerintahan Demokratis dan Negara Kesatuan, sekaligus pengusul pertama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia - P.P.K.I. agar Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden Seoemoer Hidoep.

Ketua Umum Partai Islam Indonesia Masjoemi, 7 November 1945. Perdana Menteri Kabinet Soekiman yang mengesahkan Lambang Garuda Pancasila ciptaan Soeltan Hamid Pontianak Kalbar.

Sumber: *Dep.Penerangan RI*

Badan Penerangan	: Gaffar Ismail
Bahagian Pemoeda	: Harsono Tjokroaminoto
Bahagian Hizboellah	: H. Hasjim
Anggauta-anggauta	: K.H. Dahlan
	: H.M. Farid Ma'roef
	: K.H. Masjkoer
	: M. Joenoes Anies
	: K.H. Faqih 'Oesman
	: K.H. Fatchoer Rachman
	: Dr. Aboe Hanifah
	: M. Natsir
	: Anwar Tjokroaminoto
	: Dr. Sjamsoeddin
	: Mr. Mohammad Roem
Wakil Partai di Djakarta	: R. Abikoesno Tjokrosoejoso [20]

Kantor Pengoeroes Besar di kantor Masjoemi Daerah Djogjakarta, Ngabean 25, Jogjakarta.

Lasjkar Hizboelah walaupun seragamnya tidak sama, tetapi tekad tunggal mempertahankan anugerah Allahu Akbar, yakni kemerdekaan bangsa, negara, dan agama.

Sumber: Osman Raliby, Documenta Historica

20 *Kedaulatan Rakjat*, 16-11-1945/9 Besar 1364 – Ehe 1876.

Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi merupakan partai terbesar. Jumlah anggota pendukungnya untuk satu kabupaten saja, bagi partai politik lainnya sama dengan anggota seluruh Indonesia. Masjoemi juga memiliki Lasjkar Hisboellah yang bersenjata berjumlah sekitar 20.000 hingga 25.000 pemuda. Demikian penjelasan George McTurnan Kahin dalam *Nationalism and Revolution In Indonesia*.

Adapun pimpinan partai yang merupakan *intellectual brain trust* adalah Choedratoes Sjeich Rois Akbar K.H.Hasjim Asj'ari, K.H.Wachid Hasim, Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Mohammad Natsir, Mohamad Roem, Sjafroeddin Prawiranegara, Joesoef Wibisono, Hadji Agoes Salim, dan Aroedji Kartawinata.

Walaupun Partai Islam Indonesia, Masjoemi sebagai partai terbesar yang mempunyai pendukung yang Lasykar Hisboellah dan Barisan Sabilillah, serta berperan besar dalam pembentukan: Badan Keamanan Rakjat - BKR, 22 Agustus 1945, Tentara Keamanan Rakjat - TKR, 5 Oktober 1945, Tentara Repoeblik Indonesia - TRI, 24 Januari 1946, Tentara Nasional Indonesia - TNI, 5 Mei 1947, namun tidak pernah dalam perjalanan sejarahnya melakukan kudeta terhadap pemerintah Repoeblik Indonesia.

(2) Partai Sjarikat Islam Indonesia - PSII, mulai Juli 1947 memisahkan diri dari Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi. PSII melakukan pemisahan dipimpin oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dan Aroedji Kartawinata. Pemisahan ini terjadi pada masa Kabinet Amir Sjarifoeddin. Akibat Mr. Amir Sjarifoeddin berusaha memperoleh dukungan dari partai Islam, tetapi Partai Islam Indonesia Masjoemi menolaknya.

Dalam Kabinet Amir Sjarifoeddin, menjadikan W. Wondoamiseno diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Aroedji Kartawinata sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Sjahboedin Latif sebagai Menteri Penerangan. Soekoso Wirjosapoetro sebagai Wakil Menteri Sosial. Kiai Achmad Asj'ari sebagai Menteri Agama. H. Anwaroeddin sebagai Wakil Menteri Agama.

S.M. Kartosoewirjo dari PSII sebenarnya ditunjuk menjadi Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Sjarifoeddin. Penunjukkan ini ditolaknya kemudian digantikan oleh Aroedji Kartawinata.[21] Penolakannya didasarkan penilaian S.M.Kartosoewirjo terhadap Mr.Amir Sjarifoeddin sebagai Komunis. Akibat dilaksanakannya hasil Perundingan Renville, menjadikan Jawa Barat sebagai Daerah Kantong yang telah diduduki Belanda, harus dikosongkan TNI Siliwangi. Wilayah RI hanya tinggal 8 kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasil Peroendingan Renville ini dinilai oleh S.M. Kartosoewirjo sangat merugikan Proklamasi 17 Agustus 1945.

21 George McTurnan Kahin, 1970. *Op.Cit.*, hlm. 210.

Sumber: Doc.Pribadi

DR. R. WALI AL FATTAH

Dinasti Ke-19 Sinoewoen Kandjeng Soeltan Raden Fattah Kesoeltanan Demak, Cucu dari Harso Atmodjo Dinasti Ke-17, tinggal di Oro Oro Ombo Madioen, Asisten Wedana Ngrajoen Madioen. Putra dari R. Tjokroprawiro Dinasti Ke-18. Vice Presiden Persjarikatan Pegawai Pegadaian Boemiputera - PPPB (1915-1916). Hoofd redacteur Soerat Kabar Taman Soeara (1915-1916) Ketua Komite Tentara Kandjeng Nabi Mohammad (1918).

Pengaruh R. Tokroprawiro terhadap perjuangan putranya. Dr. R. Wali Al Fattah: Redacteur Pemberita Kemadjoean di Surabaya (1928), Wd Hoofredacteur Medan Doenia di Semarang (1929), Redacteur Bintang Mataram di Yogyakarta (1930), Redacteur Marian Moestika di Yogyakarta, dan Redacteur Panangggung Jawab Oetoesan Indonesia (1931-1934), Redacteur Doenia Pegadaian organ PPPB (1934), Hoofredacteur Soeara Boeroeh di Yogyakarta (1938-1939), Redacteur Islam Bergerak di Yogyakarta, organ PII (1939-1940).

Media cetak yang dipimpin oleh Dr. R. Wali Al Fattah tidak mungkin mendapat dana atau penghargaan dari Iboe Soeri Emma Belanda seperti media cetak Medan Prijaji dan Poetri Hindia yang dipimpin oleh R.M.T. Adhisoerjo. Melainkan hanya mendapat dukungan dana dari Raden Didi Soekardi dari Soekaboemi. Dr. R. Wali Al Fattah Sekretaris Djenderal Hoodf Bestuur Partai Islam Indonesia - PII (1939-1940), Anggota Komite Nasional Indonesia Poesat dan Wakil Ketua II PB Partai Islam Indonesia Masjoemi di Yogyakarta (1946). Diangkat sebagai Residen Pekalongan (1946), Kepala Bagian Politik Kementerian Dalam Negeri (1952), Pegawai Tinggi Ketatapradjaan (1962). Penggagas organisasi paramiliter Barisan Hizboellah (1942). Pendiri organisasi Djama'ah Muslimin Hizbullah (1953).

Pada saat Jawa Barat kosong, S.M.Kartosoewirjo membubarkan Partai Islam Indonesia Masjoemi dan mendirikan Madjelis Islam. Mengubah Daerah I - Daerah Satu, menjadi Daroel Islam - D.I. Menurut Arnold C. Brackman dalam *Indonesian Communism A History*, bahwa S.M. Kartosoewirjo tidak membenarkan Jawa Barat menjadi daerah yang dikuasai oleh penjajah kafir Belanda setelah Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.

Lasjkar Hizboellah bertekad tetap menegakan Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, sebagai rahmat Allah Yang Mahakuasa, dan mempertahankan Sang Saka Merah Putih.

Sumber: Osman *Raliby*, Documenta Historica

Dijelaskan lebih lanjut oleh Arnold C. Brackman, S.M. Kartosoewirjo menilai *Roem Rojen Accord* yang melahirkan Republik Indonesia Serikat di bawah Ratoe Belanda, sebagai pengkhianatan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, reaksi S.M. Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia - NII[22] pada 7 Agustus 1949.

22 Periksa, Arnold C. Brackman, 1963 *Indonesian Communism A History*, Frederick A.Praeger. New York. hlm. 112-113. Holk H. Dengel. 1995. *Darul Islam dan Kartosuwirjo, Angan-angan yang gagal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. h.61 menjelaskan bahwa sejak Agustus 1947 dalam masalah pertahanan, di bawah pimpinan Soetoko telah dibentuk Dewan Mobilisasi Oemat Islam Indonesia di Priangan. DMOII ini melihat adanya Tentara Goet-Goet sebagai salah satu dari kesatuan istimewa dari Barisan Sabilillah yang dilucuti oleh Lasjkar Hizboellah Dengan alasan pelucutan Tentara Goet-Goet karena bertindak sebagai gerombolan perampok, pengacau dan melawan pamong desa, Polisi dan TNI. Jadi, di Jawa Barat terdapat Barisan Sabilllah palsu.

K.H. JOESOEF TAOEZIRIE

Pelaku Sejarah, Ulama, Penentang DI SM Kartosoewirjo
Pendiri Pesantren Cipari dan Pesantren Darussalam

Sumber: Doc. Pribadi

K.H. JOESOEF TAOEZIRIE

Pengalaman berorganisasinya diawali dengan bergabung pada Sjarikat Dagang Islam - SDI pimpinan H. Samanhoedi. Berlanjut dalam Sjarikat Islam - SI, Centraal Sjarikat Islam - CSI, Partai Sjarikat Islam Islam - PSI, 1923 M di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Dampaknya, K.H. Joesoef Taoezirie berkenalan pula dengan S.M. Kartosoewirjo dengan program asas Hjirahnya.

Akibat adanya program Hijrah dijadikan asas, PSII pecah menjadi Partai Islam Indonesia PII di bawah pimpinan Dr. Soekiman Wirjosandjojo dan K.H. Mas Mansoer. Apalagi setelah H.O.S. Tjokroaminoto wafat, muncullah Barisan Penjedar di bawah Hadji Agoes Salim dan Mr. Mohamad Roem. Dampaknya, Abikoesno Tjokrosoejoso melakukan *rojeren* - memecat 26 pimpinan PSII.

Bagi S.M. Kartosoewirjo memanfaatkan situasi perpecahan, untuk melaksanakan program asas Hijrah dengan mengajak umat secara fisik pindah ke Malangbong seperti Rasulullah saw pindah dari Makkah ke Madinah. Terbayang betapa kacau balau pelaksanaannya karena hanya dengan dasar semangat, mengubah profesi, okupasi, wilayah hunian, pendidikan, keragaman budaya, untuk berkumpul di Suffah Malangbong Jawa Barat dengan tanpa persiapan perencanaan dan dana yang memadai. Apabila tanpa dukungan K.H. Joesoef Taoezirie, dan Kamran tidak mungkin S.M. Kartosoewirjo mampu melaksanakan program Hijrah dan mendirikan Komite Pembela Kebenaran - KPK.

Pada masa pendudukan Balatentara Djepang memanfaatkan program Perang Asia Timoer Raja digunakan untuk melatih pemuda Islam dalam Lasjkar Hizboellah dengan nama Tentara Daroes Salam, Lasjkar Daroessalam atau Esa Selamat.

Pada masa Proklamasi 17 Agustus 1945 atau 9 Ramadhan 1364 Tentara Daroes Salam bersama TNI bergerilya di Jawa Barat. Perpecahan dengan S.M. Kartosoewirjo tidak dapat dihindarkan setelah adanya Tentara Siliwangi Hijrah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. S.M. Kartosoewirjo membentuk Tentara Islam Indonesia - TII, 1948 M. Disusul dengan pembentukan Negara Islam Indonesia - NII, 9 Agustus 1949 setelah adanya *Roem-Rojen Agreement*. Menurut K.H. Joesoef Taoezirie, NII sebagai pembentukan Negara dalam Negara. Lasjkar Daroes Salam tidak mau berpihak kepada Daroel Islam - DI.

K.H. Joesoef Taoezirie, bersama K.H. Moesaddad, K.H. Nahrawi, K.H. Abdoel Qoedoes, Samsoedi J.A, Marko, Adjengan Soedjai, K.H. Roechiat, Edi Rachmat tidak berpihak kepada Daroel Islam atau NII, S.M. Kartosoewirjo ataupun Negara Pasoendan bentukan van Mook. Melainkan tetap berpihak kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampaknya, Tentara Hizboellah pecah, diizinkan oleh S.M. Kartosoewirjo untuk memihak Tentara Nasional Indonesia -TNI atau ikut Daroel Islam. Jadi, tidak semua Lasjkar Hizboellah berpihak pada Daroel Islam. Dengan demikian Daroel Islam-DI tidaklah identik dengan Partai Politik Islam Indonesia Masjoemi dan tidak pula sejalan dengan Partai Sjarikat Islam Indonesia. Tidak pula berarti para Ulama dan Kiai di Jawa Barat menjadi pendukungnya, walaupun menamakan Daroel Islam.

> K.H. Joesoef Todjiri dari Pesantren Darussalam Wanaraja Garut,
> K.H.Moesaddad dari Pesantren Moesadaddiyah Garut, K.H.Roechiat dari Pesantren Singaparna Tasikmalaaya,
>
> Ketiga Ulama ini menolak kerjasama dengan Daroel Islam - DI. Masih banyak Kiai dan Ulama memilih pindah ke Bandung atau ke kota lainnya.

Pengaruh berikutnya S.M. Kartosoewirjo dengan gerakan N.I.I. mendapat dukungan dari Kahar Moezakkar dari Sulawesi, Daoed Beoereoeh dari Aceh, Ibnoe Hadjar dari Kalimantan Barat. Walaupun demikian besar pengaruh S.M. Kartosoewirjo, jalan yang dipilihnya dalam menegakkan Negara Islam Indonesia dengan cara inkonstitusionil, menjadikan Partai Islam Indonesia Masjumi, Partai Sjarikat Islam Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, Perti, Persjarikatan Muhammadijah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, serta organisasi Pesantren lainnya tidak mendukungnya.

Mayoritas partai politik dan organisasi sosial pendidikan Islam Indonesia, Pesantren, tetap setia terhadap pemerintah Repubik Indonesia dan tetap menjadi pendukung Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364.

Kembali ke masalah pembentukan Partai Politik yang menyambut Makloemat X 3 November 1945, Wakil Presiden Mohammad Hatta:

(3) Partai Boeroeh Indonesia - PBI, dipimpin oleh Njono, 8 November 1945. Sesudah 1951, Njono bersama-sama Aidit, Njoto, Lukman, Soedisman, membangun SOBSI sebagai organ buruh dari PKI. Nantinya mendapat tandingan SOKSI pimpinan Soehardiman dari IPKI.

(4) Partai Rakjat Djelata - PRD dipimpin oleh Soetan Dewanis, 8 November 1945. Selanjutnya, berubah menjadi Partai Moerba sebagai partai berhaluan Marxist nasionalis, dipimpin oleh Tan Malaka, Adam Malik dan Soetan Dewanis. Kontra dengan Partai Komoenis Indonesia -PKI pimpinan Sardjono, Alimin, Moeso dan Amir Sjarifoeddin penganut Komunis Internasional - Komintern atau Pro Rusia Stalinis.

K.H. ROECHIAT

Pendiri Pesantren Cipasung Singaparna Tasikmalaya
Ahli Soennah Wal Djamaah Nahdlatoel Oelama
Ajengan Patriot Pembela Proklamasi 17 Agustus 1945

Sikap dan tindakan patriotismenya, cinta bangsa, negara, dan agama menyebabkan ditangkap dan dipenjara empat kali oleh pemerintah kolonial Belanda dan Balatentara Djepang.

Pertama, bersama K.H. Zainal Moestofa dipenjara di Sukamiskin Bandung, 1941 M. Kedua, ditangkap dan dipenjarakan kembali di Ciamis, 1942 M. Ketiga, ditangkap dan dipenjarakan bersama K.H. Zainal Moestofa oleh Balatentara Djepang, 1944 M.

Penentang Darul Islam S.M. Kartosoewirjo. K.H. Roechiat menilai DI sebagai *Bughat* - Pemberontak terhadap pemerintah dan negara RI, sekaligus menolak untuk diangkat sebagai salah seorang Imam DI. Akibatnya, Pasukan DI mencoba menghijrahkan K.H. Roechiat dari Pesantren ke Gunung dengan cara didudukkan di atas kursi dengan kanan kirinya di pasang bambu panjang. Dicobanya akan dipikul, walaupun oleh 25 pasukan, namun tidak mampu bergerak dan tidak terangkat. Melihat ketinggian Ilmu Tasawuf K.H. Roechiat, membuat pasukan DI membatalkan rencana mereka untuk menghijrahkannya dari Pesantren ke Gunung.

Sumber: *Doc. Pribadi*

(5) Partai Kristen Indonesia - Parkindo, dipimpin oleh Ds. Probowinoto, 10 November1945. Pimpinan Parkindo selanjutnya yang terkenal adalah Dr. Leimena. Kelanjutan dari Perserikatan Kaoem Christen - PKC, 1929, bersikap kerjasama dengan pemerintah jajahan, pemerintah kolonial Belanda, dipimpin oleh R.M. Notosoetarso.

(6) Partai Sosialis Indonesia - Parsi, dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin, 10 November 1945. Dengan ditolaknya hasil Perundingan Renville oleh DPR, berdampak Kabinet Amir Sjarifoeddin jatuh. Kemudian, Amir Sjarifoeddin bersama Moeso melancarkan Kudeta PKI di Madiun 19 September 1948.

(7) Partai Rakjat Sosialis - PRS, dipimpin oleh Soetan Sjahrir, 20 November 1945.

(8) PSI dan PRS bergabung dengan nama Partai Sosialis di pimpin oleh Soetan Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, dan Oei Hwee Goat, Desember 1945. Partai Sosialis ini merupakan tipikal partai elite intelektual. Penggabungan ini tidak berlangsung lama. Setelah Amir Sjarifoeddin menjatuhkan Kabinet Sjahir III, dan setelah Kabinet Amir Sjarifoeddin dijatuhkan oleh PNI dan Masjoemi maka Amir Sjarifoeddin dengan menggunakan Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo, Front Demokrasi Rakjat - FDR, bersama Moeso melancarkan Kudeta PKI di Madiun 19 September 1948 melawan Kabinet Hatta.

Selanjutnya, pimpinan Partai Sosialis yang terkenal adalah Soetan Sjahrir, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, Soebadio Sastrosatomo, Djohan Sjahroezah.

(9) Partai Katolik Repoeblik Indonesia - PKRI, dipimpin oleh I.J.Kasimo, 8 Desember 1945. Kelanjutan dari Pakempalan Politik Katolik Djawi - PPKD didirikan pada 22 Februari 1922 di Djogjakarta dipimpin oleh I.J. Kasimo, bersikap koperasi dengan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian namanya diubah menjadi Perkoempoelan Politik Katolik di Djawa, 1927.

(10) Partai Rakjat Marhaen Indonesia - Permai, dipimpin oleh J.B. Assa, 17 Desember 1945

(11) Partai Nasional Indonesia - PNI, kelanjutan dari PNI yang didirikan oleh Ir. Soekarno di Bandung, 4 Juli 1927. Kemudian dipimpin oleh S. Mangoensarkoro, 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Kedaulatan Rakjat, dipimpin oleh Soejono Hadinoto dan Partai Republik Indonesia, dipimpin oleh Soeradji.

Berikutnya, Partai Nasional Indonesia - PNI pecah menjadi empat kelompok:

Pertama, pimpinan Ali Sastroamidjojo dan Ishaq Tjokrohadisoerjo dalam menghadapi kelompok Amir Sjarifoeddin yang cenderung kepada van Mook, membangun kerjasama dengan kalangan intektual Masjoemi, Mohammad Natsir.

Kedua, kelompok muda pimpinan Wilopo, Loekman Hakim, Notowidigdo secara ideologis cenderung lebih dekat dengan Partai Sosialis Soetan Sjahrir.

Ketiga, kelompok radikalis anti Barat, dipimpin oleh Sidik Djojosoekarto dan Manai Sophian.

Keempat, kelompok Prijaji, memisahkan diri dari PNI. Dipimpin oleh Mr. Wongsonegoro dan Tadjoedin Noor, memisahkan diri dan mendirikan Partai Persatoean Indonesia Raja – PIR, 10 Desember 1948. Ganti singkatannya semula Parindra pada saat dipimpin oleh Dr. Soetomo, berubah menjadi PIR.

(12) Partai Komunis Indonesia - PKI, dipimpin oleh Alimin, 11 Januari 1947.[23] Kelanjutan dari Perserikatan Kommoenist di India - PKI, 23 Mei 1920, di Semarang dipimpin oleh Samaoen, Dharsono dan Tan Malaka. Dengan adanya penangkapan dan pembuangan pimpinan PKI ke Boven Digoel Papoea, 1927 M, Samaoen dan Dharsono berada di Rusia. Sedangkan Tan Malaka di Bangkok mendirikan Partai Repoeblik Indonesia - PARI, 1927 M.

Akibat Rusia menjadi anggota Sekoetoe pada Perang Dunia II, pimpinan PKI yang sedang dalam pembuangan Boven Digoel dipindahkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Australia. Di sini, di bawah pimpinan Sardjono mendirikan PKI Sibar termasuk Komunis Internasional –Komintern atau PKI yang tunduk kepada Rusia.

Pada 5 Oktober 1945 bersama van Mook kembali ke Indonesia, PKI Sibar pimpinan Sardjono menentang Proklamasi 17 Agustus 1945 dan bersikap pro Keradjaan Protestan Belanda. Tindakan ini kontra dengan komunis nasionalis atau Partai Moerba pimpinan Tan Malaka. Pada 3 Juli 1946, Tan Malaka melakukan kudeta terhadap pemerintah RI periode Kabinet Sjahrir.

PKI pimpinan Mr. Mohammad Joesoef didirikan 7 November 1945, mempelopori melancarkan kudeta di Ceribon, 12 Februari 1946, dengan dukungan Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo.

23 Berdasarkan keterangan Alimin, dalam Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Pepora 8, *Kepataian di Indonesia*, h. 281 PKI didirikan lagi pada 11 Januari 1945. Dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka*, dituliskan berdirinya Partai Komunis Indonesia - PKI pada 7 November 1945, dipimpin oleh Mr. Moh. Joesoef. Dijelaskan pula, PKI telah didirikan sebelumnya, 21 Oktober 1945.

(13) Partai Rakjat Indonesia - PRI, dipimpin Soetomo[24] atau lebih dikenal dengan panggilan Boeng Tomo dari Barisan Pemberontakan Rakjat Indonesia - BPRI, 20 Mei 1950. Latar belakang pembentukan partai ini, akibat terbentuknya Tentara Nasional Indonesia - TNI maka semua lasykar kesenjataan ditiadakan. Demi memberikan wadah aktivitas mantan anggota dan pimpinan Barisan Pemberontakan Rakjat Indonesia dalam berpatisipasi aktif melanjutkan perjuangan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 maka didirikanlah Partai Rakjat Indonesia. Namanya mempunyai kesamaan dengan Partai Rakjat Indonesia sebagai pecahan dari PNI, dipimpin oleh M.Tabrani pada 14 September 1930.

(14) Partai Kebangsaan Indonesia - Parki, dipimpin oleh S. Soeradiradja, Mr. Kosasih, dan Soetisna Sendjaja. Nama Parki bermula dari Pagoejoeban Pasoendan,1914M, dipimpin oleh Daeng Kanduran Ardi Winata. Berdasarkan keputusan konferensi di Bandung pada Januari 1949 nama Pagoejoeban Pasoendan menjadi Partai Kebangsaan Indonesia - Parki.

Perubahan nama Pagoejoeban Pasoendan tahun 1946 di Yogyakarta berubah menjadi Pagoejoeban Pasoendan Repoeblik Indonesia. Pada 1948 di Bandung berubah lagi ke nama asal Pagoejoeban Pasoendan. Kemudian, berubah menjadi Partai Kebangsaan Indonesia - Parki,1949 M.[25].

Dari adanya sistem multipartai menyusul bermuncullah partai-partai gurem yang sangat banyak. Tidak lagi memenuhi syarat kepartaian yang mempunyai perwakilan dan pengaruh di seluruh Nusantara Indonesia. Hanya mempunyai nama partai dan dipimpin oleh sekelompok kecil pengurus pusat, yang sebenarnya nama-namanya pun tidak dikenal oleh orang di kota tempat berdirinya partai tersebut dan tidak memiliki latar belakang sejarah pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia (1900-1942 M).

Dengan adanya Makloemat 3 November 1945 dari Wakil Presiden Mohammad Hatta, sangat membingungkan umat Islam. Para Ulama pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364, sudah menyetujui Pantjasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Tiba-tiba, dengan adanya desakan dari Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin, kemudian Wakil Presiden Mohammad Hatta menyetujui adanya sistem multipartai, tanpa Presiden Soekarno dan tanpa menandaskan ideologinya harus sejalan dengan Pantjasila yang tertera dalam Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945. Akibatnya, mengizinkan PKI dengan ideologi Marxis yang mengajarkan

24 Sutomo (Bung Tomo), 2008. *Menembus Kabut Gelap Bung Tomo Menggugat*. Visimedia. Jakarta, hlm. 61-101

25 Kementerian Penerangan, Pepora 8, *Kepartaian Indonesia*, hlm. 207.

agama dinilai sebagai candu bagi rakyat dan bertujuan menciptakan *classless society* - masyarakat tanpa kelas. [26]

Kemudian, Kabinet Presidential diubah menjadi Kabinet Parlementer, dengan pengertian Kabinet bertanggung jawab ke Parlemen. Dengan demikian, UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945, kewenangan Presiden dialihkan ke Perdana Menteri sejak terbentuknya Kabinet Soetan Sjahrir I.

> Perubahan ini, tidak menjamin stabilitas situasi dalam negeri. Rakyat tetap setia kepada Dwi Toenggal Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Oleh karena itu, berdasarkan Makloemat Presiden No. 1 tanggal 29-6-1946, kekuasaan eksekutif dikembalikan lagi ke Presiden. Dengan demikian, para Menteri bertanggung jawab kepada Presiden.
>
> Hal ini terjadi sebagai upaya mengatasi kegentingan situasi adanya penculikan Perdana Menteri Soetan Sjahrir di Solo pada 27 masuk 28 Juni 1946. Penculikan ini dinilai sebagai usaha perebutan kekuasaan negara yang dilancarkan oleh:
>
> Tan Malaka, Mr. Soebardjo, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, Soekarni, Mr. Mohammad Yamin.[27]

Dari BKR menjadi TKR

Kelompok Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin, sebenarnya tidak akan berhasil melakukan perubahan apapun, bila tanpa dukungan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang sangat dikenal rakyat dari Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu, kedua pembatalan keputusan KNIP: *Pertama*, dibentuknya BPKNIP. *Kedua*, diubahnya Kabinet Presidential menjadi Kabinet Parlementer dengan sistem multipartai, tidak mungkin terjadi bila tanpa dukungan Wakil Presiden Mohammad Hatta [28]

---

26 *Kedaulatan Rakjat*, 29-11-1945 mengangkat berita *Pendapatan2 dan oesoel Anggota K.N.I. Poesat.* Diberitakan Ketua BP KNIP memberikan kesempatan kepada para anggota K.N.I. Poesat untuk menyatakan pendapatnya. Antara lain: Tabrani menyatakan yang paling baik satu partai saja yang berjuang menegakkan kemerdekaan. Mr. Soenarjo tidak setuju pengalihan kekuasaan Presiden ke Perdana Menteri. Chaeroel Saleh menolak penambahan anggota K.N.I. Poesat dengan orang-orang yang bekerja untuk Belanda dan tidak memperjuangkan cita-cita Republik Indonesia.

27 *Kedaultan Rakjat*, 6-7-1946.

28 Pemberian dukungan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta terhadap gerakan politik Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin yang pernah bekerjasama dengan Sekutu dan penjajah Belanda sebagai akibat adanya berita bahwa segenap pimpinan nasional yang pernah bekerjasama dengan Balatentara Djepang dalam Perang Asia Timur Raya, 1941-1945 M akan diperlakukan sama dengan pimpinan Eropa yang mendukung Adolf Hitler Jerman dan Musolini Italia, dalam Perang Dunia II, 1939-1945 M, akan diseret ke Mahkamah Internasional.

Demikian pula perubahan Badan Keamanan Rakjat yang dipimpin oleh Menteri Negara Otto Iskandardinata, digantikan menjadi Tentara Keamanan Rakjat - TKR, 5 Oktober 1945, di bawah Menteri Keamanan Rakjat, Soeljo Adikoesoemo. Pimpinan Tertinggi BKR semula diangkat Soeprijadi pemberontak Tentara Pembela Tanah Air - Peta Blitar. Namun, karena tak tentu nasibnya maka Kepala Staf Umum TKR dipimpin oleh Jenderal Oerip Soemohardjo mantan KNIL yang menyelesaikan penyusunan organisasi Tentara Keamanan Rakyat -TKR pada awal pertumbuhannya.

Dalam situasi revolusi yang menyulitkan, John R.W. Smail menuturkan dalam Bandung in the Early Revolution, 1945-1946. A Study In Soccial History of Indonesian Revolution, tiba-tiba Otto Iskandardinata diculik, 20 Desember 1945, oleh Mujitaba bin Murkam, 27 th dari Lasjkar Hitam. Ditembak mati di Mauk Tangerang Banten.[29] Oleh karena itu, pimpinan Badan Keamanan Rakjat digantikan oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Namun, dengan adanya perubahan Badan Keamanan Rakjat menjadi Tentara Keamanan Rakjat, 5 Oktober 1945, maka Mr. Kasman Singomedjo dialihkan menjadi Jaksa Agung menggantikan Mr. Gatot.

Konsolidasi selanjutnya pada 15 Desember 1945, diangkatlah Boeng Dirman sebagai Panglima Besar Soedirman. Di bawah Kabinet Sjahrir I, 14 November 1945-12 Maret 1946, Menteri Keamanan Rakjat dari Soeljo Adikoesoemo digantikan oleh Amir Sjarifoedddin.

Pergantian Soeljo Adikoesoemo di atas, menurut Deliar Noer karena latar belakang Soeljo Adikoesoemo dari Jong Islamieten Bond- JIB dan Daidancho Tentara Pembela Tanah Air - Peta, Danyon Batalyon II Lumajang.[30] Tindakan Kabinet Sjahrir I ini, menurut istilah Chaeroel Saleh pimpinan nasional yang berbau Jepang, dipaksa turun tahta dan digantikan oleh pimpinan yang berbau penjajah Belanda. Dengan demikian, pada Oktober 1945, terjadi proses a silent coup dari kelompok SosialisSoetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin dengan memanfaatkan keputusan Wakil PresidenMohammad Hatta.

Demikian pula kalangan komunis nasional dan komunis internasional, menyusul melancarkan kudeta. Antara lain Mr. Mohammad Joesoep dengan Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo, menduduki Cirebon, 12 Februari 1946. Disusul oleh Tan Malaka di Jogyakarta menculik Perdana Menteri Soetan Sjahrir, 3 Juli 1946, menagih Testamen Politik dari Dwi Toenggal. Berlanjut dengan Kudeta PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin dan Moeso, 19 September 1948.

29 Dalam Pengadilan tahun 1959, Mujitaba bin Murkam, menyatakan tidak tahu siapa sebenarnya Otto Iskandardinata. Hanya melaksanakan tugas menembak seorang mata-mata NICA. Sampai sekarang tidak mengetahui siapa sebenarnya yang memerintahkan penangkapan, penculikan hingga penembakan. Hanya pada saat itu, penculikan terhadap Boeng Karno, Boeng Hatta, Iboe Fatmawati, dan P.M. Soetan Sjahrir dilakukan oleh Komunis. Apakah sama pelaku penculik Otto Iskandardinata, dalangnya adalah Komunis apabila caranya sama, yakni menggunakan sistem penculikan.

30 Ahmad Mansur Suryanegara, 1996. *Op.Cit.*, hlm. 117. Deliar Noer, 1987. *Op.Cit.*, hlm. 160.

Sikap politik Ulama bersama Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi, walaupun memiliki massa yang besar, dan Lasjkar Hizboellah dan Sabilillah tetap berpihak kepada kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Tidak pernah terbetik niat kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dengan menggunakan Tentara Keamanan Rakjat - TKR umumnya dari mantan pimpinan dan prajurit Tentara Peta, bersama Lasjkar Hizboellah dan Sabilillah, demi menegakkan Negara Islam. Timbul pertanyaan, sejak kapan sebenarnya kelompok Sosialis dan kiri, mulai melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta?

Kabinet Parlementer

Dengan terbentuknya Badan Pekerja KNIP, pada 16 Oktober 1945 sebenarnya menurut Dr. R. Soeharto telah terjadi *coup d' etat* tanpa pertumpahan darah oleh kelompok Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin. Sehubungan dengan peristiwa kudeta ini, sekali lagi menurut Chaeroel Saleh: Kelompok yang berbau Jepang dipaksa turun tahta oleh kelompok yang berbau penjajah Belanda[31].Peristiwa ini oleh Benedict R.O.G. Anderson dalam *Java in a Time of Revolution. Occupation and Resistance 1944-1946*, disebutnya sebagai *a silent coup*.

Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin, kedua-duanya bekerja untuk Sekoetoe dan penjajah Belanda dalam masa pendudukan Balatentara Djepang. Memanfaatkan kehadiran Sekoetoe tidak hanya melakukan kudeta terhadap KNIP yang dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimedjo, tetapi juga menumbangkan sistem Kabinet Presidential digantikan dengan Kabinet Parlementer. Sekaligus mengubah sistem satu partai menjadi sistem multi partai, serta Badan Keamanan Rakjat - BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakjat - TKR.

Kabinet Sjahrir I bertahan sekitar 4 bulan, 14 November 1945-12 Maret 1946. Dalam Kabinet Sjahrir I, Soetan Sjahrir menjadi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Dalam Negeri. Dengan memborong ketiga kementerian ini, Soetan Sjahrir dari Partai Rakjat Sosialis - PRS, yang baru didirikan enam hari kemudian, 20 November 1945, sebagai upaya memperlihatkan kepada pihak Sekoetoe, bahwa ketiga kementerian tersebut steril dari orang-orang yang pernah kolaborasi dengan Balatentara Djepang.

Amir Sjarifoeddin dari Partai Sosialis Indonesia - Parsi yang menggunakan 10 November 1945 sebagai hari berdirinya Parsi, diangkat sebagai Menteri Keamanan

31 Dr. R. Soeharto, 1982. *Op.Cit.*, hlm. 51.

Rakjat dan Menteri Penerangan. Betapa pentingnya kedudukan Amir Sjafroeddin, dengan kedua kementerian tersebut pada masa Perang Kemerdekaan karena kedudukannya sebagai Menteri Keamanan Rakjat menjadikan Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo memiliki senjata yang lebih baik dan lebih banyak jumlahnya. Kemudian digunakan untuk menandingi TNI dengan TNI Masjarakat. ALRI dengan AL Gunung. Tiga tahun mendatang, dengan Pesindo sebagai pasukan inti bersama Front Demokrasi Rakjat - FDR, melancarkan Kudeta PKI Madiun, 19 September 1948. Dengan menguasai Kementerian Penerangan, Amir Sjarifoeddin akan mencoba membentuk opini rakyat.

Kabinet Sjahrir II, 1 Maret-2 Oktober 1946. Pada Kabinet Sjahrir II hanya menduduki dua kementerian: Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Walaupun Partai Rakjat Sosialis - PRS baru berusia sekitar empat bulan. Namun berani menduduki kedua kementerian vital: Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri.

Demikian pula Amir Sjarifoeddin hanya menduduki satu kementerian, tetap memilih sebagai Menteri Pertahanan. Walaupun Partai Sosialis Indonesia - Parsi baru berusia empat bulan. Sedangkan Menteri Penerangan digantikan oleh Mohammad Natsir dari Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi yang didirikan pada 7 November 1945, yang benar-benar memiliki kekuatan massa yang besar dan didukung oleh organisasi kesenjataan Lasjkar Hizboellah dan Sabilillah.

> Nampaknya, Soetan Sjahrir baru menyadari realitas kekuatan Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi. Memiliki massa pendukung partai yang kongkrit dan sangat besar serta memiliki Lasjkar Hizboellah dan Barisan Sabilillah yang sangat kuat. Kebesaran kekuatan massa Partai Politik Islam Masjoemi pada masa itu, dapat diukur dengan perbandingan massanya satu kabupaten saja, sama dengan massa partai non Islam lainnya untuk seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, melihat kenyataan ini, Soetan Sjahrir khawatir bila Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi menduduki kementerian yang vital. HAgoes Salim sebagai Menteri Muda Luar Negeri. Walaupun usianya dan pengalaman kepartaiannya jauh lebih tua, hanya dijadikan Menteri Muda, pendamping pemuda Soetan Sjahrir, baru berusia 36 Tahun, dari Partai Rakjat Sosialis -PRS.

KHOEDROTOES SJEICH ROIS AKBAR
KIAI HADJI HASJIM ASJ'ARI

Toeutoetan Nahdatoel Oelama kepada Pemerintah Repoeblik.

Soepaja mengambil tindakan jang sepadan.

Resolusi wakil2 Daerah Nahdatoel Oelama seloeroeh Djawa-Madoera.

BISMILLAHIRROCHMANIR-ROCHIM.

R E S O L O E S I.

Rapat besar wakil2 Daerah (Konsoel2) Perhimpoenan NAHDATOEL OELAMA seloeroeh Djawa-Madoera pada tg. 21-22 Oktober 1945 di SOERABAJA, m e n d e n g a r:

bahwa ditiap2 Daerah diseloeroeh Djawa-Madoera, ternjata betapa besarnja hasrat Oemmat Islam dan Alim Oelama ditempatnja masing2 oentoek mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPOEBLIK INDONESIA MERDEKA;

menimbang:

a. bahwa oentoek mempertahankan dan menegakkan Negara Repoeblik Indonesia menoeroet hoekoem Agama Islam, termasoek sebagai satoe kewadjiban bagi tiap2 orang Islam.
b. bahwa di Indonesia ini warga Negaranja adalah sebagian besar terdiri dari Oemmat Islam.

mengingat:

a. bahwa oleh fihak belanda (N.I.C.A.) dan djepang jang datang dan jang berada disini, telah sangat banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang menganggoe ketenteraman.
b. bahwa semoea jang dilakoekan oleh mereka itoe dengan maksoed melanggar kedaulatan Negara Repoeblik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali berkoeasa disini, maka dibeberapa tempat telah terdjadi pertempoeran jang mengorbankan beberapa banjak djiwa manoesia.
c. bahwa pertempoeran2 itoe sebagian besar telah dilakoekan oleh Oemmat Islam jang merasa wadjib menoeroet hoekoem Agamanja oentoek mempertahankan kemerdekaan Negara dan Agamanja.
d. bahwa didalam menghadapi sekalian kedjadian2 itoe beloem mendapat perintah dan toentoenan jang njata2 dari Pemerintah Repoeblik Indonesia jang sesoeai dengan kedjadian2 terseboet.

memoetoeskan:

1. memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia, soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap tiap2 oesaha jang akan membahajakan kemerdekaan Agama dan Negara Indonesia, teroetama terhadap fihak belanda dan kaki-tangannja.
2. soepaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat „sabilillah" oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

DOK. AHMAD MANSUR SURYANEGARA

PENGANGKATAN PARA RESIDEN DAN WALI KOTA SELOEROEH SOEMATERA

TELAH DISJAHKAN OLEH P.J.M. PRESIDEN.

SEBOEAH kawat jang dikirimkan oleh P.T. Goebernoer Soematera — Mr. Teukoe Hasan —, kepada P.J.M. Presiden Repoeblik Indonesia, berboenji sbb.:

No. 1/kab:

Pertama: Dengan soerat ketetapan Goebernoer Soematera dari Negara Repoeblik Indonesia tg. 3 Oktober 1945 No. 1x sementara menoenggoe pengesahan dari Presiden Repoeblik Indonesia, telah diangkat sebagai Residen daerah:

Atjeh — Teukoe Nja Arif
Soematera Timoer — Mr. Moehammad Joesoef
Tapanoeli — Dr. F. Loemban-tobing
Soematera Barat — Moehammad Sjafei
Bengkoeloe — Ir. Indratjaja
Djambi — Dr. A. Sjagaf
Palembang — Dr. A. K. Gani
Lampoeng — Mr. Abdoel Abbas
Bangka/Billiton — Masjarif.

Kedoea: Dengan soerat ketetapan Goebernoer Soematera tg. 3-10-'45 No. 2x telah diangkat sebagai Residen jang diperbantoekan pada Goebernoer Soematera. Teng-

Ketiga: Dengan soerat ketetapan Goebernoer Soematera tg. 3-10-'45 No. 3x telah diangkat sebagai Wali Kota:

Medan — Mr. Loeat Siregar
Boekit Tinggi — Bermawi
Padang — Dr. Hakim
Palembang — Ir. Ibrahim.

Berhoeboeng dengan keangkatan2 tsb. diatas dipohonkan kehadapan P.J.M. pengesahan atas angkatan2.

Demikianlah kawat dari P. T. Goebernoer Soematera dan kabar dari Kementerian Dalam Negeri menerangkan, bahwa pengangkatan2 tsb. telah disjahkan oleh P. J. M. Presiden Repoeblik Indonesia.

★

Medan sebagai iboe kota Soematera.

Sumber: *Doc. Pribadi*

K.H. ABBAS

Pesantren Buntet Cirebon

Bersama K.H. Hasyim Asy'ari dan Bung Tomo, K.H. Abbas membangkitkan perlawanan terhadap tentara sekutu dalam Perang Sabil 10 November 1945.

Sumber: *Doc. Pribadi*

Aroedji Kartawinata dari Partai Sjarikat Islam Indonesia yang didirikan sejak 1923 M, hanya sebagai Menteri Muda Pertahanan mendampingi Amir Sjarifoeddin dari Partai Sosialis Indonesia - Parsi yang baru berusia 4 bulan. Sedangkan Sjafroeddin Prawiranegara dari Partai Islam Indonesia Masjoemi, diangkat sebagai Menteri Muda Keuangan mendampingi Ir. Surachman - PNI.

> Kedua Menteri Muda dari Partai Politik Islam Masjoemi, H. Agoes Salim dan Sjafroeddin Prawiranegara, pada masa pendudukan Jepang, termasuk Menteri Penerangan Mohammad Natsir dan Menteri Agama H. Rasjidi, sebagai intelektual Muslim yang melakukan gerakan bawah tanah anti Jepang. Sebaliknya, walaupun Aroedji Kartawinata sebagai Daidancho Tentera Pembela Tanah Air - Peta dari Cimahi, tetapi karena pernah melancarkan Pemberontakan Tentara Peta di Pangalengan Bandung Selatan, 4 Mei 1945 diangkat sebagai Menteri Muda Pertahanan.

Dengan memerhatikan pembagian kekuasaan sampai dengan pada Kabinet Sjahrir II di atas, dan pendistribusian jabatan Pamong Pradja yang diserahkan kepada mantan Pangreh Pradja pemerintahan kolonial Belanda, para Ulama setelah Proklamasi, tidak menjadikan partai politik dan organisasi kesenjataannya untuk dapat menduduki kekuasaan strategis kementerian dan kepamong prajaan.

Kabinet Sjahrir III, 2 Oktober 1946-27 Juni 1947. Kabinet Sjahrir III disebut pula sebagai Kabinet Koalisi. Pada Kabinet Sjahrir III, Soetan Sjahrir tetap menduduki dua kementerian: Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dengan Menteri Muda H. Agoes Salim. Di dalam kabinetnya, terdapat tiga menteri wakil etnis. Pertama, wakil komunitas Arab - A.R. Baswedan sebagai Menteri Muda Penerangan. Kedua, wakil komunitas Cina - Mr. Tan Po Goan sebagai Menteri Negara. Ketiga, wakil komunitas Indo-Eropa - Setiabuddi Douwes Dekker[32] sebagai Menteri Negara.

Selain itu, Maria Oelfah Santoso - non partai, untuk pertama kalinya seorang wanita diangkat menjadi menteri, Menteri Sosial. S.P. Hamengkoe Boeana IX untuk pertama kalinya seorang Sultan diangkat sebagai Menteri Negara. Wikana yang pernah menculik Boeng Karno dan Boeng Hatta serta Iboe Fatmawati ke Rengasdengklok. Wikana sejak Kabinet Sjahrir II dan III, diangkat menjadi Menteri Negara sebagai wakil komunis. Untuk pertama kalinya ada menteri wakil dari komunis.

---

32 Setiabuddi Douwes Dekker, pendiri Indische Partij, 1912 M, di Bandung, beragama Islam. Keturunan dari Douwes Dekker Multatuli terkenal dengan bukunya Max Havelaar yang menuturkan penderitaan para petani muslim yang terindas di Lebak Jawa Barat oleh sistem Tanam Paksa ,1830-1919 M.

Perlu diperhatikan, dalam Kabinet Sjahrir III ini, Menteri-menteri yang berasal dari Partai Politik Islam Masjoemi, tidak mengatasnamakan partainya. Melainkan sebagai individu: Mr. Mohamad Roem - Menteri Dalam Negeri. Mr. Sjafroeddin Prawiranegara - Menteri Keuangan. Mr. Joesoef Wibisono - Menteri Muda Kemakmuran. Fatoerrachman - Menteri Agama. Wachid Hasjim - Menteri Negara, kembali kedudukannya sama dengan dalam Kabinet Presidential. Harsono Tjokroaminoto - Menteri Muda Pertahanan. Mohammad Natsir - Menteri Penerangan.

Kedaulatan Rakjat

TG. 17: PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN INDONESIA.

Kota Ambarawa seloeroehnja ditangan kita.

Moesoeh melarikan diri ke Semarang.

Tepat tg. 10 Soero, hari kemenangan di Ambarawa.

Hari Kemerdekaan.

DOK. AHMAD MANSUR SURYANEGARA

Sumber: *Dok. Pribadi*

Realitas pembagian kekuasaan di atas dan orang-orang Partai Politik Islam Masjoemi dan Partai Sjarikat Islam Indonesia, bersedia diatur oleh Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin dari PRS dan Parsi, dan bersedia pula diangkat sebagai menteri dengan tanpa nama partai politiknya karena adanya pengaruh ancaman dari luar negeri. Akibat diisukan kolaborator Fasisme Jepang akan ditangkap dan diadili sebagai penjahat perang dalam Mahkamah Internasional.

K.H. ZAINUL ARIFIN

Panglima **Keikyo Seinen Teisintau** atau Hizboellah
Kapten Yanagawa menjelaskan dalam dua bulan telah melatih
sejumlah 50.000 Keikyo Seinen Teisentau atau Hizboellah
dari 400.000 Hizboellah, pada September 1943
di bawah kordinasi Panglima K.H. Zainul Arifin

Dengan adanya Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi. 9 Ramadhan 1364,
diikuti dengan terbentuknya Partai Islam Islam Indonesia Masjoemi,
7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364,
dibentuklah Barisan Sabilillah di bawah komando K.H. Masjkoer
dan Lasjkar Hizboellah di bawah komando K.H. Zainul Arifin.
keduanya merupakan Barisan Istimewa Tentara Keamanan Rakjat - T.K.R.

Sumber: Doc. Pribadi

Resoloesi Djihad Dalam Perang Kemerdekaan

Ulama tidak memerhatikan pergumulan perebutan kursi eksekutif dengan kementeriannya, dan legislatif dengan BP KNIP serta Kementerian Keamanan Rakjat seperti yang diperankan oleh pimpinan Sosialis dan Komunis yang pernah kerjasama dengan Sekoetoe atau penjajah Belanda. Masalah pemerintahan atau eksekutif, para Ulama menyerahkan kepercayaannya mutlak kepada Dwi Tunggal Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Berangkat dari pengalaman kelembagaan Pesantren yang lama dipimpinnya, Ulama hanya memiliki makna lawannya adalah imperialis Barat, yakni Keradjaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Ulama tidak terlatih mengembangkan sikap untuk berprasangka pada lawannya dari pimpinan partai politik bangsa sendiri dari kelompok Sosialis dan Komunis.

Oleh karena itu, fokus perhatiannya dalam mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 hanya dengan angkat senjata dalam organisasi kesenjataan, baik dalam Lasjkar Hizboellah, Sabilillah bersama BKR, TKR, TRI dan TNI, selama Perang Kemerdekaan 1364-1369 H/1945-1950 M, melawan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA.

Dengan adanya pendaratan Tentara Sekoetoe dan NICA di Jakarta, Semarang dan Surabaya, serta Sumatra, 29 September 1945, sedangkan pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan perlawanan yang nyata terhadap tindakan NICA dan Balatentara Djepang maka Rapat Besar Wakil2 Daerah (Konsoel 2) Perhimpoenan Nahdlatoel Oelama seluruh Jawa dan Madura, 21-22 Oktober 1945, Ahad Legi-Senin Pahing, 14-15 Dzulqaidah 1364 mengajukan Resoloesi Djihad,[33] pada pemerintah Republik Indonesia:

> memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia, soepaja menentoekan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap tiap2 oesaha jang akan membahajakan kemerdekaan Agama dan negara Indonesia, teroetama terhadap fihak Belanda dan kaki-tangannja.
>
> soepaja memerintahkan melandjoetkan perdjoeangan bersifat "sabiloellah" oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

33 *Kedaulatan Rakjat,* 26 – 10 1945, Djoemat Legi, 20 Doelkaidah 1364. Periksa Choirul Anam. 1990. *Gerak Langkah Pemuda Ansor. Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran.* Majalah Nahdlatul Ulama AULA. Surabaya, hlm. 45 menjelaskan perumusan *Resoloesi Djihad* tersebut diadakan di kantor Pengoeroes Besar Ansor Nahdlatoel Oelama – ANO, di Jln. Bubutan VI/2 Surabaya. Bukan di kantor Pengoeroes Besar Nahdlatoel Oelama Jalan Sasak 23 Surabaya.

Resoloesi Djihad di atas, pada saat terbentuknya Partai Islam Indonesia Masjoemi, di Jogyakarta 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364, menjadi Resoloesi Djihad dari Moe'tamar Oemmat Islam Indonesia. Antara lain:

> Bahwa tiap2 bentoek pendjadjahan adalah soeatoe kezaliman jang melanggar perikemanoesiaan dan njata2 diharamkan oleh Agama Islam, maka 60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap Berdjihad Fi Sabilillah. Perang Di djalan Allah Oentoek Menentang Tiap-tiap Pendjadjahan. [34]
>
> Memperkoeat pertahanan Negara Indonesia dengan berbagai oesaha, maka disoesoenlah soeatoe barisan jang diberi nama: Barisan Sabilillah, dibawah pengawasan Masjoemi.
>
> Barisan ini adalah menjadi Barisan Istimewa dari Tentara Keamanan Rakjat - T.K.R.
>
> Keputusan Moe'tamar Oemmat Islam Indonesia di bidang organisasi kesenjataan di kalangan Ulama dengan nama Barisan Sabilillah di atas, 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364 sebagai kelanjutan dari telah terbentuknya 68 Batalyon Tentara Pembela Tanah Air - Peta, 3 Oktober 1943, dan 400.000 Barisan Hizboellah - Tentara Allah, September 1943,[35] pada masa Pendudukan Balatentara Djepang 1942-1945 M.

Nugroho Notosusanto menjelaskan bahwa Kapten Yanagama selama dua bulan melatih 50.000 Kaikyo Seinen Teisintai atau Hizboellah - Tentara Allah sebagai pembantu Tentara Pembela Tanah Air - Peta.[36] Keduanya, Tentara Pembela Tanah Air - Peta dan Hizboellah - Tentara Allah, serta Barisan Sabilillah sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi pendukung utama terbentuknya Tentara Keamanan Rakjat, 5 Oktober 1945, Djoemat Kliwon, 29 Sjawwal 1364.

---

34 *Kedaulatan Rakjat*, 9-11-1945 Djoemat Kliwon, 4 Besar (Dzulhijjah) 1364.

35 Harry J. Benda, 1980. *Op.Cit.* hlm. 216 menyebutkan pada 8 Desember 1943 pemu da Indonesia yang mendaftarkan diri menjadi sukarelawanan Hizboellah sebanyak 400.000. Kemudian yang dilatih oleh Yanagawa hanya 500 pemuda sukarelawan Hizboellah, Desember 1944. Benedict R.O'G. Anderson, 1972. *Java in a Time of Revolution. Occupation and Resistance 1944-1946*, h. 26 setelah 500 pemuda dilatih sebagai sukarelawan Hizboellah, pulang ke kampung halamannya, dan berhasil melatih 50.000 Lasjkar Hizboellah.

36 Nugroho Notosusanto, 1979. *Op.Cit.*, hlm. 47.

DOK. AHMAD MANSUR SURYANEGARA

DJOEM'AT-KLIWON 9-11-1945

Telp. Pemimpin Oemoem di Kantor 642, di roemah 634.
Telp. roem. Wk. Pem. Oem. 624
Telp. Redaksi: No. 626, 656, 655.
Telp. roemah No. 623, 627, 862.
Telp. Administrasi: No. 635.

Kedaulatan Rakjat

TAHOEN 1 — DITERBITKAN OLEH „BADAN OESAHA PENERBITAN NASIONAL INDONESIA" JOGJAKARTA. — NOMOR 28.

4 BESAR-EHE-.

Alamat Kantor Redaksi
Administrasi: Malioboro
Harga adpertensi sebaris
Harga langg. seboelan
ditambah f 1.— boeat Kemerdekaan.

60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap Berdjihad Fi Sabilillah.

Perang didjalan Allah oentoek menentang tiap-tiap pendjadjahan.

Partij Masjoemi sebagai badan perdjoeangan politik Oemmat Islam.

Poetoesan2 Moe'tamar Islam Indonesia

RESOLOSI.

Moe'tamar Oemmat Islam Indonesia di Jogjakarta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

Moe'tamar Oemmat Islam Indonesia jang diadakan di Jogjakarta tanggal 1-2 Zoelhidjdjah 1364- (7-8 November 1945) jg mewakili seloeroeh Oemmat Islam di Indonesia jang berdjoemlah koerang lebih 65 miljoen djiwa, setelah menindjau perdjoeangan bangsa Indonesia dalam waktoe jang achir2 ini dalam menegakkan Kedaulatan Negara Repoeblik Indonesia sebagai satoe sjarat moetlak oentoek kesempoernaan berdjalannja Agama Islam, maka ternjatalah bahwa tindakan2 dari fihak Imperialisme Belanda dan komplotannja membahajakan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Repoeblik Indonesia.

Menimbang:

1. Bahwa tiap2 bentoek pendjadjahan adalah soeatoe kezaliman jang melanggar peri kemanoesiaan ...

3. ... Masjoemi sebagai Poesat Persatoean Oemmat Islam Indonesia, sehingga dapat menegakkan dan memimpin perdjoeangan ...

BARISAN SABILILLAH.

Oentoek mendjalankan kepoetoesan Konggres Oemat Islam Indonesia Jogjakarta pada tg. 1-2-Zoelhidjah-1364 (7-8/11-'45) dalam mana ditegaskan, bahwa:

1. Memperkoeat persiapan Oemmat Islam oentoek berdjihad fi sabilillah.
2. Memperkoeat pertahanan Negara Indonesia dengan berbagai-bagai oesaha, maka disoesoenlah soeatoe barisan jg diberi nama: Barisan Sabilillah, dibawah pengawasan Masjoemi, jg peratoerannja sbb:

1. Hal Anggota:
Jang mendjadi anggota Barisan ini ialah Oemmat Islam.
2. Hal Pimpinan:
Poesat Pimpinan Barisan ini bernama: Markas Besar Sabilillah; jang terdiri dari 5 orang, antaranja seorang ahli siasah, 2 orang ahli Agama dan 2 orang ahli peperangan.

Ditiap-tiap Daerah diadakan Markas Sabilillah Daerah, ialah di daerah Djawa Timoer, Djawa Tengah dan Djawa Barat jang masing-masing terdiri 9 orang.

Ditiap-tiap Karesidenan diadakan Markas Sabilillah Karesidenan, jang masing2 terdiri dari 7 orang.

Ditiap-tiap Kaboepaten diadakan Markas Sabilillah Kaboepaten, jang masing2 terdiri dari 5 orang.

Barisan ini adalah mendjadi barisan istimewa dari pada Tentera Keamanan Rakjat (T.K.R.)

2. Rakjat Indonesia Oemoemnja dan Oemmat Islam Indonesia choesoesnja.

Pengoemoeman Markas Tertinggi T. K. R.

PANGGILAN.

Rapat Oemoem Oemmat Islam Indonesia.

DI JOGJAKARTA

Sumber: Dok. Pribadi

Bambu Runcing Kiai Soebhi Parakan Magelang

Di luar kebijakan pemerintah Repoeblik Indonesia, setelah rakyat mendengar Proklamasi 17 Agustus 1945 dan adanya pendaratan Tentara Sekoetoe yang disertai dengan NICA, 29 September 1945, para Ulama dan pemuda, serta Barisan Pemberontakan Rakjat Indonesia yang dipimpin oleh Boeng Tomo, berinisiatif membentuk organisasi kesenjataan untuk memperoleh senjata dari Balatentara Djepang.

Menurut George McTurnan Kahin, timbul penyerangan ke markas-markas Balatentara Djepang di Bandung, Garut, Surakarta, Jogyakarta, dan Semarang, untuk merebut senjata yang digunakan untuk mengadakan perlawanan terhadap Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA. M.C. Ricklefs menuturkan Laksamana Shibata Yaichiro, Panglima senior Jepang, memihak Repoeblik Indonesia, membuka pintu gudang persenjataan Jepang kepada para pemuda Indonesia.

Ketika seorang Kapten Angkatan Laut Belanda (tidak disebutkan namanya) tiba di Surabaya, Laksamana Shibata Yaichiro menyerah kepadanya pada 3 Oktober 1945. Tetapi memerintahkan seluruh pasukannya menyerahkan senjatanya kepada rakyat Indonesia yang akan betanggung jawab penyerahan senjata tersebut kepada Sekoetoe. Tentu, tidak mungkin rakyat Indonesia menyerahkan senjata tersebut kepada Sekoetoe. Justru digunakan untuk melawan Tentara Sekoetoe Inggris.

Boeng Tomo dari Barisan Pemberontakan Rakjat Indonesia memberikan komando, jangan sampai menyerahkan senjata sepucuk pun kepada Tentara Sekoetoe Inggris, kecuali Sekoetoe mengakui kemerdekaan Indonesia 100%. Tidak terbayangkan oleh Ulama dan Santri, betapa kuatnya Tentara Sekoetoe Inggris dengan bom pemusnahnya yang telah melumatkan segenap kehidupan di kota Hirosima dan Nagasaki. Dengan Bamboe Roencing, Ulama dan Santri bertekad baja Djihad Fi Sabilillah mempertahankan Proklamasi, walaupun harus berhadapan dengan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA yang memiliki senjata pemusnah.

Boeng Karno dan Boeng Hatta dengan proklamasi kemerdekaan, telah membangkitkan semangat keberanian luar biasa. Rakyat menjadi tidak takut kepada Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA sebagai pemenang perang dalam Perang Dunia II, 1939-1945 M, dan Perang Asia Timur Raya, 1941-1945 M. Negara-negara imperialis Barat dan Timur seperti Jerman, Italia dan Jepang telah ditundukkan. Akan tetapi, tidaklah demikian dengan bangsa Indonesia.

BOENG TOMO atau SOETOMO

Pembangkit Semangat *Djihad Fi Sabililah* mempertahankan
Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364
melalui Radio Pemberontak Repoeblik Indonesia memanggil Ulama dan Santri menjawab
ultimatum Tentara Sekoetoe dan NICA di Surabaya,
10 November 1945, Sabtu Legi, 4 Dzulhijjah 1364.
Pidatonya selalu diakhiri dengan Takbir:
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

Bangsa Indonesia punya satu keyakinan: Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapuskan di atas dunia karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Keyakinan ini melahirkan tekad: Sekali Merdeka Tetap Merdeka, Lebih Baik Mati Berkalang Tanah dari pada Hidoep Didjadjah.

Tekad yang meluap semakin bangkit dan berubah menjadi kekuatan yang tak kenal rasa takut, setelah para Ulama membangun Lasjkar Sabilillah, mendampingi Lasjkar Hizboellah - Tentara Allah, ikut serta terjun memimpin pertempuran dalam Perang Kemerdekaan. Gugur dalam pertempuran melawan imperialis diyakini sebagai mati syahid. Kematian yang indah menuju Firdaus dan memperoleh ampunan Allah Swt.

Perang Kemerdekaan membela Proklamasi 17-8-1945, Djoemat Legi, 9 Ramadhan 1364, tidak dapat dihindari dari pengaruh semangat religius yang Islami karena perang dicengkam rasa takut yang kuat hanya didorong oleh keyakinan agama, akan bangkit keberanian menantang maut. Tidakkah Tentara Sekoetoe ketika melakukan pendaratan di Normandia yang dipimpin oleh Jenderal Eisenhouwer dalam membangkitkan keberanian Tentara Sekoetoe disertai dengan bunyi lonceng Gereja.

Oleh karena itu, Boeng Tomo dalam membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia dalam menghadapi pendaratan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA yang akan menegakkan kembali penjajahan, melalui Radio Pemberontakan di Surabaya, dibangkitkan dengan Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam penutup pidato radionya.

Mohammad Natsir menjelaskan mengapa Boeng Tomo harus meneriakkan Takbir Allahu Akbar dalam menutup pidato Radio Pemberontakan. Jawabnya karena Boeng Tomo memahami siapa yang tepat menjadi teman dalam membela tanah air dan bangsa serta agama dari ancaman Tentara Sekoetoe dan Nica, kecuali Ulama dan umat Islam.

Apalagi setelah Resoloesi Djihad Nahdlatoel Oelama, 22 Oktober 1945, Senin Pahing, 15 Dzulqaidah 1364, di Surabaya, berkembang menjadi Resoloesi Djihad Partai Politik Islam Indonesia Masjoemi, 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364, pengaruhnya membangkitkan semangat 60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap Berjihad Fi Sabilillah.

Untuk merealisasi Resoloesi Djihad tersebut, Kiai Soebhi dari Parakan Magelang, mengubah Bamboe Roencing yang pejal tidak berongga, khas Parakan penuh doa, sebagai senjata pembangkit keberanian para Lasjkar Hizboellah yang ikut serta dalam Perang Kemerdekaan.

Sumber: *Mohamad Roem*

IBU FATMAWATI DAN PRESIDEN SOEKARNO

Sesudah Proklamasi dan masa Perang Kemerdekaan, 1864-1369 H/1945-1950 M
ketika masih dekat dengan Ulama. Terlihat dari busana Ibu Fatmawati yang Islami.

Kemudian diikuti setiap kota, segenap lasjkar mempersenjatai dirinya dengan Bamboe Roencing. Demikian pula rakyat secara spontan mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam, keris, pedang, tombak, rencong, dan bamboe roencing, siap menghadapi serangan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA.

Dalam penulisan Sejarah Indonesia, nama Kiai Soebehi ditiadakan kemudian disebutkan nama Tan Malaka sebagai pendiri Barisan Bamboe Roencing. Padahal, realitas sejarahnya, Lasjkar Hizboellah yang banyak menggunakan Bamboe Roencing khas Kiai Soebhi sebagai senjatanya.

> Dengan adanya Resoloesi Djihad Nahdlatoel Oelama, 22 Oktober 1945, Senin Pahing, 15 Dzulqaidah 1364, dan panggilan Takbir dari Boeng Tomo, hadirlah para Ulama antara lain: Choedrotoes Sjeich Rois Akbar K.H. Hasjim Asj'ari dari Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. K.H. Asjhari dan Kiai Toenggoel Woeloeng dari Djogjakarta. K.H. Abbas dari Pesantren Buntet Cirebon dan K.H. Moestafa Kamil dari Partai Sjarikat Islam Garut Jawa Barat, ikut serta memimpin Palagan Surabaya.
>
> Kehadirannya membangkitkan para Ulama untuk berpartisipasi dalam Barisan Sabilillah, bersama pemuda dan santri yang tergabung dalam Gerakan Pemoeda Islam Indonesia, 2 Oktober 1945, dan Lasjkar Hizboellah, bertujuan menghadang pendaratan Tentara Sekoetoe dan NICA yang akan menegakkan kembali penjajahan di Indonesia.

Ulama dan Santri Kontra Tentara Sekoetoe

M.C. Ricklefs menuturkan pada Oktober dengan mendaratnya Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA di P. Jawa dan Sumatra, pecahlah pertempuran di P. Jawa dan Sumatra. Para pemuda Republik menyerang bekas interniran Belanda, bekas serdadoe Belanda, dan Indo-Eropa yang pro Belanda.

Beda dengan Angkatan Laut Djepang di Jakarta ataupun di Surabaya berpihak kepada Repoeblik Indonesia. Sebaliknya, Angkatan Darat Djepang menentang Proklamasi 17 Agustus 1945. Akibatnya Angkatan Darat Djepang dinilai bukan lagi sebagai Saudara Tua. Melainkan bersikap memihak kepada Sekoetoe maka terjadilah penyerangan pemuda terhadap markas Angkatan Darat Djepang.

Pada 3 Oktober 1945, Kempetai membantai pemuda di Pekalongan. Dampaknya pecahlah perlawanan pemuda terhadap Jepang di Semarang. M.C. Ricklefs menuturkan jumlah korban di pihak Jepang 500 orang, sedangkan di pihak pemuda 2.000 orang. Mungkinkah terjadi perlawanan pemuda dengan korban demikian besar, kalau kemerdekaan Indonesia sebagai "hadiah dari Balatentara Djepang" menurut tuduhan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA?

Selanjutnya, Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA mendaratkan 6.000 serdadoe Goerkha dari India pada 25 Oktober 1945 di Surabaya. Bertujuan mengambil interniran Belanda dari Jepang. Para Ulama dan Santri tidak percaya. Disambutlah dengan Resoloesi Djihad, 22 Oktober 1945, Senin Pahing, 15 Dzulqaidah 1364, berdampak para Kiai dan Santri dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, membanjiri kota Surabaya.

Apalagi dibangkitkan pula semangat juangnya oleh Boeng Tomo, 1920-1981, melalui Radio Pemberontakan Rakjat Indonesia, pecahlah Perang Sabil tidak dapat dihindarkan lagi. Perlawanan Ulama dan Santri ini, yang dibakar Semangat Jihadnya, sembilan hari kemudian menjadikan terbunuhnya Brigadir Djenderal Mallaby pada 31 Oktober 1945.

Tentara Sekoetoe Inggris tidak pernah kehilangan Perwira Tingginya dalam Perang Dunia II, 1939-1945 M. Mengapa baru sebulan setelah pendaratan 29 September 1945, pada 31 Oktober 1945, Rebo Legi, 24 Dzulqaidah 1364, kehilangan seorang Perwira Tinggi, Brigadir Djenderal Mallaby?

Padahal, Tentara Keamanan Rakjat - TKR baru beberapa hari dibentuk, 5 Oktober 1945, Djoemat Kliwon, 29 Sjawwal 1364, dan Resoloesi Djihad baru dikumandangkan, 22 Oktober 1945, Senin Pahing, 15 Dzulqaidah 1364, telah berhasil mengorganisasikan perlawanan Ulama dan Santri yang membuahkan tewasnya Perwira Tinggi Tentara Sekoetoe Inggris Brigadir Djenderal Mallaby pada 31 Oktober 1945, Rebo Legi, 24 Dzulqaidah 1364.

Suatu prestasi Perang Kemerdekaan yang luar biasa. Pengaruh Resoloesi Djihad Nahdlatoel Oelama 22 Oktober 1945/15 Dzulqaidah 1364 dan pidato radio Boeng Tomo dari Barisan Pemberontakan Rakjat Indonesia, behasil memobilisasikan potensi Ulama dari Barisan Sabililah, bekerja sama dengan Tentara Keamanan Rakyat -TKR yang baru dibentuk 5 Oktober 1945/29 Sjawwal 1364 dan didukung oleh Lasjkar Hizboellah serta para Santri, berhasil mematahkan Perwira Tinggi Tentara Sekoetoe dan NICA yang berpengalaman memenangkan Perang Dunia II.

Major Djenderal R.C. Mansergh Komandan Tentara Angkatan Darat Sekoetoe memberikan ultimatum kepada segenap rakyat Indonesia agar menyerahkan senjatanya, paling lambat jam 06.00 pagi 10 November 1945. Ultimatum ini tidak didengar oleh rakyat. Walaupun Tentara Sekoetoe Inggris ditambah dengan Divisi India Ke-5. Jumlah seluruh kekuatan Tentara Sekoetoe dan NICA serta Goerkha sekitar 15.000 orang. Dibantu dengan senjata pemusnah meriam-meriam dari kapal penjelajah Sussex dan beberapa kapal Destroyer - perusak, serta pesawat Mosquito dan Thurderbolt dari Royal Air Force Inggris. Namun, tidak mampu memadamkan semangat kemerdekaan yang sedang membara di hati rakyat.

Di tengah Takbir Allahu Akbar, walaupun hanya menggenggam, Bamboe Roencing, para Ulama dan Santri maju terus pantang mundur. Mati dalam pertempuran melawan penjajah Barat, diyakini sebagai mati yang indah, gugur sebagai Syuhada. Bagaimanapun kuatnya senjata imperialis Barat, tidak mungkin mampu memadamkan semangat Ulama dan Santri yang hatinya sedang terpana oleh rasa cinta terhadap keagungan nilai kemerdekaan. Lebih baik gugur sebagai syuhada daripada hidup terjajah.

Perang Sabil 10 November 1945, Sabtoe Legi, 4 Dzulhijjah 1364, di Surabaya, menampakkan keagungan semangat rela berkorban harta dan keberanian jiwa yang tiada hingga para Ulama dan Santri bersama Tentara Keamanan Rakjat - TKR. Surabaya berubah menjadi lautan api dan darah.

Kedaulatan Rakjat

Pertjobaan moesoeh mereboet Setasioen Bandoeng digagalkan.

Lebih baik Bandoeng djadi laoetan api, dari pada djatoeh ketangan moesoeh.

Kata seorang pendekar Wanita.

moesoeh moelai lemah

Di Ambarawa

Permintaan soepaja United Nations menarik kembali

Di Soerabaja

DOK. AHMAD MANSUR SURYANEGARA

Sumber: Doc. Pribadi

Dunia tidak membiarkan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA, melancarkan pembantaian yang melanggar Hak Asasi Manusia - HAM. Antara lain protes keras Ali Jinnah dari Perserikatan Moeslimin India dan Jawaharlal Nehru dari India, memprotes penggunaan Tentara Goerkha untuk menindas bangsa Indonesia. Pertempuran Surabaya 10 November 1945, Sabtoe Legi, 4 Dzulhijjah 1364, yang menunjukkan jiwa patriotik penuh keberanian dari para Ulama dan Santri, diperingati sebagai Hari Pahlawan.

> Para Ulama dan Santri merasa terpanggil kembali untuk melanjutkan perjuangan para Ulama terdahulu antara lain: Fatahillah dan Sjarief Hidajatoellah dari Jayakarta dan Cirebon. Kiai Tapa dari Banten. Kiai Kadjoran dari Surakarta. Sjech Joesoef dari Makassar. Imam Bonjol dari Sumatra Barat. P. Diponegoro, Sentot Alibasa Prawirodirdjo, Kiai Madja, dari Yogyakarta. Teuku Tjik Di Tiro dari Aceh. Hadji Wasjid dari Cilegon Banten. Kiai Rofingi dari Pekalongan. Kasan Moekmin dari Sidoarjo. Hadji Hasan dari Garut. Kiai Nawawi dari Banten. Kiai Zainal Moestofa dari Singaparna, dan yang lainnya.

Setelah Surabaya, menyusul Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA pada 21 November 1945 memberikan ultimatum rakyat Bandung agar meninggalkan Bandung Utara dan tidak dibolehkan mendekati tempat *Rapwi* dan tempat yang dijaga Balatentara Djepang, berjarak 200 meter. Rakyat agar menyerahkan senjatanya yang diperoleh dari Balatentara Djepang. Ultimatum berlaku sampai 29 November 1945 jam 12 siang. Ultimatum inipun tidak dipedulikan oleh rakyat. Dampaknya, terjadilah pertempuran di Pabrik Kina, Balai Besar Kereta Api, Kantor Pekerjaan Umum dan PTT. Kini, berada dalam kompleks Gubernuran dan DPRD Jawa Barat.

Lasjkar Wanita dalam Bandung Lautan Api

Dalam pertempuran sengit di Bandung Utara, tidak hanya para pemuda saja yang berani menghadang Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA. Namun, juga diberitakan oleh *Kedaulatan Rakjat*, 3-12-1945, bahwa Soemirah Jati, isteri Aroedji Kartawinata dari Lasjkar Wanita Indonesia yang didirikan pada 12 September 1945 mengingatkan segenap kaum wanita agar berjuang bersama kaum pria:

> Seperti isteri2 zaman Rasoeloellah saw di masa damai mereka menjelenggarakan roemah tangga, dan di masa perang berdjoeang membantoe kaoem laki-laki. Kitapoen haroes demikian. Kita wadjib mempertahankan Bandoeng dengan mati-matian. Djika tidak dapat kita pertahankan lagi maka biarkanlah Bandoeng mendjadi laoetan api dari pada djatoeh ke tangan moesoeh. Dalam mempertahankan Bandoeng, hendaknja kaoem wanita tidak mendapat noda. Berdjoeanglah.[37]

37 *Kedaulatan Rakjat*, 3-12-1945, Senen Wage, 28 Besar - Ehe 1876. Pertjobaan moesoeh mereboet Setasioen Bandoeng digagalkan. Lebih baik Bandoeng djadi laoetan api, dari pada djatoeh ke tangan moesoeh.

Sumber: Dok. Pribadi

MONUMEN PERLAWANAN ULAMA DAN SANTRI

2 DESEMBER 1945

Perjanjian Chequers di pesanggrahan Wiston Churchill di London 24 Agustus 1945 melahirkan kerjasama militer, Keradjaan Protestan Anglikan Inggris bersedia membantu usaha Keradjaan Protestan Belanda menegakkan kembali jajahannya atas Indonesia. Dikirimkanlah Tentara Sekoetoe Inggris untuk Jawa Barat dipimpin oleh Mayor Jenderal D.C. Hawthorn. Kemudian memberikan ultimatum agar rakyat bersama segenap organisasi kesenjataan menyerahkan kota Bandung, 29 November 1945. Ultimatumnya sama seperti di Surabaya pada 10 November 1945. Kedua penjajah Barat ini menilai Barisan Sabilillah, Lasjkar Hizboellah dan Tentara Keamanan Rakjat sebagai teroris.

Ulama dan Santri menjawab ultimatum tersebut dengan menghadang gerak maju Tentara Sekoetoe Inggris dan Nica dari Bandung Utara ke Bandung Selatan, di Jalan Lengkong Besar. Perlawanan Rakyat yang mengakibatkan banyak jatuh korban, diabadikan keyakinan patriotismenya: Pengorbanan Kami Demi Nusa, Bangsa dan Agama.

Berita dari Surat Kabar Kedaulatan Rakjat yang bersumber dari Kantor Berita Antara di atas, memberikan gambaran bahwa semangat membela Proklamasi 17 Agustus 1945, benar-benar membangkitkan semangat tidak hanya para Ulama dan Santri, tetapi juga kaum Ibu atau Muslimah. Di bulan Dzulhijjah atau Idul Qurban tergerak hatinya untuk rela berkorban dan berani membela kemerdekaan. Menurut Kedaulatan Rakjat, 3-12-1945, dari Pendekar Wanita, Soemirah Jati dari Lasjkar Wanita Indonesia pada mulanya disosialisasikan istilah Bandoeng Laoetan Api.

> Bandoeng Laoetan Api yang sebenarnya terjadi pada 23 Maret 1946 sebagai akibat Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA memberikan ultimatum agar rakyat dan Tentara Repoeblik Indonesia - TRI mengosongkan seluruh kota Bandung Utara dan Selatan.
>
> Menanggapi ultimatum itu, Perdana Menteri Soetan Sjahrir - Kabinet Sjahrir II, 12 Maret-2 Oktober 1946, memerintahkan agar seluruh kota Bandung Utara dan Selatan dikosongkan. Sebaliknya, dari Markas TRI Djogjakarta, memerintahkan agar Bandung tetap dipertahankan.

Akibatnya, rakyat di bawah komando TRI bersama Barisan Sabilillah dan Lasjkar Hizboellah serta badan perjuangan lainnya, melancarkan serangan umum ke pos tentara Sekoetoe Inggris dan NICA, disertai melakukan Aksi Boemi Hangoes menjadikan Bandoeng Laoetan Api, 23 Maret 1946.

Bandoeng Laoetan Api suatu gambaran jiwa rela berkorban rakyat yang luar biasa. Rakjat Bandung Selatan dengan rela melakukan sendiri bumi hangus. Membakar rumahnya daripada diduduki oleh Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA.

> Peristiwa bumi hangus yang dilakukan oleh rakyat merupakan ciri khas perlawanan rakyat Bandung terhadap pendudukan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA. Tidak terjadi di kota-kota lainnya. Apabila terjadi rumah penduduk terbakar, hal itu terjadi akibat serangan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA. Beda dengan di Bandung, rakyat berpartisipasi aktif membumi hanguskan rumah-rumahnya sendiri, bersamaan dengan Tentara Repoeblik Indonesia membumi hanguskan perkantoran atau gedung penting lainnya.

Kelebihan Energi Ulama dalam Perang Sabil

Dalam Perang Sabil melawan Tentara Sekoetoe dan NICA, seperti di atas, di Bandung karena pengaruh kepemimpinan Kiai Tjibadoejoet atau Mama Tjibadoejoet terhadap rakyat, sangat besar. Sukar untuk dibayangkan bagaimana seorang Kiai melakukan aksi penyerbuan gudang senjata atau gudang baju seragam Tentara Sekoetoe di Bandung Utara waktu malam hari. Hasilnya, dapat dilihat saat itu Lasjkar Hizboellah memiliki seragam militer dan persenjataan yang diambil dari gudang senjata dari Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA.

Secara logika, sukar dimengerti. Namun, dalam teknik Perang Sabil, para Ulama di masa revolusi memperlihatkan potensi spiritualnya yang luar biasa. Misalnya, penuturan Achsin dari Nahdlatoel Oelama dan Lasjkar Hizboellah bahwa Mama Tjibadoejoet dapat menidurkan penjaga gudang senjata Tentara Belanda dan meringankan membawa senjata keluar dari gudang senjata untuk dibagikan kepada Lasjkar Hizboellah.

Kisah Ulama dengan potensi spiritualnya yang luar biasa, terjadi juga di kota lain. Demikian pula Perang Sabil dari Lasjkar Pentjak Silat dari Sagala Herang Subang yang dipimpin Hadji Ama Poeradiredja, dan Lasjkar Hisboellah dan Barisan Sabilillah serta rakyat yang dipimpin oleh Kiai Hadji Noer Ali dari Pesantren Ujung Malang Krawang, terjadi peristiwa yang sangat menakjubkan, dalam pertempuran di Sasak Kapuk Bekasi.

Major Moeffreni Moe'min dalam buku Jakarta, Karawang, Bekasi Dalam Gejolak Revolusi menuturkan bahwa Takbir Allahu Akbar dan kalimat Hisbun Nasr yang dikumandangkan di tengah Perang Sabil menjadikan peluru mortir dan kanon yang ditembakkan oleh Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA, tidak bisa meledak, berjatuhan utuh tanpa terjadi ledakan.

Peristiwa ini menurut penuturan Major Moefreni Moe'min memberikan gambaran bahwa Ilmu Tasawuf ajaran Kiai Hadji Noer Ali tidak hanya mampu membangkitkan semangat juang bela negara dan bangsa, tetapi juga mampu memperlihatkan keampuhannya kekuatan moralnya yang berhasil melumpuhkan sistem persenjataan teknik fisik lawan.[38] Diperlihatkan pula ketika Kiai Hadji Noer Ali ketika tertangkap dan diangkut dengan mobil serdadoe Sekoetoe, dalam perjalanan sebelum masuk ke markas sudah dapat lolos tanpa diketahui turunnya oleh serdadoe Sekoetoe.

Demikian pula ketika terjadi konvoi mobil yang dihadang dan diserbu oleh Lasjkar Pentjak Silat pimpinan Hadji Ama Poeradiredja yang meneriakkan Takbir Allahu Akbar, menjadikan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA tidak berdaya. Selain tidak sanggup melanjutkan operasinya dan kehilangan senjatanya, mereka harus kembali ke Jakarta untuk menguburkan serdadunya yang menjadi korban.

Sergapan mendadak Lasjkar Pentjak Silat yang disertai kumandang suara Takbir Allahu Akbar, meruntuhkan moril Tentara Sekoetoe Inggris, Goerkha dan NICA. Kisah ini dituturkan kembali dan diakui kebenarannya oleh Major Moeffreni Moe'min sebagai realitas Perang Sabil atau Perang Kemerdekaan yang benar-benar terjadi pada masa awal revolusi.

38 Periksa Tamar Anwar, *K.H. Noer Ali 71 Tahun*. Penerbit At-Taqwa. Bekasi, hlm. 14- 17

K.H. NOER ALIE
Sebagai petani cabai merah, mentimun, jeruk, semangka dll.
Bersama Sholeh Iskandar sebagai Komandan Batalyon Lasjkar Hizboellan.
Bersama santri melancarkan Perang Gerilya Bekasi dan Bogor
Wakil Ketua DPD Kabupaten Bekasi
Anggota Front Anti Komunis - FAK
Anggota Konstituante
Ketua Perguruan At Taqwa Yayasan Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan
Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Se-Jawa Barat - BKS PP
Sumber: www.noeralie.com

Kedaulatan Rakjat

DOK. AHMAD MANSUR SURYANEGARA

Moesoeh menghadapi kehan-tjoerannja di Ambarawa.

Bènteng pendam Banjoebiroe telah ditangan kita.

Perang Sabil didjalankan.

Beroending.

Kesanggoepan Rakjat oentoek mereboet Semarang.

Indonesia ta'poeas dengan Dominion Status.

Keterangan P. M. Sjahrir.

Peroendingan di Bandoeng.

Instruksi No. 4.

DEWAN PERDJOEANGAN

Instruksi No. 5.

DOK. AHMAD MANSUR SURYANEGARA

Sumber: Doc. Pribadi

Termasuk kisah Kiai Abbas dari Pesantren Buntet Cirebon pada saat melakukan perlawanan terhadap Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA di Surabaya, terjadi cara perlawanan yang sukar dilogikakan. Kehadiran Kiai Abbas dari Pesantren Buntet Cirebon, diundang oleh Choedratoes Sjeckh Rais Akbar K.H. Hasjim Asj'ari ke Surabaya karena mempunyai kelebihan ilmunya, dapat meruntuhkan pesawat terbang Tentara Sekoetoe hanya dengan mengarahkan Tongkatnya ke arah pesawat terbang.

Choedrotoes Sjeikh Rois Akbar Kiai Hadji Hasjim Asj'ari, dalam upaya pengamanan perlawanan terhadap Tentara Sekoetoe Inggris, Goerkha dan NICA, mengingatkan Boeng Tomo agar menunggu terlebih dulu datangnya Kiai Abbas dari Pesantren Buntet Cirebon ke Surabaya untuk mengamankan bahaya serangan udara. Benarkah berhasil meruntuhkan pesawat terbang Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA?

Dalam berita Kedaulatan Rakjat yang bersumber dari berita pihak Tentara Sekoetoe Inggris bahwa sejak terjadinya pertempuran Surabaya sampai dengan 17-12-1945, Tentara Sekoetoe Inggris menderita kerugian tujuh buah pesawat Thunderbolt

tertembak jatuh oleh serangan penangkis udara dari pihak Indonesia. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pihak Indonesia memiliki kecakapan menembak pesawat sama dengan tentara Jerman. Apakah pesawat yang terjatuh ini, akibat doa Kiai Abbas?

Kedaulatan Rakjat

TG. 17: PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN INDONESIA.

Kota Ambarawa seloeroehnja ditangan kita.

Moesoeh melarikan diri ke Semarang.

Koendjoengan Presiden

Sumber: *Doc. Pribadi*

Sumber: *Doc. Pribadi*

Seperti yang juga diberitakan oleh *Kedaulatan Rakjat*, 26-11-1945, Kamis Pahing, 21 Besar - Ehe 1876, tentang kesaktian para Kiai bersama Santri dalam pertempuran di Ambarawa:

> Kesaktian kijai2 di medan pertempoeran, ternjata boekan hanja berita lagi, tapi kita saksikan sendiri. Banjak mortier jang melempem, bom tidak meledak dsbnja lagi. Seorang Njai dari Tingkir Salatiga toeroet menjerboe.

Selanjutnya, diberitakan oleh *Kedaulatan Rakjat*, 1-12-1945, Sabtu Pahing, 26 Besar - Ehe 1876, peran para Kiai dan Santri dalam penyerbuan kota Ambarawa, antara lain:

> Hari ini, 40 orang Kjai di Beringin dan sekitarnja toeroet melakoekan penjerboean di kota Ambarawa. Masing2 Kjai diikoeti moeridnja 15 atau 20 orang.
>
> Mereka bersendjata granat tangan, granat pembakar dinamit dan tidak loepa tombak-bamboe.

Istilah perang di kalangan masyarakat dan yang digunakan media cetak persurat kabaran saat itu adalah Perang Sabil. Antara lain pertempuran awal di Banyubiru Ambarawa diberitakan oleh Kedaulatan Rakjat, 5-12-1945, Rebo Legi, 30 Besar - Ehe 1876:

> Penjerangan oemoem dilakoekan dari segala penjoeroe.
> Kini, penjerboean kita tersoesoen dari lima lapisan. Barisan Hisboellah jang ditempatkan berdjoeang digaris terdepan menjeroekan Perang Sabil dalam penjerboean. Dibarengi dengan seroean Takbir Allahoe Akbar, sehingga si'ar Perang Sabil mendengoeng di angkasa. Penjerboean pasoekan kita jang menoedjoe Banjoebiroe berhasil mendjatoehkan benteng2 moesoeh di sana. Moesoeh melarikan diri ke joeroesan Ambarawa.

Peran para Kiai dalam merebut Benteng Willem I Banyubiru, pada Kedaulatan Rakjat, 6-12 -1945, Kemis Pahing, 1 Soera - Djimawal 1877 diberitakan:

> Hari ini, Hari Peringatan 1 Sjoera 1877/1365.
> Sang Merah Poetih berkibar di atas Benteng Willem I
>
> Dengan didahoeloei oleh Kijai Komar dari Beringin, penjerboean habis-habisan didjalankan dengan keberanian loear biasa. Pasoekan2 inilah jang mengalahkan moesoeh di Banjoebiroe sehingga benteng Banjoebiroe jang bersejarah itoe dapat kita reboet dari kekoeasaan moesoeh.

Bagaimana dalam penulisan Sejarah Indonesia tentang Palagan Banyubiru di atas. Tentu tidak ada lagi pengakuan terhadap keberhasilan penyerbuan yang dipimpin oleh Kiai Komar dalam Perang Kemerdekaan saat itu karena istilahnya pun tidak lagi digunakan Perang Sabil. Melainkan sudah digantikan dengan Palagan Banyubiru. Mengapa? Jawabannya kalau menggunakan istilah Perang Sabil pasti pelakunya umat Islam, Ulama, dan Santri. Apabila menggunakan istilah Palagan artinya tempat berlaga, tidak harus pelakunya umat Islam, Ulama, dan Santri.

Kedaulatan Rakjat

Bènteng Djatingaleh Semarang dan Alastoea ditangan kita.

Semarang terkepoeng dari tiga djoeroesan.

Kekedjaman moesoeh ta' ada taranja.

P. T. Soedirman Panglima Besar Tentara Keamanan Rakjat.

Berdjoeanglah dengan hati panas dan kepala dingin.

Tenaga Perdjoeangan Rakjat perloe oentoek menjokong diplomasi Pemerintah.

Itoe tentara nica di Manggar dan Tg. Pandan terkepoeng.

DOK. AHMAD MANSUR SURYANEGARA

Sumber: *Doc. Pribadi*

Berita selanjutnya oleh *Kedaulatan Rakjat*, 17-12-1945, Senen Pon, 12 Soera - Djimawal 1877, diliputi analisis yang Islami termasuk pemaknaan tanggal Islaminya, dalam perebutan Ambarawa:

> Tanggal 17: Peringatan Tanggal Kemerdekaan Indonesia, bertepatan dengan tanggal 10 Soero sebagai Hari Kemenangan di Ambarawa. Jatuhnya Ambarawa diberitakan sbb:
>
> Hari Selasa tg. 11-12 malam hari, markas gaboengan kita telah mengambil kepastian oentoek melakoekan serangan penghabisan pada seloeroeh kedoedoekan moesoeh di kota Ambarawa.
>
> Pasoekan Hadji Moechlis dari Tjilatjap dengan 60 anggota lasjkarnja, malam itoe djoega moelai bergerak dari boekit Pasekan sebelah oetara geredja besar. Pasoekan ini teroes mengadakan gerakan ke arah selatan. Hingga hari Djoemat tg.14 djam 1 tengah malam pasoekan ini masoek kota Ambarawa. Mengadakan gerakan teratoer mereboet tempat2 jang penting. Achirnja, setelah mengadakan serangan hebat, setasioen dapat direboet oleh pasoekan ini.

> Dengan masoeknja pasoekan tsb mendoedoeki 2 benteng pertahanan moesoeh jang terpenting, terboekalah semoea koentji kota Ambarawa dari segala pendjoeroe.
>
> Dampak selanjutnya tentang hasil penyerbuan di atas:
>
> Moesoeh mengoendoerkan diri dari Ambarawa kelihatan sangat tergesa-gesa. Banjak alat2 kelengkapan perang jang ditinggalkan. Pasoekan Hadji Moechlis dapat mereboet 2 meriam dan berpoeloeh bedil.

Selanjutnya, Kedaulatan Rakjat, 19-12-1945, Rebo Kliwon, 14 Soera -Djimawal 1877, memberitakan peran aktif para Kiai dalam perebutan Benteng Djatingaleh Semarang dan Alastoea, antara lain disebutkan:

> Semarang terkepoeng dari tiga djoeroesan.
>
> Kekedjaman moesoeh ta' ada taranja.
> Kemarin, tengah malam lasjkar pasoekan kita jang menjerboe ke kota Semarang telah mengadakan serangan oemoem pada benteng pertahanan moesoeh di Djatingaleh dengan didahoeloei oleh pasoekan Kijai jang menjadi barisan penjerboe dari arah Selatan. Dengan tjepat, moesoeh dapat dipoekoel moendoer dan dengan ini poela benteng Djatingaleh kita doedoeki seloeroehnja.

Berita di atas mengangkat realitas zaman dan peristiwa sejarah yang sebenarnya terjadi pada masa revulosi atau pada masa Perang Kemerdekaan. Para Kiai atau Ulama menjadi pimpinan terdepan dalam suatu penyerbuan terhadap Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA.

Seperti yang dituturkan oleh Menteri Agama Munawir yang pernah ikut serta dalam penyerbuan ke Ambarawa kepada penulis menyatakan memang benar penyerbuannya didahului oleh Barisan Sabilillah dan Lasjkar Hizboellah dipimpin oleh Kiai Moechlis dan Kiai Mandoer. Dijelaskan lebih lanjut, kedua Kiai tersebut bersama para Santrinya, Lasjkar Hizboellah dan Barisan Sabilillah, ketika menduduki kota Ambarawa tidak menjumpai lasjkar atau pasukan lainnya.

Setelah Ambarawa dikuasai oleh para Ulama dan Santri (setelah Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA terpukul mundur oleh serbuan Barisan Sabilillah dan Lasjkar Hizboellah), barulah menyusul masuknya pasukan rakyat Purwokerto dan Banyumas,

Jogya, Kedu, Solotigo, Sumowono, Banyubiru, dan Barisan Pemberontakan Rakjat serta yang lainnya seperti yang diberitakan oleh *Kedaulatan Rakjat*, 17 -12-1945, Senen Pon, 12 Soero - Djimawal 1877.

Peran Ulama dan Santri dalam Perang Sabil di Sumatra

Kerjasama Ulama dan Santri serta Tentara Keamanan Rakjat seperti di atas tidak hanya di P. Jawa. Melainkan terjadi pula di Medan dalam menghadang pendaratan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly pada 9 Oktober 1945. Pada 13 Oktober 1945 di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Tahir, mantan Tentara *Giyugun*, mulai melancarkan perlawanan.[39]

Adapun perlawanan besar-besaran di Medan, Sumatra Utara, dikenal dengan nama Medan Area, terjadi pada 10 Desember 1945. Tentara Keamanan Rakjat yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Tahir, dalam perlawanan tersebut mendapat dukungan dari umat Islam dan para Ulama *Al-Djamiatoel Washlijah* Medan.

Ternyata, Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, tidak hanya melahirkan pemuda patriot bangsa yang berani. Namun juga, membangkitkan keberanian kaum wanita dan pemudi, turut aktif terjun dalam pertempuran. Misalnya pada awal Bandung Lautan Api tampil Soemirah Jati, isteri Aroedji Kartawinata, di Semarang Widajati, di Medan juga dikenal seorang pejuang wanita yang sangat berani, antara lain Kamsiah.[40]

Di mana-mana terjadi pertempuran besar-besaran, seperti halnya Surabaya, Semarang, Bandung, Krawang, Bekasi, Medan, sebagai akibat Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA mengultimatum agar rakyat menyerahkan senjata. Rakyat bersama Ulama menjawab dengan siap *Jihad Fi Sabilillah*. Demikian pula di Padang, Bukittinggi dan Aceh, Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA bertindak sama, mengultimatum agar rakyat menyerahkan senjatanya dan kota-kota pertahanannya. Di tempat terakhir ini, perlawanan pemuda Aceh dipimpin oleh *Residen Teoekoe Njak Arief*.

---

39 Biro Sejarah Prima, 1976. *Perjuangan Kemerdekaan Dalam Wilayah Sumatera Utara, Medan Area Mengisi Proklamasi.* Diterbitkan oleh Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area. Medan, h. 212 menuturkan terbentuknya *Lasjkar Hisboellah* yang dibentuk oleh *Al-Djamiatoel Waslijah* pada 5 Desember 1945. Akibat dibentuknya *Partai Moeslimin Indonesia – Parmoesi*, dalam waktu bersamaan dibentuk pula *Hizboellah Parmoesi*. Pada 16 Desember 1945, terjadi penggabungan keduanya, berubah nama menjadi Barisan Sabilillah. Dengan terbentuknya Partai Islam Indonesia, Masjoemi, diubah lagi menjadi Lasjkar Hizboellah, dipimpin oleh Bachtiar Joenoes. Sedangkan Hizboellah Sumatera Timur dipimpin oleh Noerdin Nasoetion.

40 Dituturkan oleh rakyat bahwa Kamsiah selain dikenal sebagai Pejuang 45 yang ikut bergerilya melawan Agresi Belanda, juga serta berpartisipasi aktif membasmi PKI di Medan bersama-sama Kesatuan Aksi, dan Pemuda Pancasila pada saat terjadi G-30-S/PKI di Jakarta pada 30 September 1965.

PADOEKA TOEAN SOEDIRMAN

Panglima Besar Tentara Keamanan Rakjat

K.H. Achmad Dachlan tidak pernah mengira bahwa mantan Guru Persjarikatan Moehammadijah
dan Komandan Batalyon III Kroya Tentara Pmbela Tanah Air,
Padoeka Toean Soedirman, dianggkat oleh PJM Presiden Soekarno dan Wakil Presiden
Mohammad Hatta sebagai Panglima Besar Tentara Kemanan Rakjat
pada 13 Muharram 1364, Selasa Wage, 18 Desember 1945.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

KOLONEL KIAI SAM'UN

Kepala Badan Keamanan Rakjar - BKR Banten
Komandan Divisi I Banten Bogor
Komandan Brigade I Tirtajasa

Sumber: *Doc. Pribadi*

Tentu, tidak mungkin Perang Sabil di Aceh terjadi tanpa ikut sertanya Ulama. Tengkoe Daoed Beoereoe-eh menjadi tokoh sentral dalam menghadang kedatangan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA. Tidak hanya itu karena pengaruh Tengkoe Daoed Beoereoe-eh, terkumpul dana yang digunakan untuk membeli pesawat terbang yang diserahkan pada pemerintah Repoeblik Indonesia. Peristiwa inilah yang menjadikan Presiden RI, Ir. Soekarno berjanji kepada Tengkoe Daoed Beoereoe-eh bahwa di Provinsi Aceh akan diberlakukan Syariah Islam.

Kesatuan Ulama dan Tentara

Revolusi dan Perang Kemerdekaan menjadikan terpadumya dua kekuatan: Tentara dan Ulama. Unsur pimpinan tentara dan pimpinan agama atau Ulama dalam situasi perang selalu saling dijadikan tempat perlindungan masyarakat. Sebaliknya, antar kedua unsur pimpinan tersebut juga saling bantu membantu. Mengapa hal ini dapat terwujud?

Kesatuan kerjasama antara Tentara dan Ulama dalam masa revolusi, merupakan pengulangan sejarah seperti yang terumuskan dalam dwi fungsi gelar Sultan. Misalnya untuk di Kesultanan Yogyakarta: Senopati Ing Alaga - Pimpinan Militer, Syayyidin Panata gama – Ulama.

Setelah Proklamasi, hal ini dimodifikasikan Sultanmenjadi Presiden. Kewenangannya Senapati Ing Alaga, diubahnya menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Sayyidin Panatagama diaplikasikan oleh Presidendengan mengangkat Menteri Agama dalam upaya menciptakan kerukunan kehidupan beragama.

> Selain pengaruh dari latar belakang sejarah itu, juga pengaruh masa pendudukan Balatentara Djepang dengan pembentukan Tentara Peta dan mengangkat Ulama sebagai Daidancho atau Komandan Batalyon. Dari sini, pengaruhnya menjadikan Ulama dan Tentara tumbuh sebagai dwi tunggal kekuatan ketahanan dan pertahanan yang tak terpisahkan, terutama dalam masa Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M. Kesatuan ini menjadikan kelahiran Tentara Keamanan Rakjat - TKR, Tentara Repoeblik Indonesia - TRI, dan Tentara Nasional Indonesia - TNI disambutnya sebagai anak kandung rakjat.

Dengan adanya Makloemat X 3 November 1945, timbullah partai politik dengan berbagai ideologinya, berebut pengaruh berupa ya menguasai BKR, TKR, TRI dan TNI. Kelompok Sosialis berhasil menempatkan dirinyaSoetan Sjahrir menduduki Kementerian Dalam dan Luar Negeri dalam Kementerian Keamanan Rakjat atau Kementerian Pertahanan dikuasai oleh Amir Sjarifoedin gelar Soetan Goenoeng Soaloon.

Dengan kedudukannya Amir Sjarifoeddin, orang yang pernah kerjasama dengan van Mook, tidaklah heran kalau berupaya dengan berbagai cara memperlemah pengaruh Ulama dengan segenap organisasi kesenjataannya dan TNI. Sebaliknya, memanfaatkan kedudukannya untuk memperkuat Lasjkar Pesindo dan membentuk TNI tandingan dengan nama TNI Masjarakat serta Angkatan Laut Gunung bermarkas di Lawang Malang Jawa Timur.

Selain itu juga, merencanakan mengadakan Reorganisasi dan Rasionalisasi - ReRa organisasi kesenjataan, bertujuan secara tidak langsung mengurangkan eksistensi Hizboellah, Sabilillah serta organisasi kesenjataan lainnya yang dipimpin oleh Ulama atau organisasi kesenjataan Tentara Pelajar. Realisasi Re-Ra ini baru dilaksanakan oleh Kabinet Hatta.

Ulama dan pimpinan partai politik, tidak terbetik minat menggunakan kekuatan organisasi kesenjataannya untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Seluruh potensinya dipusatkan justru untuk memperkuat kedudukan pemerintah RI yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam menghadapi serangan Tentara Sekoetoe dan NICA.

Kerjasama Tentara Sekoetoe dan NICA

Kerjasama antara Keraadjaan Protestan Belanda dan Keradjaan Protestan Anglikan Inggris, terjalin sejak keduanya mengambangkan wilayah jajahannya. Dapat dibaca adanya *Traktaat* atau *Treaty* yang mereka adakan di abad ke-19, *Treaty of London* 1824 dan 1870 M. Kedua kerajaan imperialis ini memperlihatkan dengan mudah memindahkan atau mempertukarkan wilayah jajahannya, dan mengadakan kerjasama pertahanan.

Oleh karena itu, tidaklah heran sesudah Perang Dunia II terjadi kembali kerjasama antar Inggris dan Belanda. Dengan dana pembangunan ekonomi dari *Marshall Plan* Amerika Serikat yang semestinya untuk membangun kembali ekonomi Keradjaan Protestan Belanda, tetapi diselewengkan digunakan untuk memerangi bangsa dan negara Repoeblik Proklamasi 17 Agoestoes 1945, Djoemat Legi, 9 Ramadhan 1364.

> Semestinya mereka sadar dan malu karena Keradjaan Protestan Belanda sendiri juga berjuang melepaskan bangsa dan negaranya dari kekuasaan Kaisar Napoleon Bonaparte yang mengangkat saudaranya Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Demikian pula, Keradjaan Protestan Anglikan Inggris seharusnya

> juga menyadari bahwa semangat kemerdekaan Amerika Serikat, menurut Crane Brinton dalam A History of Civilization sebagai Protestan Revolution, 19 April 1775, tidak dapat dipadamkan dengan kekuatan senjata.
>
> Apalah artinya kesamaan agama Protestan antara Inggris dan Belanda, kalau ajaran agama Protestannya dijadikan dasar pembenaran penjajahan. Namun di lain pihak, terhadap penganut agama Protestan Amerika Serikat dikondisikan di bawah penindasan bersenjata dan tusukan bayonet Keradjaan Protestan Anglikan Inggris agar bangsa Amerika Serikat menjadi bangsa yang siap menyerah dan mau dijajah.

Ternyata sejarah mengajarkan, kemerdekaan sebagai pilihan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama, daripada hanya didasarkan kesamaan agama tetapi agama dijadikan pembenar dasar penjajahan dan untuk menciptakan kondisi rakyat lainnya agar bersedia dijajah. Mayoritas penganut Protestan Amerika Serikat memilih bangkit berevolusi melepaskan diri penjajahan Keradjaan Protestan Anglikan Inggris. Suatu kenyataan sejarah, di mana pun penjajah, tidak mampu menundukkan kemauan rakyat yang ingin tetap merdeka. Apakah mungkin penjajah mampu mempertahankan penjajahannya dengan duduk di atas bayonetnya sendiri?

Perjanjian Chequers dan NICA

Sebenarnya penjajah Barat sendiri, Presiden Amerika Serikat Roosevelt dan Perdana Menteri Churchill,[41] di atas geladak kapal Augusta di teluk New Foundland, melahirkan Atlantic Charter, 14 Agustus 1941 M, merumuskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bertujuan menciptakan perdamaian dunia. Namun, mengapa keduanya, Keradjaan Protestan Anglikan Inggris dan Keradjaan Protestan Belanda, mengadakan Perjanjian Chequers di pesangrahan Perdana Menteri Churchill di London, 24 Agustus 1945, mencoba membantu menjadikan Indonesia sebagai jajahan Keradjaan Protestan Belanda lagi? Diikuti dengan pembentukan Netherland Indies Civil Administration - NICA di Australia dipimpin oleh Ch.O. van der Plas sebagai kepalanya.

41 Pada 1941 Amerika Serikat masih sebagai penjajah negara Filipina dan Keradjaan Protestan Anglikan Inggris masih pula sebagai penjajah negara India, Pakistan, Sri Langka, Myanmar, Malaysia, Singapora dan Hongkong.

> Kerajaan Protestan Anglikan Inggris sebagai negara imperialis Barat, secara langsung atau tidak langsung turut serta menjadikan Eropa terlibat dalam perang antar negara imperialis Barat, terjadi dua kali Perang Dunia I, 1914-1919 M, dan Perang Dunia II, 1939-1945 M. Produksi senjatanya digunakan untuk saling membunuh rakyatnya. Perang-perang itu menjadikan bangsa Eropa kehilangan banyak pemuda kulit putih. Walaupun Perang Dunia II berakhir, imperialis Barat masih nekat mau melanjutkan perang untuk menambah jumlah pemudanya yang akan mati terbunuh karena mereka menciptakan kembali perang yang bertujuan menegakkan kembali penjajahan.
>
> Padahal, Havelock Ellis mengingatkan betapa bahayanya negara kekurangan pemuda. Negara akan dihuni oleh orang tua yang semakin tua dan kemudian mati. Perang menjadikan pemuda yang masih hidup, menunda pernikahannya karena kehidupan semakin sulit. Rakyat dan sisa pemuda sebelum atau setelah perang, hidup tertindas oleh kewajiban bayar pajak berat. Pajak digunakan negara untuk mendanai perang dan melunasi utang perang. Eropa terancam dengan tingginya kematian pemuda berdampak rendahnya nilai kelahiran dari jenis yang baik. Perang antarnegara imperialis Barat mengurangkan jumlah pemuda-pemuda yang perkasa secara drastis. Perang menjadikan Eropa mengalami penundaaan dan bahkan menderita ketiadaan bayi-bayi yang akan terlahirkan.[42]

Apakah karena memahami dampak perang ini, demi memerangi Repoeblik Indonesia maka Tentara Sekoetoe Inggris menggunakan Tentara Goerkha[43] bukan Tentara Pemuda Kulit Putih? Apakah dengan menumpas Repoeblik Indonesia, ditargetkan pula akan berdampak menyelamatkan kepentingan Inggris dengan jajahannya atas India, Pakistan, Burma, Sailan, Malaya, Singapura, Hongkong dari pengaruh gerakan kemerdekaan Repoeblik Indonesia? Apabila berhasil menumbangkan Repoeblik Indonesia sekaligus akan menolong Amerika Serikat dapat mempertahankan penjajahannya atas Filipina.

Perang Dunia II dan Perang Asia Timur Raya telah menyadarkan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Asia Tenggara terhadap nilai kemerdekaan. Tidak ada satu pun penjajah, baik imperialis Barat ataupun imperialis Timur Jepang yang dapat mengangkat martabat kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama dari negara dan bangsa yang dijajahnya.

---

42 L. Stoddard, 1966. *Pasang Naik Kulit Berwarna*. Penerdjemah Dra. Kistijah dan Nj. Rochmuljati. Panitia Penerbit. Djakarta, hlm. 174-175.

43 R.H.A. Saleh, 2000. *"... Mari Bung, Rebut Kembali!"* , Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, hlm. 78 menjelaskan Gurkha dalam ejaan India menjadi Gorkha. Berasal dari kata Go artinya lembu atau sapi dan Rkha artinya pelindung. Berdasarkan ajaran Hindu, sapi sebagai binatang suci. Semboyan mereka *Kaphar hunnu bhanda marnu ramro* - Lebih baik mati daripada menjadi pengecut.

> Van Mook, Van der Plas, Djenderal Spoor, Westerling, semestinya mereka menyadari bahwa orang-orang Nasrani Protestan di Indonesia, di bawah pimpinan Leimena, dan Katolik di bawah pimpinan I.J. Kasimo, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak lagi mau memihak kepada Keradjaan Protestan Belanda sebagai kerajaan imperialis Barat.
>
> Antara lain, Mr. A.A. Maramis beragama Kristen, berjuang menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai Menteri Negara kemudian menggantikan Dr. Samsi Sastrowidagdo sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Presidential, 2 September-14 November 1945.
>
> Pada masa Pemerintah Daroerat Repoeblik Indonesia - PDRI, yang dipimpin oleh Mr. Sjafroeddin Prawiranegara dari Partai Islam Indonesia Masjoemi, mengangkat Mr. A.A. Maramis sebagai Menteri Luar Negeri, dan mengangkat I.J. Kasimo Ketua Komisariat Pemerintah Pusat- Kompempus di Jawa.

Kerajaan-kerajaan penjajah Barat, tidak percaya bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 mendapat dukungan dari segenap rakyat. Mereka memperkirakan Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai "hadiah dari Balatentara Djepang" dan hanya didukung oleh segelintir orang yang pernah bekerjasama dengan Balatentara Djepang.

Bertolak dari perkiraan yang tidak ilmiah inilah, melahirkan Perjanjian Chequers di London antara Keradjaan Protestan Anglikan Inggris dan Keradjaan Protestan Belanda. Keduanya bekerjasama melancarkan invasi militer, bertujuan menggagalkan bangkitnya negara Repoeblik Indonesia. Bangsa Indonesia menyambut tantangan invasi kedua imperialis Barat ini dengan jawaban, menurut Kolonel A.H. Nasution dengan Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M. Ulama menjawabnya dengan Jihad Fi Sabilillah, 1364-1369 H /1945-1950 M.

Pertempuran-pertempuran yang berkobar di kota-kota di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, Bali, Lombok, Maluku, melawan serdadoe Sekoetoe. Perlawanan yang heroik dari patriot bangsa Indonesia menjadikan imperialis Barat baru sadar bahwa Proklamator Soekarno-Hatta didukung sepenuhnya oleh segenap rakyat yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan.

Ditolaknya konsep "damai" di bawah penjajahan Nederland – Pax Neerlandica. Para Ulama dan pemuka Islam bertekad mempertahankan perumusan Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945 bahwa Kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan di atas doenia haroes dihapoeskan karena tidak sesoeai dengan peri-kemanoesiaan dan peri-keadilan.

Letnan Goebernoer Belanda, Dr. Hoebertoes J. van Mook (1942-1948 M), juga baru menyadari bahwa negara-negara boneka bikinannya hanya didukung oleh segelintir penjilat yang tidak mempunyai pendukung dari rakyat. Tidaklah heran bila negara bonekanya berumur pendek dan bubar.

Apalagi setiap pertempuran atau palagan hanya mampu menguasai wilayah kota pada siang harinya. Malamnya giliran gerilyawan melancarkan pembalasannya. Perlawanan rakyat dari berbagai kota yang berhasil memorak porandakan pertahanan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA, walaupun perlawanannya hanya bersenjatakan bamboe roentjing.

Tidakkah Thomas Stamfford Raffles dalam *History of Java* telah mengingatkan bila Ulama sudah kerjasama dengan penguasa Pribumi, jangan harap kaki penjajah akan dapat tegak dengan aman di Nusantara Indonesia. Lalu, bagaimana kelanjutan menegakkan kembali penjajahan, kalau dalam kenyataan Perang Kemerdekaan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, Joemat Legi, 9 Ramadhan 1364, Ulama benar-benar bekerjasama dengan Tentara Keamanan Rakjat atau Tentara Repoeblik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia maka tidaklah mungkin kekuatan penjajah berhasil melumpuhkannya.

Resoloesi Masjoemi dan G.P.I.I.

Kerjasama antar Ulama dan Tentara, dirumuskan dalam keputusan Konferensi Kilat Masjoemi dan G.P.I. di Yogyakarta, 7-8 Juli 1946 yang diberitakan oleh *Kedaulatan Rakjat*, 10 Djoeli 1946, Rebo Pon, 10 Roewah- Djimawal 1876. Antara lain dikeluarkan Resoloesi Masjoemi dan G.P.I.I:

> Seloeroeh warga Masjoemi dan G.P.I.I menjatakan kesetiaan terhadap P.J.M. Presiden Soekarno dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menegakkan hak dan keadilan.
>
> Seloeroeh warga Masjoemi dan G.P.I.I menjatakan kepertjajaan kepada Panglima Besar Soedirman, sebagai Poetjoek Pimpinan seloeroeh Tentara, dan Hizboellah, serta Sabilillah berdiri dibelakangnja.

Dari resolusi 7-8 Juli 1946 di atas, tergambar rasa kesatuan dan kesetiaan yang tinggi Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi dan Gerakan Pemoeda Islam Indonesia - G.P.I.I terhadap Presiden Soekarno serta Panglima Besar Soedirman. Para Ulama

dan pimpinan Partai Politik Islam, tidak tergerak menggunakan kekuatan massa umat Islam dan militernya untuk melakukan Kudeta seperti yang dilancarkan oleh kalangan komunis nasional Tan Malaka pada 3 Juli 1946.

Kenyataan sejarah ini dan dengan memerhatikan pula rumusan Thomas Stamfford Raffles dalam History of Java, serta peran aktif Perdana Menteri Churchill merumuskan Atlantic Charter 14 Agustus 1941, apakah mungkin Tentara Sekoetoe Inggris dapat melanjutkan usahanya membantu upaya Keradjaan Protestan Belanda menegakkan kembali penjajahan di Indonesia?

Kekalahan yang diderita oleh Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA di seluruh kota yang didudukinya, menjadikan Keradjaan Protestan Belanda menyadari kekuatan militernya tidak mampu memadamkan kemauan bangsa Indonesia yang berjuang mempertahankan Repoeblik Indonesia, Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Tentara Sekoetoe Inggris pada 24 Oktober - akhir November 1946 memilih menarik tentaranya dari Indonesia. Akibatnya kesendiriannya, Keradjaan Protestan Belanda menempuh strategi baru, bersedia melakukan diplomasi. Apalagi Kabinet Sjahrir juga lebih mengutamakan penyelesaian sengketa Indonesia - Belanda memilih jalan perundingan atau diplomasi.

Strategi Diplomasi dan Pelanggaran Belanda

Dengan adanya ketiga kabinet yang dipimpin oleh Soetan Sjahrir disebut Kabinet Sjahrir Pertama, 4 November 1945-12 Maret 1946, Kabinet Sjahrir Kedua,12 Maret-2 Oktober 1946, dan Kabinet Sjahrir III, 2 Oktober 1946-27 Juni 1947, sekitar selama 20 bulan, November 1945-Juni 1947, memberikan gambaran pilihan utama strategi mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 dari ancaman Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA, ialah diplomasi atau perundingan.

Diharapkan pula agar perundingan dapat berjalan lancar maka dipilihlah perwakilan Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Sekoetoe atau Belanda dan diutamakan pernah memperoleh pendidikan Barat. Selain itu, guna menghindarkan Kabinet Sjahrir dari tuduhan mendapat dukungan Partai Islam Indonesia Masjoemi maka Menteri-menteri yang diangkat dalam Kabinet Koalisi Sjahrir tidak mengatasnamakan partainya, melainkan berdasar individunya atau keahliannya.

Di sisi lain juga mempertimbangkan pernyataan Prof. Logeman, Menteri Daerah Seberang Belanda dengan kesombongannya menyatakan *Praten met Soekarno is even on warig als on vruchtbaar* - beroending dengan Soekarno adalah hina sekaligoes tanpa goena.[44] Oleh karena itu, dipilihlah Soetan Sjahrir dari Partai Sosialis sebagai wakil pemerintah Repoeblik Indonesia. Untuk kepentingan itu, Kabinet Presidential yang dipimpin oleh Presiden Soekarno digantikan dengan Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Soetan Sjahrir.

Sebenarnya, Tentara Sekoetoe Inggris dan Keradjaan Protestan Belanda bersedia berunding dengan Repoeblik Indonesia karena mengalami kekalahan dalam Perang Kemerdekaan selama dua bulan sesudah Proklamasi: Pertempuran Surabaya Jawa Timur - 10 November 1945, Bojongkokosan Sukabumi Jawa Barat - 9 Desember 1945, Medan Area Sumatra -10 Desember 1945, dan Ambarawa Jawa Tengah - 15 Desember 1945.

Tentara Sekoetoe Inggris kehilangan dua perwira tingginya pada Pertempuran Surabaya dan Bojongkokosan. Padahal, dalam Perang Dunia II, Tentara Sekoetoe Inggris tidak pernah kehilangan dua perwira tinggi dalam waktu relatif singkat hanya satu bulan, dari 10 November hingga 9 Desember 1945. Latar belakang kekalahannya ini menjadikan Tentara Sekoetoe Inggris pada 24 Oktober 1946 ditarik dari Bogor, Palembang, Medan, dan Padang. Secara berangsur angsur dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka*, dijelaskan pada akhir November 1946 seluruh Tentara Sekoetoe Inggris ditarik dari Indonesia.

Sebenarnya pilihan strategi dengan perundingan atau diplomasi, dalam mempertahankan Proklamasi, hasilnya sangat merugikan Repoeblik Indonesia, jauh dari yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Keradjaan Protestan Belanda sebagai penjajah tidak mau memahami kebulatan tekad bangsa Indonesia dengan Proklamasi 17-8-1945. Walaupun tuntutan kemerdekaan ini sejalan dengan *Atlantic Charter*, tetapi Keradjaan Protestan Belanda tetap berpegang kepada Perjanjian Posdam, merasa diberi hak untuk menerima kembali jajahannya, bukan mendirikan penjajahan baru.

Akibat ketidak adanya pengertian dari Keradjaan Protestan Belanda terhadap arti penjajahan dan makna kemerdekaan, walau pun juru runding dari Indonesia dipilihkan orang-orang yang pernah bekerjasama dengan Sekoetoe dan Belanda, serta bukan dari partai politik Islam, setiap perundingan, baik dari Peroendingan Linggardjati, Renville, dan Konferensi Medja Bundar, yang disepakati hasil perundingannya selalu dilanggarnya.

44 Mohamad Roem, 1989. *Diplomasi, Ujung Tombak Perjuangan RI*. Gramedia. Jakarta, hlm. 4 .

Setiap perundingan berakhir dengan pelanggaran dari pihak Keradjaan Protestan Belanda. Sejarah memperlihatkan Peroendingan Lingggadjati dilanggar dengan Aksi Militer I, 21 Juli 1947. Peroendingan Renville dilanggar dengan Aksi Militer II, 19 Desember 1948. Demikian pula hasil Perundingan Konferensi Medja Bundar-KMB yang melahirkan Republik Indonesia Serikat –RIS di bawah Ratoe Belanda, tetapi tetap dilanggarnya dengan gerakan Kudeta APRA Westerling, 23 Januari 1950, di Bandung, Pemberontakan KNIL Andi Aziz di Makassar, 1950 M, dan separatis RMS,19 April 1950.

Masyarakat Belanda benar-benar ketakutan kalau Indonesia Merdeka karena diyakini Indie Verloren, Rampspoed Geboren – Indonesia hilang, malapetaka datang. Dari pengertian dan keyakinan ini, berdampak setiap perundingan selalu diikuti dengan upaya pelanggarannya. Sejarah selalu berulang, antara lain seperti yang terjadi dalam perundingan zaman Perang Diponegoro, 1825-1830 M, janjinya dilanggar dengan penangkapan Pangeran Diponegoro dan dibuang akhirnya ke Benteng Belanda di Makassar.

Perlu diperhatikan selain setiap sesudah perundingan Indonesia- Belanda terjadi adanya upaya penggagalan dari pihak Keradjaan Protestan Belanda, terjadi pula sebelum Peroendingan Linggardjati atau sesudah Peroendingan Renville, Kudeta PKI.

Kudeta Komunis Pra Peroendingan Linggardjati

Menjelang Peroendingan Linggardjati, yang akan dilaksanakan pada 10-15 November 1945, terjadi dua kali Kudeta Komunis:

Pertama, Kudeta PKI yang dipimpin oleh Mohammad Joesoep pada 12 Februari 1946, di Cirebon. Dengan sasaran penyerangan Markas Divisi II Cirebon yang dipimpin Asikin Joedabrata. Serangan tersebut dengan menggunakan Lasjkar Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo yang didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam penulisan Sejarah Indonesia, tidak dinilai sebagai Kudeta PKI.

Dengan memerhatikan yel-yel dari Lasjkar Pesindo yang menyebutkan Hidoep Soviet maka kudeta ini dikendalikan oleh PKI penentang Proklamasi 17 Agoestoes 1945. Tentu, pelakunya PKI Serikat Indonesia Baru - PKI Sibar bikinan van der Plas di Australia yang dipimpin oleh Sardjono dan J. Poedjosoebroto sebagai Sekretaris. Mulai masuk kembali ke Indonesia bersamaan dengan datangnya Goebernoer Djenderal van Mook.

Operasi penumpasan melawan Lasjkar Merah Pesindo pimpinan Mohammad Joesoep, dilancarkan oleh Divisi II Cirebon dan dibantu oleh Resimen V Cikampek, membebaskan Cirebon dari kekuasaan PKI dan Pesindo. Pada 14 Februari 1946

atau 12 Maulud 1365/1878, bertepatan Hari Jadi Cirebon, berhasil menangkap Mohammad Joesoep dari markasnya di Hotel Leebrink.

Dapat dikatakan Kudeta PKI 12 Februari 1946 di Cirebon terjadi sesudah Proklamasi 17-8-1945 dengan tujuan menggagalkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan rencana Peroendingan Linggardjati yang akan dilaksanakan di Linggardjati Cirebon. Pada hakikatnya PKI sejak di Australia, tetap berpihak kepada Keradjaan Protestan Belanda yang menolak Proklamasi dan tidak menyetujui perundingan. Upaya Kudeta PKI dan Lasjkar Merah Pesindo ini gagal, hanya berumur 2 hari.

Kedua, pada masa Kabinet Sjahrir II, 12 Maret-2 Oktober 1946 terjadi penculikan terhadap Perdana Menteri Soetan Sjahrir di Surakarta, pada 27-28 Juni 1946. Peristiwa ini merupakan bagian dari Kudeta 3 Juli 1946 dipimpin oleh Tan Malaka, Mr. Soebardjo, Mr. Iwa Koesoema Soemantri, Soekarni, Mr. Mohammad Yamin sebagai upaya merebut kekuasaan.

Untuk mengatasi upaya Kudeta 3 Juli 1946, menurut Dr. R. Soeharto, dalam *Saksi Sejarah*, menyatakan Mr. Amir Sjarifoeddin dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dengan menggunakan Polisi Militer dan bantuan Lasjkar Pesindo, melakukan penangkapan terhadap Tan Malaka, Mr. Mohammad Yamin, Sajoeti Melik, dan Chaeroel Saleh, setelah mereka mengadakan rapat di Madiun. Dalam berita Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, 6-7-1946, selain nama-nama di atas ditangkap pula Abikoesno Tjokrosoejoso dan Djenderal Soedarsono.

Dari dokumennya ditemukan rencana kudeta dalam aksi: *Pertama,* Presiden Soekarno pada 3 Juli 1946 akan dipaksa memberhentikan Kementerian Negara yang dipimpin oleh Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin. *Kedua*, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani daftar susunan Dewan Pimpinan Politik dan Kementerian Negara baru.

Kudeta 3 Juli 1946 sebagai kelanjutan pertemuan pertama, Boeng Karno dengan Tan Malaka dan Sajoeti Melik di rumah Dr. R. Soeharto di Jalan Kramat Raya 128 Jakarta, pada malam Idul Fitri sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364 H. Dalam pertemuan ini, Tan Malaka mengusulkan bila Boeng Karno dan Boeng Hatta mengalami penangkapan dan pembunuhan oleh Balatentara Djepang, Tentara Sekoetoe atau NICA maka masalah kepemimpinan nasional agar diwariskan kepada Tan Malaka. Jawab Boeng Karno terhadap usulan tersebut, hanya berjanji akan membuat testamen politik yang berisikan penunjukan siapa yang akan mewarisinya.

Pertemuan ini ternyata dilanjutkan dengan pertemuan kedua, di rumah Mr. Achmad Soebardjo. Di sini, terjadi pertemuan antara Boeng Karno bersama

Boeng Hatta menghadapi tuntutan Tan Malaka dan Mr. Achmad Soebardjo. Tema pembicaraan masih sama, yakni masalah Testamen Politik.[45] Hasil pembicaraan ini, Dr. R. Soehardjo memperoleh penjelasan dari Mr. Achmad Soebardjo bahwa pimpinan nasional yang ditunjuknya adalah empat orang: Tan Malaka, Mr. Iwa Koesoemasoemantri, Soetan Sjahrir, dan Mr. Wongsonegoro.

Selanjutnya, Dr. R. Soeharto, menerima penjelasan dari Boeng Hatta menyangkal bahwa terjadi Testamen Politik yang menyebutkan nama Tan Malaka karena hubungan pribadi Boeng Hatta dengan Tan Malaka[46] sangat tidak baik. Oleh karena itu, tidak mungkin adanya Testamen Politik dengan penyebutan nama Tan Malaka.

Ternyata, ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama Menteri lainnya, ditangkap dan dibuang ke Bangka, akibat adanya Aksi Militer Kedua, melalui telegram kedua pimpinan nasional tersebut mengamanahkan kepada Mr. Sjafroedin Prawiranegara dari Partai Islam Indonesia Masjumi untuk menegakkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia – PDRI pada 19 Desember 1948.

Walaupun Boeng Karno dan Boeng Hatta tidak dibunuh oleh Tentara Sekutu dan NICA, tetapi Tan Malaka dan kawan-kawannya melancarkan aksi penculikan terhadap Perdana Menteri Soetan Sjahrir. Kemudian, Djenderal Soedarsono datang ke istana memaksa Boeng Karno dan Boeng Hatta untuk menyerahkan kepemimpinan negara kepada Tan Malaka, memberhentikan semua kementerian negara, serta Panglima Besar Soedirman.

Usaha Kudeta 3 Juli 1946 dapat digagalkan. Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin berhasil menangkap dan menyeret pelaku Kudeta 3 Juli 1946 ke Mahkamah Tentara Agoeng. Dalam pengadilan, mereka menyatakan bukan akan kudeta. Melainkan hanya menjalankan hak-petisi dari hak demokrasi yang diakui oleh UUD 1945. Dengan adanya jawaban ini, Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin sebagai saksi, dalam Mahkamah menjawab pertanyaan hakim, apakah Soedarsono – Yamin cs bersalah atau tidak? Jawabannya, salah dengan alasan tindak perebutan kekuasaan Pemerintah itu tidak Parlementer dan harus dihukum. [47]

---

45 Periksa pula, Geoge McTurnan Kahin, 1970.*Op.Cit.*, hlm. 167

46 *Tan Malaka* nama lengkapnya *Soetan Ibrahim* gelar *Datoek Tan Malaka*, lahir 1897 di *Suliki, Sumatra Barat*, dari keluarga bangsawan.

47 Mr. Sudarisman Purwokusumo, 1951. *Pemberontakan Madiun. Ditindjau dari Hukum Negara Kita. Sumber Kemadjuan Rakjat.* Jogja, h 6-7. Pelanggaran yang dilakukan Tan Malaka dkk, Kudeta 3 Juli 1946, dilakukan pula oleh Amir Sjarifoeddin bersama Moeso dalam peristiwa Kudeta PKI di Madiun 19 September 1948 sebagai tindakan perebutan kekuasaan, tidak parlementer.

Jawaban Mr. Amir Sjarifoeddin[48] sebagai Menteri Pertahanan itu, nantinya mengenai dirinya pula ketika melakukan Kudeta 19 September 1948 di Madiun bersama Moeso yang akan mendirikan negara Repoeblik Soviet Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa Kudeta yang dilakukan oleh gerombolan komunis nasional ataupun komunis intenasional, selalu menolak disebut Kudeta. Alasannya Kudeta 3 Juli 1946 hanya sebagai pelaksanaan Hak Petisi dan Kudeta 19 September 1948 sebagai koreksi terhadap pemerintah RI.

Peroendingan Linggadjati

Setelah kekacauan dampak Kudeta 3 Juli 1946 dapat dikuasai maka perundingan dilaksanakan. Peroendingan Linggardjati di Cirebon Jawa Barat berlangsung pada 10-15 November 1946. Repoeblik Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Soetan Sjahrir dan Keradjaan Protestan Belanda diwakili oleh Prof. Shermerhorn.

Hasilnya antara lain: Repoeblik Indonesia secara *de facto* wilayahnya diakui hanya terdiri Sumatra, Jawa dan Madura. Selain pengakuannya bukan secara *de jure*, juga ditolaknya batas wilayah RI Sabang-Merauke atau seluruh wilayah bekas jajahan India Belanda. Indonesia-Belanda akan membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Repoeblik Indonesia Serikat pada 1 Januari 1949.

> Hasil Peroendingan Linggardjati itu, bertentangan dengan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia-P.P.K.I pada 18 Agustus 1945. Wilayah Nusantara Indonesia adalah bekas wilayah India Belanda. Sering disebutkan dari Sabang hingga Merauke. Tentu, mendapat tantangan yang berat dari Partai Islam Indonesia Masjoemi. Demikian pula PNI serta partai lainnya, menolak hasil perundingan tersebut.

Agar mendapatkan persetujuan Komite Nasional Indonesia Pusat - KNIP, diubahlah jumlah anggotanya dari 200 KNIP Lama menjadi 514 KNIP Baru.[49] Penambahan jumlah anggota organisasi kebanyakan dari golongan Kiri. Sedangkan PNI tidak berubah 45 anggota. Sosialis tidak berubah 35 anggota. Masjoemi dari 35 berubah menjadi 60 anggota.

---

48 Mr. Amir Sjarifoeddin gelar *Soetan Goenoeng Soaloon*, lahir 27 Mei 1907, di Medan Sumatra Utara.

49 Himawan Soetanto, 1994. *Perintah Presiden Soekarno: "Rebut Kembali Madiun" Siliwangi Menumpas Pemberontakan PKI/Moeso 1948*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 117 menyebutkan dari jumlah 413 anggota KNIP Baru, terdapat di dalamnya 116 wakil PKI. Dari 43 anggota BP KNIP terdapat 8 anggota PKI. Bila terjadi pemungutan suara pasti PKI menang. Periksa pula, Himawan Soetanto, 2006. *Madiun dari Republik ke Republik*. Kata Hasta Pustaka.Jakarta, hlm. 97.

Kemudian, dari 105 perwakilan kelompok oposisi terhadap Kabinet Sjahrir di atas, ditandingi dengan peningkatan jumlah perwakilan dari Buruh dari 6 berubah menjadi 35 anggota. PKI dari 2 berubah menjadi 35 anggota. Protestan dari 4 menjadi 8 anggota. Katolik dari 2 menjadi 4 anggota. Perubahan yang sangat mencolok adalah perwakilan Karyawan dan Petani semula tidak ada atau 0 dalam KNIP Baru, masing-masing menjadi 40 anggota.

Perwakilan Individu, Partai kecil dan Badan Perjuangan dari 40 berubah menjadi 121 anggota. Demikian pula perwakilan Daerah terjadi perubahan besar: Sumatra semula 1 menjadi 50 anggota. Kalimantan dari 4 menjadi 8. Sulawesi dari 5 menjadi 10. Sunda Kecil dari 2 menjadi 5. Maluku dari 2 menjadi 5 anggota. Golongan Minoritas: Cina dari 5 menjadi 7. Arab dari 2 menjadi 3. Peranakan Indo Belanda dari 1 menjadi 3 anggota.[50]

Akhirnya, diputuskan dibentuk pula BP KNIP di Malang pada 3 Maret 1947 yang terdiri dari 47 anggota. Terdiri dari perwakilan 5 Partai Sosialis, 5 Masjoemi, 5 PNI, 3 dari PKI, 3 Partai Buruh, 3 Karyawan, 2 Petani, 1 Sarekat Tani Islam Indonesia, 2 Barisan Tani Indonesia, 1 Partai Kristen. Tidak terdapat wakil Partai Katolik. 1 Pesindo, tidak terdapat wakil Hizboellah atau Sabilillah.

Wakil Daerah 5 wakil terdiri dari Sumatra 1, Kalimantan 1, Sulawesi 1, Maluku 1, Sunda Kecil 1. Tidak terdapat Wakil Jawa dan Madura. Namun, terdapat 3 Perwakilan Minoritas: Cina 1, Arab 1, dan Peranakan Indo-Belanda 1 wakil.

Adapun kelima perwakilan dari Partai Islam Indonesia Masjoemi adalah: S.M. Kartosoewirjo, Mahmoed L. Latjoeba, Prawoto Mangkoesasmito, Mr. Samsoedin, Mohammad Sardjan, dan perwakilan Sjarikat Tani Islam Indonesia adalah Aboe Oemar.

Dapat dibayangkan betapa kecilnya suara ke enam perwakilan umat Islam ini, dibandingkan dengan keseluruhan berjumlah 47 perwakilan. Demikian pula seorang wakil Sjarikat Tani Islam Indonesia kalau diadakan pemungutan suara akan selalu kalah, walaupun hanya menghadapi perwakilan Barisan Tani Indonesia-BTI dari PKI karena berjumlah 2 wakilnya.

Anehnya, Presiden Ir. Soekarno dan Wakil PresidenMohammad Hatta mengancam akan meletakkan jabatannya kalau penambahan anggota Komite Nasional Indonesia dan hasil Peroendingan Linggarjati ditolak. Menurut penuturan Bung Tomo dalam Bung Tomo Menggungat bahwa Presiden Soekarno menyatakan kalau penambahan anggota KNI dan hasil Peroendingan Linggardjati tidak disetujui, " carilah Presiden lain". Tindakan Presiden Soekarno ini menimbulkan kejengkelan kalangan oposisi seperti, Ali Sastroamidjojo, Mr. Sartono, K.H. Maskoer, S.M. Kartosoewirjo, dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo.

50 George Mc Turnan Kahin, 1970. *Op.Cit.*, hlm. 201.

Sumber: *Doc. Pribadi*

GERAKAN KEBANGKITAN KOPERASI

Sosialisasi gerakan kesadaran berkoperasi di bidang ekonomi pada masa gerakan
Kebangkitan Kesadaran Nasional
warga Nadlatoel Oelama di pedesaan pinggiran kota Bandung, Nyengseret Utara,
di belakang Rumah Sakit Emmanuel,
di bawah pimpinan M.Sjafii melahirkan
Sjarikat Coperatie van Warga Njengeseret - S.C.V.W.N
didirikan sejak 1934 M dan memperingati Ulang Tahun Ke-5
Jubelium 1934-1939 M
di belakang kanan terlihat bangunan
Sekolah Arab atau Madrasah Pengajian Anak-Anak.

Penambahan anggota KNI, walaupun terdapat penentangan dari kaum oposan, menjadikan Peroendingan Linggardjati tetap ditanda tangani oleh pemerintah Kabinet Soetan Sjahrir dan Keradjaan Protestan Belanda, 25 Maret 1947. Dampak penanda tanganan tersebut, memanaskan KNIP antara yang pro dan kontra. Secara horizontal meluas timbulnya perpecahan di masyarakat bawah. Bahkan, Partai Sosialis sendiri pecah. Akibatnya, Kabinet Sjahrir dijatuhkan oleh Amir Sjarifoeddin, 27 Juni 1947. Kemudian, Soetan Sjahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia- PSI.

Peroendingan Renville

Dengan jatuhnya Kabinet Sjahrir Ketiga, Presiden Soekarno menunjuk tiga formatur kabinet: Mr Amir Sjarifoeddin, Dr. Soekiman, dan A.K.Gani untuk membentuk Kabinet Koalisi. Akhirnya, Presiden Soekarno mengangkat Mr. Amir Sjarifoeddin sebagai Perdana Menteri. Dibentuklah Kabinet Amir Sjarifoeddin berumur sekitar 7 bulan, 3 Juli 1947-23 Januari 1948.

Akibat Partai Islam Indonesia Masjoemi menolak, agar kabinetnya mendapatkan dukungan dari partai Islam, Mr. Amir Sjarifoeddin berhasil memengaruhi Partai Sjarikat Islam Indonesia keluar dari Partai Islam Indonesia Masjoemi maka diangkatlah W. Wondoamiseno sebagai Menteri Dalam Negeri dan Aroedji Kartawinata sebagai Menteri Muda Pertahanan. Sedangkan S.M. Kartosoewirjo tidak bersedia untuk diangkat sebagai Menteri Muda Pertahanan.[51]

Pergolakan antarpartai, tidak dapat dihindarkan. Tidak heran kalau benturan pendapat antarpartai dimanfaatkan pihak Keradjaan Protestan Belanda untuk melanggar hasil Peroendingan Linggardjati dengan melancarkan Agresi Militer Belanda Pertama 21 Juli 1947. Hasil penyerangan mereka, wilayah yang diduduki dinyatakan sebagai "daerah garis van Mook ". Kemudian, Keradjaan Protestan Belanda menyatakan kesediaannya kembali untuk berunding dengan Kabinet Amir Sjarifoeddin. Sebagai kerajaan imperialis, walaupun berunding, tetap bertujuan mempertahankan penjajahan dengan tidak memedulikan Atlantic Charter ataupun Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945.

Di tengah gemuruhnya Perang Kemerdekaan dan Peroendingan Linggardjati yang dilanggar oleh imperialis Belanda dengan Agresi Militer Belanda Pertama, 21 Juli 1947, sepuluh hari sebelumnya di Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam rangka mengaplikasikan Pasal 33 UUD 1945 diresmikan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta berdirinya Hari Koperasi pada 12 Juli 1947, Ahad Legi, 22 Sya'ban 1366. Sejak itu, Mohammad Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi.

Pada saat itu, Tasikmalaya merupakan Ibukota Perjuangan Provinsi Jawa Barat dalam pengungsian. Oleh karena itu, peresmian berdirinya Hari Koperasi, dipilih di Tasikmalaya. Pilihan Tasikmalaya sebagai kota peresmian Hari Lahir Koperasi,

51 Surat Kabar *Kedaulatan Kakjat*, 7-7-1947, memberitakan pada 6-7-1947 hari Ahad, *Toean S.M. Kartosoewirjo* menjampaikan kawat dari Jawa Barat kepada Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Dalam Negeri, jang isinja menerangkan bahwa beliau tidak sanggoep menerima *portefeulle* Menteri Moeda Pertahanan, berhoeboeng beliau sampai kini beloem mentjampoeri P.S.I.I. dan masih tetap anggauta Masjoemi. Periksa pula George McbTurnan Kahin, 1970, Op.Cit., hlm. 208. Holk H. Dengel, 1995, *Darul Islam dan Kartosuwirjo*, Langkah Perwujudan Angan-Angan yang Gagal, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 60.

secara politis dan geografis dekat dengan Bandung dan Jakarta yang sedang diduduki oleh Tentara NICA. Di samping itu, sebenarnya masyarakat Jawa Barat memang sudah memiliki kesadaran berkoperasi sejak masa Kebangkitan Nasional, sebelum Proklamasi.

Contohnya di sebuah desa di pinggiran kota Bandung, di belakang Rumah Sakit Immanuel, di wilayah Nyengseret Kecamatan Tegalega, kaum Nahdliyin telah mendirikan S.C.V.W.N yang dipimpin oleh R.M. Safii yang sedang mengadakan Jubelium 1934-1939. Dengan sistem koperasi ini, digunakan pula untuk mengelola Madrasah atau Sekolah Arab yang sederhana di sebelah belakang kiri.

Choedrotus Sjeich Rois Akbar K.H. Hasjim Asj'ari Wafat

Dua puluh hari Kabinet Amir Sjarifoeddin dan tiga hari setelah Agresi Militer Belanda Pertama, pada dini hari pukul 03.45, tepat 4/5 Ramadhan 1366, Rabu Legi/Kamis Pahing, 24/25 Djuli 1947, telah berpulang ke rahmatullah, *Choedrotoes Sjeich Rois Akbar* K.H. Hasjim Asj'ari Guru Besar Pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, dalam usia 70 tahun (1283-1366 H/1867-1947 M).

Sebelumnya, beliau masih mampu mengimami shalat Isya dan shalat Tarawih, serta menerima tamu. Namun waktu sahur, pukul 03.45 dini hari, *Choedratoes Sjeich Rois Akbar* K.H. Hasjim Asj'ari wafat. Demikian berita yang disampaikan oleh Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, 25 Djuli 1947, Kamis Pahing, 5 Ramadhan 1366 H.

Choedrotoes Sjeich Rois Akbar K.H. Hasjim Asj'ari sebagai pembangkit semangat Resoloesi Djihad Nahdlatoel Oelama, 22 Oktober 1945, Senin Pahing, 15 Dzulqaidah 1364 H, dalam menghadapi pendaratan Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA. Berperan aktif memimpin perlawanan Ulama dan Santri terhadap Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA di Surabaya, pada 31 Oktober 1945 yang berdampak matinya Brigadir Djenderal Mallaby. Demikian pula dalam Pertempuran Surabaya 10 November 1945, bersama Kiai Abbas dari Pesantren Buntet Cirebon, serta Kiai Soebhi atau Kiai Soebeki dari Parakan Wonosobo yang terkenal dengan Bamboe Roentjing Parakan.

Dengan terbentuknya Partai Islam Indonesia Masjoemi maka Resoloesi Djihad Nahdlatoel Oelama, pada 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364, menjadi Resoloesi Djihad Oemmat Islam Indonesia. Oleh karena itu, Umat Islam Indonesia dan Partai Islam Indonesia Masjoemi kehilangan Ulama Besar dalam menghadapi Agresi Militer Belanda Pertama yang baru dilancarkan pada 21 Juli 1947. Terutama

Keluarga Besar Nahdlatoel Oelama, terlanda duka sedalam-dalamnya. Walaupun pelanjut kepemimpinan Nahdlatoel Oelama telah lama disiapkan.[52]

Wachid Hasjim, lahir 12 Februari 1913, diikutsertakan dalam memimpin Pesantren Tebu Ireng, Madjlis Islam A'la Indonesia, Kantor Urusan Agama, Masjoemi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Partai Islam Indonesia Masjoemi, dan Menteri Agama. Demikian pula putranya yang lain, Joesoef Hasjim dan Abdoel Choliq Hasjim, kedua-duanya sebagai pimpinan Lasjkar Hizboellah. Sedangkan putri tertuanya, Nyi Moehaimin dikenal sebagai Guru Madrasah Indonesia di Makkah.

> Perlu pula diperhatikan keterangan Dr. R. Soeharto bahwa setelah terbentuk Kabinet Amir Sjarifoeddin I pada 3 Juli 1947, sepuluh hari kemudian Amir Sjarifoeddin mengadakan pertemuan dengan van Mook di Jakarta, 14 Juli 1947. Menyusul seminggu kemudian, Belanda melancarkan Agresi Militer Pertama, 21 Juli 1947.
>
> Timbul pertanyaan, apakah Amir Sjarifoeddin mengetahui rencana Agresi Militer Pertama dalam pertemuan dengan van Mook di atas? Tidakkah Amir Sjarifoeddin pernah mendapat dana f.25.000 dari van Mook pada masa menjelang pendudukan Balatentara Djepang? Dengan demikian, hubungan Amir - van Mook sangat dekat.

Dari tinjauan kesehatan oleh Dr. R. Soeharto bersama sejawatnya akan mengusulkan kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bahwa Amir Sjarifoeddin setelah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, 1946-1947, perlu istirahat karena terjadi perubahan tingkah lakunya.[53]

> Perubahan tingkah laku Mr. Amir Sjarifoeddin dari tinjauan kesehatan oleh Dr. Soeharto dan sejawatnya, tidak terdapat pada penulisan sejarah manapun. Tidaklah berarti hal tersebut menjadi salah. Melainkan tetap benar, hanya seperti yang di kemukakan oleh Dr. R. Soeharto dengan pertimbangan politik saat itu, tidak berani untuk diajukan kepada Presiden Repoeblik Indonesia. Akibatnya, kondisi kesehatan Amir Sjarifoeddin dengan perubahan wataknya, tidak terpublikasikan pada saat itu.

52 Sejak 1 April 1947 diberlakukannya Edjaan Republik Indonesia atau Edjaan Soewandi. Tetapi surat kabar saat itu, masih banyak menuliskan u tetap dengan Edjaan Ophuysen (1901) yakni oe. Termasuk penulisan Republik Indonesia masih belum seragam: Repoeblik Indonesia atau Republik Indonesia. Demikian pula dalam penulisan Hizboellah atau Hisbullah. Peroendingan atau Perundingan.

53 Dr. R. Soeharto, 1982. *Op.Cit.*, hlm. 69

Oleh karena itu, dampak dari terganggunya kesehatan Mr. Amir Sjarifoeddin menjadi sebab Mr. Amir Sjarifoeddin bersedia menandatangani hasil Peroendingan Renville yang disodorkan oleh Abdoelkadir Widjojoatmodjo, walaupun sangat merugikan Repoeblik Indonesia.

Untuk menghadapi perundingan pemerintah Repoeblik Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifoeddin. Perundingan diadakan di atas Kapal Amerika Serikat, *Renville*. Kemudian, dikenal dengan nama Peroendingan Renville - *Renville Agreement*.[54] Dari Repoeblik Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Mr. Amir Sjarifoeddin dan Keradjaan Protestan Belanda diwakili oleh Abdoelkadir Widjojoatmodjo.[55]

Pemilihan Mr. Amir Sjarifoeddin dari Partai Sosialis dan tidak beragama Islam, walaupun namanya dari Bahasa Arab. Melainkan beragama Kristen, dan pernah bekerjasama dengan van Mook pada masa pendudukan Jepang. Diharapkan Peroendingan Renville dapat menyelesaikan sengketa Indonesia - Belanda dengan baik.

Memang, dengan cepat perundingan membuahkan persetujuan kedua belah pihak dan segera dapat ditandatangani oleh Wakil Indonesia - Belanda, pada 17 Januari 1948. Tetapi, hasilnya benar-benar merendahkan martabat Republik Indonesia. Luas wilayah Republik Indonesia semakin berkurang. Tinggal sekitar 8 wilayah terdiri dari Jawa Tengah: Jogyakarta, Surakarta, Magelang, Purwodadi. Untuk Jawa Timur tinggal: Madiun, Ponorogo, Kediri. Jawa Barat: Banten.[56]

Kemudian, setelah TNI Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, Jawa Barat dinyatakan seluruhnya sebagai "daerah van Mook" kecuali Banten. Telah dibentuk pula Negara Pasoendan dengan Wali Negara R.A.A. Wiranatakoesoemah pada 25 April 1948.

---

54 Periksa, Ide Anak Agung Gde Agung. 1980. *'Renville' als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen. The Renville Agreement. A turning point in the Dutch-Indonesian negotiations (with a summary in English)*. A.W. Sijthoff. Alphen Aan Den Rijn.

55 Perlu diperhatikan mistik kalangan politikus Barat, kalau akan mengadakan perundingan selalu mengirimkan utusannya yang memiliki huruf awal namanya sama dengan lawannya. Misalnya, dalam Peroendingan Linggardjati, pihak Indonesia (S)oetan (S)jahrir maka pihak Belanda mengirimkan (S)chermerhorn. Dalam Peroendingan Renville, pihak Indonesia (A)mir Sjarifoeddin maka pihak Belanda (A)bdoel Kadir Widjojotmodjo. Dalam Konferensi Medja Bundar, wakil Indonesia adalah Drs. (M)ohammad Hatta. Sedangkan dari Belanda, Mr. van (M)aarseveen. Sebelumnya, diawali dengan pertemuan pendahuluan antar Indonesia Belanda. Wakil Indonesia Mohamad (R)oem, dan pihak Belanda (R)oyen. Sampai pada masa Reformasi terjadi pertemuan Indonesia-Amerika Serikat terulang hal yang sama. Indonesia (W)iranto dan Amerika Serikat (W)illiam Cohen. Benarkah? *Wallahu alam*.

56 Periksa George McTurnan Kahin, 1970. *Op.Cit.*, h. 232 tentang Peta Wilayah Republik Indonesia dan wilayah Garis van Mook, hasil Peroendingan Renville, 19 Januari 1949, antar Indoneia - Belanda yang dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin dan Abdoelkadir Widjojoatmojo. Wilayah Republik Indonesia di P. Jawa tinggal: Magelang, Jogyakarta, Surakarta, Purwodadi, Madiun, Ponorogo, dan Kediri.

Daerah yang telah diduduki serdadu Belanda dalam Aksi Militer Pertama 21 Juli 1947 dinyatakan sebagai Garis van Mook. Segenap kekuatan TNI di wilayah tersebut disebut Daerah Kantong, harus ditarik ke delapan kota Republik Indonesia di Jawa Tengah atau Jawa Timur di atas. Akibatnya, dari Jawa Barat sekitar 35.000 anggota Divisi Siliwangi dipimpin oleh Kolonel Nasoetion dihijrahkan ke Jawa Tengah. Keberangkatan Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah melalui jalan laut dari Cirebon ke Rembang Jawa Tengah. Sedangkan melalui jalan darat diangkut dengan kereta api dari Parujakan Cirebon ke Yogyakarta. Demikian pula TNI yang berada di Daerah Kantong Jawa Timur harus dihijrahkan keluar dari wilayah Garis van Mook ke 3 wilayah Repoeblik Indonesia: Kediri, Madiun, dan Ponorogo sejumlah 6.000 pasukan TNI.

> Perlu diperhatikan, saat Siliwangi melaksanakan Hijrah dari Sumedang ke Kadipaten, dipimpin oleh Sentot Iskandardinata dan Amir Machmud dengan truk. Dari Kadipaten ke Cirebon, naik kereta api. Dari Cirebon ke Jawa Tengah melalui jalan laut.
>
> Saat itu di Cimahi, dibentuk oleh Letnan Djenderal S.H. Spoor, pasukan Pao An Tui dari kalangan Hoakiauw - Cina Perantauan, di bawah organisasi Chung Hua Chung Hui dipimpin oleh Ang Jan Goan. Berdasarkan keterangan Konsul Djenderal Tsiang, tujuan pembentukan pasukan Pao An Tui untuk melindungi kalangan Hoakiauw dalam situasi revolusi dan bersikap tidak memusuhi orang Indonesia. Namun, akibat pelatihan militernya di Cimahi di bawah Letnan Djendral S.H. Spoor, berubah tujuannya melawan Siliwangi. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Siliwangi yang dipimpin Kapten Amir Machmud dan Mayor Sentot Iskandardinata pada saat Hijrah, pasukan Pao An Tui sangat arogan, menghina dan mengejek TNI.
>
> Penghinaan ini merupakan provokasi agar terjadi baku tembak antara pasukan Pao An Tui dengan Siliwangi. Kedua pimpinan Siliwangi menyikapinya dengan tenang, tidak terpancing, tetap menjaga disiplin. Tujuan utama Hijrah segera meninggalkan daerah kantong Jawa Barat, sebagaimana keputusan Peroendingan Renville. Tugas berikutnya, menghadapi rencana Kudeta PKI di Madiun. Setelah tiba di Solo, Jawa Tengah, dan Ngawi, Jawa Timur, Siliwangi berhasil memukul mundur Lasjkar Pesindo dan Front Demokrasi Rakjat PKI. Mengapa?

Di bawah kondisi itu, situasi wilayah Republik Indonesia menjadi sangat kacau. Konflik kepentingan dan ideologi antar partai politik serta militer berdampak luas hingga menimbulkan konflik horizontal dan konflik antar badan perjuangan yang

bersenjata. Kelompok Amir Sjarifoeddin dengan pendukungnya Partai Buruh Indonesia-PBI, Barisan Tani Indonesia-BTI, Lasjkar Pesindo, Front Demokrasi Rakjat-FDR, menjadikan Solo sebagai wilayah pengalihan perhatian pemerintah pusat Jogyakarta, terhadap rencana Kudeta PKI di Madiun.[57]

Hari Kebangkitan Nasional dan Amnesti

Bahaya perpecahan antarpartai politik dan organisasi kesenjataan, melupakan lawan sebenarnya yang harus dihadapi seluruh bangsa, yakni penjajah Belanda. Kesatuan nasional lebih terancam dan dipertajam bahaya keretakannya dengan tersiarnya kritik dari Pengadilan Pelaku Kudeta 3 Juli 1946 terhadap pemerintah RI yang dipimpin Soetan Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, ataupun Mohammad Hatta.

Berbagai cara yang ditempuh oleh Kabinet Hatta dalam upayanya membangkitkan kesadaran nasional. Salah satu cara yang dipilihnya dengan pendekatan kesadaran sejarah, mengadakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Atas saran Ki Hadjar Dewantara dan Dr. Radjiman Wedijodiningrat, dipilihlah hari jadi bukan organisasi yang sedang konflik berat: PNI, PSI, Masjumi kontra PKI. Melainkan 20 Mei sebagai hari jadi organisasi yang sudah tidak ada, yakni Boedi Oetomo. Organisasi ini sebenarnya telah dibubarkan oleh pendirinya sendiri, Dr. Soetomo. Sebenarnya Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara, Dr. Tjipto Mangoenkosoemo, keluar dari Boedi Oetomo karena dinilainya sebagai gerakan eksklusif dari Regent atau Boepati dan bangsawan Djawa atau Prijaji, menentang gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional.

Walaupun Boedi Oetomo sebagai organisasi beranggotakan kalangan Prijaji dan Boepati sebagai perangkat pelaksana sistem penjajahan dari pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan sistem tidak langsung - *indirect rule system*. Dengan kata lain, Prijaji atau Boepati sebagai kaum loyalis terhadap penjajahan dengan pemerintahan kolonialnya. Dapat dibuktikan Kongres Boedi Oetomo Ke-20 di Surakarta, 1928, menolak pelaksanaan tjita2 persatoean Indonesia sebagai reaksi hasil keputusan Jong Islmieten Bond Congres.

57 Madiun dijadikan kota untuk mematahkan gerakan komunis: *Pertama*, National Congres Centraal Sjarikat Islam di Madiun, 1923 M, mengeluarkan pimpinan Perserikatan Kommunis di India - PKI dari kepemimpinan dan keanggotaan Centraal Sjarikat Islam. Melalui Disiplin Partai, tidak dibenarkan pimpinan PKI merangkap menjadi pimpinan Sjarekat Islam dan sebaliknya. *Kedua*, penangkapan dan penahanan pelaku Kudeta 3 Juli 1946, Tan Malaka dkk, setelah merumuskan rencana kudetanya dalam rapat di Madiun. *Ketiga*, dari PKI Madiun, Amir Moeso melancarkan Kudeta. 19 September 1948, menegakkan Repoeblik Soviet Indonesia. Terpatahkan oleh serangan gabungan TNI Siliwangi dari utara dan barat Surakarta, serta Brigade S bersama Hizboellah dari timur dan selatan Kediri.

BUYA HAMKA Minangkabau, BUNG KARNO Jawa dan KARIM OEY Cina

Pembauran Islami antarsuku dan etnis sangat ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda yang berusaha memisahkan etnis Cina sebagai Vreemde Oosterlingen - Bangsa Timur Asing

Kemudian, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 atau 9 Ramadhan 1364, Chung Hua Chung Hui di bawah ketuanya The Sien Tjo bersama Ketua Muda Mr. Lie Kian Kim dan Soeto Tjan pada 6 September 1947 membentuk pasukan Pao An Tui untuk mengikuti latihan militer di Cimahi oleh Letnan Jenderal S.H. Spoor untuk menentang kemerdekaan Indonesia.
Oleh karena itu, sikap pasukan Pao An Tui menghina TNI seperti yang dialami oleh Kompi Amir Mahmud saat mau Hijrah ke Jawa Tengah (Berita Buana, 18 Juni 1995)
dan penyiksaan terhadap PMI yang bermarkas di Rumah Sakit Gemeente Jalan Serdang Medan oleh pasukan Pao An Tui (Berita Buana 26 Maret 1995).

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Sebenarnya sukar dimengerti, sangat bertentangan dengan fakta sejarahnya, tetapi Kabinet Hatta melalui kekuasaan pemerintah tetap memutuskan dan menetapkan 20 Mei sebagai kebangkitan kesadaran nasional.[58]

Selain itu, ditempuh pula dalam menyejukkan iklim konflik yang sedang memanas dengan mengurangi lawan politik pemerintah, Presiden Soekarno pada 17 Agustus1948 memberikan amnesti bagi pelaku Kudeta 3 Juli 1946.[59] Tentunya, dengan pertimbangan Komunis Tan Malaka disebut sebagai Komunis Nasionalis. Sedangkan Komunis Sardjono, Amir Sjarifoeddin, dan Moeso disebut oleh kelompok Tan Malaka sebagai Komunis bikinan van der Plas. Mereka bekerja untuk kepentingan Nederland atau Komunis Internasional Rusia.

Kudeta PKI di Madiun Pasca Perundingan Renville

Di tengah kekacauan itu, kelompok Amir Sjarifoeddin dengan buruh dan tani yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakjat - FDR menyatakan kekacauan keadaan ini produk dari Perundingan Renville. Padahal, Perundingan Renville dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin sendiri. Kemudian, mengadakan kampanye untuk menolak hasil Perundingan Linggardjati dan Renville serta pelaksanaan Rehabilitasi dan Reorganisasi - ReRa seluruh organisasi kesenjataan.

Walaupun Rehabilitasi dan Reorganisasi tersebut sebenarnya produk program dari Kabinet Amir. Pada awalnya, melalui Re-Ra, Amir Sjarifoeddin merencanakan meniadakan Lasjkar Hizboellah, Barisan Sabilillah dan kekuatan Islam dalam organisasi kesenjataan Tentara Pelajar, TRIP, TGP, TP, IMAM, termasuk dalam TNI,[60] yang bersikap anti komunis.

Setelah Amir tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, dikecamnya kebijakan Re-Ra Kabinet Hatta. Dengan tujuan agar anggota tentara dan lasjkar yang terkena Re-Ra bergabung dalam FDR dan Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo. Setelah merasa kuat, FDR dengan organisasi kesenjataan Pemoeda Sosialis

---

58 Menurut penulis lebih tepat 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Siliwangi daripada Boedi Oetomo yang jelas menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia. 1908-1928 M. dalam Kongres Boedi Oetomo di Solo, 1928 M. Dr. Soetomo pun membubarkan Boedi Oetomo pada 1931 M.

59 Himawan Soetanto, 1994. *Op.Cit.*, h 116 menjelaskan bahwa di Solo terdapat Barisan Pemberontak Repoeblik Indonesia - BPRI dan Barisan Banteng dipimpin oleh Dr. Moewardi. Kedua pasukan ini di bawah pengaruh Gerakan Revoloesi Rakjat - GRR penganut Tan Malaka, bersikap anti FDR/PKI.

60 TRIP - Tentara Pelajar Republik Indonesia, TGP - Tentara Genie Pelajar Jawa Timur, TP - Tentara Pelajar Jawa Tengah dan Jawa Barat, IMAM - Indonesia Merdeka Atau Mati - Tentara Pelajar Banyumas Jawa Tengah. Periksa, Ahmad Mansur Suryanegara et al. 1991. *Peranan Tentara Pelajar dalam Mempertahankan Proklamasi dan Mengisi Pembangunan Negara dan Bangsa Indonesia.* Suatu Tinjauan Historis Prospektif. Fakultas Sastra Universitas Pajadjaran, Bandung.

Indonesia - Pesindo, di Solo menyerang Tentara Siliwangi yang disebutnya sebagai Tentara Hatta.

Demi untuk menumbuhkan kebencian rakyat, buruh, petani, dikembangkan plesetan Siliwangi dengan SLW disebut sebagai kepanjangan dari Stoot Leger Wihelmina. Namun, upaya ini sia-sia karena rakyat tetap setia kepada kepemimpinan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan Panglima Besar Soedirman, serta tetap bangga dengan kehadiran Tentara Siliwangi.

Setelah datang Moeso dari Uni Soviet dan bergabung dengan Amir Sjarifoeddin, mengubah Front Demokrasi Rakjat – FDR menjadi PKI. Berikutnya, mereka dengan menggunakan kekuatan Lasjkar Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo, Partai Sosialis Amir, dan Partai Boeroeh, Sentral Organisasi Boeroeh Seloeroeh Indonesia - SOBSI, Barisan Tani Indonesia - BTI, dan TNI Masjarakat[61] ikut serta dalam Kudeta PKI di Madiun pada 19 September 1948, Ahad Kliwon, 15 Dzulqaidah 1367 H.

Seperti halnya dengan Lenin ketika terjadi Revolusi Oktober 1917, tidak berada di Moskow, bersembunyi di Jenewa. Demikian pula, Amir dan Moeso keduanya tidak berada di Madiun. Keduanya berada di Purwodadi sebelah timur Semarang. Kudeta PKI di Madiun dilaksanakan oleh Goebernoer Militer Soemarsono dari Pesindo.

> Setelah kudeta, Himawan Soetanto menjelaskan selanjutnya dibentuk pemerintahan baru yang disebutnya Front Nasional. Menurut Moeso sebagai suatu pemerintahan yang disebutnya sebagai Djalan Baroe Menoedjoe Repoeblik Indonesia. Saat terjadinya kudeta, istilah Komintern - Komunis Internationale, 1919 M, telah ditiadakan karena terkesan sama dengan imperialisme komunis. Sejak 1947 digantikan istilahnya menjadi Cominform – Communist Information.

Diktator Amir - Moeso dari Madiun akan merobohkan Repoeblik Indonesia, digantikan Negara Soviet Indonesia.[62] Sang Saka Merah Poetih digantikan dengan bendera Merah Palu Arit. Kemudian, Lagu Kebangsaan Indonesia Raja digantikan dengan lagu Internasionale. Ideologi Pantjasila digantikan dengan Marxisme Leninisme.

---

61 580 TNI Masjarakat berasal dari Lasykar-lasykar Bersenjata yang dibangun oleh Mr. Amir Sjarifoeddin pada saat menjadi Menteri Pertahanan. Sebagai tandingan terhadap TNI, 5 0ktober 1945, di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Sedangkan TNI Masjarakat di bawah pimpinan Jenderal Major Djokosoejono, Jenderal Major Ir. Sakirman.

62 Lenin memandang Demokrasi Parlementer ala Barat telah gagal. Digantikan dengan istilah baru Demokrasi Sovyet. Pengertian Sovyet adalah rakyat. Adapun proses pembentukan Parlemen sebagai produk pemilihan bertahap dari bawah Dewan Rakyat tahap bawah, memilih tahapan-tahapan atasnya hingga terbentuk Dewan Rakyat Pusat.

> Pada pagi hari, 19 September 1948, Ahad Kliwon, 15 Dzulqaidah 1367 H, para Ulama dan Santri serta rakyat Madiun terkejut telah terjadi pergantian pemerintahan di bawah Amir dan Moeso. Rakyat menyaksikan banyak *truck* mondar mandir bermuatan pasukan FDR/PKI. Di lehernya dibalut dengan kain merah. Mereka tidak lagi membawa bendera Merah Putih. Melainkan bendera Merah Palu Arit. Oleh rakyat Madiun disebutnya Tentara Merah. Di pinggangnya, tersangkut golok lebar, bukan bayonet dan bersenjatakan senjata laras panjang baru.
>
> Rakyat bingung, mengapa pasukan FDR PKI tidak lagi memekikkan pekik Merdeka. Melainkan digantikan dengan Bebas, Menang Perang dengan tangan kiri diangkat ke atas. Tidak seperti biasanya, rakyat dan para pelajar selalu meneriakkan Merdeka sambil mengangkat tangan kanan.
>
> Rakyat dan pelajar Madiun merasa tidak merdeka lagi. Terutama Ulama dan Santri mulai terasa terjajah oleh diktator Amir Moeso dengan pasukan FDR PKI-nya yang anti agama, anti Ulama dan Santri. Rakyat menyaksikan Tentara Merah masuk masjid tanpa buka sepatu dan merusak Al-Qur'an.

Berikutnya, para Ulama dan Santri, beberapa pimpinan Partai Islam Indonesia Masjoemi, Gerakan Pemoeda Islam Indonesia-GPII, Peladjar Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia - PNI dan Pemoeda Marhaen, Tentara Peladjar Repoeblik Indonesia - TRIP, Tentara Genie Peladjar - TGP, Guru-guru Sekolah, aparat pemerintahan, ditangkap dan dibunuh. Pembunuhan yang luar biasa ganasnya dilaksanakan oleh FDR/PKI di luar kota Madiun:

Di kaki Gunung Wilis di daerah Dungus Kresek Madiun terdapat pemakaman massal dari Ulama[63] yang ditangkap dari berbagai pesantren. Di daerah Takeran Maospati Magetan Madiun, terdapat sumur yang dijadikan tempat penyiksaan Ulama dan Santri yang diambil dari beberapa pesantren, antara lain: Pesantren Sewulan, Mojopurno, dan Ponorogo. Dimasukkan ke dalam sumur di saat masih hidup. Misalnya, Kiai Pesantren Selopura bersama kedua putranya, Goes Bawani dan Goes Zoebair, dilemparkan ke dalam sumur, kemudian ditimbuni dengan batu.

63 Di Dungus Kresek, Madiun, terdapat makam massal pemakaman Ulama korban keganasan PKI. Dengan patung: PKI yang sedang mengayunkan golok besarnya, siap memenggal leher Ulama yang tunduk di depannya.

KORBAN KEGANASAN KOMUNIS KESAMAAN SISTEM PEMBINASAAN ULAMA DAN UMAT ISLAM DI MADIUN 1948 DAN CHECNYA RUSIA 1995

Kiri
Lubang pembantaian Ulama dan Santri di Madiun oleh PKI 1948 M.
Foto: Madiun 1948

Kanan
Seorang ayah mencari anaknya berdiri di dalam lubang pembantaian Muslim di Checnya oleh komunis, Rusia 1995 M.
Foto: National Geographic Indonesia.

Mungkinkah kedua peristiwa di atas terjadi tanpa campur tangan CIA?

Di Gorang Gareng Magetan terdapat tempat pembantaian massal di lembah terbuka, terdiri dari Ulama, pimpinan Partai Islam Indonesia Masjoemi, Pemoeda Anshor, Pemoeda Gerakan Marhaen, Partai Nasional Indonesia, Moehammadijah, Nahdlatoel Oelama, Pamong Pradja, Guru-Guru, dan berbagai pimpinan pelajar yang melawan PKI. Kekejaman PKI ini tidak diketahui oleh penduduk kota dan para pelajar. Hanya keluarganya mengetahui adanya penculikan dan keluarganya tidak kembali lagi. Baru diketahui setelah Tentara Siliwangi menduduki daerah Gorang Gareng Magetan tersebut.

> Pembunuhan terhadap para Ulama secara massal di Madiun dan Surakarta oleh Amir PKI, 19-30 September 1948, merupakan pengulangan sejarah pembunuhan atas Ulama dilakukan oleh Amangkoerat I, 1646-1677 M, berjumlah sekitar 6.000 Ulama di Surakarta. Tindak pembunuhan yang berdampak tumbangnya kekuasaan Amangkurat I. Kemudian lari menuju VOC Batavia, di tengah perjalanan di Tegal, tewas.
>
> Demikian pula Amir PKI dengan tindak kudeta dan pembunuhan Ulama, berdampak tumbangnya kekuasaannya di Madiun, lari menuju ke wilayah Garis van Mook Semarang. Di tengah perjalanan menuju Purwodadi ditangkap. Saat terjadi Agresi Militer Belanda Kedua, dijatuhi hukuman mati di Surakarta.

Menurut Himawan Soetanto, empat hari kemudian sesudah terjadi Kudeta 19 September 1948, Residen PKI Madiun Abdoel Moettholib, pada 23 September 1948, mengumpulkan sekitar 6000 pelajar SMP dan SMA di pendopo Kabupaten Madiun. Dalam pidatonya, antara lain menjanjikan kalau para pelajar setia pada pemerintahan PKI Amir Moeso maka anak-anak sekolah tidak perlu membayar uang sekolah lagi.

> Para pelajar menjawab pidato tersebut dengan yel-yel "*Lebih baik bayar, lebih baik bayar, lebih baik bayar*" berulang kali, disertai dengan tuntutan "*Moeljadi minta ganti, Moeljadi minta ganti, Moeljadi minta ganti*" diteriakkan dengan keras. Akhirnya, pertemuan itu kacau hingga dibubarkan.

Moeljadi adalah seorang anggota Tentara Peladjar Repoeblik Indonesia - TRIP, dibunuh di SMP Negeri 2 Madiun. Pembunuhan ini berdampak bangkitnya solidaritas pelajar Patriot Anti Moeso - P.A.M.[64] Para pelajar tidak mau menyanyikan lagu *Internasionale*, Lasjkar Pesindo, Darah Rakjat, dan menolak menghormati Bendera Merah Palu Arit, saat upacara di halaman SMP Negeri 2 Madiun sebelum masuk sekolah di pagi hari.

64 Himawan Soetanto, 1994. *Op.Cit.*, hlm. 177.

Korban keganasan PKI sebenarnya tidak hanya pihak TRIP, juga diderita Peladjar Islam Indonesia - PII. Seorang Komandan Brigade PII Madiun, Soerjosoegito gugur sebelum TNI Divisi Siliwangi berhasil merebut kembali Madiun.[65]

Peristiwa ini pula yang membangkitkan perlawanan para pelajar di bawah organisasi Peladjar Islam Indonesia - P.I.I Madiun yang dipimpin oleh Ali Hoendojo dan Ikatan Peladjar Indonesia - I.P.I dipimpin oleh Margono dari SMP Negeri 2 Madiun, serta dipimpin oleh kakak-kakak dari Tentara Repoeblik Indonesia Peladjar - TRIP atau Tentara Geni Peladjar - TGP dengan sembunyi-sembunyi menurunkan Bendera Palu Arit yang dikibarkan di halaman sekolah atau di tempat lain atau melakukan gerakan pemboikotan lainnya.

Selain para pelajar berani berdemonstrasi menentang pemerintahan PKI Amir Moeso, juga membuat selebaran yang isinya tetap setia kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Di ruang kelas SMP N 2 Madiun, ditempel oleh murid-murid Bendera Sang Saka Merah Putih dari kertas.

Sikap perlawanan pelajar dan rakyat serta umat Islam inilah, menjadikan banyak guru dan pimpinan masyarakat ditangkap dan dibantai secara massal bersama Ulama dan Santri. Dari kenyataan ini, pimpinan PKI dalam propagandanya berbalik menyerukan tetap menegakkan Repoeblik Indonesia dan Bendera Merah Palu Arit dikibarkan bersama Sang Saka Merah Putih. Menjawab perubahan taktik ini, para Ulama dan Santri serta pimpinan parpol Masjoemi, pelajar SMP dan SMA tetap menunjukkan sikap menentangnya.

PKI Moeso Membangkrutkan Cita-cita Kemerdekaan

Menjawab tantangan coup d' etat PKI Amir Moeso di Madiun pada 19 September 1948 pukul 20.00 Presiden Soekarno menjampaikan amanahnya melalui RRI Jogyakarta:[66]

---

65 A.H.Nasution."*Peranan PII dalam Penumpasan PKI, Pengalaman Seorang Jenderal*". Periksa. Djayadi Hanan. 2006. *Gerakan Pelajar Islam Di Bawah Bayang-Bayang Negara*. UII Press. Yogyakarta, hlm..63.

66 Himawan Soetanto, 1994. *Op. Cit.*, hlm. 147-148.

Sumber: *Dok. Pribadi*

MONUMEN KEGANASAN PKI DI MADIUN

19 September 1948, Ahad Kliwon, 15 Dzulqaidah 1367

Monumen Keganasan
Pemuda Sosialis Indonesia - Pesindo
Front Demokrasi Rakjat – FDR
Partai Komunis Indonesia – PKI
dengan senjata parangnya siap memenggal leher Ulama
dalam Kudeta PKI di Madiun pimpinan
Amir Sjarifoeddin dan Moeso.

> Rakjat jang kutjinta.
>
> Atas nama perdjuangan untuk Indonesia Merdeka, aku berseru kepadamu:
>
> Pada saat jang begini genting, di mana engkau dan kita sekalian mengalami pertjobaan jang sebesar-besarnja di dalam menentukan nasib kita sendiri, dan kita adalah memilih antara dua:
>
> Ikut Moeso dengan PKI-nja jang akan membawa bangkrutnja tjita-tjita Indonesia Merdeka.
>
> Atau ikut Soekarno - Hatta yang Insja Allah dengan bantuan Tuhan, akan memimpin negara Republik Indonesia Merdeka, tidak didjadjah oleh negara manapun juga.
>
> Madiun harus lekas di tangan kita kembali!

Pada waktu pagi hari, rakyat Madiun dikejutkan adanya Pesawat Terbang AURI yang bersayap dua, terbang rendah dan sangat cepat, menyebarkan famlet isi amanah Presiden Soekarno di atas. Tentara PKI menindak rakyat yang mengambil famlet dari pesawat udara tersebut. Namun, rakyat berusaha mengambil famlet yang jatuh di atas rumahnya. Dari famlet tersebut, rakyat semakin yakin bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta masih berkuasa. Rakyat berharap segera Madiun dibebaskan dari penindasan PKI.

Peringatan Presiden Soekarno: Teror Aksi Komunis

Selanjutnya, melalui Surat Kabar Kedaulatan Rakjat , 2-10-1948, Presiden Soekarno mengingatkan rakyat agar tetap mentaati pemerintah Repoeblik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta:

> PKI-Moeso tidak memelihara kemerdekaan, melainkan mempermainkan Kemerdekaan.
>
> Selanjutnya ditandaskan:
>
> PKI dengan kedok "kemerdekaan" diktatur didjalankan. Pembunuhan dilakukan. Terror meradjalela seganas2nja. Budi pekerti sendi kebudajaan dan pusaka lama bangsa kita diindjak2.

Dari perintah dan pernyataan Presiden Soekarno itu, sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga 19 September 1948, bersikap tidak membenarkan ideologi komunis yang dijadikan landasan dasar melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah Repoeblik Indonesia.

Untuk mengimbangi berkembangnya ideologi Marxis maka Menteri Penerangan Mohammad Natsir, mengajak rakyat tetap memegang teguh dengan ideologi Pantjasila serta memperkuat kembali kedekatan rakyat terhadap Ulama dengan ajaran Islam. Demikian pula diingatkan agar tetap berpihak pada pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Teori Vyshinsky Tentang Teror Aksi Komunis

Presiden Soekarno mengingatkan bahwa Komunis menggunakan aksi teror di mana-mana. Mengapa Presiden Soekarno menggunakan istilah teror untuk aksi komunis. Apakah teror memang ajaran Komunis yang dilakukan dalam memenangkan *coup d' etat*.

Dengan mendasarkan dokumen PKI yang ditemukan oleh Partai Moerba bahwa PKI menganjurkan meningkatkan perampokan, asal diorganisasikan dengan baik, Polisi tidak akan mampu mengatasinya. Perampokan mendatangkan rasa takut masyarakat. Dampaknya, dari gerakan teror itu akan dikembangkan oleh PKI agar rakyat yang ketakutan menjadi tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Dengan melalui *fear strategy* - strategi takut diharapkan rakyat menjadikan PKI sebagai pahlawannya.

Untuk mengetahui ajaran *terorisme komunis* seperti yang dipidatokan oleh Presiden Soekarno itu, dapat kita ikuti analisis *Vyshinsky* berikut ini:

(1) *Terrorism is a tool of coup d' etat* - Terorisme alat kudeta.

(2) *The main terrorist efford is directed against the leaders of state* - Upaya utama teroris diarahkan secara langsung melawan pimpinan negara.

(3) *Terrorism coupled with infiltration, socio economic warfare, and defeatism* - Terorisme berpasangan dengan infiltrasi, peperangan sosio ekonomi, dan upaya penggagalan kesuksesan lawan dan upaya penaklukan, baik dalam sistem berpikir maupun ekspresi pembicaraan lawan.

Terorisme dipraktikkan dengan tujuan yang tidak diketahui - *imperceptible means*. Dengan istilah lain dalam kedokteran disebut juga terorisme sebagai *surgigal*

intervention – intervensi pembedahan atau dengan istilah contra indicated therapy - terapi kontra indikasi.

Vyshinsky memberikan contoh imperceptiple murder - pembunuhan yang tidak tampak nyata. Misalnya, Kepala Negara dibunuh dengan cara melalui kecelakaan mobil - automobile accident. Terorisme tidaklah dapat dikerjakan secara perorangan, melainkan diorganisasikan dengan cara class organization.

Teori terorisme di atas dijalankan oleh PKI di Madiun. Rakyat Madiun tidak tahu bahwa pada 18 September 1948 malam terjadi penyerbuan Lasjkar Pesindo bersama PDR, terhadap Markas Tentara Siliwangi dan Maskar TNI lainnya, serta gedung-gedung pemerintahan dan Kantor Telepon dan Telegraf. Paginya, 19 September 1948, rakyat Madiun baru mengetahui adanya pergantian pemerintahan dan penguasa militer baru. Selanjutnya, penangkapan dan pembunuhan dijalankan dengan penculikan dan pembunuhan yang dirahasiakan tempat dan caranya. Oleh karena itu, Presiden Soekarno yang sangat memahami teori Marxis Leninisme, menyatakan PKI menjalankan teror seganas-ganasnya.

Presiden Soekarno: Mari Rebut Kembali Madiun

Kembali ke masalah Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948. Walaupun PKI berhasil menduduki seluruh kota atau kecamatan dari Keresidenan Madiun: Maospati, Gorang Gareng, Magetan, Ngawi, Walikukun, Ponorogo, Pacitan, dan kota-kota di luar Madiun: Purwantoro, Cepu, Sukoharjo, dikuasainya dengan didahului gerakan terornya seperti yang dipidatokan oleh Presiden Soekarno di atas.

Namun, TNI yang hijrah dari Jawa Barat dan Jawa Timur bersatu dengan seluruh kekuatan TNI bersama Lasjkar Hizboellah dan Barisan Sabilillah dan PNI, masih berada di Jawa Tengah dan berada di Jawa Timur, mengepung Karesidenan Madiun. Tentara Merah hanya secara fisik kota-kota di atas dikuasainya, tidak demikian halnya dengan hati rakyat di kota-kota serta desa-desa di sekitarnya. Amir Moeso tidak berhasil merebut hati rakyat yang masih memercayai kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Amir Moeso PKI meyakini bahwa merebut kekuasaan dengan cara kekerasan sebagai jalan mencapai kemenangan. Mengapa PKI harus melakukan kudeta di tengah Repoeblik Indonesia yang sedang melakukan Perang Kemerdekaan melawan imperialis Keradjaan Protestan Belanda? Dalam doktrin mereka, selain melalui war is the road to communist revolution - perang sebagai jalan menuju pecahnya revolusi komunis; and to the world dictatorship of the communist party - dan sebagai jalan

terwujudnya dunia kepemimpinan diktator sistem partai komunis. Dapat dicontohkan bahwa kemenangan Revolusi Oktober 1917 dimenangkan ketika Tsar Nicholas sedang terlibat dalam Perang Dunia I, 1914-1919 M.

Menurut Lenin, *war is part of a whole* - perang sebagai bagian dari keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan keseluruhan. Lenin menjelaskan *the whole is politics* - dan keseluruhan tersebut adalah politik. Jauh sebelumnya, Clausewitz telah menyatakan *war as an instrument of politics* - perang sebagai instrumen dari politik. Menurut Bubnov kalau terjadi kekalahan hanya *the result of weak or deficient politics* - akibat dari kelemahan dan ketidakefesiensi politik.[67] Stalin menambahkan bahwa perang tidak pernah bebas dari pertumpahan darah - *war are not free of bloodshed*. Melainkan perang yang sebenarnya sangat berlumuran darah - *but actually are very bloodly*.

> Dari pengertian itu, Amir Sjarifoeddin berupaya menjadi Menteri Pertahanan. Dari kedudukan politiknya sebagai Menteri Pertahanan, berhasil menjadikan Lasjkar Pesindo lebih kuat persenjataannya dan jaminan sosial ekonominya daripada badan perjuangan kesenjataan lainnya. Tidak hanya itu, juga membuat TNI Masjarakat dan Angkatan Laut sebagai organisasi kesenjataan tandingan TNI dan ALRI. Apa tujuan pembentukan angkatan bersenjata ini? Jawabannya kemenangan politiknya hanya dapat diperoleh dengan jalan kudeta dan konsekuensinya adalah perang. Dampaknya, pertumpahan darah tidak dapat dihindari. Dengan aksi teror menjadikan lawanlah yang berlumuran darah dan akan terselamatkan darah PKI.
>
> Stalin menggariskan yang terpenting sebenarnya bukan hanya adanya *armed forces under its immediate command* - kekuatan angkatan bersenjata yang siap di bawah komando. Namun, *vast potential reserves of manpower* - sumber daya manusia yang luas dan potensial. Adapun yang dimaksudkan *reserve*, oleh Stalin dijelaskan *reserve* adalah *force – kekuatan yang dapat dieksploitasikan demi kepentingan komunis*.

Amir dan Moeso melihat Indonesia seperti Rusia di tengah Perang Dunia I. Di bawah kondisi perang inilah, Revolusi Oktober 1917 berhasil menumbangkan Tsar Nicolas dan menegakkan Unisoviet Rusia. Kemudian, ditirunya di tengah Perang Kemerdekaan, mereka melancarkan Kudeta PKI di Madiun. Ajaran Marxisme yang menyatakan agama sebagai candu bagi rakyat, dipraktikkan di Indonesia dengan Ulama dijadikan target pembantaian.

---

67 Stefan T. Possony. 1953. *A Century of Conflict. Communist Techniques of World Revolution.* Henry Regnery Company. Chicago, hlm. 22-23.

Penulis dan Jend. (Purn.) Himawan Soetanto
dalam peluncuran Buku I Sejarah Siliwangi.

Sumber: Doc. Pribadi

Padahal, bangsa Indonesia sangat mencintai agama dan para pimpinan agama karena dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Ulama selalu tampil sebagai pembela rakyat yang tertindas oleh imperialis Barat dan Timur. Pembantaian terhadap Ulama membangkitkan kebencian rakyat terhadap kejahatan PKI.

Amir dan Moeso lupa, rakyat Rusia tertindas oleh Tsar Nicholas dengan tentaranya. Sedangkan bangsa Indonesia justru karena Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta terbebas dari penindasan imperialis Keradjaan Protestan Belanda. Tindakan Kudeta terhadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang dicintai rakyat Indonesia, menjadi bumerang terhadap PKI dibenci dan ditinggalkan rakyat.

Kemudian, setelah Kudeta 19 September 1948, Amir, Moeso, dan Soemarsono mencoba menghasut rakyat agar membenci Soekarno-Hatta. Kelaparan dan penderitaan rakyat dalam masa Perang Kemerdekaan akibat dari kesalahan pemerintahan Soekarno-Hatta. Rakyat tidak diingatkan bahwa kelaparan dan penderitaan rakyat terjadi sebagai akibat Indonesia sedang diblokade oleh Tentara Belanda.

Provokasi Amir Moeso terhadap rakyat tidak mempan karena rakyat dalam masa Perang Kemerdekaan sadar dan menerima penderitaan dengan ikhlas. Misalnya rakyat di Bandung, ikhlas membumihanguskan rumah-rumahnya sendiri. Sikap rakyat di Jawa selalu menghormati pemimpinny, baik pemimpin Pamong Praja ataupun pimpinan militer dan partai politik yang sah. Akibatnya, rakyat desa beramai-ramai membantu TNI dalam perang gerilyanya. Mungkinkah rakyat mengerti kalau Amir Moeso memprovokasi rakyat agar menentang TNI yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman?

Apakah mungkin rakyat dapat mengerti pidato Soemarsono Goebernoer Militer PKI di Radio Gelora Madiun bahwa kolaborator fasis Hatta memperalat Repoeblik oentoek mendjadjah kaoem boeroeh dan tani. Pemerintah Repoeblik seloeroehnja terdiri dari pengchianat-pengchianat. Pidato ini tidak dipahami oleh rakyat karena rakyat belum tahu Soemarsono itu siapa? Rakyat belum mengenalnya. Saat itu, rakyat tidak mengenal istilah kolaborator dan fasis. Kalau yang dimaksud rakyat pada saat itu adalah golongan kecil atau wong cilik, mereka belum mengenalnya.

Di bawah kondisi rakyat dan pelajar di Madiun yang menampakkan sikap tetap setia pada pemerintah Soekarno-Hatta maka Presiden Soekarno memerintahkan agar reboet kembali Madiun dari tangan PKI Amir Moeso. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Siliwangi dan Brigade S, merebut kembali Madiun secepatnya.

Himawan Soetanto dalam Mari Bung, Rebut Kembali, menuturkan secara detail langkah Siliwangi dalam operasi militernya dari arah Tawang mangu, Sarangan, Plaosan, Magetan, Gorang Gareng, Maospati, Takeran, Walikukun, Ngawi, hingga masuk ke Madiun. Selanjutnya, dituturkan pula gerakan operasi Brigade S bersama Lasjkar Hizboellah dari arah timur, Nganjuk, Gunung Wilis kemudian masuk ke Madiun. Dilanjutkan dengan pengejaran ke arah selatan, mengejar Moeso lari ke Ponorogo.

> Rakyat dan para pelajar terkejut hadirnya Tentara Siliwangi dan Brigade S, masuk Madiun dengan Bendera Merah Putih. Ternyata, Kudeta PKI di Madiun 19 September 1948 hanya mampu bertahan selama 11 hari. Tepat 30 September 1948 jam 16.00, Tentara Siliwangi pimpinan Mayor Sambas berhasil merebut kembali Madiun. Para Ulama bersujud syukur terbebas dari pemerintahan diktator Tentara Merah. Apalagi para Ulama yang mendengar dirinya sudah terdaftar untuk mendapat giliran diculik dan dibinasakan oleh PKI.

Akhir Kudeta PKI Amir Moeso

Tentara Merah sudah mundur meninggalkan Madiun ke Dungus. Dari Kediri, sebelum Tentara Merah mampu mengonsolidasi, di Dungus diserbu oleh Batalyon Sabaroeddin dari Brigade S. Pimpinan PKI lari dan gerakan mundurnya terpecah dua arah. Moeso bersama pengawalnya melarikan diri ke arah Ponorogo. Amir Sjarifoeddin dengan segenap Tentara Merahnya mundur ke arah Purwodadi. Sebelum melarikan diri, PKI melakukan pembantaian massal di Gorang Gareng Magetan dan Takeran Maospati, serta di sebelah timur Madiun, yakni Dungus.

Kompi Soemardi bersama Kompi Hizboellah bergerak dari Trenggalek Kediri menuju ke Ponorogo. Di Semanding dekat Sumoroto Ponorogo, Moeso bersama pengawalnya, bertemu dengan Kompi Soemardi dan Kompi Hizboellah, terjadilah kontak tembak yang tidak dapat dihindari lagi. Di sinilah berakhirnya kepemimpinan Moeso, tertembak mati.

Menurut Arnold C. Brackman dalam Indonesian Communism A History, Moeso 20 tahun lamanya berada di Moskow, 1928-1948. Pada 11 Agustus 1948, Moeso datang dari Moskow ke Jogyakarta. Pada 19 September 1948 bersama Mr. Amir Sjarifoeddin memimpin Kudeta PKI di Madiun. Moeso tertembak mati pada 31 Oktober 1948. Kemudian, pada 8 November 1948 jenazahnya dibakar oleh ribuan rakyat yang menyaksikannya.

Berarti Moeso baru sempat memimpin kembali PKI setelah tiba kembali ke Indonesia dari Rusia sekitar 90 hari, 11 Agustus-8 November 1948. Selain itu, Moeso hanya mampu memimpin Kudeta PKI di kota Madiun selama 11 hari dari 19-31 September 1948. Dari Madiun, lari ke Dungus, dan dari Dungus lari ke Semanding Sumaroto Ponorogo. Di sini, jasadnya dibakar habis menjadi abu, di tengah ribuan rakyat.

Sebenarnya, Moeso menyandang nama Nabi Musa, tetapi sikap hidupnya dibentuk oleh Marxisme dan menghabiskan energi dan jatah waktunya, mencoba untuk meniadakan agama Islam dan membantai Ulama dan Santri di Indonesia. Di wilayah yang tidak jauh dari Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, habislah energi Moeso untuk melawan Ulama dan Santri. Tidak jauh pula dari desa Tegalsari, Kabupaten Ponorogo, Keresidenan Madiun, wilayah yang dibangun oleh Kandjeng Kiai Bagoes Kasan Besari, moyang H.O.S. Tjokroaminoto, Moeso berakhir sejarahnya.

Dari Madiun Dihentikannya Komunis

Di Madiun, *National Congres Centraal Sjarikat Islam*, dipimpin oleh Oemar Said Tjokroaminoto memutuskan Disiplin Partai dan Sjarikat Islam berubah menjadi Partai Sjarikat Islam, 1923 M. Disiplin Partai maksudnya pimpinan Partai Sjarikat Islam tidak dibenarkan menjadi pimpinan Perserikatan Komunis di India - PKI yang didirikan oleh Samaoen dan Darsono. Demikian pula pimpinan Perserikatan Komunis di India tidak dibenarkan menjadi pimpinan Partai Sjarikat Islam.

Dari Semarang, Samaoen dan Darsono melawan Oemar Said Tjokroaminoto, Agoes Salim, dan Abdoel Moeis dengan membelah Sjarikat Islam dari dalam. Dari Madiun, Partai Sjariat Islam, Oemar Said Tjokroaminoto, Agoes Salim, dan Abdoel Moeis, membersihkan partainya dari infiltrasi PKI melalui disiplin partai.

> Di Madiun pula, Tan Malaka pimpinan Partai Moerba yang dikenal sebagai Komunis Nasional, mengadakan rapat yang merumuskan rencana Kudeta 3 Juli 1946 terhadap Kabinet Sjahrir dan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, di Jogyakarta.
>
> Di Madiun, pada 19 September 1948, PKI Amir Moeso melancarkan Kudeta terhadap pemerintah Repoeblik Indonesia. Hanya berlangsung selama 11 hari Madiun dikuasai oleh PKI Amir Moeso.

Catatan sejarah ini, Madiun dijadikan sebagai kota National Congres Centraal Sjarikat Islam untuk menghentikan pengaruh komunis ke dalam tubuh Partai Sjarikat Islam, 1923 M. Dari Madiun pula, komunis Tan Malakais menggunakan sebagai kota untuk merundingkan rencana Kudeta 3 Juli 1946. Akhirnya menghasilkan kegagalan. Di Madiun, PKI Amir Moeso memulai Kudeta 19 September 1948. Akhirnya, hanya 11 hari Madiun dikuasai komunis.

Penangkapan Amir Sjarifoeddin oleh Kompi Pasopati

Amir Sjarifoeddin dengan pasukannya mencoba melarikan diri ke arah Semarang dengan tujuan masuk Garis van Mook. Dari sini, Amir bersama pasukannya berharap mendapat perlindungan dari Belanda. Namun, sesampainya di hutan Klambu Purwodadi, Amir, Soeripno, dan Harjono, dengan pasukan PKI yang dipimpin oleh Djoko Soejono dan Soemarsono, pada 29 November 1948 ditangkap oleh Kompi Pasopati. Kemudian, diserahkan kepada Batalyon RA Kosasih/Brigade Siliwangi.

Perlu diperhatikan, Menteri Luar Negeri Belanda, D.U. Stikker, meminta kepada Perdana Menteri Mohammad Hatta, membantu menyelesaikan Kudeta PKI di Madiun. Masalah Kudeta PKI di Madiun dijawabnya sebagai masalah dalam negeri. Repoeblik Indonesia akan menyelesaikannya dengan cara Repoeblik Indonesia.

> Andaikata diizinkan bantuan Belanda oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta maka dapat diperkirakan secara politis, Amir Sjarifoeddin yang berjasa terhadap van Mook dan berhasil menikam Repoeblik Indonesia dari belakang, serta mau menandatangani hasil Perundingan Renville yang menguntungkan Belanda, pimpinan PKI Amir Sjarifoeddin tentu akan diselamatkan oleh Keradjaan Protestan Belanda.
>
> Selain itu, dari tinjauan kepentingan penjajah Belanda, Amir Sjarifoeddin mempunyai kesamaan jasanya dengan Sneevliet. Terbelahnya kekuatan Sjarikat Islam dari dalam, melalui upaya Sneevliet mendirikan PKI dari Sjarikat Islam Semarang. Amir Sjarifoeddin dengan mendirikan PKI dan Kudeta di Madiun, berhasil membelah dan menikam pemerintah Republik Indonesia dari belakang. Walaupun saat itu, Perang Dingin antara Blok Barat Kapitalis dan Timur Komunis sesudah selesai Perang Dunia II, mulai menghangat.
>
> Politik memungkinkan melakukan kerjasama atas dasar kesamaan kepentingan. Seperti, Amerika Serikat bersedia mempersenjatai Stalin Unisoviet Rusia dalam menghadapi Hitler Jerman dan mau mempersenjatai Mao Ze Dong dalam menghadapi serangan Kaisar Hirohito Jepang di Cina. Van der Plas mau bekerjasama dengan Sardjono PKI Sibar di Australia.

Agresi Militer Belanda Kedua

Tiga bulan kemudian, setelah Kudeta PKI di Madiun 19 September 1948, Kerajaan Protestan Belanda melancarkan Aksi Militer Kedua, 19 Desember 1948, masuk ke Ibukota Perjuangan Jogyakarta, tetapi tidak dapat menjumpai pimpinan PKI Amir Sjarifoeddin dan kawan-kawannya. Belanda hanya berhasil menangkap dan menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa Menteri lainnya. Mereka juga tidak mampu menangkap Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Amir Sjarifoeddin bersama 11 pimpinan PKI, atas perintah Gubernur Militer Surakarta, Kolonel Gatot Soebroto, dijatuhi hukuman mati di desa Ngalihan, Karanganyar, Surakarta. Namun, tidak demikian halnya dengan Aidit, Lukman, Nyoto, Sudisman, dan Sakirman, bebas dan berhasil membangkitkan kembali PKI. Kemudian, ditandaskan oleh Aidit, PKI tetap mempertahankan Merah Putih. Aidit sebagai penegak Marxisme, mengingatkan Pancasila digunakan oleh PNI untuk membunuh pimpinan PKI di Madiun.[68]

Dengan kata lain, PKI mempertahankan Merah Putih, tetapi dengan bahasa politisnya, tidak identik menerima Pancasila. Setelah PKI kuat, terjadilah pengulangan kudeta berikutnya yang dikenal Gerakan 30 September PKI di Jakarta, 30 September 1965.

> Kudeta Gerakan 30 September PKI, terjadi didahului dengan kembalinya Samaoen pendiri PKI di Semarang, 23 Mei 1920 dari Rusia ke Indonesia pada 12 Desember 1956. Samaoen tinggal di Moskow selama 31 tahun di Rusia. Selain menjadi warganegara Rusia, juga pernah menduduki jabatan Wakil Perdana Menteri Ketiga dari Republik Soviet Tajikistan.
>
> Selanjutnya, Arnold C. Brackman menjelaskan Samaoen di Indonesia diangkat menjadi Penasehat Presiden Soekarno sebagai anggota dari Dewan Perencanaan Nasional yang dipimpin oleh Mohammad Yamin. Berhasilkah Presiden Soekarno menjadikan Mohammad Yamin sebagai pimpinan Komunis Nasionalis Partai Murba Tan Malakais, mengendalikan kelompok PKI Aidit?

Kembali ke masalah Agresi Militer Kedua, memang secara fisik berhasil menangkap dan menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa Menteri lainnya. Namun, tidak berarti pemerintah Repoeblik Indonesia telah berakhir. Bangsa Indonesia masih mampu menjawab tantangan Agresi Militer Belanda Kedua dengan Perang Gerilya.

---

68 Arnld C.Brackman, 1963. Op.Cit., hlm 209.

Long March Siliwangi

Demi meningkatkan Gerilya TNI di Jawa Barat melalui Perintah Siasat No.1 Tahun 1948 dari Panglima Besar Soedirman, Tentara Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Dampaknya, Kudeta Gerakan 30 September 1965 di Jakarta, PKI berhadapan kembali dengan Siliwangi seperti dalam Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948.

Perjalanan kembali Tentara Siliwangi dari Jawa Tengah ke Jawa Barat tidak sama dengan saat Hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ketika Hijrah diangkut dengan kapal laut atau kereta api. Pejalanan kembali ke Jawa Barat bersama keluarga dan penduduk sipil lainnya dengan jalan kaki. Perjalanan kembali yang penuh perjuangan ini disebutnya Long March.[69] Dalam perjalanan Letkol Daan Jahja, Kepala Staf Divisi, dan Mayor Daeng, Komandan Batalyon, ditangkap Belanda di Kebumen. Penangkapan ini tidaklah menghentikan gerakan Long March Divisi Siliwangi bersama keluarga dan rakyat Jawa Barat. Demikian penuturan, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1950.

Sesampainya di Jawa Barat, Divisi Siliwangi berhadapan dengan Tentara Islam Indonesia - TII[70] pimpinan S.M. Kartosoewirjo dan Tentara Belanda serta Negara Pasoendan. Halangan ini pun tidaklah menghentikan perjuangan Tentara Siliwangi untuk tetap setia membela bangsa dan negara Republik Indonesia. Saat itu, telah dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Presiden Soekarno, melalui telegramnya ke Sjafrudin Prawiranegara dari Partai Islam Indonesia Masjumi, menjadikan terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia - PDRI di Bukittinggi, Sumatra Barat. Kemudian, telegram Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim kepada Dr. Soedarsono, menjadikan terbentuknya Exile Government - Pemerintah Dalam Pelarian di India. Sebelum membahas masalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan Exile Government terlebih dahulu penulis bahas masalah pembentukan negara boneka bikinan Letnan Goebernoer Djenderal van Mook.

69 Mengapa dinamakan dengan *Long March* memiliki kesamaan istilahnya dengan *Long March Mao Ze Dong* dan pasukannya, ketika Tentara Komunis Cina pindah mendekatkan posisi geografinya ke wilayah Cina Utara yang terletak dekat dengan perbatasan Rusia. Penulis sampai sekarang belum menemukan siapa yang pertama menuliskan istilah *Long March* dalam Sejarah Siliwangi. Apakah istilah ini sebagai imbangan penggunaan istilah *Hijrah* yang bersifat Islami maka lebih disukai menggunakan istilah *Long March* yang pernah digunakan oleh komunis RRC, akibat sesampainya di Jawa Barat dihadang Tentara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo. Padahal, Tentara Silliwangi baru berhasil menghancurkan PKI di Madiun. Mengapa menggunakan istilah *Long March Mao*? Apakah hal ini sebagai infiltrasi istilah komunis dalam penulisan Sejarah Siliwangi ? *Wallahu 'alam.*

70 Mengapa berhadapan dengan TII bukan NII karena NII diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 sebagai penolakan terhadap *Roem van Royen Statement* yang dinilai oleh S.M.Kartosoewirjo sebagai pengkhianatan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945, status Republik Indonesia Serikat di bawah Ratu Belanda.

Pembentukan Negara Boneka

Dengan jatuhnya Kabinet Amir, van Mook mendirikan negara boneka: Negara Madoera dengan Wali Negara R.A.A. Tjakraningrat pada 23 Januari 1948. Diikuti dengan pembentukan Negara Sumatra Timur dengan Wali Negara Dr. Tengkoe Mansjoer pada 24 Maret 1948. Menyusul Negara Jawa Barat atau Negara Pasoendan dengan Wali Negara R.A.A. Wiranatakoesoemah pada 26 April 1948. Diteruskan dengan pembentukan Negara Jawa Timur dengan Wali Negara R.T.P. Achmad Koesoemonegoro, 3 Desember 1948.

> Menurut Choirul Anam, pembentukan Negara Madoera, 23 Januari 1948, dan Negara Djawa Timoer, 3 Desember 1948, membangkitkan reaksi Gerakan Pemoeda Ansor atau Pemoeda Ansor, pada 14 Desember 1949, yang pernah didirikan 10 Muharam 1353 atau 24 April 1934, dengan nama Ansor Nahdlatoel Oelama - ANO, mengadakan konsolidasi organisasi dan menuntut agar kedua negara boneka van Mook tersebut segera dibubarkan dan bergabung ke Repoeblik Indonesia.

Upaya memecah belah Repoeblik Indonesia dengan pembentukan negara boneka oleh van Mook, terjadi sejak terbentuknya Negara Indonesia Timoer - NIT dengan Presiden Soekawati[71] pada 24 Desember 1946. Selanjutnya, van Mook mendirikan Daerah Istimewa Borneo Barat dengan Kepala Daerah Soeltan Hamid Algadrie II dari Pontianak pada 12 Mei 1947. Diikuti dengan pembentukan Negara Pasoendan dengan Kepala Negara Soeria Kartalegawa. Hal ini ternyata tidak dapat direalisasikan, kecuali Negara Pasoendan pimpinan R.A.A. Wiranatakoesoemah pada 26 April 1948.

Puncak usaha van Mook mengadakan Konferensi Federal di Bandung pada 29 Mei 1948 bertujuan membentuk badan musyawarah antar negara boneka yang diberi nama *Bijeenkomst voor Federale Overleg - BFO* yang dipimpin oleh Soeltan Hamid II dari Pontianak.

Kerajaan Protestan Belanda sebenarnya hanya seluas Provinsi Jawa Barat dan Banten. Berarti hanya sekitar 1,5% luas wilayah nusantara Indonesia. Populasi dan serdadu dari Kulit Putih-nya pun sangat sedikit. Berani menyerang kembali Republik Indonesia karena dinilai masih sangat muda usia. Secara fisik geografis Repoeblik Indonesia dapat dipecah belah dengan mendirikan negara-negara boneka.

71 Perhatikan upaya van Mook dalam menandingi Presiden (Soe)karno maka diangkatlah (Soe)kawati sebagai Presiden Negara Indonesia Timur - NIT. Benarkah dengan menyamakan huruf awal dari nama lawan, sebagai salah satu mitos kepercayaan politisi Barat dalam upaya mengalahkan lawan rundingnya? Benarkah? *Wallahu'alam.*

Bagaimana kalau negara Republik Indonesia berideologi Pancasila ini benar-benar runtuh? Sedangkan Mao Ze Dong di Cina semakin kuat posisinya. Kim Il Sung di Korea Utara semakin berjaya. Demikian pula Ho Chi Minh di Vietnam mampu bertahan dari serangan Amerika Serikat.

Eksistensi Barat di Asia akan terancam bangkrut oleh Political Testament dari Lenin, menyatakan Komunisme akan berhasil menguasai dunia, kalau Rusia membantu gerakan revolusi kemerdekaan di India dan Cina. Kedua wilayah ini memiliki populasi dua pertiga dunia. Revolusi Timur menurut Sinovjev bermuatanthe great reserve of the revolution - kekuatan revolusi yang besar.[72] Terbukti Testamen Politik Lenin tersebut, besar pengaruhnya. Komunis Mao Ze Dong berhasil mendesak terus Chiang Kai Shek. Amerika Serikat sebagai negara superpower tidak mampu membendung kebangkitan Komunis walaupun hanya di wilayah kecil Korea Utara dan Vietnam.

Sebaliknya Indonesia, berhasil menumpas Kudeta PKI Amir Moeso di Madiun. Kudeta PKI Amir Moeso terjadi sebagai kelanjutan Perundingan Renville yang dikonsep oleh van Mook dan Abdoelkadir Wiidjojoatmodjo. Kemudian van Mook berupaya memperlemah posisi Republik Indonesia dengan mendirikan negara-negara boneka. Bagaimana jadinya bila Unisoviet Rusia menurunkan bantuan militernya ke Republik Indonesia dalam menghadapi Agresi Militer Belanda Kedua yang didukung oleh negara-negara imperialis Barat Inggris dan Amerika Serikat?

Apakah karena adanya pertimbangan Testamen Politik Lenin di atas dan realitas kemajuan Komunis Cina, Korea serta Kerala India, serta akibat kesalahan politik kedua pimpinan Belanda maka diberhentikannya Abdoelkadir Widjojoatmodjo dan Letnan Goebernoer Djenderal van Mook digantikan Dr. Beel, dengan jabatan sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda. Dari peristiwa ini, sejak 1948 tidak ada lagi jabatan Goebernoer Djenderal diganti dengan Wakil Tinggi Mahkota Belanda.

Namun, Kerdjaan Protestan Belanda tidak mau memahami pertanda zaman - Zeitgeist, gerakan dunia yang sudah tidak mau mengakui lagi penjajahan. Dr. Beel ternyata tidak beda dengan van Mook, berupaya membatalkan hasil Perundingan Renville dengan Agresi Militer Kedua, 19 Desember 1948 menyerang langsung Ibukota Perjuangan Republik Indonesia Jogyakarta. Tepat tiga bulan sesudah Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948.

Dengan serangan Agresi Militer Kedua tersebut berhasil menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta beberapa Menteri dibuang ke Bangka. Kecuali Panglima Besar Soedirman, tetap memimpin gerilya. Dengan keberhasilannya menangkap Presiden dan Wakil Presiden bersama beberapa

72 Stefan T. Possony, 1953. Op.Cit., hlm. 155.

menteri, Keradjaan Protestan Belanda menargetkan berakhirnya Republik Indonesia. Berhasilkah dengan target itu?

Ternyata, penangkapan dan pembuangan Presiden dan Wakil Presiden, serta para Menteri di Bangka, tidaklah menghentikan Perang Gerilya TNI. Di bawah perintah Panglima Soedirman, Letnan Kolonel Soeharto Komadan Brigade 10 Wehkreise III, berhasil melancarkan Serangan Umum TNI Enam Jam bersama Lasjkar Hizboellah, Tentara Peladjar - TP, Tentara Genie Peladjar - TGP, di Jogyakarta pada 1 Maret 1949.

Resolusi Dewan Keamanan PBB

Dunia internasional dan imperialis Barat, melihat Republik Indonesia masih mampu mempertahankan eksistensinya. TNI bersama Badan Perjuangan lainnya, masih mampu melakukan serangan ofensif yang mematahkan moral Serdadu Belanda. Apalagi dengan telah terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatra Barat dan *Exile Government* di India. Berkat perjuangan keduanya, juga karena perjuangan A.N. Palar, Wakil Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa - PBB, menjadikan Dewan Keamanan PBB pada 28 Januari 1949 mengeluarkan resolusi:

> *Pertama*, Belanda menghentikan Agresi Militer Belanda Kedua.
>
> *Kedua*, Republik Indonesia dan Keradjaan Protestan Belanda, bersedia berunding dalam Konferensi Medja Bundar.
>
> *Ketiga*, mengembalikan pembesar Republik Indonesia dari tempat pembuangan ke Jogyakarta.
>
> *Keempat*, menyiapkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat, paling lambat 1 Juli 1949.
>
> *Kelima*, Komisi Tiga Negara-KTN, Komisi Djasa Baik, digantikan dengan *United Nations Commission for Indonesia - UNCI* atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, bertugas memperlancar proses perundingan.

Di bawah ini penulis bicarakan terlebih dahulu, Kawat Presiden dan Wakil Presiden serta Menteri Luar Negeri tentang perlunya dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan Pemerintah Pelarian di India.

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Menteri Keuangan dan Ketua PDRI

Mr. Sjafruddin Prawiranegara selalu menampakkan loyalitasnya yang tinggi terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Tidak hanya menyelamatkan Keuangan Negara dengan Gunting Sjafruddin. Namun juga menyelamatkan eksistensi pemerintahan Republik Indonesia dengan membentuk dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia - PDRI.

Akibat adanya Agresi Milter II, 19 Desember 1948, Ibu Kota RI Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Presiden, Wakil Presiden dan beberapa Menteri ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Di bawah kondisi ini, Partai Islam Indonesia Masjumi yang memiliki banyak massa pendukung dan memiliki Lasjkar Hizboellah dan Sabilillah yang kuat, tidak dimanfaatkan untuk melancarkan kudeta. Melainkan tetap bertekad menegakkan dan membela Proklamasi 17 Agustus 1945. Partai Islam Indonesia Masjumi, bukanlah partai eksklusif. Dalam setiap pembentukan Kabinet, tidak lupa selalu menyertakan menteri dari Partai Kristen - Parkondo dan Partai Katolik.

Sumber: Harian Abadi, 15 Agustus 1970

Pemerintah Darurat Republik Indonesia

Mr. S.M. Rasjid dalam *Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)* menuturkan bahwa target pihak Belanda itu tidak akan terealisasikan karena bangsa dan negara Indonesia masih punya Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Sebelum terjadi penangkapan, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta mengirimkan Kawat Pertama 19/12/1948 kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Adapun teks Kawat Pertama 19/12/1948 berbunyi:

Mandat Presiden Soekarno/Wakil Presiden Hatta kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara.
Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah mulai serangannja atas atas Ibu Kota Djogja karta.
Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemeriintah Republik Indonesia Darurat di Sumatra.

Jogjakarta, 19 Desember 1948

Presiden — Wakil Presiden

Soekarno — Moh. Hatta[73]

Latar belakang Partai Islam Indonesia Masjumi yang selalu menunjukkan loyalitasnya yang tinggi kepada kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta Panglima Besar Soedirman, baik pada saat terjadinya Kudeta 3 Juli 1946 di Yogyakarta oleh Komunis Nasional Tan Malaka dan Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948 oleh Mr. Amir Sjarifoeddin dan Moeso, menjadikan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, melalui Kawat Pertama, 19 Desember 1948, Ahad Legi, 17 Syafar 1368, mempercayakan kepada Mr. Sjafrudin Prawiranegara[74] dari Partai Islam Indonesia Masjumi untuk menjadi Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia - PDRI.

73 Periksa, Mr. S.M. Rasjid, 1982. *Di Sekitar PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia)*. Bulan Bintang. Jakarta, hlm. 19-20 Kawat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dituliskan oleh Mr. S.M. Rasjid dalam EYD.

74 *Kedaulatan Rakjat*, 30-6-1947, menuliskan Amir Sjarifoeddin dengan ejaan oe dan dengan huruf d – dobel: Sjarifoeddin. Sedangkan *Kedaultan Rakjat*, 4-7-1949, 3-8-1949, menuliskan Sjafrudin Prawiranegara dengan ejaan u dan huruf d hanya satu.

Akibat perang menurut Carl von Clausewitz, mengondisikan realm of uncertainty - ketidakpastian, menjadikan Mr. Sjafrudin Prawiranegara tidak diketahui secara pasti di mana posisinya karena perang menuntut mobilitas yang tinggi dengan memindah-mindahkan kedudukannya, dalam upaya menghindarkan kejaran lawan. Di bawah kondisi ini, memungkinkan Kawat Pertama belum diterima oleh Mr. Sjafrudin Prawiranegara atau ada halangan lainnya. Oleh karena itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim, mengirimkan Kawat Kedua yang ditujukan kepada Dr. Soedarsono, A.N. Palar, Mr. A.A. Maramis di New Delhi:

Kawat Kedua tanggal 19/12/1948
Pro Dr. Soedarsono, Palar, Mr. A.A. Maramis Di New Delhi

Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, jam 06.00 pagi, Belanda mulai serangannja atas Ibu Kota Djogjakarta. Djika ichtiar Mr. Sjafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat di Sumatra tidak berhasil, kepada Saudara dikuasakan untuk membentuk Exile Government Republik Indonesia di India.

Harap dalam hal ini berhubungan dengan Mr. Sjafrudin Prawiranegara di Sumatra. Djika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunja.

Jogjakarta, 19 Desember 1948

Wakil Presiden	Menteri Luar Negeri
Moh. Hatta	H. Agoes Salim

Walaupun Kawat Kedua berisikan pembentukan Exile Government Republik Indonesia di India, tetapi tetap harus menghubungi Mr. Sjafrudin Prawiranegara sebagai pemegang amanah PDRI. Tergambar Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim, tetap mempercayakan pembentukan PDRI adalah Mr. Sjafrudin Prawiranegara dari Partai Islam Indonesia Masjumi.

Ternyata, Mr. Sjafrudin Prawiranegara berdasarkan amanah Presiden dan Wakil Presiden melalui Kawat Pertama, 19 Desember 1948, pada 31 Maret 1949 berhasil

membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia - PDRI[75] dengan susunan kementerian sebagai berikut:

-	Ketua dan Menteri Pertahanan dan Penerangan	:	Mr.Sjafrudin Prawiranegara
-	Wakil Ketua dan Menteri Kehakiman	:	Mr. Soesanto Tirtoprodjo
-	Menteri Luar Negeri	:	Mr. A.A. Maramis
-	Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan	:	Dr. Soekiman Wirjosandjojo
-	Menteri Keuangan	:	Mr. Loekman Hakim
-	Menteri Kemakmuran dan Pengawasan Makanan Rakjat	:	I. Kasimo
-	Menteri Agama	:	K.H. Masjkoer
-	Menteri P dan K	:	Mr.Teuku Mohammad Hasan
-	Menteri Perhubungan	:	Ir. Inderatjaja
-	Menteri Pekerdjaan Umum	:	Ir. Mananti Sitompul
-	Menteri Perburuhan dan Sosial	:	Mr. St. M. Rasjid

Dari fakta sejarah ini, Mr. Sjafrudin Prawiranegara tidak menyalahgunakan amanah pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia - PDRI untuk mengangkat dirinya sebagai Presiden PDRI. Melainkan hanya sebagai Ketua PDRI.

Sementara orang menyatakan bahwa Presiden RI Kedua adalah Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Pernyataan ini perlu dikoreksi kembali. Mr. Sjafrudin Prawiranegara dari Partai Islam Indonesia Masjumi tetap loyal dan mengakui Presiden RI adalah Ir. Soekarno dan Wakil Presiden RI adalah Mohammad Hatta walaupun masih dalam pembuangan.

75 Mr. S. M. Rasjid, 1982. *Op.Cit.*, hlm 33 dari susunan Kabinet PDRI di atas, kalau dibandingkan dengan Kabinet Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1949, hampir tidak terjadi perubahan kedudukannya yang sangat beda. Semula dalam Kabinet Hatta, Mr. Sjafrudin Prawiranegara sebagai Menteri Ekonomi, berubah menjadi Ketua PDRI, merangkap menjadi Menteri Pertahanan dan Penerangan. Mr. Soesanto Tirtoprodjo semula sebagai Kehakimanan, bertambah dengan jabatan sebagai Wakil Ketua.

Amanah tersebut tetap dijaganya hingga 13 Juli 1949. Mr. Sjafrudin Prawiranegara menyerahkan mandatnya kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada saat itu merangkap sebagai Perdana Menteri.

Perang Dingin Blok Barat dan Blok Timur

Sebelum penulis membicarakan Persetujuan Roem-Royen 7 Mei 1949 dan Konferensi Medja Bundar, 23 Agustus 1949, terlebih dahulu penulis bicarakan pengaruh Perang Dingin terhadap penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Pengaruh Proklamasi 17 Agustus 1945, terhadap pemberian kemerdekaan dari negara-negara imperialis Barat untuk Filipina, India, Pakistan, Birma, dan Srilangka.

Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M yang sedang berlangsung di Indonesia, di dunia Barat sedang terjadi Perang Dingin - Cold War antara Blok Barat Kapitalis atau Blok Merdeka dengan Blok Timur atau Blok Rusia Komunis, sebagai kelanjutan dari Perang Dunia II, 1939-1945 M, dan Perang Asia Timur Raya, 1941-1945 M. Dalam Perang Dunia II, Unisoviet dalam pandangan Barat sebagai Fron Kedua.

Perang bagi Rusia sebagai simbol Pembebas Penjajahan karena dalam upayanya pengembangan ajaran Komunisme, strategi Rusia adalah membantu perjuangan rakyat dari negara Asia-Afrika yang masih tertindas oleh imperialis dan kapitalis Barat.

Dampak Perang Dunia II, menjadikan Mao Ze Dong pada 1 Oktober 1949, berhasil mendirikan Republik Rakyat Cina – RRC. Sedangkan Chiang Kai Shek dibiarkan oleh Amerika Serikat, tergusur ke Taiwan. Kemudian, RRC berani membantu Korea Utara dipimpin oleh Kim Il Sung. Mengapa?

Jumlah populasi Cina yang sangat besar dan luas wilayah Cina, menjadikan Amerika Serikat, tidak bersedia masuk ke daratan Cina. Presiden Truman tidak berani pula menggunakan bom atom untuk ketiga kalinya. Presiden Truman hanya berani mengirimkan tentaranya ke Korea Selatan.

Ternyata, Truman's War - Perang Truman menjadikan Amerika Serikat tidak mampu menghadapi gempuran Cina dan Korea Utara. Akibatnya, meninggalkan Korea Selatan yang dipimpin Dr. Syngman Rhee, Juni 1949.

Keberhasilan RRC di Korea Utara, segera melanjutkan membantu Vietnam Komunis yang dipimpin oleh Ho Chi Minh melawan Perancis. Pengalaman kelemahan Amerika Serikat di Korea Utara, menjadikan Amerika Serikat hanya membantu Perancis dengan dollar dan material. Tidak mau mengirimkan tentaranya

ke Vietnam. Akibatnya, Perancis tidak mampu melawan gempuran komunis RRC dan Vietnam Utara.[76]

Melihat perkembangan pengaruh RRC kuat di Vietnam Utara maka Rusia mencoba menanamkan pengaruhnya dengan segera mengakui Republik Demokrasi Vietnam pimpinan Ho Chi Minh pada 31 Januari 1950. Akibatnya, Vietnam Utara berkiblat ke Rusia. Pengaruh pengakuan Rusia ini menjadikan Vietnam Utara semakin kuat. Dibuktikan dengan jatuhnya Benteng Dienbienphu Perancis ke tangan Vietnam Komunis pada 7 Mei 1954. Berikutnya, seluruh Vietnam Utara jatuh ke tangan Ho Chi Minh. Di bawah situasi ini, Amerika Serikat mengirimkan tentara untuk berhadapan dengan Tentara Vietnam Utara yang dipersenjatai oleh Rusia. Akhirnya, Amerika Serikat juga tidak mampu menghadapi gempuran gerilyawan komunis seperti di Korea Utara, menarik tentaranya dari Vietnam Utara.

Vietnam Komunis yang bergerak sejak 1945, Perancis membendung pengaruh komunis dengan menjadikan Kamboja sebagai *free state* - negara merdeka di bawah Norodom Sihanouk pada 7 Januari 1946. Demikian pula Laos juga sebagai *free state* – negara merdeka pada 27 Agustus 1946 di bawah Raja Sisavong Vong.

Kondisi kemajuan komunis yang pesat berhasil melumpuhkan Amerika Serikat di Cina, Korea Utara dan Perancis di Vietnam Utara, menjadikan gerakan komunis tumbuh pula di Birma Partai Komunis Than Tun. Di Malaya Communist Party Malaya, dan di Filipina Hukbalahab.

Oleh karena itu, Inggris buru-buru menyelamatkan wilayah jajahannya. Khawatir *Political Testament* Lenin yang berusaha mengkomuniskan India dan Cina, benar-benar terjadi. Inggris segera menghadiahkan kemerdekaan India, tetapi dengan cara dipecah belah menjadi empat negara agama dan ditinggalkan bom waktu perpecahan, yakni masalah Kashmir.

Sistem pembelahan negaranya meniru sistem pembelahan Eropa. Dipecah belah Eropa menjadi negara-negara Katolik, Protestan, dan Calvinisme. Demikian pula dengan India, dibelah menjadi empat negara agama. Dari sudut ideologi dengan pembelahan

76 Z.A. Maulani, 2002. *Mengapa Barat Memfitnah Islam*. Daseta. Jakarta, hlm 115-120 menuturkan tentang Perang Dingin dan Minyak, tidak terlepas di dalamnya peran dari keluarga Rockefeller Yahudi. Dengan latar belakang upaya penghancuran Jepang dalam Perang Fasifik (1941-1945 M) maka P. Okinama dijadikan gudang senjata Amerika Serikat. Anehnya, setelah perang selesai, Laurence Rockefeller menyerahkan senjata dalam jumlah besar kepada Ho Chi Minh. Dengan perhitungan bila Perancis terusir dari Vietnam maka Laurence Rockefeller akan memperoleh lisensi untuk mengekpoitasi minyak di lepas pantai Laut Cina. Namun, Ho Chi Minh setelah mengusir Perancis, tidak mau menepati janjinya kepada Yahudi Laurence Rockefeller dengan Standard Oil. Akhirnya, Amerika Serikat menurunkan tentaranya ke Vietnam dalam menagih Ho Chi Minh terhadap Laurence Rockefeller. Hasilnya, Amerika Serikat kehilangan 57.000 tentaranya, ketika perang berakhir. Standard Oil telah memperoleh keuntungan besar dari minyak yang diambilnya dari lepas pantai saat perang berlangsung.

berdasarkan agama, diharapkan menjadi benteng pertahanan yang kuat terhadap ideologi komunis yang menganggap agama sebagai candu rakyat. Namun, Inggris adalah kerajaan imperialis, bagaimanapun juga motivasi pembelahan tersebut sebagai tindakan divide and rule yang dibungkus dengan bahasa politik kemerdekaan.

Proklamasi dan Kemerdekaan India Pakistan

India sebagai negara Hindu dan Pakistan Barat dan Timur sebagai negara Islam, dimerdekakan pada 15 Agustus 1947. Bom waktu yang menyulitkan India dan Pakistan adalah masalah Kashmir juga sebagai negara merdeka. Penduduknya beragama Islam, tetapi rajanya Hindu. Demikian pula pembelahan Pakistan menjadi Pakistan Barat dan Timur tersekat oleh India.

> Setelah India merdeka, kerjasama dengan Exile Government yang dipimpin oleh Dr. Soedarsono di New Delhi mengadakan Conference on Indonesia, pada 20 Januari 1949. Hasilnya mendesak Dewan Keamanan PBB agar segera menghentikan Agresi Militer Belanda Kedua 19 Desember 1948. Dari desakan inilah, lahirlah Resolusi Dewan Keamanan PBB, 28 Januari 1949 dan dibentuklah UNCI.

Setelah India dan Pakistan diberikan kemerdekaannya, Inggris juga memerdekakan Birma atau Myanmar sebagai negara Buddha pada 4 Januari 1948, Srilangka sebagai negara Buddha pada 4 Februari 1948. Pembelahan kedua negara Buddha, Srilangka dan Myanmar mirip dengan Islam, Pakistan Timur dan Barat. Namun, negara-negara ini semuanya masih terikat dalam Commonwealth.

Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Militer

Amerika Serikat mempelopori memberikan kemerdekaan atas Filipina, 4 Juli 1946, sebelum Inggris memerdekakan negara jajahannya. Amerika Serikat menjadikan Filipina merdeka, tetapi tetap terikat dengan Amerika Serikat karena pangkalan militernya tetap berada di Filipina selama 99 tahun.

Selain Amerika Serikat mencoba membendung pengaruh Rusia Komunis dengan membantu pembangunan ekonomi Eropa dengan Marshall Plan. Khusus Keradjaan Protestan Belanda sebagai kerajaan imperialis memanfaatkan bantuan dana Marshall Plan untuk mendanai Agresi Militer Pertama dan Kedua mematahkan Perang Kemerdekaan di Indonesia.

Amerika Serikat dengan negara Barat, Jepang, dan Taiwan menciptakan kerjasama dalam pakta pertahanan militer dengan negara-negara pinggir - *rimland*,[77] yang melingkari negara Unisoviet Rusia, RRC, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Kuba. Sedangkan di Eropa dibentuk Pakta Pertahanan *North Atlantic Treaty Organization* - NATO yang bermarkas di Paris Perancis, 1949. Republik Sekuler Turki sekalipun bukan negara di sekitar Atlantik, tetapi karena lawan utamanya adalah Rusia maka bergabung dalam NATO. Berikutnya, Amerika Serikat memperluas pakta pertahanan: *Rio Pact, Anzus Pact, Japanese Pact,* dan *Korean Pact*.

Kemudian, bersama Inggris, Perancis, Australia, New Zeland, dan Thailand, Pakistan serta Filipina, Menteri Luar Negeri AS Dulles di Manila membangun *South East Asia Treaty Organization – SEATO,* 1954. Namun, SEATO hanya mampu bertahan sampai adanya Konferensi Asia Afrika, 24 April 1955 yang melahirkan Dasa Sila Bandung. Ketiga negara Filipina, Thailand dan Pakistan, tidak lagi bersedia negaranya dijadikan pangkalan pertahanan Amerika Serikat dan negara-negara imperialis Barat lainnya.

Di bawah kondisi pembaharuan sistem penjajahan Barat atas wilayah India, Pakistan, Asia Tenggara, Korea Selatan, Jepang, Australia, New Zeland, dan Amerika Selatan seperti di atas, menjadikan Keradjaan Protestan Belanda tetap berusaha mencegah Indonesia agar tidak merdeka 100%. Melainkan tetap berada di bawah naungan Keradjaan Protestan Belanda untuk sementara diikat dalam bentuk Uni Indonesia-Belanda. Barangkali seperti Inggris dengan *Commonwealth-nya.*

Dalam pandangan Amerika Serikat, Republik Indonesia sangat beda dengan pertumbuhan negara-negara Asia Tenggara. Republik Indonesia justru berhasil membuktikan pada dunia, berhasil menumpas gerakan Kudeta PKI Amir Moeso dan RI tetap berjuang untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia. Di Filipina, walaupun di bawah kekuasaan Amerika Serikat, tetapi gagal menghancurkan gerakan Komunis Huk Balahap.

77 Ahmad Mansur Suryanegara, 1996. *Op.Cit.*, hlm.78 tentang Nicolas Spykman, 1994. *The Geography of To Peace* menjelaskan bahwa antara ***the heartland and the marginal seas***, dinilai sebagai ***rimland area – daerah pinggir***. Dengan fungsi sebagai *buffer zone of conflict* - ***zona penyangga konflik*** yang mempunyai fungsi *amfibi*. Oleh karena fungsinya ini dirumuskan dalam tesisnya, ***who controls the Rimland, rule Eurasia*** - siapa yang menguasai daerah pinggir, akan menguasai Eropa dan Asia. ***Who rules Eurasia*** - siapa yang menguasai Eurasia, ***controls the destinies of the World*** - siapa yang menguasai Eurasia akan menguasai keberuntungan dunia.

Roem-Royen Statements

Oleh karena itu, Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB, agar Unites Nations Commission for Indonesia - UNCI, melaksanakan resolusi 28 Januari 1949 maka dipertemukan perwakilan Indonesia - Belanda yang melahirkan Roem-Royen Statements - Persetujuan Roem-Royen pada 7 Mei 1949:[78]

Pemerintah Republik Indonesia bersedia:

1. TNI segera menghentikan Perang Gerilya.
2. Kerjasama menciptakan perdamaian dan ketertiban serta keamanan.
3. Bersedia ikut serta dalam perundingan di Konferensi Medja Bundar -KMB di Den Haag.

Keradjaan Protestan Belanda bersedia:

1. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Jogyakarta.
2. Menghentikan Aksi Militer Belanda Kedua dan membebaskan kembali segenap tahanan politik.
3. Tidak mendirikan lagi negara boneka sesudah 19 Desember 1948.
4. Menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
5. Menyelenggarakan Konferensi Medja Bundar sesudah perintah Republik Indonesia kembali ke Jogyayarta.

Roem-Royen Statements dibuat tanpa melalui perundingan dengan PDRI dan TNI.[79] Akan tetapi, langsung dengan pemerintah Republik Indonesia yang sedang dalam pembuangan. Padahal saat itu, Gerilya TNI di P. Jawa dan Sumatra sedang menunjukkan keberhasilan serangan gerilyanya sehingga benar-benar

---

78 Arnold C. Brackman menjelaskan S.M. Kartosoewirjo menilai *Roem-Royen Statements*, 7 Mei 1949 sebagai pengkhianatan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 karena Republik Indonesia Serikat membentuk Uni Indonesia-Belanda, di bawah Ratu Belanda. Oleh karena itu, S.M. Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia - NII. Itulah sebabnya dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1950*, dituliskan Tentara Siliwangi ketika kembali ke Jawa Barat dihadang oleh Tentara Islam Indonesia - TII, bukan oleh NII karena Negara Islam Indonesia baru didirikan pada 7 Agustus 1949 sebagai reaksi terhadap *Roem-Royen Statements*, 7 Mei 1949.

79 Deliar Noer. 1422/2001. *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*. Mizan, Bandung, h 141 sebenarnya Sjafruddin Prawiranegara merasa dilangkahi. Bukankah PDRI telah diamanati untuk bertindak sebagai pemegang kendali Pemerintah Pusat Republik Indonesia daripada para pemimpin yang sedang dalam tahanan di Bangka. Walaupun demikian dengan penuh keikhlasan, Sjafrudin Prawiranegara menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 13 Juli 1949. Walaupun Panglima Besar Jenderal Soedirman menyarankan lain.

menggoncangkan moral serdadu Belanda. Rakyat di desa juga masih tetap menunjukkan loyalitasnya kepada pemerintah Republik Indonesia dan TNI. Para Ulama dan Santri serta rakyat desa pada umumnya, dengan ikhlas mendukung dan memberikan bantuan tenaga dan logistiknya pada TNI.

Walaupun demikian, Mr. Sjafrudin Prawiranegara Ketua PDRI dan Panglima Besar Jenderal Soedirman, berhati mulia tetap menunjukkan loyalitasnya kepada pemerintah Presiden Soekarno, Wakil Presiden dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, serta menghormati hasil *Roem-Royen Statements.*

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

TNI ANAK KANDUNG RAKYAT

Boeng Dirman kembali ke Yogyakarta

Kesatuan TNI dengan rakyat pada masa Perang Kemerdekaan, 1364-1369 H/1945-1950, menumbuhkan kesadaran rakyat menjadi bangga dan merasa terlindungi oleh TNI dan sangat dicintainya sehingga disebutnya sebagai Anak Kandung Rakyat
Ketika Panglima Besar Soedirman kembali dari daerah gerilya akan kembali ke Ibu Kota Perjuangan RI Yogyakarta, memenuhi penggilan Presiden dan Wakil Presiden.
Rakyat dengan rela memikul tandu panglima Soedirman karena kesehatannya menurun.
Pada 13 Ramadhan 1368, Ahad Wage, 10 Juli 1949.
Dengan Rahmat dan Magfiroh Allah, Panglima Besar Soedirman dapat bertemu dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Pemerintah RI Kembali Ke Jogyakarta

Setelah adanya kesepakatan gencatan senjata - cease fire, pada 22 Juni 1949 dimulai persiapan penarikan Tentara Belanda dari Jogyakarta. Pelaksanaan penarikan diawasi oleh UNCI, berlangsung pada 24-29 Juni 1949. Setelah Jogyakarta kosong dari Tentara Belanda, masuklah TNI ke Jogyakarta pada 29 Juni 1949, Rabu Pon, 2 Ramadhan 1368. Selanjutnya masuk pula:

> Pada 6 Juli 1949, Rabu Kliwon, 9 Ramadhan 1368, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kembali ke Jogyakarta. Diikuti oleh Menteri Luar Negeri Hadji Agoes Salim dan Menteri-menteri lainnya. Rakyat mengelu-elukan kehadiran kembali Presiden dan Wakil Presiden bersama para Menteri. Kemudian, setibanya di Gedung Kepresidenan Yogyakarta, Presiden memimpim doa syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa.
>
> Pada 10 Juli 1949, Ahad Wage, 13 Ramadhan 1368, setelah hampir 7 bulan lamanya bergerilya, Panglima Besar Jenderal Soedirman, masuk ke Jogyakarta. Daerah gerilya yang dilaluinya dari Jogyakarta, Keresidenan Surakarta, Madiun dan Kediri.
>
> Ketika Boeng Dirman masuk Jogyakarta, kondisi kesehatan beliau sedang menurun. Rakyat desa yang dilewatinya menyambut dengan perasaan bangga dan haru serta rasa syukur. Rakyat desa siap sedia kalau diminta menggantikan memikul Tandu Boeng Dirman karena rakyat desa cinta kepada TNI merasakan Boeng Dirman milik rakyat.
>
> Setibanya di Jogyakarta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, dijemput oleh Letnan Kolonel Soeharto. Setelah memeriksa Barisan Kehormatan TNI, diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden dengan pelukan penuh rasa syukur dan haru.
>
> Untuk menjemput Sjafrudin Prawiranegara, Ketua PDRI, ditugaskan Menteri Penerangan Mohammad Natsir, disertai Menteri Kesehatan Dr. J. Leimena dan anggota BPKNIP, terbang dari bandara Halim ke Bukittinggi. Untuk menyampaikan berita bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan kembali ke Jogyakarta pada 6 Juni 1949, Rabu Kliwon, 9 Ramadhan 1368 H.[80]
>
> Pada 13 Juli 1949, Selasa Legi, 16 Ramadhan 1368, Mr. Sjafruddin Prawiranegara bersama pimpinan PDRI diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden bersama seluruh pimpinan negara yang dibuang di Bangka. Pada pertemuan inilah, Mr. Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan mandatnya kepada Wakil Presiden yang merangkap sebagai Perdana Menteri serta Ketua BPKNIP.

---

80 Surat Kabar *Kedaultan Rakjat*, 4 Djuli 1949.

Betapa agungnya nilai perjuangan para pendiri Republik Indonesia pada saat itu. Betapa pula bangganya rakyat saat itu merasakan memiliki kembali pemimpinnya dan negaranya. Suasana haru penuh rasa syukur yang tiada hingga rakyat dan para pemimpin merasa Republik Indonesia benar-benar merdeka.

Sejarah mencatat, di tengah pemerintah Republik Indonesia sedang menghadapi kesulitan besar, tampillah tiga tokoh pimpinan Partai Islam Indonesia, Masjumi: Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Mohamad Roem, dan Mohammad Natsir menunjukkan pretasi juangnya yang sangat tinggi. Benar-benar berjuang atas dasar agama Islam yang diyakininya, menjadikan perjuangannya sebagai ibadah, bersama seluruh potensi bangsa, mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364 H.

Konferensi Medja Bundar

Sebelum memberangkatkan delegasi Indonesia ke Konferensi Medja Bundar, terlebih dahulu mengadakan *reshufle* kabinet. Adapun susunan Kabinet Hatta yang telah di*reshufle* pada 4 Agustus 1949, Kamis Wage, 8 Sjawwal 1368 H, menurut Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, 5 Agustus 1949, Djumat Kliwon, 9 Sjawwal 1368 H, sebagai berikut:

Perdana Menteri	:	Drs. Mohammad Hatta
Wakil Perdana Menteri	:	Sjafrudin Prawiranegara
Menteri Pertahanan	:	Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX
Luar Negeri	:	Hadji Agoes Salim
Dalam Negeri	:	Mr. Wongsonegoro
Kehakiman	:	Mr. Soesanto Tirtoprodjo
Keuangan	:	Mr. Loekman Hakim
Kemakmuran dan PMR	:	I.J. Kasimo
P. U. dan Perhubungan	:	Ir. Laoh
P dan K	:	S. Mangoensarkoro
Kesehatan a.i.	:	Dr. Soerono
Sosial	:	Koesnan
Agama	:	Kiai Maskoer
Penerangan	:	Mr. Sjamsoedin

Zonder Portofolio	:	Dr. Soekiman Wirjosandjojo
	:	Dr. Leimena
	:	Ir. Djuanda

Pesan Perdana Menteri Mohammad Hatta ketika akan berangkat ke Konferensi Medja Bundar, antara lain:

> Perdjuangan kemerdekaan terbagi dua: satu di luar negeri di Den Haag dan dua di dalam negeri. Perdjuangan di luar negeri ditentukan oleh faktor dan kekuatan jang ada di dalam negeri. Artinja, perdjuangan tersebut tidak bisa menjimpang dari pada keadaan dalam negeri. Sebab kalau menjimpang akan tergantung di awang-awang. Tidak ada tanah untuk pidjakan kaki.

Selanjutnya diingatkan:

> Kekuatan dalam negeri pada waktu ini, bukan main hebatnja. Pradjurit dan rakjat seluruhnja melancarkan gerilja dimana2. Bersatu padu dalam satu persatuan bulat menghantam lawan kemerdekaan. Selama revolusi kita jang 4 tahun ini, belum pernah kekuatan dan persatuan sehebat sekarang ini.

KMB merupakan sebuah "plat form" perjuangan kita. Di situ nanti kita menuntiut djandji Belanda jang diutjapkan di forum internasional, jaitu penjerahan kedaulatan kepada bangsa Indonesia jang sungguh, penuh, dan tidak bersjarat - real, complete, and unconditional.

Adapun Delegasi Repubik Indonesia yang ditetapkan pada 4 Agustus 1949, Kamis Wage, 8 Sjawwal 1368 H, dalam Surat Kabar Kedaulatan Rakjat, 5 Agustus 1949, Djumat Kliwon, 9 Sjawwal 1368 H terdiri dari:

Ketua	:	Drs. Mohammad Hatta
Anggota	:	Mr. Mohamad Roem
	:	Prof. Mr. Dr. Soepomo
	:	Ir. Djuanda
	:	Dr. J. Leimena
	:	Mr. Ali Sastroamidjojo
	:	Dr. Soekiman Wirjosandjojo
	:	Mr. Soejono Hadinoto
	:	Kolonel Simatoepang
	:	Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo

Sekretaris : Mr. A.K. Pringgodigdo
Penasehat terdiri dari : S.P. Soesoehoenan Pakoe Boeono XII
: S.P. Mangkoenegoro VIII
: Dr. Sim Ki Ay
: Sewaka

Ditambah dengan Staf Ahli 14 orang. Sekretariat dan Administrasi 9 orang. Penasehat dan Ahli dari Sumatra 4 orang. Wartawan 4 orang: Wonohito - *Kedaulatan Rakjat*. Rosihan Anwar - *Pedoman*. Mohammad Said - *Waspada*. Soekrisno - *Antara*.

Bertolak dari dua strategi dalam negeri dan luar negeri tadi maka Kabinet Hatta juga membentuk Delegasi di Indonesia, terdiri dari:

Ketua : Mr. Soesanto Tirtoprodjo
Anggota : Ir.Laoh, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ali Boediardjo
: Mohammad Natsir Datoek Sinaropandjang
: Mr. Latuharhary, Mr. St. Mohammad Rasjid
Penasehat : Dr. Abu Hanifah, Mr. Sartono, Mr. Sjamsoedin
: Kolonel Djatikoesoemo, St. Iskandar
: Harsono Tjokroaminoto

Konferensi Inter-Indonesia

Pembentukan Delegasi Indonesia di atas, sebelumnya telah diadakan dua kali Konferensi Inter-Indonesia yang diselenggarakan antara Wakil Republik Indonesia dan BFO, di Jogyakarta pada 19-22 Juli 1949. Kemudian, dilanjutkan di Jakarta pada 31 Juli-2 Agustus 1949.

Dalam konferensi ini, dibicarakan bagaimana bentuk kerjasamanya Republik Indonesia Serikat - RIS dengan Keradjaan Protestan Belanda, setelah terjadi pengakuan kedaulatan. Diputuskan pula bahwa BFO mendukung Republik Indonesia bahwa pengakuan kedaulatan atau penyerahan kedaulatan tanpa ada ikatan politik dan ekonomi.

Konsekuensi pembentukan RIS maka dibentuk pula Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat - APRIS terbuka pula untuk *Koninkelijke Nederlands Indische Lager - KNIL*, dan inti APRIS adalah TNI.

Persetujuan Konferensi Medja Bundar

Dasar pemikiran ini dibawa dalam Konferensi Medja Bundar di Den Haag pada 23 Agustus 1949, Selasa Pon, 27 Sjawwal 1368. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta dan BFO diketuai oleh Sultan Hamid II serta Belanda diketuai oleh Mr. van Maarseveen, dan UNCI oleh Chritchey.

Dapat dibayangkan betapa sulitnya, Belanda untuk menerima pikiran yang diputuskan oleh Koferensi Inter-Indonesia. Perundingan berjalan sangat alot sekali. Setelah memakan waktu runding selama sekitar 71 hari, tepat pada 2 November 1949, Rabu Wage, 10 Muharram 1369 H, tercapai persetujuan. Kemudian ditanda tangani oleh Drs. Mohammad Hatta, Mr. J.H. van Maarseveen, dan Sultan Hamid II. Ketiga-tiganya menyetujui pokok perundingannya, antara lain :

> Pertama, pada 27 Desember 1949 akan dilaksanakan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.[81]
>
> Kedua, satu-satunya organisasi kesenjataan RIS adalah APRIS. Dengan intinya adalah TNI. KNIL dibubarkan dan diterima dalam APRIS. Dibentuk Misi Militer Belanda yang bertugas melatih APRIS.
>
> Ketiga,Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.

Setelah adanya penandatanganan Konferensi Medja Bundar - KMB di atas, pada 14 Desember 1949 disahkannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dalam Konstitusi RIS, negara berbentuk federasi terdiri dari Republik Indonesia dengan luas wilayah seperti dalam ketentuan Perundingan Renville, dan negara boneka bikinan van Mook, serta daerah lainnya yang tidak termasuk wilayah keduanya.

> Sistem kelembagaan perwakilan memiliki sistem dua kamar. Terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun yang dimaksud dengan Senat sebagai perwakilan negara/daerah bagian. Setiap daerah diwakili dua orang wakil. Sedangkan jumlah Dewan Perwakilan Rakyat disepakati 150 wakil.

---

81 Istilah penyerahan dari pihak Keradjaan Protestan Belanda, dalam penulisan Sejarah Indonesia ditafsirkan menjadi bukan penyerahan melainkan pengakuan kedaulatan Indonesia karena pemilik kedaulatan atas Indonesia yang sebenarnya adalah bangsa Indonesia. Sedangkan Keradjaan Protestan Belanda sebagai penjajah, perampas kedaulatan bangsa Indonesia.

Pengangkatan Presiden dan Kabinet RIS

Selanjutnya, menurut Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, pada 15 Desember 1949. Kamis Pahing, 24 Sapar 1369 diadakan Pemilihan Presiden RIS dengan calon tunggal Ir. Soekarno. Diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Presiden RIS yang dipimpin oleh Mr. Mohamad Roem. Pada 17 Desember 1949, Sabtu Wage, 26 Sapar 1369, bertempat di Bangsal Sitihinggil Kraton Jogyakarta, Ir. Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumah Atmadja.

Mohammad Hatta ditetapkan pula sebagai Wakil Presiden dan dilantik pada 20 Desember 1949, Selasa Pahing, 29 Sapar 1369, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RIS. Adapun susunan Kabinet RIS menurut Surat Kabar *Kedaulatan Rakjat*, 21-12-1949, Rabu Pon, 30 Sapar 1369 H adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri	:	Drs Mohammad Hatta
Menteri Luar negeri	:	Drs Mohammad Hatta
Pertahanan	:	Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX
Dalam Negeri	:	Anak Agoeng Gde Agoeng
Keuangan	:	Mr. Sjafrudin Prawiranegara
Kemakmuran	:	Ir. Djuanda
Perhubungan, Tenaga		
Dan Pekerdjaan Umum	:	Ir. Laoh
Kehakiman	:	Prof. Mr. Dr. Soepomo
P dan K	:	Dr. Abu Hanifah
Kesehatan	:	Dr. Leimena
Perburuhan	:	Mr. Wilopo
Sosial	:	Kosasih
Agama	:	Wahid Hasjim
Penerangan	:	Arnold Mononutu
Negara	:	Sultan Hamid II
	:	Mr. Mohamad Roem
	:	Dr. Soeparno

Program Kabinet RIS

Pertama, menyelenggarakan pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia dengan saksama. Reorganisasi KNIL dalam APRIS.

Kedua, menyelenggarakan keamanan umum agar terjaminnya hak-hak demokrasi.

Ketiga, memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat, menyehatkan keuangan, perhubungan, perubahan dan kesehatan.

Keempat, mengusahakan tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum dan segera menyelengarakan Pemilu untuk Konstituante.

Kelima, menyempurnakan Perguruan Tinggi dan membangun pusat kebudayaan Keenam, menyelesaikan soal Irian dalam tahun ini.

Ketujuh, menjalankan Politik Luar Negeri yang memperkuat kedudukan RIS dan berupaya agar Uni berguna untuk RIS, serta RIS agar menjadi anggota PBB.

Dengan adanya Ir. Soekarno diangkat menjadi Presiden RIS maka untuk Presiden RI diangkatlah Mr. Asaat di Jogya karta.

Hasil Persetujuan Konferensi Medja Bundar itu sangat melukai hati para patriot Indonesia. Bagaimana mungkin TNI harus mampu membuka hati untuk menerima kehadiran KNIL untuk kerjasama membangun Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat - APRIS. Kemudian, harus pula membenarkan bahwa kehadiran Misi Militer Belanda bertugas untuk melatih aktivitas TNI. Dengan cara ini, dengan mudah TNI akan dipatahkan oleh penjajah Belanda. Wilayah Republik Indonesia seperti yang telah disepakati bersama dalam Perundingan Renville, hanya terdiri dari delapan kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk Republik Indonesia diangkat Presiden Assaat.

Pengakuan Kedaulatan RIS

Situasi ini disiapkan untuk menyambut detik-detik penanda tanganan Pengakuan Kedaulatan dari pemerintah Belanda yang direncanakan pada 27 Desember 1949. Untuk kepentingan tersebut pada 23 Desember 1949 berangkatlah delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Drs. Mohammad Hatta.

> Penandatanganan tersebut dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda dilaksanakan di Istana Keradjaan Protestan Belanda, dihadiri oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Wilem Drees, Menteri Seberang Lautan, Mr. A.M.J.A. Sassen, dan Ketua Delegasi RIS, Drs. Mohammad Hatta.
>
> Di Indonesia, dilaksanakan di Jakarta, antara Sri Sultan Hamengkoe Boeana IX dengan Wakil Tinggi Mahkota, A.H.J. Lovink.
>
> Pada tanggal yang sama, di Jogyakarta, dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat.[82]

Sehari setelah adanya penanda tanganan pengakuan kedaulatan Indonesia, 27 Desember 1948 maka Presiden Soekarno pada 28 Desember 1949 kembali ke Jakarta. Rakyat dengan antusias menyambut kehadiran Presiden seperti pertama kali Ir. Soekarno diangkat sebagai Presiden RI, sehari sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Rakyat tidak membedakan antara Ir Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia - RI atau sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat - RIS. Walaupun sudah adanya pemisahan antara kedua jabatan tersebut. Mr. Assaat sebagai Presiden RI, dan Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS. Pemisahan ini belum dipahami benar oleh rakyat. Mereka hanya mengerti bahwa Boeng Karno adalah Presiden.

Partai Politik bagi rakyat awam sebagai tempat berjamaah dan menambah ilmu tentang kenegaraan dan pemerintahan. Sekaligus sebagai media rakyat menunjukkan baktinya pada negara dan bangsa. Apalagi, mengenai arti bahasa perundingan, rakyat awam tidak banyak memahami bahasa perundingan yang banyak makna dan tafsirnya.

Bagi rakyat awam, tertanam pemahaman tindak melawan peraturan pemerintah dan agama, sebagai tindakan melawan hukum kodrati. Oleh karena itu, kesetiaan, penghormatan serta kebaktian kepada pemimpin sebagai dasar kemuliaan jiwa yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya.

Sikap rakyat terhadap para pemimpin juru runding Konferensi Medja Bundar, tidak diperhatikan kekurangan dan kesalahannya. Bagi rakyat yang penting dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri karena perjuangan para pemimpin sipil dan militer, serdadu penjajah Belanda meninggalkan Indonesia. Kecuali Irian Barat. Rakyat dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan, mereka menyambut kehadiran kembali Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama menteri-menterinya sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan yang berhasil melepaskan rakyat dari penindasan penjajah.

82 Periksa, *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949.*

Rakyat menyadari dengan tidak dilepaskannya Irian Barat atau Papua oleh Keradjaan Protestan Belanda, berarti perjuangan mengakhiri penjajahan di Nusantara Indonesia belum berakhir. Apalagi, perjuangan untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia, seperti yang menjadi tekad bangsa Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 masih memerlukan perjuangan panjang dalam membangun kesatuan dan persatuan seluruh bangsa-bangsa yang terjajah. Penjajah di manapun selalu memperbodoh bangsa-bangsa yang dijajah. Oleh karena itu, sudah menjadi tekad para Ulama bagaimana membangun pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364.

Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam

Dengan adanya kepindahan pemerintah Republik Indonesia dari Jakarta ke Jogyakarta, 4 Januari 1946 maka Sekolah Tinggi Islam yang didirikan pada 27 Rajab 1364, Ahad Legi, 8 Juli 1945, ketika masih di bawah pendudukan Jepang, ikut pula pindah ke Jogyakarta. Perpindahan ini berdampak terjadinya perubahan status Sekolah Tinggi Islam menjadi Universitas Islam Indonesia -UII. Rektor pertama adalah K.H. Kahar Moezakkir. Ketua Dewan Kuratornya adalah Drs. Mohammad Hatta.

Drs. Mohammad Hatta dalam pidato pembukaan Sekolah Tinggi Islam -STI menyatakan:

> Agama adalah salah satoe tiang dari pada keboedajaan bangsa. Bagi rakjat Indonesia jang lebih koerang sembilan poeloeh persen memeloek agama Islam. Menjempoernakan pendidikan agama adalah satoe soal jang maha penting oentoek memperkokoh kedoedoekan masjarakat.
>
> Negara Indonesia Merdeka menghendaki soesoenan masjarakat jang koeat. Masjarakat jang berdasarkan tjita2 persaudaraan dan tolong menolong. Oentoek mentjapai masjarakat jang sematjam itoe, perloelah disempoernakan pendidikan Agama Islam.
>
> Agama Islam adalah pelita jang sebaik-baiknja oentoek menjoeloehi jalan rakjat kedalam masjarakat persaudaraan kedalam masjarakat persaudaraan dan tolong menolong. Oentoek menjempoernakan pendidikan Agama Islam perloe sekali pendidikan tinggi.

PROF. K.H. ANWAR MUSADDAD

Masa mudanya Santri Pesantren Cipari Wanaraja Garut, dan Madrasah Al-Ikhlas Jakarta, serta Madrasah Indonesia di Makkah. Mukim di Makkah selama 11 Tanun. Merupakan murid HOS Tjokroaminoto, dalam Partai Sjarikat Islam Indonesia - P.S.I.I, sekaligus Pimpinan Lasjkar Hizboelah di Uarut bersama K.H. Moestafa Kamil P.S.I.I

Imam Besar Masjid Syuhada di Ibu kota perjuangan RI Yogyakarta dan bersama Prof Kahar Muzakkir mendirikan PTAIN Yogyakarta. Pendiri dan Rektor pertama IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Pembangun Pesantren Musadaddiyah di Garut.

Menolak Ordonasi Perkawinan 1973 di DPR dengan melakukan walk out

Menjalin kerjasama dakwah dengan Orang Kaya Digadong Seri Raja Dato Laila Utama Haji Awang Abdul Rahman bin Pehin Orang Kaya Shahbandar Haji Awang Mohammad Taha dari Brunai

Menghabiskan hayatnya berjuang dan berdakwah untuk mencerdaskan bangsa.

Sumber: Doc. Pribadi

Dari pesan Drs. Mohammad Hatta ini, pendirian Sekolah Tinggi Islam sebagai tuntutan zaman yang tidak dapat ditolak. Suatu keharusan kelengkapan sarana perjuangan umat Islam yang harus dimulai dalam upaya meningkatkan mutu dan tempat studi lanjut pendidikan pesantren. Dari Universitas Islam Indonesia diharapkan akan lahir pemimpin bangsa yang siap melanjutkan perjuangan Ulama.

Apalagi tuntutan tersebut meningkat dengan adanya zaman peralihan antara pemerintahan kolonial Belanda dengan pemerintahan Repoeblik Indonesia, terbukti yang menduduki pimpinan bangsa, baik yang duduk dalam KNIP, Kementerian, Partai Politik umumnya yang berlatar belakang pendidikan SLA atau Perguruan Tinggi dari pendidikan Barat.

Dari Partai Islam Indonesia Masjoemi, yang duduk dalam Kementerian, Kepamongprajaan, KNIP, umumnya yang memiliki latar belakang pendidikan Barat. Misalnya Dr. Soekiman Wirjosandjojo, Mr. Mohammad Roem, Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Sjamsjoeridjal.

K.H. Wachid Hasjim sendiri sebagai Menteri Agama menginginkan adanya pembaharuan sistem pendidikan pesantren. Bukan hanya akan melahirkan santri yang hanya memahami ajaran agama Islam semata. Lebih sempit lagi hanya memahami masalah fiqih. Melainkan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan dari berbagai cabang ilmu yang diperlukan masyarakat. Tidak hanya pelayanan keberagaman macam pendidikannya, tetapi juga harus memiliki sistem penjenjangan atau strata pendidikan: dasar, menengah dan perguruan tinggi.

Fungsi pesantren di bawah penjajah pemerintah kolonial Belanda, beda sekali dengan fungsi pesantren di alam kemerdekaan karena setelah pengakuan kedaulatan maka peranan pegawai negeri sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Terjadilah proses rehabilitasi dan reorganisasi sistem pemerintahan, dampaknya menuntut pula pembaharuan sistem pendidikan. Keseluruhan upaya ini terletak di atas pundak pegawai negeri.

K.H. Wachid Hasjim sangat menyadari setelah memimpin Departemen Agama, sejak pendudukan Jepang, menemui kesulitan memperoleh human resources yang berlatar belakang pesantren dan mampu memimpin administrasi Departemen Agama dengan Kantor Agama. Pada masa penjajahan, Pesantren tidak mengenal kantor. Dengan kata lain, pesantren tidak menyiapkan tenaga siap pakai dalam perkantoran di bawah Departemen Agama di tengah pembaharuan tata pemerintahan.

K.H. Wachid Hasjim terbangkitkan perlunya pembaharuan sistem pendidikan agama, setelah dibukanya Universiteit Gadjah Mada - UGM di Yogyakarta, 3 Maret 1946, yang berstatus negeri. Apalagi, isi pidato Presiden UGM Prof. Sardjito menyatakan bahwa:

Letak Universiteit Gadjah Mada di antara Tjandi Prambanan dan Borobudur maka Universiteit Gadjah Mada haruslah kelak mendjelmakan reinkarnasi Prambanan dan Borobudur.

Mendengar pidato Prof. Sardjito ini, K.H. Wachid Hasjim menyatakan, secara demokrasi dan zaman modern, isi pidato dan sistem mengeluarkan pendapatnya adalah bebas. Diingatkan pada zaman modern masih ada penganut Djawanisme yang masih mengharapkan Universiteit Gadjah Mada menjadi reinkarnasi candi Prambanan dan Borobudur.[83] Lalu, apa yang harus dikerjakan oleh seorang K.H. Wachid Hasjim dengan Departemen Agama yang dipimpinnya?

Departeman Agama terpacu untuk segera membuka sistem pendidikan yang berjenjang dan berstatus negeri, serta berkantor yang terkait dalam kehidupan masyarakat beragama dan bernegara. Oleh karena itu, dibukalah: Pendidikan Guru Agama, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Agama, Penerangan Agama. Di samping itu, Departemen Agama memiliki aktivitas yang terkait dengan luar negeri, yakni masalah Haji dan Umrah untuk Islam. Termasuk pengiriman siswa atau mahasiswa yang ingin studi di Timur Tengah atau tempat lain.

83 Panitia. 1958. *Op. Cit.* hlm. 783-786 K.H. Wachid Hasjim menuliskan namanya dengan nama samaran Ma'mun Bingun, 22 Desember 1951, 23 Rabiul Awwal 1371, dengan judul "*Ummat Islam Indonesia Menunggu Adjalnja Tetapi Pemimpin2 Nja tidak Tahu*".

Sumber: Wiyanto Sumardi

DARI PTAIN, IAIN HINGGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pelopor pembangun Perguruan Tinggi Islam pada masa Pendudukan Balatentara Djepang adalah Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir dengan Sekolah Tinggi Islam - STI di Jakarta. Kepindahannya ke Yogyakarta berubah menjadi Universitas Islam Indonesia - UII berstatus Swasta.

Akibat adanya pidato pembukaan Prof. Sardjito pada saat pembukaan Universitas Negeri Gadjah Mada - UGM karena letak kampus UGM di antara candi Prambanan dan candi Borobudur, dan ingin menjadikan alumninya sebagai pelanjut ajaran Hindu dan ajaran Buddha, membangkitkan K.H. Abdul Wahid Hasjim sebagai Menteri Agama tergugah hatinya ingin mendirikan Perguruan Tinggi Islam Negeri.

Dirintislah melalui Departemen Agama yang membuka Akademi Dinas Ilmu Agama - ADIA. Kelanjutannya berubah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam – PTAIN. Langkah penyempurnaannya diubah menjadi Institut Agama Islam Negeri - IAIN. Di bawah masa Presiden Dr. Abdurrahman Wahid, diluaskan bidang studinya tidak hanya sebatas studi Agama, tetapi juga ama dengan bidang studi seperti yang diselenggarakan oleh Diknas, hingga berubah menjadi Universitas Islam Negeri - UIN.

Tampak pada gambar di atas Fakultas Psikologi UIN Sjarif Hidajatullah Jakarta.

Dengan demikian, Departemen Agama memiliki banyak urusan. Apabila menggunakan istilah departemen maka dalam Departemen Agama terdapat banyak departemen: Departemen Pendidikan dari Pendidikan Rendah, hingga Pendidikan Tinggi, Departemen Pengadilan, Departemen Penerangan, Departemen Urusan Agama, dan Departemen Luar Negeri bidang Haji dan Umrah.

Pembaharuan pendidikan menuntut pembukaan banyak sekolah pada setiap kabupaten, keresidenan dan provinsi. Tuntutan ini membutuhkan tenaga guru. Oleh karena itu, Depatemen Agama membuka sistem pendidikan berjenjang: Ibtidaiyah - SD, Tsanawiyah - SMP, Aliyah - SMA, Pendidikan Guru Agama - PGA, Sekolah Guru Hukum Agama - SGHA. Dibuka pula Akademi Dinas Ilmu Agama - ADIA, selanjutnya untuk strata satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri - PTAIN. Kemudian, berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri - IAIN.[84]

Dengan adanya pembaharuan pendidikan ini, tidaklah berarti sistem pendidikan Pesantren dimatikan, tetapi terus diberdayakan dengan kurikulum yang lebih dinamik disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Nahlatoel Oelama, Persjarikatan Moehammadijah, Persatoean Islam di P. Jawa masih mempertahankan adanya Pesantren. Dengan pertimbangan semakin semaraknya pembaharuan pendidikan hanya ditujukan untuk dipersiapkan menjadi pegawai negeri. Bagaimana kalau kantornya sangat terbatas penerimaan pegawainya?

Pesantren melayani pembinaan terciptanya insan cerdas dan berkarakter Muslim dan mampu mandiri serta siap menjadi pemimpin umat dan bangsa. Untuk tujuan ini, timbullah sistem pesantren terpadu. Di dalamnya, terdapat sistem penjenjangan dari dasar hingga pesantren luhur.

Ulama melihat realitas ketertinggalan dalam menciptakan sarana pendidikan. Beda dengan kalangan Missi dan Zending, telah memiliki gedung sekolah yang representatif warisan masa pemerintahan kolonial. Dana pendidikan dari yayasan pendidikan Islam, terlalu minim yang dimilikinya. Namun, tidak putus asa dalam menjalankan tugas ibadah pendidikannya. Ulama berjuang terus memajukan pendidikan dari pelosok desa hingga kota-kota besar dengan dana swadaya umat Islam.

84 Sesudah Reformasi, 1997 M, terjadi pembaharuan sistem pendidikan. IKIP berubah menjadi Universitas. Pengaruhnya IAIN juga meluaskan bidang kajiannya. Tidak hanya sebagai Institut yang membatasi studi Agama. Diluaskan sama dengan Universitas yang berada di bawah Dikbud. Oleh karena itu, diubah menjadi Universitas Islam Negeri - UIN. Gelar Sarjana UIN tidak lagi seperti IAIN - S.Ag, M.Ag lagi, berubah disesuaikan dengan ilmu yang studinya sama dengan gelar Sarjana pada umumnya di Indonesia.

BANDUNG — SENIN KLIWON, 18 NOPEMBER 1968

Amanat Panglima Dharsono Pada Peresmian Satu²nja RS di Djabar :

Rumah Sakit Islam

Amal Njata Jang Paling Djarang Dalam Kalangan Ummat Islam

BANDUNG, 18-11 (PR). —

PANGDAM VI/Siliwangi Majdjen HR Dharsono Minggu kemarin menegaskan, bahwa suatu pembangunan amal shalih jang njata sebagai fakta, paling djarang terdjadi dalam kalangan ummat Islam. Mungkin bagi ummat2 jang lain soal mendirikan Rumah Sakit adalah suatu soal biasa, soal routine se-akan2 memang seharusnja demikian, jaitu berbitjara tentang amal shalih diikuti bukti njata.

MAJDJEN HR. DHARSONO

Penegasan Panglima Dharsono itu dikemukakan Minggu kemarin dalam amanat tertulisnja jang dibatjakan oleh Kesdam VI/Siliwangi Brigdjen Dr Agusni pada peresmian Rumah Sakit Islam pertama di Bandung, bahkan di Djabar jang diselenggarakan oleh Muhammadijah. Dikemukakan, bahwa bagi ummat Islam terpaksa harus kita akui, jang njata dalam masjarakat ialah tidak seimbang antara andjuran berbuat amal kebadjikan dengan kegiatan membuktikan amal kebadjikan itu setjara njata. Tidak heran, kalau diantara kita jang telah ketjil hatinja dan bertanja: "Apakah adjaran2 Islam dapat mendjawab tantangan2 kehidupan zaman modern ini ?

Perlu diketahui, dengan diresmikannja Rumah Sakit Islam pertama jang dibangun oleh Muhammadijah, di Djl. Banteng 41 Bandung, dalam Kodya Bandung mendapat tambahan satu Rumah Sakit lagi mendjadi 9 Rumah Sakit. Rumah2 Sakit jang telah ada sbb: RS Dr Hassan Sadikin (Pemerintah), RS Wlama Angkasa (AURI), RS Chandra Kiruna (Pindad), RS Kebondjati (Jajasan Kebondjati), RS Borromeus (Katolik), RS Santo Jusuf (Katolik), RS Immanuel (Kristen), RS Advent (Adventist) ditambah RS Islam Muhammadijah (Muhammadijah).

Sajang Sekali

Setelah menjampaikan terimakasih kepada Muhammadijah jang sedjak 1912 lebih menitik beratkan kegiatan dakwahnja pada amal kebadjikan dan usaha2 sosial, Panglima Dharsono dalam amanatnja mengemukakan, bahwa sajang sekali usaha2 Muhammadijah kurang mendapat perhatian dan dukungan dari umma, Islam sendiri. Sajang sekali, demikian Panglima, karena pertentangan antara golongan Islam satu sama lain dan diperhebat dengan nafsu dan kampanje politik serta karena kehidupan ummat jang ibarat telah ber-kotak2 itu, maka apa jang baik dari golongan lain tidak akan diakui, apalagi dibantu. Tidak djarang terdjadi maksud dan usaha jang baik disabotir dengan bermatjam2 tjara dan djalan, al dengan fitnah jang kedji. Achirnja demikian Panglima, ummat beragama menuduh kaum Komunis berbuat dosa dengan tjara tudjuan menghasilkan segala matjam djalan, dan memang demikian pendirian orang Komunis, tapi tjara2 orang Islam bekerdja untuk saling mendjatuhkan, banjak tidak berbeda dengan tjara2 kaum Komunis, dengan unsur fitnah, hasutan asal sadja tudjuan mereka tertjapai.

Bisa Kurang Kepertjajaan

Berbitjara tentang usaha meningkatkan kesedjahteraan materiil dan spirituil masjarakat Indonesia, Panglima mengemukakan, bahwa telah mendjadi rahasia umum, djumlah Rakjat jang menderita penjakit djuga termasuk jang mengaku beragama Islam, besar sekali. Kalau terus menerus dilantjarkan penerangan agama mengenai kebahagiaan dunia dan achirat, sedangkan dalam kenjataan taraf hidup orang beragama, makin hari makin merosot, bukankah hal itu dapat mengakibatkan kekurangan kepertjajaan terhadap Allah, terhadap Agama dan terbukalah kesempatan bagi golongan jang anti Agama maupun anti Tuhan untuk mempengaruhi mereka.

Oleh karena itu, demikian Panglima, dengan didirikannja Rumah Sakit Islam menundjukkan bukti, bahwa orang Islam bukan sadja pandai mentjari2 kesalahan golongan agama lain dengan alasan mendapat bantuan tidak wadjar dari luar negeri, tapi ummat Islam djuga dapat bekerdja dan kalau perlu berlomba setjara sportif. Diingatkan, bahwa sikap melemparkan kesalahan terhadap pendjadjah, PKI dan Orla dengan tidak berbuat sesuatu apa, adalah merupakan dosa. Demikian Panglima Dharsono.

Sumber: Pikiran Rakyat, 18 Nopember 1968

NURIANA

Satu-satunya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat yang menciptakan **Al-Qur'an Mushaf Sundawi**. Kebijakannya dalam bidang Agama menjadikan Jawa Barat tumbuh subur Masjid, Pesantren, dan Pesantren Al-Qur'an, seperti Pesantren Al-Qur'an Babussalam Ciburial Dago Bandung (Pimpinan Drs. K.H. Muchtar Adam) dan Pesantren Al-Falah Cicalengka Sumedang (Pimpinan K.H.Q.Ahmad Syahid, Ph.D.).

Mengondisikan pula lahirnya Tafsir Al-Qur'an Nur Hidayah dalam bentuk Tembang Sunda Cianjuran karya Hidayat Suryalaga, Dosen Fakultas Sastra Jurusan Sastra dan Bahasa Sunda, Universitas Padjadjaran Bandung, dan mendorong lahirnya lingkung seni tembang Cianjuran, antara lain Lingkung Seni Tembang Cianjuran Diah Pitaloka.

Sumber: Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan

H.M. UKMAN SUTARYAN

Satu-satunya Wakil Gubemur Jawa Barat menjadi Ketua ICMI Orwil Jawa Barat. Bersama Dr. Ir. Hidayat Salim - Persjarikatan Muhammadiyah, Drs. H. Shiddiq Amin, MBA - Persatuan Islam, K.H. Iljas Ruhiat - Nahdlatul Ulama, K.H. Drs. Syamsuri Shiddiq - Syarikat Islam, dan Prof. Dr. Djawad Dahlan, Dr. H. Rahman Mass Sp.R., dan Prof. H. Wahab Alif, Dr. H. Nuroni Hidyat - Direktur RSI Al-Ihsan membangun Rumah Sakit Islam Al-Ihsan di Bale Endah Bandung.

H.M. Ukman Sutarman memeroleh Medali dari Presiden Soeharto, Satyalencana Karya Satya Kelas I pada 1992, Satyalencana Bidang Koperasi pada 1994, dan Satyalencana Pembangunan Bidang Pertanian pada 1996.

Raden Rr. Sumaryati adalah dinasti dari kerabat Keraton Demak dan Keraton Yogyakarta, Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, satu-satunya isteri Wakil Gubemur Jawa Barat 22 kali ke Makkah, di antaranya 10 kali ibadah Haji, baik melalui ONH biasa atau Plus.

Sumber: Hasan Syukur

Sumber: Doc. Pribadi

TEMBANG SUNDA CIANJURAN

Media dakwah yang berkembang pula di masa Orde Baru

Sumber: R.Ace Hasan Su'eb, Wawasan Tembang Sunda

Revolusi pembaharuan pendidikan ini belum secara tuntas dilaksanakan, Menteri Agama K.H. Wachid Hasjim menemui kecelakaan mobil di Cimindi, Cimahi, Bandung, 19 April 1953, Ahad Pon, 4 Sya'ban 1372 H.

Pada saat kecelakaan terjadi, oleh Ahsien dari pimpinan Nahdlatul Ulama Jawa Barat, K.H. Wachid Hasjim yang telah wafat dibawa ke Rumah Sakit Santo Boromeus. Melihat Menteri Agama pada saat wafatnya dipulasara di Rumah Sakit Katolik, secara Katolik, mengilhami Badan Kerjasama Wanita Islam - BKSWI Bandung, terbetik niat membangun Rumah Sakit Islam dan juga berfungsi sebagai *Teaching Hospital.*

Niat ini terkabul, dirintis oleh Hj. Hadijah Salim, Hj. Rogajah, serta Hj. Saribanon,dari Badan Kerjasama Sama Wanita Indonesia - BKSWI dan anggota DPRD Jawa Barat, bekerja sama dengan Rektor Universitas Islam Bandung, Dr. K.H. E.Z. Muttaqien, dan Gubernur Jawa Barat, H. Aang Kunaefi, berdirilah Rumah Sakit Al-Islam Bandung, di Jalan Soekarno-Hatta Bandung, 9 Muharram 1411, Rabu Legi,1 Agustus 1990.

Berdirilah tahap awal Rumah Sakit Al-Islam yang disponsori oleh BKSWI Jawa Barat yang terdiri dari: Aisiyah, Persatuan Islam Istri - Persistri, Muslimat Nahdlatul Ulama, Wanita Sjarikat Islam, dan Wanita Persatuan Umat Islam - PUI.[85]

Proses pembangunan Rumah Sakit Al-Islam diawali dari dana yang diperjuangkan oleh Hj. Hadiyah Salim, mendapat dari Kerajaan Saudi Arabia hanya sejumlah Rp 28.000.000,00. Untunglah disusul dengan Presiden Soeharto membantu dana, Bantuan Presiden, lebih besar dari Saudi Arabia, Rp 200.000.000,00. Ditambah dengan partisipasi Dai Sejuta Ummat, K.H. Zainuddin MZ sejumlah Rp 9.000.000,00. Dari ketiga sumber dana itu dan dana umat Islam lainnya, Badan Kerjasama Wanita Islam - BKSWI berhasil membangun Rumah Sakit Al-Islam.

Sebagai catatan tambahan, di Bandung terdapat tiga Rumah Sakit Islam:

Pertama, Rumah Sakit Muhammadiyah di Jalan Banteng atau K.H. Ahmad Dahlan Bandung, dipimpin oleh Dr. Sjachron Fadjar mendapat dana bantuan dari Presiden Soekarno.

Kedua, Rumah Sakit Al-Ihsan[86] di Bale Endah Bandung, dirintis oleh Drs H.M. Ukman Sutaryan Wakil Gubernur Jawa Barat dari dana zakat masyarakat Islam Jawa Barat.[87]

85 Periksa, Tim Penyusun. 2001. *Catatan Sejarah Perkembangan Rumah Sakit Al-Islam Bandung.*

86 Hasan Syukur, 1426H/2005 M. *Birokrat Mencari Keadilan. Perjuangan H.M. Ukman Sutaryan Melawan Kezaliman*. Baitul Hikmah. Bandung, hlm. 67- 104

87 Ulama mulai menyadari pentingnya meningkatkan kesehatan umat, ditantang untuk mendirikan

HJ. HADIYAH SALIM

HJ. ROGAYAH BUCHORIE

Sumber: Doc. Pribadi

Dua Wanita Islam Penggagas dan Pendiri Rumah Sakit Al-Islam di Jalan Sukarno Hatta Bandung.

Terilhami melihat **K.H.Wahid Hasjim, Menteri Agama** wafat karena kecelakaan mobil yang ditumpanginya di Cimindi, Cimahi, kemudian dipulasara secara tidak Islami di Rumah Sakit Katolik Santo Boromeus Bandung.

Dari jawaban para Ulama dan BKSWI terhadap tantangan zamannya ini, perkembangan masyarakat Islam, memerlukan adanya tenaga medis. Bagaimana, dari mana dan di mana dididiknya. Universitas Islam Bandung dirintis oleh Dr. K.H. E.Z. Muttaqien, H. Achmad Tirtosudiro akhirnya Rektor Prof. Dr. Endang Saefullah SH. MH dibukalah Fakultas Kedokteran, bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Rumah Sakit Al-Islam, Rumah Sakit Al-Ihsan, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan Rumah Sakit Muhammadiyah.

Gambaran di atas hanya sebagai salah satu contoh, tahapan jawaban Ulama terhadap tuntutan perubahan zaman, dalam upayanya pemenuhan kebutuhan pendidikan meluas meliputi segala bidang. Apabila Pesantren pada masa Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M, telah membuktikan melahirkan alumni yang mampu memimpin Perang Gerilya maka setelah perang selesai, Ulama kembali disibukkan membina Pesanten, Sekolah, Sekolah Tinggi dan Universitas, dengan gaya baru guna membangun umat, mencetak Santri Kader pemimpin bangsa dan negara.

Para Ulama pejuang, seperti K.H. R. Abdoellah bin Noeh, K.H. Noer Ali, K.H. Soetalaksana, K.H. Pardjaman, K.H Sholeh Iskandar, K.H. Rusad Nurdin, K.H. Sjam'oen, K.H. Ahmad Chatib, K.H. Joesoef Hasjim dan masih banyak lagi, selesai perang tanpa menuntut tanda jasa, kembali berjuang membina pesantrennya atau lembaga pendidikan lainnya.

Misalnya, K.H. Sjam'oen sebagai Komandan Divisi Tirtajasa Banten, kembali membina Pesantren Al-Chorijah Citangkil Cilegon Banten. K.H. R. Abdoellah bin Noeh, Danyon Peta Batalyon I Jampang Kulon, Tentara Keamanan Rakjat -TKR, KNIP Jogyakarta, kembali membina Majlis Al-Ghazali di Bogor. Melalui Pesantren yang dipimpinnya, dibentuklah *character and national building* masyarakat dan alumninya menjadi *Insan Kamil* yang kreatif, berguna dan mandiri.

K.H. R. Abdoellah bin Noeh tidak hanya aktif sebagai pembina Pesantren di Bogor, tetapi juga menjadi Dosen Senior Lektor Kepala di Fakultas Sastra dan Bahasa Arab Universitas Indonesia Jakarta. Diangkat sebagai Sesepuh dari Majlis Al-Ghazali dan Majlis Al-Ihja.

Rumah Sakit Islam dan Fakultas Kedokteran. Penulis kira belum pernah diterbitkan secara khusus Sejarah Pendirian dan Perkembangan Rumah Sakit Islam dan Fakultas Kedokteran di Indonesia. Perlu diteliti di mana dan bilamana serta siapa atau organisasi apa yang mendirikan. Misalnya Rumah Sakit Islam Surakarta di pimpin oleh Dr. Mohammad Djufri, lebih dahulu mana dengan Rumah Sakit Islam Jakarta - didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam pimpinan Prof. Dr. Jurnalis di Cempaka Putih Jakarta, dllnya.

DR. K.H. E.Z. MUTTAQIEN

Bersama A.H. Nasution dan Dr.Ibnu Sutowo
menasionalisasi perusahaan Belanda
Ketua DPRD Jawa Barat
Pendiri Sekolah Dasar Pertjobaan Islam di Bandung
Ketua GPII ikut dipenjara di RTM Madiun karena anti komunis
Ketua Madjelis Ulama Indonesia Jawa Barat
Rektor ke-3 Universitas Islam Bandung
Pendiri Lembaga Sejarah Universitas Islam Bandung
Pendiri Badan Amal Muslimin Pancasila
Pendukung gerakan Keluarga Berencana di Jawa Barat
Pendiri Rumah Sakit Al Islam Sukarno Hatta Bandung

Sumber: Doc.Pribadi
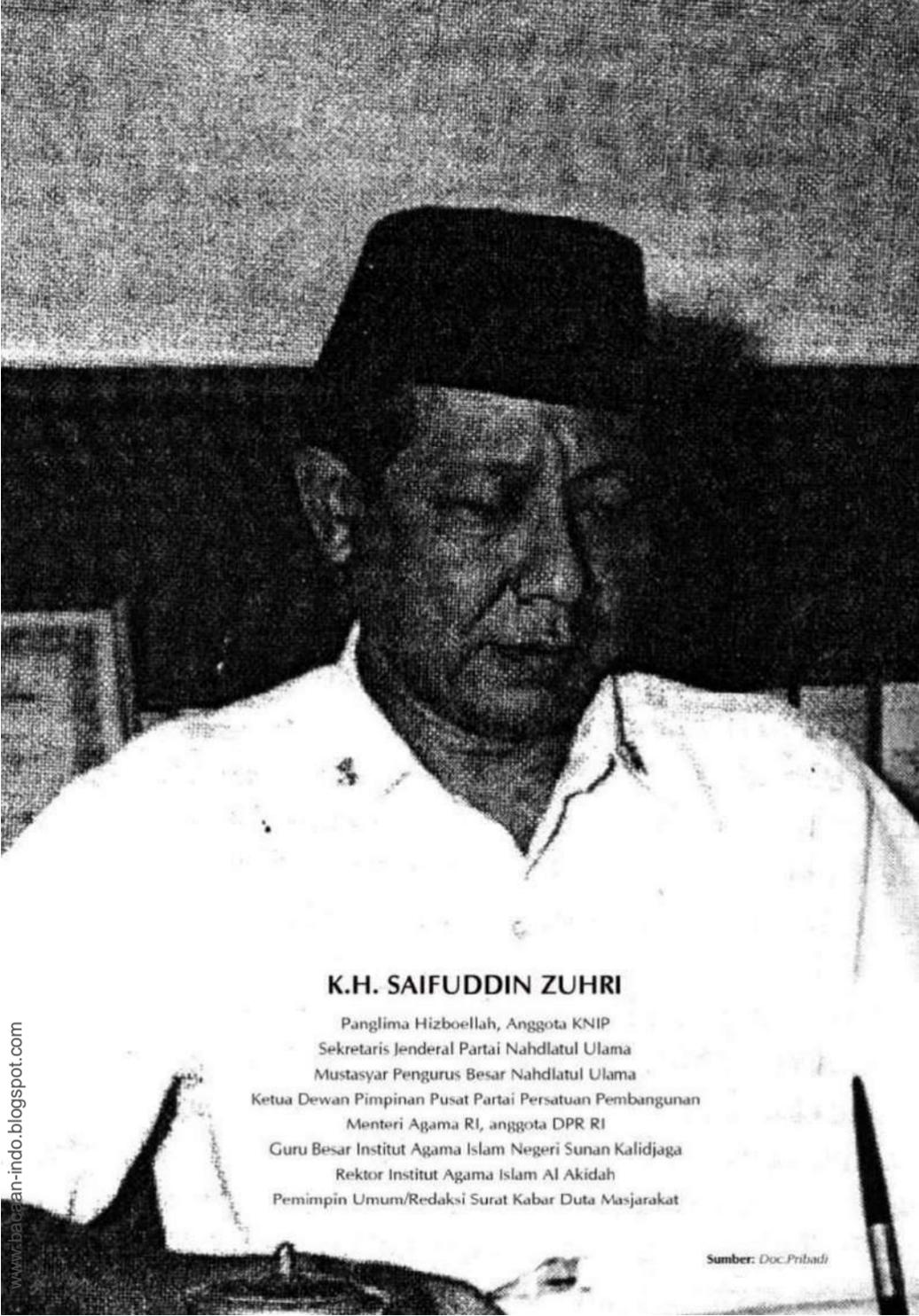
K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Panglima Hizboellah, Anggota KNIP
Sekretaris Jenderal Partai Nahdlatul Ulama
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Menteri Agama RI, anggota DPR RI
Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalidjaga
Rektor Institut Agama Islam Al Akidah
Pemimpin Umum/Redaksi Surat Kabar Duta Masjarakat

Sumber: *Doc.Pribadi*

> K.H. Sholeh Iskandar setelah meninggalkan Tentara Peta, aktif dalam Perang Gerilya dari Lasjkar Hizboellah. Aktif pula dalam Partai Islam Indonesia Masjumi. Pada masa Orde Baru, aktif membangun Darul Falah Pesantren Pertanian dan Peternakan satu satunya pesantren di Indonesia, tidak hanya diajari masalah agama, melainkan juga diajari memelihara ternak dan masalah pertanian. Di samping itu, juga ikut serta membina Universitas Ibn Khaldun di Bogor. Pada 21 Mei 1980, menjadi pendiri Yayasan Lembaga Sejarah Islam.
>
> Prof. Dr. Buya Hamka, selain ikut aktif dalam pembinaan Persyarikatan Muhammadiyah, membina Majalah Panji Masyarakat, serta Universitas Muhammadiyah tetapi juga membangun Yayasan Lembaga Sejarah Islam.[88] Dirasakan perlu pula para Ulama menuliskan Sejarah Umat Islam Indonesia dari sisi analisis Ulama. Tidak kalah pentingnya, di bidang politik, Prof. Dr. Buya Hamka menjadi anggota Konstituante 1955-1959 M. Tidak lupa menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia di masa Orde Baru.

Persyarikatan Muhammadiyah mendirikan IKIP juga ditantang untuk membuka Universitas Muhammadiyah di Jakarta, Cirebon, Jogyakarta, Surakarta, Malang. Selain Fakultas Sastra, Teknik, juga dibuka Fakultas Ekonomi. Dari sini, diharapkan bangkit kembali kesadaran ekonomi dan perlunya umat Islam menguasai kembali kekuasaan pasar yang pernah dialihkan oleh pemerintah kolonial Belanda penguasaan pasar pada Vreemde Oosterlingan.

> K.H. Rusad Nurdin sebagai pimpinan Lasjkar Hizboellah, kembali aktif sebagai anggota Konstituante dari Masjumi, di masa Orde Baru, Ketua Parmusi Jawa Barat, Yayasan Dana Al-Falah, Ketua Parmusi Jawa Barat, Dewan Dakwah Islam Indonesia - DDII Jawa Barat, dan Yayasan Istiqamah Bandung. Di samping itu, juga aktif memberikan kuliah Pendidikan Agama di ITB, IKIP dan Unpad serta Ketua Yayasan Pendidikan Islam Universitas Islam Bandung. Pada Orde Reformasi menjadi Sesepuh Partai Bulan Bintang.
>
> Di Bandung, Idham Chalid meresmikan Universitas Nahdlatul Ulama -UNU dengan dua Fakultas Hukum dan Ekonomi. Berikutnya, namanya berubah menjadi Universitas Islam Nusantara-UNINUS di Jalan Sukarno-Hatta sebagai pemindahan kampusnya dari jalan Galunggung Bandung. Bersamaan waktunya dengan Idham Chalid tersebut, I.J. Kasimo membuka Universitas Katolik Parahiyangan - UNPAR dengan dua Fakultas Hukum dan Ekonomi di Jalan Merdeka Bandung.

88 *Yayasan Lembaga Sejarah Islam*, didirikan pada 21 Mei 1980, Rabu Pahing, 6 Rajab 1400, oleh H. Imron Rosjadi SH., Prof. Drs. H. Amura, Ali Audah, K.H. Soleh Iskandar, Ir. Ahmad Mas'oed Luthfi, Prof. Dr. Hamka, K.H. Hasan Basri, K.H. Achmad Sjaichu, H.S. Prodjokusumo, Prof. Drs. Ahmad Sadeli, K.H. Amiruddin Siregar, M.C. Ibrahim, Drs. Nurul Huda, Ir. H.M. Sanusi, Ahmad Mansur Suryanegara, dihadapan Notaris Ali Harsojo, Jalan Sukabumi 4 Jakarta.

Saat didirikannya Universitas Islam Indonesia - UII di Ibukota Perjuangan Yogyakarta, iklim politik sedang dikuasai oleh kalangan Sosialis Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin. Perlombaan upaya memperkuat posisi, tidak hanya berusaha memiliki organisasi kesenjataan semata. Namun, kelompok Sosialis juga berupaya melemahkan organisasi kesenjataan, organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam melalui berbagai departemen pemerintahan dan militer yang dikuasainya.

Kalangan Sosialis dan Komunis tidak hanya menggusur pimpinan lembaga kenegaraan: KNIP dan Kementerian dari pimpinan yang pernah kerjasama dengan Balatentara Djepang. Namun juga, menguasai Departemen Dalam Negeri dan Luar Negeri dari tingkat Dirjen, serta pimpinan golongan menengahnya. Tindakan ini menjadikan Ulama terkejut karena di tengah suasana kebersamaan, departemen tersebut dimanfaatkan tidak untuk memperkuat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Melainkan lebih digunakan untuk melemahkan peranan Ulama di bidang eksekutif dan legislafif serta yudikatif, melalui kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Apalagi setelah kembalinya Darsono, pendiri PKI di Semarang dari Unisoviet, menduduki jabatan di Departemen Dalam Negeri. Dimanfaatkan untuk mendudukkan orang-orangnya pada struktur kepamong prajaan.

Penggusuran pimpinan pro Jepang digantkan dengan pimpinan pro penjajah Belanda atau Sekutu, dan berideologi Sosialis atau Komunis, berproses sangat cepat. Terbaca terjadi pendudukan institusi pemerintahan kembali dikuasai oleh elit priyayi yang berpandangan kebatinan, sekuler dan anti Islam serta orang-orang sosialis komunis. Dengan mudah terbaca targetnya menghambat perkembangan Islam sebagai kekuatan politik.

Alumni dari sekolah yang diatur oleh Departemen Agama, tidak dapat belajar di jenjang di atasnya pada sekolah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Demikian pula pembatasan lapangan kerja alumni sekolah-sekolah atau perguruan yang dibina oleh Departemen Agama tidak dapat bekerja pada Departemen RI lainnya.[89]

89 Di bawah masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid terjadi refomasi sistem pendidikan yang luar biasa demokratisnya. Lahirnya penghargaan yang sama terhadap alumni dari Sekolah atau Perguruan Tinggi antar Departemen. Dihilangkannya pagar-pagar pembatas atau diskriminasi alumni pendidikan antar Departemen dengan Departemen lainnya. Artinya alumni Sekolah, Madrasah atau Perguruan Tinggi di bawah Departemen Agama, terbuka untuk menjadi pegawai atau melanjutkan studinya pada sekolah-sekolah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kecuali pembinaan Kadet AMN Departemen Hankam ABRI dan Kepolisian.

Sumber: Doc.Pribadi

MOHAMMAD NATSIR dan ANWAR HARJONO

Mohammad Natsir Ketua Partai Masjoemi, Menteri Penerangan dan Perdana Menteri NKRI
Anwar Harjono Pendiri Gerakan Pemoeda Islam Indonesia - GPII
3 Oktober 1945, Rabu Pon, 26 Syawwal 1364
dituduh oleh PKI DN Aidit, Anti Pantjasila dan akan mengkanankan Revolusi Indonesia
dipenjarakan di RTM Madiun

Kebangkitan Gerakan Pemoeda Islam Indonesia GPII Anwar Harjono,
3 Oktober 1945 di Jakarta diimbangi oleh Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo Wikana
10 November 1945 di Jogyakarta yang merupakan pendukung Kudeta PKI , 12 Februari 1946,
di Cirebon, pimpinan Mohammad Joesoep, Kudeta Komunis Nasional , 3 Juli 1946, di Jogyakarta
pimpinan Ibrahim Datuk Tan Malaka, dan Kudeta PKI di Madiun , 19 September 1948. pimpinan
Amir Sjarifuddin dan Muso.

Kebangkitan Gerakan Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar Islam

Tantangan ini, dampaknya di luar jalur struktural ke pemerintahan, menurut Feith melahirkan *mass leader* - pemimpin massa di kalangan umat Islam. Sejak awal Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, umat Islam memelopori membangkitkan organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam, diawali pula dengan kesadaran dan semangat bela negara.

Menurut Prof. Abubakar Atjeh, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam, Anwar Harjono, mengambil inisiatif mendirikan gerakan pemuda. Pada 3 Oktober 1945, Rabu Pon, 26 Syawwal 1364 H, terbentuklah Gerakan Pemoeda Islam Indonesia - G.P.I.I di Balai Moeslimin Indonesia, Jalan Kramat Raya 19 Jakarta. Dengan Ketua Umum Harsono Tjokroaminoto, dan Sekretaris Umum Anwar Harjono. Tidak dapat disangsikan, kelahiran G.P.I.I segera dikonter oleh Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo yang lahir sebulan kemudian, pada 10 November 1945.

> Dengan adanya Makloemat X 3 November 1945, para Ulama berhasil merespon secara cepat, mendirikan Partai Islam Indonesia Masjoemi, empat hari kemudian, 7 November 1945, Rabo Pon, 1 Dzulhijjah 1364, Disertai dengan terbentukannya Barisan Sabilillah yang dipimpin oleh K.H. Maskoer sebagai Barisan Istimewa Tentara Keamanan Rakjat. Sedangkan di kalangan pemuda, membentuk organisasi kesenjataan Lasjkar Hizboellah dipimpin oleh Zainoel Arifin. Kemudian antara Barisan Sabilillah, Lasjkar Hizboellah, dan Gerakan Pemoeda Islam Indonesia - G.P.I.I, membentuk Dewan Mobilisasi Pemoeda Islam Indonesia D.M.P.I.I, 26 Oktober 1946, Sabtu Legi, 29 Dzulqaidah 1365, di Malang Jawa Timur.
>
> Di Jawa Barat, Agustus 1947, di bawah Soetoko[90] dibentuklah Dewan Mobilisasi Oemmat Islam Indonesia dengan anggotanya terdiri dari Masjoemi, G.P.I.I, Hizboellah, dan Sabilillah. Menurut Holk H. Dengel, pembentukan ini ditolak oleh S.M. Kartosoewirjo yang menilai sebagai taktik baru dari golongan sayap kiri dalam membatasi kemandirian organisasi Islam karena Soetoko dari Pemoeda Sosialis Indonesia –Pesindo atau golongan kiri.

Dari fakta sejarah ini, memberikan gambaran bahwa Ulama dengan Pesantrennya sebagai tempat persemaian lahirnya generasi patriot bangsa. Organisasi sosial politik, kepemudaan, pelajar berwawasan nasional dan meniadakan etnis orientasinya, bermula dari Pesantren. Misalnya, Anwar Harjono sebelum kuliah di Sekolah Tinggi Islam, berawal sebagai Santri dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur.

---

90 Mashudi, dalam *Memandu Sepanjang Masa*, menjelaskan bahwa Soetoko dari Pemoeda Sosialis Indonesia - Pesindo. Latar belakang inilah yang menjadikan S.M. Kartosoewirjo tidak dapat menerima eksistensi Dewan Mobilisasi Oemat Islam Indonesia - DMOII karena dewan ini dipimpin oleh Soetoko dari Pesindo, Agustus 1947.

Dengan adanya kepindahan Sekolah Tinggi Islam dari Djakarta ke Djogjakarta, atas inisiatif mahasiswa Lafran Pane, didirikan Himpoenan Mahasiswa Islam - HMI, 2 Febroeari 1947, Kamis Kliwon, 5 Rabioel Achir 1366.

Tiga bulan kemudian, 4 Mei 1947, di Kantor G.P.I.I, Djalan Margomoeljo 8, Djogjakarta, atas inisiatif Yoesli Ghozali, 4 Mei 1947, Ahad Legi, 12 Djoemadil Achir 1366, pukul 10.00 pagi, didirikanlah Peladjar Islam Indonesia - P.I.I di Djogjakarta.

Dengan demikian sampai saat itu, 1366 H/1947 M, Ulama, Politisi, Pemuda, dan Mahasiswa, serta Pelajar, memiliki satu-satunya Partai Politik Islam Indonesia, Masjoemi. Untuk gerakan pemuda, Gerakan Pemoeda Islam Indonesia-G.P.I.I. Untuk mahasiswa, Himpoenan Mahasiswa Islam-H.M.I. dan pelajar, Peladjar Islam Indonesia-P.I.I. Sedangkan Nahdlatoel Oelama dan Partai Sjarikat Islam Indonesia belum berdiri sendiri sebagai partai politik, dan masih bergabung dalam Partai Islam Indonesia, Masjoemi.

Organisasi ini semuanya terlahir sebagai jawaban terhadap tantangan upaya kembalinya penjajah Belanda yang dibantu oleh Sekoetoe. Kemudian muncul tantangan baru, kelompok Sosialis Soetan Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin. Keduanya menurut M.C. Ricklefs, dalam Sejarah Indonesia Modern, berasal dari sama-sama Sumatra, melancarkan penggusuran pimpinan politik Islam dan Ulama.

Menurut Deliar Noer, Amir Sjarifoeddin berhasil mendesak Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Makloemat X 3 November 1945, yang berdampak lahirnya multipartai politik dengan berbagai ideologinya. Guna mengubah sistem satu partai produk Komite Nasinal Indonesia Poesat - KNIP, 22 Agustus 1945, dan ideologi Pantjasila yang telah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364.

Di bawah tekanan tantangan zaman itu, tidak hanya dirasakan oleh para Ulama dan pimpinan politik, tetapi juga dirasakan oleh para pimpinan organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam. Dampaknya membentuk karakter organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam menjadi peka terhadap masalah politik:

Pertama, menyadari betapa tegarnya sikap para pejuang Islam, dalam diplomasi dan gerilya dalam menjawab upaya kembalinya penjajah Belanda yang mendapat dukungan dari Tentara Sekoetoe Inggris. Sikap ini menyadarkan ketiga organisasi Islam tersebut bahwa imperialisme Barat tidak mendulikan Atlantic Charter 15 Agustus 1941 buatan Inggris dan Amerika Serikat yang tidak membenarkan adanya upaya imperialisme yang menghalang–halangi hak bangsa-bangsa yang akan menentukan kemerdekaannya sendiri.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

INTERNASIONAL ISLAMIC COLLOQUIUM – IIC DI LAHORE

Pertemuan Pakar Islam Internasional - International Islamic Colloquium
Di Lahore, Pakistan, 1377 - 1378 H/1957 - 1958 M.

Delegasi Indonesia berfoto bersama di depan Hotel Fallatis Lahore.
Dari kiri ke kanan: Mohammad Moein, Sekretaris II KBRI. Prof. Anwar Moesaddad.
Prof. Hasbi Ash Shiddiqi. Prof.Dr. Buya Hamka. Mr. Azes Butt Panitia IIC dan Amura.

Umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia dan sebagai sumber kekuatan pembela Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh imperialis Barat tidak diakui eksistensinya. Tersiar berita, kepemimpinan juru runding dalam menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda akan diterima oleh pihak imperialis Barat bila juru rundingnya bukan dari pimpinan organisasi Islam dan bukan pula pimpinan organisasi yang pernah berkolaborasi dengan Balatentara Djepang. Melainkan pimpinan kelompok sosialis dan komunis yang pernah bekerja sama dengan Sekoetoe atau Belanda pada masa Perang Dunia II.

Menyesuaikan dengan berita isu tersebut, terpilihlah juru runding dari kubu Sosialis Soetan Sjahrir dalam Peroendingan Linggardjati dan dari kubu Komunis Amir Sjarifoeddin dalam Peroendingan Renville. Keduanya pernah bekerjasama dengan Sekoetoe dan van Mook. Akibatnya, hasil perundingan yang dipimpin keduanya sangat merugikan Repoeblik Proklamasi. Dampaknya bagi rakyat dan Ulama jadi korban Kudeta PKI Amir Moeso di Madiun, 19 September 1948.

Kedua, ketiga organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam melihat adanya benturan kepentingan antar kubu Sosialis Amir dengan Sosialis Soetan Sjahrir. Kemudian, Sosialis Amir berubah menjadi PKI Amir Moeso. PKI ini juga

> berbenturan kepentingannya dengan Komunis Nasionalis Partai Moerba pimpinan Tan Malaka. Semula diperkirakan kubu Sosialis dan Komunis sangat solid tidak mengalami keretakan di dalamnya. Kenyataannya, kubu Sosialis pecah dan kubu Komunis pun pecah. Walaupun demikian, masing-masing dari mereka tetap menjadikan organisasi Islam sebagai lawannya.
>
> Ketiga, kalangan parpol netral agama melalui jalur birokrasi pendidikan dan kepemudaan, berupaya secara sistemik melemahkan eksistensi ketiga organisasi Islam tersebut. Oleh karena itu, disadari oleh pimpinan organisasi pemuda, mahasiswa, dan pelajar Islam untuk menegakkan ajaran Islam selalu akan bertemu dengan lawan-lawan yang licik. Walaupun demikian, para pimpinan organisasi Islam tidak terkejut karena Al-Quran mengingatkan untuk tidak menjadi terpesona oleh kekuatan materi lawan dan jumlah pengikut lawan karena dengan kekuatan materi dan jumlah lawan tersebut, Allah Swt akan mengujinya di dunia dan mereka akan mati dalam kekafiran (QS. 9: 55 dan 85).

Menghadapi ketiga tantangan itu, terbaca pilihan jawaban dari pimpinan organisasi Islam, selalu bersikap tenang dan terus berkarya dan membangun. Ketiga organisasi Islam tersebut, tetap berupaya meluaskan wawasannya dan kerjasamanya dengan Ulama dan Santri serta organisasi lainnya yang sejalan dan sama tujuan kepentingannya.

Dengan penuh keuletan, mencoba melahirkan kader-kader pelanjut cita-cita perjuangannya. Di kalangan Nahdlatoel Oelama, pada 14 Desember 1949, Rabu Legi, 22 Sapar 1369, tiga belas hari sebelum pengakuan kedaulatan, 27 Desember 1949, Selasa Wage, 6 Rabiul Awwal 1369, Chamid Widjaja mengaktifkan kembali Gerakan Pemoeda Ansor - G.P. Ansor yang pernah dibangun pada 1350 H/1931 M.

> Terbaca pula sikap jawabannya dalam menghadapi tantangan yang memusuhinya, organisasi Islam tersebut ibarat engkang-engkang yang selalu bergerak goyang-goyang dengan kaki-kaki lemahnya, di atas arus deras yang akan menghanyutkan. Kadang terlihat justru karena gerakannya yang kontinyu menjadikan mampu terbang pindah sejenak, menghindarkan diri dari benturan benda yang hanyut di atas permukaan arus.

Dengan adanya tantangan yang membentur dirinya, menyadarkan ketiga organisasi Islam tersebut bahwa lawannya, Komunis Amir Moeso, sangat besar kekuatan dan senjata serta massanya. Merasa kekuatan dan senjata serta massanya besar, PKI tidak hanya melawan Ulama dan Santri, tetapi juga melawan Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Target utamanya adalah melawan TNI beserta Badan Perjuangan lainnya. Memang itulah sasaran kekuatan yang dikudeta.

Sumber: *Doc.Pribadi*

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH - IMM

Umat Islam sedang dihadapkan tantangan arogansi kredit aksi PKI dan organisasi bawahannya, menuntut secara sistemik satu persatu pembubaran organisasi kemahasiswaan Islam. Di bawah kondisi tantangan ini, pimpinan Wilayah Persjarikatan Muhammadiyah Jawa Barat segera menjawabnya dengan membangkitkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah –IMM. Dengan Pembina Ibu Negara Fatmawati Soekarno dan Jenderal Prof.Dr. Moestopo. Acara Ramah Tamah

Duduk Kiri gambar: Pengawal Ibu Fatmawati, A. Mansur Suryanegara Sekretaris Umum. Ahmad Riskawa Sekretaris I, Djenderal Prof.Dr. Mostopo - Pembina. Tengah: Ibu Negara Fatmawati Soekarno. Duduk kanan: Mursalin Dahlan Ketua Umum DPHD IMM Jabar, Pengawal Cakrabirawa, Ibu Hadijah Salim. Berdiri: Mahasiswi IMM dan Ibu Ibu Aisyiah dan Nasiatul Aisyiyah.

Menghadapi kenyataan tantangan ini, dipilihlah jawaban pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam, diwujudkan dalam bentuk meningkatkan aktivitas gerakan organisasinya. Diibaratkan aktivitas organisasinya seperti engkang-engkang yang selalu bergerak. Sekalipun organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam, berada di atas terjangan arus deras lawan yang tak pernah berhenti. Walaupun kaki tumpuan pijaknya sebenarnya sangat lemah, tetapi karena pimpinannya selalu menciptakan gerakan yang *istiqamah* maka berdampak pada organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam menjadi selamat. Terutama karena tidak menjauhkan diri dari Ulama (QS Al-Kahfi 18: 28). Dengan pengertian Ulama termasuk para cendekiawan Muslim.

Misalnya, dua kali peristiwa Kudeta PKI Amir Moeso di Madiun pada 19 September 1948 dan Kudeta G-30-S/PKI pada 30 September 1965 di Jakarta, menjadikan ketiga organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar Islam sebagai lawan PKI yang ditargetkan akan dilumpuhkan.

IMM Bangkit

Di tengah situasi ketegangan nasional yang sedang jor-joran antarpartai politik, atas inisiatif Djajusman Al-Kindi, Sudibjo Markus, Rosad Sholeh, Amien Rais, Mohammad Musa, Mursalin Dahlan, Ahmad Mansur Suryanegara, dan kawan lainnya dari Surakarta dan Jember, membangkitkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah - IMM di Jogyakarta, 29 Syawwal 1384, Sabtu Kliwon, 14 Maret 1964 M.

Tujuan didirikan IMM pada awalnya secara sederhana, yaitu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antarmahasiswa dari keluarga Muhammadiyah. Oleh karena itu, saat penerimaan anggota baru disebut Masa Kasih Sayang.

Tidaklah dapat dipungkiri kalau IMM dibangkitkan bertujuan menghimpun, menggerakan, membina potensi mahasiswa untuk menumbuhkan kesadarannya dan tanggung jawabnya sebagai kader Persyerikatan Muhammadiyah, kader umat, kader bangsa. Kader yang berfastabiqul khairat dalam meningkatkan pemilikan ilmu untuk dijadikan dasar amaliah. Sekaligus sebagai kader yang beramal ilmiah.

Di bawah situasi ini, DPHD IMM Jawa Barat, Ketua Mursalin Dahlan dan Sekretaris Umum Ahmad Mansur Suryanegara, didirikan 13 Desember 1964, dalam memperkuat eksistensi IMM Jawa Barat dengan mengangkat Pelindung dan Penasehat Ibu Fatmawati dan Prof. Dr. Moestopo.

Selain itu, dengan mudah dapat dibaca, dengan mendirikan IMM minimal menambah jumlah organisasi mahasiswa Islam dan memperkuat eksistensi organisasi kemahasiswaan Islam yang secara bergilir akan dibubarkan pula: HMI, SEMMI, PMII dan IMM.

Bagaimanapun besar dan aktifnya upaya lawan Islam akan membubarkan dan secara sistemik akan meniadakan segenap organisasi Islam: niaga, pendidikan, sosial budaya, dan politik, ujung sejarahnya untuk di Indonesia, Islamlah yang berjaya. Terbukti seperti yang dialami oleh penjajah Barat danTimur akhirnya angkat kaki dari Nusantara Indonesia.

Politik devide et impera yang dilakukan oleh penjajah Barat, dengan rencana akan menegakkan negara pulau-pulau, justru oleh Ulama ditandingi dengan menegakkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GERBANG KEDELAPAN

PERAN ULAMA DALAM MENEGAKKAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

RAHMAT Allah Yang Mahakuasa terlimpah kembali kepada bangsa dan negara Indonesia. Di tengah upaya penjajah Keradjaan Protestan Belanda dibantu oleh Keradjaan Protestan Anglikan Inggris akan merobohkan Republik Indonesia Serikat dengan menghidupkan gerakan separatis, dijawab oleh Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masjumi, dengan membangkitkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Benarkah Keradjaan Protestan Belanda berkeinginan tegaknya RIS dan berkinginan pula membangun kerja sama Uni Indonesia-Belanda. Fakta sejarah berbicara, Peroendingan Linggardjati dilanggar dengan Agresi Militer Belanda Pertama 21 Juli 1947. Peroendingan Renville dilanggar dengan Agresi Militer Belanda Kedua 19 Desember 1948, dan sesudah Konferensi Medja Bundar 2 November 1949 dapat dipastikan terjadi lagi pelanggaran dari pihak penjajah Belanda.

Sesudah terjadi kesepakatan antara Indonesia-Belanda Roem-Royen Statements pada 7 Mei 1949, Sabtu Kliwon, 7 Radjab 1368, menyusul Konferensi Medja Bundar pada 23 Agustus 1949, Selasa Pon, 27 Syawwal 1368, dan baru ditandatangani bersama pada 2 November 1949, Rabu Wage, 10 Muharram 1369, diikuti dengan penandatanganan Pengakuan Kedaulatan pada 27 Desember 1949, Selasa Wage, 6 Rabiul Awwal 1369, melahirkan pemerintahan Republik Indonesia Serikat - RIS yang baru berumur selama tiga minggu, 27 Desember 1949-23 Januari 1950 telah dilanggar oleh imperialis Belanda dengan melancarkan Agresi APRA Westerling di Bandung, dan dari Bandung mencoba melancarkan kudeta terhadap pemerintah RIS di Jakarta.

Padahal dari lahirnya *Roem Royen Statements*, 7 Mei 1949, Sabtu Kliwon, 7 Radjab 1368 hingga penandatanganan Konferensi Medja Bundar, 2 November 1949, Rabu Wage, 10 Muharram 1369, memakan waktu sekitar 180 hari atau enam bulan. Ditambah dengan waktu penandatanganan Pengakuan Kedaulatan, 27 Desember 1949, Selasa Wage, 6 Rabiul Awwal 1369, berproses selama sekitar 235 hari.

Kudeta APRA, Andi Azis, dan RMS

Hasil perundingan demikian panjang memakan waktu dan energi, selama 235 hari, tetapi dirusak oleh tiga peristiwa:

Pertama, belum sampai satu bulan, 27 Desember 1949-23 Januari 1950, pecah gerakan Angkatan Perang Ratu Adil - APRA yang terdiri sekitar 800 serdadu KNIL, dipimpin oleh Westerling melancarkan Kudeta pada 23 Januari 1950 di Bandung.[1] Untuk diteruskan ke Jakarta.

Diawali dengan melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap TNI di Bandung yang dijumpainya. Sedangkan pihak TNI saat itu sesudah KMB, menaati perintah peletakan senjata. Tidak mengira akan terjadi penyerangan dari serdadu KNIL yang melakukan penembakan terhadap personil TNI di mana saja yang dijumpainya. Akibat serangan mendadak ini, dari pihak TNI 79 prajurit gugur. Di antaranya adalah Letnan Kolonel Lembong yang beragama Kristen Protestan seperti umumnya KNIL.

Gerakan Kudeta APRA ini diotaki oleh Soeltan Hamid II dari Pontianak dan dari beberapa orang dari pimpinan Negara Pasoendan. Tujuannya mempertahankan bentuk pemerintahan Federalis dan menolak Unitaris. Mempertahankan adanya Negara Boneka bikinan van Mook, sebagai Negara Bagian dan menolak Menteri-Menteri Kabinet RIS walaupun beragama Protestan yang berjiwa Republikan. Misalnya Kolonel T.B. Simatoepang.

Dari Bandung, gerombolan serdadu APRA meneruskan rencana kudeta terhadap Pemerintahan RIS di Jakarta. Dengan sasaran akan membunuh Menteri Pertahanan Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Mr. A . Boediardjo dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel T.B. Simatoepang.

---

1 Penamaan dengan *Angkatan Perang Ratu Adil* bertujuan memanfaatkan kepercayaan sebagian orang-orang Pribumi, bersumber dari *Ramalan Djojobojo* bahwa di tengah kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang tertindas oleh penjajah Belanda akan datang *Ratu Adil* dengan nama *Heroetjokro*. Dengan nama *Ratu Adil* berharap mendapat dukungan rakyat. Namun, bila nama pimpinan *Angkatan Perang Ratu Adil* namanya bukan *Heroetjokro*, melainkan *Westerling* dan bukan Pribumi tetapi *Walanda* atau *Belanda*, serta menembaki *TNI*, dan melakukan perampokan di kota-kota yang dilaluinya, bagaimana mungkin dihormati oleh rakyat sebagai *Ratu Adil*?

Jauh sebelum sampai ke Jakarta, baru masuk daerah Pacet Cianjur pada 24 Januari 1950, TNI berhasil menghancurkan sisa gerombolan serdadu APRA. Sedangkan Westerling dengan bantuan Angkatan Laut Belanda, berhasil lolos keluar negeri dengan menumpang pesawat Catalina. Demikian menurut penuturan dalam 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964.

> Pada saat terjadinya penyerbuan serdadu APRA ke Bandung, Presiden Soekarno bersama Iboe Fatmawati sedang mengadakan perjalanan muhibah ke India, untuk bertemu dengan Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru. Kemudian diteruskan berkunjung ke Pakistan. Di sini, hanya di sambut oleh Gubernur Jenderal Pakistan, Khwaja Naramuddin. Selanjutnya, kunjungan muhibah dilanjutkan ke Burma atau Myanmar, setibanya di Rangoon, disambut secara kenegaraan seperti di India, oleh Presiden Sao Shwe Thaike.
>
> Perjalanan ini segera dilakukan oleh Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS, bersama Iboe Fatmawati, karena negara-negara yang dikunjunginya, pada saat Republik Indonesia sedang dalam kesulitan, memberikan bantuan dukungan politik yang sangat besar. Jadi, pada saat terjadi gerakan Kudeta APRA di Bandung, 23 Januari 1950, Presiden Soekarno bersama Iboe Fatmawati sedang melakukan kunjungan muhibah.

Kedua, pelanggaran oleh pihak Belanda, terjadi sesudah Konferensi Tingkat Menteri Dalam Rangka Uni Indonesia-Belanda di bawah Ratu Belanda, di Jakarta, diselenggarakan pada 24 Maret 1950. Dalam konferensi ini, dibahas masalah hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan, perekonomian, dan kebudayaan setelah terbentuk Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Demikian pula, dalam konferensi ini dibicarakan masalah Irian Barat.

Dengan diselenggarakannya konferensi ini, tergambar betapa mulianya sikap para Menteri Republik Indonesia Serikat tetap menghargai keputusan bersama Konferensi Medja Bundar, tentang Uni Indonesia-Belanda. Walaupun pihak Belanda dua bulan sebelumnya, dengan menggunakan mantan serdadu KNIL dengan bantuan Angkatan Laut Belanda, menamakan dirinya sebagai APRA pada 23 Januari 1950 melakukan Kudeta di Bandung.

Hasil pembicaraan konferensi ini, juga hanya berlangsung sekitar 13 hari karena dinodai dengan Peristiwa Andi Azis di Makassar pada 5 April 1950. Andi Azis bersama sejumlah mantan serdadu KNIL menuntut agar APRIS KNIL saja yang bertanggung jawab keamanan di Negara Indonesia Timur - NIT. Menolak masuknya APRIS TNI yang dipimpin oleh Mayor Worang dari Pulau Jawa.

Andi Azis memulai gerakan sepratisnya dengan menangkap Letkol Achmad Joenoes Mokoginta sebagai Pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur bersama staf. Dengan cara itu, Andi Azis tetap mempertahankan negara boneka bikinan van Mook, Negara Indonesia Timur, setelah Negara Pasoendan dan Kalimantan Barat dengan keterlibatannya dengan APRA dibubarkan.

Pelaksanaan ekspedisi penyerangan APRIS ke Makassar dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang. Didahului oleh pendaratan Batalyon Worang yang mendarat di Jeneponto, pada 18 April 1950. Serangan APRIS TNI pada 26 April 1950 berhasil menduduki Makassar, menjadikan Andi Azis tertangkap dan menyerah.[2] Namun, sisa serdadu KNIL masih melanjutkan perlawanan hingga bulan Agustus 1950.

Pada 5 Agustus 1950, serdadu KNIL melakukan pengepungan Markas Staf Brigade 10 Garuda dengan menggunakan Lapis Baja. Serangan ini dapat dipukul mundur dan minta berunding. Permintaan ini ditolak oleh Letnan Kolonel Soeharto, kemudian serdadu KNIL diizinkan meninggalkan Makassar melalui pelabuhan, dengan menyerahkan senjatanya. Makassar mulai aman dari gangguan pengacau keamanan yang ditimbulkan oleh serdadu KNIL.

Dengan keberhasilan operasi penumpasan gerakan separatis Andi Azis, rakyat melancarkan demonstrasi menuntut agar Negara Indonesia Timur bikinan van Mook dibubarkan. Rakyat menuntut untuk segera dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, pelanggaran Konferensi Medja Bundar oleh Belanda, melalui gerakan separatis Republik Maluku Selatan - RMS yang dipimpin oleh Dr. Ch. R. Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Secara manifes tampak pada 25 April 1950 diproklamasikannya RMS.[3] Namun, gerakan separatis ini sudah ada sejak 1946 oleh van Mook dengan nama Negara Indonesia Timur dan Soekawati sebagai Presidennya. Dari sini, van Mook mencoba menandingi Presiden Soekarno dari Repoeblik Indonesia, ditandingi dengan Presiden Soekawati dari Negara Indonesia Timoer. Mistik politik van Mook, Presiden (S)oekarno kontra Presiden (S)oekawati.

Maluku merupakan wilayah rempah-rempah yang diperebutkan oleh VOC dengan Portoegis. Semula Keradjaan Katolik Portoegis mengizinkan pedagang Belanda untuk mengambil rempah-rempah dari pelabuhan Lisbon, untuk dipasarkan

2 Pada 30 April 1950 Kahar Moezakkar sebagai putra daerah Makassar, menolak pelantikan Korps Cadangan Nasional dengan kedudukan di bawah Letnan Kolonel Warrow sebagai putra daerah Manado.

3 Pemilihan waktu 25 April 1950, yang sebenarnya pada 19 April 1950. Selain itu, pada saat bersamaan mulai rontoknya Andi Azis di Makassar, juga terkait erat dengan 19 April 1529 sebagai Hari jadi Protestan Martin Luther. Diharapkan mendapatkan simpati dari Amerika Serikat yang diproklamasikan pada 19 April 1775, oleh Crane Brinton disebut sebagai Protestant Revolution.

di Eropa belahan utara. Kelanjutannya, pedagang Belanda berkeinginan mendapatkan rempah-rempah langsung dari Maluku. Di abad ke-17 M, keinginannya berhasil sampai ke Maluku.

> Awalnya VOC didirikan dari modal penguasaan Ambon Maluku. Suatu pemilihan wilayah yang diperhitungkan tidak hanya penguasaan daerah sentral produsen rempah-rempah sebagai komoditas yang diperlukan oleh pasar Eropa. Namun, sekaligus letak Maluku sebagai wilayah yang sangat strategis berfungsi sebagai mata baji yang membelah posisi kedua jajahan Keradjaan Katolik Spanjol di Filipina dan jajahan Keradjaan Katolik Portoegis di Timor Timur.
>
> Kedatangan VOC pada abad ke-17, tidak hanya sekadar untuk memperoleh rempah-rempah. Namun juga, memindahkan Perang Agama antara Kontra Reformasi Katolik dengan Reformasi Protestan dari Eropa ke wilayah jajahan di Asia Afrika. Indonesia dijadikan ajang Perang Agama ini. Tidakkah saat itu, waktu kedatangan VOC Belanda sebagai penganut Protestan masih berperang, Perang 80 Tahun melawan Keradjaan Katolik Spanjol. Mereka baru merdeka pada 1648 M.
>
> Oleh karena itu, Keradjaan Protestan Belanda berupaya menjadikan Maluku sebagai mata baji yang memisahkan antara kedua wilayah jajahan Keradjaan Katolik Spanjol dan Keradjaan Katolik Portoegis yang berposisi berseberangan mengapit Kepulauan Maluku.
>
> van Mook sebagai Goebernoer Djenderal, tentu juga belajar dari pengalaman Thomas Stamford Raffles hanya dengan menguasai sebuah pulau, Singapura pada abad ke-19 M menjadikan Keradjaan Anglikan Protestan Inggris mampu berkuasa hingga abad ke-20 M.Oleh karena itu, orang-orang van Mook, yakni Dr. Ch. R. Soumokil dan yang lainnya, membantu pelaksanaan pemikiran van Mook menjadikan Maluku Selatan sebagai modal membangun negara Republik Maluku Selatan yang berpihak kepada Keradjaan Protestan Belanda.

Menurut M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern, di Ambon orang yang beragama Serani atau Protestan yang pro Belanda menentang upaya Unitarisme atau Negara Kesatuan. Mereka diprovokasi bahwa Republik sebagai negara yang dikuasai oleh orang Jawa, Muslim, dan tokoh-tokoh yang berhaluan kiri.

Politik divide and rule dari penjajah Belanda selalu menggunakan isu suku dan agama mudah menyentuh rasa dan mudah menular. Akibatnya, meletuslah benturan antarsuku atau antaragama. Terutama setelah Negara Indonesia Timur - NIT tidak

mampu bertahan maka Dr. Ch. R. Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan, dengan mengambil waktu sehari sebelum pendaratan APRIS /TNI di Makassar, 25 April 1950.

Demi untuk menyadarkan Dr. Ch. R. Soumokil maka dikirimkanlah Dr. Leimena. Dengan tujuan menjelaskan bahwa Republik Indonesia bukan negara yang dikuasai oleh orang Jawa saja, Muslim dan kiri. Dr. Leimena sendiri sebagai orang Maluku dan beragama Kristen. Diangkat sebagai Menteri Kesehatan dan ikut pula sebagai salah seorang dari delegasi Indonesia dalam Konferensi Medja Bundar. Sebelumnya, Dr. Leimena bersama Mohammad Natsir, menjadi penjemput Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Ketua PDRI di Sumatra Barat. Namun, usaha damai oleh Dr. Leimena ini tidak membuahkan hasil.

Dr. Ch. R. Soumokil RMS merasa kuat dengan bergabungnya serdadu KNIL dari Makassar ke Ambon. Ditolaknya tawaran jalan damai dalam menyelesaikan masalah gerakan separatis yang dipimpinnya maka tiga bulan kemudian, dilaksanakanlah operasi militer pada 14 Juli 1950 dengan didaratkannya APRIS/TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dari Manado dan beragama Protestan. Operasi militer ini berhasil menduduki Laha P. Buru. Menyusul pendudukan atas P. Tanimbar, Kei, dan Aru. Akhirnya, ke P. Seram, terjadi perlawanan yang berat.

Penyerbuan pada November 1950, berhasil membebaskan benteng Nieuw Victoria, di Ambon dari RMS. Pada saat perebutan benteng tersebut, gugurlah Letnan Kolonel Slamet Rijadi yang beragama Katolik. Fakta gugurnya Letnan Kolonel Slamet Rijadi, memberikan jawaban terhadap kebohongan propaganda gerakan separatis RMS, bahwa Republik Indonesia dikuasai oleh orang Jawa saja, Muslim, serta beraliran kiri.

Para pelaku RMS ditangkap dan diadili di Jogyakarta. Pada 2 Desember 1963 Dr. Ch. R. Soumokil ditangkap di P. Seram. Diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa - Mahmilub di Jakarta, pada 21 April 1964 dijatuhi hukuman mati. Sisa-sisa serdadu KNIL yang lari ke Belanda, nantinya kembali repatria ke Maluku. Timbullah kembali gerakan separatis RMS. Demikianlah penuturan dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*.

Semestinya Dr. Ch. R. Soumokil tidak hanya menduga-duga apabila berkeyakinan bahwa Republik Indonesia adalah Republik Islam dan Republik orang Jawa saja dan Republik Kiri. Apabila Dr. Ch. R. Soumokil benar-benar meneliti dugaannya dengan membandingkan pada kenyataan fakta di lapangan, akan sadar bahwa dugaannya salah karena:

mampu bertahan maka Dr. Ch. R. Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan, dengan mengambil waktu sehari sebelum pendaratan APRIS /TNI di Makassar, 25 April 1950.

Demi untuk menyadarkan Dr. Ch. R. Soumokil maka dikirimkanlah Dr. Leimena. Dengan tujuan menjelaskan bahwa Republik Indonesia bukan negara yang dikuasai oleh orang Jawa saja, Muslim dan kiri. Dr. Leimena sendiri sebagai orang Maluku dan beragama Kristen. Diangkat sebagai Menteri Kesehatan dan ikut pula sebagai salah seorang dari delegasi Indonesia dalam Konferensi Medja Bundar. Sebelumnya, Dr. Leimena bersama Mohammad Natsir, menjadi penjemput Mr. Sjafrudin Prawiranegara, Ketua PDRI di Sumatra Barat. Namun, usaha damai oleh Dr. Leimena ini tidak membuahkan hasil.

Dr. Ch. R. Soumokil RMS merasa kuat dengan bergabungnya serdadu KNIL dari Makassar ke Ambon. Ditolaknya tawaran jalan damai dalam menyelesaikan masalah gerakan separatis yang dipimpinnya maka tiga bulan kemudian, dilaksanakanlah operasi militer pada 14 Juli 1950 dengan didaratkannya APRIS/TNI di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dari Manado dan beragama Protestan. Operasi militer ini berhasil menduduki Laha P. Buru. Menyusul pendudukan atas P. Tanimbar, Kei, dan Aru. Akhirnya, ke P. Seram, terjadi perlawanan yang berat.

Penyerbuan pada November 1950, berhasil membebaskan benteng Nieuw Victoria, di Ambon dari RMS. Pada saat perebutan benteng tersebut, gugurlah Letnan Kolonel Slamet Rijadi yang beragama Katolik. Fakta gugurnya Letnan Kolonel Slamet Rijadi, memberikan jawaban terhadap kebohongan propaganda gerakan separatis RMS, bahwa Republik Indonesia dikuasai oleh orang Jawa saja, Muslim, serta beraliran kiri.

Para pelaku RMS ditangkap dan diadili di Jogyakarta. Pada 2 Desember 1963 Dr. Ch. R. Soumokil ditangkap di P. Seram. Diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa - Mahmilub di Jakarta, pada 21 April 1964 dijatuhi hukuman mati. Sisa-sisa serdadu KNIL yang lari ke Belanda, nantinya kembali repatria ke Maluku. Timbullah kembali gerakan separatis RMS. Demikianlah penuturan dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*.

Semestinya Dr. Ch. R. Soumokil tidak hanya menduga-duga apabila berkeyakinan bahwa Republik Indonesia adalah Republik Islam dan Republik orang Jawa saja dan Republik Kiri. Apabila Dr. Ch. R. Soumokil benar-benar meneliti dugaannya dengan membandingkan pada kenyataan fakta di lapangan, akan sadar bahwa dugaannya salah karena:

Apabila dugaan Dr. R. Ch. Soumokil benar, tentunya dapat mempertanyakan mengapa S.M. Kartosoewirjo sebagai orang Jawa, memproklamasikan Negara Islam Indonesia - NII pada 7 Agustus 1949, menentang Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno orang Jawa?

Apabila benar Republik Indonesia sebagai Republik Islam, dapat dipastikan S.M. Kartosoewirjo akan mencabut kembali proklamasi Negara Islam Indonesia-nya.

Apabila benar Republik Indonesia sebagai Republik Jawa, mengapa Kahar Moezakkar sebagai orang Makassar, pada 30 April 1950 memberontak kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Presiden Soekarno orang Jawa, tetapi mengapa Kahar Moezakkar sebagai putera daerah Makassar bersedia menjadi Panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia, di bawah pimpinan S.M. Kartosoewirjo orang Jawa?

Apabila benar dugaan Dr. Ch. R. Soumokil bahwa yang memerintah Republik Indonesia hanya orang Jawa saja, tetapi mengapa timbul pemberontakan orang-orang Jawa: di Brebes, Tegal, Pekalongan, dipimpin oleh Jenderal Mayor TII Amir Fatah? Diikuti oleh Kiai Sumolangu atau disebutnya juga sebagai Romo Pusat atau Kiai Mohammad Mahfud Abdurrahman dari Kebumen Jawa Tengah.

Apabila benar Republik Indonesia sebagai Republik Islam, mengapa Tengkoe Daoed Beoereoe-eh dari Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh – POSA, memberontak dan bergabung dengan S.M. Kartosoewirjo orang Jawa sebagai Imam Negara Islam Indonesia?

Gerakan separatis RMS di bawah Dr. Ch. R. Soumokil korban provokasi penjajah Belanda yang memperalat RMS menjadi tameng terhadap Irian Barat yang dipertahankan sebagai sisa wilayah jajahan Belanda. Barangkali Dr. Ch. R. Soumokil menemui kesukaran membedakan antara Negara Islam Indonesia - NII diproklamasikan di Jawa Barat, dengan Ibu Kota Republik Indonesia Serikat - RIS di Jakarta. Sedangkan DKI dekat dengan wilayah Provinsi Jawa Barat.

Hikmah adanya gerakan separatis di Indonesia Timur, menjadikanTNI memiliki pengalaman yang sangat berharga, bagaimana sistem menumpas Gerakan Pengacau Keamanan - GPK yang terjadi di luar P. Jawa. Apalagi posisi wilayah Maluku yang berdampingan dengan Irian Barat. Memudahkan langkah pemerintah Republik Indonesia dan TNI bila harus melakukan operasi membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

NKRI dan Perdana Menteri Mohammad Natsir

Tiga peristiwa Kudeta APRA 23 Januari 1950 yang gagal, dipimpin oleh Westerling, disusul dengan gerakan separatis di Makassar diipimpin oleh Kapten Andi Aziz pada 5 April 1950, diikuti oleh gerakan separatis Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Ch. R. Soumokil, 19 April 1950, merupakan bom waktu yang ditinggalkan oleh van Mook dalam upaya menggagalkan terbentuknya negara Indonesia Merdeka yang berdaulat. Sebaliknya, ketiga peristiwa tersebut memotivasi para pejuang Unitaris meningkatkan tuntutannya agar segera dibubarkannya seluruh negara boneka bikinan van Mook dan bergabung dengan Republik Indonesia.

Realitasnya, negara boneka tinggal Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur. Dengan adanya tuntutan rakyat di wilayah negara-negara boneka tersebut, dan adanya Undang-Undang Darurat yang memberikan peluang penggabungan antarnegara bila dikehendaki oleh rakyatnya maka diadakan pendekatan pemerintah RIS dengan negara-negara yang bersangkutan.

Selain itu, ide dari Mohammad Natsir yang dikenal dengan istilah Mosi Integral menjadi embrio lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mosi Integral sebuah mosi berisikan kesediaan seluruh Negara Bagian RIS dan Negara Boneka bikinan van Mook serta Negara RI bersama-sama membubarkan diri dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Soekarno.

> Dalam proses persiapan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mohammad Natsir mengutus Toean A. Hassan pimpinan Persis, untuk menemui S.M. Kartosoewirjo Imam Negara Islam Indonesia - NII yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949. Dengan tujuan menyampaikan Mosi Integral mengajaknya agar bersedia membubarkan NII bersama-sama dengan Negara Bagian RIS termasuk Negara RI serta Negara Boneka lainnya dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indnesia - NKRI. Namun, usaha ini tidak mendapat sambutan positif dari S.M. Kartososewirjo sehingga NII berada di luar NKRI. Sejak penolakan penggabungan ke NKRI, pemerintah konfrontatif dengan NII. Diperlakukan sama dengan pemberontak lainnya.

Kembali ke masalah persiapan berdirinya NKRI dan upaya penyusunan UUD Sementara. Akhirnya, dicapailah kesepakatan bersama melalui Parlemen dan Senat RIS pada 14 Agustus 1950, disahkannya Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MOHAMMAD NATSIR

Perdana Menteri Pertama NKRI

Aktivis Jong Islamieten Bond - JIB Bandung. Persatuan Islam - Persis Bandung. Partai Islam Indonesia - PII. Ketua Partai Islam Indonesia Masjumi. Tiga kali menjadi Menteri Penerangan RI. Arsitek keberhasilan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI melalui Mosi Integral. Dengan cara saling membubarkan diri antar negara-negara bagian bikinan van Mook dan Republik Indonesia, kemudian mengakhiri negara Republik Indonesia Serikat - RIS, dan sama-sama mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Kemudian, Presiden Soekarno menunjuk Mohammad Natsir arsitek lahirnya NKRI sebagai Perdana Menteri.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Sumber: *Doc. Pribadi*

PRESIDEN SOEKARNO

Melantik Perdana Menteri Mohammad Natsir Sebagai Perdana Menteri Pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya menyambut Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pada 15 Agustus 1950 di Yogyakarta, Presiden Soekarno menerima kembali jabatan Presiden Republik Indonesia dari Acting Presiden RI, Mr. Asaat. Pada waktu yang sama di Jakarta, diadakan penyerahan mandat sebagai Perdana Menteri dari Drs. Mohammad Hatta kepada Presiden Ir. Soekarno. Selanjutnya memangku kembali jabatan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diikuti pula pelantikan DPR NKRI pada 16 Agustus 1950.

Tepat pada Ulang Tahun Ke-5 Republik Indonesia, dalam pidato kenegaraan, di Istana Merdeka, Presiden Ir. Soekarno secara terbuka di hadapan rakyat memproklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369. Dengan demikian, tamatlah sejarah Republik Indonesia Serikat secara resmi, 27 Desember 1949-17 Agustus 1950.

Bila kita renungkan kembali, Proklamasi 17 Agustus 1945, dibacakan pada hari Jumat Legi, sebagai Rajanya Hari bagi umat Islam. Bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364 termasuk dalam Puluhan Pertama Ramadhan. Puluhan Pertama yang diimani oleh umat Islam sebagai Puluhan Rahmat Allah. Pengaruhnya, kemerdekaan Indonesia dirumuskan sebagai berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dalam Pembukaan UUD 1945.

Sedangkan pada saat Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI, 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, bertepatan masuk 2 Dzulhijjah 1364. Dzulhijjah dalam keimanan umat Islam, diyakini sebagai Bulan Suci Idul Qurban - bulan pendekatan kepada Allah Maha Kuasa. Dzulhijjah selain diimani sebagai salah satu di antara 4 bulan suci: Muharram, Rajab, Dzulqaidah, Dzulhijjah, di dalamnya juga terdapat 10 Dzulhijjah yang diimani sebagai Idul Adha - Hari Raya Agung. Tentunya, hal ini bukan secara kebetulan, melainkan sebagai kepastian dari Allah Yang Maha Kuasa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah yang agung bagi bangsa dan negara Indonesia.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden bersama Menteri kembali dari Bangka masuk Yogyakarta, terjadi pada 6 Juli 1949, Rabu Kliwon, 9 Ramadhan 1368. Mempunyai kesamaan tanggal Komariyahnya, 9 Ramadhan 1368 sama dengan 9 Ramadhan 1364, Jumat Legi, pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945. Disusul masuknya Panglima Besar Jenderal Soedirman ke Yogyakarta pada 10 Juli 1949, Ahad Wage, 13 Ramadhan 1368.

Bulan Ramadhan dalam perkembangan peristiwa sejarah di Indonesia, merupakan *the great time* - titik waktu yang mustari dalam perubahan sejarah yang besar. Bagi sebagian orang menilai sebagai peristiwa yang kebetulan. Namun, bagi Allah Yang Maha Membalikkan Waktu, siang dan malam, tidak menilai merupakan kebetulan, melainkan setiap peristiwa kehidupan manusia dan perubahan sejarahnya, terjadi sebagai suatu kepastian yang telah ditulis di Lauhul Mahfuz.

Kembali ke situasi nasional saat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369, menjelang Idul Adha, terasa kembali seperti pada awal Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, menjelang Idul Fitri.

Ternyata, dalam Sejarah Indonesia, Hari Besar Islam memberi suasana perubahan tatanan pemerintahan Indonesia. Nampaknya, pengaruh dari situasi ini maka Mohammad Natsir[4] dari Partai Islam Indonesia Masjumi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri yang pertama dari NKRI.

Pengangkatan Mohammad Natsir untuk menjadi orang pertama yang menduduki posisi Perdana Menteri NKRI, tentu mempertimbangkan pula latar belakang partai politiknya pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia. Mohammad Natsir aktif dalam Partai Islam Indonesia - PII yang didirikan oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo, bersama Wali Al-Fatah, K.H. M. Mansoer. Dalam kongresnya 11 April 1940, Kamis Pahing, 2 Rabiul Awwal 1359, Partai Islam Indonesia - PII memutuskan Program Perjuangannya antara lain:

1. Membangun Negara Kesatuan - *eenheidsstaat* Indonesia yang diperintah oleh Pemerintah Pusat
2. Dasar pemerintahan bersifat demokratis
3. Parlemen yang dipilih oleh rakyat secara umum dan langsung
4. Meng-indonesia-kan jabatan negeri
5. Pemerintah memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapat penghidupan dan pekerjaan
6. Menghapuskan hak monopoli dan digantikan oleh perusahaan pemerintah

4 *Mohammad Natsir* lahir di Alahan Panjang, Sumatra Barat, 17 Juli 1908. Pendidikan HIS Padang, 1923; MULO, 1927; AMS di Bandung, 1930; Kursus Guru, 1932; studi agama di Persatoean Islam Bandung dari Toean A. Hassan. Ketua Jong Islamieten Bond – JIB di Bandung, 1928-1932. Direktur Perguruan Pendidikan Islam, 1932-1942. Terpilih menjadi Wakil P.B. Persatoean Islam, 1937. Anggota Dewan Kaboepaten Bandoeng, 1940-1942. Kepala Biro Pendidikan Kota Bandoeng –Shiyakuso (1942-1945). Anggota BP KNIP, 1945-1946. Ketua Umum Partai Islam Indonesia Masjumi, 1949-1958. Menteri Penerangan Kabinet Sjahrir III, 1946-1947, dan Kabinet Hatta, 1948-1949.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Perdana menteri Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masjumi
dan para menteri foto bersama setelah pelantikan dengan
Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta

Hanya sebagian Program Perjuangan Partai Islam Indonesia - PII di atas yang pernah diperjuangkan oleh Mohammad Natsir pada masa Pergerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional sangat relevan dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh NKRI. Terutama Program PII membangun Negara Kesatuan dan Berpemerintah Pusat yang demokratis. Apalagi, Mohammad Natsir juga berangkat dari Persatuan Islam, sejalan dengan cita-cita kesatuannya.

Kabinet Natsir

Oleh karena itu, Mohammad Natsir sebagai Ulama dan intelektual Muslim yang layak menjadi orang yang pertama sebagai Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu, Mohammad Natsir dalam menyusun kabinetnya sangat memerhatikan tuntutan politik Indonesia saat itu. Adapun Kabinet Natsir, 9 September 1950-20 Maret 1951, sebagai berikut:[5]

Perdana Menteri	Mohammad Natsir	Masjumi
Wakil P M	Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX	Non Partai
Dalam Negeri	Asaat	Non Partai
Luar Negeri	Mohamad Roem	Masjumi
Pertahanan	Abdul Halim[6]	Non Partai
Kehakiman	Wongsonegoro	PIR
Keuangan	Sjafrudin Prawiranegara	Masjumi
Perdagangan dan Industri	Soemitro	PSI
Pertanian	Tandiono Manu	PSI
Perhubungan & Transportasi	Djuanda	Non Partai
Pendidikan dan Kebudayaan	Bahder Djohan	Non Partai
Pekerjaan Umum	Johannes	PIR
Kesehatan	J. Leimena	Parkindo
Perburuhan	P. Saroso	Parindra
Sosial	F.S. Harjadi	Katolik
Agama	K.H. Wachid Hasjim	Masjumi
Penerangan	M.A. Pellaupesy	Demokrat
Negara	Harsono Tjokroaminoto[7]	PSII

5 George McTurnan Kahin. 1970. *Op.Cit.*, h 468

6 Abdoel Halim tidak berlanjut karena sakit keras, diambil alih oleh Mohammad Natsir dan Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX.

7 Mengundurkan diri karena PSII sebagai partai oposisi terhadap Kabinet Natsir, 18-12-1950.
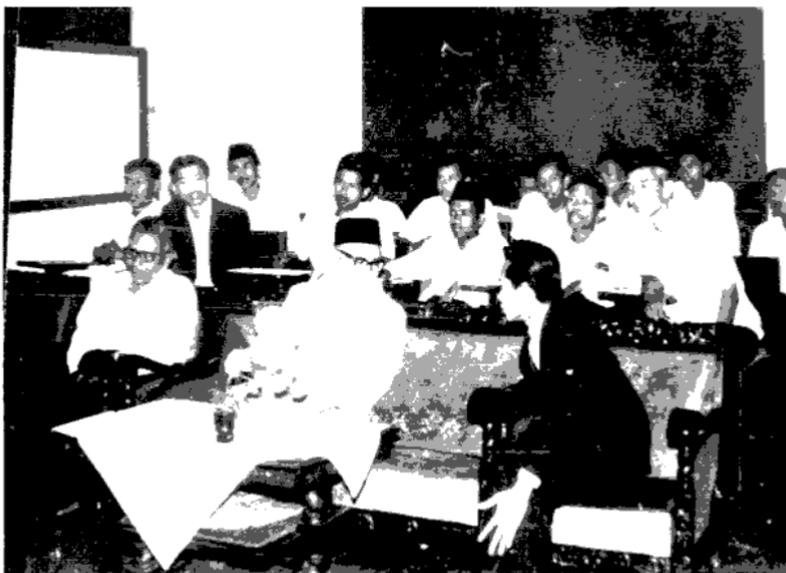
Sumber: Doc. Pribadi

PERTEMUAN PENULIS DENGAN MOHAMMAD NATSIR

Pada pertemuan Dana Al Falah di Masjid Al Azhar Kebayoran Baru Jakarta, Mohammad Natsir memberikan informasi tentang bagaimana proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui Mosi Integral kepada penulis

Kabinet Natsir ini adalah kabinet pertama pada periode NKRI dipimpin oleh Partai Islam Indonesia Masjumi. Pada masa Perang Kemerdekaan dan Diplomasi, 1945-1950 M, tidak pernah ada Kabinet yang dipimpin oleh Partai Islam Indonesia, Masjoemi.

> Sesudah Proklamasi 17 Agustus, Djoemat Legi, 9 Ramadhan 1964, diawali dengan Kabinet Presidential dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, 31 Agustus-14 November 1945, atau 75 hari. Disusul dengan kabinet yang dipimpin PSI Sjahrir hingga tiga kali: Kabinet Sjahrir I, 14 November 1945-12 Maret 1946. Terjadi Kudeta PKI dipimpin Mohammad Joesoef di Cirebon, 12 Februari 1946. Kabinet Sjahrir II, 12 Maret-2 Oktober 1946. Terjadi lagi Kudeta 3 juli 1946, dari komunis nasional Tan Malaka di Djokjakarta. Kabinet Sjahrir III, 2 Oktober 1946-27 Juni 1947.
>
> Diikuti oleh Kabinet Amir Sjarifoeddin, 3 Juli-11 November 1947. Digantikan oleh Kabinet Hatta,11 November 1947-27 Desember 1949. Pecahlah Kudeta PKI di Madiun dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin bersama Moeso, 19 September 1948. Muncul pula gerakan Negara Islam Indonesia, 7 Agustus 1949, oleh S.M. Kartosoewirjo menentang *Roem-Royen Statement* yang berkelanjutan dengan Konferensi Medja Bundar melahirkan RIS di bawah Ratu Belanda, dinilai bertentangan Proklamasi 17 Agustus 1945.
>
> Pada masa Republik Indonesia Serikat - RIS, 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, Kabinet RIS dipimpin lagi oleh Drs. Mohammad Hatta. Terjadi Kudeta APRA di Bandung, 23 Januari 1950 dipimpin oleh Westerling. Diikuti oleh Pemberontakan KNIL Andi Azis di Makassar. 5 April 1950.
>
> Dilanjutkan pecahnya gerakan separatis Republik Maluku Selatan, 19 April 1950, dipimpin oleh Dr. Soumokil.

Baru setelah terbentuknya NKRI, untuk pertama kalinya Presiden Soekarno memercayakan kepada Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masjumi untuk memimpin Kabinet NKRI, 6 September 1950-20 Maret 1951.

Kalau kita perhatikan dari susunan kementerian dan menteri-menterinya, Mohammad Natsir memberikan pesan tersirat kepada generasi muda Islam yang mau belajar sejarah, dan sedang membina dirinya sebagai aktivis organisasi Islam, mengingatkan bahwa dalam mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan partai dan pemerintahan di NKRI, memiliki seni tersendiri. Ditantang untuk mampu membangun kerja sama dengan menyeleksi tuntutan politik nasional dan kekuatan partai dalam DPR. Dalam mengaplikasikan wawasan politik luar negeri harus

mempertimbangkan peristiwa politik dunia yang sedang terjadi, dengan berwawasan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Mohammad Natsir sebagai Perdana Menteri harus lebih mampu memperlihatkan sikap politik yang berada di atas bhineka tunggal ika. Pertentangan masa penjajahan Keradjaan Protestan Belanda dengan Politik Kristenisasinya, dan masa penjajahan Fasisme Kekaisaran Djepang, dengan program perang dan romushanya dengan para kolaboratornya, untuk tidak dipertentangkan lagi antarsesama pemimpin bangsa Indonesia. Dibuktikan diangkatnya menteri-menteri dari kalangan Partai Kristen Indonesia - Parkindo dan Partai Katolik. Demikian pula mengendalikan sikap politik Partai Islam Indonesia Masjumi terhadap pimpinan kalangan Kedjawen.

> Maksudnya, tidak mungkin menyusun kabinet, secara mutlak keseluruhannya terdiri dari partai Islam. Idealnya, memang demikian, tetapi cara itu tidak realistis aspirasinya karena dalam penyusunan kabinet harus menggambarkan kerja sama dan adanya pembagian kerja antarkementerian dengan partai lain atau perwakilan lainnya secara berimbang. Dalam menyusunKabinet Parlementer, jumlah kursi pendukung yang ada dalam DPR harus dihitung. Mencoba tetap berdiri pada prinsip demokrasi. Demikian pula dalam mengaplikasikan politik luar negeri bebas aktif, untuk menghadapi pergolakan politik dunia yang sedang terjadi.

Dapat dibaca pada masa Kabinet Sjahrir dan Kabinet Amir, pos-pos kementerian yang penting dikuasai oleh Partai Sosialis. Dari masalah Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, hingga Menteri Pertahanan dikuasai oleh Partai Sosialis. Sedangkan kementerian lainnya ditawarkan kepada partai lainnya, sesuai dengan yang disetujuinya karena Kabinet Parlementer harus disusun berdasarkan kesamaan kepentingan daripada ideologi.

> Misalnya Amir Sjarifoeddin walaupun berideologi Marxis dan beragama Kristen, tetapi ingin memperkuat kabinetnya di hadapan DPR, memerlukan adanya Menteri yang berasal dari Partai Sjarikat Islam Indonesia. Meskipun P.S.I.I pada masa pimpinan H.O.S.Tjokroaminoto menentang Komunisme dan Sosialisme sekuler.
>
> Amir Sjarifoeddin menyadari ketidakmungkinan untuk mampu mengendalikan pemerintahan di tengah Perang Kemerdekaan apabila tanpa dukungan partai politik Islam. Apalagi Amir Sjarifoeddin dengan kedudukannya sebagai Perdana Menteri diperolehnya dengan menjatuhkan Soetan Sjahrir sama-sama Sosialis Marxist. Oleh karena itu, sangat mutlak perlunya mendapatkan dukungan dari P.S.I.I. yang telah melepaskan ikatannya dengan Masjumi karena Partai Islam Indonesia Masjumi menolaknya, 1948 M.

Mohammad Natsir juga membagi pos utamanya untuk dipegang oleh Masjumi. Dari 18 kementerian, Masjumi hanya menduduki 4 kementerian: Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Keuangan, Agama. Selebihnya untuk partai politik yang lain atau non partai seperti terlihat dalam susunan Kabinet Natsir di atas.

Sebenarnya tidak mungkin Masjumi sebagai partai Islam, kemudian mau bekerja sama dengan Partai Sosialis Sjahrir. Namun apabila bersedia untuk diajak kerja sama, walaupun tidak sejalan dengan ajaran Islam ideologinya, dibukalah kursi kementeriannya sebagai partai pendukung.

Kabinet Natsir walaupun telah berkoalisi dengan PSI Sjahrir, ternyata hanya mampu bertahan selama 7 bulan. Apa sebab pendeknya usia kementerian Natsir. Menurut M.C. Ricklefs periode 1950-1956, Indonesia sedang belajar berdemokrasi.

Menurut pendapat penulis, situasi setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan dan mulai tidak adanya lawan secara fisik penjajah Belanda di Indonesia, kecuali di wilayah Irian Barat, menjadikan hilangnya rasa pemilikan kesamaan musuh - *common enemy*.

Kemudian, akibat program kabinetnya tidak segera dialihkan atau difokuskan dengan menumbuhkan rasa kebencian dan permusuhan kembali kepada penjajah Belanda yang masih bercokol di Irian Barat, dampaknya permusuhannya beralih ke dalam. Timbullah *internal conflict* dan terjadi pergantian secara cepat siapa yang dianggap lawan atau kawan? Bergantung kepada perbedaan dan persamaan kepentingannya.

Misalnya PNI sejalan atau bekerja sama dengan Masjumi dan Presiden Soekarno dalam menghadapi PKI Amir dan Moeso tahun 1948 M. Presiden Soekarno menyatakan PKI sebagai teroris. Namun, setelah terbentuknya RIS dalam rangka menegakkan demokrasi, oleh Kabinet Hatta RIS maka PKI diberi hak untuk aktif kembali. Apalagi setelah terbentuknya RRC di bawah Mao Ze Dong, semakin kuat. Pada proses berikutnya memasuki 1960, pengaruhnya di Indonesia terjadi pembalikan kerja sama antar partai politik dan TNI serta Presiden.

Partai Masjumi mulai bekerja sama dengan PSI Sjahrir dalam melawan PKI Aidit. Memasuki 1960, kedua partai Masjumi dan PSI, mulai tersingkirkan. Presiden Soekarno pun beralih, hubungannya dengan pimpinan PNI, Masjumi, dan TNI mulai kurang akrab karena Presiden Soekarno dirangkul oleh PKI. Walaupun PKI sebenarnya oleh PNI disebut sebagai partai bermuka dua ke Moskow, Beijing, dan ke Indonesia.

Sebelum peristiwa-peristiwa sejarah ini terjadi, dan dalam menghadapi kemajuan RRC, Korea Utara, dan Vietnam Utara dengan ideologi komunisnya, serta saat itu mereka belum mendapat pengakuan dari dunia maju, membuat kebijakan Mohammad Natsir cenderung mendekati Barat dalam kebijakan politik luar negerinya.

Dimulai dengan menjadikan Indonesia diterima sebagai anggota ke-60 PBB, 27 September 1950, Rabu Pon, 14 Dzulhijjah 1369. Upaya ini dipimpin oleh Mohammad Roem sebagai Ketua dan A.N. Palar wakil Ketua delegasi Indonesia. Adapun tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota ke-60 PBB tidak sesederhana yang terlihat secara fisik. Sang Merah Putih dikibarkan di antara bendera nasional 59 negara-negara merdeka lainnya.

Hal itu, sebagai upaya menempatkan Indonesia sejajar dengan bangsa dan negara merdeka lainnya. Dengan kata lain, secara de jure diakui oleh dunia negara-negara merdeka, Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Dari sini, menurut Mohammad Natsir, perjuangan membebaskan Irian Barat dari penjajahan Keradjaan Protestan Belanda, diharapkan akan mendapatkan dukungan dari PBB.

Ternyata langkah perjuangan yang ditempuh oleh Mohammad Natsir ini benar. Terbukti pada 15 Agustus 1962, Rabu Pon, 14 Rabiul Awwal 1382, diadakan Persetujuan New York Penyerahan Irian Barat oleh Keradjaan Protestan Belanda kepada Republik Indonesia dilakukan penandatanganannya di Markas Besar PBB.

Walaupun di bidang ekonomi saat itu mulai dirasakan ada kemajuan, tetapi hal ini belum menjadi kebanggaan bangsa karena baru saja merdeka, pemikiran masalah kekisruhan pemberontakan negara-negara boneka bikinan van Mook masih dominan. Apalagi, masalah APRIS menjadi APRI diikuti masalah tuntutan bekas gerilyawan, cukup berat dihadapi oleh Kabinet Natsir. Oleh karena itu, diterimanya Indonesia menjadi anggota PBB, upaya Kabinet Natsir saat itu belum dinilai sebagai prestasi politik luar negeri yang patut dibanggakan rakyat.

Sekali lagi, Kabinet Natsir mendapatkan tugas yang sangat berat dalam penyelesaian masalah TNI dari Tentara Gerilya, untuk ditingkatkan sistem pengorganisasiannya menjadi tentara reguler. Sebenarnya, hal ini sebagai kelanjutan tugas Re-Ra pada masa Kabinet Hatta pada masa RIS yang belum terselesaikan. Penertiban organisasi kesenjataan tidak hanya masalah pengaturan senjatanya. Tetapi, lebih menyangkut masalah personalia dan psikologi militer dari jiwa perang untuk diubah dalam kehidupan damai di tengah masyarakat. Termasuk tidak kurang muskilnya mantan

serdadu KNIL yang pernah bergabung dalam APRIS. Ditambah dengan masalah KNIL dari Andi Azis atau RMS yang ingin bergabung kembali dengan Keradjaan Protestan Belanda.

Dapat dilihat masalah Kahar Moezakkar di Makassar, kekeliruan mengangkat pimpinan Korps Cadangan Tentara Nasional bukan dipimpin oleh Kahar Moezakkar sebagai putra daerah, menimbulkan pecahnya pemberontakan. Disusul dengan pecahnya pemberontakan Ibnoe Hadjar, bekas Letnan Dua TNI, di Kalimantan Selatan pada Oktober 1950. Berarti satu bulan setelah Kabinet Natsir diangkat.

Kelanjutannya Kahar Moezakkar, 7 Agustus 1953, menyatakan Sulawesi Selatan sebagai Republik Islam Indonesia di bawah Imam S.M. Kartosoewirjo. Tindakan ini dipilihnya, menurut pelakunya sebagai upaya menyelamatkan Indonesia dari pengaruh komunisme. Upaya Kahar Muzakkar baru dapat dihentikan oleh Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Brigjen Jusuf, 3 Februari 1965. Setelah S.M. Kartosoewirjo[8] ditangkap 4 Juni 1962. Berarti 15 tahun, 1950-1965 M lamanya waktu yang digunakan untuk menghentikan perlawanan Kahar Muzakkar.

Semuanya merupakan problem utama Angkatan Bersenjata bila perang telah usai. Menuntut kebijakan dengan memberikan penghargaan yang tepat dan memuaskan semua pihak. Terutama bagi yang pernah berjasa menjadi gerilyawan. Kahar Muzakkar tidak hanya berjasa melindungi Presiden Soekarno di Lapangan Ikada Jakarta, 19 September 1945 dari Balatentara Djepang, dan bergerilya di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Namun juga, berjasa dalam melumpuhkan Pemberontakan Andi Aziz, 9 April 1950 dan menyelesaikan tuntutan para Gerilyawan Sulawesi Selatan. Akan tetapi, upaya dan pejuangannya tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari Panglima Komando Tentara dan Teritorial Indonesia Timur - KTTIT, Kolonel Kawilarang.

Kekecewaan yang sama dialami oleh Daud Beureueh yang dijanjikan oleh Presiden Soekarno setelah Perang Kemerdekaan selesai, Atjeh akan diberi kebebasan menjalankan Sjariah Islam. Kenyataannya setelah Republik Indonesia Serikat terbentuk, justru Provinsi Atjeh ditiadakan digabung dalam Provinsi Sumatra Utara. Setelah terbentuknya NKRI, Gubernur Atjeh Daud Beureueh menuntut otonomi daerah yang berdiri sendiri, 1 September 1951 kepada Perdana Menteri Mohammad Natsir. Tuntutan ini terhalang oleh belum adanya Undang-Undang Otonomi Daerah.

8 Dalam Pengadilan S.M. Kartosoewirjo ditanya oleh Hakim, apakah Sdr S.M. Kartosoewirjo meminta grasi kepada Presiden Soekarno. Jawab S. Kartosoewirjo, Tuan Hakim haram hukumnya meminta grasi kepada manusia Presiden Soekarno. Makin cepat eksekusi dilaksanakan, makin cepat saya melihat hasil *ijtihaj* saya. Terima kasih.

Berikutnya, rakyat Atjeh dikejutkan pidato Presiden Soekarno di Amuntai Kalimantan Selatan, 27 Januari 1953 agar rakyat menolak ajakan untuk membentuk Negara Islam. Dampaknya di Atjeh, Daud Beureueh, seperti yang dilakukan oleh Kahar Muzakkar, 7 Agustus 1953, justru menjadikan Atjeh sebagai Negara Islam Indonesia bergabung dengan S.M. Kartosoewirjo, 21 September 1953. Pemerintah Orde Lama, dengan adanya Pemberontakan PRRI/Permesta, Atjeh diubah menjadi Provinsi, 23 Mei 1959. Hal ini akan penulis bahas kembali pada sub bab Proklamasi Darul Islam Di Aceh.

Presiden Soekarno mengangkat Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masjumi, sebagai Perdana Menteri, selain yang memiliki Mosi Integral yang berhasil membentuk NKRI, juga karena problem dalam negeri yang paling menyulitkan adalah adanya pemberontakan bersenjata dengan nama Islam.

Pemberontakan Andi Aziz bekas serdadu KNIL, mudah dipatahkan. Namun, RMS yang mengatasnamakan gerakannya agama Protestan, sukar untuk diatasi. Dari 19 April 1950, Dr. Ch. R. Soumokil mencetuskan RMS, baru tertangkap 2 Desember 1963 setelah Irian Barat atau Papua kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Peristiwa ini, menjadikan RMS tidak berdaya setelah ditinggalkan pendukungnya, penjajah Belanda.

Untuk mengatasi masalah NII Jawa Barat, Mohammad Natsir meminta jasa dari A. Hassan Guru Utama dari Persatuan Islam untuk mengadakan pertemuan dengan S.M. Kartosoewirjo guna menyampaikan tujuan Mosi Integral dan pembentukan NKRI. Ternyata, usaha ini menemui kegagalan.

Problema TII dan NII

Problema Tentara Islam Indonesia - TII bukan terlahir di masa Kabinet Natsir. Melainkan sebagai tindakan kontra politik terhadap hasil Peroendingan Renville yang dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin, 1948 M. Dengan perintahnya, pengosongan Jawa Barat dari Tentara Siliwangi dan segenap organisasi kesenjataan Lasjkar Hizboellah dan Sabilillah, untuk diserahkan kepada penjajah Belanda. Selain itu, pembentukan Tentara Islam Indonesia, bertujuan menggagalkan Negara Pasoendan bikinan van Mook.

Kemudian, setelah Roem-Royen Statements, 7 Mei 1949, Sabtu Kliwon, 7 Rajab 1368, muncullah Proklamasi Negara Islam Indonesia - NII yang diproklamasikan 7 Agustus 1949, Ahad Pahing, 11 Syawwal 1368 oleh S.M. Kartosoewirjo.

Sebagai reaksi terhadap *Roem-Royen Statements* yang akan melahirkan Republik Indonesia Serikat di bawah Ratu Belanda. Dalam pandangan S.M. Kartosoewirjo, pembentukan RIS itu statusnya sangat bertentangan dengan Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.

Walaupun mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak, *Roem-Royen Statement,* 7 Mei 1949, ditindaklanjuti dengan Konferensi Medja Bundar - KMB dari pihak Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, 2 November 1949. Kemudian, hasil KMB, direalisasikan dengan terbentuknya Kabinet RIS di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta, 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950.

Masalah DI/TII baru terselesaikan 13 tahun kemudian, pada 4 Juni 1962, Senin Legi, 1 Muharram 1382, S.M. Kartosoewirjo baru tertangkap karena dilancarkannya Operasi Pagar Betis Rakyat yang dipimpin oleh TNI Siliwangi di bawah Panglima Ibrahim Adjie.

Betapa beratnya tugas Perdana Menteri Mohammad Natsir dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI yang baru dibentuk pada 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369. Merupakan masa peralihan, berakhirnya negara-negara boneka bikinan van Mook, menjadi satu negara terdiri dari sejumlah provinsi, di bawah pemerintah pusat di Jakarta. Selain itu, dihadapkan juga problem baru, dimulainya sistem Demokrasi Perlementer dengan multipartai, serta berakhirnya APRIS menjadi APRI.

Penataan pemerintahan, setiap departemen dan kantor, dihadapkan masalah sangat kurangnya, *administrative leader* - tenaga ahli pemerintahan yang benar-benar berjiwa patriotik, dari pusat hingga eselon terbawah di setiap daerah. Tambahan lagi, masalah keamanan masih sangat rawan. Di bawah kondisi pemerintahan serba kurang tenaga profesional, Mohammad Natsir sebagai pemimpin negara yang baru, mendapat tantangan banyaknya *mass leader* - pemimpin massa di lembaga legislatif yang lebih berpikir idealis daripada realitas.

Bagaimanapun beratnya pekerjaan sebagai perintis pertama pembangun NKRI, semua problem negara tetap dihadapi dengan bijaksana oleh Mohammad Natsir. Berjuang dengan tabah, membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara agar memahami realitas kebhinekaan, bukan untuk dipertengkarkan. Melainkan agar disadari bahwa keragaman hakikatnya adalah satu kesatuan. Pekerjaan dan perjuangan yang berat tidak mungkin berhasil secepat membalikkan telapak tangan atau secara instan dan segera jadi.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

KABINET SOEKIMAN WIRJOSANDJOJO - SOEWIRJO

Koalisi Masjumi – PNI
April 1951 – Februari 1952
Foto bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden

Timbu l gerakan DI Kahar Muzakkar di Makassar
Pemberontakan Batayon 426 – Amir Fatah dan Angkatan Umat Islam AUI – Kiai Mahfudz
Sistem Demokrasi Liberal menjadikan usia kerja Kabinet sangat pendek, dijatuhkan oleh mosi tidak percaya DPR terhadap kebijakan politiknya.
Mutual Security Act – MSA dengan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Mohammad Natsir dari Partai Islam Indonesia Masjumi dan Persatuan Islam, sebagai arsitek pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai pemegang stock estafet yang pertama, berusaha agar dapat dilanjutkan oleh penerusnya. Dengan kata lain, Mohammad Natsir sebagai pembangun fondasi dasar NKRI, bekerja keras agar bangunan selanjutnya tidak bertentangan dengan fondasinya.

Kabinet Parlementer yang bergantung kepada dukungan Parlemen-DPR, dalam perkembangan Sejarah Kabinet di Indonesia, melahirkan masa pemerintahan

atau kabinet berumur sangat pendek. Akibat Parlemen-DPR dikuasai pimpinan partai politik, pada umumnya sebagai *mass leader* - pemimpin massa, dan sangat kurangnya *administrative leader* - pemimpin yang memahami masalah pemerintahan, menjadikan DPR dengan mudah memberikan evaluasi tidak percaya kepada kabinet dan terjadilah pergantian kabinet.

LAMBANG NEGARA GARUDA PANCASILA

Masyarakat luas mengira Lambang Negara NKRI sebagai ciptaan Mohammad Yamin.
Perkiraan yang demikian itu tidak benar. Sebenarnya, pencipta Lambang Negara adalah
Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak Kalimantan Barat

Ketika masih menjabat Menteri Negara RIS mendapat tugas dari Presiden Soekarno,
Sultan Hamid II sebagai pencipta Lambang Negara menuturkan proses penciptaannya
kepada sejarawan Solihin Salam.

Burung Garuda Pancasila
Bukanlah sebagai Burung Garuda Airlangga dari Kediri, melainkan
Burung Elang Rajawali Sayyidina Ali ra
Bersayap kanan kiri masing-masing 17, ekor 8, dan bulu pada pangkal ekor 19
dan pada leher 45 lambang Proklamasi 17-08-1945

Perisai di dada Burung Garuda Pancasila,

berwarna dasar kanan kiri Merah Putih di tengah berwarna Hitam

berbentuk segi empat dan lengkung di bagian bawahnya sebagai lambang

Ka'bah dan Hijir Ismail

Pada Perisai Lambang Garuda Pancasila terdapat lambang lima sila

Bintang Nur Cahaya

warna dasar hitam, Bintang berwana putih

Lambang Ketuhanan Yang Maha Esa

Rantai atau **Kalung**

berwarna emas, warna dasar Merah,

Lambang Kemanusiaan Yang Adil Beradab

Pohon Istana

Warna daun hijau batang coklat, berwarna dasar Putih

Lambang Persatuan Indonesia

Kepala Banteng

warna hitam putih, warna dasar Merah

Lambang Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan

Kapas dan Padi

Kapas warna hijau putih, Padi berwarna emas, warna dasar Putih

Lambang Keadilan Sosial

Cara membaca lambang Bintang di tengah, turun ke Rantai, naik ke Pohon Istana,

Terus belok ke kanan Banteng, turun ke Kapas dan Padi disebut

Thowaf seperti mengelilingi Ka'bah

Di antara kelima lambang terdapat garis tebal hitam melintang

Lambang Garis Khatulistiwa

Kaki Garuda Pancasila menggenggam pita yang bertuliskan

Bhineka Tunggal Ika

Pelukis pertama Lambang Garuda Pancasila adalah Dullah

Lambang Pancasila sebagai Lambang NKRI disahkan pertama kalinya oleh

Perdana Menteri NKRI Dr.Soekiman Wirjosandjojo

Partai Islam Indonesia Masjumi

Periksa Lebih Lanjut di Museum Konferensi Asia Afrika

Kabinet Soekiman Wirjosandjojo

Kabinet Dr. Soekiman Wirjosandjojo, April 1951-Februari 1952, koalisi PNI-Masjumi, menghadapi problem baru masalah TNI karena Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX tidak lagi duduk dalam Kabinet Soekiman. Dipersulit juga oleh tindakan Mohammad Yamin penganut Komunis Nasional Tan Malaka, sebagai Menteri Kehakiman yang tiba-tiba membebaskan 950 orang tahanan di antara 17.000 tahanan yang ditangkap oleh TNI dalam Kudeta PKI Madiun 19 September 1948, padahal belum diadili. Sebaliknya, tanpa koordinasi dengan TNI, melakukan razia penangkapan 15.000 PKI di Jakarta, Bogor, dan Medan. Akibatnya timbul kekacauan stabilitas sosial.

Muncul pertanyaan, siapa yang dilepas dan siapa pula yang ditangkap? Sayangnya, nama-namanya dan kedudukan kepartaiannya tidak diumumkan. Tidak pula terberitakan secara terbuka nama-namanya dalam media cetak saat itu. Setelah direhabilitasikan, mereka mendapatkan kedudukan apa dan di mana. Secara logika politik dapat diduga, yang dibebaskan oleh Mohammad Yamin, 950 tapol adalah dari komunis nasional Tan Malaka. Sedangkan yang ditangkap ulang 15.000 tapol adalah lawannya, yakni pengikut PKI Amir Sjarifoeddin. Benarkah, perlu penelitian ulang?

Adapun susunan Kabinet Soekiman Wirjosandjojo sebagai berikut:

Perdana Menteri	Dr. Soekiman Wirjosandjojo	Masjumi
Wakil Perdana Menteri	Soewirjo	PNI
Luar Negeri	Mr. Achmad Soebardjo	Masjumi
Dalam Negeri	Mr. Ishaq Tjokrodisoerjo	PNI
Pertahanan	Sewaka	PIR
Kehakiman	Mr. Mohammad Yamin	-
Penerangan	Arnold Mononutu	PNI
Keuangan	Mr. Joesoef Wibisono	Masjumi
Pertanian	Ir. Soewarto	Katolik
Perburuhan, Perdagangan dan Perindustrian	Mr. Soejono Hadinoto	PNI
Perhubungan	Ir. Djuanda	-
Pekerjaan Umum	Ir. Ukar Bratakoesoemah	PNI
Perburuhan	Iskandar Tjedjasukmana	Buruh
Sosial	Dr. Sjamsoedin	Masjumi

Pendidikan, Pengajaran,		
Kebudayaan	Mr. Wongsonegoro	PIR
Agama	K.H. Wachid Hasjim	Masjumi
Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
Soal-Soal Umum	M.A. Pelaupessy	Demokrat
Kepegawaian Negeri	R.P. Soeroso	Parindra
Agraria	Gondokoesoemo	PIR

Menurut Deliar Noer dalam Partai Islam Di Pentas Nasional dijelaskan bahwa Sewaka pengganti Soemitro Kolopaking, diangkat pada 9 Mei 1951. Pelaupessy diangkat menjadi penjabat Menteri Kehakiman, 14 Juni 1951, pada saat Mohammad Yamin mengundurkan diri. Kemudian, Mohammad Nasrun, pada 20 November 1951 diangkat sebagai Menteri Kehakiman. Mr. Soejono Hadinoto digantikan oleh Wilopo, 16 Juli 1951. Adapun yang dimaksudkan Dr. Samsudin bukan pimpinan Masjumi 1947-1949. Sedangkan Gondokoesoemo wafat 6 Maret 1962.

Dalam menghadapi Perang Dingin antar Blok Barat dan Timur, Kabinet Soekiman mengadakan kerja sama dengan Amerika Serikat, di bidang ekonomi, teknik dan militer atas dasar Mutual Security Act – MSA atau Undang-Undang Keamanan Bersama, 1951. Kebijakan Kabinet Soekiman ini dinilai bertentangan dengan Politik Luar Negeri yang bebas dan aktif. Akibatnya, Kabinet Soekiman, dituduh menjadikan Indonesia berpihak mutlak ke Blok Barat. Dampaknya Kabinet Soekiman hanya bertahan 10 bulan, walaupun telah bekerja menegakkan pemerintahan secara demokratis. Kabinetnya dibangun bersama antar parpol Masjumi, PNI, Katolik, Kristen, PIR, Demokrat, Buruh, dan Parindra.

Kedua Kabinet Natsir bekerja selama tujuh bulan, 9 September 1950-20 Maret 1951, dan Kabinet Dr. Soekiman Wirjosandjojo bekerja sebelas bulan, April 1951-Februari 1952 adalah dipimpin langsung oleh Partai Islam Indonesia Masjumi. Berikutnya oleh Presiden Soekarno pada 19 Maret 1951 diserahkan kepada Wilopo dari Partai Nasional Indonesia - PNI. Namun, sebelumnya telah ditunjuk oleh Presiden Soekarno, sebagai formateur adalah Prawoto Mangkusasmito Wakil Ketua I Partai Masjumi dan Sidik dari PNI. Namun, sampai dengan 18 Maret 1951, kedua formateur tersebut tidak berhasil menyusun kabinetnya dan menyerahkan kembali mandatnya.

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

KABINET WILOPO – PRAWOTO

Koalisi PNI – Masjumi

April 1952 – Juni 1953

Atas: Foto Pelantikan dan Sumpah Perdana Menteri

Bawah: Foto bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden

Menghadapi Demo Pembubaran Parlemen, 17 Oktober 1952

Timbullah gerakan kedaerahan

Peristiwa Tanjung Morawa PKI

Kegagalan pembentuk kabinet tersebut akibat Joesoef Wibisono menolak Ishak sebagai Perdana Menteri dan A.K. Gani sebagai Menteri Perekonomian. Joesoef Wibisono menghendaki agar Dr. Soekiman Wirjosandjojo sebagai Perdana Menteri.

K.H. Abdoel Wahab menuntut agar K.H. Wachid Hasjim sebagai Menteri Agama. Bila menolak masih ada calonnya K.H. Maskoer, K.H. Fatoerrahman, H. Moestari Bupati Tuban, dan Mohammad Machien Bupati Kediri.

Di samping itu, K.H. Abdoel Wahab menempuh jalur sendiri artinya bukan usulan partai, mengusulkan pula Zainoel Arifin sebagai Menteri Pertahanan dan Aboe Hanifah sebagai Menteri Luar Negeri.

Sedangkan Muhammadiyah mengusulkan K.H. Fakih Oesman sebagai menteri agama karena Nahdlatul Ulama sudah dua kali menduduki Kementerian Agama. Demikian penjelasan Deliar Noer.

Ulama dalam Kabinet Wilopo

Dengan melanjutkan hasil kerja Prawoto Mangkusasmito dan Sidik, Wilopo dari PNI berhasil membentuk Kabinet Wilopo, April 1952-Juni 1953, koalisi PNI-Masjumi, terdiri dari:

Perdana Menteri	Mr. Wilopo	PNI
Wakil Perdana Menteri	Prawoto Mangkusasmito	Masjumi
Luar Negeri	Moekarto Notowidagdo	PNI
Dalam Negeri	Mr. Mohamad Roem	Masjumi
Pertahanan	Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX	-
Kehakiman	Mr. Loekman Wiriadinata	PSI
Penerangan	Arnold Mononutu	PNI
Keuangan	Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo	PSI
Pertanian	Mohammad Sardjan	Masjumi
Perekonomian	Mr. Soemanang	PNI
Perhubungan	Ir. Djuanda	-
Pekerjaan Umum	Ir. Soewarto	Katolik
Perburuhan	I.Tedjasoekmana	Buruh
Sosial	Anwar Tjokroaminoto	PSII
Pendidikan, Pengajaran Kebudayaan	Dr. Bahder Djohan	-

Agama	K.H. Fakih Oesman	Masjumi
Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
Kepegawaian Negeri	R.P. Soeroso	Parindra

Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX berhenti pada 2 Juni 1953, Kementerian Pertahanan dijabat oleh Wakil Perdana Menteri, kemudian oleh Perdana Menteri. Anwar Tjokroaminoto mengundurkan diri, kemudian jabatan Menteri Sosial dipegang oleh R.P. Soeroso. Sementara itu, Kementerian Kepegawaian Negeri, mulai 11 Mei 1953 ditiadakan.

Lahirnya Partai Nahdlatul Ulama

Dari susunan Kabinet Wilopo di atas, apa yang diusulkan oleh K.H. Abdoel Wahab tidak direalisasikan.Terutama sekali, tuntutan Nahdlatul Ulama tentang Menteri Agama, tidak seorang pun dari lima usulan: K.H. Wachid Hasjim, K.H. Maskoer, K.H. Fatoerrahman, H. Moestari, Mohamad Machien yang diangkat. Dan yang diangkat adalah K.H. Fakih Oesman dari Persjarikatan Moehammadijah.

> Dampaknya menurut Deliar Noer, Muktamar Nahdlatul Ulama di Palembang, 29 April 1952, mengubah Djamijah Nahdlatul Ulama menjadi Partai Politik Nahdlatul Ulama. Pada Muktamar ini, Dr. Soekiman Wirjosandjojo sebagai Wakil Ketua I Pimpinan Pusat Masjumi hadir. Sebenarnya sebelum diadakan pemungutan suara, Dr. Soekiman Wirjosandjojo dipersilakan untuk berbicara. Namun ia menolaknya, alasannya Nahdlatoel Oelama sebagai organisasi yang berdaulat. Kemudian setelah terbentuk, Dr. Soekiman Wirjosandjojo mengajak untuk bekerja sama.

Dengan terbentuknya Nahdlatul Ulama sebagai partai politik, 6 Sja'ban 1371, Kamis Kliwon, 1 Mei 1952 maka untuk kedua kalinya terjadi pemisahan Ulama secara fisik keorganisasian kepartaiannya dari Partai Islam Indonesia Masjumi. Pertama dipelopori oleh Sjarikat Islam, 1949 M. Kedua oleh Nahdlatul Ulama, 1952 M.

Semula para Ulama baik dari Persjarikatan Moehammadijah, Persatoean Islam, Nahdlatoel Oelama, Matlaoel Anwar, Persatoean Oemat Islam, Al-Waslijah, Sjarikat Islam duduk bersama-sama dalam Madjlis Sjoero dari Partai Islam Indonesia Masjoemi, 1 Dzulhijjah 1364, Rabo Pon, 7 November 1945, di Djokjakarta.

Lambang Djamiah Nahdlatoel Oelama

Sumber: Dok. Prihadi

Namun dengan berdirinya Partai Nahdlatul Ulama maka sejak 6 Sja'ban 1371, Kamis Kliwon, 1 Mei 1952, dalam Madjlis Sjuro Partai Islam Indonesia Masjumi, tidak ada lagi Ulama dari Nahdlatul Ulama, berarti menyusul Ulama dari Sjarikat Islam yang telah keluar sejak 1948 M karena menghidupkan kembali Partai Sjarikat Islam Indonesia ,1923 M.

K.H. Wachid Hasjim Wafat

> Upaya kerja sama yang diminta oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo terhambat karena K.H. Wachid Hasjim, 1331-1372 H/1913-1953 M wafat setelah mengalami kecelakaan lalu-lintas di Cimindi, Cimahi, Bandung, 4 Sja'ban 1372, Ahad Pon, 19 April 1953.
>
> Tepat setahun setelah terbentuknya Partai Nahdlatul Ulama, 6 Sja'ban 1371, Kamis Kliwon, 1 Mei 1952/ awal Muktamar Nahdlatul Ulama di Palembang, 3 Sja'ban 1371, Senin Pahing, 28 April 1952.

K.H. Wachid Hasjim sebagai Menteri Agama 1950-1952 memberikan keterangan dan jawaban tentang eksistensi Kementerian dan Departemen Agama di tengah bangsa dan negara Indonesia. Keterangannya untuk memberikan jawaban kepada sebagian orang yang berkeinginan menghapuskan Departemen Agama. Menurut Deliar Noer dicontohkan Nj. Rasoena Said pejuang wanita, pengikut Tan Malaka, di Sumatera pada masa penjajahan Belanda, Departemen Agama serta Departemen Penerangan dituntut untuk dihapuskan.

> K.H. Wachid Hasjim menandaskan bahwa Pemerintah RI merasa berkewajiban melayani keperluan masyarakat tentang agama atas dasar Pancasila. Ditegaskan adanya upaya pemisahan agama dan negara hanya terdapat secara teori dan tidak pernah dipraktikkan sepenuhnya di negara mana pun, kecuali negara atheis.
>
> Selanjutnya diingatkan, walaupun Departemen Agama dapat saja dihapuskan dan berbagai fungsi departemen itu dilaksanakan oleh berbagai departemen lain, K.H. Wachid Hasjim tegaskan bahwa penghapusannya akan menyinggung perasaan umat Islam Indonesia.
>
> Mengenai tuduhan bahwa departemen memberikan perhatian lebih banyak pada Islam, Menteri K.H. Wachid Hasjim mengingatkan bahwa jumlah penganut Islam berlipat ganda dari yang bukan Islam sehingga kesan seperti yang dituduhkan

> itu mungkin timbul. Namun, beban kerja untuk melayani umat Islam karena jumlahnya itu, tidak dapat disamakan dengan beban kerja bagi umat lainnya. Ini bukanlah bersandar pada diskriminasi.

Pernyataan K.H. Wachid Hasjim sebagai Menteri Agama itu karena pada zamannya terdapat upaya deislamisasi kabinet sebagai kelanjutan setelah berhasil menghapuskan tujuh kata pada Piagam Jakarta; Departemen Agama pun perlu ditiadakan.

> Upaya pemisahan agama dan negara dari kalangan sekuler dan orang Islam sendiri seperti Nj. Rasoena Said, akan tetap selalu bangkit lagi pada setiap zaman. Peringatan yang ditinggalkan K.H. Wachid Hasjim perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak yang akan memahami realitas eksistensi umat Islam Indonesia sebagai mayoritas bangsa Indonesia, serta partisipasi aktif perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Problema Batalyon 426 dan Partai NU

Kembali ke masalah kerja Kabinet Wilopo di bidang keamanan pada April 1952 operasi militer berhasil menumpas gerakan Bataljon 426 di Kudus dan Magelang, dan sisanya bergabung ke Darul Islam Jawa Barat. Operasi militer ini sebenarnya telah dilakukan sejak 1950, dipimpin oleh Kolonel Sarbini, digantikan oleh Letnan Kolonel M. Bahroem, kemudian dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Yani. Operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, berhasil melumpuhkan Bataljon 426 tersebut.

> Choirul Anam dalam Gerak Langkah Pemuda Ansor, menjelaskan bahwa Bataljon 426 adalah batalyon mantan Hizboellah. Sejak Kabinet Soekiman, April 1951-Februari 1952, tidak memerhatikan nasib Bataljon 426 yang diperlakukan oleh Bataljon TNI AD yang lain di Jawa Tengah secara kurang layak sehingga terjadi benturan antara Bataljon 426 dengan Bataljon TNI AD lainnya.
>
> Akibatnya terjadilah fitnah, banyak pemuda mantan Lasjkar Hizboellah, ditangkap dan dipenjarakan. Tidak heran karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil, sisanya yang tidak tertangkap, mengambil sikap lebih baik bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat.

Oleh karena itu, menurut Nahdaltul Ulama saat itu, tindakan Kabinet Natsir dan Kabinet Soekiman Wirjosandjojo di bidang keamanan, dengan hancurnya Bataljon 426 mantan Lasjkar Hizboellah, kebijakannya sangat merugikan Islam. Koreksi dari Nahdlatul Ulama ini, tidak didengar dan tidak diperhatikan oleh pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi.

Akibatnya, Muktamar Ke-18 Nahdlatul Ulama di Jakarta pada 30 April-3 Mei 1950, Ahad Pon-Rabu Legi, 11-14 Rajab 1369, memutuskan keluar dari Partai Islam Indonesia, Masjumi. Namun, pelaksanaan keputusan tersebut ditangguhkan hingga Muktamar Ke-19 Nahdlatul Ulama di Palembang yang diselenggarakan pada 28 April-1 Mei 1952, Senin Pahing-Kamis Kliwon, 3-6 Sya'ban 1371.

Dari keputusan Muktamar Ke-19 Nahdlatul Ulama ini, lahirlah Instruksi PBNU No.1/Tanf/52 Tentang Pemisahan Diri NU Secara Organisatoris dari Masjumi dan Usul Memfederasikannya 1 Mei 1952/6 Sya'ban 1371. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh Pengurus Cabang hingga Ranting NU se-Indonesia. Ditanda tangani Ketua dan Biro Politik K.H. Wachid Hasjim.

Pembubaran DPRS dan Peristiwa Tanjung Morawa

Kemudian, Kabinet Wilopo diguncang oleh demonstrasi rakyat dan TNI AD dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution yang menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan DPRS, dan Kabinet Wilopo juga dituntut agar segera menyelenggarakan Pemilu.

Dalam menanggapi tuntutan tersebut, Presiden Soekarno menolak tuntutan pembubaran DPR karena bukan diktator. Peristiwa ini dikenal nama Peristiwa 17 Oktober 1952.[9] Menurut Bung Tomo dalam *Bung Tomo Menggugat*, Partai Sosialis Indonesia - PSI Soetan Sjahrir menggunakan Angkatan Perang memenangkan tujuannya. Kelompok demonstran ini disebutnya 17 Oktoberisten. Dampaknya timbullah *internal conflicts* antarpartai politik dan *internal conflict* antarTNI AD. Antara Kelompok 17 Oktoberisten kontra Golongan Anti 17 Oktober.

9 Bandingkan dengan tindakan Presiden Soekarno dengan Dekrit Presiden 1959, berani membubarkan Konstituante dan DPR hasil Pemilu 1955. Di hadapan demonstran 17 Oktober 1952, tidak bersedia membubarkan DPR bukan hasil Pemilu karena Presiden Soekarno merasa bukan Diktator.

Kabinet Wilopo pada akhirnya tidak mampu menghadapi Peristiwa Tanjung Morawa, Medan Sumatra Utara. Peristiwa tentang upaya pembebasan tanah perkebunan asing, diduduki oleh emigran China asing dan Pribumi. Upaya pembebasan mendapat perlawanan dan kericuhan dari penghuni China Asing dan Pribumi yang mendapat dukungan dari PKI dengan kamuflase membela petani dengan melalui Landreform. Akibat terjadi perlawanan, korban tidak dapat dihindari. Kemudian, hal ini diperuncing oleh PKI di DPRS. Partai-partai non komunis pun tidak mampu menandingi manuver PKI di DPRS. Akibatnya, Kabinet Wilopo menyerahkan mandatnya.

Problem Tanjung Morawa dampaknya menjadikan PKI menjadi populer, berhasil menarik perhatian Mr. Ali Sastroamidjojo dan PKI dijadikan salah satu dari ketiga pendukung Kabinet Ali Sastroamidjojo PNI-PKI-NU, Juli 1953-Juli 1955. Sekalipun demikian, Mr Ali Sastroamidjojo sangat kritis dan taktis serba waspada terhadap upaya pemanfaatan kedudukan di kementerian yang akan dijadikan batu loncatan pengembangan PKI lebih lanjut. Oleh karena itu, tidak menempatkan pimpinan Polit Biro PKI, artinya bukan Aidit atau Njoto, melainkan Sadjarwo dari BTI dan S.M. Abidin dari Buruh, dalam kabinetnya.

Kabinet PNI, PKI, NU

Selanjutnya dalam upaya pembentukan kabinet baru, tidak lupa Ali Sastroamidjojo mendekati NU sebagai partai baru yang bermassa besar. Diberikan porsi untuk Kementerian Agama kepada K.H. Maskoer. Sedangkan untuk Zainoel Arifin yang pernah memimpin Sabilillah, tidak ditempatkan pada Kementerian Pertahanan sebagaimana yang diusulkan Partai NU. Tentu dengan pertimbangan, NU yang memiliki Barisan Sabilillah dan Lasjkar Hizboellah, serta massa yang besar akan menjadi kuat bila menguasai Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, Zainoel Arifin ditawari sebagai Wakil Perdana Menteri II, dan Mohammad Hanafiah yang diusulkan oleh NU sebagai Menteri Luar Negeri ditempatkan sebagai Menteri Negara. Dengan demikian, NU sebagai partai baru, walaupun sangat kuat, hanya memperoleh tiga kursi.

Sementara itu, kementerian pertahanan dan keamanan diserahkan kepada Mr. Iwa Koesoemasoemantri sebagai pengikut Tan Malaka yang pernah ikut dalam Kudeta 3 Juli 1946 di Yogyakarta, dengan pertimbangan sebagai intelektual komunis nasionalis. Demikian pula Mohammad Yamin, pengikut Tan Malaka, keduanya sebagai pengikut setia Tan Malaka, komunis nasionalis untuk mengimbangi PKI. Menurut Arnold C. Brackman, keduanya secara fisik mengaku dari Progresif dan bukan dari partai politik.

Dari penawaran dan pertimbangan itu, terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan poros PNI-NU-PKI, susunannya adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri	Mr. Ali Sasroamidjojo	PNI
Wakil Perdana Menteri I	Mr. Wongsonegoro	PIR
Wakil Perdana Menteri II	Zainoel Arifin	NU
Luar Negeri	Mr. Soenario	PNI
Dalam Negeri	Mr. Dr. Hazairin	PIR
Pertahanan	Mr. Iwa Koesoemasoemantri	Progresif
Kehakiman	Mr. Djody Gondokusumo	PRN
Penerangan	Dr. F.L. Tobing	SKI
Keuangan	Dr. Ong Eng Die	PNI
Pertanian	Sadjarwo	BTI
Perekonomian	Mr. Ishaq Tjokroadisoerjo	PNI
Perhubungan	Abikoesno Tjokrosoejoso	PSII
Pekerjaan Umum	Ir. Rooseno	PIR
Perburuhan	S.M. Abidin	Buruh
Sosial	R.P. Soeroso	Parindra
Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan	Mr. Mohammad Yamin	-
Agama	K.H. Maskoer	NU
Kesehatan	Dr. F.L. Tobing a.i.	SKI
Menteri Negara dengan Tanggung Jawab Soal-soal agraria	Mohammad Hanafiah	NU
Menteri Negara dengan Tanggung Jawab Kesejahteraan Negara	Soedibjo	PSII

Selanjutnya, Deliar Noer menjelaskan bahwa Mr. Wongsonegoro - PIR, Mr. Dr. Hazairin - PIR, dan Ir. Rooseno - PIR berhenti pada 23 Oktober 1954. Pada 6 November 1954 K.H. Siradjoeddin Abbas dari Perti diangkat menjadi Menteri Kesejahteraan Negara. Ir. Rooseno - PIR menjadi Menteri Perekonomian. Mulai 19 November 1954 diangkat tiga menteri baru: Dr. A.K. Gani - PNI sebagai Menteri Perhubungan, Mr. Soenarjo - NU sebagai Menteri Dalam Negeri, dan I Gusti Gde - PRN sebagai Menteri Agraria.

Mr. Iwa Koesoemasoemantri berhenti pada 13 Juli 1955, kementeriannya dipegang oleh Perdana Menteri. Mr. Ishaq Tjokroadisoerjo digantikan oleh Ir. Rooseno pada 6 November 1954. Abikoesno Tjokrosoejoso dan Soedibjo berhenti pada 14 September 1953. Kementerian Perhubungan dipegang oleh Ir Rooseno dan Pekerjaan Umum digantikan oleh Mohammad Hasan - PSII. Dr. Lie Kiat Teng - PSII diangkat menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Dr. F.L. Tobing pada Oktober 1953.

Proklamasi Darul Islam di Aceh

Program Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Juli 1953-Juli 1955, juga akan menyelesaikan masalah DI/TII. Tetapi hasilnya justru Daud Beureueh orang kuat Aceh dan Benteng RI pada masa Revolusi, pada Muharram 1373/September 1953 bergabung kepada S.M. Kartosoewirjo.Tidak percaya lagi terhadap ideologi Pancasila.

> Walaupun Mr. Teuku Mohammad Hasan sebagai wakil Aceh ikut serta merumuskan ideologi Pantjasila dan Konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945, bersama K.H. Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Drs. Mohammad Hatta sebelum sidang pengesahan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364.
>
> Teungku Mohammad Daud Beureueh nampaknya bukan tidak memerhatikan siapa yang merumuskan Pantjasila pada sehari sesudah Proklamasi ini. Namun, akibat perilaku politik, penguasa tidak menjadikan Pantjasila sebagai pedoman pengambilan kebijakan politiknya lagi.

Alasan Daud Beureueh bersama Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh - POSA,[10] menentang Pemerintah Pusat Jakarta karena kesertaan PKI anti agama berada dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo. Selain itu, Proklamasi Teungku Mohammad Daud Beureueh itu, juga sebagai perkembangan lebih lanjut reaksi umat Islam terhadap pidato Presiden Soekarno di Amuntai Kalimantan Selatan pada 27 Januari 1953. Presiden Soekarno menganjurkan agar rakyat menolak usul atau ajakan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara:

---

10 Bila terdapat tulisan dengan ejaan lama, Teoengkoe Mohammad Daoed Beoereoe-eh dibaca menjadi Teungku Mohammad Daud Beureueh dan Persatoean Oelama Seloeroeh Atjeh - POSA dibaca menjadi Persatuan Ulama Seluruh Aceh – PUSA.

Bismillahir rahmanir rahim. Dengan
nama Allah Yang Mahamurah dan
Yang Maha Asih, Asyhadu alla ilaha
illallahu wa asyhadu anna Muhammadur
Rasulullahu.

Kami Umat Islam Bangsa Indonesia
MENYATAKAN berdirinya NEGARA
ISLAM INDONESIA.
Maka hukum yang berlaku atas Negara
Islam Indonesia itu,
ialah: HUKUM ISLAM.

Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Allahu Akbar!
Atas nama Ummat Islam Bangsa
Indonesia

Tertanda
S.M. Kartosoewirjo
Madinah Indonesia, 22 Syawal 1368/
7 Agustus 1949.

S.M. KARTOSOEWIRJO

DAUD BEUREUEH

KAHAR MUZAKKAR

Sumber: *Doc. Pribadi*

Jangan mau, jangan mau, jangan mau. Karena ini akan menyebabkan daerah-daerah seperti Maluku, Bali, Flores, Kepulauan Kai, dan Sulawesi Utara lepas dari Republik Indonesia.

Apa maksud dari Pidato Presiden Soekarno itu? Dengan memerhatikan tempatnya di sebuah kota kecil Amuntai, di pedalaman Kalimantan Selatan, besar kemungkinan sasarannya adalah untuk membendung pengaruh gerakan Daroel Islam dan Kesatoean Rakjat Jang Tertindas - KRJT, pimpinan Ibnoe Hadjar dari Kalimantan Selatan.

Pandangan Presiden Soekarno ini, menurut Deliar Noer, diulang lagi dalam Ceramah Umum di Universitas Indonesia pada 7 Mei 1953.

Tidak heran bila hal tersebut membangkitkan reaksi Teungku Mohammad Daud Beureueh dengan mengingatkan kembali janji dan sumpah Presiden Soekarno saat berkunjung ke Aceh pada 1948. Dalam dialognya[11] dapat kita ikuti keterangan M. Nur El-Ibrahimy dalam Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai berikut:

Presiden: Saya minta bantuan Kakak Daud Beureueh agar rakyat Aceh turut mengambil bagian perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Daud Beureueh: Sdr. Presiden. Kami Rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa Perang Sabil atau Perang Fi Sabilillah, perang untuk menegakkan Agama Allah sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu maka berarti mati syahid.

Presiden: Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Tjhik di Tiro, dan lain-lain yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersembyan "Merdeka atau Syahid".

11 M. Nur El-Ibrahimy. 1986. *Teungku Muhammad Daud Beureueh. Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*. Gunung Agung. Jakarta, h. 67–68. Dialog ini tidak dalam bentuk teks aslinya, hanya didasarkan keterangan lisan dari Teungku Muhammad Daud Beureueh. Memang, Presiden Soekarno tidak menuliskan janjinya. M. Nur El-Ibrahimy menuliskan dialognya dalam bentuk EYD. Perlu penelitian lagi.

Daud Beureueh: Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Sdr. Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada Sdr. Presiden, bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syariat Islam di dalam daerahnya.

Presiden: Mengenai hal itu, Kakak tak usah khawatir. Sebab 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam.

Daud Beureueh: Maafkan saya Sdr Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan, bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Sdr Presiden.

Presiden: Kalau demikian baiklah, saya menyetujui permintaan Kakak itu.

Daud Beureueh: Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Sdr. Presiden. Kami mohon (sambil menyodorkan secarik kertas kepada Presiden) sudi kiranya Sdr Presiden menulis sedikit di atas keras ini.

Melihat permohonan Daud Beureueh itu, Presiden menangis terisak-isak. Dan berkata: Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya?

Daud Beureueh menjawab: Bukan kami tidak percaya Sdr. Presiden. Akan tetapi hanya sekadar menjadi tanda untuk berperang.

Presiden sambil menyeka air matanya berkata: Wallah, Billah, kepada Daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. Dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?

Mohammad Daud Beureueh: Saya tidak ragu-ragu lagi Sdr. Presiden. Sekali lagi, saya atas nama rakyat Aceh mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Sdr. Presiden.

Bertolak dari Janji dan Sumpah Presiden Soekarno di atas, dan sebagai reaksi terhadap pidato Presiden 27 Januari 1953 di Amuntai, serta dipicu oleh Peristiwa Berdarah 21 September 1953 di Aceh maka Teungku Muhammad Daud Beureueh, seorang Ulama besar, seorang pemimpin rakyat, mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, serta mantan Gubernur Aceh yang pertama, mengangkat senjata terhadap Pemerintah Pusat dan memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia.

LETJEN IBRAHIM ADJIE dan S.M. KARTOSOEWIRJO

Sumber: HU Pikiran Rakyat.

SEKARMADJI MARIDJAN KARTOSOEWIRJO

Wakil Partai Sjarikat Islam Indonesia dalam Kongres Pemoeda, 28 Oktober 1928, yang mengusulkan Bahasa Indonesia dijadikan Bahasa Persatoean dan menolak Bahasa Djawa usulan Tri Koro Dharmo atau Jong Java, walaupun dirinya orang Jawa.

Menolak permintaan Amir Sjarifoeddin untuk menjadi staf Menteri Pertahanan karena dinilai Amir Sjarifoeddin PKI. Terbukti adanya Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948.

Pendiri Tentara Islam Indonesia - TII setelah Jawa Barat kosong, ditinggalkan Tentara Siliwangi yang Hijrah ke Jawa Tengah, memenuhi hasil Peroendingan Renville (1948 M). Tujuan pembentukan TII meneruskan bergerilya mempertahankan Jawa Barat sebagai wilayah RI, yang dijadikan sebagai Negara Pasoendan oleh van Mook penjajah Belanda.

Membubarkan Partai Islam Indonesia Masjumi, dan mendirikan Majelis Islam karena Mohamad Roem dari Masjumi yang memimpin *Roem-Rojen Statements*, 7 Mei 1949, yang dijadikan dasar Perundingan KMB yang melahirkan RIS di bawah Ratu Belanda.

Proklamasi Negara Islam Indonesia - NII, 7 Agustus 1949, sebagai manifestasi penolakan Perundingan Konferensi Medja Bundar - KMB yang dimulai 6 Agustus 1948 Drs. Mohammad Hatta ke Nederland, walaupun KMB baru akan diselenggarakan 23 Agustus s/d 2 November 1949. Hasilnya melahirkan RIS di bawah Ratu Belanda, 27 Desember 1949. Hal ini dinilai bertentangan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Kerja sama Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, Kahar Muzakkar, Daud Beureueh dari NII, dengan Ahmad Husein dari PRRI, Samual dari Permesta, menentang Presiden Soekarno yang bekerja sama dengan PKI.

Setelah empat belas tahun kemudian, Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo (1948-1962 M) baru tertangkap oleh kepungan Pagar Betis Rakyat, di belakangnya Tentara Siliwangi, di Gunung Geber dan memerintahkan agar anak buahnya turun dari gunung dan kembali kepangkuan RI.

Pangdam VI Siliwangi Ibrahim Adjie menjenguk Imam Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Pos Komando Cipanas, Garut, sebelum dihadapkan ke Mahmilub. Melalui Harian Umum Pikiran Rakjat, rakyat Jawa Barat baru mengetahui Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo ternyata sudah berusia lanjut.

Tawaran Grasi oleh Majelis Hakim Mahmilub ditolak oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, dengan menyatakan: Haram hukumnya saya meminta grasi kepada manusia Presiden Soekarno. Makin cepat eksekusi dilaksanakan, makin cepat saya melihat hasil ijtihad saya di hadapan Mahkamah Allah.
Terima kasih.

Konferensi Ulama di Cipanas Bogor

Dalam menanggapi semakin meluasnya pengaruh S.M. Kartosoewirjo diakui sebagai Imam oleh Kahar Moezakkar, Teungku Muhammad Daud Beureueh, seperti Proklamasi 13 Muharram 1373 di atas, Kabinet Ali mengadakan upaya menandingi gelar S.M. Kartosoewirjo sebagai Imam umat Islam Indonesia oleh kelompok Darul Islam, dengan mengadakan Konferensi Ulama pada 2-7 Maret 1954, Selasa Kliwon - Ahad Kliwon, 25 Jumadil Akhir - 1 Rajab 1373, di Cipanas Bogor Jawa Barat.

Dalam konferensi tersebut dengan kewenangan, para Ulama memutuskan untuk menetapkan Presiden Soekarno diangkat sebagai Wali'al Amri Dharuri bi al Syaukah. Maksudnya Presiden sebagai Pelindung umat Islam Indonesia, secara darurat diberikan kekuasaan. Konferensi tersebut juga memutuskan bahwa rakyat Indonesia wajib mentaatinya.

> Ditinjau dari segi waktu Konferensi Ulama, 2-7 Maret 1954, Selasa Kliwon-Ahad Kliwon, 25 Jumadil Akhir-1 Rajab 1373, dan diselenggarakan oleh Departemen Agama, Menteri Agama K.H. Maskoer dari Nahdlatul Ulama, di tengah suasana S.M. Kartosoewirjo bergelar Imam Negara Islam Indonesia - NII, 7 Agustus 1949, dan didukung oleh Kahar Muzakkar, 7 Agustus 1953, dengan Republik Persatuan Islam - RPI, serta Daud Beureueh, Negara Islam Indonesia - NII, 21 September 1953, Kabinet Ali dalam upaya politis untuk melindungi umat Islam agar tidak berpihak kepada gerakan Negara Islam Indonesia, dengan melalui Konferensi Ulama di atas, memberikan gelar dan kewenangan kepada Presiden Soekarno sebagai Wali al Amri Dharuri bi al Syaukah

Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Menteri Agama K.H. Maskoer dan para Ulama dalam Konferensi Ulama di Cipanas pada 2-7 Maret 1954 tersirat sebagai manifestasi kecintaan dan loyalitas umat Islam kepada Presiden Soekarno karena bagaimanapun juga Presiden Soekarno mempunyai pengaruh besar terhadap rakyat dan mulai didekati PKI sebelum Pemilu 1955.
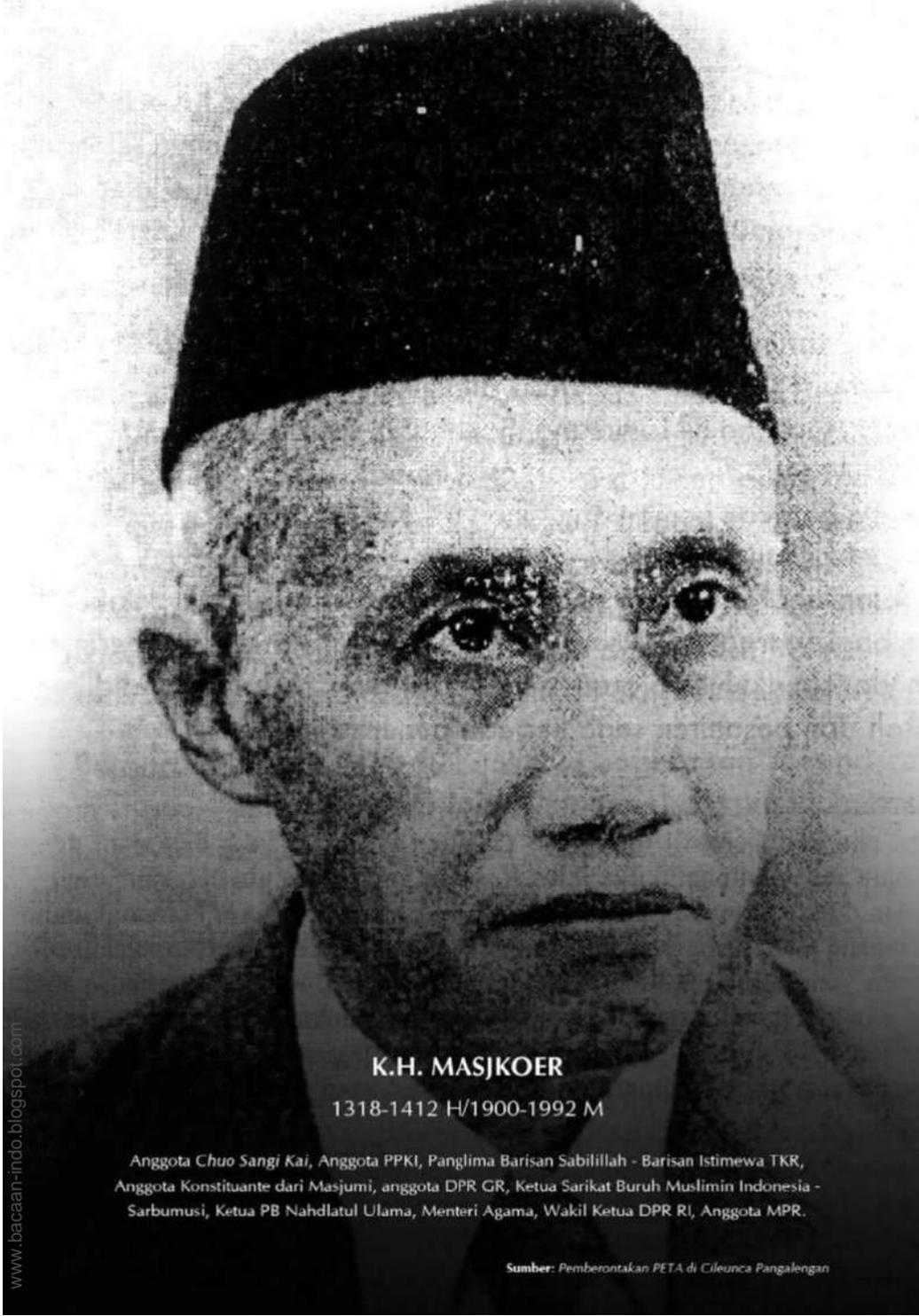
K.H. MASJKOER
1318-1412 H/1900-1992 M
Anggota *Chuo Sangi Kai*, Anggota PPKI, Panglima Barisan Sabilillah - Barisan Istimewa TKR, Anggota Konstituante dari Masjumi, anggota DPR GR, Ketua Sarikat Buruh Muslimin Indonesia - Sarbumusi, Ketua PB Nahdlatul Ulama, Menteri Agama, Wakil Ketua DPR RI, Anggota MPR.
Sumber: *Pemberontakan PETA di Cileunca Pangalengan*

> Lebih dari keputusan Konferensi Ulama tersebut, Dr. Soekiman Wirjosandjojo dari Partai Islam Indonesia, 1938 M, nantinya menjadi Ketua Partai Islam Indonesia Masjoemi, 7 November 1945, dan sebelumnya pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364, dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengusulkan agar Presiden Soekarno diangkat untuk waktu seumur hidup. Bukan untuk sementara sebatas Lima Tahun.
>
> Akan tetapi, usulan ini tidak mendapat perhatian dari anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Usulan Dr. Soekiman Wirjosandjojo itu tidak pula dituliskan dalam Sejarah Indonesia. Akibatnya, banyak yang berpendapat bahwa keputusan Konferensi Ulama di atas dinilai terlalu menyimpang.
>
> Kelanjutannya pada 18 Mei 1963 berdasarkan Tap MPRS RI Nomor III/MPRS/1963 ditetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup.
>
> Usulan yang mirip terulang kembali dalam Konferensi Islam Afrika Asia, 15 Maret 1965, Sabtu Kliwon, 11 Dzulhijjah 1384 di Bandung, yang dipimpin oleh Dr. K.H. Idham Chalid dan K.H. A. Sjaichu, Presiden Soekarno diangkat sebagai the Champion of Freedom and Islam -Pendekar Kemedekaan dan Islam.
>
> Disusul oleh Universitas Muhammadijah Jakarta, 3 Agustus 1965, 5 Rabiul Achir 1385, Promotor Prof. Dra. Baroroh Baried, dan Rektor Sutjipto SH, Brigadir Djenderal TNI, serta Sekretaris Senat Drs. H. Sadad Siswowidjojo memberikan anugerah gelar Doctor Honoris Causa, alam Falsafah Ilmu Tauhid, kepada Dr. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi, Pahlawan Islam dan Kemerdekaan, Anggota Setia Muhammadijah.

Pemberian gelar kepada Presiden Soekarno di atas, sebenarnya berangkat dari tinjauan politik. Tidak heran bila menimbulkan sikap pro dan kontra dari kalangan politisi dan Ulama, pimpinan Masjumi, Persatuan Islam, PSII, dan Muhammadijah.

Secara politik, kebijakan mengimbangi tindakan lawan politik dengan cara yang sama tetapi beda, adalah memang karakter politisi. Kalau S.M. Kartosoewirjo diangkat sebagai Imam Negara Islam Indonesia, bagaimana kedudukan Presiden Soekarno dengan mayoritas rakyatnya adalah umat Islam Indonesia? Sementara Boeng Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang bukan negara Islam.

Dengan mempertimbangkan kepentingan politik yang itu, para Ulama secara politik mencarikan sebutan gelar kedudukan yang bersifat sementara. Dengan tujuan untuk mengimbangi Imam Negara Islam Indonesia yang dinilai juga bersifat sementara keberadaannya, untuk Presiden Soekarno dipilihlah bukan gelar Khalifah, bukan Sultan, melainkan Wali al Amri Dharuri bi Al Syaukah.

Konferensi Asia Afrika dan Dasa Sila Bandung

Kabinet Ali dengan operasi militernya belum berhasil dalam upayanya mengatasi masalah Darul Islam dan Republik Maluku Selatan dan belum tertangkapnya Dr. Ch. R. Soumokil RMS maka perhatian Kabinet Ali dipusatkan kepada masalah politik luar negeri yang lebih diarahkan kepada upaya menghapuskan penjajahan di atas dunia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.[12] Karena penjajahan Belanda di Indonesia masih bercokol di Irian Barat, Irian Jaya (Papua). Bertahannya penjajahan Belanda ini sebagai akibat mendapat dukungan dari negara-negara Barat. Dampaknya masih bertahan gerakan RMS pimpinan Dr. Ch. Soumokil.

Untuk menjawab tantangan negara-negara Barat yang mempertahankan imperialisme di Indonesia maka Indonesia membangun kerja sama dengan India, Sri Langka, Pakistan, dan Burma, sebagai Negara-Negara Colombo, 1954 M menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, 24 April 1955 di Bandung. Dihadiri pula oleh RRC, dan 28 negara Asia Afrika.

> Pemimpin besar yang hadir antara lain: Nehru - India, Chou En Lai -RRC, Norodom Sihanouk - Kamboja, U Nu - Burma, Mohammad Ali -Pakistan, dan Gamal Abdel Nasser - Mesir. Dari Konferensi Asia Afrika ini, disepakati adanya Dasa Sila Bandung.

Konferensi Asia Afrika 24 April 1955 adalah prestasi politik luar negeri bangsa dan negara Indonesia yang sangat menakjubkan. Indonesia baru saja lepas dari Perang Kemerdekaan 1945-1950 M, dan baru berhasil membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1950 dengan membubarkan negara-negara boneka bikinan van Mook, dalam waktu lima tahun telah berhasil menghimpun kerja sama negara-negara Asia Afrika dan melahirkan kesepakatan untuk mengakhiri imperialisme dan kapitalisme yang terumuskan dalam Dasa Sila Bandung sebagai realisasi tekad bangsa dan negara Indonesia, dalam upaya meniadakan penjajahan di atas dunia yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Padahal di antar 29 negara yang hadir, satu dengan yang lainnya, memiliki suatu problem besar yang sukar untuk mempertemukan pemecahannya. Namun, dalam Konferensi Asia Afrika, 24 April 1955 di Bandung dapat diredakan dan bersedia mempertemukan kepentingan politiknya dalam suatu konsensus yang lebih mengutamakan mensukseskan tujuan Konferensi Asia Afrika, yakni meniadakan penjajahan di atas dunia yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

---

12 Walaupun pada masa Kabinet Ali, masih berlaku UUDS 1950.

Kabinet Ali dan PKI serta Kemelut TNI

Kesuksesan Kabinet Ali dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika menjadikan PNI merasa siap untuk menghadapi Pemilu yang dituntut oleh pihak TNI AD dan rakyat pada saat demonstrasi 17 Oktober 1952 dan tuntutan pembubaran DPRS. Pada 1952, PNI merasa belum siap untuk ikut serta dalam Pemilu karena merasa tertinggal popularitasnya dengan Partai Masjumi di tengah rakyat.

Di lain pihak, problem lama hidup kembali, dengan masuknya PKI dalam Kabinet Ali, aktivitas PKI di desa-desa berhasil menggusur pengaruh NU. Apalagi menurut M.C. Ricklefs, PKI memiliki dana besar dari komunitas China. Menurut Arnold C. Brackman, PKI memperoleh dana dari Rusia dan RRC.

Dampak aktivitas PKI di desa-desa, Ulama dan Santri mulai terancam eksistensinya. Sebenarnya, lawan PKI yang terkuat adalah TNI AD walaupun sedang dalam perpecahan setelah adanya Peristiwa 17 Oktober 1952.

Menghadapi perkembangan PKI itu, TNI AD berhasil mengatasi internal conflict dengan mengadakan Piagam Keutuhan setelah Rapat Collegiaal-RaCo, di Yogyakarta, 1 Mei 1955. Namun, Kabinet Ali mengambil kebijakan yang salah, pergantian KSAD dari Mayor Jenderal Bambang Soegeng kepada Bambang Oetojo pada 27 Juli 1955 yang tidak disetujui oleh Kolonel Zulkifli penjabat Kepala Staf Agkatan Darat, berdampak jatuhnya Kabinet Ali.

> Kemelut TNI AD ini nantinya dapat diselesaikan oleh Kabinet Boerhanoeddin Harahap dari Partai Masjumi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD. Pelantikannya pun dilaksanakan pada 7 November 1955, sebagai Hari Ulang Tahun ke-10 Partai Islam Indonesia, Masjumi.

Proses jatuhnya Kabinet Ali dipercepat dengan tuntutan Partai NU agar Kabinet Ali segera mengembalikan mandatnya. Partai NU merasa mulai terancam dengan perkembangan PKI. Partai NU cukup lama merasa tidak puas pula terhadap kebijakan Ali Sastroamidjojo mengenai kepegawaian, ekonomi, dan keamanan.

Pada 20 Juli 1955, Partai NU yang memperoleh 3 kursi pada Kabinet Ali, menuntut segera mengundurkan diri. Atas desakan NU tersebut dan tuntutan TNI AD, empat hari kemudian, 24 Juli 1955 Kabinet Ali gagal memperoleh dukungan dari DPR, dan menyerahkan mandat kepada Presiden.

Seminggu sebelum Kabinet Ali menyerahkan mandat 24 Juli 1955 kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta karena pada 18 Juli 1955, Senin Pon, 27 Dzulqaidah 1374, Presiden Soekarno menunaikan Rukun Islam Kelima, Naik Haji. Hal ini terkait dalam upaya pemenuhan kriteria sebagai seorang Presiden yang bergelar *Wali al-Amri Dharuri bi al-Syaukah* yang diterima pada 7 Maret 1954, Ahad Kliwon, 1 Rajab 1373. Selain harus ada Masjid Baiturrahim di Istana Merdeka, Presiden Soekarno juga harus Naik Haji.

Di tengah ketegangan antarpartai politik dan juga terjadi konflik antar pimpinan Angkatan Darat dan Angkatan Udara, PKI memanfatkannya untuk meningkatkan agitasi, mensolidkan sistem pengorganisasian guna memobilisasikan massa. Sasarannya adalah meraih suara rakyat yang tidak berpartai. Itulah sebabnya, PKI dalam tanda gambar kampanyenya, menamakan PKI dan orang-orang yang tidak berpartai.

Kenyataan ini menjadikan umat Islam dan Ulama dihadapkan kepada tantangan ideologi. Hanya karena Indonesia lebih mengutamakan demokrasi, walaupun PKI yang tidak mengenal agama, atheis, menentang Pancasila, pernah melakukan Kudeta di Madiun, 19 September 1948, dan oleh Presiden Soekarno sendiri, PKI dicap sebagai teroris, tetapi dapat dibenarkan untuk aktif kembali dalam kehidupan politik nasional.

Sumber: *Doc. Pribadi*

Massa Kampanye Pemilu pertama dari Partai Islam Indonesia Masjumi
di Lapangan Tegallega Bandung mendengarkan pesan-pesan politik dari Mohammad Natsir,
K.H. Isa Anshary, K.H. M. Rusjad Nurdin, dan E.Z.Muttaqien.

Di bawah tantangan kehidupan politik nasional ini, para Ulama berupaya untuk mampu beradaptasi. Namun, tetap mempertahankan tujuan perjuangannya menegakkan ajaran Islam secara Parlementer atau Konstitusional. Dengan cara memperkuat kesadaran umat Islam agar tetap berafiliasi terhadap partai-partai Islam. Dengan tetap pula menghormati norma dan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpolitik, terutama dalam perjuangan memenangkan partai Islam dalam Pemilu.

Perjuangan Ulama Mensukseskan Pemilu

Kelanjutannya, terbentuklah Kabinet Boerhanoedin Harahap dengan koalisi Masjumi-PSI-NU, 12 Agustus 1955-3 Maret 1956. Program utama Kabinet Boerhanoedin Harahap adalah mengembalikan wibawa moral pemerintah. Menumbuhkan kepercayaan TNI AD dan masyarakat kepada pemerintah. Jadi, Kabinet Boerhanoedin Harahap lebih mengutamakan politik dalam negeri. Memfokuskan segera melaksanakan Pemilu:

(1) untuk DPR, dilaksanakan pada 29 September 1955, Sabtu Legi, 12 Safar 1375

(2) untuk Konstituante dilaksanakan pada 15 Desember 1955, Kamis Pon, 30 Rabiul Akhir 1375

Adapun komposisi Kabinet Boerhanoedin Harahap, 12 Agustus 1955-3 Maret 1956, adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri	Mr. Boerhanoedin Harahap	Masjumi
Wakil Perdana Menteri I	Danu Ismadi	PIR
Wakil Perdana Menteri II	Harsono Tjokroaminoto	PSII
Dalam Negeri	Mr. Soenarjo	NU
Luar Negeri	Anak Agung Gde Agung	Demokrat
Perekonomian	I.J. Kasimo	Katolik
Keuangan	Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo	PSI
Pertahanan	Mr. BoerhanoedinHarahap	Masjumi
Kehakiman	Mr. Loekman Wiriadinata	PSI
Pekerjaan Umum	R.P. Soeroso	Parindra
Perhubungan	Ir. H. Laoh	PNI
Menteri Muda Perhubungan	Asraroeddin	Buruh
Sosial	Soedibjo	PSII
Perburuhan	I. Tedjasoekmana	Buruh

Pertanian	Mohammad Sardjan	Masjumi
Agraria	Mr. Goenawan	PRN
Agama	K.H. Iljas	NU
Penerangan	Sjamsudin St Makmur	PIR
Kesehatan	Dr. J. Leimena	Parkindo
Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan	Prof. Ir. Suwandi	Katolik
Menteri Negara	AbdoelHakim	Masjumi
	Soetomo	PRI
	Drs. Cumala Noor	PIR

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP

Koalisi Masjumi - PNI

12 Agustus 1955 - Maret 1956
Pelantikan Kabinet ditandai dengan Sumpah Perdana Menteri

Berhasil menyelesaikan Peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD, pada 7 November 1955 dan berhasil pula mengembalikan wibawa pemerintah dan AD.
Sukses melaksanakan Pemilu untuk pertama kali semenjak Proklamasi 17 Agustus 1945 untuk DPR, 29 September 1955, dan Konstituante, 15 Desember 1955.

Deliar Noer menambahkan keterangan Danu Ismadi adalah PIR Hazairin. Para menteri dari Partai NU dan PSII berhenti pada 19 Januari 1956 maka jabatan Wakil Perdana Menteri II ditiadakan. Kementerian Dalam Negeri dijabat oleh R.P. Soeroso. Kementerian Sosial dijabat oleh Soetomo. Kementerian Agama dijabat oleh Mohammad Sardjan, masing-masing tidak melepaskan kedudukan asalnya.

Kementerian Pekerjaan Umum, semula dipegang oleh Wakil Perdana Menteri I, Danu Ismadi. Kemudian pada 26 Agustus 1955 diserahkan kepada R.P. Soeroso.

Sehubungan Indonesia masih dalam taraf belajar berdemokrasi[13], peserta Pemilu diizinkan terdiri dari: Partai Politik, Organisasi Massa, dan Perorangan pun, mencalonkan diri dalam Pemilu. Diharapkan dari hasil perolehan suara dalam Pemilu, para pimpinan parpol, ormas, dan perorangan akan memahami sejauh mana pengaruhnya di tengah rakyat se-Nusantara Indonesia.

Dampak kebebasan mendirikan parpol, melahirkan ratusan jumlah parpol dan ormas serta perorangan peserta Pemilu, hingga mencapai sekitar 155 gambar. Rakyat Pemilih akan menjadi selektor terhadap jumlah partai politik dan organisasi massa.

Menjelang Pemilu Indonesia dibagi dalam 16 Daerah Pemilihan, meliputi 208 Kabupaten, 2.139 Kecamatan, dan 43.249 Desa. Hasil Pemilu DPR, beranggotakan 272 wakil. Dengan perhitungan per wakil DPR mewakili 300.000 orang, sedangkan Konstituante mencapai 542 wakil. Kemudian diadakan pelantikan DPR pada tanggal 20 Maret 1956, Selasa Wage, 6 Sja'ban 1375, dan Konstituante pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November 1956, Sabtu Wage, 6 Rabiul Akhir 1375.

Menurut Deliar Noer, dalam menghadapi Pemilu antar Partai-partai Islam pada 15 Juni 1955, Rabu Kliwon, 23 Sjawal 1374, dikeluarkanlah pengumuman bersama menghimbau para pengikut dan simpatisan agar:

> Pertama, menjaga sungguh-sungguh agar perbedaan paham di lapangan politik jangan sampai merusak Ukhuwah Islamiyah.
>
> Kedua, bersama-sama menciptakan suasana tidak saling menyerang dalam kegiatan (yang bersifat) menyarankan pendirian dan program masing-masing dalam menghadapi Pemilihan Umum.
>
> Ketiga, bertindak sesuai dengan pernyataan antar partai-partai Islam.

---

13 Demokrasi berasal dari Athena. Dengan komposisi masyarakatnya 30.000 penduduk asli Athena dan budak belian berjumlah 100.000 orang yang tidak punya hak pilih. Amerika Serikat sebagai pendekar demokrasi, diproklamasikan pada 19 April 1775. Sampai dengan 1865 artinya seratus tahun kemudian, baru dihapuskan perbudakan setelah Perang Budak 1861-1865. Di Rusia disebut demokrasi rakyat tetapi di bawah Diktator Proletar, dan hak milik pribadi dihapuskan. Ternyata dalam politik, demokrasi sangat beragam pemahaman dan aplikasinya.

Sumber: *Doc Pribadi*

MOHAMMAD NATSIR
DAN GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA

Mohammad Natsir memberikan penghormatan kepada Barisan Penghormatan
Gerakan Pemuda Islam Indonesia - GPII Kota Besar Bandung, persiapan menuju Lapangan
Tegallega Bandung, dalam rangka kampanye Pemilu untuk DPR dan Konstituante.
Gambar di halaman Markas Partai Islam Indonesia Masjumi Jawa Barat
Gerakan Pemuda Islam Indonesia Kota Besar Bandung
Kantor redaksi *Madjalah Boelanan Aliran Islam*
Jalan Pungkur 73 Bandung.
Sekarang Kantor Dewan Dakwah Islamijah Indonesia - DDII
dan Partai Bulan Bintang - PBB Jawa Barat.

Dapat dibayangkan bagaimana rumitnya pelaksanaannya dalam wilayah yang terpencar dalam kepulauan yang ribuan jumlahnya dengan sistem transportasi yang masih tergolong sederhana dan daya dukung sistem komunikasi pemberitaan yang masih sederhana. Walaupun demikian, Pemilu dapat terlaksana dengan baik.

Dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, dijelaskan terbentuknya DPR hasil Pemilu terdiri dari 19 Fraksi sebagai berikut: [14]

14 Bandingkan antara keterangan M.C. Ricklefs. 1991. *Op.Cit*, hlm. 377 Parlemen berjumlah 257 wakil dengan keterangan *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, hlm. 89 DPR berjumlah 272 wakil.

No.	Fraksi	Jumlah
1.	Fraksi Masyumi	60 anggota
2.	PNI	58
3.	NU	47
4.	PKI	32
5.	Nasional Progresif, yakni gabungan partai/organisasi: Baperki, Permai, Ascoma, Murba, PRN, Gerindo, PIR Wongso dan perorangan R. Soedjono Prawirosoedardjo	11
	Pendukung Proklamasi: IPKI, Buruh, PRI, dan PRD	11
7.	PSII	8
8.	Parkindo	9
9.	Katolik & Persatuan Daya	8
10.	Pembangunan dicalonkan oleh PKI	7
11.	PSI	5
12.	Perti	2
13.	Gerakan Pembela Pancasila	2
14.	Persatuan Pegawai Polisi RI - P3 RI	2
15.	Perorangan AKUI	1
16.	Partai Persatuan Tharikat Islam-PPTI	1
17.	PIR Hazairin	1
18.	Persatuan mewakili Irian Barat	3
19.	Tidak berfraksi	2
	Jumlah	272 anggota

Jumlah angka kursi yang menjadikan Partai Islam Indonesia Masjumi memeroleh jumlah tertinggi dan memenangkan 14 Daerah Pemilihan dari 16 Daerah Pemilihan, tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di Luar Jawa, merupakan pertanda umat Islam benar-benar merupakan mayoritas yang hidup dan sadar berpolitik. Demikian pula Partai Nahdlatul Ulama meraih suara pemilih yang besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta di Kalimantan Selatan, sebagai gambaran wilayah kerjanya dan pengaruh Nahdlatul Ulama. Angka-angka yang demikian besar menjadikan lawan politik Islam resah karenanya.

Sumber: *Pikiran Rakyat*

K.H. SUDJAI KETUA SEMENTERA PERTAMA KONSTITUANTE

Ketua Sementera Konstituante, K.H.Sudjai dari Partai Islam Indonesia Masjumi, berumur 106 Tahun. Betapa mulianya semangat juang K.H. Sudjai di usia setinggi itu, masih berprestasi di bidang politik dan hukum, menjadi Ketua Sementera Konstituante. Untuk pertama kalinya dalam Sejarah Indonesia setelah Proklamasi, 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, Konstituante dari NKRI dipimpin oleh Ulama dari Partai Islam Indonesia Masjumi. K.H.Sudjai, pelopor pendiri *Izharu Baiatil Muluk wal Umara* pada 1920, semacam MUI sekarang.

Menurut Deliar Noer, seluruh Partai Islam memperoleh 16.518.332 suara dan 115 kursi dalam *DPR*, termasuk PPTI yang memperoleh 85.131 suara dengan 1 kursi. Dalam Konstituante, Partai Islam memperoleh 16.464.008 suara dan 228 kursi terbagi atas:

Partai Islam Indonesia Masjumi	7. 789. 619 suara	-	112 kursi
Partai Nahdlatul Ulama	6. 989.333 suara	-	91 kursi
PSII	1. 059.922 suara	-	16 kursi
Perti	465.359 suara	-	7 kursi
PPTI	74.913 suara	-	1 kursi
	Jumlah		227 kursi

Menurut Harian ABADI, 17 Juli 1956, diberitakan PNI memperoleh 9.070.218 suara - 119 kursi, dan PKI 6.232. 512 suara - 80 kursi. Apabila dijumlah, perolehan kursi PNI dan PKI berjumlah 199 + 80 kursi = 279 kursi. Jumlah kursi dari Partai Islam di atas, apabila ditambah dengan Angkatan Kesatuan Ummat Islam - AKUI Jawa Timur memperoleh suara 84.862 suara - 1 kursi, menjadi 227 + 1 kursi = 228 kursi. Jadi, tidak begitu jauh dengan perolehan PNI dan PKI.

Hasil suara Partai Islam di atas, mendekati gambaran dari apa yang dipidatokan oleh Ir. Soekarno dalam B.P.U.P.K pada 1 Juni 1945, Hari Lahir Pantjasila, antara lain:

> Ibaratnja Badan Perwakilan Rakjat 100 orang anggotanja 60, 70, 80, 90 utusan jang duduk dalam perwakilan rakjat ini orang Islam, pemoeka-pemoeka Islam. Dengan sendirinja hoekoem-hoekoem jang keloear dari Badan Perwakilan Rakjat itu, hukum Islam poela. Malahan saja jakin, djikalau hal jang demikian itoe njata terdjadi, baroelah boleh dikatakan bahwa Agama Islam benar-benar hidoep di dalam djiwa rakjat, sehingga 60%, 70%, 80 %, 90% utusan adalah orang Islam, pemoeka-pemoeka Islam. Maka saja berkata, baroe djikalau demikian, hidoeplah Islam Indonesia, dan boekan Islam jang hanja diatas bibir sadja.

Pidato di atas ini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Sekaligus berisi petunjuk Ir. Soekarno bagaimana cara memenangkan Hukum Islam secara Parlementer.

Apabila dengan jumlah suara dan kursi yang diperoleh Partai Islam di atas, bersatu, sangat menakutkan pimpinan partai non Islam lainnya yang tidak menghendaki berlakunya Syariah Islam dimenangkan melalui sistem Parlemen atau Konstituante karena untuk memperoleh dua pertiga ditambah satu, dari jumlah anggota seluruhnya tinggal sedikit lagi tambahannya.

Perlu ditambahkan di sini sebagai bahan perbandingan fakta sejarah Pemilu 1955. Dari yang terdaftar 43.104.464 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 37.875.299 suara. Menurut Arnold C. Brackman, hasil Pemilu melahirkan Empat Besar dengan jumlah suara dan kursi serta persentasenya sebagai berikut:

Partai	Jumlah Suara	Persentase	Jumlah Kursi	Jumlah Kursi DPRS
PNI	8.434. 653	22. 3	57	42
Masjumi	7. 903. 886	20. 9	57	44
NU	6.955. 141	18. 4	45	8
PKI	6.176. 914	16. 4	39	17
Lain-lain	8.404. 705	22. 0	59	122

Sosialis	753. 191	2	5	14
Murba	199. 588	0. 5	2	4
IPKI	541. 306	1. 4	4	-

Dari Daerah Pemilih memberikan gambaran bahwa PNI-PKI-NU di wilayah yang berpenduduk dari etnis Jawa. Adapun suara yang diperoleh di Luar Jawa, di wilayah yang terdapat transmigran dari Jawa. Untuk NU, suara terbesar di daerah yang terdapat Pesantren atau Madrasah NU.

Sementara itu, Masjumi tersebar di seluruh kepulauan Nusantara Indonesia. Untuk PKI di P. Jawa memperoleh suara terbesar di Jawa Timur 2.299.602 sekitar 23.2%, di Jawa Tengah 2.326.108 sekitar 25.8% dan Jawa Barat 755.634 sekitar 10.8%.

Pada 15 Desember 1955, sesudah Pemilu untuk DPR, diadakan lagi Pemilu untuk Konstituante. Menurut Arnold C. Brackman, hasilnya adalah sebagai berikut:

Partai	**Jumlah Suara**	**Jumlah Kursi**
PNI	9.070.218	119
Masjumi	7. 789.619	112
NU	6. 989.333	91
PKI	6.232.512	80
Lain-lain	11.627.544	66

Sehari sebelum Pemilu Konstituante, 14 Desember 1955, terjadi upaya penggagalan pelantikan Komodor Muda Udara Hoebertoes Soejono menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Udara di Pangkalan Cililitan atau Halim Perdanakusumah. Ketika akan diambil sumpahnya oleh Menteri Pertahanan Boerhanoedin Harahap, tiba-tiba terjadi teriakan pemboikot "Tidak Setuju, Tidak Setuju", sambil meninggalkan barisan, dan dibawa pula panji-panji AURI. Akibatnya, pelantikan dibatalkan.

Perlu diperhatikan, Boerhanoedin Harahap sekalipun dari Partai Islam Indonesia Masjumi, dalam menyusun kabinet, beberapa pos penting diserahkan kepada Partai Katolik. Misalnya Menteri Perekonomian diserahkan kepada I.J. Kasimo, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan diserahkan kepada Prof. Ir. Soewandi. Demikian pula Wakil Kepala Staf AURI juga akan diserahkan kepada Komodor Udara Hoebertoes Soejono. Apakah hal ini sebagai jawaban terhadap masalah RMS yang dipimpin oleh Dr. Ch. R. Soumokil yang belum teratasi?

Peristiwa TNI AD Bambang Soegeng masa Kabinet Ali I, dan TNI AU Hoebertoes Soejono masa Kabinet Boerhanoedin Harahap di atas memberikan pengertian bahwa pada saat Angkatan Darat dan Angkatan Udara, terjadi pula internal conflict yang cukup berat, sama halnya dengan kalangan pimpinan partai politik.

Padahal, Panglima Besar Jenderal Soedirman mengingatkan agar TNI menjauhkan diri dari tindak perpecahan dalam kesatuannya karena pengorbanan sudah cukup besar. Namun, Panglima Besar Jenderal Soedirman sudah tiada, 29 Januari 1950, Ahad Pahing, 10 Rabiul Akhir 1369 dalam usia 34 tahun maka internal conflict tidak dapat dihindarkan karena pimpinan angkatan, sama-sama usia - similar age. Akibatnya, krisis wibawa dalam pimpinan angkatan.

Dampak Mimpi Presiden Pembubaran Partai

Setelah Pemilu berakhir, Kabinet Boerhanoedin Harahap, menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. Kemudian Presiden Soekarno pada 24 Maret 1956 mengukuhkan Kabinet Ali Sastroamidjojo II.

Kemenangan partai-partai Islam dalam Pemilu DPR ataupun Konstituante menjadikan Presiden Soekarno mimpi setuju jika seluruh partai politik di Indonesia dikubur saja. Hal ini terjadi setelah Presiden Soekarno pulang dari kunjungannya ke Austria, Yugoslavia, Cekoslovakia, Rusia, Mongolia Luar, dan China, pada 28 Oktober 1956. Karena sistem multipartai menimbulkan konflik yang berkepanjangan, pembangunan bangsa dan negara menjadi terhambat.

Presiden Soekarno menjelaskan Demokratisasi Indonesia sebagai produk dari pemikiran Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir yang berusaha membatalkan hasil keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 22 Agustus 1945, antara lain sistem satu partai, yakni hanya ada satu partai politik Partai Nasional Indonesia. Dibatalkan dengan dikeluarkannya Makloemat 3 November 1945 oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, berlakulah sistem multipartai.

Diingatkan pula oleh Presiden Soekarno, sebenarnya Makloemat 3 November 1945 ini lahir akibat Mohammad Hatta didesak oleh Amir Sjarifoeddin. Saat itu, Presiden Soekarno sedang tidak ada di Jogyakarta.

Bagaimana solusinya untuk mengatasi sistem multipartai yang sangat menganggu perkembangan bangsa dan negara Indonesia? Pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno menjawab, saya setuju bila seluruh partai dibubarkan saja. Lebih lanjut, Presiden Soekarno menyatakan saya tidak senang dengan sistem demokrasi Barat. Saya sangat senang dengan Demokrasi Terpimpin seperti yang saya lihat di Republik Rakyat China.[15]

15 Arnold C. Brackman, 1963. Op.Cit., hlm. 227.

Akibat contoh Demokrasi Terpimpin dari RRC, tidaklah heran bila Presiden Soekarno didekati oleh pimpinan komunis, baik dari golongan PKI, D.N. Aidit maupun Komunis Murba dari Tan Malaka.

> Samaoen pendiri Perserikatan Kommunis di India, PKI di Semarang, 23 Mei 1920. Setelah Samaoen tinggal di Rusia selama 33 tahun, pada 12 Desember 1956, kembali ke Jakarta.
>
> Samaoen yang pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Republik Soviet Tajikistan dan beristri wanita Rusia, diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Penasihat Demokrasi Terpimpin. Di samping itu, diangkat pula Wikana, Tjoa Siklen, sebagai kelompok inteligensia komunis, duduk sebagai Dewan Perencanaan Nasional - Depernas.
>
> Tidak lupa Aidit, Nyoto, Soetomo Atomo, Siauw Giok Tjan, dari kelompok PKI, bersama dari kelompok komunis nasionalis Tan Malaka, Iwa Koesoemasoemantri, Mohammad Padang, Nj. Rasoena Said, sebagai Dewan Pertimbangan Agung - DPA.

Ulama melihat perubahan dratis politik Indonesia, dihadapkan tantangan yang cukup berat. D.N. Aidit yang setelah Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, dapat lolos keluar negeri. Kemudian pulang kembali ke Indonesia mengadakan konsolidasi, menghidupkan kembali PKI.

Secara kebetulan, situasi dunia sedang dilanda Perang Dingin, memungkinkan Blok Rusia dan RRC berlomba untuk berpengaruh di Asia Tenggara dan India, serta Timur Tengah. Sebaliknya, Blok Amerika Serikat masih mempertahankan sistem imperialisme dan kapitalismenya. Untuk Indonesia, Amerika Serikat tidak bersedia mengusir Keradjaan Protestan Belanda dari Irian Barat. Berarti Amerika Serikat tetap mempertahankan sisa-sisa imperialisme Barat di Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Dulles, tetap menilai Belanda sebagai sahabatnya.

Sebaliknya, Rusia mencoba melaksanakan Testamen Politik Lenin, dalam upaya pengkomunisan dunia, Rusia harus membantu gerakan nasional di Asia Tenggara yang sedang berjuang ingin merdeka. Pun, membantu perjuangan rakyat India dan China yang tertindas oleh imperialis Barat.

Karena populasi India dan China merupakan dua pertiga jumlah penduduk dunia, dan China sudah menjadi negara komunis, Republik Rakyat China. Keradjaan Protestan Anglikan Inggris, memahami bahaya komunis di China. Segera India dimerdekakan tetapi dibelah menjadi negara-negara agama: (1) Islam - Pakistan Timur dan Barat, (2) Hindu - India, (3) Buddha - Srilanka dan Burma. Pemberian kemerdekaan ini meniru pembelahan Eropa dan Inggris menjadi kerajaan-kerajaan agama Katolik dan Protestan.

PRESIDEN SOEKARNO

Pendiri Parpol Mimpi Ingin Membubarkan Parpol

Organisasi massa politik yang menggunakan nama Partai di Indonesia terjadi di abad ke-14 H/20 M di masa gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional, dipelopori oleh Centraal Sjarikat Islam menjadi Partai Sjarikat Islam, 1342 H/1923 M. Setahun kemudian, menyusul Perserikatan Kommunist di India 1920 M menjadi Partai Kommunist di India, 1924 M. Berikutnya, muncul Perserikatan Nasional Indonesia,1927 M, menjadi Partai Nasional Indonesia - PNI, 1928 M. Diikuti oleh Partai Rakjat Indonesia - PRI, 1930, Partai Indonesia - Partindo, 1931 M, Partai Islam Indonesia Parii atau PII, 1932 M, dan Partai Indonesia Raja - Parindra, 1938 M.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno sangat setuju terhadap keputusan PPKI, one system party, PNI. Namun, dengan adanya Maklumat X 3 November 1945, yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta atas desakan Soetan Sjahrir, tumbuhlah ratusan parpol seperti jamur terkena hujan. Setelah Pemilu 1955 M terjadilah proses seleksi parpol terpilih dan tidak dipilih oleh rakyat. Lahirlah Empat Besar: PNI, Masjumi, Partai NU, dan PKI.

Tiba-tiba di Bandung, 1956 M, Presiden menyatakan mimpinya ingin membubarkan seluruh Parpol. Meng hidupkan kembali keputusan PPKI, one system party, sama seperti di RRC. Mimpinya semakin menjadi nyata setelah adanya Dekrit Presiden, 1959 M. Diikuti dengan pembubaran Partai Islam Indonesia Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia - PSI, 1960 M.

Kelanjutannya Kabinet yang dipimpinnya, menteri-menterinya bukan mewakili partai politiknya, tetapi diangkat berdasarkan keahliannya. Demokrasi Terpimpin yang dipimpinnya tanpa Oposisi. Presiden Soekarno gandrung dengan persatuan Bangsa Indonesia. Akan tetapi, Presiden Soekarno lupa, kebijakan politik nya dimanfaatkan oleh PKI untuk melancarkan Kudeta G30S/PKI, di Jakarta, 1965 M.

Benarkah multy system party tidak cocok bagi bangsa Indonesia karena berdampak gontok-gontokan? Atau akibat adanya Marxisme dengan Conflict Theory-nya yang mendatangkan prahara perpecahan bangsa?

Sumber: wikipedia.com

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

KABINET ALI SASTROAMIDJOJO II

Kabinet Ali Roem Idham

24 Maret 1956 - 14 Maret 1957
Pelantikan dengan pembacaan Sumpah Perdana Menteri
Dengan formasi PNI 5, NU 5, Masjumi 4, PSII 1, Perti 1.
Pembatalan hasil Perundingan KMB, melaksanakan program Kabinet Burhanuddin Harahap.
Berdampak lanjut Drs. Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
Pembentukan Provinsi Irian Barat dengan Gubernur Sultan Tidore, Zainal Abidin Sjah
dan ibu kotanya, Soa Siu.

Sumber: Doc. Pribadi

K.H. ISA ANSHARY dan MOHAMMAD NATSIR

K.H. Isa Anshary adalah Ketua Front Anti Komunis yang menentang ideologi komunis yang diperjuangkan keponakannya sendiri, D.N. Aidit. Tampak dalam gambar, K.H. Isa Anshary (kiri) bersama Mohammad Natsir (kanan) di antara para pemuda anggota dan aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia - G.P.I.I di Lapang Tegallega Bandung.

Dengan cara ini, Barat berhasil menyelamatkan India dari pengaruh komunis. Demi mencegah pengaruh komunis dari China dan Indonesia, segera dibentuklah Federasi Malaysia merdeka meliputi Malaysia Barat dan Malaysia Timur Serawak, serta Sabah.

Perancis terlambat bertindak dalam menghadapi gerakan kemerdekaan di wilayah jajahannya Indo China atau India Belakang. Menurut Z.A. Maulani dalam Mengapa Barat Memfitnah Islam, menjelaskan Vietnam di bawah Ho Chi Minh berhasil meyakinkan rakyatnya hanya dengan ideologi komunis Vietnam akan merdeka. Apalagi dibantu Laurence Rockefeller Bankir Yahudi, dengan senjata dari Perang Pasifik, 1941-1945 M, benteng pertahanan Perancis dapat dirobohkan oleh Vietnam Utara.

Ulama melihat negara-negara Timur Tengah sesudah Perang Dunia I, 1914-1919 M dan Perang Dunia II, 1939-1945 M usai, Turki menjadi Republik Sekuler Turki, 1923 M, maka Timur Tengah diperebutkan oleh negara-negara imperialis Barat. Sekaligus diupayakan akan dipadamkan semangat Islamnya. Ditegakkannya negara Israel, 15 Mei 1948, menjadi duri dalam daging penghambat kemajuan negara-negara Timur Tengah, dengan perang yang tidak pernah berkesudahan. Mesir kalangan militernya, Gamal Abdel Nasser, mencoba mengubah Mesir sebagai negara sosialis.

Sementara itu, Keradjaan Saudi Arabia, sudah berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Inggris. Demikian pula situasi di Iran, tidak berbeda. Akibatnya, gerakan Islam Indonesia tidak ada lagi negara-negara Timur Tengah yang dapat dijadikan teman berjuang seperti zaman Sultan Turki. Dampaknya Ulama Indonesia harus lebih mengutamakan percaya kepada kekuatan kaki sendiri atau berdikari. Realitas perkembangan perjuangan Ulama Indonesia jauh berbeda dengan Ulama Timur Tengah. Ulama Indonesia memperjuangkan Indonesia sebagai Republik. Sebaliknya Ulama Timur Tengah membangun kerajaan dalam mengaplikasikan ajaran Islam di bidang politik.

Ulama dalam Kabinet Ali Roem Idham

Di tengah situasi perubahan dunia tadi, sebelum pengangkatan pimpinan komunis nasionalis dan komunis internasional sebagai anggota DPA di atas, Presiden Soekarno menunjuk kembali Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Terbentuklah Kabinet Ali Sastroamidjojo II dengan koalisi PNI-Masjumi-NU, 24 Maret 1956-14 Maret 1957.

Ali Sastroamidjojo tampaknya untuk sementara tidak memperlihatkan PKI sebagai sumber kekuatan pendukungnya. PNI mulai merasa tersaingi oleh PKI yang dapat berkembang sangat cepat walaupun PKI sudah dihancurkan dalam Kudeta PKI di Madiun 19 September 1948. Hanya dalam waktu tujuh tahun, PKI menyusul PNI kepopulerannya di tengah rakyat.

Mangunsarkoro mengingatkan bahaya PKI terhadap kemerdekaan Indonesia karena PKI berorientasi ke Rusia atau China. Oleh karena itu, dibentuklah *Kabinet Ali Santroamidjojo II* dengan koalisi PNI-Masjumi-NU, disebut pula sebagai *Kabinet Ali-Roem - Idham*. Deliar Noer menjelaskan komposisi *Kabinet Ali Sastroa midjojo II* adalah sebagai berikut:

Perdana Menteri	Mr. Ali Sastroamidjojo	PNI
Wakil Perdana Menteri I	Mr. Mohamad Roem	Masjumi
Wakil Perdana Menteri II	K.H. Idham Chalid	NU
Menteri Pertahanan	Mr. Ali Sastroamidjojo	PNI
Dalam Negeri	Mr. Soenarjo	NU
Luar Negeri	Roeslan Abdulgani	PNI
Keuangan	Mr. Jusuf Wibisono	Masjumi
Perekonomian	Mr. Boerhanoedin	NU
Wakil Perekonomian	F.F. Umbas	Parkindo
Kehakiman	Mr. Muljatno	Masjumi
Wakil Kehakiman	A.B.L. de Rozario	Katolik
Pekerjaan Umum	Ir. P. Mohammad Noer	Masjumi
Sosial	K.H. Fatah Jasin	NU
Perburuhan	Sabilal Rasjad	PNI
Pertanian	Eni Karim	PNI
Wakil Pertanian	Sjech Marhaban	PSII
Pendidikan, Pengajaran, Kebudayaan	Sarino Mangoenpoespito	PNI
Agama	K.H. Iljas	NU
Agraria	Ir. Soehardi	Katolik
Penerangan	Soedibjo	PSII
Urusan Veteran	Dahlan Ibrahim	IPKI
Perencanaan	Ir. Djuanda	-
Negara	H. Roesli A. Wahid	Perti

GEDUNG CONCORDIA atau **GEDUNG MERDEKA**

Gedung Concordia dijadikan sebagai arena National Congres Central Sjarikat Islam , 16-24 Juni 1916. Di bawah pimpinan H.O.S Tjokoami noto, Abdoel Moeis, Hadji Agoes Salim, CSI mempelopori menunut Indonesia Merdeka atau Zelf Bestuur dan Indonesia Berparlemen serta Indie Werbaar – Pertahanan Indonesia dengan tujuan melatih generasi muda agar terlatih dalam organisai militer modern.

Diubah menjadi Gedung Merdeka, ketika dijadikan arena Konfrensi Asia Afrika - KAA, 24 April 1955. Suatu konferensi yang bertujuan menghapuskan bersama-sama seluruh negara peserta KAA bertekad penjajahan atau imperialisme di atas dunia sebagaimana yang tertuliskan dalam Pembukaan UUD 1945. KAA melahirkan Dasa Sila Bandung atau Bandung Spirit.

Pada 15 Maret 1965, di Gedung Medeka ini pula diselenggarakan Konferensi Islam Afrika Asia – KIAA yang mengangkat Presiden Sukarno sebagai The Champion Freedom and Islam – Pendekar Kemerde kaan dan Islam.

Setelah Pemilu Pertama 1955 Gedung Konstituante. Dan kemudian menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara – MPRS setelah Dekrit Presiden 1959, Konstituante dan DPR dibubarkan. Kembali ke UUD 1945 dan Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.
Selanjutnya pada masa Mr. Muhtar Kusuma Atmaja, Menteri Luar Negeri dan Rektor Unversitas Padjadjaran Bandung, ditetapkan Gedung Merdeka menjadi Museum Asia Afrika.

Deliar Noer menjelaskan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia - IPKI didirikan pada 1955 oleh Veteran. Umumnya dari Divisi Siliwangi Jawa Barat dengan bantuan pihak tentara. Kolonel Nasution aktif dalam mendirikan IPKI tersebut.[16]

Kabinet Ali Sastroamidjojo II walaupun PKI termasuk Empat Besar dalam Pemilu, tidak disertakan dalam kabinetnya. Lebih memberi peluang untuk Partai Nahdaltul Ulama memperoleh lima kursi dan Partai Islam Indonesia Masjumi, empat kursi.

Kabinet Ali berupaya membatalkan hubungan Indonesia - Belanda berdasarkan Perjanjian Konferensi Medja Bundar secara sepihak oleh Indonesia, dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1956 pada 3 Mei 1956. Selanjutnya, hubungan kedua negara berlangsung sebagaimana hubungan yang lazim antar negara-negara yang ber daulat.

Pembatalan masalah Konferensi Medja Bundar, berangkat dari program Kabinet Boerhanoeddin Harahap yang telah berhasil menyusun RUU tentang pembatalan secara sepihak hasil perjanjian KMB, mengenai Uni Indonesia Belanda, yang menempatkan Republik Indonesia di bawah Ratu Belanda. Namun, Presiden Soekarno karena tidak menyukai Boerhanoeddin Harahap dari Masjumi, tidak mau menandatanganinya. Menunggu terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo dari PNI, baru mau menandatanganinya RUU menjadi UU Pembatalan Perdjandjian KMB. Walaupun sebenarnya hal tersebut hasil dari Kabinet Boehanoeddin Harahap. Demikian penjelasan Sutomo atau Bung Tomo dalam *Bung Tomo Menggugat*. Dijelaskan lebih lanjut tentang sikap egoistisnya Presiden Soekarno yang selalu bersaha memenangkan partainya sendiri, PNI.

> Dapatlah dipahami apabila Drs. Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri yang memimpin perjanjian KMB tersebut, dengan adanya pembatalan secara sepihak oleh Indonesia, meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden, pada 1 Desember 1956. Walaupun DPR membentuk Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ahem Erningpradja, tidak berhasil mengembalikan keutuhan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta.

16 Dari susunan Kabinet Ali Sastroamindjojo II, siapa yang menjadi Menteri Kesehatan? Deliar Noer, dalam *Partai Islam di Pentas Nasional*, pada hal 267-268 dalam susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo II ,1956-1957, tidak terdapat Menteri Kesehatan. Demikian pula dalam *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, hanya terdapat gambar kolektif pelantikan Kabinet Ali Sastroamidjojo II, bersama Presiden dan Wakil Presiden, tanpa menyertakan nama-nama menterinya. Benarkah Kabinet Ali - Roem - Idham tanpa Menteri Kesehatan? Padahal dalam setiap pergantian kabinet selalu dipimpin oleh Dr.J. Leimena - Parkindo.

Pelaksanaan pembebasan Irian Barat belum berhasil masuk ke pangkuan Republik Indonesia. Namun, baru dalam tahap pembentukan Provinsi Irian Barat pada 17 Agustus 1956. Dengan memerhatikan Sejarah Irian Barat merupakan wilayah Kesultanan Tidore, Gubernur Provinsi Irian Barat yang diangkat adalah Sultan Tidore, Zainal Abidin Sjah dan Ibukota Provinsi Irian Barat adalah Soa Siu.

Kabinet Ali II hanya mampu berumur kurang dari setahun. Selain akibat kegagalan merealisasikan programnya di bidang keamanan, berbalik di daerah timbul pergolakan yang dipimpin oleh TNI AD. Untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia pun gagal. Hanya berhasil membentuk Provinsi Irian Barat seperti di atas.

> Situasi nasional yang semakin keruh akibat timbulnya reaksi yang menolak Konsepsi Presiden Soekarno tentang Kabinet Kaki Empat terdiri dari PNI, Masjumi, NU dan PKI, disampaikan di Istana Merdeka pada 21 Februari 1957. Kemudian, Presiden Soekarno berkeinginan membentuk Dewan Nasional terdiri dari golongan fungsional di masyarakat. Berfungsi sebagai Penasihat Presiden.

Konsepsi Presiden ternyata menimbulkan ketegangan horizontal di masyarakat daerah. Akibatnya, gerakan Dewan-Dewan di daerah semakin kuat pengaruhnya. Dampaknya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II tidak mampu melanjutkan kerjanya, dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno, pada 14 Maret 1957.

Kemudian, diikuti dengan pernyataan Presiden Soekarno bahwa seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk perairan terirorialnya, dinyatakan dalam keadaan darurat perang pada 17 Desember 1957.

Ulama di Tengah DPRS Waroeng Kopi

Ulama dihadapkan kepada peningkatan tantangan, setelah terbentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI pada 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369 H, kehidupan demokrasi kepartaian di masa damai. Kendatipun partai-partai pendukung dari Kabinet semula telah menyetujui programnya ketika menghadapi koreksi dari pihak oposisi di DPR, terbaca tidak lagi mau mendukung program kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berpihak kepada mayoritas opini DPR. Bahkan, ikut serta mendesak agar Perdana Menteri menyerahkan mandat. Terdapat beberapa menteri mengundurkan diri sebelum Perdana Menteri menyerahkan mandat.

> Waktu itu, terdengar sindiran masyarakat bahwa DPR sebagai "Waroeng Kopi". Tempat *ngerumpi*, tidak dapat menemukan pemecahan masalah. Setiap program dari pihak lawan, bagaimanapun baiknya harus dipatahkan. DPR saat itu, tampaknya seperti warung distribusi kesempatan untuk orang-orang partai bergantian menjadi menteri. Oleh karena itu, tidak dilihat lagi ideologi dan program kabinetnya, yang penting harus jatuh dan terjadilah pergantian kesempatan untuk menjadi menteri.

Menurut Mohammad Hatta dalam *Demokrasi Kita*, para pelaku politik tidak memahami Pancasila sebagai Filsafat Negara, dan juga tidak mau mengindahkan. Demokrasi Indonesia sebenarnya demokrasi sosial atau kolektif. Demokrasi dalam sistem Pancasila bukan demokrasi-demokrasian. Demokrasi yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dijelaskan lebih lanjut suatu demokrasi yang melaksanakan prinsip *the right man in the right place*. Dengan pengertian tumbuhnya rasa percaya memercayai dan rasa toleransi yang sebesar-besarnya.

Demokrasi Terpimpin

Setelah Pemilu, justru Indonesia sedang mengalami krisis wibawa pemerintahan - *crisis gezag*. Lalu, jawaban apa yang dipilihnya dari problem ini? Ulama dihadapkan pada munculnya tantangan baru dalam berdemokrasi. Konsepsi Presiden yang dikemukan Presiden Soekarno di Istana Negara di hadapan pimpinan partai politik. Konsepsi Presiden dengan Demokrasi Terpimpin, pada 21 Februari 1957.

> Presiden dalam pembukaan DPR menginginkan Demokrasi Terpimpin yang dirasakannya lebih sesuai dengan Indonesia. Gagasan Demokrasi Terpimpin ini, menurut M.C. Ricklefs berasal dari gagasan Ki Hadjar Dewantara yang dipraktikkan dalam kehidupan bersama di Taman Siswa.

Untuk mempratikkan Konsepsi Presiden, Kabinet Kaki Empat ditunjuklah Soewirjo untuk menjadi formatur. Soewirjo diberi kesempatan dua kali, tetapi gagal. Menurut Deliar Noer, kegagalan Soewirjo diakibatkan Partai Nahdlatul Ulama menolak rencana Soewirjo bila kabinetnya tanpa Partai Islam Indonesia Masjumi. Sebaliknya, Masjumi menolak duduk dalam kabinet Soewirjo apabila di dalamnya terdapat PKI. Dengan demikian, Soewirjo tidak berhasil menyusun Kabinet Kaki Empat.

Justus M. van der Kroef dalam Indonesia Since Sukarno, menuturkan bahwa Ketua Ansor Imron Rosjadi, SH. menolak Demokrasi Terpimpin. Dengan alasan umat Islam tidak mungkin berkolaborasi dengan PKI. Dampak dari sikapnya yang keras, menjadikan Imron Rosjadi SH ditangkap dan dipenjarakan seperti halnya pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Sikap Imron Rosjadi SH itu bertentangan dengan Dr. K.H. Idham Chalid, Ketua Partai Nahdlatul Ulama yang menjadi pendukung Demokrasi Terpimpin.

Ulama dalam Kabinet Karya

Akibatnya, Presiden Soekarno menunjuk warga negara Ir. Soekarno sebagai formateur. Terbentuklah Kabinet Karya pada 9 April 1957. Penunjukkan Presiden Soekarno atas dirinya sendiri ini tidak dinilai sebagai tindak inkonstitusional. Presiden Soekarno mengumumkan terbentuknya Kabinet Karya, sebagai kabinet non partai. Dipimpin oleh Ir. H. Djuanda dari organisasi Perserikatan Muhammadijah sebagai Perdana Menteri. Disertai Wakil Perdana Menteri I, Mr. Hardi - warga PNI, dan Wakil Perdana Menteri II, Dr. K.H. Idham Chalid - warga Nahdliyin. Dengan demikian, disebut pula menjadi Kabinet Djuanda - Hardi - Idham .

Dengan adanya ketiga Perdana Menteri ini, Presiden Soekarno, belum lagi menjadi Perdana Menteri. Baru sesudah Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, terbentuklah kembali Presidential Kabinet.

> Dengan adanya penggunaan istilah Kabinet Karya sebagai kabinet non partai, dan menterinya walaupun dari orang partai, tetapi tidak mengatasnamakan partainya, berarti betapa tidak mungkinnya menyusun kabinet berdasarkan Konsepsi Presiden, Kabinet Kaki Empat, walaupun oleh Presiden Soekarno sendiri yang punya konsepsinya.

Ulama menyaksikan proses pembubaran partai politik yang diimpikan oleh Presiden Soekarno, dipraktikkan dengan cara memisahkan pimpinan partai yang diangkat menjadi menteri, tidak mengatasnamakan dirinya sebagai pimpinan partainya. Dengan cara ini, wibawa pemimpin Partai Politik dikebiri. Namun, keberadaannya tetap dipertahankan hanya sebagai pajangan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Program Kabinet Karya disebut Pancakarya:

1. Membentuk Dewan Nasional;
2. Normalisasi Keadaan Republik Indonesia;
3. Melanjutkan pembatalan KMB;
4. Memperjuangkan Irian Barat;
5. Mempercepat Pembangunan.

Program ini sebagai jawaban situasi nasional yang sedang dilanda *internal conflict* atau perpecahan di kalangan partai politik dan militer. Jelaslah Presiden Soekarno berupaya sungguh-sungguh pengalihan *internal conflict* ke arah tumbuhnya kesadaran bahwa lawan sebenarnya adalah imperialis Belanda. Dengan cara membangkitkan kesadaran kembali kebencian terhadap penjajah Belanda, bangkitlah semangat kebersamaan membebaskan Irian Barat.

Gerakan kebangkitan anti penjajah Belanda diawali dengan mengadakan Rapat Umum Pembebasan Irian Barat di Jakarta pada 18 November 1957. Pada hari yang sama digerakkan pemogokan buruh dan sekaligus menasionalisasikan perusahan Belanda. Diikuti pula dengan melarang semua terbitan dan film berbahasa Belanda. KLM dilarang mendarat di seluruh bandara di Indonesia.

Pengaruh berikutnya, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran yang dipimpin oleh Drs. R. Mohammad Ali dibubarkan oleh Dekan karena mempertahankan adanya Mata Kuliah Bahasa Belanda sebagai Bahasa Sumber Sejarah. Diubah menjadi Jurusan Antropologi, dengan mahasiswanya dari Tingkat Satu Jurusan Sejarah. Sedangkah mahasiswa Tingkat Dua dan Tiga, tetap bertahan tidak mau digabungkan menjadi mahasiswa Antropologi. Atas tuntutan Himpunan Mahasiswa Sejarah - HIMSE, Jurusan Sejarah dibuka kembali setelah Prof. Harsojo diangkat menjadi Dekan karena memahami arti Bahasa Belanda sebagai Mata Kuliah yang dinilai sebagai Bahasa Sumber.

Upaya Pembunuhan Presiden Soekarno

Kebijakan nasionalisme milik Belanda yang dilaksanakan di tengah konflik dalam tubuh ABRI di daerah luar Jawa berdampak pada terancamnya keselamatan Presiden Soekarno bersama keluarganya. Dalam waktu dua belas hari kemudian, terjadilah upaya percobaan Pembunuhan Presiden Soekarno, 30 November 1957, Sabtu Wage, 8 Jumadil Awwal 1377 dengan cara digranat dari lima jurusan. Terjadi pada saat Presiden Soekarno menghadiri pesta sekolah putra putrinya di SD Cikini.

Peristiwa ini dikenal dengan nama Peristiwa Cikini. Hanya karena Rahmat Allah Yang Maha Kuasa terlimpah, Presiden Soekarno dan putra putrinya dapat selamat, walaupun berada di tengah ledakan granat yang dilemparkan dari lima penjuru oleh para pelaku pembunuhan tersebut.

> Siapa pelakunya dan siapa yang mengendalikannya? Ternyata Jusuf Ismail, Saadon, dan Tasrif sebagai pelaksana yang tidak mengetahui satu dengan lainnya. Masing-masing hanya melemparkan satu granat, tetapi mengapa ledakannya menjadi lima ledakan? Siapa yang ikut melemparkan granat tidak diketahui oleh ketiga pelaku yang tertangkap.

Mereka bertiga Jusuf Ismail, Saadon, dan Tasrif tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi "dalangnya". Hanya waktunya terjadi pada 12 hari sesudah gerakan anti Belanda dan pembebasan Irian Barat, disertai dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.

Gerakan Militer Daerah

Perpecahan antarpartai politik dan perpecahan di kalangan militer, berdampak di daerah, timbul Gerakan Militer Daerah melawan Pemerintah Pusat atau Kabinet Djuanda yang dibentuk mulai 9 April 1957, Selasa Wage, 8 Ramadhan 1376. Gerakan Militer Daerah dipimpin oleh tentara:

> Dewan Banteng, di Sumatra Barat, dipimpin Letnan Kolonel Achmad Husein, Komandan Resimen IV Tentara dan Teritorium - TT I
>
> Dewan Gajah di Sumatra Utara dipimpin Kolonel M. Simbolon, Panglima Tentara dan Teritorium I
>
> Dewan Garuda di Sumatra Selatan, dipimpin Letnan Kolonel Berlian, Panglima Tentara dan Teritorium II
>
> Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin Letnan Kolonel Samual, Panglima Tentara dan Teritorium VII

Untuk mengatasi secara damai, diadakan Konferensi Panglima Tentara dan Teritorium, termasuk Panglima dari Daerah yang bergolak pada Maret 1957. Namun, tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Daerah tetap bergolak.

IR. H. DJUANDA

Guru Sekolah Muhammadiyah
Menteri Perhubungan
Menteri Pertama Repulblik Indonesia

Dikenal dengan Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957
Penetapan batas perairan Indonesia berdasarkan Archipelago Principle
menjadikan NKRI memiliki laut terluas di dunia
sekitar 3.200.000 km²

Sumber: *Doc. Pribadi*

Kemudian, disusul dengan Musjawarah Nasional - Munas, 10-14 September 1957, dihadiri tokoh-tokoh pusat dan daerah, termasuk mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hasil dari Munas ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Di tengah keretakan nasional, 13 Desember 1957, Jumat Pahing, 21 Jumadil Awwal 1377, pemerintah Indonesia berhasil menetapkan wilayah perairan negara Republik Indonesia. Ketetapan Pemerintah Indonesia dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Penetapan tentang batas perairan nasional didasarkan pada Archipelago Principle atau Wawasan Nusantara. Ditetapkan semua kepulauan dan laut yang terletak di antaranya sebagai satu kesatuan yang bulat. Adapun batas lautan teritorial lebar 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.

Deklarasi Djuanda ini menjadikan Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki luas laut terluas di antara negara-negara di dunia. Hal ini merupakan perubahan atas Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, menjadikan luas wilayah negara Indonesia yang tadinya 2.000.000 km^2 daratan, menjadi lebih kurang 5.200.000 km^2 darat dan laut. Jadi, terjadi penambahan wilayah berupa perairan nasional atau laut, seluas 3.200.000 km^2.

Ketetapan batas laut teritorial ini merupakan satu upaya politik dalam negeri, untuk menumbuhkan kesadaran kesatuan wilayah. Sekaligus untuk mengingatkan batas laut teritorial Indonesia bagi negara-negara lain pengguna laut Nusantara Indonesia. Deklarasi Djuanda tentunya menantang semboyan rule the wave rule Britain. Dampaknya, lahirlah Federasi Malaysia, yang didalangi Barat yang takut terhadap kemajuan NKRI.

Pemberontakan PRRI-PERMESTA

Namun sayangnya, belum terbina satu wawasan nasional di antara pimpinan militer dan partai politik. Akibatnya, pecahlah pemberontakan, mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia - PRRI di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Husein pada 15 Februari 1958 di Padang. Dua hari kemudian, 17 Februari 1958, Letnan Kolonel D.J. Somba Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, mendukung sepenuhnya PRRI, dan mendirikan Gerakan Piagam Perdjuangan Semesta - Permesta.

Menjawab pemberontakan PRRI, Dewan Menteri, 11 Februari 1958, mengambil keputusan memecat dengan tidak hormat Letnan Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, Kolonel Simbolon, yang mengadakan pertemuan di Sungai Dareh, 9 Januari 1958.

Dari pihak Ketua Umum Masjumi, Prawoto Mangkusasmito, dalam *Alam Pikiran dan Djedjak Perdjuangan Prawoto Mangkusasmito*, sebagai Ketua menyatakan keberadaan pimpinan Masjumi di PRRI, bukan atas nama partai, melainkan sebagai inisiatif individu. Penjelasan ini dapat dibaca dalam *Risalah DPR*, 28 Februari 1958. Isinya Partai Islam Indonesia Masjumi menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia - PRRI adalah inkonstitusional. Namun, penjelasan ini tidak didengar oleh Fraksi PKI yang tetap mendiskreditkan Masjumi.

Dr. Anwar Harjono, 1993, dalam *Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan* juga menjelaskan bahwa statemen pimpinan Partai Masjumi, 17 Februari 1958, No. 1130/ Sek.PP/1/M.VIII/58 melarang anggotanya dan pimpinan Partai Masjumi memberikan bantuan kepada pemberontak, serta menyalahkan seluruh pemberontakan di Tapanuli, Sumatra Barat, Riau Daratan, Sumatra Utara, dan Sulawesi Tengah. Ditambahkan bahwa Partai Masjumi tidak ada rencana merobohkan negara.

Di samping itu, tersiar berita bahwa kehadiran Mohammad Natsir di Sumatra Barat bertujuan mengingatkan kembali Letnan Kolonel Ahmad Husein, dalam upayanya memberikan koreksi terhadap kesalahan Presiden Soekarno, mengapa membuat pemerintahan tandingan dengan mendirikan PRRI secara inkonstitusional.

Mohammad Natsir sebagai arsitek terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI datang ke Sumatra Barat berusaha keras untuk menyadarkan kesalahan langkah Letnan Kolonel Ahmad Husein. Namun, kehadiran beberapa orang-orang Masjumi dijadikan alasan Presiden Soekarno menurunkan Kepres No. 200/1960 pada 17 Agustus 1960 memerintahkan sebulan kemudian agar Partai Islam Indonesia Masjumi membubarkan diri. Jika tidak, dikategorikan sebagai partai terlarang.

Perintah pembubaran ini menjadikan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi mencari dan menuntut keadilan karena PKI yang jelas melakukan Kudeta di Madiun 19 September 1948 terhadap pemerintah Republik Indonesia, justru diberi hak hidup kembali. Pada saat PKI melakukan kudeta di Madiun, Presiden Soekarno menyatakan PKI sebagai teroris. Apalagi ajaran *Marxisme* yang dianut PKI bertentangan dengan ideologi Pancasila. Namun, mengapa justru pimpinan PKI diberi kesempatan menduduki beberapa pos eksekutif, legislatif, dan militer?

Peristiwa sejarah ini membuat para Ulama dan Santri dihadapkan pada pembalikan sikap Presiden Soekarno dengan kebijakan politiknya terhadap partai politik Islam dan TNI, jauh berbeda dengan masa Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M. Setelah Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, para Ulama dan Santri disadarkan bagaimana caranya Presiden Soekarno mempertahankan kekuasaannya dengan bungkus bahasa persatuan dan gotong royong.

Seluruh kekuatan bangsa harus menghilangkan idealisme dirinya, melebur menjadi satu kekuatan di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Ulama dan Santri menyaksikan bagaimana cara Presiden Soekarno merealisasikan mimpinya, pembubaran seluruh partai politik di tahun 1956 M. Di bawah Demokrasi Terpimpin secara de facto, partai politik pendukung konsepsinya, diberi hak hidup. Sebaliknya, partai oposisi ditiadakan.

Para Ulama dan Santri serta pimpinan politik Islam, melihat praktik pembalikan kepentingan politik yang berpengaruh terhadap kebijakan politik. Pada masa Perang Kemerdekaan dan Masa Diplomasi, 1945-1950 M, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, bekerja sama dengan Masjumi dan PNI melawan PKI Amir Moeso, 1948 M. PKI dinyatakan sebagai teroris, ditangkap dan dipenjarakan.

Pada saat terjadinya Kudeta 3 Juli 1946, Tan Malaka dan kawan-kawannya ditangkap, diadili, dan dipenjarakan. Dalam menghadapi Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, kelompok Tan Malaka dan Partai Murba sebagai penganut komunis nasionalis, dibebaskan dan diajak kerjasama dalam perlawanan terhadap Kudeta PKI di Madiun.

Realitas sejarah yang berbalik, Presiden Soekarno tanpa Wakil Presiden Mohammad Hatta, 1956 M dengan dasar Demokrasi Terpimpin membangun kerja sama dengan PKI Aidit dan PNI Ali Soerachman kontra Masjumi Prawoto Mangkusasmito, 1960 M. Partai Islam Indonesia Masjumi dinilai sebagai kontra revolusi, dibubarkan dan pimpinannya serta Ulamanya dipenjarakan.

Kembali ke masalah PRRI/Permesta. Dewan Menteri merasa perlu untuk segera menuntaskan pemberontakan dewan militer daerah tersebut, dengan melancarkan operasi militer. Untuk Sumatra Barat dipimpin oleh Kolonel Yani. Sumatera Utara dipimpin oleh Brigadir Djenderal Djatikoesoemo. Sumatera Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Dr. Ibnoe Soetowo. Untuk menghadapi Permesta, operasi penumpasan dipimpin Letnan Kolonel Roekminto Hendraningrat.

Di tengah operasi penumpasan PRRI dan Permesta pada 6 Maret 1960, seorang perwira AURI, Letnan Udara II Daniel Alexander Maukar, dengan menggunakan pesawat MIG 17 melakukan penembakan atas Istana Merdeka, Istana Bogor dan Kompleks BPM di Tanjung Priok. Dengan cara ini, Maukar mencoba melakukan pembunuhan secara langsung terhadap Presiden Soekarno. Tetapi gagal, dan mendaratkan pesawatnya di pesawahan Kadungora, Leles, Garut.

Lima tahun kemudian, sejarah berulang Laksamana Udara Umar Dani, secara tidak langsung melancarkan rencana pembunuhan Presiden Soekarno, tetapi dengan mencatut namanya dalam Kudeta G-30-S/PKI. Kegagalan kudetanya meruntuhkan nama baik Presiden Soekarno di mata rakyat.

Kembali ke masalah upaya percobaan pembunuhan Presiden Soekarno oleh Maukar. Saat itu, di Bandung timbul gerakan kedaerahan, dan beberapa anggota Pusat Kavaleri, yang dipimpin oleh Kolonel Bratamenggala, 27 Maret 1960, memaksa Kabinet Djuanda agar mengadakan perundingan dengan PRRI/ Permesta.

Pemberontakan yang dipimpin oleh kalangan militer dengan cepat dapat diselesaikan. Ternyata, Letnan Kolonel Ahmad Husien hanya mampu bertahan sekitar dua tahun setengah, 9 Januari 1958-29 Mei 1961, kemudian menyerah. Disusul Permesta menyerah pada pertengahan 1961. Hal ini selanjutnya mempercepat penyelesaian masalah RMS, DI TII, dan Irian Barat.

Sebenarnya PRRI Permesta mendapat bantuan militer asing. Misalnya, dengan Pesawat B26 yang dikemudikan oleh Allan Lawrence Pope, dapat membantu melakukan pembunuhan rakyat Ambon. Serangan udara ini dapat menggugurkan moril rakyat yang diserangnya. Namun, akibat Allan L. Pope menilai rendah kemampuan TNI AL dan AU, akhirnya dapat dirontokkan oleh anak buah KRI Sawega dan penerbang Mustang AURI Kapten Udara Penerbang I Dewata pada Juli 1958 di Teluk Ambon Pulau Tiga.

Pelaku pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dalam Peristiwa Cikini 30 November 1957, Peristiwa Maukar 9 Maret 1960, dan pelaku pemboman di Ambon, Allan Lawrence Pope 18 Mei 1958, dijatuhi hukuman mati seluruhnya oleh pengadilan.

Kecuali Allan Pope, tidak dilakukan eksekusi hukuman mati karena mendapat amnesti dari Presiden Soekarno. Menurut Manai Sophiaan dalam *Kehormatan Bagi Yang Berhak, Bung Karno tidak Terlibat G-30-S/PKI*, istri Allan Pope mantan

pramugari PAN American Airways datang ke Presiden Soekarno dan diterimanya. Dia bersama Ibu Allan Pope dan saudaranya, sambil menangis memohon ampunan untuk suaminya. Atas kemurahan hati Presiden Republik Indonesia, Pope diampuni secara diam-diam.

Sebenarnya Allan Pope agen CIA, dan dalam melakukan pemboman di Ambon, jatuh korban dari rakyat sejumlah 700 orang. Namun, dalam kepentingan politik menghadapi Amerika Serikat, Allan Pope diberi amnesti. Allan Pope bersama keluarga di Amerika Serikat hanya diminta untuk tidak membuat berita sensasi, agar menyembunyikan diri dan melupakan semua peristiwa pembunuhan atas rakyat yang pernah dilakukannya di Indonesia.

Dengan amnesti, Presiden Soekarno menunjukkan sikap bersahabat dengan bangsa Amerika Serikat. Tetapi, balasannya adalah justru sebaliknya, Amerika Serikat melakukan subversi, berusaha menjatuhkan Presiden Soekarno.[17]

Gerakan Militer Daerah yang mendapatkan bantuan persenjataan dari Amerika Serikat, menjadikan Presiden Soekarno dan TNI dalam upayanya membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda, melalui operasi militer, terpaksa belanja persenjataannya dari negara-negara Blok Timur.

DN Aidit PKI Merangkul Presiden Soekarno

Ulama dan Santri menyaksikan PKI yang memanfaatkan kesempatan terjadinya Perang Saudara, ataupun pada saat Perang Kemerdekaan melawan Imperialis Belanda, digunakan untuk melancarkan kudeta. Apalagi dengan adanya Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dimanfaatkan oleh D.N. Aidit merangkul Presiden Soekarno untuk memperkuat PKI. Kelanjutannya dimanfaatkan mempercepat pelaksanaan Kudeta G-30-S/PKI. Mengapa PKI selalu melancarkan Kudeta pada saat situasi nasional sedang menghadapi perang kemerdekaan atau konfrontasi senjata?

Tidak lain berangkat dari doktrin perang komunis Steffan T. Possony, dalam A Century of Conflict, Communist Tech niques of World Revolution, menyatakan war is the road to communist revolution - perang sebagai jalan raya bagi revolusi komunis. And to the world dictatorship of the communist party - dan juga jalan terbentuknya kediktatoran partai komunis dunia. Dari doktrin ini, komunis selalu memanfaatkan vultural strategy - mengail di air keruh.

17 Manai Sophiaan, 1994. *Kehormatan Bagi yang Berhak, Bung Karno Tidak Terlibat G-30-S/PKI.* Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Jakarta, hlm. 188-191.

Sumber: Mohammad Roem 70 Tahun. Pejuang Perunding. Bulan Bintang. Jakarta. 1978.

PIMPINAN MASJUMI DAN GPII
DI RTM WILIS MADIUN

Fitnah PKI terhadap Masjumi dan GPII
anti Pancasila dan akan mengkanankan revolusi,
menjadikan Presiden Soekarno membubarkannya
dan memenjarakan pimpinannya di Rumah Tahanan Militer - RTM
atau Wisma Wilis Madiun.

Dari kiri ke kanan antara lain:
M. Yunan Nasution, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito,
K.H. M. Isa Anshary, Muchtar Ghazali, dan E.Z. Muttaqien - GPII

Surat perintah penangkapan untuk Mr. Mohammad Roem ditanda tangani oleh Jenderal TNI AD Nasution. Terjadi beberapa hari setelah Mr. Mohammad Roem sebagai Rektor Universitas Islam Sumatra Utara - UISU menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada Jenderal TNI AD Nasution. Melihat penanda tangan surat perintah penangkapan, dan setelah pemberian gelar, Mr. Mohammad Roem berkesimpulan untuk penangkapan politisi tidak perlu bertanya apa sebabnya.

Selain itu, dalam propaganda komunis, agresi komunis sebagai tindak self defence - bela diri. Dalam pandangan komunis, perang dilakukan oleh komunis sebagai revolution war - perang revolusi. Misalnya Chinese Revolution - Revolusi China melawan imperialist war - perang imperialis atau reactionary war - perang kaum reaksioner. Pokoknya, semua lawan komunis dikategorikan sebagai the counter revolution and exploitation - kontra revolusi dan eksploitasi.

Untuk mensukseskan revolusinya, D.N. Aidit memanfaatkan potensi organisasi kesenjataan yang resmi - the government army is the key to revolutionary success. Kaum revolusioner harus dibangun melalui organisasi kesenjataan - the revolutionaries must build a military organization. Hanya dengan melalui organisasi kesenjataan, revolusi komunis akan sukses - the revolutionary army is the key to revolutionary success.

Adapun yang dimaksud dengan revolutionary army - tentara revolusi dalam teori Lenin adalah tentara yang dibangun dari pelaku-pelaku organisasi buruh, petani, kader dan militer yang melakukan desersi memihak kepada ajaran komunis. Dari ajaran ini, D.N. Aidit bersama Njoto, Njono, Sakirman dan Sudisman, membangun SOBSI, BTI, Pemuda Rakjat, Gerwani, menuntut kepada Presiden Soekarno agar diizinkan mempersenjatai buruh tani untuk menyerbu langsung ke Irian Barat.

> Bersamaan dengan tuntutan PKI mempersenjatai buruh dan tani, Uni Rusia mengirimkan Patung Pak Tani. Menggambarkan Petani bercaping, tidak memanggul cangkul, tetapi menyandang senjata, menjadikan petani dapat sungguhan makan dari rakyat. Disimbolkan patung seorang wanita yang menghantarkan makanan.
>
> Diletakkan di bunderan Menteng yang menghadap ke arah Kantor Pusat Pelajar Islam Indonesia - PII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia dan Persjarikatan Muhammadiyah di Menteng Raya. Mengapa tidak menghadap ke Istana Negara seperti Patung Pangeran Diponegoro di depan Monas?

Bagi D.N. Aidit hanya dengan merangkul Presiden Soekarno dan Demokrasi Terpimpinnya, PKI akan memperoleh kemenangan dalam menghadapi kekuatan TNI AD. Bagi D.N. Aidit, Guided Democracy as antimilitary dictorship of the individual and anti liberalism. Upaya merangkul Presiden diaktifkan setelah Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa - PBB, 1 Januari 1965, Jumat Pon, 27 Sya'ban 1384.

D.N. Aidit mulai menyiarkan adanya *Dewan Djenderal*. Bertolak dari *Dokumen Gillchrist* yang ditemukan di rumah Bill Palmer, importir Film Amerika, saat didemo oleh Pemuda Rakjat. Ditiupkan kabar, dari bulan Mei-September 1965, bahwa Dewan Jenderal sebagai kelompok Djenderal Angkatan Darat yang tidak setia kepada Pemimpin Besar Revolusi. Dewan Djenderal akan melakukan kudeta. Dengan strategi ini, perhatian Presiden Soekarno akan tercurah kepada PKI sebagai partai yang setia tanpa *reserve*.

Untuk mencapai tujuannya ini, dalam mengaplikasikan ajaran komunisme, D.N. Aidit dan kawan-kawannya hanya memerlukan waktu lima tahun, 1960-1965 M. Dengan bantuan Presiden Soekarno dan RRC, PKI semakin maju. Lawan-lawannya, yakni Partai Masjumi, PSI, 17 Agustus 1960, dan Partai Murba, 21 September 1965 berhasil dilumpuhkan. Terbukalah jalan revolusi untuk melancarkan Kudeta G-30-S/PKI, 30 September 1965. Semuanya terjadi setelah strategi PKI diarahkan memanfaatkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Situasi daerah luar Jawa, kalangan militer berupaya membuat pemerintahan tandingan, PRRI dan Permesta, 15 dan 17 Februari 1958, dan mendapat bantuan militer dari Amerika Serikat, di bawah Presiden Dwight Eisenhower, 1953-1961M. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Pusat Jakarta mencari jalan keluar dengan cara meningkatkan hubungan diplomasinya dengan negara-negara komunis. Apalagi, Barat mencoba membuat pangkalan perangnya di Asia Tenggara, *South East Asia Treaty Organization – SEATO*. Amerika Serikat masih menempatkan pangkalan militernya di Filipina.

Dengan mempraktikkan *Rimland Theory* - Teori Penguasaan Daerah Pinggir dari N. Spykman, Amerika Serikat membangun pakta pertahanannya mengepung negara-negara komunis. Asia Tenggara dijadikan basis pertahanan Amerika Serikat dan negara penjajah Barat lainnya. *South East Treaty Organization - SEATO* juga bertujuan untuk melumpuhkan kembali Republik Indonesia.

Dengan adanya Konferensi Asia Afrika, 24 April 1955, eksistensi *South East Asia Treaty Organization - SEATO*, 1954 M, walaupun didukung oleh Filipina, Thailand, Pakistan, bersama Amerika Serikat, Inggris, New Zeland, dan Australia, tetapi dapat digagalkan. Dampaknya, timbullah gejolak di daerah militer yang berposisi sebagai daerah pinggir dari pemerintah pusat Indonesia. Dipelopori dengan pemberontakan

militer dari Sumatera Barat dan Sulawesi, yakni PRRI/Permesta, 1958 M. Dapat dibayangkan bagaimana jadinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bila operasi militernya gagal.

> Pembebasan Irian Barat tidak mungkin mendapatkan bantuan dari negara-negara Blok Barat dan Timur Tengah yang di dalamnya terdapat Republik Sekuler Turki, sebagai anggota Nato. Realitas sejarah telah berubah seratus delapan puluh derajat. Perjuangan Ulama masa lalu mendapat dukungan dari Kesultanan Turki. Sejak 1923 M, Turki sudah berubah menjadi negara sekuler yang berpihak ke Barat. Demikian pula Saudi Arabia yang dimanfaatkan energi minyaknya oleh Barat. Akibatnya, lebih menghadap ke Barat daripada ke Asia Afrika.
>
> Timur Tengah dipecah belah oleh Barat. Nasionalisme Aljazair melahirkan konflik tak berkesudahan. Mesir membebaskan dirinya dari Arabia atau Turki. Iran dan Irak pernah di bawah Muawiyah dan Abasiyah. Keduanya melepaskan diri dari pengaruh Arabia dan Turki, menjadi dua negara yang tidak mungkin bersatu. Kedua negara tersebut, dibangkitkan kesadaran nasionalisme Persianya.
>
> Nasionalisme Pakistan dibelahnya dengan Bangladesh. Afganistan bekas negara penjangga - buffer state, sedang terpuruk. Kesultanan Mongol di India, sudah tiada. Siria, Jordania, Palestina, digoncang terus oleh Israel dengan perang. Di bawah kondisi ini, apa yang dapat diharapkan oleh NKRI apabila mengizinkan bantuan dari Timur Tengah untuk membebaskan Irian Barat?

Tantangan Barat bersama Sekoetoenya yang mempertahankan penjajahan di Irian Barat, menurut Presiden Soekarno perlu dijawab dengan terlebih dahulu menyatukan wawasan bangsa yang sedang mempertentangkan masalah ideologi di dalam Konstituante. Di samping itu, dilancarkan pula operasi militer menindak gerakan kedaerahan yang dipimpin oleh kalangan militer.

Hanya dengan menumbuhkan kesadaran pemikiran Revolusi Indonesia yang tetap bertekad menghapuskan penjajahan di atas dunia, akan dapat disatukan gerak juangnya dalam menyempurnakan batas wilayah dan memerdekakan seluruh tanah air Indonesia dari penjajahan. Para pimpinan partai politik dan militer perlu menyadari, Indonesia tanpa Irian Barat, bukan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364. Tanpa tumbuhnya kesadaran ini, akan tumbuh kesadaran lawannya bukan imperialis Belanda dan imperialis Barat. Melainkan lawannya berbalik bangsa sendiri dan berubah menjadi internal conflict.

Untuk mengakhiri *internal conflict* di kalangan partai politik yang berkepanjangan dan menyatu-bahasakan kembali pemikiran para pimpinan dan anggota Konstituante, diperlukan tumbuhnya kesadaran sejarah bahwa:

> Piagam Djakarta, 22 Juni 1945, Jumat Kliwon, 11 Rajab 1364 yang telah menjadi dasar *Gentlement Agreement* adalah produk kesepakatan para Ulama bersama segenap pemikir kemerdekaan bangsa dan negara, termasuk Mr. M.A. Maramis wakil dari Kristen.

Akibat adanya distorsi penulisan Sejarah Indonesia, Piagam Djakarta seperti murni produk pimpinan Islam saja, tanpa ikut sertanya Mr. M.A. Maramis dari Protestan. Dikesankan Piagam Djakarta identik dengan Negara Islam. Padahal secara historis, tujuh kata-kata, *dengan mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknya*, disetujui 200% oleh Mr. M.A. Maramis dari Wakil Protestan atau golongan Nasrani saat itu.

Menyetujui dengan pengertian dan penafsiran bahwa Sjariat Islam hanya berlaku untuk umat Islam. Tidak dikenakan kepada umat non-Islam, menjadikan Mr. A. Maramis menyetujui 200%. Dengan demikian, sebenarnya Piagam Djakarta, 22 juni 1945, Jumat Kliwon, 11 Rajab 1364, produk semua pihak, benar-benar sebagai *Gentlement Agreement* menurut Dr. Soekiman Wirjosandjojo, kecuali PKI tidak ikut serta di dalamnya.

Ideologi Pantjasila serta konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945, secara politis disetujui oleh para Ulama dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apakah mungkin terjadi perumusan ideologi Pantjasila dan Oendang-Oendang Dasar 1945, apabila tidak ada persetujuan dari Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan Mr. Kasman Singodimedjo dari Persjarikatan Moehammadijah, Wachid Hasjim dari Nahdlatoel Oelama bersama Mr. Teuku Mohammad Hasan dari perwakilan Aceh? Hasil perumusannya kemudian baru diserahkan kepada Drs. Mohammad Hatta dari Sumatra Barat. Atas dasar dan perumusan kelima pimpinan nasional inilah, menjadikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengesahkannya pada 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadhan 1364 H.

Untuk mengembalikan kesadaran sejarah ini, Presiden Soekarno dan pemerintah pada 25 April 1959, menganjurkan pimpinan dan anggota Konstituante agar memutuskan untuk kembali ke ideologi Pantjasila dan konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945.

Menurut Deliar Noer, Joesoef Wibisono dari Partai Islam Indonesia Masjumi, dengan mempertimbangkan kondisi nasional dan internasional, perlu segera dicarikan jalan keluar dari perbedaan pendapat antara kelompok Islam yang menginginkan kembali Piagam Djakarta sebagai landasan dasar perumusan Konstitusi, dengan kelompok luar Islam yang menginginkan Pantjasila dan Piagam Djakarta hanya sebagai dokumen historis.

Pada saat itu juga, ketika dalam Konstituante dari pihak Masjumi menyetujui Demokrasi Terpimpin, tetapi dengan pengertian dipimpin oleh kaidah-kaidah hukum. Hukum berlaku untuk seluruh isi negara, berlaku pula untuk pemegang pemerintahan Presiden. Masjumi tidak setuju apabila Demokrasi Terpimpin diartikan dipimpin oleh Maha Pemimpin siapa pun orangnya, yang menempatkan dirinya di atas segala hukum. Demikian penjelasan Prawoto Mangkusasmito. Dalam pelaksanaan setelah Dekrit Presiden, Demokrasi Terpimpin menjadi demokrasi tanpa oposisi seperti pernyataan Mohammad Natsir.

Mohammad Natsir, Pancasila dan Islam

Menurut Mohammad Natsir dalam Capita Selecta, Djilid 2, sebagai mantan Menteri Penerangan dan Perdana Menteri pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kaitannya dengan Pancasila, pada Ramadhan 1373/Mei 1954 menyatakan:

> Pantjasila memang mengandung tudjuan2 Islam, tetapi Pantjasila itu bukanlah berarti Islam. Kita berkejakinan jang tak akan kundjung kering, bahwa diatas tanah dan dalam iklim Islamlah, Pantjasila akan hidup subur. Sebab Iman kepertjajaan kepada Tuhan Jang Maha Esa itu tidak dapat ditumbuhkan dengan se-mata2 hanja mentjantumkan kata2 dan istilah "Ketuhanan Jang Maha Esa" itu sadja didalam perumusan Pantjasila itu.
>
> Berlainan soalnja, apabila sila Ketuhanan Jang Esa itu hanja sekadar buah bibir, bagi orang2 jang djiwanja sebenarnja sceptis dan penuh ironi terhadap agama: bagi orang ini dalam ajunan langkahnja jang pertama ini sadja Pantjasila itu sudah lumpuh.
>
> Apabila sila pertama ini, jang hakikatnja urat-tunggal bagi sila2 berikutnja, sudah tumbang, maka seluruhnja akan hampa, dan amorph, tidak mempunjai bentuk jang tentu. Jang tinggal adalah kerangka Pantjasila jang mudah sekali dipergunakan untuk penutup tiap2 langkah perbuatan jang tanpa sila, tidak berkesusilaan sama sekali.

LAMBANG PERSATUAN ISLAM

Jadi, secara historis dapat dibaca kembali peristiwa sejarahnya yang sebenarnya terjadi. Kedua-duanya terlahir karena Ulama ikut berpartisipasi aktif sebagai pembuat keputusan sejarahnya. Tidak mungkin keduanya terjadi tanpa persetujuan Ulama. Hanya sayangnya, penulisan sejarahnya atau Sejarah Sebagai Tulisan, dihapuskan di dalamnya Ulama sebagai peran utamanya.

Pemungutan Suara di Konstituante

Perbedaan kepentingan antarpimpinan partai politik dalam Konstituante telah berlangsung selama sekitar 4 tahun, 1955-1959 M, terjadi sebagai dampak kehilangan pengertian sejarah yang sebenarnya. Apabila saling mengetahui proses sejarah awal kelahiran kedua hal yang dipertentangkannya, ideologi Pantjasila dan konstitusi Oendang-Oendang Dasar 1945, dapat dipastikan akan menemukan solusi atau jalan keluarnya tanpa berlarut-larut makan waktu yang panjang.

Anjuran Presiden Soekarno dan pemerintah, pada 25 April 1959, diperdebatkan oleh anggota dan pimpinan Konstituante, dan diambil keputusan dengan mengadakan pemungutan suara. Berdasarkan dokumentasi 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, dapat dibaca hasil pemungutan suara antara anggota dan pimpinan Konstituante dalam tiga kali sidangnya:

> Pemungutan suara pertama, 30 Mei 1959, menghasilkan: setudju 269 suara, dan tidak setudju 199 suara.
>
> Disusul dengan pemungutan suara kedua, 1 Juni 1959, menghasilkan: setudju 263 suara, dan tidak setudju 203 suara.
>
> Kemudian diikuti dengan pemungutan suara ketiga, 2 Juni 1959, menghasilkan: setudju 264 suara, dan tidak setudju 204 suara.

Melalui sistem pemungutan suara di atas, ternyata gagal mengambil keputusan menjadikan Oendang-Oendang Dasar 1945 sebagai Undang Undang Dasar Republik Indonesia dan Pantjasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ditetapkan pemungutan suara sah, bila mencapai dua pertiga dari jumlah suara yang masuk.

Dampak dari kegagalan dari hasil pemungutan suara tersebut adalah semakin meruncingnya internal conflict. Penguasa Perang, KSAD Abdul Haris Nasution, melarang aktivitas politik dan Konstituante reses.

> Pada 5 Juli 1959, dari Istana Merdeka ditetapkanlah Dekrit Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dinyatakan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Dengan adanya Dekrit Presiden tersebut maka tidak berlakulah Undang-Undang Dasar Sementara, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya segera dibentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara - MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara - DPAS. Kelanjutannya, Konstituante hasil Pemilu dibubarkan.

Peristiwa ini memberikan gambaran bahwa Presiden Soekarno sebagai tokoh yang sangat kuat pengaruhnya. Demi memberikan jawaban terhadap pimpinan Gerakan Militer Daerah, tidak benar tuduhan yang menyatakan bahwa hanya orang Jawa yang diangkat sebagai pimpinan militer. Terbukti untuk KSAD diangkatlah Djenderal Abdul Haris Nasution dari Batak. Kerja sama keduanya menjadikan Dekrit

Presiden dapat berlangsung dengan baik. Seluruh pimpinan partai politik tidak dapat berbuat apapun terhadap pembubaran Konstituante dan DPR hasil Pemilu.

> Presiden Soekarno di hadapan demonstran 17 Oktober 1952, atau kalangan militer Oktoberisme, tidak mau membubarkan DPR karena dirinya bukan pemimpin diktator. Namun, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang didukung oleh Penguasa Perang KSAD Djenderal A.H. Nasution, dibekukanlah aktivitas Konstituante dan dibubarkannya DPR sekalipun hasil Pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno.

Dengan peristiwa sejarah ini, pada saat itu, Ulama dan Santri, dipahamkan terhadap makna Kekuasaan Eksekutif dalam menciptakan Ketetapan Presiden, Peraturan Presiden, Dekrit Presiden, dan Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Pada saat itu pula, Ulama dan Santri menjadi sadar terhadap kemampuan kerja Partai Politik dalam menghadapi pelaksanaan Dekrit Presiden.

Dengan pengalaman sejarah politik yang dialaminya, para Ulama dan pimpinan partai politik Islam, memahami makna sebuah kekuasaan atau kekhalifahan setelah kemerdekaan tercapai. Dengan kekuasaan dapat merealisasikan programnya. Dan melalui pengalaman sejarah, dipahami pula makna Paradigma Lima-K dari Sjarikat Islam yang dipesankan oleh Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. Hanya dengan bertolak membangkitkan (1) kemauan akan terlahir (2) kekuatan. Dari terbentuknya kemauan dan kekuatan akan memperoleh (3) kemenangan. Dengan kemenangan akan mampu menduduki (4) kekuasaan, dan dengan menguasai kekuasaan akan memperoleh (5) kemerdekaan. Dengan kemerdekaan politik terbebasnya penjajahan, akan diciptakan kemerdekaan sejati dengan makna memelihara keadilan untuk menciptakan kemakmuran.

Ulama di tengah Manipol Usdek

Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pada 10 Juli 1959, Jumat Legi, 3 Muharram 1379, dibentuklah Kabinet Kerja Pertama, dengan Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Didahului dengan Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden. Pada tanggal yang sama, 10 Juli 1959, Ir. H. Djuanda diangkat sebagai Menteri Pertama.

Program Kabinet Kerja Pertama dikenal dengan nama Tri Program: (1) Memenuhi kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan (2) Menegakkan keamanan untuk rakyat dan negara (3) Melanjutkan perjuangan melawan ekonomi imperialis dan imperialisme politik di Irian Barat.

Selanjutnya, pada 15 Agustus 1959, di Istana Negara dilantik 46 anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara - DPAS, di dalamnya diangkatlah Aidit, Njoto, Soetomo Atomo, dan Siauw Giok Tjhan. Tidak lupa diangkat pula sebagai pengimbang, kelompok komunis nasionalis Tan Malakais, yakni Adam Malik, Iwa Koesoema soemantri, Mohammad Padang, Nj. Rasoena Said, Wikana, dan Tjoa Siklen sebagai Dewan Perancang Nasional-Depernas dan Mr. Mohammad Yamin sebagai Ketua, dan Sakirman dari PKI di angkat sebagai Wakil Ketua. Di samping itu, dibentuk pula, Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara, dengan Sri Soeltan Hamengkoe Boeana IX sebagai Ketua.

Dari kenyataan sejarah ini terbaca hasil PKI merangkul Presiden Soekarno, memperoleh posisi politik seperti di atas. Sekaligus terbaca cara Presiden Soekarno menciptakan balance of power. Walaupun D.N. Aidit dan kawannya diangkat, diimbangi pula dengan kelompok komunis nasionalis Tan Malaka: Adam Malik, Mohammad Yamin Cs. Kedudukan Mohammad Yamin sebagai ketua, diimbangi dengan Sri Soeltan Hamengkoeboeana IX sebagai Wakil Ketua.

Manipol Usdek

Pada 17 Agustus 1959, Senin Wage, 10 Safar 1379, pada Hari Ulang Tahun Ke-14 Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengucapkan pidato kenegaraannya berjudul Menemukan Kembali Revolusi Kita atau disebut pula sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia.

DPAS, Roeslan Abdulgani, mengusulkan pidato tersebut dijadikan dasar Garis Besar Haluan Negara. Presiden Soekarno di depan Kongres Pemuda di Bandung, Februari 1960, menjelaskan intisari Manifesto Politik Republik Indonesia – Manipol adalah:

Pertama, Undang Undang Dasar 1945

Kedua, Sosialisme Indonesia

Ketiga, DemokrasiTerpimpin

Keempat, Ekonomi Terpimpin

Kelima, Kepribadian Indonesia

Kelima hal tersebut disingkat menjadi USDEK.

Mohamad Roem
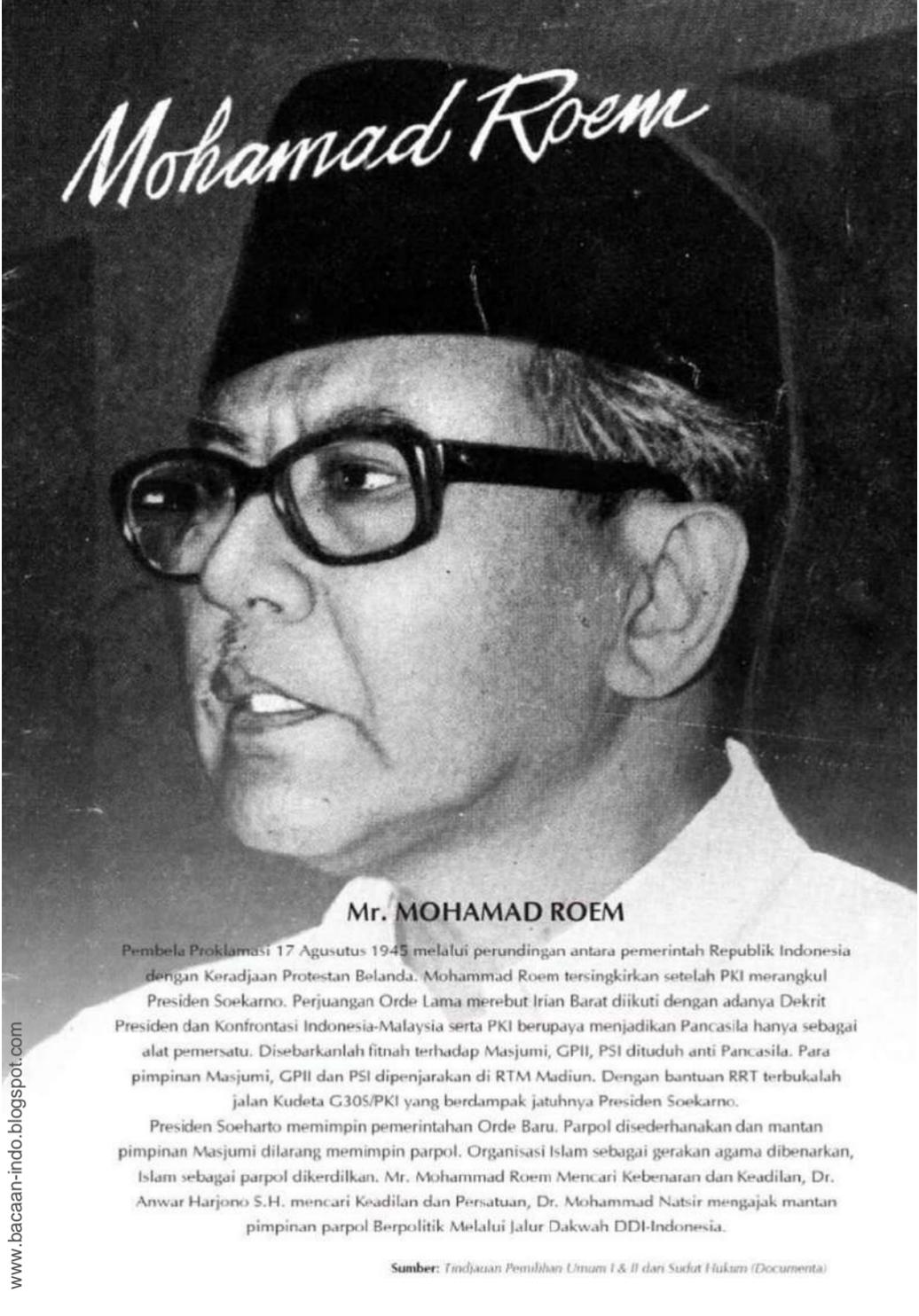
Mr. MOHAMAD ROEM

Pembela Proklamasi 17 Agusutus 1945 melalui perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Keradjaan Protestan Belanda. Mohammad Roem tersingkirkan setelah PKI merangkul Presiden Soekarno. Perjuangan Orde Lama merebut Irian Barat diikuti dengan adanya Dekrit Presiden dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia serta PKI berupaya menjadikan Pancasila hanya sebagai alat pemersatu. Disebarkanlah fitnah terhadap Masjumi, GPII, PSI dituduh anti Pancasila. Para pimpinan Masjumi, GPII dan PSI dipenjarakan di RTM Madiun. Dengan bantuan RRT terbukalah jalan Kudeta G30S/PKI yang berdampak jatuhnya Presiden Soekarno.

Presiden Soeharto memimpin pemerintahan Orde Baru. Parpol disederhanakan dan mantan pimpinan Masjumi dilarang memimpin parpol. Organisasi Islam sebagai gerakan agama dibenarkan, Islam sebagai parpol dikerdilkan. Mr. Mohammad Roem Mencari Kebenaran dan Keadilan, Dr. Anwar Harjono S.H. mencari Keadilan dan Persatuan, Dr. Mohammad Natsir mengajak mantan pimpinan parpol Berpolitik Melalui Jalur Dakwah DDI-Indonesia.

Sumber: *Tindjauan Pemilihan Umum I & II dari Sudut Hukum (Documenta)*

Selain itu, dibentuk pula Front Nasional pada 31 Desember 1959, Kamis Kliwon, 29 Jumadil Akhir 1389. Dengan tujuan: Pertama, menyelesaikan revolusi nasional. Kedua, melaksanakan pembangunan semesta nasional. Ketiga, mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Namanya mirip sekali dengan Front Nasional sebagai pemerintahan baru yang didirikan dalam Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948. Oleh karena itu, menurut 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, Front Nasional dikuasai oleh PKI dan simpatisannnya digunakan untuk mencapai tujuan politiknya, Kudeta G-30-S/PKI pada 30 September 1965 di Jakarta.

> Mengapa menghidupkan kembali Front Nasional? Tidakkah hal tersebut berarti menghidupkan kembali Kudeta PKI di Madiun? Aidit sebagai pelaku Kudeta PKI di Madiun yang tidak tertangkap. Apakah hal ini, sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, memang disengaja menggunakan terminologi Marxisme: Manifesto Politik? Tidakkah istilah ini sama dengan Manifesto Komunis, 1848 M yang berisikan anjuran Karl Marx agar kaum buruh proletar berevolusi melawan kaum borjuis? Demikian pula istilah Sosialisme sebagai tahapan revolusi menuju Komunisme.

Kemajuan PKI semakin hari semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Menurut Arnold C. Brackman, D.N. Aidit mendukung konsep Khrushchev, if everything depends on the communists, we would follow the peaceful way - bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan Khrushchev ini seperti bertentangan dengan konsep Mao Ze Dong dan Stalin secara terbuka menyatakan komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. Istilah politik ini, perdamaian tidaklah sama dengan pengertian rakyat awam, damai artinya tiada peperangan. Tidaklah demikian maksudnya.

Dapat dilihat dari sikap Rusia dengan bahasa politik perdamaian, tetapi juga menyiapkan berbagai senjata pemusnah nuklir dalam menandingi Amerika Serikat. Seperti halnya istilah pakta pertahanan - pact of defence, artinya pakta, pakto, pact, memang perdamaian. Namun, mengapa disiapkan dengan kekuatan militer. Misalnya NATO - 1949 M, ANZUS - 1951 M, SEATO - 1954 M karena dunia Barat merumuskan perang untuk mengakhiri peperangan.

Selain itu, D.N. Aidit juga menyatakan karena PKI merangkul Presiden Soekarno, PKI akan bekerja sama dengan pimpinan partai politik lainnya yang sama-sama mendukung Konsepsi Presiden dengan Demokrasi Terpimpin walaupun PNI partai yang didirikan oleh Ir. Soekarno -1927 M dan mendukung Demokrasi Terpimpin. Namun, pimpinan PNI menyerang PKI sebagai partai bermuka dua - double faced

party. Pikirannya separuh menghadap ke Moskow atau Beijing, dan sisanya baru diarahkan ke Indonesia.

DPR Gotong Royong

Dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno, demi menciptakan iklim kerja sama antara legislatif dengan eksekutif secara gotong royong maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Royong pada 24 Juni 1960. DPR hasil Pemilu dibubarkan. DPRGR dibentuk sebagai perwakilan dari partai politik, golongan karya, dan wakil dari Irian Barat. Status ketua dan wakil ketuanya, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Soekarno. Demikian pula pembentukan MPRS pada 15 Agustus 1960.

Demi menciptakan pemerintahan tanpa oposisi, setelah berhasil dibubarkannya Konstituante tanpa terjadi gejolak politik maka pada 17 Agustus 1960, berdasarkan Keputusan Presiden, No. 200 Tahun 1960 dan No. 201 Tahun 1960, pemerintah membubarkan Partai Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia - PSI maka terjadilah seperti yang dinyatakan oleh Mohammad Natsir, Demokrasi Terpimpin adalah *democracy without opposition* - demokrasi tanpa oposisi.

Pada saat pidato pembubaran ini, Presiden Soekarno didampingi oleh Staf Penguasa Perang Tertinggi, *Djenderal Abdul Haris Nasution* di hadapan pimpinan PSI Soetan Sjahrir, Soebadio Sastrosatomo dan Moerad. Dari Partai Masjumi hadir pula Junan Nasution dan Prawoto Mangkusasmito.

Melihat adegan atau fakta luar itu, secara sepintas pihak pimpinan militer Angkatan Darat, tidak sejalan dengan pemikiran pimpinan Partai Politik Islam Indonesia Masjumi dan umat Islam umumnya. Lebih mendukung keinginan Presiden Soekarno dan PKI, membiarkan kedua partai politik tersebut tumbang.

Kenyataan sejarah berikutnya, bicara sangat berbeda. PKI sesudah Pemilu mencapai puncak keberhasilannya. Hanya memerlukan waktu sepuluh tahun sesudah Pemilu 1955, PKI berani mengulang kudeta di Madiun, 19 September 1948, di Jakarta 30 September 1965, dikenal dengan nama G-30-S/PKI dan pimpinan Angkatan Darat dijadikan target korban pembunuhan dalam kudetanya.

PRESIDEN Dr.Ir. H. SOEKARNO

Satu-satunya Presiden Indonesia yang mengenakan lambang
Matahari Muhammadiyah di dada atas sebelah kanan
Presiden Dr. Ir. H. Soekarno
memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dalam Falsafah Ilmu Tauhid
dari Universitas Muhammadijah
5 Rabiul Akhir 1385/3 Agustus 1965 di Jakarta.

Sumber: satriopinandito.files.wordpress.com

Sumber: *Kalender Muhammadiyah*

PRESIDEN SOEKARNO DAN MU'TAMAR MUHAMMADIYAH

Mu'tamar Setengah Abad, Jakarta, 21-25 November 1962

Presiden Soekarno setelah membubarkan Partai Islam Indonesia Masjumi
Lebih mendekati Persjarikatan Muhammadijah
Presiden Soekarno menyatakan, Makin Lama Makin Tjinta Muhammadijah.
Dan berpesan apabila wafat, agar kain kafannya ada lambang Perserikatan Muhammadijah.

Hanya dalam waktu relatif singkat lima tahun setelah lawan politiknya Partai Islam Indonesia Masjumi pimpinan Prawoto Mangkusasmito, Gerakan Pemuda Islam Indonesia pimpinan E.Z. Muttaqien, dan Partai Sosialis Indonesia pimpinan Soetan Sjahrir, 17 Agustus 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Sembilan hari setelah Partai Murba dibubarkan pada 21 September 1965, PKI merasa aman dari partai politik lawannnya, kemudian berani melancarkan Kudeta G-30-S di Jakarta diarahkan menumbangkan pimpinan Angkatan Darat. Siapa - *who*, mengapa - *why*, apa - *what*, kapan - *when*, dan bagaimana - *how*?

Trikora

Setelah adanya kunjungan Khrushchev ke Indonesia, Januari 1960, dan memberikan kredit sebesar 250 juta dolar AS, diikuti dengan kunjungan Jenderal Nasution ke Moskow memperoleh pinjaman sebesar 450 juta dolar AS untuk pembelian senjata maka pada 4 Maret 1961 dilangsungkan penandatanganan pembelian senjata dari Uni Soviet. Antara lain, Pesawat Pembom TU-16, Kapal Selam, dan Kapal Penjelajah.

Tujuannya adalah mempersiapkan dengan kekuatan militer guna merebut Irian Barat. Mengapa Presiden Soekarno membeli senjata dari Rusia? Sebagai balance of power untuk mengimbangi PKI yang bekerja sama dengan RRC, dengan tidak membeli senjata dari RRC. Dengan cara pembelian senjata dari Rusia, Indonesia berharap akan mendapat perlindungan dari Rusia apabila terjadi tindak penyimpangan PKI dengan RRC.

> Andaikata Amerika Serikat benar-benar Pendekar Demokrasi dan berpihak kepada perjuangan rakyat yang terjajah, pasti Amerika Serikat segera memaksa Keradjaan Protestan Belanda mengakhiri penjajahannya di Irian Barat. Seperti Amerika Serikat sendiri bersegera memerdekakan Filipina. Dampaknya, Republik Indonesia tidak perlu membeli senjata dari Unisoviet dan tidak perlu membesar–besarkan kembali PKI. Namun sayangnya, Amerika Serikat memilih sikap masih mentoleransi penjajahan Keradjaan Protestan Belanda di Irian Barat.

Akibatnya, Komando Pembebasan Irian Barat, mulai dilaksanakan dengan nama Tri Komando Rakyat - Trikora disampaikan oleh Presiden Soekarno pada rapat raksasa di Yogyakarta, 19 Desember 1961. Tanggal ini dipilih untuk mengenang kembali Agresi Militer Belanda Kedua, 19 Desember 1948, yang berhasil menangkap Presiden dan Wakil Presiden bersama beberapa Menteri. Kemudian, diasingkan ke P. Bangka dan terbentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera Barat dan dipimpin oleh Ketua, Sjafrudin Prawiranegara.

Adapun isi dari Trikora tersebut adalah:

1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua;
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat;
3. Bersiaplah mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Untuk pelaksanaan operasi militer, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962, dipimpin oleh Major Djenderal Soeharto. Wakil I Panglima Kolonel Laut Soebono, Wakil II Panglima Kolonel Udara Leo Wattimena, dan Kepala Staf Gabungan Kolonel Achmad Tahir.[18]

Sepuluh hari kemudian, 12 Januari 1962, dilaksanakanlah patroli rutin di Laut Arafuru, menggunakan Motor Torpedo Boat - MTB yang tergabung dalam Kesatuan Patroli Tjepat - KPT terdiri tiga buah: RI Macan Tutul, RI Harimau, dan RI Macan Kumbang. Komandan Satuan MTB adalah Kapten Wiratno dan juga sebagai Komandan RI Macan Tutul. Dalam patroli ini, ikut serta para penjabat tinggi MBAL: Komodor Yos Soedarso - Deputy KSAL, Kolonel Soedomo - Kepala Direktorat Operasi MBAL, dan Kolonel Moersid - Asisten II KSAD. Tujuan patroli meninjau dari dekat perbatasan Trikora, untuk menyusun rencana operasi selanjutnya.

> Patroli ini pada 15 Januari 1962, jam 21.15 zone time, dihadang oleh kapal-kapal perusak Belanda. Dalam pertempuran laut ini, gugurlah Yos Soedarso yang beragama Katolik bersama Kapten Wiratno bersama seluruh anak buahnya.
>
> Dengan gugurnya Komodor Yos Soedarso, dunia mengetahui bahwa Republik Indonesia sebagai negara, bukan sebagaimana yang diisukan oleh orang-orang RMS bahwa Republik Indonesia negara yang dipimpin oleh orang Jawa yang Islam saja, tidak ada non-Islam sebagai pemimpinnya.

Penyerahan Irian Barat

Setelah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat melancarkan infiltrasi melalui udara, darat, dan laut, ternyata hanya memakan waktu delapan bulan kemudian, dari 2 Januari 1962, Keradjaan Protestan Belanda pada 15 Agustus 1962 mengadakan penyerahan Irian Barat kepada Pemerintah Republik Indonesia di Markas Besar PBB.

Kemudian diikuti dengan pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan dari *United Nations Temporary Executive Authority – UNTEA* dari PBB di Kota Baru Irian Barat

18 Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di atas, 1962 M, sangat tepat waktu. Bersamaan waktunya dengan adanya masalah Krisis Kuba. Adanya pengiriman senjata missile Rusia ke Kuba (1962 M). Presiden Kennedy AS memerintahkan segenap militernya untuk siaga. P.M. Khrushchev agar memerintahkan kapal Rusia yang membawa senjata pemusnah agar meninggalkan perairan Kuba. Bagi Amerika Serikat, secara geografis posisi Kuba sebagai musuh di halaman belakang. Situasi Krisis Kuba menjadikan posisi Amerika Serikat di Vietnam Utara, baik pasukan darat dan udara di seluruh sektor, menemui kegagalan dan banyak yang tewas.

kepada Indonesia, pada 1 Mei 1963. Pada hari yang sama, Komando Mandala dibubarkan.

Dengan adanya penyerahan tersebut, sejak 1 Mei 1963, secara de yure lengkaplah luas wilayah Republik Indonesia dari barat, Sabang hingga timur Merauke. Batas utara Kepulauan Talaud dan selatan Pulau Rote. Dengan batas luas laut sebagaimana yang tertera dalam Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Jumat Pahing, 21 Jumadil Awwal 1377, Republik Indonesia menjadikan negara pemilik batas luas laut yang terluas di dunia.

Kenyataan luas wilayah darat, laut dan udara Indonesia ini, menjadikan Keradjaan Protestan Anglikan Inggris, merasa terganggu. Tidakkah Inggris menyatakan rule the wave rule Britain - menguasai lautan berarti menguasai Inggris? Oleh karena itu, untuk mengimbangi Republik Indonesia yang memiliki batas laut terluas di dunia, dibentuklah negara Federasi Malaysia pada 16 September 1963, Senin Kliwon, 27 Rabiul Akhir 1383.

> Dampaknya di sisi lain, dengan adanya Persetujuan Penyerahan Irian Barat dari Keradjaan Protestan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia, 15 Agustus 1962, dan diikuti dengan Penyerahan Kekuasaan dari United Nations Temporary Execuive Authority - UNTEA dari PBB ke Indonesia, pada 1 Mei 1963, menjadikan Dr. Ch. R. Soumokil menjadi gembong RMS 19 April 1950, tidak mampu bertahan lagi, akibat tidak lagi menerima bantuan dari imperialis Belanda. Berhasil ditangkap, 2 Desember 1963, dan kemudian dijatuhi hukuman mati pada 21 April 1964.

Dengan demikian, segenap gangguan keamanan berhasil diselesaikan. Diawali dengan APRA dan Andi Azis, 1950 M. Menyusul PRRI/Pemesta, 1961 M. Darul Islam Jawa Barat, 1962 M, dan Pembebasan Irian Barat berhasil masuk pangkuan RI, gagallah separatis OPM, Mei 1963 M, serta RMS, 2 Desember 1963 M.

Prestasi ini semuanya dapat terjadi, dengan terbentuknya kesatuan dan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Terutama TNI sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, dalam Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M hingga Pembebasan Irian Barat, 1963 M, ABRI sebagai anak kandung rakyat, kelanjutan Tentara Peta produk Ulama menunjukkan prestasi juang yang gemilang dalam bela bangsa dan negara. Lalu, apa yang akan terjadi apabila perang-perang telah berhenti. Dapat dipastikan akan timbul internal conflict.

Tiba-tiba, Barat setelah Amerika Serikat menemui kekalahan di Vietnam Utara, dan berkembangnya pengaruh komunis di Laos, Kamboja, Filipina, dan PKI di

Indonesia, melancarkan politik *devide and rule* bagi bangsa-bangsa di Asia Tenggara, dengan mengangkat Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Tentu hal ini mendorong Indonesia keluar dari PBB sejak 1 Januari 1965.

Konfrontasi Indonesia - Malaysia

Keradjaan Protestan Anglikan Inggris menciptakan politik keseimbangan baru di Asia Tenggara. Dengan mengalirnya senjata dari Rusia ke Indonesia, besarnya pengaruh RRC terhadap PKI maka dibentuklah Federasi Malaysia, direncanakan 31 Agustus 1963. Namun, baru dilaksanakan 16 September 1963, Senin Kliwon, 27 Rabiul Akhir 1383. Di bawah kondisi ini, Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Malaysia, 17 September 1963.

Menyusul ketegangan baru, Konfrontasi Indonesia-Malaysia, di tengah situasi dalam negeri sedang terjadi *jor-joran* antara PKI dengan TNI dan segenap organisasi non komunis. Pendekatan Presiden Soekarno terhadap negara Blok Timur Komunis, dalam upaya mensukseskan Pembebasan Irian Barat, berdampak menyuburkan PKI.

Balance of Power dari Presiden Soekarno atas pertumbuhan partai politik dalam negeri, lebih cenderung kepada PKI. Walaupun sebenarnya terbaca, PNI agar menyatu dengan PKI, dinyatakan Marhenisme PNI adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. PKI diimbangi dengan komunis nasional, Partai Murba.

Sementara itu, parpol agama, Partai Nahdlatul Ulama diimbangi dengan Partai Kristen dan Katolik. Antarorganisasi sosial keagamaan Islam Nahdlatul Ulama, Perti, Matlaul Anwar, Jami'atul Al-Wasliyah, PUI, Nahdlatul Wathan dari kelompok Ahli Sunnah Wal Jamaah, diimbangi dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsjad dari kelompok Wahabi.

Tidak luput dalam ABRI, terbaca *balance of power* - politik keseimbangan Presiden Soekarno. Setelah Djenderal Soeharto berhasil melaksanakan Trikora, dalam melaksanakan operasi Dwikora menghadapi Konfrontasi Malaysia, dibentuklah Komando Siaga - KOGA, 2 September 1964. Kemudian, konsolidasi berikutnya, 28 Februari 1965, KOGA diubah menjadi Komando Mandala Siaga - KOLAGA dengan Panglima, Laksamana (U) Omar Dhani, Wakil Panglima I Djenderal (AD) Soeharto, dan Wakil Panglima II Laksamana (L) Muljadi, Kepala Staf Komodor (U) Leo Watimena.

Di bawah situasi ini, timbul pertanyaan, apa dan bagaimana Presiden Soekarno dalam menciptakan *balance of power* antara partai politik dengan ABRI, dan antara Angkatan dengan Angkatan dalam ABRI sendiri?

Partai Nahdlatul Ulama memang bermassa besar, tetapi tidak memiliki pendukung

negara luar yang bersedia menyumbangkan senjata. Negara-negara Timur Tengah di bawah pengaruh Barat Amerika dan Inggris. Barat tidak bersedia menyumbangkan produksi senjatanya dengan cuma-cuma. Kecuali Partai Nahdlatul Ulama bersedia membelinya. Hal itu tidak diperlukan lagi oleh Partai Nahdlatul Ulama yang sudah dekat hubungannya dengan TNI Angkatan Darat. Dikuatkan dengan adanya Badan Kerja sama Ulama dan Militer.

Partai Kristen dan Katolik walaupun mempunyai pendukung negara Barat yang memiliki senjata, tidak memiliki massa rakyat yang besar. Tidak mungkin dapat dijadikan pengimbang kekuatan ABRI.

PKI sebagai parpol yang memiliki pendukung RRC yang bersedia menyumbangkan sejumlah senjata, dan bersedia membangun Angkatan ke-5 untuk menandingi ABRI dengan Empat Angkatannya. Demi kepentingan ini, Laksamana (U) Omar Dhani, sebagai pimpinan KOLAGA, didekati oleh D.N. Aidit. Bantuan Omar Dhani terhadap PKI dapat dilihat pada saat Ulang Tahun ke-45 PKI di Jakarta, 23 Mei 1920-1965. Jakarta berubah seperti "ibu kota komunis". Dipenuhi dengan bendera PKI dan gambar-gambar Karl Marx, Lenin, D.N. Aidit, dan kawan-kawannya.

Presiden Soekarno menjadi kurang waspada terhadap rencana terselubung Kudeta PKI yang akan membusukkan namanya. Bahkan, Presiden Soekarno menganjurkan agar segenap bangsa Indonesia, dan juga terhadap PNI agar tidak takut kepada komunis atau communisto phobia. Walaupun realitasnya PNI terkalahkan pengaruhnya oleh PKI.

Ulama di Tengah Upaya Peniadaan Communisto Phobia

Ulama dihadapkan pada problematika politik yang sangat rumit. Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tetapi pidato Menemukan Kembali Revolusi Kita, 17 Agustus 1959, disahkan oleh DPAS menjadi Manifesto Politik Republik Indonesia. Dari saat ini, mulailah dikembangkan istilah-istilah Marxisme Leninisme. Seperti istilah Manifesto Komunis Karl Marx, 1848 M, dipinjam untuk nama lain dari Menemukan Revolusi Kita. Ada apa dengan PKI?

Pengertian revolusi oleh Presiden Soekarno didefinisikan, reject yesterday and built tomorrow - meniadakan yang kemarin, membangun yang hari esok. Sebagai hasil revolusi, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa dan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Timbul pertanyaan, bagaimana cara Presiden Soekarno agar Pancasila dapat

diterima oleh PKI yang tidak mengenal Ketuhanan Yang Maha Esa dan agama? Apabila pengertian revolusi menolak yang kemarin - *reject yesterday,* Pancasila sebagai hasil revolusi ideologi harus diperbaharui pengertian lamanya dengan diperas menjadi Tri Sila. Kemudian, diperas lagi menjadi Eka Sila yakni Gotong Royong. Dengan demikian tidak terbaca lagi pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa secara tersurat.

Pemerasan Pancasila itu, menjadikan PKI D.N. Aidit tidak hanya dapat menerima Sang Merah Putih sebagai bendera negara dan bangsa Indonesia. PKI tidak lagi menyatakan bahwa Pancasila digunakan oleh PNI untuk membunuh pimpinan PKI di Madiun,1948 M. Akan tetapi, D.N. Aidit mengubah pernyataannya tersebut dengan menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Hanya alat, bukan filosofi dan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. PKI tetap tidak berubah, mempertahankan Marxisme Leninisme Maoisme sebagai landasan falsafahnya.

> Oleh karena itu, D.N. Aidit sebagai Sekjen Central Comite PKI, di depan peserta Pendidikan Kader Revolusi, 1964 M, menegaskan bahwa jika sosialisme sudah tercapai di Indonesia, Pancasila tidak lagi dibutuhkan sebagai alat pemersatu. Demikian penafsiran D.N. Aidit PKI terhadap Manipol Usdek dengan Pancasilanya.

Para Ulama diajak untuk menerima Manipol Usdek dan Nasakom. Bagi yang tidak dapat menerima ketiganya, dinyatakan sebagai kaum reaksioner atau agen Nekolim - Neo Kolonialisme dan Imperialisme. Diajak kembali ke tahun 1926 M adanya konsep pemikiran Ir. Soekarno tentang Nasakom. Jadi, beralih ke masa bangsa Indonesia sebelum mempunyai Pancasila 1 Juni 1945 atau 18 Agustus 1945.

ABRI Menolak Nasakomisasi ABRI

Dalam upaya pengembangan *Nasakomisasi* di kalangan TNI, desakan PKI tidak hanya mengartikan Nasakom sebagai ideologi. Melainkan dengan pengertian masuknya ketiga pimpinan Nasakom, terutama pimpinan PKI, menduduki pimpinan ABRI. Tentu, gagasan ini ditolak oleh pimpinan ABRI karena ABRI bukan parpol. Apalagi ABRI organisasi kesenjataan sebagai organisasi kerahasiaan.

> Adanya upaya penolakan ABRI terhadap Manipol, Usdek, Nasakom menurut

> pengertian PKI di atas, dan menurut D.N. Aidit pemikiran penolakannya adalah produk dari pengaruh Masjumi, PSI, PRRI, Darul Islam, dan Jenderal Nasution yang pura-pura setuju terhadap Manipol Usdek dan Nasakom. Rakyat diracuni oleh pikiran mereka ini semua, sebagai kaum reaksioner.

Presiden Soekarno mengingatkan kepada pimpinan PNI dan Partindo sesudah Kabinet Ali Sastroamidjojo II, menjadi mundur pengaruhnya diakibatkan kejangkitan penyakit Communisto Phobia - Takut Komunis. Diingatkan, oleh PresidenSoekarno:

> Saya tidak takut PKI. Saya tidak punya rasa takut kiri - leftist phobia. Saya dan PKI memang mempunyai banyak perbedaan, tetapi juga punya kesamaan pandangannya. Terutama dalam hal anti kolonialisme, anti imperialisme, dan kesamaan yang lainnya adalah perhatian terhadap nasib kaum buruh dan tani serta perjuangan membebaskan Irian Barat.
>
> Pada kesempatan lain, dalam Kongres X PNI, 28 Agustus - 1 September 1963 di Purwokerto, Presiden Soekarno menegaskan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia, yang intinya adalah Sosialisme Indonesia. Marhenisme macam inilah yang akan dijadikan dasar perjuangan.[19]

Pernyataan bahwa PKI anti imperialisme dan anti kolonialisme, sebenarnya Presiden Soekarno dengan sengaja melupakan fakta sejarah. Walaupun pidatonya menyebutkan Jasmerah – Jangan Sekali-kali melupakan sejarah. Tidakkah PKI Sibar pimpinan Sardjono dari Australia, bekerja sama dengan penjajah Keradjaan Protestan Belanda dan Sekoetoe? Dari Australia, PKI Sibar mencaci maki Soekarno Hatta sebagai kolaborator Fasisme Djepang.

Pada saat Proklamasi, PKI Sibar pimpinan Sardjono tidak membenarkan Indonesia Merdeka tanpa kerja sama dengan Keradjaan Protestan Belanda. Sekaligus Presiden Soekarno lupa pernyataannya sendiri pada saat PKI Amir Moeso melakukan Kudeta di Madiun, 19 September 1948, bahwa PKI teroris, dan Kudeta PKI sebagai tindakan menikam Republik Indonesia dari belakang yang sedang melawan Agresi Militer Belanda.

Demi melupakan sejarah, pimpinan PKI melalui Front Nasional mengadakan

19 Apabila menurut Presiden Soekarno, Marhenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia, besar kemungkinannya Marhenisme merupakan akronim dari Mar-Marxis, He-Hegel, En-Engel dan isme. Perlu penelitian.

aksi pemberian gelar kepada Presiden. Presiden Soekarno memasuki 1961 M menerima gelar serba agung. Pada 1 Januari 1961, memperoleh gelar Pemimpin Besar Revolusi, selain sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Pada 20 Januari 1961, diangkat pula sebagai Pemimpin Agung Front Nasional. Selain itu, Presiden Soekarno juga memperoleh *Lenin Peace Prize,* dinilai sebagai salah seorang tokoh pemimpin kemerdekaan Asia dan pejuang keras dalam menegakkan kemerdekaan serta memperkuat perdamaian dunia, untuk mengakhiri kekuatan imperialisme dan kapalisme Barat.

Pemanfaatan Kekuatan Barat dan Timur

Presiden Soekarno tidak hanya ingin dekat dengan PKI tetapi juga ingin dekat dengan negara-negara komunis. Dibukalah hubungan diplomatik dengan RRC, Rusia, Vietnam, Yugoslavia dan Kuba. Namun, dalam hubungan diplomatik ini, di satu pihak Presiden Soekarno seperti menampakkan dekat dengan Blok Timur: RRC, Rusia, dan Vietnam. Di lain pihak, Presiden Soekarno berjuang menciptakan Indonesia sebagai pengambil inisiatif lahirnya Negara-negara Non Blok.

> Ketika Presiden Soekarno membangun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, Soekarno-Hatta pernah disebut oleh Unisoviet Rusia dan PKI, sebagai *the agents of American imperialism* - agen imperialis Amerika Serikat dan *Parasites of the People* - benalu rakyat.

Presiden Soekarno juga berusaha mengenalkan ideologi Pancasila di negara-negara komunis. Di China, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Pancasila, Tri Silanya berasal San Min Chu I dari Sun Yat Sen. Pidato Presiden Soekarno di RRC ini bertujuan agar terjadi kesinambungan hubungan diplomatik yang harmonis antara Indonesia-RRC.

Presiden Soekarno memahami bahwa China di bidang ekonomi perniagaan di Indonesia sangat dominan. Demi untuk membatasi pengaruhnya, dikeluarkanlah PP 10/1959, pengusaha China di Indonesia tidak diperkenankan memiliki hak milik tanah dan wilayah usahanya hanya diperkenankan di ibu kota Provinsi. Tidak diperkenankan pula adanya koran atau media cetak lainnya yang menggunakan Huruf China dan Bahasa Mandarin.

Kemudian, pedagang China dari Kecamatan hingga Kabupaten dan Keresidenan,

dialihkan ke Provinsi. Di samping itu, dibenahi juga ketentuan hak dan kewajiban orang China yang memiliki Dwi Kewarganegaraan pada saat kedatangan Deputi Perdana Menteri Ch'en Yi.

Di sisi lain, Presiden Soekarno dalam upayanya menciptakan pembauran antara etnis China dengan Pribumi, melahirkan kebijakan yang bertujuan mengurangi perasaan one Chinese forever Chinese - sekali China tetap China, melarang penggunaan huruf China untuk penulisan penamaan toko, tempat usaha niaga lainnya.

Presiden Soekarno juga memahami adanya ketidaksamaan strategi pengembangan komunis di dunia antara Khrushchev atau Chrustjov dengan Mao Ze Dong atau Mao Che Tung. Guna memperlihatkan Politik Bebas Aktif dalam menghadapi negara-negara komunis maka dipilih pembelian senjata dari Rusia dan Cheko. Kemudian, Khrushchev diundang pula datang ke Indonesia, Februari 1960. Sementara itu, untuk Duta Indonesia di Rusia, bukan dari pimpinan PKI, melainkan diangkat Adam Malik dari kelompok komunis nasional Tan Malaka atau Partai Murba.

Presiden Soekarno memahami bahwa Ho Chi Minh dari Vietnam berpihak pada Unisoviet Rusia. Oleh karena itu, diundang ke Indonesia. Pada saat kedatangan Ho Chi Minh, D.N.Aidit pergi ke RRC karena pro China.

Di tengah konflik antarnegara komunis China dengan Rusia, dan Blok Barat Kapitalis Amerika Serikat dengan Blok Timur Komunis Rusia dalam Perang Dingin, Indonesia mengambil inisiatif mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Pertama Non Blok. Dari konferensi Beogard, Yugoslavia, 6 September 1961 yang dihadiri oleh: Afghanistan, India, Indonesia, Republik Arab Persatuan Mesir, dan Yugoslavia, diputuskan dalam menghadapi Perang Dingin, negara-negara berkembang tidak terseret dalam kedua blok: baik Blok Barat ataupun Blok Timur. Di samping itu, juga diputuskan agar tetap bersatu, dan agar berpengaruh dalam percaturan politik dunia.

Dalam kenyataan sejarah, negara-negara komunis juga terlibat dalam Perang Dingin, antarsesama komunis. Tidak mengira Khrushchev menghendaki pengembangan komunis dengan cara kerja sama dalam suasana perdamaian. Pandangan Khrushchev itu, ditentang oleh Mao Ze Dong menginginkan pengembangan komunisme dengan perang.

Agar pandangan Khrushchev berjalan di Rusia maka dibangkitkan gerakan meniadakan ajaran Stalin tentang pengembangan komunisme melalui perang. Gerakan tersebut disebut pula sebagai Destalinisasi. Dari fakta perjalanan sejarah ini, suatu ajaran ideologi tidak pernah sunyi dari perbedaan penafsirannya dan akhirnya mendatangkan perpecahan antarsesama penganut ajaran komunisme. Unisoviet Rusia, Vietnam, Kuba dengan RRC dan Korea Utara.

Demikian besarnya perhatian Presiden Soekarno terhadap negara-negara komunis. Namun, kurang waspada terhadap PKI D.N. Aidit dengan segenap sanjungan dan gelar yang diberikan kepada Presiden Soekarno. Ketika setiap organisasi dalam upayanya mendekatkan diri kepada Presiden Soekarno dengan memberikan gelar keagungannya, Presiden Soekarno mengingatkan bahwa dirinya adalah manusia biasa yang tidak luput dari tindakan yang salah.

Sumber: *Sinar Pelangi*

Letnan Djenderal Achmad Jani, Menteri/Panglima AD/ Ka Staf Koti
Presiden, PBR, Panglima Tertinggi Soekarno, Pangdam VI Siliwangi, Major Djenderal Ibrahim Adjie
Langkah kesatuan sejarahnya terpisahkan akibat G 30 S/PKI.

Disebutnya beberapa nama pemimpin dunia yang juga tidak dapat melepaskan dirinya dari kesalahan. Kecuali Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin dunia akhirat yang dimaksum dari kesalahan. Diingatkan pula, Pancasila bukan agama. Pancasila hanya ideologi bangsa dan negara. Pemakluman Presiden Soekarno tentang dirinya dan Pancasila itu karena ada sebagian kelompok organisasi, mencoba akan mengangkat Presiden Soekarno sebagai "Nabi agama Pancasila".

Sebaliknya, terdapat pula upaya pemberian gelar pemujaan dan keagungan, bertujuan pula "pembusukan nama baik Presiden Soekarno". Siapa perancangnya dan apa targetnya?

Target terselubung, PKI akan memproklamasikan dirinya sebagai the vangurad of Indonesia's democratic forces in the struggle for liberties and representative government - garda kekuatan demokrasi di dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan dan penegak pemerintahan yang representatif. Caranya dengan kudeta.

Kedekatan PKI terhadap Presiden Soekarno melahirkan pernyataan Presiden Soekarno agar segenap pimpinan partai politik tidak dihinggapi penyakit Communisto Phobia. Para Ulama memberikan tafsiran berbeda, memang Ulama tidak takut kepada PKI. Para Ulama dan Santri siap menjawab segenap tantangan PKI dan organisasi bawahannya. Dibahasakan dengan Fastabiqul Khairat - berlomba-lomba dalam kebaikan dalam menegakkan ajaran agama dan bela negara.

Kegagalan Konsep Kabinet Kaki Empat

Semula, Presiden Soekarmo ingin menciptakan Kabinet Kaki Empat, PNI, Masjumi, NU dan PKI seperti Empat Besar yang memperoleh kemenangan dalam Pemilu 1955. Namun, Konsepsi Presiden itu gagal, akibat ditolak oleh Masjumi. Dalam kelanjutan sejarah, Konsepsi Presiden melahirkan Demokrasi Terpimpin sebagai demokrasi tanpa oposisi, dan di dalamnya terdapat empat kekuatan yang saling beda kepentingan dan wawasannya: ABRI, NU, PKI, dan Murba.

Dari empat kekuatan tersebut, terbaca penciptaan sistem balance of power antara dua kekuatan, antara kekuatan bersenjata ABRI diimbangi dengan kekuatan partai politik, NU, PKI, dan Murba. Antara kekekuatan partai politik terbagi dalam dua kekuatan agama NU dan komunis PKI, Partai Murba. Demikian pula antar kekuatan komunis sendiri terimbangi, antara komunis internasional PKI dengan komunis nasional Partai Murba.

> Di kalangan Nahdliyin, timbul dua pendapat pro dan kontra menjelang dibentuknya DPR GR, 24 Juni 1960, dan MPRS, 15 Agustus 1960. Menurut Choirul Anam dalam Gerak Langkah Pemuda Ansor dari kalangan Nahdliyin yang kontra adalah K.H. Bishri Sjamsoeri, K.H. M. Dachlan, Mr. Imron Rosjadi dan K.H. Achmad Siddik.
>
> Sebaliknya, yang pro adalah K.H. Wahab Chasboellah, K.H. Maskoer, K.H. Idham Cholid, Zainoel Arifin, Saifoeddin Zoehri, dan K.H. Sjaichoe, alasannya kalau berada di luar justru tidak bisa melakukan kontrol dan amar ma'ruf nahi munkar. Apa alasan berikutnya?

Dijelaskan lebih lanjut, oposisi di luar lembaga, jelas tidak mungkin, dan dicap reaksioner dan dibubarkan. Lebih baik masuk dulu, lalu memanggil Dewan Partai bersidang. Kalau Dewan Partai memutuskan setuju masuk, Nahdlatul Ulama sudah di dalam. Namun sebaliknya, jika Dewan Partai tidak setuju, apa susahnya menarik keluar?

Gerakan Partai NU dalam mengimbangi gerakan *jor-joran* PKI, dijelaskan oleh K.H. Saifoeddin Zoehri tidak melupakan korban terbesar dampak dari Kudeta PKI di Madiun pada 19 September 1948 adalah para Ulama, Kiai, dan Santri dari warga Nahdliyin.

> Oleh karena itu, digariskan perjuangan perlawanan NU terhadap PKI dilancarkan di semua lini. Apabila PKI menggerakkan massanya, NU membangkitkan Ansor dan Bansernya. Apabila PKI menggerakkan Lekra, NU menjawab dengan Lesbuminya. Apabila PKI menyanyikan Lagu *Genjer-genjer*, NU mengobarkan *Salawat Badar* kecuali jika PKI ingin kudeta. Ulama tetap mempertahankan NKRI.

Konsep PKI Setan Desa dan Setan Kota

Untuk mempersiapkan kudeta, PKI melancarkan taktik *scapegoating* - pengkambing hitaman terhadap *the establishment* - golongan mapan. Mereka sebut sebagai kelompok setan desa dan setan kota. Para kiai dan haji serta Ulama yang memiliki sawah dan ladang mereka jadikan sasaran untuk melaksanakan *land reform*.

Para Kiai dan Ulama desa dijadikan sarana *scapegoating* oleh BTI. Dengan cara itu, menumbuhkan *sense of community* - rasa kebersamaannya di antara organisasi-organisasi di bawah PKI karena apabila kelompok dalam - *in group* sudah dihinggapi rasa *dislike* - tidak menyukai kelompok luarnya - *out group* maka mereka akan dengan mudah mengadakan *rumor* - kerusuhan terhadap lawannya.

Di bawah kondisi konflik dan kerusuhan ini, menurut Gottschalk akan menumbuhkan *mutual awareness* - kesadaran bersama dan dijadikan sebagai *symbols of inclusiveness* - simbol kelompok senasib. Di antara sesama pengurus organisasi di bawah PKI dalam menumbuhkan rasa senasib - *inclusiveness*, selalu memanggilkan sesamanya dengan panggilan *comrade* - kawan.

Dari sini dikembangkan tumbuhnya *solidified public opinion* - solidaritas pendapat umum di antara kelompok organisasi di bawah PKI. Berangkat dari *feeling of belonging* - rasa saling memiliki, ditumbuhkan rasa *feeling of cohesion* - rasa keterpaduan dan *group worthiness* - rasa saling menghargai sesama kelompok dalam

- in group. Rasa ini akan terbentuk apabila seluruh organisasi mantel PKI, memiliki kesamaan lawan - common enemy.

Kemudian, dibenturkan dengan kelompok luar dengan aksi sepihak. Dengan cara BTI, Pemuda Rakyat, Gerwani, memberanikan diri mengklaim tanah milik Perusahaan Perkebunan Negara - PPN di Kediri, 1961 M, untuk dibagi di antara mereka. Aksi sepihak ini disebut sebagai Peristiwa Jengkol, November 1961.

Sumber: Doc. Pribadi

PERTEMUAN PERSIAPAN
AFRIKA ASIA ISLAMIC CONFERENCE
6-14 Juni 1964 JAKARTA

Terlihat di sebelah kiri tertulis Pantjasila
Di sebelah kanan teks dan penandatangan Piagam Djakarta

Mengapa nama konferensinya tidak Asia Africa Conference
melainkan AFRICA ASIA CONFERENCE? Sangat berbeda dengan
17 Konferensi Asia Afrika lainnya? Apakah karena pengaruh komunis
tidak ada di dalamnya?

Latihan melakukan tuntutan disertai dengan kekerasan - violence dalam conflict theory, memang dibuat dengan sengaja oleh pimpinan PKI sebagai prepetrator - dalang kerusuhannya. Ditumbuhkan self assertion - dalam mengekspresi tuntutan diyakini benar menurut pendapatnya.

Para santri Pesantren Lirboyo, Banser dan Ansor, melakukan perlawanan terhadap Aksi Sepihak BTI, Pemuda Rakyat dan Gerwani yang terdiri dari sekitar 3.000 orang. Pada waktu itu, umumnya tumbuh rasa takut dalam menghadapi demo kekuatan dari orang-orang PKI. Tidaklah demikian halnya dengan sikap Ulama dan Santri, dihadapinya dengan rasa tawakal dan dilawannya secara fisik. Banser, Ansor di bawah pimpinan Kiai, tidak ada rasa takut atau gentar terhadap BTI, Pemuda Rakyat atau PKI.

Akibat Aksi Sepihak PKI mendatangkan korban, menjadikan Komadan Resimen 16 Letnan Kolonel Soekartijo, membekukan PKI, BTI, Gerwani dan Pemuda Rakyat setempat. Kegagalan ini dieksploitasi untuk menumbuhkan rasa *discontent* - rasa ketidakpuasan. Dengan rasa ketidakpuasan, mereka akan lebih sadar jadi *different* - beda dengan kelompok luar - *out group*, yakni Islam danTNI. Dari rasa ketidakpuasan dan merasa beda, akan diubahnya menjadi gerakan *anti Islam* dan *anti militerisme*.

Infiltrasi dan Demoralisasi Militer

Menurut Stefan T. Possony, dalam *A Century of Conflict*, menjelaskan *anti militerisme* tidaklah sejalan artinya dengan gerakan *pasifism* - perdamaian yang dipropagandakan oleh komunis. Militer dalam pandangan komunis, dinilai sebagai *the army is the most powerful instrument of class oppresion* - militer sebagai instrumen yang sangat kuat yang dimiliki oleh kelas penguasa.

Oleh karena itu, upaya kudeta komunis selalu gagal, apabila komunis belum berhasil melakukan *infiltrasi* dalam organisasi militer. Revolusi tidak akan menjadi gerakan massa apabila tanpa ada campur tangan militer di dalamnya. Untuk menarik tentara resmi bergabung kepada kelompok revolusioner komunis, di kalangan penjabat militer diciptakan kondisi *demoralization* - demoralisasi.

Demoralization dalam bahasa Jerman diistilahkan dengan *Zersetzung* artinya menjadikan organisasi militer pecah berantakan atau *dekomposisi*. Terbagi dalam dua cara: *Pertama*, *Zersetzung Aparat* - memecah belah aparat militer. *Kedua*, *Terror Apparat* - memecah belah dengan melalui teror. Kedua-duannya *Z and T Apparat* merupakan *powerful combination* - kombinasi yang sangat ampuh dalam upaya mengubah tentara resmi berpihak kepada gerakan revolusi komunis. Mengapa kudeta komunis perlu kesertaan tentara?

Dalam realitas sejarah, tidak ada suatu revolusi dari golongan manapun, tanpa dipimpin oleh kalangan *intelektual* dan *militer*. Hampir tidak ada pemberontakan petani atau gerakan revolusi di tingkat desa sekalipun, dipimpin oleh petani - *almost no peasant war or rural revolutionary movements have been led by peasants.*

Sumber: Doc.Pribadi

PEMBUKAAN
AFRICA ASIA ISLAMIC CONFERENCE
6-15 Maret 1965
BANDUNG

Namanya tetap sama dengan AFRICA ASIA
seperti dalam Persiapan Pertemuan AAIC 6-14 June 1964
di Jakarta, bukan ASIA AFRICA
Di sebelah kiri bertuliskan Pancasila di sebelah kanan Piagam Jakarta.

KIAA atau AAIC
sebagai imbangan persiapan Ulang Tahun Dasa Warsa 1955-1965 Konferensi Asia Afrika II
yang akan diselenggarakan di Aljazair Afrika Utara Juni 1965

Dengan tujuan utamanya membangkitkan kesadaran umat Islam
di benua Afrika agar mempunyai kesamaan kesadaran
anti imperialisnya dengan umat Islam Asia.

Dengan kata lain, menurut Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel, pimpinan revolusi jarang sekali terlahir dari kelas terbawah - seldom emerge from the lowest classes. Gerakan revolusi munculnya higher classes - kelompok atas berpartisipasi di dalamnya. Misalnya Mao Ze Dong pernah mendapat pelatihan militer dan pelatihan pengorganisasian sebelum memimpin Revolusi China.

Aksi Teror PKI terhadap Mental Training PII

Teori komunis itu dipraktikkan oleh PKI dengan organisasi bawahnya Sobsi, Gerwani, BTI, dan Pemuda Rakyat. Gerakan *anti militerisme* diwujudkan dalam gerakan melawan personil tentaranya di Indramayu dan Bandar Betsi Sumatra Utara. Untuk membalas kekalahan dari Peristiwa Jengkol Kediri November 1961, diulang dengan melancarkan teror terhadap Pelajar Islam Indonesia - PII yang sedang menyelenggarakan Mental Training, di desa Kanigoro, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri Jawa Timur.

Menurut Djayadi Hanan dalam *Gerakan Pelajar Islam, Di Bawah Bayang-Bayang Negara, Peristiwa Kanigoro* ini terjadi pada waktu subuh 9 Ramadhan 1365, Rabu Kliwon, 13 Januari 1965, ribuan Pemuda Rakyat, BTI, memaksa PII bersama santri serta kiai, keluar dari masjid. Kemudian masjid dirusak dan Al-Quran diinjak-injak. Sambil kelompok teroris tersebut meneriakkan kata ancaman: "Bunuh! Ganyang! Hidup PKI! Ganyang Malaysia! Gorok Balas Madiun!" Selain itu juga diteriakkan, "Ganyang Sorban, Ganyang Santri, Ganyang Nekolim!" Dari teriakan ini memberikan gambaran siapa yang dikambinghitamkan – *scapegoating* oleh PKI. Dapat dipastikan targetnya adalah Ulama dan Santri.

Gerakan penyerangan ini, menurut Anis Abiyoso, digerakkan oleh Nyoto dari *Central Commite* PKI. Sekali lagi, tidak mungkin terjadi pemberontakan petani desa dipimpin oleh petani desa - *almost no peasants war or rural revolutionary have been led by peasants*. Selain itu, sehari sesudah Peristiwa Kanigoro, pada 14 Januari 1965, *Central Commite* PKI Aidit mengusulkan 15 Juta massa Tani dan Buruh Dipersenjatai kepada Presiden Soekarno di Istana Negara.

Diberitakan lebih lanjut, dengan dipersenjatainya BTI dan Sobsi akan dibentuk Angkatan Ke-5 dalam menandingi ABRI Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polisi, yang memperoleh senjata pembelian dari Rusia. Adapun senjata untuk Angkatan Ke-5 diperoleh secara cuma-cuma dari Perdana Menteri RRC Chu En Lai, sebanyak 100.000 pucuk senjata. Menurut Soeharto, dalam *Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, menjelaskan bahwa seluruh Angkatan menolak pembentukan Angkatan Ke-5. Kecuali pimpinan AURI, Oemar Dhani menyetujuinya.

> Menghadapi kenyataan ini, para Ulama dan Santri, tidak mungkin memperoleh senjata sebanyak yang dimiliki oleh PKI. Negara-negara Arab dan Timur Tengah yang sedang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Inggris, tidak mungkin mau membantu mempersenjatai Ulama dan Santri, untuk menghadapi PKI yang akan dipersenjatai oleh RRC. Amerika Serikat khawatir targetnya berbalik untuk melawan Inggris dan kekuatan Nekolim lainnya.

Sumber: Doc. Pribadi

K.H. ACHMAD SJAICHU

Sekretaris Organizing Commite
Konferensi Islam Afrika Asia

DR. K.H. IDHAM CHALID

Ketua Organizing Committee
Konferensi Islam Afrika Asia

Menurut Choirul Anam dalam Gerak Langkah Pemuda Ansor, menghadapi gerakan teror Pemuda Rakyat dan BTI yang bersenjata, segera diturunkan delapan truk Pemuda Ansor dan Banser yang telah dilatih ilmu kekebalan untuk menyelamatkan Kiai dan Santri serta umat Islam pada umumnya. Cara yang dipilih oleh Ansor dan Banser dengan menumbuhkan self confidence - percaya diri melalui ilmu kekebalan, menjadikan BTI, Pemuda Rakyat, walaupun dikabarkan memiliki senjata dari RRC, benar-benar ketakutan.

> Peristiwa Kanigoro dengan Aksi Teror dalam pandangan PKI sebagai Kredit Aksi dan proses mencapai tujuan puncaknya kudeta. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Presiden Soekarno ketika terjadi Kudeta PKI di Madiun bahwa PKI melancarkan aksi teror. Mengapa harus menempuh cara ini?

Menurut Kropotkin dampak dari Aksi Teror bila telah meluas akan menjadikan massa rakyat kehilangan orientasinya dan cemas - mass disorientatation and anxiety. Dari situasi rakyat yang dipenuhi rasa takut maka PKI akan tampil sebagai "pahlawan pembela buruh dan tani" atau rakyat pada umumnya.

PJM Presiden SOEKARNO Dan Ibu Negara FATMAWATI

Memasuki Gedung Merdeka KAA

Sumber: Tempo - Edisi Khusus HUT Ke 60 KAA
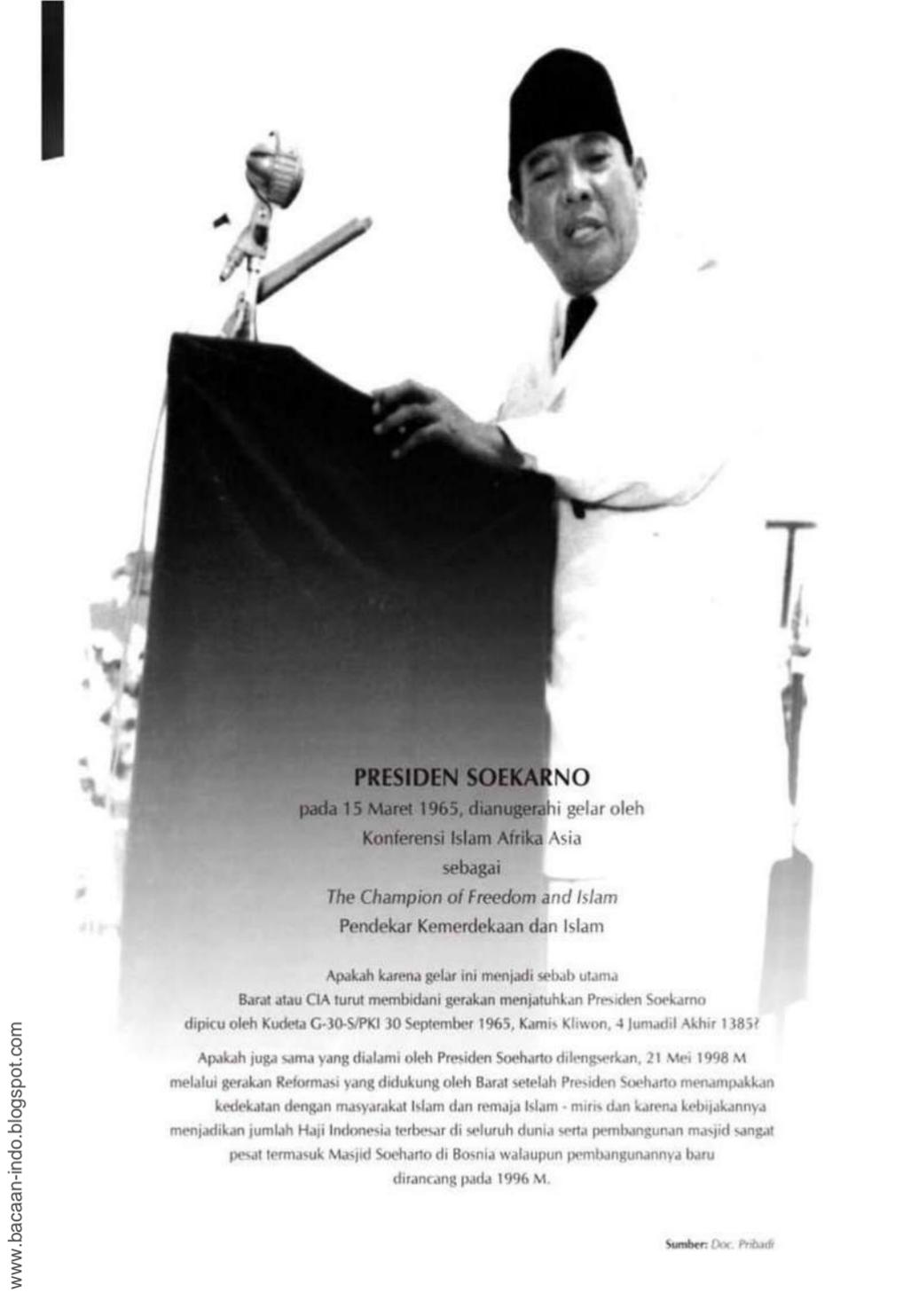
PRESIDEN SOEKARNO
pada 15 Maret 1965, dianugerahi gelar oleh
Konferensi Islam Afrika Asia
sebagai
The Champion of Freedom and Islam
Pendekar Kemerdekaan dan Islam

Apakah karena gelar ini menjadi sebab utama
Barat atau CIA turut membidani gerakan menjatuhkan Presiden Soekarno
dipicu oleh Kudeta G-30-S/PKI 30 September 1965, Kamis Kliwon, 4 Jumadil Akhir 1385?

Apakah juga sama yang dialami oleh Presiden Soeharto dilengserkan, 21 Mei 1998 M
melalui gerakan Reformasi yang didukung oleh Barat setelah Presiden Soeharto menampakkan
kedekatan dengan masyarakat Islam dan remaja Islam - miris dan karena kebijakannya
menjadikan jumlah Haji Indonesia terbesar di seluruh dunia serta pembangunan masjid sangat
pesat termasuk Masjid Soeharto di Bosnia walaupun pembangunannya baru
dirancang pada 1996 M.

Sumber: *Doc. Pribadi*

Mengapa Mental Training PII dijadikan target *political violence* dari PKI. Tidak lain, pada 23-25 Agustus 1963, PB PII dibawah pimpinan Ketua Umum, Ahmad Djuwaeni, mengadakan diskusi terbatas. Kesimpulannya rezim Demokrasi Terpimpin di bawah cengkeraman komunis. Untuk menghadapinya dibentuk Brigade PII dan kerja sama dengan perwira Angkatan Darat yang anti komunis.

Konferensi Islam Afrika Asia

Dalam menanggapi semakin terbukanya aksi sepihak PKI dan semakin jelasnya dukungan Unisoviet dan RRC terhadap PKI, para Ulama mencoba menandinginya dengan mengadakan Konferensi Islam Afrika Asia, 4-11 Dzulqaidah 1384/8-15 Maret 1965 di Bandung. Diharapkan timbulnya solidaritas Islam Afrika Asia agar Islam Indonesia terselamatkan dari bencana imperialisme dan penindasan komunisme.

Selain itu, melalui Konferensi Islam Afrika Asia, diangkatlah Presiden Soekarno sebagai *the Champion of Freedom and Islam* - Pendekar Kemerdekaan dan Islam. Dari kebijakan Presiden Soekarno, diadakannya Konferensi Islam Afrika Asia, bertujuan menggalang kesatuan Islam Afrika Asia dalam menghadapi imperialis Barat. Sekaligus dengan gelar tersebut, bertujuan secara politis untuk membantah tuduhan bahwa dirinya PKI. Melainkan sebagai Muslim.

Kemusliman Presiden Soekarno, juga diperlihatkan oleh Rektor Universitas Muhammadijah, Sutjipto SH, Brigadir Djendral TNI, dan Sekretaris Senat, Drs. H. Sadad Siswowidjojo, menganugerahkan kepada Dr. Ir. Soekarno, gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Falsafah Ilmu Tauhid, pada 5 Rabi'ul Akhir 1385, 3 Agustus 1965, di Djakarta.

> Perlu diperhatikan, mengapa ketika Konferensi Islam berubah menjadi Afrika Asia. Tidak seperti Konferensi Asia Afrika. Apakah hal ini diakibatkan kondisi negara-negara Timur Tengah di bawah pengaruh Amerika dan Inggris, tidak bersedia bergabung dalam Konferensi Islam Afrika Asia yang dituduh berhaluan kiri? Sementara benua Afrika yang telah banyak umat Islamnya, dan banyak negaranya yang belum merdeka, dengan penamaan Afrika Asia, dengan mengedepankan Afrika agar bersedia bergabung dalam gerakan negara-negara Asia. Oleh karena itu, lebih diutamakan menjadi Konferensi Islam Afrika Asia daripada Konferensi Islam Asia Afrika.
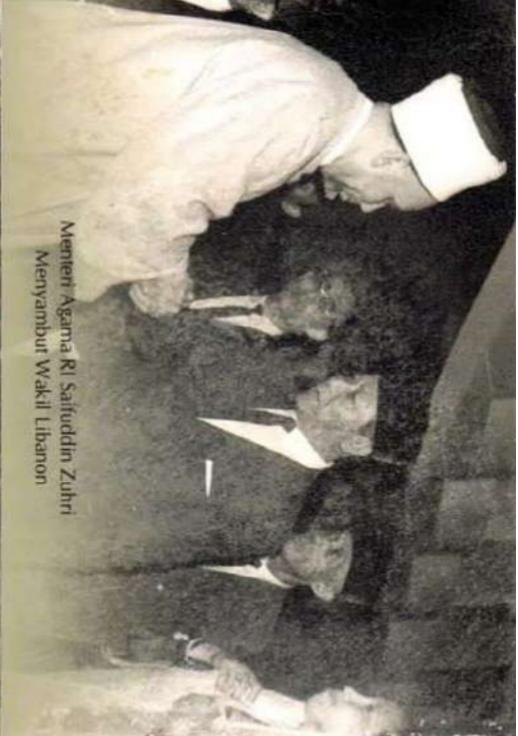
Menteri Agama RI Saifuddin Zuhri
Menyambut Wakil Libanon
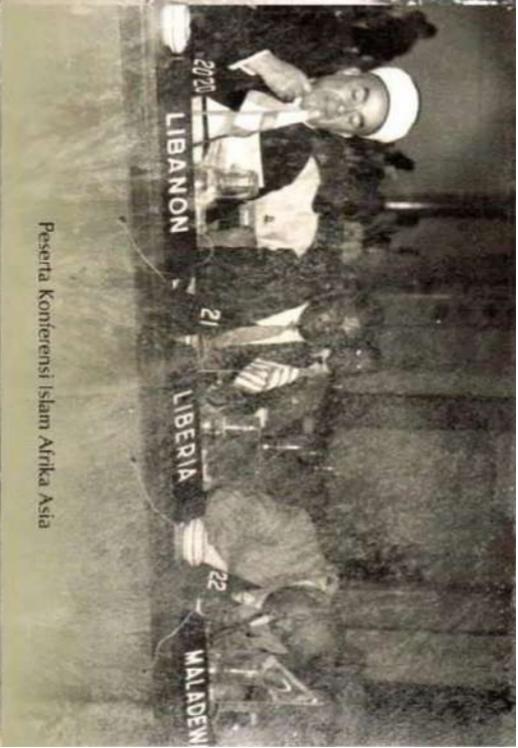
Peserta Konferensi Islam Afrika Asia

KONFERENSI ISLAM AFRIKA ASIA
8 - 15 Maret 1965 di Gedung Merdeka, Bandung
(Gedung Concordia, tempat National Congres Centraal Syarikat Islam, 16 - 24 Juni 1916)
(Baca API SEJARAH Jilid Kesatu)

Peserta Konferensi Islam Afrika Asia

Secara politis, maksudnya Konferensi Islam Asia Afrika, tidak akan mendapat dukungan dari negara-negara komunis di Asia, terutama RRC karena Islam akan mengancam eksistensi ideologi komunisme. Menurut penulis, strategi dasar perubahan nama konferensi ini, Konferensi Islam Afrika Asia, agar KIAA menjadi pendukung dan pengimbang, rencana Ulang Tahun Ke-10 Konferensi Asia Afrika - KAA yang akan diselenggarakan di Aljazair, Afrika Utara.

Selubung Politik Presiden Soekarno

Louis Fisher dalam *The Story of Indonesia* menuturkan tentang Presiden Soekarno digambarkan sebagai seorang pemain judi yang menekankan kartunya di dadanya sehingga lawan pemain judinya tidak mengetahui kartu apa yang dipegang oleh Presiden Soekarno. Dituturkan pula Presiden Soekarno sebagai "pawang politik", membiarkan binatang-binatang buas berada di dekatnya.

> Maksud penggambaran itu, pikiran politik Presiden Soekarno tidak mudah untuk diduga. Dituduh pendukung Blok Timur Komunis, tetapi Presiden Soekarno membangun Non Blok dan Konferensi Islam Afrika Asia mengangkatnya sebagai *the Champion of Freedom and Islam* – Pendekar Kemerdekaan dan Islam.
>
> Demikian pula Presiden Soekarno menampilkan dirinya dekat dengan D.N. Aidit padahal PKI selalu siap akan melancarkan kudeta menumbangkan dirinya. Presiden Soekarno seperti pawang politik yang dapat menjinakkan lawan politiknya. Kecuali lawannya yang bersikap terbuka dan jujur, Masjumi dan PSI, justru ditangkap dan dipenjarakan di Rumah Tahanan Militer di Madiun.
>
> Presiden Soekarno menyatakan dirinya semakin lama semakin cinta Muhammadiyah. Namun, Presiden Soekarno sangat dekat pula dengan Ulama Tasawuf serta Ulama dari Nahdlatul Ulama.
>
> Presiden Soekarno dekat dengan Dr. Leimena dari Parkindo tetapi juga dekat dengan I.J. Kasimo dari Partai Katolik. Tidak dapat diragukan lagi, kedekatan Presiden Soekarno dengan Pedanda Hindu Bali.
>
> Selain itu, Presiden Soekarno berani mengangkat pimpinan PKI menempati posisi yang strategis, Front Nasional dan pimpinan MPRS. Demikian pula Samaoen pendiri PKI, 23 Mei 1920 di Semarang, setelah kembali dari Rusia, 1956 M, diangkat sebagai Penasihat Demokrasi Terpimpin. Dengan cara ini, benarkah Presiden Soekarno berhasil menjinakkan pimpinan PKI di bawah payung Demokrasi Terpimpin apabila realitasnya melancarkan Kudeta G-30-S/PKI?

Front Anti Komunis

Kembali ke masalah sikap umat Islam terhadap PKI. Jauh sebelum Konferensi Islam Afrika Asia - KIAA ini pada 12 September 1954, Ahad Wage, 14 Muharram 1374, sebelum Pemilu 1955, di Kantor DPD Masjumi Jawa Barat, Jalan Pungkur Bandung[20], atas prakarsa K.H. M. Rusyad Nurdin, menuturkan kepada penulis, untuk menghadapi dihidupkannya kembali PKI setelah Kudeta PKI di Madiun, Partai Islam Indonesia Masjumi merasa perlu membentuk Front Anti Komunis - FAK.

Prakarsa K.H. M. Rusad Nurdin ini mendapat dukungan dari Ulama Madjelis Sjura Masjumi Jawa Barat dalam konferensinya 23-24 Oktober 1954, Sabtu Kliwon - Ahad Legi, 2526 Safar 1374, diputuskan Front Anti Komunis - FAK agar dikembangkan di seluruh Indonesia. Berikutnya, Front Anti Komunis pindah ke Jakarta yang dipimpin oleh K.H. M. Rusyad Nurdin, beralih dipimpin oleh K.H. M. Isa Anshary. Dalam hubungan keluarga, K.H. Isa Anshary sebagai paman D.N. Aidit.

Menurut Drs. Ii Baihaqi Mustafa, Ak. M.M. dalam K.H. M. Rusyad Nurdin, Ulama, Pejuang, Politikus, Pemimpin Demokrat, Pendidik, dan Pendakwah, menjelaskan tujuan pembentukan Front Anti Komunis sebagai jawaban Partai Islam Indonesia Masjumi terhadap PKI partai politik yang anti Tuhan dan anti agama, serta menentang Pancasila dan UUD 1945.

> Pembentukan Front Anti Komunis – FAK sebenarnya sebagai peringatan bagi yang lupa, betapa bahayanya ajaran Marxisme dan Leninisme terhadap demokrasi Indonesia, serta ideologi Pancasila dan UUD 1945. Namun, peringatan Partai Islam Indonesia Masjumi justru dijawab oleh Konsepsi Presiden Soekarno, 21 Februari 1957, Kabinet Kaki Empat. Setelah Dekrit Presiden memberikan kesempatan kepada PKI untuk menghidupkan Front Nasional, 31 Desember 1959, seperti yang pernah dibangun oleh PKI pada masa Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948.

---

20 Sebuah rumah wakaf dari Tn. Hamid sahabat dekat Tn. A. Hassan dan Mohammad Natsir. Rumah tersebut semula difungsikan sebagai Kantor DPD Masjumi dan GPII. Setelah Partai Islam Indonesia Masjumi dibubarkan menjadi Kantor DPD Parmusi. Setelah Parmusi ditiadakan, berubah menjadi Kantor Dewan Dakwah Islam Indonesia - DDII. Setelah Reformasi menjadi Kantor DPD Partai Bulan Bintang. Ketika terdengar berita, rumah tersebut akan dijual dijadikan toko, terjadilah protes keras dari keluarga Tn. Hamid. Diingatkan diwakafkan untuk kepentingan sosial Islam, bukan kepentingan bisnis. Protes keras tersebut membatalkan niat penjualan.

Setahun kemudian, setelah Dekrit Presiden, pada 17 Agustus 1960, Rabu Kliwon, 24 Safar 1380, Presiden Soekarno didampingi Penguasa Perang Tertinggi Djenderal Abdul Haris Nasution, membubarkan Partai Islam Indonesia Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia. Diikuti dengan penangkapan pimpinan Front Anti Komunis dan pimpinan utama kedua partai politik tersebut, serta pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia, untuk dipenjarakan di Rumah Tahanan Militer Malang dan Madiun.

Dampak penangkapan para Ulama itu hanya dalam waktu lima tahun, Djenderal Abdul Haris Nasution, menyaksikan secara langsung bahwa dirinya dijadikan target sasaran Kudeta Gerakan 30 September PKI dan TNI kehilangan perwira terbaiknya.

Sumber: *Doc. Pribadi*

K.H. ISA ANSHARY dan MOHAMMAD NATSIR

K.H. Isa Anshary adalah Ketua Front Anti Komunis yang menentang ideologi komunis yang diperjuangkan keponakannya sendiri, D.N. Aidit. Tampak dalam gambar, K.H. Isa Anshary (kiri) bersama Mohammad Natsir (kanan) di antara para pemuda anggota dan aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia - G.P.I.I di Lapang Tegallega Bandung.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

PRESIDEN SOEKARNO DAN D.N. AIDIT, KETUA PKI

Ir. Soekarno, menulis artikel, berhubungan dengan tulisan Ir. A. Baars, di Suluh Indonesia Muda, 1928 M, tentang peringatan Ir. A. Baars sebagai salah seorang kawan Sneevliet, penyebar benih Marxisme di Indonesia, yang berbalik menentang komunisme.

Dituliskan setelah Ir. A. Baars dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia lagi, Ir. A. Baars bekerja lama di Rusia. Tetapi berubahlah pandangannya terhadap komunisme, menjadi berbalik menentang komunisme. Sikap penentangan ini dituliskan dalam surat kabar, S.I.D. de Preangerbode dan Surabajaasch Handelsblad.

Diingatkan berkali-kali, antara lain,
djanganlah kita mendekati komunisme itu.
Apa jang dialaminja, di Rusia hanjalah kekalutan dan kesengsaraan sahaja.

Andaikata Presiden Soekarno membenarkan peringatan Ir. A. Baars di atas, mungkinkah Presiden Soekarno mau menerima rangkulan D.N. Aidit PKI yang akan menjatuhkannya dan membusukkan kebesaran namanya.

Apabila dijauhinya PKI, dan mendekati kembali Ulama sebagaimana sebelum dan sesudah Proklamasi, jalan sejarah Presiden Soekarno dan bangsa Indonesia akan selalu memperoleh rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Konfrontasi Indonesia Malaysia dan Kudeta PKI

Kelanjutan kedekatan Presiden Soekarno dengan Aidit PKI melahirkan Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Mengapa, padahal masalah Irian Barat telah teratasi, kemudian membuka konfrontasi dengan saudara serumpun Melayu? Menurut program komunis, *war is the road to communist revolution* - perang adalah jalan menuju revolusi komunis. RRC juga tidak menyetujui pembentukan *Maphilindo* - Malaysia, Philipina, Indonesia yang dirasakan akan menghadang perkembangan RRC. Oleh karena itu, lebih setuju Konfrontasi dengan Malaysia dilanjutkan.

Menurut Stefan T. Possony dalam *A Century of Conflict*, menyatakan bahwa komunis mempunyai strategi yang disebut *vulture strategy* artinya strategi seperti *a person who seeks benefit or profit from the troubles or sufferings of others* - orang yang mencari keuntungan atau laba dari kesulitan atau penderitaan orang lain. Dengan kata lain, mengail di air keruh. Mengapa dan bagaimana?

> Tidakkah Revolusi Oktober 1917 dilakukan pada saat Tsar Nicolas II Rusia terlibat dalam Perang Dunia I, 1914-1919 M. Tidakkah Komunis Perancis melancarkan revolusinya di tengah Perancis menghadapi kesulitan dalam Perang Dunia II, berupaya menumbangkan pemerintahan Vichy buatan Jerman. Tidakkah RRC berhasil dibangun, sejak pemerintahan Chiang Kai Shek mengalami kesulitan dalam Perang Asia Timur Raya, 1941-1945 M?
>
> Bertolak dari pengalaman sejarah ini, PKI akan memanfaatkan kekeruhan situasi Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan akan dimanfaatkan seperti saat Indonesia menghadapi Agresi Belanda Pertama, 21 Juli 1947, kemudian digunakan untuk menikam Republik Indonesia dari belakang, dengan melancarkan Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948.

Terbukti saat berlangsungnya Dwi Komando Rakyat - Dwikora, dengan dibentuknya Komando Mandala Siaga, pada 16 Mei 1964, di bawah Komando Men/Pangau Laksamana Madya Udara Omar Dhani, dimanfaatkan mengubah Jakarta sebagai "ibu kota komunis". Dihiasi dengan gambar Karl Marx, Lenin, Stalin serta bendera Palu Arit, pada ulang tahun ke-45, hari jadi PKI 23 Mei 1920-1965 sehingga lenyaplah kesan di Bandung atau Jakarta, pernah ada Konferensi Islam Afrika Asia 8-15 Maret 1965 yang dipimpin oleh K.H. Idham Chalid dan K.H. Achmad Syaichu. Demikian pula seluruh kota besar di Pulau Jawa, dipenuhi poster, spandoek, nasaKOM, dituliskan KOM lebih besar daripada nasa.

Apa yang diperoleh dengan kedekatan PKI dengan Men/Pangau Laksamana Madya Udara Omar Dhani, dapat dilihat nantinya ketika terjadi penculikan dan pembunuhan Jenderal Angkatan Darat di Lubang Buaya. Kedekatan PKI merupakan tahapan the military preparation - persiapan militer dalam menjalankan tactics of communist insurrection - taktik pemberontakan komunis. Persiapan yang diwujudkan show of force dalam Ulang Tahun Ke-45 PKI, guna menumbuhkan self confidence to revolutionaries - semakin percaya diri bagi seluruh pelaku revolusi.

Dari 23 Mei menuju September 1965, PKI punya sisa waktu tinggal 4 bulan menuju hari Kudeta 30 September 1965. Apakah mungkin kudeta tanpa ikut sertanya militer? Untuk keperluan ini, menurut Manai Sophiaan sudah disiapkan sebelumnya Syam Komaruzaman dari SOBSI dikirimkan oleh Aidit ke RRC untuk mempelajari soal-soal pemanfaatan tenaga militer dalam revolusi atau kudeta.

Sekembalinya dari RRC diangkat menjadi pimpinan Komite Militer. Mengapa dan untuk apa? Menurut Lenin bahwa the uprising should be prepared both politically and military - pemberontakan perlu dipersiapkan dengan kedua-duanya, politik dan militer. Mengapa persiapannya, PKI mendekati pimpinan AURI dalam persiapan kudetanya?

Stalin mengingatkan bahwa the victory of revolution never comes by itself - kemenangan revolusi tidaklah datang dengan sendirinya. It must be prepared for and won - Melainkan harus dipersiapkannya dan harus mencoba untuk memperolehnya. Diingatkan perang tidak dapat dihindari. Lalu, bagaimana caranya agar memperoleh dukungan dari kalangan militer?

Tentara revolusi - the revolutionary army menurut Lenin, terdiri dari organisasi buruh dan tani. Itulah sebabnya Syam Komaruzaman dari SOBSI, pergi ke RRC untuk mempelajari bagaimana membina the revolutionary army dari organisasi buruh dan tani.

Dengan cara infiltrasi administrasi, ekonomi dan ke dalam struktur militer, dengan target menjadikan the government army - tentara resmi pemerintah, berfungsi sebagai is the key to revolution - kunci pendukung revolusi. Dari sini, revolutionary army is the key to revolutionary success - tentara revolusi menjadi kunci kesuksesan revolusi. Kesuksesan ini hanya diperoleh karena melalui perlawanan, pengaruhnya parts of the government army are meshed into the revolutionary organization - menjadikan bagian-bagian tentara resmi pemerintah, terbawa ke dalam gerakan organisasi revolusi. Dampak lanjutnya a revolutionary army emerges - muncullah tentara revolusiner.

Di sisi lain, diupayakan pula infiltrasi dengan tujuan, *the government army must be disintegrated* - tentara resmi harus dijadikan berantakan dispilinnya karena revolusi harus dilaksanakan oleh organisasi kesenjataan - *the revolutionaries must build a military organization* yang sejalan dengan gerakan buruh dan tani. Ditanamkan keyakinan bahwa *there is no salvation for them, except through alliance with the revolutionary proletariat* - tidak ada penyelamat bagi organisasi-organisasi non komunis kecuali bergabung dengan gerakan revolusiner proletar, akan memperoleh kemenangan.

Bertolak dari doktrin pemberontakan komunis itu, dan didukung dengan adanya pembelian senjata dan pesawat serta obat-obatan dari Rusia maka proses infiltrasi PKI ke sebagian pimpinan AURI, Omar Dhani, menemukan jalan yang mudah. PKI mendapatkan prioritas penggunaan lapangan Halim dijadikan tempat latihan militer "sukarelawan PKI, pemuda, buruh, tani, Gerwani" dan dekatnya di kebun karet terdapat sumur mati di Lubang Buaya, sebagai tempat yang dipersiapkan untuk penculikan dan pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat.

PKI mempercepat proses kudetanya, tidak hanya karena Presiden Soekarno mulai menurun kesehatannya, Juli-Agustus 1965. Dan adanya isu Dewan Jenderal dari Dokumen Gilchrist, 15 Mei 1965, di kalangan Angkatan Darat. Namun, PKI juga memperhitungkan bahaya solidaritas Muslim setelah Konferensi Islam Afrika Asia, 8-15 Maret 1965. Mengapa?

Aksi Sepihak PKI yang dicoba di Jawa Timur selalu dipatahkan oleh Banser dan Ansor dari Nahdlatul Ulama. Masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah, yakin Banser dan Ansor walaupun hanya bersenjatakan tongkat rotan, tetapi diyakinkan akan menjadi kebal dari peluru senjata PKI. Bersikap sangat berani berhadapan dengan massa PKI.

Apa jadinya jika K.H. Dr. Idham Chalid dan K.H. Achmad Sjaichu berhasil membangkitkan solidaritas Muslim Afrika Asia, pasti tidak akan ada upaya PKI yang menemui kesuksesan. Perang Dingin akan beralih dari Blok Barat dengan Blok Timur menjadi antara Kaum Muslim dengan Kaum Komunis. Hal ini tidak hanya akan dihadapi oleh PKI saja, tetapi Rusia, RRC, dan negara sosialis lainnya akan berhadapan dengan negara-negara Islam.

Apalagi situasi dalam negeri, ABRI telah membina Badan Kerja sama Ulama Militer, Badan Kerja sama Pemuda Militer, Badan Kerja sama Wanita Militer dan lain-lainnya. Sedangkan dalam badan kerja sama ini, Banser dan Ansor sejalan dengan ABRI yang anti komunis.

LAMBANG PERSJARIKATAN MOEHAMMADIJAH

Situasi perubahan ini menjadikan PKI berupaya menutupi kelemahannya dengan unjuk kekuatan - show of force dan berupaya menciptakan organizational vitality dengan cara mengadakan seleksi yang sangat hati-hati dalam menerima keanggotaan - careful selection of members, disiplin penuh - full discipline, ketaatan yang mutlak - absolute obidience.

Dalam menghadapi kekuatan militer non komunis, menurut Selznick misi utama dari the communist armed forces is to defeat the armed forces of the non communist powers - tujuan kekuatan kesenjataan komunis adalah melumpuhkan kekuatan kesenjataan non komunis. Dengan cara melemahkan sistem organisasinya dan menjadikan disorganisasi kekuatan kesenjataan anti komunis dan to destroy their inner cohesion - dan menghancurkan lubuk terdalam keterpautan organisasinya.

Hal ini, telah dikerjakan oleh PKI sejak melihat perkembangan upaya mengakhiri sengketa Indonesia Malaysia dengan melalui perundingan atau pertemuan. Upaya ini, dinilai merugikan kepentingan RRC. Seperti pembentukan konfederasi negara-negara Melayu: Malaysia, Philipina, Indonesia - Maphilindo yang dirintis sejak 7 Juni 1963 dan diprakarsai oleh Perdana Menteri Tengku Abdurrahman, Presiden Soekarno, Presiden Macapagal. Menurut Manai Sophiaan, Menteri Luar Negeri Chen Yi menuduh Maphilindo sebagai proyek Nekolim. Walaupun Amerika Serikat dan Inggris juga menentangnya.

Apalagi Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal, merumuskan Doktrin Soekarno - Macapagal bahwa masalah Asia diselesaikan oleh Asia. Doktrin ini berdampak mematikan peran Inggris dan Amerika Serikat di Asia Tenggara, dalam menegakkan Malaysia. Oleh karena itu, Inggris menyegerakan pembentukan Federasi Malaysia diresmikan pada 16 September 1963. Tentu pembentukan Federasi Malaysia tidak dapat lepas dari peran Amerika Serikat di dalamnya.

Oleh karena itu, Republik Rakyat China - RRC memancing Indonesia mengubah konfrontasi menjadi perang karena Amerika Serikat menfaatkan kondisi konfrontasi untuk menjual produksi senjatanya. Sebenarnya, kemampuan perang Amerika Serikat lemah, terbukti ketika menghadapi Korea Utara dan Vietnam sebagai negara-negara komunis yang kecil, harus menarik mundur tentaranya. Apalagi jika menghadapi Indonesia yang mendapatkan bantuan dari RRC berubah menjadi negara komunis yang besar maka Amerika Serikat dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan luar biasa.

> Indonesia sebagai negara *New Emerging Forces - Nefos* yang sedang berkobar semangatnya menentang *The Old Established Forces - Oldefos* dan *Neokolonialisme Imperialisme - Nekolim*. Di bawah kondisi ini, dapat diperhitungkan hasilnya, apabila Indonesia jatuh secara mutlak di bawah pengaruh RRC.
>
> Apalagi menurut L. Stoddard dalam *Pasang Naik Kulit Berwarna* bahwa *China* berencana akan memindahkan penduduknya sebanyak 50.000.000 dari Gurun Gobi ke Kalimantan. Dapat diperhitungkan gerakan Nefos dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia, kerja sama pertahanan Indonesia -RRC, bila kurang diwaspadai akan mengubah Indonesia sebagai wilayah baru pemindahan penduduk China. Mengapa?

> Tidakkah dalam pandangan komunis, organisasi politiknya, paramilternya, dan milternya disiapkan untuk melakukan konflik, kekerasan dan menyusup dalam sel-sel kemasyarakatan - social fission? Migrasi penduduk China ke Kalimantan Barat yang berpenduduk China sebagai upaya penyusupan. Diubahnya Kalimantan Barat sebagai Small China. Dari Kalimantan Barat akan langsung menyerbu ke Jakarta.
>
> Tujuan aksi-aksi komunis adalah to eliminate the life force of the enemy - mematahkan kekuatan kehidupan lawan-lawannya dan sebaliknya bila komunis merasa lemah mereka melakukan sikap defensif.

Bertolak dari tujuan dan kepentingan komunis itu, PKI hanya mampu melawan lawan-lawannya dengan cara mendapat dukungan dari pihak militer karena menurut teori Lenin, dalam perang modern, organisasi pemaksa hanyalah organisasi kesenjataan atau militer. Agar organisasi militer berpihak kepada kepentingan PKI maka organisasi militer harus dilemahkan. Dalam saat yang sama, organisasi militer tersebut dimanfaatkan untuk diubah menjadi organisasi militer revolusioner. SOBSI diubah dari barisan buruh menjadi militer.

Di samping itu, PKI aktif melancarkan propaganda, agitasi, infiltrasi, spionase, desersi, dan pemberontakan melawan yang diarahkan meniadakan kepercayaan rakyat terhadap TNI. Propagandanya menggunakan organisasi non komunis untuk mengobarkan gerakan antimiliterisme. Oleh PKI dipropagandakan anti militerisme sebagai gerakan anti ABRI. Padahal, makna militerisme sebagai upaya memperkuat kedudukan suatu golongan dengan cara seluruh aparatnya dimiliterkan kepangkatannya dan kewenangannya.

Kalau demikian makna militerisme, tindakan politik Presiden Soekarno dapat dikatakan militerisme karena dalam mengukuhkan kedudukannya, menteri-menterinya diberi kepangkatan militer. Oleh karena itu, apabila PKI antimilterisme maka kudeta PKI selain merobohkan kekuatan TNI AD, sekaligus berupaya menumbangkan pemerintahan militerisme Presiden Soekarno.

Propanganda PKI menampakkan "central anti militerist slogan". Namun, PKI sendiri menuntut agar dipersenjatai tani-BTI, dan buruh SOBSI, disiapkan untuk melawan imperialis, dan melawan Tujuh Setan Desa yang terdiri dari (1) tuan tanah jahat (2) lintah darat (3) tengkulak jahat (4) tukang ijon (5) penguasa jahat (6) kapitalis birokrat dan (7) bandit di desa. Situasi nasional menjadi panas dalam menghadapi aksi sepihak PKI.

> Haji-haji pimpinan Pesantren di desa yang memiliki tanah lebih dari 5 ha, harus dibagikan sawahnya kepada BTI. Menurut Aidit, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Bagi Hasil, dan ketentuan Menteri Pertanian dan Agraria, tahun 1963, tanah-tanah milik tuan tanah harus dinasionalisasikan dan seorang petani tidak boleh memiliki tanah lebih dari 5 ha. Untuk pelaksanaan ini tidak mungkin terjadi secara sukarela, melainkan dengan cara Aksi Sepihak BTI. Demikian pembelaan Aidit terhadap Aksi Sepihak BTI.

Di samping itu, untuk mempercepat perluasan pengaruh propagandanya, PKI menggunakan media transportasi. Terutama menguasai kereta api dan buruh kereta api - SBKA. Menyusul urutan sopir bus, taksi, buruh pelabuhan, seluruh media transfortasi lainnya, dijadikan alat "penyebar berita" ajakan agar berpihak dan mendukung rencana revolusi komunis. Isi beritanya meniupkan perpecahan dengan sasaran organisasi lawan komunis. Apa tujuannya?

Menurut teori komunis, tidak mungkin memihak kepada revolusi PKI apabila tidak terjadi perpecahan dari dalam atau *inner conflict* dari organisasi lawan komunis, paramiliter dan militernya. Seperti dalam rumus ajarannya, *conflict among enemies of communism was thus an essential precondition of revolutionary war* - konflik di antara lawan-lawan komunis, sebagai prakondisi yang memungkinkan pecahnya perang revolusi.

> Upaya memecah belah Indonesia juga dikerjakan oleh Amerika Serikat. Menurut George Mc Turnan Kahin, dalam makalahnya, *Impact of US Policy on Indonesia Politics*, dalam seminar di *Monash University*, menuturkan Presiden Eisenhouwer lebih menyukai Indonesia pecah belah ketimbang jatuh ke tangan komunis. Untuk pelaksanaan program itu, ditugaskanlah Duta Besar Hugh S. Cumming Jr. Alasannya Presiden Soekarno dinilai lebih dekat dengan Beijing setelah mengunjungi RRC tahun 1956 yang akan meniru pembangunan ekonominya.

Upaya Amerika Serikat menurunkan peran kepemimpinan Presiden Soekarno, menurut Manai Sophiaan memuncak setelah kedatangan Marshall Green dan Lisa istrinya, 13 Juli 1965 di Jakarta, menggantikan Howard Jones sebagai Duta Besar. Sebenarnya Marshall Green tidak disukai oleh Presiden Soekarno karena bagaimanapun juga sebagai Duta Besar baru akan tetap melanjutkan program kerja Duta Besar Amerika Serikat sebelumnya.

Untuk pelaksanaan memecah belah Indonesia, CIA menjadikan umat Islam mayoritas bangsa Indonesia sebagai sasaran utamanya karena diperhitungkan oleh CIA, umat Islam sebagai pendukung kuat Presiden Soekarno. Namun juga, berkaitan erat dengan tujuan menghancurkan PKI pendukung Presiden Soekarno.

Pada saat itu, PKI tidak segan-segan propagandanya dalam upayanya meraih massa Muslim Indonesia agar keluar dari induk organisasi Islamnya, mendirikan organisasi dengan nama Islam di bawah PKI. Dicontohkan oleh Lenin, 7 Desember 1917, mengadakan pendekatan kepada kaum buruh Muslim Rusia dan Dunia Timur agar kerja sama membantu kaum komunis melawan segenap penindasan dan dominasi asing Barat.

Demikian pula D.N. Aidit PKI mencoba mengambil hati kaum buruh Muslim dalam melawan imperialis Amerika Serikat. Didirikanlah organisasi Ikhwanul Muslimin. Nama organisasi yang Islami ini untuk mengelabui mayoritas umat Islam Indonesia agar berpihak kepada PKI. Kebiasaan dalam organisasi PKI, menyebut pimpinannya dengan Kawan. Misalnya D.N. Aidit disebut sebagai Kawan Ketua. Dalam bahasa Arab, kawan adalah Ikhwan. Sengaja namanya dibuat mirip dengan nama organisasi yang dibangun oleh Hasan Al-Banna di Mesir. Dalam masa jor-joran ini, PNI juga membuat Jamiatul Muslimin atau Jamus.

> Nama-nama ini dibuat oleh PKI dan PNI, memberikan pengakuan bahwa realitas kekuatan massa rakyat bangsa Indonesia, mayoritasnya adalah umat Islam. Hanya dengan memanipulasi nama Islami, PKI dan PNI menyadari akan mendapatkan dukungan mayoritas rakyat Indonesia yang terdiri dari umat Islam. Walaupun kedua parpol tersebut tetap berideologi Marxisme dan Marhaenisme.

Permainan politik Presiden Soekarno yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai mercusuar Asia Afrika, menghadapi lawan tidak hanya dari Blok Barat Kapitalis, tetapi justru dari pihak Blok Timur Komunis juga berusaha menumbangkannya. Presiden Soekarno ingin Membangun Dunia Baru – To Build A New World, 30 September 1960, dengan meninggalkan PBB, 7 Januari 1965, dengan membangun Conference New Emerging Forces – Conefo.

Demokrasi Ekonomi yang dibangunnya dengan membatasi gerak wilayah ekonomi China RRC di Indonesia dengan PP 10. Memberikan izin usaha kalangan China hanya sebatas di ibu kota Provinsi. Tentu jiwa PP 10/1959 ini berbenturan dengan kepentingan ekonomi RRC yang berusaha mengkomuniskan dunia melalui dominasi ekonominya.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

AMANAT TERTULIS P.J.M. PRESIDEN/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI PADA KONPERENSI BESAR KE VIII PELADJAR ISLAM INDONESIA 28 DJULI/3 AGUSTUS 1965 DI JOGJAKARTA.

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan ini saja restui Konperensi Besar Ke-VIII peladjar Islam Indonesia !

Thema : BERDIKARI MENGAMANKAN PANDJI PANDJI REVOLUSI, jang kau gariskan, adalah sangat tepat, djustru kaum Nekolim dan anthek-antheknja sangat takut kepada prinsip-prinsip Revolusi Indonesia.

Madju terus anak-anakku Peladjar Islam Indonesia, dan perhebat usaha-usahamu dalam menggali Apinja Islam, untuk memenangkan Revolusi !

Selamat berkonperensi !

Madju terus Pantang Mindur !

DJAKARTA, 26 Djuli 1965.
PRESIDEN/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
BERSENDJATA,

SUKARNO

Dokumentasi
AHMAD MANSUR SURYANEGARA

AMANAT TERTULIS P.J.M. PRESIDEN/ PEMIMPIN BESAR REVOLUSI PADA KONFERENSI BESAR VIII PELAJAR ISLAM INDONESIA - PII

di Jogjakarta, 26 Juli - 3 Agustus 1965

Terbaca sebagai upaya Presiden Sukarno menciptakan imbangan politik terhadap PII yang mulai tersudutkan, setelah PII mengalami pengganyangan PKI, BTI, di Kanigoro Kediri, 13 Januari 1965. Presiden Sukarno memandang sangat perlu memberikan dukungan terhadap Konferensi Besar PII yang bertemakan Berdikari Mengamankan Panji Panji Revolusi. Sebelumnya, di Markas Ganefo, 18 Mei 1965, Presiden Sukarno memperingatkan bahwa Revolusi Indonesia oleh Barat dinilai lebih berbahaya daripada Rusia yang telah berubah menciptakan peaceful coexistence. Ancaman Barat semakin terasa setelah rencana Konferensi Asia Afrika II di Alzajair, Juni 1965, dukungan RRC dapat digagalkan.

Tambahan lagi kondisi jor-joran semakin memanas antara Islam dan komunis di dalam negeri. Tidak mengarah lagi ke Nekolim. Selain itu, di Jakarta, 13 Juli 1965, Marshall Green menggantikan Howard Jones sebagai Duta Besar AS yang tidak disukai oleh Presiden Sukarno. Di bawah kondisi yang demikian ini, Presiden Sukarno merasa perlu dekat lagi dengan Islam: PII, HMI, Muhammadiyah, dan NU. Namun, terlambat PKI dengan dukungan RRC semakin keras berupaya merobohkan Presiden Sukarno.

PKI ingin menjadikan D.N. Aidit Diktator Proletar Indonesia. Namun, terbentur dengan Presiden Soekarno diangkat oleh MPRS sebagai Presiden Seumur Hidup. Berarti Presiden Soekarno menduduki kursi kepresidenan hingga akhir hayat. Pengangkatan MPRS ini bertentangan dengan kepentingan D.N. Aidit PKI karena D.N. Aidit PKI dalam upaya mencapai tujuannya tidak mungkin menempuh cara Parlementer. Tidak mungkin pula dengan menunggu Presiden Soekarno wafat. Selain karena terlalu lama, juga akan berhadapan dengan keputusan MPRS berikutnya. Penantian itu, bertolak belakang dengan ajaran komunis. Oleh karena itu, dipilihnya pesan Lenin, *No class, no regime falls unless it is pushed* - Tiada kelas, tiada rezim rontok, kecuali didobrak.

Dapat dipastikan setelah PKI kuat maka Presiden Soekarno akan ditumbangkannya. Untuk tujuan ini, diajarkan pula *except war, infiltrations is the most effective method of fighting a dictatorship* - selain perang, infiltrasi merupakan metode perlawanan kediktatoran yang sangat efektif. Dengan kata lain, untuk menumbangkan Presiden Soekarno, PKI pasti menggunakan taktik kuda Troya.

Upaya PKI ini, menjadikan pimpinan PKI terjerumus bekerja untuk asing, dan juga menjadikan pimpinan PKI sebagai pemimpin yang *keblinger*. Melahirkan Aidit, Nyoto, Nyono, Sudisman, Sakirman, Soepardjo, Untung, Umar Dhani, dan kawan-kawan lainnya menjadi bonekanya RRC.

Kegagalan Tuntutan CGMI Pembubaran HMI

Persiapan kudeta PKI dimatangkan oleh tuntutan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia - CGMI dalam penutupan kongresnya di Istora Senayan, 28 September 1965 yang dihadiri oleh Ketua CCPKI Aidit, Presiden Soekarno, Wakil Perdana Menteri II Dr. Leimena, Menteri Penerangan Achmadi, menuntut agar Himpunan Mahasiswa Islam - HMI dibubarkan.

Menurut Manai Sopihaan, tuntutan CGMI ini dijawab terlebih dahulu oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. Leimena:

> Pemerintah tidak mempunyai niat untuk membubarkan HMI. HMI adalah organisasi nasionalistis, patriotik, dan loyal kepada Pemerintah. Pemerintah banyak mendapat sokongan dari HMI dalam perjuangan melawan Nekolim.

Penulis yakin, bahwa tidak mungkin Wampa II Dr. Leimena menyampaikan keputusan pemerintah itu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Presiden, Pemimpin Besar Revolusi, Panglima Tertinggi, Perdana Menteri Soekarno yang sama-sama hadir dalam acara penutupan Kongres CGMI tersebut. Dr. Leimena bersikap tenang tidak terpengaruh oleh gemuruhnya teriakan CGMI dalam Istora Senajan, tetap disampaikan keputusan pemerintah seperti di atas.

> Keputusan pemerintah, penolakan tuntutan CGMI tentang pembubaran HMI, apakah bukan sebagai pelaksanaan balance of power antar kekuatan organisasi kemahasiswaan dan sebagai tindak lanjut dari Konferensi Islam Afrika Asia. Sayang belum sampai tersosialisasikan, telah terjadi Kudeta G-30-S/PKI sehingga masyarakat belum memahami pembelaan Presiden Soekarno terhadap HMI.

Pilihan Dr. Leimena dari Partai Kristen Indonesia - Parkindo, menyampaikan penjelasan keputusan pemerintah tentang HMI benar-benar sangat strategis karena apabila disampaikan oleh Menteri yang beragama Islam, pasti hal itu dicurigai bukan keputusan Presiden Soekarno dengan seluruh menterinya.

Ketika Presiden Soekarno mendapatkan giliran, menawarkan kepada peserta kongres CGMI, apakah setuju jika Ketua CCPKI dan Ketua MPRS Aidit terlebih dahulu memberikan sambutannya. Tentu disetujuinya tawaran tersebut, maka bicaralah Aidit:

> Kalau Pemerintah tidak akan membubarkan HMI maka janganlah kalian berteriak-teriak menuntut pembubaran HMI. Lebih baik kalian bubarkan sendiri saja dan kalau kalian tidak mampu melakukan itu, lebih baik kalian jangan pakai celana, tapi tukar saja dengan sarung.

Kemudian D.N. Aidit meneruskan pidatonya, menyerang pemimpin-pemimpin palsu yang merampok uang rakyat dan memelihara istri empat sampai lima.[21] Siapa yang disindir oleh D.N. Aidit setelah mendengar pernyataan pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Presiden Soekarno tidak menyetujui pembubaran HMI.

21 Erka, 1978. *Bung Karno! Perginya Seorang Kekasih Suamiku & Kebanggaanku*. Aneka Ilmu. Semarang, menuturkan tetang wanita-wanita yang pernah berhubungan dan mengaku menjadi istri Bung Karno: (1) Lok Utari Tjokroaminoto (2) Inggit Garnasih (3) Fatmawati (4) Hartini (5) Baby Huwae atau Lukita Purnamasari (6) Kartini Manoppo (7) Haryati (8) Naoko Meimoto atau Sari Dewi.

JENDERAL TNI H. M. SOEHARTO

Sumber: *30 Tahun Indonesia Merdeka*

JENDERAL TNI H. M. SOEHARTO

Allah Yang Mahakuasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
kepada Jenderal TNI H. A. Soeharto untuk menyelamatkan bangsa, negara, agama dari kebiadaban PKI dan ormas bawahannya dalam Kudeta G30S/PKI.

Surat Perintah 11 Maret 1966, Supersemar, dari Presiden Soekarno disampaikan melalui ketiga Jenderal M. Jusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rachmat, di Istana Bogor, untuk Jenderal Soeharto sebagai Panglima Pemulihan Keamanan.

Menurut Prof. DR. H. Priyatna Abdurrasyid SH. PhD. C.IISL. D.IAA.Fell.BIS.LAA, 2001, dalam buku memoir, Dari Cilampeni ke New York, Mengikuti Hati Nurani, Supersemar tersebut pernah ditawarkan oleh Jenderal TNI Soeharto, di Wisma Siliwangi Ciumbuleuit, Bandung kepada Jenderal A.H. Nasution, dan Jenderal Ibrahim Adjie, untuk mengambil alih Pimpinan Pemulihan Keamanan tetapi ditolak oleh keduanya.

Menurut Jenderal Soeharto, 1989, dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, menuturkan tentang kesulitan Presiden Soekarno dalam pemenuhan tuntutan rakyat tentang pembubaran PKI,
dalam menghadapi protes luar negeri nantinya. Karena kesulitan inilah melahirkan Supersemar dan melimpahkan kewenangan pembubaran PKI dan ormas bawahannya kepada Jenderal Soeharto.

Langkah lanjutnya, Jenderal Soeharto, dalam mengeliminasi pengaruh ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, Sosialisme menghidupkan ajaran agama dan Aliran Kepercayaan. Akan tetapi, aliran Kepercayaan dijadikan sumber Kudeta Sawito dengan ilham Gunung Srandil untuk menggantikan Presiden Soeharto. Akibatnya, Presiden Soeharto kurang menaruh kepercayaan terhadap Aliran Kepercayaan lagi. Pembangunan agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha lebih dipriortaskan.
Dalam penertiban ormas dan parpol, disederhanakan menjadi mirip Nasakom terdiri dari satu GolKar, dan dua parpol PPP dan PDI. Panggilan Paduka Yang Mulia Presiden diganti cukup dengan Bapak Presiden.

Pembangunan Masjid diutamakan, diselesaikanlah pembangunan Masjid Istiqlal – Masjid Kemerdekaan, sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara. Kebijakannya menjadikan pertumbuhan masjid dan musholla sangat pesat: di Kampus, Kompleks perumahan, perkantoran, pasar, dan di SPBU dari Sabang hingga Merauke. Kecuali kehidupan parpol. Sesuai dengan mimpi Presiden Soekarno, parpol dikecilkan.

Satu-satunya Kepala Negara yang membangun Masjid di Bosnia, hanyalah Presiden H.A. Soeharto. Padahal Barat berkepentingan menghancurkan Islam di Bosnia setelah Rusia mengalami Perestroika -Reformasi. Presiden Soeharto juga membangun Masjid di perbatasan Irian Jaya dengan Papua New Guinea. Pembangunan Agama Katolik di Dilli Timur Timur, dengan pembangunan Patung Jesus seperti di Brazilia, mengejutkan dunia Barat Protestan.

Kedekatan Presiden Soeharto dengan Islam, berdampak harus lengser melalui Reformasi atau Perestroika yang menular di Indonesia. Bernasib sama dengan Presiden Soekarno setelah mendapat gelar The Champion of Freedom and Islam, tumbanglah kekuasaannya, sesudah G30S/PKI.
Benarkah kedua hal ini terjadi karena adanya
intervensi CIA atau KGB?

Tidakkah Presiden Soekarno memiliki istri yang banyak? Sebenarnya pidato Aidit tersebut secara tidak langsung ditujukan kepada CGMI tentang Presiden Soekarno yang tidak mau membubarkan HMI. Walaupun tidak terus terang, dapat dibaca dari bahasa yang tersirat. Maksudnya, pemimpin yang tidak berpihak kepada tujuan PKI maka pemimpin itu palsu. Padahal, tuntutan CGMI dan PKI bertujuan membubarkan HMI. Sebaliknya, pemerintah tidak menyetujuinya, bahkan menilai HMI sebagai organisasi patriotik, nasionalistis, dan anti nekolim.

Tentu jawaban pemerintah itu, diterima sebagai penghinaan tidak hanya kepada CGMI tetapi justru kepada Aidit dan PKI. Oleh karena itu, disindirlah adanya pemimpin palsu, makan uang rakyat, dan banyak istrinya. Siapa pemimpin itu? Dialah pemimpin yang tidak mau membubarkan HMI. Pemimpin yang tidak berpihak kepada tujuan PKI.

Mengapa D.N. Aidit berani menyindir Presiden Soekarno dengan bahasa yang merendahkan? Jawabannya karena malam itu, 28 September 1965, tinggal dua hari lagi, PKI merasa kudetanya di malam hari yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung pasti berhasil menggulingkan Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan akan digantikan dengan Dewan Revolusi, sekaligus melumpuhkan Dewan Jenderal.

Ulang Tahun KAA II dan Rencana Kudeta PKI

Rencana Kudeta PKI sebenarnya tidak hanya terlihat setelah adanya Kongres CGMI itu, 28 September 1965. Namun, sejak adanya kegagalan Ulang Tahun Dasa Warsa Konferensi Asia Afrika di Aljazair, Juni 1965, akibat adanya Kudeta Kolonel Boumediene terhadap Presiden Ben Bella dan gedung tempat penyelenggaraan Ulang Tahun KAA II di Aljazair dibom.

Pada saat itu, Presiden Soekarno tetap melanjutkan pergi ke Kairo. Di sini, ia bertemu dengan Presiden Gamal Abdul Nasser dari Republik Persatuan Arab dan Perdana Menteri Chu En Lay, Menteri Luar Negeri Chen Yi dari RRC, Menteri Luar Negeri, dan Zulfikar Ali Bhutto dari Pakistan. Pertemuan ini dinamakan KTT Kecil, sepakat untuk menunda Konferensi Asia Afrika II.

Pada kesempatan ini, diadakan pula *briefing* dengan Duta Indonesia untuk Eropa dan Amerika Serikat, membicarakan tentang rencana akan diselenggarakannya *Conference of New Emerging Forces - Conefo*. Dalam pertemuan ini, Aidit ikut di dalamnya.

REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

I. Mengingat
1.1. Tingkatan Revolusi sekarang ini, serta keadaan politik baik Nasional maupun Internasional
1.2. Perintah Harian Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata/Presiden/Panglima Besar Revolusi pada tanggal 8 Maret 1966

II. Menimbang
2.1. Perlu adanja ketenangan dan kestabilan Pemerintahan dan djalannja Revolusi
2.2. Perlu adanja djaminan keutuhan Pemimpin Besar Revolusi ABRI dan Rakjat untuk memelihara kepemimpinan dan kewibawaan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi serta segala adjaran-adjarannja

III. Memutuskan/Memerintahkan

Kepada : LETNAN DJENDRAL SUHARTO, MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk : Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi :

1. Mengambil segala tindakan jang dianggap perlu, untuk terdjaminnja keamanan dan ketenangan serta kestabilan djalannja Pemerintahan dan djalannja Revolusi, serta mendjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S. demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala adjaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan2 lain dengan sebaik-baiknja.
3. Supaja melaporkan segala sesuatu jang bersangkut-paut dalam tugas dan tanggung-djawab seperti tersebut diatas.

IV. Selesai

Djakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S.

SUKARNO

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

SURAT PERINTAH 11 MARET 1966

Dari

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI/PEMIMPIN BESAR REVOLUSI/
MANDATARIS M.P.R.S.

Kepada

LETNAN DJENDRAL SOEHARTO
MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Setelah selesai Aidit pergi ke Paris. Di sini, ia bertemu dengan A. Karim D.P., Ketua Umum PWI. Ditanya oleh Karim D.P. tentang Kudeta Kolonel Boumediene. Jawaban Aidit, bahwa Boumediene adalah benar dan progresif. Dijelaskan lebih lanjut, jika kudeta didukung sedikitnya 30% rakyat, kudeta tersebut bisa bermutasi menjadi revolusi. Pandangan ini menurut Manai Sophiaan sebagai analisis Aidit dalam upayanya melaksanakan Kudeta Gerakan 30 September nantinya.

Untuk kepentingan ini, D.N. Aidit dan Njoto meneruskan ke Kremlin Moskow. Ternyata, rencana kudeta dengan kekuatan 30% ditolak oleh Kremlin karena menurut Marxisme, revolusi harus bersumber dari kemauan rakyat. Bukan hanya dipaksakan dari atas dengan rekayasa kudeta. Penolakan Rusia ini tidak dipedulikan dan Aidit jalan terus dengan rencana kudetanya karena merasa cukup dengan dukungan RRC saja.

Adapun Politbiro PKI terdiri dari D.N. Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman, Ir. Sakirman, Njono, Munir, Ruslan Wijayasastra, dan Rewang. Mereka juga merasa sudah kuat dalam menghadapi Dewan Jenderal karena sudah memiliki pendukung Kelompok Perwira Muda Yang Maju serta RRC berpihak kepada D.N. Aidit bukan Rusia.

Dalam *briefing* 28 September 1965 di Jakarta, dihadiri pula oleh CDB Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Diputuskan PKI akan melakukan kudeta, dengan bantuan Laksamana Udara Umar Dhani dengan cara penculikan dan pembinasaan para Jenderal Angkatan Darat yang dikategorikan dari Dewan Jenderal.

Pahlawan Revolusi

Rencana ini dilaksanakan pada 30 September 1965, Kamis Kliwon malam Jumat Legi, 4 Jumadil Akhir 1385 H, sekitar pukul 3 dini hari. Dapat diartikan pula 1 Oktober 1965 karena telah lewat pukul 12 malam. Terjadi bencana penculikan dan pembunuhan:

1. Letnan Djenderal Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Koti.
2. Major Djenderal R. Soeprapto, Deputi II Men/Pangad
3. Major Djenderal Harjono Mas Tirtodarmo, Deputi III Men/Pangad
4. Major Djenderal Suwondo Parman, Asisten I Men/Pangad
5. Brigadir Djenderal Donald I. Panjaitan, Asisten IV Men/Pangad
6. Brigadir Djenderal Soetojo Siswomihardjo, Inspektur Kehakiman AD
7. Letnan Satu Andreas Tendean, Adjudan Menko Hankam Kasab
8. Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun

Di Jawa Tengah

9. Kolonel Katamso Dharmokusumo, Komandan Korem 072 Yogyakarta
10. Letnan Kolonel Sugijono Mangunwijoto, Kastaf Korem 072 Yogyakarta

Para Ulama dan rakyat pada umumnya tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Jangankan para Ulama dan pimpinan partai politik Islam lainnya, para Pahlawan Revolusi sekalipun sedang memangku kedudukan yang strategis, tidak juga mengetahui rencana Kudeta PKI. Terbukti, setelah pagi harinya, 1 Oktober 1965, Jumat Legi, 5 Jumadil Akhir 1385 H, mendengar siaran RRI, pukul 07.20 dan diulang pada 08.15, para Ulama dan masyarakat mulai mendengar adanya Gerakan 30 September PKI. Pada siang harinya, pukul 13.00 disiarkan tentang pembentukan Dewan Revolusi dan pendemisionerkan Kabinet Dwikora.

Pada pukul 14.00, 1 Oktober 1965 diumumkan 45 anggota Dewan Revolusi, dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, dengan wakil-wakilnya terdiri dari Brigadir Djenderal Supardjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Adjun Komisaris Besar Polisi Anwas. Diumumkan pula, penurunan pangkat jenderal menjadi kolonel. Sebaliknya, kepada yang memihak kepada Dewan Revolusi dinaikkan pangkatnya dua kali kenaikan.

Omar Dhani pada hari dan tanggal yang sama di atas, 1 Oktober 1965, mengeluarkan perintah harian, untuk Slagorde AURI, mendukung Gerakan 30 September/PKI di atas. Omar Dhani yakin adanya Dewan Djenderal Angkatan Darat berdasarkan informasi dari Brigadir Djenderal Supardjo.

Sepintas PKI seperti menang dan benar. Namun, setelah Major Djenderal Soeharto dari Komando Strategis Angkatan Darat - Kostrad, mengambil alih pimpinan keamanan. Segera diadakan operasi militer, dipimpin Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, mengambil alih Studio RRI dan Kantor Pusat Telekomikasi. Kemudian, disiarkan pidato Major Djenderal Soeharto, penjelasan situasi yang sebenarnya terjadi dan keselamatan Presiden Soekarno. Para Ulama dan rakyat baru memahami adanya Kudeta Gerakan 30 September/PKI yang dibantu oleh pimpinan Angkatan Udara.

Pada 4 Oktober 1965, Senin Wage, 9 Jumadil Akhir 1385 H, berdasarkan keterangan Polri Soekitman, yang berhasil lolos dari penculikan, ditemukanlah tempat pemakaman jenderal-jenderal yang diculik dan dibunuh oleh PKI, dimasukkan dalam sumur sedalam 12 m, di Lubang Buaya dari Bandara Halim Perdanakusumah. Untuk menguasai Lubang Buaya, terjadi perlawanan kecil dari Pemuda Rakyat dan Gerwani sebagai kekuatan massa yang dipersenjatai, di bawah pimpinan Major Udara Sujono. Pengangkatan jenazah dari Sumur Lubang Buaya dilaksanakan oleh Kesatuan Inti Para Amphibi dari KKO AL.

Adapun dari kesatuan TNI yang memihak kepada PKI dan bertugas menculik dan melakukan pembunuhan delapan jenderal adalah Kesatuan Pasopati di bawah Letnan Satu Dul Arief dan Letnan Dua Siman, terdiri dari satu kompi masing-masing Resimen Tjakrabirawa, Batalyon Para 454, Batalyon Para 530, dan dua peleton masing-masing dari Brigade Infanteri 1, Kesatuan Para Angkatan Udara, serta Kesatuan Kavaleri. Korban delapan jenderal ini diserahkan kepada Kesatuan Pringgodani di Lubang Buaya yang berada di wilayah Halim Perdanakusumah.

Penguasaan wilayah Halim Perdanakusumah dan Lubang Buaya oleh pasukan RPKAD. Kemudian dilaporkan oleh Major C.I. Santoso, Danyon I RPKAD kepada Pangkostrad Major Djenderal Soeharto yang memimpin langsung pengambilan jenazah para jenderal dan perwira pertama korban keganasan G-30-S/PKI. Adapun penggalian kembali dilakukan oleh RPKAD dan KKO AL atau Korps Marinir TNI AL. Untuk dipindahkan ke Makam Pahlawan Kalibata Jakarta pada 5 Oktober 1965.

> Prosesi pemakaman diikuti oleh segenap rakyat, dari Markas Besar Angkatan Darat - MBAD di jalan Merdeka Utara hingga Makam Pahlawan Kalibata, baik yang muda ataupun orang tua, yang tergugah hatinya merasa kehilangan putra terbaiknya, disertai tangis lirih yang dalam dan doa tulus dari para Ulama: Selamat Jalan Pahlawan Revolusi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan menempatkan disisi-Nya dengan penuh kemuliaan. Para Ulama dan Santri bersama segenap generasi muda Islam bertekad akan meneruskan perjuanganmu mengamankan dan membebaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ajaran komunisme.

Sayangnya, peristiwa yang menjadikan rakyat terhimpit rasa duka yang dalam, Presiden, Pemimpin Besar Revolusi Soekarno, Penyambung Lidah Rakyat, tidak hadir dalam pemakaman para Pahlawan Revolusi korban kebiadaban Dewan Revolusi, Gerakan 30 September PKI.

Sumber: Kilas Balik

ORMAS ISLAM GP ANSHOR,
PEMUDA MUHAMMADIJAH, PEMUDA AL-WASLIJAH,
PEMUDA PERSIS KAMI DAN KAPPI

Walaupun dihadang oleh tentara bersenjata lengkap, tidak merasa gentar, demonstrasi tetap menuntut pembubaran PKI dan organisasi bawahannya.

Jawaban Partai NU terhadap Dewan Revolusi

Pada saat Letnan Kolonel Untung mengumumkan melalui RRI, menurut Choirul Anam, PB NU Ketua III K.H. A. A. Sjaichu mengirim teks kepada Redaksi Surat Kabar *Duta Masyarakat* pada hari yang sama, pukul 22.00, 1 Oktober 1965, Jumat Legi, 5 Jumadil Akhir 1385, berisikan pernyataan:

1. mengutuk tindakan kudeta yang dipimpin oleh Letkol Untung;
2. agar segenap umat Islam umumnya serta warga NU khususnya tetap membantu ABRI;
3. segenap warga Nahdliyin, siap siaga terhadap gerakan kontra revolusi dengan nama Gerakan 30 September/PKI.

Pernyataan yang sama diikuti oleh GP Ansor. Setelah RRI dikuasai kembali, NU dan GP Ansor menyatakan keberpihakannya kepada ABRI.

> Pada 2 Oktober 1965, Sabtu Pahing, 6 Jumadil Akhir 1385 H, pimpinan muda NU, H. M. Subhan Z.E. membentuk Komando Aksi Pengganjangan Kontra Revolusi 30 September - KAP Gestapu. Dengan Sekretaris Jenderal Harry Tjan SH dari Partai Katolik dan Sekretaris Ketua Pergerakan Massa, Lukman Harun dari Persyarikatan Muhammadiyah, serta Syafruddin Harahap dari HMI. Demikian pula dari generasi muda Muhammadiyah membentuk Komando Kesiapsigaan Angkatan Muda Muhammadiyah - KOKAM.

Kemudian, menyusul HMI, 4 Oktober 1965, Senin Wage, 8 Jumadil Akhir 1385 H, di Taman Suropati Jakarta, mengadakan Rapat Umum, mengutuk gerakan kontra revolusi G30S/PKI. Mendesak dibersihkannya Kabinet Dwikora, Lembaga Negara, Front Nasional, LKBN Antara, Front Pemuda, PPMI, dari oknum G30S/PKI. Kepeloporan HMI ini sebagai salah satu jawaban terhadap keputusan Kongres CGMI, 28 September 1965 dengan tuntutannya pembubaran HMI.

Jawaban KAMI dan KAPPI terhadap G-30-S PKI

Oleh karena itu, menurut Drs. H.R. Soemarno Dipodisatro dalam *Kilas Balik Perjuangan Menegakkan Orde Baru* menuturkan bahwa dalam pengganyangan PKI dan organisasi bawahannya, HMI menjadi ujung tombaknya. Tindak lanjutnya, HMI bersama PII, Pemuda Muhammadiyah, dan Pemuda Pancasila, membakar Gedung CCPKI, Jalan Kramat Raya, Jakarta, 8 Oktober 1965, Jumat Pon, 12 Jumadil Akhir 1385.

Sumber: Kilas Balik

DEMO KAPPI KAMI PENGGEMBOSAN BAN MOBIL

Gambar menampakkan seorang pelajar putri dengan sukarela melakukan Penggembosan Ban Mobil di jalan protokol, dalam rangka menggagalkan Pengangkatan Kabinet Seratus Menteri di Istana.

Betapa cepat dan meluasnya dalam waktu relatif singkat Kesadaran anti PKI dimiliki oleh kalangan pelajar. Tidak hanya sekedar sadar, tetapi disertai rela melakukan aksi.

Menurut Drs. H. R. Soemarno Dipodisastro tadi dan menurut Soegiarso Soerojo dalam *Siapa Menabur Angin, Akan Menuai Badai* menuturkan bahwa atas restu Menteri PTIP Mayjen Syarif Thayeb, terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia - KAMI Pusat, 25 Oktober 1965 dengan Ketua Zamroni -PMII, Ketua Bidang Massa Cosmas Batubara - PMKRI, Sekretaris Jenderal Mari Muhammad - HMI. Bendahara Teuku Hamzah - SEMMI. Disusul dengan KAMI Jakarta, Ketua Firdaus Wadjdi - HMI, Team Ketua Fahmi Idris dan Sumarno Dipodisastro - HMI, serta Liem Bian Koen PMKRI.

Setelah diketahui bahwa dalang utama Kudeta G-30-S adalah PKI, tidaklah mungkin PII berpangku tangan.Di bawah pimpinan Mohammad Husni Thamrin, bangkitkah PII memelopori menggerakkan para pemuda pelajar, bergerak dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia - KAPPI pada 23 Desember 1965, Kamis Wage, 1 Ramadhan 1385.

Berdasarkan Drs. Erwin M. Hasan, M.Psc., 2002, dalam *Gerakan Pemuda Pelajar Berjuang KAPPI*, menjelaskan pendiri *KAPPI Pusat* adalah Ketua Umum, M. Husnie Thamrin - PII. Ketua: Sjahril Dardja - G.S.N.I.R. Sihombing - Baperpeki. Darlis Zakaria - IPE Indonesia. Sekretaris Jenderal, Abdul Kahar Dangka - IPPI Pantjasila. Sekretaris: Usmanudin Siregar - I.P. Al-Waslijah. Zulkifli TM - I.P. Al-Irsjad. Bendahara: M. Djuwaeni - I.P. Matla'ul Anwar.

Kebangkitan KAPPI sangat menyulitkan pihak Istana, melawan pemuda pelajar atau anak anak pelajar yang datang membanjiri dari kota-kota di Jawa Barat ke Jakarta dalam jumlah luar biasa. Kekerasan senjata, tidak mungkin dapat memadamkan kemauan para pemuda pelajar dengan hati nurani yang jernih tanpa pamrih materi ataupun lainnya. Berjuang menegaknya kebenaran dan keadilan: kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Artinya Pancasila tidak dibenarkan bila diubah menjadi Manipol Usdek dan Nasakom, serta tidak direduksi menjadi Ekasila atau Gotong Rojong.

Adapun dari pimpinan PII Jakarta pengambil inisiatif pembentukan KAPPI Pusat menurut Djayadi Hanan dalam *Gerakan Pelajar Islam Indonesia*, antara lain adalah: Mohammad Husni Tamrin, Syarifuddin Siregar Pahu, Husein Umar, Wahid Kadungga, Sri Syamsudin Prawoto dan Ilyas. Untuk KAPPI Jaya adalah Anhari Achadi, Oo Cholis Rohendi, Gomsoni Yasin, M. Nadjib, Maryati Nasution, Titi Nurhayati, Ruminah ER.

Kepeloporan PII dalam kebangkitan KAPPI, suatu pilihan dan jawaban yang tepat. Dua peristiwa Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, menjadikan gugurnya Komandan Brigade PII Madiun, Soerjosoegito, dan adanya Peristiwa

Kanigoro, Mental Training PII jadi korban sasaran Aksi Sepihak PKI, 13 Januari 1965, Rabu Kliwon, 9 Ramadhan 1384. Dengan adanya kedua peristiwa ini, dapat dipastikan PII mengambil inisiatif melakukan perlawanan aktif terhadap PKI sesudah Kudeta G 30 S/PKI.

Apalagi sudah sejak 22-27 Rabiul Akhir 1385, Jumat-Rabu, 20-25 Agustus 1965, PB PII di bawah pimpinan Ahmad Djuwaeni memutuskan rezim Demokrasi Terpimpin dikuasai oleh PKI. Oleh karena itu, PII harus bekerja sama dengan perwira Angkatan Darat yang anti komunis dalam menyiapkan perlawanan terhadap segenap aksi PKI. Bertolak dari dasar keputusan tersebut, dengan adanya Kudeta G30S/PKI, menjadikan PII dengan cepat mengambil inisiatif memelopori Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia - KAPPI.

Dengan terbentuknya KAPPI, menjadikan KAMI semakin berani menggerakkan demonstrasi pelajar dan mahasiswa. Fahmi Idris dan Eki Sjahruddin - HMI, memimpin demonstrasi ke Sekretariat Negara untuk berdialog dengan Menteri Chaerul Saleh, 10 Januari 1966. Sudah tiga bulan, 30 September 1965-10 Januari 1966, tuntutan pembubaran PKI tidak dijawab segera oleh Presiden Soekarno. Dalam dialog ini, Chaerul Saleh tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan tuntutan demonstran KAPPI dan KAMI.

Bahkan, Presiden Soekarno dalam menjawab tuntutan demonstran dengan menyempurnakan kabinetnya menjadi Kabinet 100 Menteri. Tanpa mengadakan retooling menteri-menteri yang terlibat dalam Gestapu. Akibatnya, KAPPI dan KAMI menyebutnya Kabinet Gestapu. Reaksi dari kalangan pemuda pelajar KAPPI dan mahasiswa KAMI melancarkan demonstrasi penggembosan ban mobil di jalan raja, untuk menggagalkan pelantikan Kabinet Gestapu.[22] Diikuti dengan demo ke Istana Negara, 23 Februari 1966. Di sini, disambut dengan tembakan. Gugurlah Arief Rachman Hakim.

Kampus Universitas Indonesia - UI ditutup. KAMI dilarang, Firdaus Wadjdi mengubah KAMI menjadi Resimen Arief Rachman Hakim. Kemudian, diubah lagi menjadi Lasjkar Arief Rachman Hakim dengan Komandan Fahmi Idris dan Kastaf Soemarno Diposastro.

22 Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, terjadi demonstrasi dengan melakukan penggembosan ban setiap mobil yang sedang lewat di jalan raya. Pada umumnya, demonstrasi melakukan pembakaran ban bekas di jalan atau di halaman suatu kantor, kampus, atau tempat lain yang dijadikan obyek demo. Pelaku demo penggembosan ban adalah pemuda pelajar masih duduk di bangku SMP dan SMA. Betapa cepat proses penularan gerakan anti komunis di kalangan pemuda pelajar.

Sumber: *Kompas*

Demonstrasi HMI Anti Korupsi

M. HUSNI THAMRIN
Ketua Umum KAPPI Pusat
A. MANSUR SURYANEGARA
Sekretaris Umum DPHD KAPPI Jabar

Sumber: Doc. Pribadi

Penutupan kampus dan kegiatan kuliah, menjadikan lahirnya Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia - KASI. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga meluas di kota-kota universitas. Universitas Padjadjaran berubah menjadi Universitas Padjadjaran Berdjuang. Dewan Mahasiswa UNPAD di bawah pimpinan Zen Amar membangkitkan KAMI Bandung bersama mahasiswa Institut Teknologi Bandung - ITB. Diikuti pula oleh organisasi mahasiswa ekstra.

Demo KAPPI dan KAMI Jabar

Demonstrasi khusus di Jawa Barat, demonstrasi KAPPI dipimpin oleh Mursalin Dahlan melakukan penyobekan gambar Presiden Soekarno di Bandung, Serang, di Pesantren Citangkil dan di Mancak Cilegon Banten. Menurut Gubernur Mashudi dalam *Memandu Sepanjang Masa*, demonstrasi KAMI yang dipimpin oleh Sugeng Suryadi, selain menuntut Presiden Soekarno di Mahmilubkan, juga melakukan tindakan menyobek-nyobek dan menginjak-injak gambar Presiden Soekarno yang diambil dari Gedung Pakuan Bandung.

Tidaklah heran apabila di kalangan pemuda pelajar dibentuk KAPPI. Kalangan guru pun membangun Kesatuan Aksi Guru Indonesia - KAGI. Kalangan wanita bangkit, mendirikan Kesatuan Aksi Wanita Indonesia - KAWI. Di kalangan buruh yang anti komunis membentuk Kesatuan Aksi Perserikatan Buruh Indonesia - KAPBI dan para nelayan membangun pula Kesatuan Aksi Peserikatan Nelayan Indonesia - KAPNI.

Dalam pengerahan massa pemuda pelajar dan santri dari Pesantren, SMP Tsanawiyah, SMP, SMA, SGA-Negeri, PGAA-Negeri dan swasta dari Bandung atau kota-kota di seluruh Jawa Barat, yang membanjiri Jakarta, dikerahkan oleh KAPPI DPHD Jabar karena Jakarta secara geografis, di dalam lingkaran dekat dengan Jawa Barat atau Bandung. Oleh karena itu, memungkinkan pemuda pelajar Bandung atau seluruh Jawa Barat dengan mudah membanjiri Jakarta secara cepat.

Hal itu terjadi, setelah Endang Saifudin Anshary dari PII, mendapat mandat dari Ketua Pusat KAPPI Husni Thamrin, berhasil membentuk DPHD KAPPI Jabar di Jalan Kemir 7 Bandung. Dari sini, diikuti dengan terbentuknya Cabang KAPPI di seluruh sekolah dan kota-kota hingga kecamatan di Jawa Barat. Bangkitlah massa pemuda pelajar membanjiri Jakarta, melancarkan demo perlawanan terhadap PKI dan organisasi bawahnya. Keikhlasan jiwa dan keberanian para pemuda pelajar berdemo, baik di Bandung, Bogor, dan Djakarta, sangat menakjubkan. Terbaca tanpa memerhitungkan risiko yang dapat merenggut nyawanya.

Sumber: Doc. Pribadi

ITTO RIVANO

Ketua Presidium KAPPI Bandung
Guna mengkualitaskan gerakan Demonstrasi KAPPI di Jakarta dan di Jabar
Itto Rivano dan Artie Djohan, bersama Udin Koswara, Suganda Priatna,
Maman, Toto, Komar Nurdin,
membangkitkan Pasukan Chusus - Passus dan Lasjkar Amperawati
terdiri dari pelajar SMP, SKP, SMA, PGAA, SGA swasta dan negeri.

Poster atau Spandoek bertuliskan
Mahmilubkan Soekarno, Soekarno Pelindung Gestapo PKI,
Tjabut Gelar Ulil Amri, Mahmilubkan Bandrio Hadji Peking
sebagai akibat Presiden Soekarno terlambat mengeluarkan surat perintah pembubaran PKI
terdahului Gubernur Jawa Barat Mashudi dan Pangdam VI Siliwangi Ibrahim Adjie
yang telah membubarkan PKI dan organisasi bawahannya Jawa Barat.

Sumber: *Doc. Pribadi*

Pemberian Satia Penegak Kodam VI Siliwangi (1969)

Pangdam H. R. Dharsono menyematkan lambang Satia Penegak Kodam VI SIliwangi kepada pimpinan angkatan 66.
Kedua dari kanan: Uwes Corni, Ketua umum DPHD KAPPI Jabar juga pencetus ide Provinsi Banten.

Sumber: Dept.Penerangan RI

DRUM BAND FATAYAT NU JATIM

Kebangkitan Fatayat NU menuntut pembubaran PKI
dalam Harlah ke-40 Nahdlatul Ulama

Sumber: Dept.Penerangan RI

DRUM BAND MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA

Genderang Kematian Untuk PKI
Didentangkan di hadapan Presiden Soekarno
Agar segera membubarkannya PKI
Bersama seluruh organisasi bawahannya

Semangat yang menyala dari pemuda pelajar menjadikan orang-orang yang bersimpati kepada komunis berang. Mereka dengan senjatanya mencoba mengubah jalannya sejarah. Mereka menembaki demo pemuda pelajar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan di kota-kota lainnya. Tidak sedikit pemuda pelajar yang jadi korban, gugur dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Darah pemuda pelajar yang masih muda dari KAPPI, KOKAM dan Ansor bersama Banser, dengan ikhlas membasahi bumi tempat juangnya demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka bertekad membersihkan Indonesia yang merdeka karena berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, harus terbebas dari ajaran ideologi komunisme, sekulerisme, atheisme - anti Tuhan dan anti agama.

> Suatu peristiwa sejarah yang sangat menakjubkan dan tanpa tanding. Suatu kekuasaan politik Orde Lama yang sangat kuat dan didukung PKI dan organisasi bawahannya serta oknum militer dan polisi, ditunjang pula oleh kekuatan komunis RRC, dapat ditumbangkan oleh kekuatan mayoritas massa pemuda pelajar yang masih duduk di bangku sekolah dan mahasiswa.
>
> Betapa cepatnya pengembangan penularan kesadaran anti komunis merasuk masuk pada setiap dada pemuda pelajar dari sekolahan swasta dan negeri, serta pesantren. Dalam waktu relatif singkat, dari kecamatan hingga Ibu kota. Kemudian, berkembang dari Jawa Barat menyebar ke seluruh Nusantara Indonesia. Mungkinkah hal ini terjadi bila tanpa dukungan Ulama?

Pengerahan massa KAPPI dari seluruh desa dan kota-kota di Jawa Barat, para pemuda pelajar yang membanjiri Jakarta digerakkan dan diorganisasikan oleh DPHD KAPPI Jabar, dipimpin oleh: Ketua Umum, Uwes Corni dari PII dan Jurnalistik Unpad. Ketua Presidium terdiri dari: Mursalin Dahlan dari IPM dan Teknik Kimia ITB. Mukti Ritonga, dari Pelajar Al-Waslijah dan Jurnalistik Unpad, Rusmana dari SEPMI dan IKIP Bandung. Ibnu Kutub dari IPNU dan IKIP Bandung.

Sekretaris Umum, A. Mansur Suryanegara dari IPM, Fak.Sastra Jurusan Sejarah Unpad. Sekretaris I, Hasan Sjukur dari PII dan Publisistik Jurusan Jurnalistik Unpad. Bendahara, Gahara Nauli Rambe, Peladjar Al-Waslijah dan Publisistik Jurusan Jurnalistik Unpad. Humas, Mahyudin Rambe dari Peladjar Al-Wasliyah dan Publisitik Jurnalistik Unpad. Keputrian, Tuti Sugiarti dari PII dan SKPN Bandung.

Markas DPHD KAPPI Jabar di ujung timur Jalan Suniaraja Bandung,[23] dan Markas KAPPI Bandung di Jalan Stasiun Bandung.

Untuk meningkatkan kualitas gerakan pengerahan massa, DPHD KAPPI Jawa Barat membentuk Pasukan Chusus – Passus dan Lasjkar Amperawati, dilaksanakan oleh Ketua Presidium KAPPI Bandung Itto Rivano - PII dari Fakultas Hukum Unpad dan Sekretaris Umum M. Romli - SEPMI dari IKIP Bandung.

Dibantu oleh Udin Koswara, Apen, Suganda Priatna, Suharto, Komar Nurdin - PII dari Fakultas Hukum, Sospol Unpad, Barna Somantri - Sepmi dari IKIP Bandung. Sedangkan Ketua Passus Bandung adalah Artie Johan.

Adapun Passus dan Lasjkar Amperawati KAPPI direkrut dari siswa SMP Muslimin, SMP, SMEA, SMA Muhammadiyah, SKPN, SMPN, SMAN, PGAAN, SGAN Bandung.[24] Dengan seragam loreng, warna dasar merah dan loreng berwarna hitam. Pada goresan loreng hitam terdapat tulisan Passus KAPPI atau Amperawati KAPPI. Sukar untuk dipahami di masa kini apabila pelajar putri dengan sukarela bersedia berjuang membebaskan negara dan bangsa dari ideologi komunis. Dengan tidak memerhitungkan imbalan materi apapun.

> Tuntutan dari Passus dan Amperawati pada saat demonstrasi dapat dibaca pada poster yang dibawanya, antara lain: Soekarno Pelindung Gestapu PKI, Tjabut Gelar Waliul Amri dari Sukarno, Sukarno Ketjap Agung, Pak Osa Maliki tindaklah Teror di Djokja. Mahmilubkan Sukarno.

Poster atau spandoek yang begitu bunyinya karena kerasnya tuntutan para pemuda pelajar agar Presiden Soekarno segera membubarkan PKI dan organisasi bawahannya, belum juga dijawab oleh Presiden Soekarno. Dengan kata lain, bunyi poster dan spandoek, atau coretan di jalanan itu sebagai akibat Presiden Soekarno mempertahankan PKI, serta menilai PKI dan organisasi bawahannya dengan melalui pengaruh Presiden Soekarno masih dapat dikendalikan seperti golongan nasional, agama dan ABRI yang berjuang untuk mempertahankan NKRI. Padahal, PKI realitasnya agen negara asing RRT atau Rusia. Presiden Soekarno tidak mau beranjak dari konsep Nasakom walaupun sudah tidak realistis lagi. Dampaknya, nama baik dan seluruh gelar Presiden Soekarno ternodai karena bekerja sama dengan PKI.

---

23 Haryoto Kunto,1984. *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. PT. Granesia, hlm 232, menuturkan bekas Markas KAPPI gedung antik bergaya seni bangunan *Indische Empire Stijl* tahun 1881, dihancurkan oleh Wali Kota Bandung.

24 Diluar dugaan pimpinan DPHD KAPPI Jabar tiba-tiba muncul kesatuan aksi tandingan *Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia – KAPI* hanya ada di Sukabumi dan Bandung yang terdiri dari pelajar Sekolah Kristen dipimpin oleh Thomas Sitepu. Tidak pernah ada di luar Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi hanya ada di Sukabumi dan Bandung. Demikian penjelasan Itto Rivano.

Setelah Djenderal Soeharto menyatakan pembubaran PKI dan segenap organisasi bawahannya, berdasar Surat Perintah 11 Maret 1966, dampaknya di Bandung, lima bulan kemudian, 19 Agustus 1966 terjadi serbuan dengan nama PNI Ali Soerachman - A Soe dan Barisan Anak Soekarno, didukung pula oleh sebagian oknum militer, ke Markas KAPPI di Jalan Stasiun Bandung. Sekarang menjadi SMP Pasundan. Mereka juga melakukan penyerangan ke Markas KAMI di Jalan Lembong, dan Universitas Katolik Parahiyangan di Jalan Merdeka Bandung.

Penyerbuan ke Markas KAPPI, dapat digagalkan oleh Mursalin Dahlan Ketua DPHD KAPPI Jabar yang menantang dengan suara keras di pintu Markas, langkahi lebih dahulu mayatku, kalau berani menduduki Markas KAPPI. Demikian penjelasan Itto Rivano SH kepada penulis. Kalau direnungkan sekarang, sukar dimengerti mengapa tantangan ini membuat kelompok penyerbu, sekalipun didukung oleh oknum militernya, ketakutan dan kembali menarik mundur.[25]

Perlu diperhatikan, walaupun namanya KAPPI atau pemuda pelajar, namun pimpinannya terdiri dari mahasiswa ataupun yang telah selesai studinya atau sarjana muda. Strategi kepemimpinan ini dipandang sangat perlu, demi menjaga infiltrasi PKI dan agar mampu mencerna info gerakan yang waktu itu sedang berkembang. Terutama untuk memudahkan membentuk kesatuan sikap antara KAPPI dan KAMI serta ABRI dalam menjalankan strategi gerakan atau aksi.

Perlu dicatat pula, pengaruh ajaran Islam ke dalam sekolah dan universitas, institut, melahirkan organisasi ikatan pelajar: Peladjar Islam Indonesia - PII, Ikatan Peladjar Muhammadijah - IPM, Ikatan Peladjar Nahdlatul Ulama - IPNU, Serikat Peladjar Muslimin Indonesia - SEPMI dan himpunan atau ikatan mahasiswa: Himpunan Mahasiswa Islam - HMI, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia - SEMMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia - PMII, Ikatan Mahasiswa Muhammadijah - IMM yang berhaluan Islam.

Organisasi ini semuanya menjadi ciri perluasan dan peningkatan jaringan kejuangan organisasi yang semula dengan nama Santri. Dengan kata lain, pembentukan organisasi pelajar atau mahasiswa, hakikatnya sebagai perkembangan lanjut gerakan Santri dari masa penjajahan dan masa kebangkitan kesadaran nasional. Adapun bentuk dan wujud gerakannya disesuaikan dengan kepentingan tantangan - *challenge* dan ciri zaman - *Zeitgeist*.

---

25 Dalam penyerbuan Barisan Anak Sukarno 19 Agustus 1967 ke Universitas Katolik Parahyangan, di Jalan Merdeka Bandung, telah gugur seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Yulius Usman dari HMI. Oleh Dewan Guru Besar, Yulius Usman diangkat sebagai Drs. Ekonomi Anumerta.

Sumber: Dept.Penerangan RI

POSTER HARLAH KE-40 NAHDLATUL ULAMA

31 Januari 1926 - 1966 di Jakarta

MEMBUBARKAN PKI ANTI TUHAN – IBADAT KEPADA ALLAH SWT

Menyambut kehadiran Presiden Soekarno dalam Harlah ke-40 NU.

UP Grading dan Musyawarah KAPPI

DPHD KAPPI Jabar tidak hanya mengadakan pengerahan massa untuk demonstrasi di Jakarta. Namun, di bawah pimpinan Mursalin Dahlan juga mengadakan Up Grading atau Musyawarah KAPPI Jawa Barat. Dengan mengambil lokasi berpindah-pindah di sekitar Jakarta, antara lain: Cirebon, Bogor, Banten, Purwakarta, dan Tasikmalaya. Tujuannya selain dengan pertimbangan geostrategi memilih kota-kota di sekitar Jakarta, juga sebagai upaya konsolidasi dan sebagai upaya membentuk kesadaran masyarakat agar konsisten tetap menentang ajaran komunis.

Bertolak dari kepentingan ini, pembicara dalam Up Grading KAPPI diundang beberapa pimpinan nasional yang memahami kondisi zaman dan mayoritas rakyat Indonesia bersikap anti komunis. Antara lain: Bung Tomo pelaku sejarah dalam Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Bergabung dalam gerakan Amanat Penderitaan Rakjat - Ampera dari pemuda pelajar dan mahasiswa. Bung Hatta Proklamator 17 Agustus 1945 dikenal dengan pencetus pemikiran Demokrasi Kita. Tidak lupa

Sumber: *picasaweb.google.com; id.wikipedia.org*

Prof. Dr. Buya Hamka, Ulama pejuang dan pimpinan Masjumi, Muhammadiyah yang pernah dipenjarakan pada masa Orde Lama karena menentang PKI.

TRITURA KAPPI dan KAMI

Sebelum lahirnya Supersemar 1966, pada 12 Januari 1966, Rabu Wage, 19 Ramadhan 1385, sesudah melakukan demo ke Kantor Sekneg berdialog dengan Menteri Chaerul Saleh maka KAMI dan KAPPI mencetuskan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat - Tritura, isinya adalah :

1. Pembubaran PKI;
2. Pembersihan Kabinet dari Unsur G-30-S/PKI;
3. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Harlah Ke- 40 Nahdlatul Ulama

Namun, Tritura ini tidak dijawab oleh Presiden Soekarno. Bahkan, Presiden Soekarno memanfaatkan momen Hari Lahir Ke-40 Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926-1966 dengan mengajak agar segenap warga Nahdliyin merangkul Presiden Soekarno dan sebaliknya Presiden Soekarno merangkul Nahdlatul Ulama:

> Memang saja tidak tedeng aling2, saja tjinta kepada N.U. Bukankah saja sudah mengutjapkan di Sala, He N.U. saja tjinta kepadamu, tjintailah kepadaku. Hai N.U. saja rangkul kepadamu, rangkullah aku ini.[26]

Pidato Presiden Soekarno benar-benar tidak memahami tuntutan warga Nahdliyin agar Presiden Soekarno membubarkan PKI. Seperti yang terpampang pada poster raksasa yang menyatakan "Membubarkan PKI Jang Anti Tuhan = Ibadat Kepada Allah SWT."

Artinya, para Ulama dan pimpinan Partai Nahdlatul Ulama tetap menuntut pembubaran PKI. Sayangnya, tuntutan yang demikian jelas, tidak diperhatikan oleh Presiden Soekarno. Padahal, Presiden Soekarno menamakan dirinya sebagai Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Sikap Presiden Soekarno yang tdak mau mendengar tuntutan Nahdlatoel Oelama - NO, dijadikan kata sindiran di tengah masyarakat, Soekarno tanpa No jadi Soekar.

26 Kementerian Penerangan, Publikasi Visual, 1966, *Harlah N.U.* Tjukilan Amanat P.J.M. Presiden Sukarno pada Rapat Akbar Peringatan 40 tahun Harlah (Hari Lahir) Nahdlatul Ulama pada 30 Januari 1966 di Stadion utama Gelora Bung Karno, Senajan Djakarta, hlm 9.

Sumber: *Dept.Penerangan RI*

DEFILE BARISAN SERBA GUNA - BANSER ANSOR DAN DRUM BAND G.P. ANSOR

Terompet kematian PKI dan organisasi bawahannya digemakan di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di tengah Samodra Keluarga Nahdliyin di hadapan Presiden Soekarno. Sekaligus Genderang Syukur ditabuh, mensyukuri Nikmat Allah para Ulama dan Santri Selamat dari Terulangnya Kebiadaban Kudeta PKI di Madiun dan G30S/PKI di Jakarta.

Sebenarnya, GP Ansor dan Banser menghadiri Harlah Ke-40 Nahdlatul Ulama, di Jakarta dengan nawaitu siap menunggu komando selanjutnya dari Presiden Soekarno, dan Dr. K.H. Idham Chalid dalam menumpas PKI dan segenap organisasi bawahannya, seperti yang telah dilaksanakan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali terhadap PKI atau Gestok 1965.

> Sangat disesalkan tidak ada komando atau perintah lanjutnya. Baik dari Presiden Soekarno ataupun dari Ketua Umum NU, Dr. K.H. Idham Chalid. Akibatnya, Harlah Ke-40 Nahdlatul Ulama di Senayan Jakarta, hanya mengadakan show of force dari kekuatan keluarga besar Nahdlatul Ulama termasuk GP Ansor dan Banser, disertai drum band Muslimat.
>
> Walaupun demikian, 31 Januari 1966, Senin Pon, 8 Syawwal 1385, mengubah Jakarta yang pernah jadi lautan bendera dan poster merah Palu Arit pada saat Ultah ke-45 PKI, 23 Mei 1965, menjadi Samodra Hijau Nahdlatul Ulama dan dipenuhi poster yang menggambarkan desakan warga Nahdliyin membebaskan NKRI dari PKI.

Tuntutan Partai Nahdlatul Ulama tetap konsisten ingin membubarkan PKI dan organisasi bawahannya, walaupun dirangkul oleh Presiden Soekarno, menjadikan kepastian langkah KAMI dan KAPPI bersama ABRI, berjuang membebaskan bangsa dan negara NKRI dari bencana PKI. Apalagi, Kudeta PKI bukan untuk Indonesia. Melainkan untuk RRC dan Uni Soviet Rusia serta Kominform.

Ledakan demonstrasi KAMI-KAPPI yang datang dari kota-kota di Jawa Barat, membanjiri Jakarta, tidak dapat dilumpuhkan atau dihancurkan dengan kekuatan senjata Tjakrabirawa Barisan Kawal Presiden Soekarno. Seratus Menteri juga tidak mampu berbuat apapun untuk membendungnya.

Presiden Soekarno tidak mampu lagi melindungi Omar Dhani dan keluarganya walaupun disimpan di Istana dan tidak dapat lagi mempertahankan pendapatnya bila PKI dibubarkan akan terjadi ancaman dari luar negeri Rusia dan RRC. Demo KAPPI di kota-kota besar telah mengambil alih sekolah China Komunis atau milik Baperki. Dekan Fakultas Sastra pun telah membekukan kuliah untuk Jurusan Sastra Rusia dan China. Seluruh Perguruan Tinggi dan sekolah menghentikan aktivitas belajar mengajar sebelum PKI dibubarkan.

Gubernur Jawa Barat Mashudi dan Pangdam Kodam VI Siliwangi Ibrahim Adjie telah memelopori pembubaran PKI Jawa Barat dan organisasi bawahannya. Menurut Soeharto dalam Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya , Otobigrafi mendesak

kepada Presiden Soekarno untuk menghindarkan ancaman dari luar negeri agar mengalihkan kewenangan pembubaran PKI kepada Letnan Djendral Soeharto. Dari sinilah, lahirnya Supersemar.

Supersemar Pembubaran PKI

Puncak keberhasilan perjuangan KAMI dan KAPPI dalam mendukung perjuangan ABRI yang dipimpin oleh Major Djenderal Basuki Rahmat, Brigadir Djenderal M. Jusuf, dan Brigadir Djenderal Amir Mahmud menjadikan Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 - Supersemar, bertepatan pada Jumat Pahing, 18 Dzulqaidah 1385. Kelanjutannya bersumber pada Supersemar, Letnan Djenderal Soeharto, atas nama Presiden Soekarno pada 12 Maret 1966, Sabtu Pon, 19 Dzulqaidah 1385, menetapkan pembubaran dan pelarangan PKI dan ajaran ideologi komunis.[27]

Pembubaran dan pelarangan aktivitas PKI dan ajaran komunisme disambut oleh rakyat dengan rasa syukur tiada hingga. Di mana-mana terjadi demonstrasi segenap kesatuan aksi luar biasa besarnya. Komunisme dan Marxisme benar-benar merupakan ajaran musuh rakyat Indonesia.

> Sekali lagi, untuk pertama kalinya dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia, kekuatan PKI sebagai partai politik dan organisasi bawahannya, sekalipun didukung oleh kekuatan RRC dan Rusia, tumbang oleh kekuatan pemuda pelajar KAPPI yang diorganisasikan oleh PII, IPM, IPNU, SEPMI, Ansor dan mahasiswa KAMI yang digerakkan oleh kekuatan utamanya dari HMI bersama IMM, PMII, SEMMI dan segenap kekuatan rakyat, pelajar, mahasiswa Indonesia yang anti komunis.

Langkah lanjut perjuangan dari realisasi Supersemar, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia - KAMI menyampaikan Nota Politik KAMI, pada 2 Mei 1966, dibacakan oleh Ketua Presidium KAMI Cosmas Batubara, di depan Ketua Sidang DPRGR H. Achmad Sjaichu, menyatakan bahwa proses pembentukannya DPRGR, MPRS, dan DPA tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan DPR.

27 Soeharto, 1989. *Soeharto, Fikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Otobiografi.* PT Citra Lamtoro Gung Persada. Jakarta, hlm. 171-178.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

DEMONTRASI NU
TUNTUT BUBARKAN PKI DAN ORGANISASI
BAWAHANNYA MASSA KAPPI KAMI MENUNTUT
MAHMILUBKAN SUBANDRIO

Pendadanan Kembali dan Pembaruan DPRGR

Pengaruh dari Nota Politik KAMI ini, pimpinan DPRGR demisioner. Kemudian pada 17 Mei 1966, Selasa Wage, 25 Muharram 1386, DPRGR memilih pimpinannya:

Ketua	:	H. A. Sjaichu	Golongan Islam
Wakil Ketua	:	Mohammad Isnaeni	Golongan Nasionalis
Wakil Ketua	:	Drs. Ben Mang Reng Say	Golongan Katolik
Wakil Ketua	:	Laksamana Muda L. Mursalin Daeng Mamanggung	Golongan Karya
Wakil Ketua	:	Brigjen Dr. Sjarif Thayeb	Golongan Karya

Dari penamaan golongan tadi, terbaca adanya istilah nasionalis, diartikan sebagai golongan yang tidak mewakili agama atau aliran kebatinan. Padahal, istilah nasional awalnya dicetuskan dan disosialisasikan oleh H.O.S. Said Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis dari Centraal Sjarikat Islam. Pada awal maknanya, pada 1916 M, gerakan kepeloporan umat Islam Indonesia sebagai mayoritas bangsa dalam perjuangannya membebaskan bangsa dan negara serta agama dari penindasan imperialisme Barat. Berikutnya berubah maknanya seperti di atas.

> Di atas terdapat adanya empat golongan maka makna istilah nasional di tahun 1386 H/1966 M berubah menjadi nama golongan bukan dari gerakan Islam. Berarti pada saat perubahan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru, terjadi pula proses deislamisasi makna nasional.

Selain itu, saat situasi nasional sangat genting, para Ulama dijadikan umbrella - payung pelindung dan diangkat dalam kedudukan dan peran politik yang menentukan. Seperti diangkatnya K.H. Achmad Sjaichu dari NU sebagai Ketua DPRGR di atas. Juga KAP Gestapu dipimpin Subhan Z.E. dari NU. Sebaliknya, bila situasi sudah aman, digeser dan dikondisikan agar Ulama kembali kepada Khittah 1926 memimpin jami'ahnya sendiri.

Kebijakan Presiden Soeharto selanjutnya, dalam melakukan "redressed and renewed – mendandani dan memperbaharui" DPR dari 247 wakil, ditambah dengan 75 dari ABRI dan 14 KAMI, 2 Hindu Bali, 8 Irian Barat, 2 Veteran, 2 Sipil. KAPPI tidak menuntut untuk ikut serta memiliki perwakilan dalam kelembagaan negara. Walaupun pimpinan KAPPI ada yang diangkat sebagai Staf Pengajar di Perguruan

Tinggi atau telah menyelesaikan studi di universitas atau institutnya.

Militer 75 wakil, terdiri dari:
AD 19, AL 14, AU 14, Polisi 14

Parpol menjadi 247 wakil, terdiri dari:
NU 75, PSII 20, Parmusi 18, Perti 9
Parkindo 17, Katolik 15,
PNI 78, IPKI 11, Murba 4

Dari gambaran nama partai atau golongan dan jumlah perwakilannya tadi, Partai Sosialis Indonesia - PSI dari Soetan Sjahrir ditiadakan. Parmusi sebagai partai politik baru yang dibangun oleh pimpinan Persjarikatan Muhammadijah, hampir bersamaan jumlah perwakilannya dengan Parkindo dan Katolik.

Apakah penentuan jumlah perwakilan Partai Kristen Indonesia - Parkindo dan Partai Katolik di atas, didasarkan pula adanya peningkatan jumlah konversi penganut baru agama Kristen yang bertambah 400.000 orang, beberapa bulan setelah Kudeta 30 September 1965 PKI, seperti yang dikemukakan oleh Justus M. van der Kroef, 1971, dalam Indonesia Since Sukarno.

Apakah karena adanya dukungan kalangan militer non-Islam maka jumlah perwakilan partai Kristen dan Katolik tersebut, hampir menyamai jumlah perwakilan parpol Islam? Barangkali juga sebagai akibat Orde Baru setelah menghancurkan PKI, politiknya mulai cenderung ke Barat maka jumlah perwakilan dari kedua partai politik non-Islam disamakan dengan partai politik Islam.

Kemudian, timbul pertanyaan apa alasan kedua partai politik Kristen dan Katolik, kelanjutannya ditiadakan? Apakah karena keduanya sudah disiapkan wadah baru Golongan Karja - Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia – PDI? Sedangkan partai politik Islam NU, PSII, Perti, Parmusi juga ditiadakan, tetapi disalurkan dalam Partai Persatuan Pembangunan – PPP? Lalu, masuk kemana Partai Katolik dan Parkindo, ke Golkar atau PDI?

D.N. Aidit, Pemimpin PKI Keblinger

Kembali ke masalah RRC pembantu G30S/PKI maka Pemerintah RI mulai 1 Oktober 1967 memutuskan Hubungan Diplomatik RI dengan RRC. Seperti yang dituturkan oleh Manai Sophiaan dari Karim D.P. bahwa Aidit dan Njoto, setelah menghadiri KTT Kecil di Kairo, Juni 1965, pergi ke Paris. Tanpa diketahui oleh Presiden Soekarno, dilanjutkan ke Kremlin untuk menyampaikan niat kudeta di Indonesia seperti yang dikerjakan oleh Kolonel Boumediene yang berhasil menggulingkan Presiden Ben Bella yang sedang tidur.

Walaupun kudeta tersebut dipimpin oleh kolonel, dan hanya didukung oleh 30% rakyat, menurut Aidit dapat diubah menjadi revolusi. Penolakan rencana kudeta oleh Kremlin tetap dikerjakan oleh Aidit karena merasa telah didukung oleh RRC dan dilaksanakan oleh kelompok perwira muda yang maju.

Dapatlah dipahami bila Aidit membenarkan Kudeta Kolonel Boumediene terhadap Presiden Ben Bella dalam menjawab pertanyaan Karim D.P. tadi karena Aidit sendiri merencanakan Kudeta PKI, pelaksananya adalah Letnan Kolonel Untung dan akan dilaksanakan sama malam hari seperti di Aljazair.

> Namun, D.N. Aidit lupa bahwa Presiden Soekarno tidak sama kualitasnya dengan Presiden Ben Bella. Beberapa kali diberitakan CIA mencoba melakukan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, dan selalu gagal. Apalagi, Politbiro PKI dan D.N. Aidit merencanakan akan menggantikan Presiden Soekarno walaupun sedang turun kesehatannya dan diobati oleh Sin She RRC, dapat dipastikan hasilnya gagal.
>
> D.N. Aidit salah perhitungannya, Angkatan Darat masih memiliki banyak Prajurit yang dibesarkan dengan pengalaman militer dan politik dalam kancah revolusi melawan imperialis. Beda dengan realitas pimpinan militer dan sikap rakyat Aljazair.
>
> Aidit lupa dalam masa Perang Kemerdekaan, 1945-1950 M ketika PKI melakukan Kudeta di Madiun, Presiden Soekarno menyatakan PKI melakukan teror terhadap rakyat. Rakyat sangat cinta kepada Presiden Soekarno dan Panglima Besar Soedirman, dan saat itu Aidit dan kawan-kawannya tidak dikenal rakyat. Kecuali Amir dan Moeso, kedua pimpinan PKI yang dicap oleh Presiden Soekarno sebagai Teroris.
>
> Aidit lupa bahwa pidato dan penyataan Presiden Soekarno bagi rakyat awam mempunyai nilai hukum yang tinggi. Walaupun telah lama tetapi sukar dilupakan, kata Presiden Soekarno, PKI Teroris.

Oleh karena itu, pidato Presiden Soekarno yang dikenal dengan nama Nawaksara[28]

28 Soegiarso Soerojo, 1988. *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai.* CV Sri Murni. Jakarta, hlm.

menyatakan bahwa Gerakan 30 September ditimbulkan oleh tiga faktor:

1. Keblingeran pemimpin-pemimpin PKI;
2. Kelihaian Nekolim;
3. Memang ada oknum-oknum yang tidak benar.[29]

Kekeblingeran pimpinan PKI dapat diukur dari ucapan kemarahan besar Presiden Soekarno dalam Sidang Kabinet di Istana Bogor, 6 Oktober 1965, memaki-maki Njoto PKI,

> "Njoto, kamu tolol mengobarkan peristiwa terkutuk itu. Peristiwa ini menghancurkan nama komunis. Itu satu tindakan kekanak-kanakan"

Demikian penjelasan Djenderal Soeharto yang hadir dalam sidang tersebut.

> Pidato Presiden Soekarno, Nawaksara, di depan MPRS, dituntut untuk mempertanggungjawabkan sebab terjadinya peristiwa G30S/PKI dan epilognya. MPRS mencabut gelar Pemimpin Besar Revolusi dan Presiden Seumur Hidup karena tidak memiliki dasar hukum.

Jika kedua pernyataan dan penilaian Presiden Soekarno terhadap Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, PKI adalah Teroris dan pertanyaan Presiden Soekarno terhadap Kudeta G30S/PKI, pemimpin PKI adalah pemimpin yang keblinger, keduanya dapat dijadikan fakta sejarah bahwa kehadiran PKI di tengah bangsa dan negara Indonesia, menjadi sumber terorisme, keblingeran, ketololan, dan tindakan kekanak-kanakan.

Lalu, setelah penumpasan PKI secara fisik selesai, parpol dan organisasinya dibubarkan. Kemudian, kemana saja anggota dan pimpinan PKI melakukan infiltrasi? Sulit kiranya untuk menemukan informasinya karena istilahnya saja infiltrasi, tentu tidak terbuka sifatnya. Barangkali hanya dapat dideteksi bila timbul lagi pemimpin yang keblinger.

Melalui Supersemar pula, dibubarkan lembaga-lembaga yang didirikan secara ekstra konsitusional: Front Nasional, Komando Operasi Tertinggi - KOTI, Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi - Kotrar, Komando Logistik Nasional - Kolognas,

562 penolakan Pimpinan MPRS RI No. 13/B/1967 tentang Tanggapan Terhadap Pelengkap Pidato Nawaksara.

29 *Ibid*, hlm.415. Periksa, Justus M. van der Kroef. 1971. *Indonesia Since Soekarno*. Asia Pacific Press. Singapore, h. 33 menyatakan bahwa *Presiden Soekarno mengutuk Kudeta Gestapu*. Presiden Soekarno juga menyatakan sangat terkejut – *complete surprise to me*. Dinyatakan selanjutnya Kudeta Gestapu terjadi akibat adanya tiga sebab: (1) *Blundering PKI leaders* (2) *The Cunning of the nekolim* (3) *And the activities of persons who were "crazy"*.

DRS. K.H. MUCHTAR ADAM

Pendiri Pesantren Al-Qur'an Babussalam
Ciburial Bandung, Solok, Selayar, Wakaitobi, Nias, dan Aceh
Pernah ditugaskan sebagai pembina rohis Tapol PKI di Pulau Buru.
Kepada penulis menuturkan keherananya, mengapa Tapol PKI banyak yang masih buta huruf.
DIsamping itu diakui ada intelektualnya, yaitu Pramudya Ananta Toer dari Lekra.
Keherananya dijawabnya, hal itu terjadi sebagai akibat Tapol PKI dikirim dari daerah yang dipimpin oleh Walikota, Bupati, Kodim, Polisi yang menaruh simpati pada PKI dan organisasi bawahannya. Oleh karena itu, dikirimkanlah PKI yang buta huruf. Lalu ke mana larinya atau menyusupnya anggota dan pimpinan PKI yang tidak buta huruf?

Sumber: *Doc. Pribadi*

dan yang lainnya.

Pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1966 diberi nama "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah - Jasmerah". Isinya tetap mempertahankan konsep Nasakom. Pidato ini dinilai oleh rakyat, Presiden Soekarno sendiri justru telah meninggalkan sejarah yang sebenarnya. Tidak lagi mampu untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Terjadilah demo di mana-mana. Di Jakarta berdampak gugurnya wartawan mahasiswa Zainal Zakse.

GP Ansor dan RPKAD

GP Ansor dengan Bansernya, tanpa menunggu komando Panglima Kodam VIII Brawijaya, melakukan gerakan sapu bersih PKI dan segenap organisasi bawahnya. Menurut Choirul Anam, di bawah pimpinan Hizbullah Huda, GP Ansor melakukan penumpasan secara fisik terhadap PKI karena tidak mau terulang kembali Ulama dijadikan sasaran pembunuhan PKI pada saat Kudeta PKI di Madiun, 1948 M. Diakibatkan juga adanya rencana PKI akan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Ulama. Selanjutnya, Choirul Anam menuturkan operasi fisik GP Ansor dan Banser ini menghadapi kekuatan PKI yang sudah memiliki senjata. Akibatnya di seluruh Jawa Timur, GP Ansor dan Banser banyak gugur sebagai syuhada, berjumlah sekitar 132 orang pemuda.

Pada saat itu, terdengar berita D.N. Aidit melarikan diri ke Surabaya, kemudian pindah ke Blitar. Dari sini, bersembunyi lagi ke Semarang dan Solo Jawa Tengah. Dampaknya, setelah D.N. Aidit tertangkap, muncullah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, gerakan mBah Soero dengan pasukan baju dan celana hitamnya bertali pinggang benang putih. Mereka ini pendukung gerakan PKI, PNI Ali Soerachman atau PNI ASoe. Disebut juga sebagai gerakan Aku Pendukung Soekarno atau Apes. Dalam bahasa Jawa, Asoe adalah anjing dan Apes artinya celaka. Singkatan ini mewarnai pemberitaan media anti-Soekarno.

Operasi militer RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi, bersama GP Ansor dan Banser berhasil menghancurkan mBah Soero di sekitar Blora. Demikian penuturan Choirul Anam, tentang rakyat bertindak sendiri menghancurkan PKI.

Di tengah bangsa sedang Konfrontasi Indonesia-Malaysia, dimanfaatkan oleh PKI untuk melaksanakan Kudeta PKI 30 September 1965. Mengapa di tengah konfrontasi digunakan untuk kudeta? Menurut teori komunis, perang

sebagai pembuka jalan kemenangan bagi revolusi komunis. Komunisme juga mengajarkan dengan melaksanakan *vultural strategy* - mengail di air keruh akan mensukseskan apa yang sedang diprogramkan, yakni kudeta.

Ketika PKI melaksanakan teori *vultural strategy*, muncullah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia - KAMI dengan mayoritasnya dari HMI, dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia - KAPPI dengan mayoritasnya dari Pelajar Islam Indonesia - PII, dan didukung pula oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah - IPM, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama - IPNU, serta KAP Gestapu dari Ansor dan Banser, menyulitkan gerakan Kudeta G30S/PKI selanjutnya.

Sebenarnya, ABRI dalam upayanya menghancurkan PKI menemui hambatan karena situasi peralihan iklim politik masih didominasi oleh pengertian anti komunis tetapi pro Soekarno. Dari kalangan ABRI sendiri masih belum jelas, dari kesatuan dan batalyon mana memihak kemana serta kepada siapa?

Setelah adanya kegagalan Kudeta G30S/PKI, Presiden Soekarno memerintahkan agar menghancurkan Gerakan Satu Oktober atau Gestok sampai ke akar-akarnya. Maksudnya, Gerakan 30 September terjadi pada pukul 03.00 pagi, berarti sudah lewat jam 00.00 tengah malam, masuk 1 Oktober 1965. Oleh karena itu, gerakannya bukan G-30-S melainkan Gestok.

Pidato Presiden ini di Jawa Timur wilayah Ansor dan Banser, diterjemahkan menjadi perintah pembasmian anggota dan pimpinan PKI dan organisasi bawahannya. Diikuti Pemuda Marhaen yang anti PKI di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali. Tidak mau terulangnya Kudeta PKI di Madiun yang menjadikan kalangan Marhaen juga jadi korbannya bersama para Ulama dan Santri.

Setelah D.N. Aidit mengetahui Kudeta G30S/PKI gagal total, ia segera meninggalkan Jakarta dan lari ke Surabaya. Kemudian, pindah ke Blitar pada 6 Oktober 1965. Selanjutnya, lari ke Jawa Tengah, sembunyi di rumah janda tua *mBok* Hardjosoemarto di Desa Sambeng Gede, belakang stasiun KA Balapan Surakarta. Rumah itu dikontrakkan kepada A. Kasim, pensiunan pegawai Bea Cukai.

Pada 22 November 1965, pukul 21.00 D.N. Aidit tidak dapat lagi melarikan diri dari operasi RPKAD yang dipimpin oleh Kapten Hartono dan Letnan Ning Prijatna. Tamatlah riwayat D.N. Aidit Sekretaris CC PKI. Berkat Rahmat Allah Yang

Kita Ungkap Lagi Tulisan „TIME" Tgl. 16-7-1967

Meletusnja G-30-S/PKI

Membuka Kesempatan Misi2 Kristen Indonesia

DJAKARTA (MH).— MENGULAS tentang kemadjuan Misi2 Kristen di Indonesia dalam rangka pengabaran Indjil keseluruh pendjuru dunia madjalah Time (Amerika) dalam penerbitannja tgl. 16 Djuli 1967 menulis sebagai berikut :

Selama pemerintahan kediktatoran Sukarno jang tjukup lama dan tak menjenangkan itu, Missi Kristen di Indonesia terantjam oleh pengatjau2 kominis dan gerombolan2 terror Islam dan mengalami tekanan2 jang dilakukan setjara priodik oleh pemerintah jang kedjam itu. Sekarang ini, dikalangan bangsa jang sebahagian besar beragama Islam itu dimana orang2 Kristen berdjumlah kurang dari 10% diantara 110 djuta penduduk adalah merupakan suatu adegan kebangkitan adjaran geredja jang bersifat eksplosip jang oleh madjalah Kehidupan Presbeyterian di A.S. dinamakan „salah satu gerakan terbesar masuk agama Kristen dalam zaman modern". Dalam djangka waktu 20 bulan sedjak revolusi anti komunis, geredja Katolik dan Protestan telah memperoleh tambahan penganut lebih kurang 250.000 orang.

Di Djawa Tengah dan Djawa Timur sadja, 65.000 orang telah dibaptiskan. Didaerah Tanah Karo Sumatera Utara, 16.000 orang telah masuk geredja Kristen. Tigapuluh djemaat baru dengan anggota2 5.000 orang telah didirikan disuatu daerah Kalimantan Barat. Di Djakarta, 50 perkumpulan pengadjaran Indjil telah timbul & permintaan akan Kitab Indjil sedemikian besarnja sehingga sangat dirasakan kekurangan persediaan. Dewan Geredja2 Nasional A.S. telah memberikan bantuan sebesar $. 300.000 untuk menjokong orang2 Protestant Indonesia dalam usaha mendidik anggota2 mereka jang baru itu.

Banjak diantara orang2 jang masuk geredja itu, adalah pengikut2 Kominisme (termasuk Tjina2 RRT-Red), dan jang terbanjak djumlahnja ialah didaerah2 dimana sebelum kedjatuhan Sukarno memang sangat banjak orang2 Komunisnja (Djateng). Berkatalah seorang anggota Missi Geredja Baptist di Djakarta: „Tatkala Komunisme gagal dalam memenuhi djandjinja untuk mengisi dada rakjat ini dengan suatu kejakinan, merekapun berpindah mendjadi orang2 Kristen. Sebahagian pemimpin2 geredja jang nampaknja kurang bersemangat, menaruh tjuriga bahwa kebanjakan orang2 jang masuk geredja itu bukanlah karena Iman melainkan karena didorong oleh rasa

(Bersambung kehalaman IV)

DN AIDIT (jang telah mati), dinamai djulukan sebagai antem Mao di Indonesia berhasil mengibuli rakjat dengan idee2 NASAKOM-NJA, menudju Lubang Buaja.—

Sumber: Hanan MH

Madjalah Time, 16 Juli 1967

Memprovokasi Islam sebagai teroris, menuduh Islam menteror kaum Kristen dan Katolik, yang telah mendapatkan anggota baru sejumlah 250.000 mantan PKI. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah sejumlah 65.000 orang yang telah dibaptis. Di Sumatera Utara sejumlah 16.000 orang. Amerika Serikat memberikan bantuan ke Gereja Protestan Indonesia sejumlah US$ 300.000 untuk pembinaan jemaat baru mantan PKI.

Mahakuasa, tepat 27 Rajab 1365, Senin Pon, 22 November 1965. Bebaslah bangsa dan negara NKRI dari keganasan D.N. Aidit PKI, pemimpin Marxisme.[30]

Walaupun demikian, tidaklah berarti kader PKI sudah tertangkap seluruhnya. Sampai dengan tiga tahun kemudian, menurut Panglima Kodam V/Djaja, Djenderal Amir Machmud, baru 75% tokoh Gestapu PKI tingkat C berhasil ditangkap. Menurut Djaksa Agung Muda, Kolonel Purwosunu SH, sekitar 200.000 kader PKI sukar dipatahkan keyakinannya, September 1968. Sebelumnya Operasi Trisula di Blitar Selatan, berhasil menangkap dan menembak mati Oloan Hutapea yang diangkat sebagai pengganti D.N. Aidit, Agustus 1968.

Operasi terhadap PGRS/PARAKU di Kalbar, dilaksanakan oleh Pangdam XII Tandjungpura, Brigjen Soemadi yang pernah berhasil menangkap Moeso pimpinan Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948. Moeso tertangkap di Ponorogo Madiun. Dengan kerja sama dengan masyarakat Suku Daya, pasukan PGRS/ PARAKU yang bersembunyi di hutan rimba yang masih lebat, dapat dihancurkan.

Pimpinan PKI Golongan A, bersama oknum militer yang terlibat langsung kudeta, diadili di Mahkamah Luar Biasa - Mahmilub.[31] Menurut Djaksa Agung Madjen Sugiharto, 1966, seluruh tahanan sipil PKI berjumlah 120.000 tidak termasuk militer. Secara bertahap dibebaskan kembali, 1974, tinggal 30.000 termasuk 10.000 di P. Buru. Menyusul Golongan B, 1979, seluruhnya dibebaskan. Di antaranya adalah Pramudya Ananta Toer dari Lekra.

Namun, untuk gembong Gestapu PKI, Sjam, Supardjo, Wirjomartono, Njono, dan Soedisman, ditolak permohonan grasinya oleh Presiden Soeharto.[32] Mereka tetap dijatuhi hukuman mati dan eksekusinya dilaksanakan pada waktu fajar menyingsing, Oktober 1968. Sedangkan Menteri Achmadi dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, dan Achadi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, Mei 1968.

Perlu dicatat, menurut keterangan Drs. H. Muchtar Adam dari Pesantren Al-Qur'an Babusalam Bandung,[33] ditugaskan sebagai pendidik Agama Islam untuk

30 Soegiarso Soerojo, 1988. *Op.Cit.*, hlm. 235.

31 Menurut Mohammad Hatta, karena Presiden Soekarno tidak pernah di Mahmilubkan maka tidak dapat dinyatakan terlibat dalam G30S/PKI.

32 Beda dengan S.M. Kartosoewirjo menolak untuk minta grasi kepada Presiden Soekarno ketika Hakim Mahmilub menanyakannya.

33 Drs. K.H. Muchtar Adam pada masa Reformasi, mengembangkan pembangunan Pesantren Al-

Tapol PKI di Pulau Buru, menyatakan merasa heran mayoritas tapol PKI di Pulau Buru masih buta huruf.

Pertanyaannya, benarkah mereka pimpinan PKI atau pimpinan organisasi bawahannya. Di mana pimpinan PKI sebenarnya dan dalam organisasi apa serta kemana pimpinan PKI yang tidak buta huruf menyusupnya, infiltrasi, atau melarikan diri, apabila di Pulau Buru kebanyakan tapol PKI buta huruf?

Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Drs. K.H. Muchtar Adam, tapol PKI yang buta huruf ini dikirim ke Pulau Buru, berasal dari daerah yang dipimpin oleh Camat, Kodim, Bupati, Walikota, Gubernurnya simpatisan PKI. Misalnya Wali Kota Bandung, Djukardi adalah tokoh PKI.

Pembubaran PKI Jawa Barat

Jawa Barat satu-satu provinsi terdepan dan terdekat dengan ibu kota Jakarta. Oleh karena itu, Jawa Barat menjadi barometer segenap gerakan yang muncul di seluruh tanah air Indonesia. Pada saat terjadinya, G-30-S/PKI, pengaruh demonstrasi KAMI KAPPI di Jawa Barat, memengaruhi gerakan demo di luar Provinsi Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat, PKI dan organisasi bawahnya paling awal dibubarkan. Siapa yang membubarkannya?

Ternyata, atas inisiatif Gubernur Jawa Barat Mashudi yang berlatar belakang sebagai Pesindo[34], bersama Pangdam Siliwangi Ibrahim Adjie, mendesak agar PKI dan segenap organisasi bawahannya membubarkan diri. Setelah PKI membubarkan diri, Gubernur dan Panglima menghadap Presiden Soekarno. Saat itu, ditanya oleh Presiden Soekarno, siapa yang berhak membubarkan PKI? Gubernur menjawab Presiden Soekarno. Lalu, mengapa Gubernur dan Pangdam membubarkan PKI Jabar di luar perintah Presiden?

Jawabannya, apabila tidak segera dibubarkan maka akan terjadi proses penumpasan PKI di Jawa Barat yang lebih hebat daripada di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena di Jawa Barat, masih banyak Darul Islam musuh utama PKI. Kebijakan Gubernur Mashudi dan Panglima Kodam VI Siliwangi Ibrahim Adjie, menjadikan PKI Jawa Barat selamat. Tidak terjadi pembunuhan PKI yang parah sebagaimana di Jawa

Qur'an di Aceh, Solok Sumatra Barat, Pulau Nias, Pulau Selayar, Kepulauan Wakatobi, dan juga merencanakan di pulau-pulau kecil di dekat perbatasan Filipina Selatan. Periksa lebih lanjut, Muchtar Adam, 2007. *Meretas Jalan Menuju Ma'rifatullah*. Penerbit Makrifat. Bandung.

34 Mashudi, 1998. *Mashudi Memandu Sepanjang Masa*. Yayasan Universitas Siliwangi. Bandung, h. 72 menjelaskan bahwa dirinya sebagai anggota Pemuda Sosialis Indonesia - Pesindo yang didirikan Wikana. Dijelaskan pula bahwa Mashudi sebagai peserta dari Pesindo Bandung ketika Munas Pesindo di Jogyakarta, 10 November 1945.

Timur, Jawa Tengah dan P. Bali.

Pembubaran PKI Jawa Barat dengan cara ini, menimbulkan ketegangan hubungan antara Djenderal Soeharto, Kastaf Djenderal Ton Dharsono sebagai Djenderal Angkatan Darat yang antikomunis, terhadap Pangdam VI Siliwangi Ibrahim Adjie yang dinilai terlalu dekat dengan Presiden Soekarno yang saat itu tidak mau membubarkan PKI.

Dengan pendekatan pribadi dan sebagai Gubernur, Mashudi kepada Djenderal Soeharto dan Djenderal Ton Dharsono menjelaskan bahwa Pangdam Siliwangi Major Djenderal Ibrahim Adjie, sebagai jenderal yang antikomunis, tetapi pro Soekarnois.[35] Kedekatannya dengan Presiden Soekarno hanya bersifat hubungan pribadi, tidak ada kaitannya dengan upaya penyelamatan PKI. Demikian penjelasan Mashudi dalam *Mashudi Memandu Sepanjang Masa*.

> Perlu dicatat: Kodam III Siliwangi memperoleh Sam Karya Nugraha dari Presiden Soekarno karena jasa-jasanya menumpas Kudeta PKI di Madiun, 18 September 1948, Republik Maluku Selatan 1950, Permesta 1958-1961, dan TII/NII 1949-1962.

Presiden Soekarno terbuka hatinya tidak hanya akan membekukan PKI bersama seluruh organisasi bawahannya. Melainkan justru organisasi politik PKI dan ormas-ormasnya dilarang dan dibubarkan. Hanya caranya mendelegasikan kewenangannya kepada Djenderal Soeharto pada 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Supersemar, dengan atas nama Presiden Soekarno melarang ajaran komunisme dan mengumumkan pembubaran PKI dan organisasi bawahnya.

Kegagalan Teori Nasakom dan Marhaenisme

Presiden Soekarno menyaksikan sendiri dampak Pancasila yang diperasnya sendiri menjadi Ekasila atau Gotong Rojong dan pengaruh dikemukakannya bahwa Marhaenisme berubah menjadi Marxisme diterapkan di Indonesia, mendatangkan bencana nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

> Pengutamaan Manipol Usdek dan Nasakom menjadikan Pancasila oleh PKI dinilai hanya "alat pemersatu" semata. Bila sudah bersatu, kembali ke ajaran

35 Harold Crouch, 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta, h.258 Major Djenderal Ibrahim Adjie yang menampakkan sikapnya pro Soekarno, pada Juli 1967 diangkat sebagai Duta Besar di London. Jenderal Muslim lainnya yang pro Soekarno, diangkat sebagai Duta Besar di Republik Arab Persatuan, adalah Letnan Djenderal Mokoginta.

Marxisme dan Leninisme.

Di akhir kekuasaannya, Presiden Soekarno menyaksikan ajaran Marxisme, Leninisme yang diterapkan oleh PKI di Indonesia, melahirkan pemimpin PKI keblinger dan mencemarkan nama baik Presiden Soekarno. Konsep Ir. Soekarno tentang Nasakom tahun 1926 M, sebagai sekadar ide semata adalah mungkin. Namun, pada 1965 M, dalam praktik kehidupan partai politik dan negara, Nasakom tidak dibenarkan oleh sejarah.

> Kenyataannya, sejak Hadji Misbach, sebelum Ir. Soekarno terjun dalam dunia politik, upaya menyatukan ajaran Islam dengan komunis atau sebaliknya, gagal total. Berhadapan dengan H.O.S. Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, H. Agoes Salim menolak ajaran komunisme dan National Congres Centraal Sjarikat Islam di Madiun merumuskan perlunya Disiplin Partai. Melarang pimpinan Partai Sjarikat Islam, 1923 M, menjadi pimpinan atau anggota Perserikatan Kommunist di India - PKI atau sebaliknya.
>
> Dengan kata lain, segenap upaya melawan imperialis Barat tidak mungkin Partai Sjarikat Islam Indonesia bekerja sama dengan PKI yang menghalalkan segala cara karena dalam perjalanan sejarahnya, PKI Sibar pimpinan Sardjono bekerja sama dengan van Mook, menentang Proklamasi 17-8-1945.
>
> Terjadi beberapa pimpinan P.S.I.I yang bersedia duduk dalam Kabinet Amir Sjarifoeddin, akibat mereka melupakan garis sejarah P.S.I.I dengan keputusan Dispilin Partai yang diputuskan dalam Natico di Madiun, 1923 M. Dampak kelupaannya pimpinan P.S.I.I pendukung Kabinet Amir diingatkan kembali bencana sikap politik Amir Moeso yang sebenarnya dengan gerakan Kudeta PKI di Madiun, 1948 M.

Nasakom dalam kenyataan sejarahnya, mendatangkan bencana nasional yang menggoyahkan kesatuan dan persatuan bangsa. Akibat komunisme dengan ajarannya, pengertian persatuan dan kesatuan adalah hanya antar organisasi bawahannya saja: SOBSI, BTI, SBMI, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan Lekra.

Marxisme mengajarkan, tidak ada penguasa dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada komunis, kecuali direbut dengan senjata. Partai Komunis sebagai partai yang berupaya dengan kekerasan untuk menduduki kekuasaan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin PKI dapat bekerja sama dengan golongan Nasional dan Agama kalau Komunis mau menguasai keduanya dengan kekerasan. Satu hal yang cukup unik, mengapa pimpinan Kudeta PKI, umumnya berlatar belakang

budaya Sumatra Barat? Padahal Sumatra Barat dikenal sebagai gerbang pembaharuan Islam di Indonesia pada abad ke-13 H/19 M.

Latar Belakang Budaya Pimpinan Kudeta Komunis

Kontradiksi peristiwa yang perlu diperhatikan, ajaran komunis pertama di kalangan Pribumi disemaikan di Semarang Jawa Tengah di kalangan buruh kereta api pimpinan Samaoen dan Darsono. Namun, mengapa pucuk pimpinan utama kudeta kumunis yang terkenal berlatar belakang budaya dari Sumatra Barat:

Pertama, Sutan Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka, lahir di Suliki Sumatra Barat, 1897 M, memimpin Kudeta 3 Juli 1946 di Yogyakarta. Datuk Tan Malaka dari komunis nasionalis, kemudian dikenal menjadi Partai Murba. Dibantu pula oleh Mohammad Yamin, lahir 23 Agustus 1903, di Sawahlunto, Sumatra Barat. Sebelum kudeta di Yogyakarta dilaksanakan karena keduanya sedang berada di P. Jawa, diawali dengan pertemuannya di Madiun, Jawa Timur.

Kedua, Amir Sjarifuddin gelar Soetan Goenoeng Soaloon, lahir di Medan, 27 Mei 1907 sebagai pimpinan Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948. Kudeta ini terjadi dipimpin bersama Moeso yang baru datang dari Rusia, bergabung dengan Amir Sjarifoeddin gelar Soetan Goenoeng Saoloon.

Ketiga, D.N.Aidit lahir di Maninjau, semula namanya Dja'far Naim. Kemudian pindah ke Bangka bersama ayah tirinya, Husein Aidit. Namanya berubah, Dja'far Naim menjadi Dwipa Nusantara, kemudian menjadi D.N. Aidit.

Pada saat terjadi Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, D.N. Aidit belum menduduki pimpinan utama. Oleh karena itu, D.N. Aidit dapat lolos dan selamat. Pada 30 September 1965 sebagai pimpinan utama Kudeta G30S/PKI di Jakarta.

Sebenarnya, masa muda D.N. Aidit sebelum aktif dalam PKI, pernah tinggal selama 4 tahun dengan pamannya K.H. Isa Anshary dari Partai Islam Indonesia Masjumi di Bandung. Namun, pertemuannya dengan K.H. Isa Anshary tidak menjadikan D.N. Aidit memahami Islam sebagai ajaran yang benar. Dia tetap memilih PKI.

Setelah D.N. Aidit menjadi pimpinan CCPKI, tidaklah heran bila K.H. Isa Anshary sebagai pamannya diangkat sebagai Ketua Front Anti Komunis - FAK oleh pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Bila ditinjau dari garis keluarga, menjadi Paman kontra Keponakan dan sebaliknya. Demikianlah penjelasan Drs. H. Ridwan Saidi kepada penulis di Soto Muchlis Ma'ruf TIM Jakarta.

Dengan memerhatikan realitas sejarah itu, pimpinan Kudeta Komunis, baik komunis nasional ataupun internasional, selalu berlatar belakang budaya Sumatra

Barat. Gerakan antikomunis pun dipimpin oleh Ulama yang berlatar belakang budaya dari Sumatra Barat. Namun, umumnya orang awam menyangka bahwa PKI berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demikian pula penulis Barat, dalam tulisannya mengidentikkan pimpinan komunis dengan orang Jawa.

Memang benar, pendiri pertama PKI di Semarang adalah Samaoen dan Darsono. Kudeta dilaksanakan di Cirebon, 12 Februari 1946. Jogyakarta, 3 Juli 1946. Madiun, 19 September 1948. Jakarta, 30 September 1965. Keseluruhan kudeta terjadi di Pulau Jawa. Namun, pimpinan utama setiap Kudeta PKI berlatar belakang budaya dari Sumatra Barat, yakni Tan Malaka, Amir, D.N. Aidit, ketiga-tiganya pimpinan kudeta di Jogyakarta, Madiun, dan Jakarta. Penulis belum mengetahui secara pasti latar belakang budaya Mohammad Joesoef pimpinan Kudeta PKI di Cirebon. Apa juga dari Sumatra Barat atau dari mana?

Kesalahan memahami sejarah sering dijadikan bahan membangkitkan gerakan separatis dari luar Jawa yang ingin melepaskan diri dari pemerintah pusat Republik Indonesia di Jakarta, menyebarkan informasi yang bersifat provokatif berbau etnis dan ideologis: orang Jawa identik dengan komunis atau penganut Majapahitisme. Padahal, penulis utama Tata Negara Majapahit adalah Mohammad Yamin dari Sumatra Barat.

Ulama yang terkenal dari pimpinan ormas atau partai politik Islam yang antikomunis dan anti imperialisme serta anti kapitalisme berasal dari suku Jawa sangat banyak antara lain:

1. H.O.S. Tjokroaminoto P.S.I.I dari Ponorogo, Jawa Timur.
2. Dr. Soekiman Wirjosandjojo Ketua Umum Partai Islam Indonesia Masjumi
3. Soerjopranoto dari P.S.I.I. dari kerabat Paku Alam, dikenal sebagai Jago Pemogokan.
4. Raden Sjamsoerizal pendiri Jong Islamieten Bond dan Walikota Jakarta, keponakan Soerjopranoto.
5. Choedrotoes Sjech K.H. Hasjim Asj'ari, Rois Akbar Nadlatoel Oelama dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jatim.
6. K.H. Mas Mansoer Persjarikatan Moehammadijah dari Surabaya, Jatim.
7. K.H. Wahab Chasboellah, Nahdlatoel Oelama dari Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Jatim.
8. Ki Bagoes Hadikoesoemo, Ketua Pusat Persjarikatan Moehammadijah dari Jogyakarta.
9. K.H. Kahar Moezakkir, Persjarikatan Moehammadijah, Ketua Sekolah Tinggi Islam, dari Jogyakarta, dan yang lainnya.

Tidaklah berarti dengan ketiga tokoh komunis di atas, Sumatra Barat tidak melahirkan Ulama. Justru sebaliknya, penggerak dakwah, pimpinan ormas, partai politik, dan antikomunis yang terkenal adalah dari Sumatra Barat antara lain:

1. Hadji Agoes Salim dari P.S.I.I dan P.S.I.I. Penjedar. Menteri Luar Negeri.
2. Dr. Mohammad Natsir, dari Persatoean Islam, Ketua Umum Partai Islam Indonesia Masjumi, Dewan Dakwah Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Buya Hamka, pimpinan Muhammadiyah, Masjumi, dan Ketua Lembaga Sejarah Islam Indonesia.
4. K.H. Isa Anshari, dari Masjumi, Front Anti Komunis, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Yayasan Istiqomah Bandung.
5. K.H. Rusjad Nurdin, dari Persatoean Islam, Masjumi, Front Anti Komunis, Yayasan Dana Al-Falah, Dewan Dakwan Islam Indonesia, Yayasan Istiqomah, Partai Bulan Bintang.
6. Taufiq Ismail, budayawan dan putra dari Abdul Ghafar Ismail.

Kekeliruan pemahaman sejarah tadi sebagai akibat ditiadakannya peran Ulama dan Santri dalam penulisan Sejarah Indonesia. Menurut istilah K.H. Achmad Sidik dari Nahdlatul Ulama, peran Ulama dalam perkembangan Sejarah Indonesia, diemperkan. Artinya dituliskan di "halaman luar". Hanya di saat situasi negara sangat genting atau kacau, Ulama dikedepankan. Jika damai sudah tiba, Ulama mulai dilupakan. Bahkan, dijadikan target secara sistemik dan pasti untuk disingkirkan perannya dalam pembangunan selanjutnya. Hal ini terjadi, sebagai akibat lembaga sejarah negara dikuasai oleh orang-orang komunis.

> Dengan adanya Supersemar, PKI dan organisasi bawahannya, memang secara fisik telah dibubarkan. Namun, mungkinkah ideologi dan ismenya bubar? Partai Murba sebagai partai komunis nasional tetap ada. Untuk menyelesaikan Konfrontasi Indonesia-Malaysia, ditugaskan kepada Adam Malik dari Partai Murba, komunis nasional Tan Malakais. Bukan Mohammad Natsir atau Mohammad Roem dari Partai Islam Indonesia Masjumi. Apakah hal ini sebagai salah satu bukti adanya *Masjumi Phobia* dan sekaligus juga sebagai bukti ajaran komunis masih ada di Indonesia? Bagaimana halnya dengan Marhenisme, apakah masih tetap diinterpretasikan sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia oleh pimpinan PNI sekarang?

Bagaimana peran dan kedudukan Ulama dan Santri pasca Orde Lama? Dengan

dibubarkannya, ditangkap, dibuang pimpinan PKI serta dilarangnya PKI, tidaklah berarti Ulama dan Santri merasa aman tiada lawan. Karena tiada seorang Rasul dan Nabi pun bebas dari halangan dan rintangan serta musuh. Sementara, Ulama sebagai ahli waris ajaran Kerasulan. Tentu, tidak mungkin bebas dari tantangan, dan halang rintangan serta lawan.

Deislamisasi politik dan depolitisisasi Islam, serta deparpolisasi Ulama, terulang kembali setelah PKI ditiadakan. Di bawah pemerintahan Orde Baru, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, berumur pendek hanya sampai 1973. Upaya rehabilitasi Partai Islam Indonesia Masjumi dan pendirian partai baru Partai Demokrasi Islam Indonesia pimpinan Mohammad Hatta tidak mendapatkan perkenan pula dari pemerintah Orde Baru. Kemudian, dibangunkan oleh pemerintah Orde Baru, untuk umat Islam satu wadah baru Partai Persatuan Pembangunan, 1973 M. Apakah kebijakan ini sama dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru Balatentara Dai Nippon dengan Persiapan Persatoean Oemat Islam, 1943 M.

Suasana transisi pemerintahan sipil Orde Lama ke pemerintahan militer Orde Baru, menjadikan Ulama dan Santri beradaptasi terhadap sistem baru dalam pembangunan politik. Melalui Fabian Strategy - Perlahan tetapi pasti, terbaca kebijakan politik pemerintahan Orde Baru bertujuan menyempurnakan apa yang dimimpikan oleh Presiden Soekarno, 1956 M seperti yang dilihat di RRC, pembubaran seluruh partai politik yang didirikan pada masa Liberal dan Orde Lama. Demikian pendapat Arti Sanit, 1997 dalam Partai Pemilu, dan Demokrasi.

Delapan tahun kemudian, pemerintah Orde Baru hanya mengizinkan berdirinya dua partai baru: Partai Persatuan Pembangunan - PPP, 5 Januari 1973 dan Partai Demokrasi Indonesia - PDI, 10 Januari 1973.[36] Didahului dengan pembentuk Golongan Karya - Golkar. Pemerintah Orde Baru dengan Repelitanya lebih mengutamakan pembangunan ekonomi. dan bertumpu pada Demokrasi Pancasila yang tidak mengenal adanya oposisi ala demokrasi Barat. Melainkan lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Sampailah pada akhir kesimpulan tentang mengapa Presiden Soekarno tidak diMahmilubkan. Menurut keyakinan Presiden Soeharto, 1989, dalam Soeharto Pikiran Ucapan Dan Tindakan Saya, Otobiografi , menyatakan memang benar Bung Karno mempunyai kesalahan, seperti juga manusia lain. Tetapi ia berkepastian, beliau bukanlah PKI.

36 Apakah pembentukan PPP dan PDI, 1973 M, pemerintah militer Orde Baru meniru kebijakan politiknya pemerintahan Balatentara Dai Nippon, setelah melarang seluruh ormas dan orpol, kemudian membangunkan dua wadah organisasi pengganti? Untuk umat Islam, Masjoemi, dan yang untuk yang netral agama, Putera, 1943M. Benarkah, sejarah sering berulang?

Monumen Nasional, Masjid, dan Proklamasi

Jasa besar para Ulama dan Santri dalam gerakan nasional, gerakan perlawanan terhadap imperialis Barat-Timur, dan dalam mempertahankan dan mengisi Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi hingga terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI, 17 Agustus 1950, Kamis Pahing, 2 Dzulhijjah 1369 maka pemerintah Republik Indonesia membangun monumen berupa:

Pertama, Masjid Syuhada di ibu kota perjuangan Republik Indonesia, Yogyakarta. Pertanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia - NKRI, tidak akan tegak merdeka dan berdaulat apabila tanpa pengorbanan besar harta dan jiwa para Ulama dan Santri serta umat Islam sebagai pemakmur masjid yang gugur sebagai *Syuhada.*

Kedua, Monumen Nasional - Monas, dengan Patung Pangeran Diponegoro yang sedang memacu kuda dan menghadap ke arah Istana Merdeka. Perlambang bahwa Ulama yang berjubah dan bersorban sebagai pengawal terdepan perjuangan nasional melawan imperialis Barat dan Timur yang menjadikan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka dan mampu membangun.

Selain itu, kuda sebagai perlambang aplikasi dari ajaran Rasulullah saw, ajari generasi mudamu mengendarai kuda. Dalam menghadapi lawan-lawan Islam, kuda sebagai lambang mobilitas dan kewajiban menguasai media transportasi. Sementara itu, kearifan mengendalikan kuda sebagai lambang kebijakan *khalifah fil ardhi* – pimpinan negara, pemegang kendali kedaulatan berbangsa dan bernegara.

Ketiga, Masjid Raya Istiqlal - Masjid Kemerdekaan yang dibangun atas tanah bekas benteng VOC. Mengapa dipilih di atas tanah tersebut? Padahal sangat dekat dengan Gereja Katolik Katedral. Presiden Soekarno menjelaskan sebelum ada gereja Katedral, dan sebelum ada benteng VOC, tepat di atas lahan benteng tersebut ada Masjid Al-Fatah - Masjid Kemenangan yang dibangun oleh Soenan Goenoeng Djati atau Sjarif Hidajatoellah bersama menantunya Fatahillah atau Faletehan. Keduanyalah juga sebagai pembangun kota Jayakarta atau Jakarta. Masjid Al-Fatah dirobohkan oleh VOC dan lahannya dijadikan benteng yang menghadap pula ke arah lawan agamanya, Gereja Katolik Katedral.

Sumber: Monas

PATUNG PANGERAN DIPONEGORO DI DEPAN MONUMEN NASIONAL

Patung Pangeran Diponegoro yang sedang memacu kuda
dan ditempatkan di depan Monumen Nasional
sebagai lambang Pengawal Terdepan
Perjuangan Nasional Indonesia membebaskan Indonesia
dari segala bentuk penjajahan adalah Ulama.

Sumber: *www.wikimedia.org dan www.yayasansaifuddinzuhri.blogspot.com*

MASJID ISTIQLAL - MASJID KEMERDEKAAN

Masjid yang dibangun oleh Presiden Soekarno di atas lahan bekas Benteng VOC
Nama Masjid Istiqlal diusulkan oleh Menteri Agama RI K.H. Mohammad Iljas
Pembangunannnya diselesaikan oleh Presiden Soeharto

Masjid Istiqlal sebagai monumen perjuangan bangsa dan negara sebagai fakta sejarah yang berbicara bahwa Proklamasi dan penegak NKRI
diperjuangkan oleh para Ulama dan Santri serta umat Islam sebagai pemakmur masjid.

Arsitek masjid adalah Silaban berdampak filosofi arsitektur kegerejaan mewarnai bangunan Masjid Istiqlal terbaca adanya Salib dengan jumlah 3, 6, 12, 24, 36, lambang jumlah murid Jesus di dalam mimbar diapit oleh dua salib, juga ventilasi depan bagian kanan dan kiri atas masing-masing enam buah salib.

Sumber: Doc. Pribadi

Jumpa penulis dengan Taufiq Ismail, penyair, sastrawan, dan budayawan antikomunisme, dalam acara pameran buku di Jalan Braga, Bandung.

Letak Masjid Istiqlal yang berhadapan dengan Gereja Katedral diprotes oleh I.J. Kasimo dari pimpinan Partai Katolik. Mengingatkan Presiden Soekarno tentang larangan mendirikan tempat ibadah yang berbeda saling berdekatan. Dijawab oleh Presiden Soekarno, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, membangun kembali Masjid Al-Fatah Soenan Goenoeng Djati, di atas lahan benteng VOC pertahanan imperialis Belanda. Kebetulan dekat dengan Gereja Katedral.

Adapun pelaksanaan pembangunan Masjid Istiqlal, terwujud pada masa Presiden Soeharto karena Presiden Soekarno lebih mendahulukan pembangunan Monumen Nasional. Dengan alasan, kalau ia meninggal, ia yakin Masjid Istiqlal tetap dapat dibangun. Akan tetapi kalau ia meninggal, apabila Monumen Nasional belum berdiri, akan gagal seterusnya.

> Penjelasan Presiden Soekarno itu dapat dipahami karena menjelang dibangunnya Monumen Nasional terjadi demo yang menolaknya. Demonstran terbaca hanya berpikiran praktis dan pragmatis, menuntut agar lebih mengutamakan masalah pangan, bukan monumen sejarah.

Keempat, Masjid Baiturrahim di depan Istana Merdeka sebagai lambang Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Tidak mungkin ada Presiden terlahir tanpa disertai darah yang tumpah dari rahim ibunya. Tidak mungkin, Indonesia Merdeka tanpa adanya *Maha Rahim Allah*.

Kelima, Patung Proklamator Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur 56 Jakarta dibangun pada masa Presiden Soeharto. Mengingatkan segenap generasi bangsa bahwa hanya dengan dua kalimat Proklamasi, berbahasa Indonesia, dibacakan pada 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, jam 10.00 pagi, oleh Soekarno dan ditanda tangani oleh Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia, menjadikan bangsa dan negara Indonesia merdeka.

Dijelaskan oleh Bung Karno kepada Cindy Adams dalam *An Autobiography As Told To Cindy Adams*, mengapa memilih *tanggal 17*, meyakini angka *17* sebagai jumlah *angka* dan *tanggal keramat*. Seperti shalatnya setiap hari 17 rakaat, dan Al-Qur'an diturunkan pada 17 Ramadhan.

Wal tandhur nafsum ma qadamat li ghod - Perhatikanlah sejarahmu, apa yang telah diperjuangkan oleh Ulama dan Santri pendahulumu, untuk hari esokmu. (QS 59:18).

GERBANG KESEMBILAN

LANGKAH JUANG JIHAD ULAMA DAN SANTRI DI ERA ORDE BARU DAN REFORMASI

PRESIDEN H. MUHAMMAD SOEHARTO

Bapak Pembangunan
Pemersatu Bangsa dan Pemersatu TNI
Satu-satunya Presiden yang membangun Masjid Muslim Pancasila sebanyak 999 Masjid,
Masjid Istiqlal, Masjid Pangeran Diponegoro, Masjid At-Tiin, Masjid di perbatasan Papua dan Papua Nugini
dan Masjid Soeharto di Bosnia
Satu-satunya Presiden di dunia yang menjabat Presiden selama 32 tahun

Deparpolisasi Ulama

Ulama dan Santri memasuki pertengahan kedua 1384 H/1965 M, dilimpahi anugerah Allah Yang Maha Agung menyaksikan runtuh dan tenggelam serta berakhirnya PKI dengan segenap organisasi bawahnya, akibat kesalahan pilihan tingkah laku politiknya Kudeta 30 September 1965, Kamis Kliwon, 4 Jumadil Akhir 1385. Disusul dalam relatif singkat tertangkaplah D.N. Aidit dari persembunyiannya di Surakarta, 22 November 1965, Senin Pon, 27 Rajab 1365. Bertepatan dengan hari Isra' dan Mi'raj Rasulullah saw, umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terbebas dari kebiadaban PKI.

Kemudian terbukalah hati Presiden Soekarno secara resmi, melalui Surat 11 Maret 1966 atau Supersemar, bertepatan dengan Jumat Pahing, 18 Dzulqaidah 1385, mendelegasikan kewenangannya kepada Major Djenderal Soeharto untuk membubarkan PKI dengan segenap organisasi di bawahnya.

Kesaksian Ulama dan Santri pada 1384 H/1965 M tadi, hakikatnya merupakan pengulangan rahmat Allah menyaksikan kembali kegagalan dan keruntuhan parpol anti agama: Pertama, Kudeta PKI di Cirebon pimpinan Mohammad Joesoep, 1 Februari 1946. Kedua, Kudeta 3 Juli 1946 di Yogyakarta pimpinan Tan Malaka. Ketiga, Kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948, pimpinan Amir Sjarifoeddin dan Moeso. Ketiga usaha komunis nasional atau internasional dengan kudetanya, menemui kegagalan.

Kegagalan semua Kudeta PKI merupakan pertanda bahwa di negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, yang terjadi karena berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, dan negara Indonesia sebagai negara yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak memberikan hak hidup bagi ideologi Marxisme yang mengajarkan anti agama dan tidak percaya

kepada Allah Yang Mahakuasa.

Demikian pula konsep Nasakom 1926 M, tidak mungkin dijadikan wawasan dan ideologi bangsa dan negara Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komunis yang mendasarkan *conflict theory* - teori konfliknya dalam mencapai tujuannya, tidak mungkin bersedia bersatu dengan golongan nasional dan agama.

Siapapun dan organisasi apapun serta pemimpin kaliber bagaimanapun besarnya, yang mencoba menghidupkan kembali Nasakom, sejarah telah memperingatkan, kapan pun akan menemui mimpi buruk dan akan menambah jumlah kegagalan. Sejarah juga membuktikan, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Timor Timur, Balkan, Jerman. Bahkan, di Uni Soviet dan RRC sedang terjadi proses *dekomunisasi*.

Ulama dan Santri bersyukur pimpinan parpol Islam, generasi muda Islam, mahasiswa dan pemuda pelajar Islam serta Santri, memelopori terbentuknya kesatuan aksi, GAP Gestapu, KAMI, KAPPI, KOKAM, bekerjasama dengan ABRI, berjuang membubarkan PKI. Suatu anugerah Ilahi yang tiada hingga, generasi muda Islam memiliki kesadaran yang tinggi, tidak dapat membenarkan adanya partai politik anti dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa, hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicintainya. Demikian pula Aisyiah, Muslimat NU, Wanita Islam, bangkit membersihkan Republik Indonesia dari ajaran komunisme dengan Gerwaninya. Seniman Islam dari HSBI, tidak membiarkan seni dan budaya bangsa Indonesia terlumuri noda Lekra.

Suatu rahmat Allah Yang Mahakuasa walaupun hanya sedetik waktunya, menjadikan runtuhnya kebatilan dan bangkitnya pemerintahan baru yang tidak memberi tempat kembali partai politik atau organisasi apapun yang tidak membenarkan kemerdekaan Indone sia adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa. Para Ulama dan Santri bersujud syukur dan berharap, bersama pemerintah Orde Baru agar mampu membangun bangsa dan negara yang ridhai Allah serta berhasil mengentaskan kemiskinan umat sebagai mayoritas bangsa.

Di masa Orde Lama, kemiskinan atau krisis ekonomi, merupakan lahan subur hidupnya ajaran parpol komunis, gerakan buruh tani serta wanitanya. Komunis berupaya melakukan pemurtadan, mereka menilai pemurtadan sebagai jalan keluar dari rasa ketertindasan rakyat dari pimpinan agamawan. Mereka mengonsepkan kebahagian hidup akan termiliki oleh rakyat bila tidak ada lagi pemerintahan - *abolition of government*, dan tidak ada lagi anutan agama - *abolition of religion*, serta hilangnya stratifikasi sosial - *social stratification*. Hidup akan terbentuk masyarakat sama rata sama rasa - *classless sosciety*. Diajarkan ideologi komunisme

hanya bisa terwujud dengan menumbangkan pemerintahan, melalui konflik, teror dan meningkatkan kriminalitas. Kemudian, membalikkan seluruh tatanan kehidupan dan ketatanegaraan yang ada, didahului dengan abolisi atau penghapusan ideologi dan konstitusi nonkomunis.

Usaha ini semua diawali pula dengan gerakan pembodohan generasi muda, tindak imoralitas. Penguasaan lembaga pendidikan dan press, media cetak dan elektronik, untuk membentuk opini publik agar berpihak kepada ajaran komunisme. Demikianlah sisa-sisa program ajaran komunis yang ditinggalkan pada masa Orde Lama. Lalu, apa yang diprogramkan oleh pemerintah Orde Baru dalam menjawab tantangan itu?

Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, bertekad mengentaskan kemiskinan dan krisis ekonomi. Menghidupkan wawasan politik yang tidak lagi mempertentangan ideologi, hanya berideologi tunggal Pancasila. Menyederhanakan jumlah partai politik. Meredam perkembangan rasa kecurigaan terhadap pemerintah, dengan memahamkan masyarakat terhadap program pembangunan, Rencana Pembangunan Lima Tahun - Repelita yang ditentukan oleh MPR dengan Garis Besar Haluan Negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Langkah yang dipilih oleh pemerintah Orde Baru, mengadakan penataran P4 - Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila agar dapat dipahami dan dihayati. Dengan cara ini ditargetkan tumbuhnya sense of belonging - rasa saling memiliki dan sense of responsibility - rasa saling bertanggung jawab, kesadaran bela negara melalui profesi masing-masing.

> Selain itu, Orde Baru menyadari masyarakat Indonesia terdiri dari rumah tangga yang terbentuk akibat ikatan pernikahan. Oleh karena itu, perlu segera dibentuk UU Perkawinan. Di bidang pernikahan, Orde Lama tidak memiliki UU Perkawinan yang dapat dijadikan pedoman pernikahan. Padahal, pemimpin teladan rakyat. Bagaimana jadinya bila pimpinan negara, ABRI dan pegawai negeri, melakukan kawin cerai seenaknya maka diundangkanlah UU Perkawinan, 1973 M, yang didasarkan pada ajaran agama.

Diharapkan dengan adanya UU Perkawinan, 1973 M, akan tercegah praktik bebas pernikahan poliandri - satu isteri banyak suami. Poligini - satu suami dengan banyak isteri, atau group married - perkawinan kelompok, dan kawin mut'ah, serta segenap penyimpangan sistem perkawinan. Dengan UU Perkawinan, 1973 M, adanya keteraturan pula sistem perceraian berdasarkan agama.

Bersamaan dengan diundangkannya UU Perkawinan, juga diberlakukannya

dwi sistem partai politik: Partai Persatuan Pembangunan - PPP, 5 Januari 1973 dan Partai Demokrasi Indonesia - PDI, 10 Januari 1973. Didahului dengan pembentukan Golongan Karya - Golkar. Kebijakan pemerintah Orde Baru ini, dirasakan oleh Ulama sebagai kebijakan deparpolisasi Ulama.

Pembentukan ketiganya Golkar, PPP dan PDI dalam masa peralihan merupakan model pengganti dari Nasakom. Para Ulama yang tidak terpilih dalam kepemimpinan Golkar, PPP, PDI, dibenarkan bila bersedia aktif di luar jalur parpol, dalam Majelis Ulama Indonesia - MUI atau Dewan Dakwah Islamiah Indonesia - DDII, Dewan Keluarga Masjid - DKM, Dewan Masjid Indonesia - DMI, Rumah Zakat, Rumah Yatim Piatu dan lain-lainnya.

Untuk melaksanakan deparpolisasi Ulama kebijakan pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melancarkan *Fabian Strategy* - strategi yang dilaksanakan dengan perlahan dalam menciptakan perubahan, namun pasti - *slowly but true*. Dalam bahasa Jawa, *alon-alon asal kelakon*. Di samping itu, juga disiapkan *Blitzkrieg Strategy* - siap menindak secara militer dan cepat tepat, terhadap gerakan lawan yang muncul di permukaan secara fisik militer.

Selain itu, dilaksanakan *Violence Strategy* - Strategi kekerasan ini diarahkan penumpasan *bromocorah* atau preman. Seperti dalam dokumen Kudeta PKI di Madiun, diketemukan oleh Partai Murba, pada masa prakudeta, PKI mengadakan aksi meningkatkan kriminalitas, perampokan atau bromocorah, penculikan dan pembunuhan. Dengan cara ini, ditingkatkan secara politik akan berlanjut mengganyang pemerintahan atau kudeta.

Pemerintah Orde Baru melihat menjamurnya tindak kriminali tas. Sepintas seperti hanya kriminalitas murni. Kenyataannya ada upaya sabotase terhadap pembangunan maka dijawab dengan melancarkan operasi Penembakan Misterius - Petrus. Bertujuan untuk menumbuhkan rasa takut - *fear strategy* kepada pelaku kriminal.

Selain itu, fungsi dan target pelaksanaan *Violence Strategy* dalam kepentingan politik sebagai pemukul lawan agar menjadi *powerless group* - kelompok yang tanpa daya. Pengaruhnya akan menumbuhkan karakter dan kesadaran kelompok garis keras lawan, menjadi *a minimal sense of political efficacy* - meminimalisasikan rasa kemujaraban terhadap organisasi politiknya yang pernah dibanggakan. Artinya para pendukungnya tidak lagi menilai organisasi kebanggaannya, tetap berjaya. Menjadi loyo tidak dapat dijadikan payung pelindungnya lagi.

Sumber: Doc. Pribadi

AL-QURANIL KARIM MUSHAF SUNDAWI

Di bawah Gubernur Jawa Barat, Nuriana diterbitkan Al-Quranul Karim Mushaf Sundawi
Isi Al-Qur'an tetap sama dengan wahyu yang diterima oleh Rasulullah saw
Disebut Mushaf Sundawi dalam penulisannya tetap menggunakan huruf Arab
bedanya terletak pada bingkai setiap lembarnya berornamen seni Sundawi.

Sumber: Doc. Pribadi

Surah al-Kahfi dari Al Quranul Karim Mushaf Sundawi. Setiap huruf Allah dicetak dengan warna merah.

Fabian Strategy dalam bahasa Jawa, *alon-alon asal kelakon* - pelan-pelan namun teratasi. Pelaksanaannya terlihat dari kebijakan pemerintah Orde Baru, semula dalam mengondisikan sikap Ulama dan Santri agar tetap mendukung kebijakannya, partai politik Islamnya, tetap diizinkan aktif. Setelah terlihat seluruh kekuatannya di permukaan, baru dilaksanakan penghentian aktivitasnya.

Antara lain dengan cara mengizinkan untuk sementara waktu, didirikan Partai Muslimin Indonesia - Parmusi atau PMI pada 20 Februari 1968. Sekaligus Parmusi dijadikan sebagai pengimbang hasil Muktamar Partai Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan terlebih dahulu Juli 1967 di Bandung. Muktamar ini berhasil melahirkan kepimpinan baru, Ketua Umum tetap Dr. K.H. Idham Chalid, dan Ketua I s/d IV terdiri dari H.M. Subhan Z.E, H.A. Sjaichu, H. Djamaluddin Malik dan Imron Rosjadi S.H. Dengan bergabungnya H. Djamaluddin Malik sebagai wirausahawan, terbayang akan semakin kuatnya Partai Nahdlatul Ulama.

Oleh karena itu, Partai Nahdlatul Ulama dihadapkan kepada kebijakan mengakhiri eksistensinya sebagai partai politik. Dikembalikan ke *Khittah* 1926 M, menjadi Jamiah Nahdlatul Ulama dan menerima asas tunggal Pancasila. Ideologi yang dirumuskan oleh K.H. Wahid Hasjim, sehari setelah Proklamasi, 18 Agustus 1945. Massa Nahdliyin diubah menjadi pendukung utama Partai Persatuan Pembangunan.

Betapa kuatnya Nahdlatul Ulama dengan massa pendukung yang tidak hanya kelompok Ulama, melainkan juga generasi muda yang mempunyai semangat tempur yang tinggi dalam menghadapi PKI dan organisasi di bawahnya. Namun, pimpinan Nahdlatul Ulama di tengah masa transisi kepemimpinan sipil ke militer, lebih memilih langkah menerima realitas, beradaptasi. Dengan pengertian menerima perintah membubarkan diri sebagai kekuatan partai politik dan menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai salah satu jamiah pendukung Partai Persatuan Pembangunan - PPP.

Dari *test case* ini, apabila Partai Nahdlatul Ulama yang kuat dapat diubah menjadi jamiah, apakah mungkin Partai Muslimin Indonesia, Perti, PSII atau partai politik Islam lainnya, mampu memertahankan eksistensinya. Demikian pula nasib PNI, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Murba?

Partai Muslimin Indonesia pada awalnya diizinkan untuk didirikan dengan syarat Ketua Umumnya adalah Djarnawi Hadikusumo dari Persjarikatan Muhammadijah. Dibantu dengan Agus Sudono dari Gasbindo dan J. Naro, S.H. dari Al-Waslijah sebagai Ketua. Bukan ketua dan pengurusnya dari mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Bagaimana jika tidak, itu hasil Muktamar Parmusi.

Pemerintah militer Orde Baru tidak dapat bekerjasama lagi dengan mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi. Sekalipun pimpinan dan anggota partai ini anti komunis, tetapi memberikan sumbangan besar dalam menggerakkan massa kesatuan aksi menumbangkan pemerintahan Orde Lama. Walaupun Mohammad Natsir membantu upaya penyelesaian Konfrontasi Indonesia-Malaysia dan juga membantu memungkinkan investor Jepang bersedia menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian penjelasan Dr. Anwar Harjono, S.H. yang diangkat oleh Lukman Hakiem, 1993 dalam Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan. Biografi Dr. Anwar Harjono, S.H.

Walaupun demikian, Brigdjen Ali Moertopo menilai beberapa pimpinannya sebagai kelompok fundamentalis Islam, tidak dapat bekerjasama dengan pemerintah militer Orde Baru. Sebenarnya istilah fundamentalis ini sebagai istilah pinjaman, untuk nama kelompok garis keras Protestan, bukan untuk Islam.

Namun, akibat Brigdjen Ali Moetopo mendasarkan pemikirannya dari hasil penelitian CSIS yang pimpinannya dari Katolik maka digunakan istilah tersebut untuk menamai kelompok garis keras Islam Masjumi, kaum fundamentalis karena dinilai mempunyai kemiripan karakter kerasnya sama dengan kelompok garis keras Protestan. Akibat penilaian ini, dapat diprediksikan nasib Parmusi selanjutnya.

Dipraktikkannya Fabian Strategy, terhadap umat Islam terlihat sembilan bulan kemudian, Parmusi atau PMI, mengadakan Muktamar Parmusi, 2-7 November 1968. Diizinkan pula menggunakan tempat Pendopo Kabupaten Malang.

Muktamar Parmusi yang mengambil November sebagai hari kelahiran Partai Islam Indonesia Masjoemi, 7 November 1945. Panitia Muktamar menjadikan kota Malang dihiasi banyak spandoek antara lain bertuliskan, Selamat Datang Duta Bulan Bintang dan Keluarga Bulan Bintang Kompak. Kompak menghadapi siapa. Tentu, menghadapi sikap pemerintah militer Orde Baru.

Kota Malang saat itu, berubah menjadi Samodra Bulan Bintang dengan berbagai warna. Bulan Bintang Merah, Bulan Bintang Hijau, Bulan Bintang Biru. Biasanya hanya Bulan Bintang Hitam Putih, atau Hijau. Muktamar Partai Muslimin Indonesia - Parmusi atau PMI, mendapat dukungan pemuda dari KOKAM dengan baret kuning dan jaket cokelat, sebagai Badan Keamanan Muktamar. Diberitakan bersikap cakap dan cekatan, namun tetap ramah dan penuh simpatik. Demikian pemberitaaan Harian Operasi pimpinan Bachtiar Djamily.

MASJID YAYASAN AMAL MUSLIM PANCASILA

Presiden Seharto dalam rangka membendung pengaruh ajaran Marxisme dan Leninisme membangun masjid Yayasan Amal Muslim Pancasila. Seluruh Nusantara Indonesia dibangun sejumlah 999 Masjid Yayasan Amal Muslim Pancasila. Selain itu Presiden Suharto membangun Masjid Istiqlal atau Masjid Kemerdekaan di atas lahan bekas Benteng VOC di Jakarta, dan Masjid Suharto di Bosnia.

MASJID ISTIKLAL DŽAMIJA

Masjid yang dibangun oleh Presiden Seharto di Bosnia.

Selanjutnya diberitakan, kehadiran Prawoto Mangkusasmito didahului dengan voor rijders Polisi diikuti dengan barisan mobil dan motor, mendapatkan sambutan ribuan rakyat yang sangat meriah di sepanjang jalan antara Surabaya-Malang. Kemudian, muktamar dibuka dengan didahului dengan pengguntingan pita oleh Prawoto Mangkusasmito. Suasana muktamar menjadi arena syukuran Hari Ulang Tahun Ke 23, 7 November 1945-1968, Partai Politik Islam Masjumi.

Muktamar Parmusi dua hari kemudian, dihadiri Brigdjen Ali Moertopo Kepala Operasi Chusus atau Opsus, Badan Rahasia di bawah langsung Djenderal Soeharto. Menyatakan bahwa Presiden Djenderal Soeharto, 31 Oktober 1968, mungkin membolehkan Dr. Anwar Harjono dan H. Hasan Basri dalam pimpinan PMI.

Muktamar Parmusi di Malang, dihadiri oleh 202 cabang dari seluruh Indonesia. Dalam Muktamar disampaikan calon ketua terdiri dari dua alternatif. Pertama, Trio Natsir-Prawoto-Roem. Kedua, Trio Anwar Harjono-Hasan Basri-Sarif Usman. [1] Tepat pada 5 November 1968, Selasa Pahing, 13 Sya'ban 1388, jam 11:29 secara aklamasi memilih Mr. Mohamad Roem sebagai Ketua Umum. Ketua I s/d IV adalah Dr. Anwar Harjono S.H., H. Hasan Basri, H. Djarnawi Hadikusumo dan Ir. Umar Tosin. Sekretaris Umum Drs. Hasbullah. Dibantu oleh Sekretaris I dan II, Drs. Lukman Harun dan Mohamad Sulaiman.

Selain itu terdapat 17 anggota Dewan Pimpinan Pusat, antara lain Nj. Aisjah Amini S.H., Nj. Chadidjah Razak, Djamaludin Datuk Mangkuto S.H., Gusti Muis, AR. Baswedan, Ir. Mohammad Sanusi, Nj. Rohana Zainal Abidin Achmad, Nj. Latuba, Ir. Alala, Andi Matasila, S. Siregar Pahu, Nj. Sunario Mangkusasmito, Maizir Amadin dan K.H. Misbah. Demikian yang diberitakan oleh Pikiran Rakjat, 17 Sya'ban 1388, Sabtu Manis, 9 November 1968.

Bagaimana dampak dari keputusan Muktamar Parmusi atau PMI itu. Mimbar Demokrasi menuliskan pernyataan Djendral TNI Soeharto Presiden RI, 28 Oktober 1968, a.l.

> Tokoh2 Masjumi djangan sampai duduk dalam pimpinan PMI. Selagi saja berkuasa, saja tidak segan2 membekukan PMI.

Selain itu, Pikiran Rakjat, pimpinan Sakti Alamsjah, 22 No vember 1968, Djumat Wage, 1 Ramadhan 1388, mengangkat penegasan kembali Presiden Soeharto bahwa "amnesti terhadap perseorangan pimpinan Masjumi jang terlibat PRRI, tidak berarti pemerintah membenarkan upaja merehabilitasi partai politik Masjumi."

---

1 Lukman Hakiem, 1993. *Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan. Biografi Dr. Anwar Harjono SH*. Media Da'wah. Jakarta, hlm. 230.

Sumber: *Doc. Pribadi*

MASJID PONDOK PESANTREN AL-FALAH CICALENGKA BANDUNG

Strategi pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dalam membendung pengaruh ajaran komunis, mengondisikan semaraknya pembangunan masjid dan pesantren dengan modernisasikan sarana dan kurikulum pendidikannya serta alat transportasi pendukung aktivitas Ulama dalam pengembangan dakwahnya.

Selanjutnya *Mimbar Demokrasi,* No. 60 Tahun II, Minggu Ke III November 1968, pimpinan Adi Sasono dari Jalan Braga 40 A Bandung, dengan adanya keputusan Muktamar Parmusi atau PMI seperti tadi, memberitakan pada 5 November 1968, jam 15:00, datang surat dari Asisten I Urusan *Intelligence* Kasdam VIII Brawidijaja yang ditujukan kepada Mohamad Roem. Kemudian 7 November 1968, disusul dengan Radiogram Sekneg, Major Djenderal Ratu Alamsjah Prawiranegara, a.l.

> Bapak Presiden, Pemerintah pada saat ini memandang belum waktunja adanja perobahan susunan pimpinan PMI sesuai dengan Keputusan Presiden RI No 70 Thn 1968 Tanggal 20 Februari 1968.
>
> Apabila ada perobahan pimpinan jang bertentangan dengan keputusan Presiden No 70 Thn 1968, berarti suatu pelanggaran dan tidak dapat dibenarkan oleh Pemerintah.

Ditolaknya keputusan Muktamar Parmusi atau PMI di Malang yang menetapkan Mohamad Roem, mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi, sebagai Ketua Umum, oleh pemerintah militer Orde Baru melalui Radiogram di atas,menimbulkan berbagai reaksi antara lain:

Dr. Mohammad Hatta yang mempunyai nasib sama dengan Parmusi, partainya Partai Demokrasi Islam Indonesia - PDII ditolak oleh Pd Presiden Djenderal Soeharto, Juli 1967. Dalam ceramahnya di Dewan Keluarga Masdjid Istiqamah Jalan Taman Citarum Bandung, 21 Sja'ban 1388, Kamis Manis, 13 November 1968, dalam menjawab pertanyaan wartawan Antara, Dr. Mohammad Hatta antara lain menyatakan ingin membentuk kader partai. Selain itu, walaupun sebagai pendiri PDII juga meragukan bahwa umat Islam benar-benar 90% dari populasi bangsa Indonesia. Di samping itu juga, menyatakan bila Indonesia sebagai negara demokrasi, Presiden Soeharto tidak benar campur tangan terhadap hasil Muktamar Parmusi.

Tentu, pandangan ini berbeda dengan penafsiran demokrasi oleh Musjawarah Komando - Musko, Kopkamtip, Pangdam, serta Pelaksana Chusus - Laksus: tindakan pemerintah menolak hasil keputusan Muktamar Parmusi justru sebagai upaja menegakkan demokrasi jang sehat dalam pelaksanaan, ditindjau dari keamanan dan ketertiban. Tanpa keduanja demokrasi jang sehat hanja djadi angan-angan.

Setelah penertiban parpol dengan hanya diiizinkan dua sistem partai, PPP dan PDI, Januari 1973, setahun kemudian meledaklah demo mahasiswa bersama rakyat yang disebut oleh pemerintah sebagai Peristiwa Malari, Malapetaka Januari, 15 Januari 1974. Peristiwa ini terjadi bersamaan dengan kedatangan P.M. Tanaka dari Jepang.

Menurut Jenderal Yoga Sugomo, demo Malari ini dikendalikan oleh kelompok Rahmadi yang bertujuan mengadakan perubahan politik dengan penyegaran kabinet. Untuk sementara mempertahankan Soeharto sebagai presiden.

Ternyata, menurut Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban - Pangkopkamtib, Jenderal Soemitro, bahwa yang disebut kelompok Rahmadi adalah orang dekatnya Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani. Terdiri dari Letjen Suadi, bekas Dubes Etiopia, Laksamana Muda Mardanus, mantan Menteri Perindustrian dan Maritim, dan Puguh. Dalam Dokumen yang diketemukan oleh Pangkoptamtib Soemitro, menokohkan Jenderal Soemitro sebagai rival Presiden Soeharto.

Demikianlah penjelasan dari Jenderal Soemitro kepada Dr. Anwar Harjono S.H. Namun, pihak kelompok Rahmadi menyebarkan pemberitaan di luar, demo Malari didalangi oleh Masjumi dan PSI. Walaupun sudah 14 tahun Masjumi dibubarkan, 1960-1974 M, namun tetap dijadikan isu dalam demo.

PONDOK PESANTREN ISLAM INTERNASIONAL TERPADU ASY-SYIFAA WAL MAHMUUDIYYAH

KP. SIMPANG KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG
JAWA BARAT - INDONESIA

Sumber: Doc. Pontren Asy-Syifaa wal Mahmuudiyyah

Mencetak Santri untuk menjadi al-'Ulama
al-'Aminun dan al-'Amilun al-'Ulama dengan landasan
aqidah Ahli al-Sunnah Wa al-jama'ah.

Madjelis Ulama Indonesia

Langkah selanjutnya, untuk mewadahi aktivitas Ulama mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masjumi, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan mantan Tahanan Politik di RTM Madiun dan Malang, serta pimpinan terpilih Muktamar Partai Muslimin Indonesia, diizinkan aktif dalam Madjelis Ulama Indonesia - MUI. Suatu Majlis Oelama Indonesia yang pernah ada, 29 Januari 1928, Sabtu Kliwon, 5 Sya'ban 1346, yang diusulkan oleh Hadji Agoes Salim dalam National Congres Partai Sjarikat Islam Indonesia di Djogjakarta. Pada saat itu, antarUlama Wahabi dengan Ahli Soennah Wal Djamaah, teragendakan program pemerintah kolonial Belanda, menjadi saling aktif melancarkan debat masalah khilafiah, serta melupakan realisasi tuntutan politiknya, Pemerintahan Sendiri dan Indonesia Berparlemen.

Ternyata, sejarah berulang lagi. Di bawah pemerintah Orde Baru, untuk membelokkan perhatian masyarakat Islam terhadap masalah politik, dijadwalkan kembali meledaknya benturan masalah khilafiah. Menanggapi kondisi itu, Ketua Organisasi Islam Afrika Asia - OIAA, Ketua II PBNU, Ketua DPRS, K.H. Achmad Sjaichu, di hadapan kaum Muslim Madjlis Taklim Kwitang Djakarta, 29 Sya'ban 1388, Rabu, 20 November 1968, mengajukan appeal agar umat Islam bersatu padu, menghilangkan dan mening galkan perselisihan masalah khilafiah.

Dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan, dibangun kembali Madjelis Ulama Indonesia, dipelopori oleh Dr. K.H. E.Z. Muttaqien di Bandung. Kemudian, menyusul didirikan Madjelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, dengan Ketua Prof. Dr. Buya Hamka. Demikian pula, Mohammad Natsir mengaktifkan diri memimpin Dewan Dakwah Islam Indonesia, yang didirikan sekitar 1387 H/1967.

Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia

Dengan pertimbangan realitas kebijakan pemerintah militer Orde Baru di bidang partai politik tadi dan realitas pertumbuhan masjid sangat pesat, didukung dengan semakin ramainya para pemuda memakmurkan masjid maka atas inisiatif Hamid Sajuti, Ahmad Mansur Suryanegara, Mustafid Amna, dan Samsudin Manaf di ruang Dekanat Fakultas Psikologi UNISBA, Jalan Tamansari No 1 Bandung, diprogramkan pembentukan Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia - BKPMI.

Untuk pertama kalinya BKPMI direalisasikan di Masjid Istiqomah Jalan Taman Citarum Bandung. Dipimpin oleh Toto Tasmara sebagai Ketua, Bambang Pranggono sebagai Sekretaris, dan Muchlis Ma'ruf sebagai Bendahara. Diresmikan oleh Ketua

MUI, Dr. K.H. E.Z. Muttaqien (27 Ramadhan 1397 H, Senin Kliwon, 12 September 1977). Setelah berkembang di seluruh Indonesia, disarankan oleh Presiden Soeharto untuk disempurnakan menjadi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia - BKPRMI.

Di samping itu, di Bandung didirikan pula Yayasan Dana Al-Falah oleh K.H. Rusjad Nurdin dan Dahlan Lukman dengan pelindung Mohammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmito. Dengan tujuan menghimpun dana umat untuk membangun ekonomi umat. Selain itu, diadakan pula latihan kerja untuk generasi muda, dilatih dalam bidang pertanian, peternakan, dan wirausahawan, di Ciampea Bogor didirikan Pesantren Daarul Falah.

Sejenis dengan usaha ini, didirikan pula Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia - BKPPI disertai dengan gerakan Koperasi Pondok Pesantren - Kopontren sebagai upaya membangkitkan kembali kesadaran berwirausaha sebagaimana saat awal Islam masuk ke Nusantara Indonesia. Di samping itu juga, digalakkan kembali Koperasi Unit Desa - KUD.

Dampak dari pertumbuhan dan perkembangan masjid yang menjamur di seluruh Nusantara Indonesia, dibentuklah Dewan Keluarga Masjid - DKM di bawah pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Menyusul dibentuk pula Dewan Masjid Indonesia - DMI di bawah pimpinan Golongan Karya.

Selain itu, dibangun pula Masjid Yayasan Amal Muslimin Pancasila yang memiliki kekhasan bentuk arsiteknya, disesuaikan dengan lahannya. Dengan bentuk arsitektur Indonesia yang Islami, tidak terlihat kusen dan pintu, serta mimbar dari bentuk atau ornamen salib. Dana pembangunan masjid dikumpulkan antara lain dari pemotongan gaji Pegawai Negeri. Didirikan di kota-kota kabupaten hingga ibu kota Provinsi.

Dengan membanjirnya jamaah dan aktivitas masjid-masjid di Indonesia, menjadikan di sekitar masjid tumbuh pertokoan atau pasar. Oleh karena itu, Presiden Soeharto merasa perlu untuk mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi umat, di Istana Bogor meresmikan berdirinya Bank Muamalat. Demikian pula dengan adanya akselerasi sistem pendidikan Perguruan Tinggi, menjadikan semakin banyaknya jumlah Sarjana Muslim. Demi meningkatkan partisipasi para cendekiawan Muslim dalam pembangunan maka Presiden Soeharto bersedia membuka pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia - ICMI di Malang.

Pengaruh iklim pembangunan di masa Orde Baru menjadikan pembangunan sarana pendidikan Islam sangat cepat dari pendidikan Taman Kanak-Kanak, Madrasah, Pesantren hingga Perguruan Tinggi Islam. Diikuti pula pesatnya pembangunan Klinik

dan Rumah Sakit Islam. Penerbit buku Islam menjamur di mana-mana. Tidak kalah pula meningkatnya jumlah KBIH dengan Jamaah Haji dan Umrah Indonesia sebagai negara yang paling banyak jumlah Haji dan Umrahnya.

Semangat membangun masjid dan mushala dengan dana umat, meledak luar biasa, dapat dilihat partisipasi dari masyarakat mulai RT, RW, Terminal, kompleks perumahan, perkantoran pemerintah dan swasta, rumah makan, kampus universitas, bandara, di pom bensin - SBPU. Disertai dengan aktivitas mengadakan dakwah secara rutin. Kenyataan ini sebagai bukti keberhasilan strategi pemerintah Orde Baru dalam usahanya memisahkan rakyat dari pengaruh ajaran komunis.

Di Bandung, SPBU Al-Ma'soem memelopori pembangunan masjid atau mushala dan tidak buka pada waktu Shalat Jumat. Haji Ma'soem sebagai wirausahawan Muslim tidak hanya bertumpu pada aktivitas pengembangan bisnis perniagaannya semata. Namun juga, aktif mendirikan dan mendanai sekolah dari Taman Kanak-Kanak hingga AMIK Al-Ma'soem, dan Pesantren. Tidak lupa mengadakan Peringatan Hari Besar Islam dengan dakwah terbuka. Semua kegiatan ini sampai sekarang semakin meningkat, diteruskan oleh putranya Nanang Iskandar Ma'soem, S.E. M.Si.

Presiden Soeharto selain menyelesaikan pembangunan Masjid Istiqlal, juga membangun masjid di perbatasan Irian Jaya dengan Papua New Guinea. Setelah membebaskan Timor Timur dari komunisme Fretelin, 1976 M, selain membangun Gereja Katolik serta Patung Jesus yang sama besarnya di Brasilia, juga membangun masjid di perkampungan Islam. Demikian pula di Bosnia, satu-satunya Kepala Negara yang membangun masjid hanyalah Presiden Soeharto dengan nama Masjid Soeharto dan di Jakarta dengan nama Masjid At-Tin.

HADJI MA'SOEM

Bukti sejarah adanya sosok wirausahawan pada abad ke-20 M yang berjuang dengan dana pribadi menggerakkan dakwah Islam dan Pesantren, melanjutkan perjuangan dan dakwah para wirausahawan Muslim dari abad ke-7 M dan Wali Sanga abad ke-13 M.

Berpartisipasi aktif mencerdaskan anak bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Akademi Manajemen, Informatika dan Komputer - AMIK di wilayah Bandung Timur.

Kampus pendidikan Al-Ma'soem dilengkapi dengan Kolam Renang untuk melaksanakan salah satu perintah Rasulullah saw, ajari anakmu berenang. Pelopor SPBU yang memiliki mushala dan masjid serta tutup pada waktu shalat jumat.

H. NANANG ISKANDAR MA'SOEM, SE., M.Si

Generasi Penerus Pertama yang menjadikan Al Ma'soem tidak hanya sebagai Lembaga Niaga dan Lembaga Pendidikan semata tetapi juga ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Pilkada atau Pilpres

Sumber: Doc. Pribadi

Satu hal yang sangat menakjubkan dunia Islam, Hajjah Juriah M. Al-Rasjid, satu-satunya wanita di dunia yang mampu membangun Masjid Kubah Mas di Depok Jawa Barat, dengan berat emas di kubah dan di puncak menara, serta di kepala tiang seluruhnya mencapai 2,5 ton. Walaupun demikian kemajuan umat Islam, diberitakan Indonesia sebagai negara yang terpuruk.

Perhatian dan pendekatan Presiden Soeharto kepada masyarakat Islam, cendekiawan Muslim, pemuda dan remaja Islam, serta petani desa, besar kemungkinannya setelah terlepas dari pengaruh Sekpri Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, dan sesudah Daud Jusuf, Benny Moerdani, serta Soedomo. Ketiganya tidak berperan aktif dalam jabatan kementeriannya.

Ulama Menghadapi Kopkamtip

Sekali lagi, sejarah mengajarkan bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Kecuali kesamaan kepentingan yang abadi. Setelah kondisi PKI teratasi, bergantilah sasarannya. Di bawah penguasa militer Orde Baru, Komando Operasi Penertiban Keamanan dan Ketertiban - Kopkamtib, Jenderal Benny Murdani dan Admiral Soedomo[2] keduanya non-Islam, dan Ali Moertopo sebagai Ketua Badan Intelijen - Bakin, terjadilah pembalikkan situasi.

Dakwah Ulama dan BKPMI serta aktivitas mantan pimpinan KAMI dan KAPPI dihadapkan tuduhan anti Pancasila dan tindakan pelanggaran hukum subsersif. Sementara masjid sebagai pusat ibadah umat Islam, dan kampus tidak luput dicurigai tempat gerakan anti pemerintah. Pada umumnya, masyarakat gelisah dan ketakutan, terasa hidup kehilangan kekebasan dan menjadi tercekam.

Pemerintah Orde Baru dalam mengoperasikan ideologi Pancasila dan UUD 1945, terjadi penafsiran yang menyimpang. Menurut Mashudi dalam Mamandu Sepanjang Masa, setelah Kolonel Ali Moertopo dan Kolonel Soedjono Hoemardani sebagai Sekpri, terjadilah ketegangan hubungan antarpimpinan Orde Baru. Jenderal Nasution dengan tindakan koreksinya dinilai sebagai penghambat. Presiden Soeharto menjawab bahwa dalam menjalankan roda eksekutif memerlukan pendamping. Namun, karena adanya tuntutan demo mahasiswa maka kedua Sekri tersebut ditiadakan.

2 Admiral Soedomo pada akhirnya kembali memperoleh hidayah, kembali masuk Islam.

Sumber: *Doc. Wiyanto Sumardi*

HJ. DIAN JURIAH M. AL-RASJID

Sumber: *Doc. Wiyanto Sumardi*

MASJID KUBAH EMAS

Di tengah derasnya berita Statistik Barat, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang perekonomiannya sedang terpuruk. Umat Islam menjawab, menjadikan Indonesia jumlah Calon Haji terbesar di seluruh dunia. Walaupun ONH naik, namun jumlah Calon Haji *waiting list* semakin membengkak. Pertanda semangat dan kesadaran beragamanya, serta jiwa berkorban dalam harta sangat tinggi.

Sebagai salah satu buktinya, Hj. Dian Juriah M. Al-Rasjid dengan amal nyata, membangun Masjid Kubah Emas dan kapitil kepala tiang, puncak menara, berlapiskan emas. Diberitakan berat emas seluruhnya adalah dua setengah ton.

Satu-satunya wanita di dunia dengan dana pribadi membangun masjid indah berkubah emas, melampaui berat Kubah Emas Masjidil Aqsha. Sungguh menakjubkan!

Petisi 50

Akibat lanjutnya timbullah gerakan koreksi terhadap Orde Baru yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Presiden Soeharto menjelaskan bahwa Demokrasi Pancasila tidak mengenal adanya oposisi ala Barat. Hanya lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dampaknya muncullah koreksi Petisi 50 di dalamnya terdapat pimpinan Angkatan Laut, Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta.[3] Terdapat pula mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir dan Menteri Perindustrian Ir. H. M. Sanusi.

Koreksi Petisi 50 ini dinilai oleh Presiden Soeharto sebagai kelompok orang menurut pepatah Jawa, rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa - merasa bisa tetapi sebenarnya tidak memiliki perasaan. Maksudnya merasa mengerti, bagaimana mengaplikasikan Pancasila dan UUD 1945. Namun, dari sistem koreksinya, menggambarkan ketidakbisaannya. Demikian penjelasan Presiden Soeharto, 1989, dalam Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya .

Dalam menghadapi Petisi 50, Kepala Bakin Yoga Soegomo, Pangkopkamtib Soedomo, dan Jaksa Agung Ali Said, mereka menghadap ke Menhankam/Panglima ABRI, Jenderal Jusuf, menyampaikan rencana penangkapan para pelaku Petisi 50. Ternyata, Jenderal Jusuf tidak membenarkan rencana dari ketiga penguasa tersebut, dan mengingatkan mereka bahwa tidak mungkin dapat memenjarakan pelaku Petisi 50 selamanya. Penolakan Jenderal Jusuf itu menjadikan rencana penangkapan para pelaku Petisi 50 gagal dilaksanakan. Walaupun dijamin dari segi keamanan oleh Soedomo, intelijen oleh Yoga Soegomo, dan segi hukum oleh Ali Said. Demikian penjelasan Dr. Anwar Harjono, S.H.

Di sisi lain, represi dan provokasi, menimbulkan gerakan perlawanan secara fisik. Antara lain, Peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984. Dari peristiwa ini ditangani secara militer, sebagai pelaksanaan Blitzkrieg Strategy, akibatnya banyak korban yang berjatuhan, antara lain Amir Biki gugur. Juga dilakukan penangkapan tanpa disertai pengacara dengan dihadapkan ke pengadilan. Tindakan selanjutnya, untuk meredakan api dalam sekam, Pangkopkamtib mendekati Majelis Ulama Indonesia agar ikut serta mendinginkan situasi yang memanas setelahnya.

---

3 Gubernur Kepala daerah DKI Jakarta, Ali Sadikin, ditegur oleh K.H. Rusjad Nurdin dan Dahlan Loekman, dari Yayasan Dana Al-Falah, dalam usahanya menjadikan Jakarta hidup 24 Jam dan pembangunan kota Jakarta, mengapa menjadikan *Hua Hue* dan *Totalisator*, sebagai sumber dana pendapatan daerah atau *income*, padahal Jakarta sebagai ibukota RI dan Pancasila sebagai dasar ideologinya. Sedangkan Uni Soviet dan RRC sebagai negara komunis, tidak ada yang menjadikan judi sebagai sumber *income* pembangunan tata kotanya. Kedua Ulama tersebut memohon agar judi *Hua Hue, Totalisator* yang merusak moral rakyat, dihentikan.

Peristiwa Tanjung Priok mengundang perhatian Petisi 50. Kemudian, membentuk Panitia Kecil diketuai oleh H.R. Dharsono, dan anggotanya Sjafruddin Prawiranegara, Slamet Bratanata, Anwar Harjono, dan A.M. Fatwa. Dikeluarkanlah Lembaran Putih koreksi kesalahan pemerintah yang menyimpang dari UUD 1945 dan asas tunggal Pancasila.

Namun, hasilnya ketiga penandatangan Lembaran Putih, yakni Ir. H. M. Sanusi dijatuhi hukuman 19 tahun dengan tuduhan mendalangi peledakan bom BCA, jembatan Metro dan Glodok. A.M. Fatwa dihukum 18 tahun. H.R. Dharsono mantan Pangdam VII Siliwangi dijatuhi hukuman 7 tahun.

Memasuki 1984 M, mantan pimpinan Masjumi dijadikan sasaran tuduhan dari segenap peristiwa yang dinilai pemerintah Orde Baru tidak benar. Kelompok Petisi 50 dituduh oleh Kepala Bakin Yoga Soegomo, melakukan Kudeta Konstitusional. Dituduh akan mengubah ideologi Pancasila.

> Padahal jauh-jauh sebelumnya, menurut Dr. Anwar Harjono, S.H. dalam *Membentuk Idjma (Konsensus) Nasional untuk Melaksanakan Pembangunan Indonesia dengan Djiwa jang segar*, menyatakan:
>
> Sepandjang menjangkut Pantjasila sebagai filsafat dasar negara, sedjak diproklamasikannja kemerdekaan Indonesia, tidak satu partai Islam pun jang ragu-ragu menjatakan penerimaannya. Penerimaan itu tidak dilakukan sebagai taktik. Umat Islam menerima Pantjasila adalah karena pertimbangan-pertimbangan asasi jakni karena asas Islam dapat menerima Pantjasila.

Penjelasan ini pun, tidak dibenarkan oleh pe nguasa militer Orde Baru. Sekalipun Dr. Anwar Harjono, S.H. menambahkan penjelasannya:

> Piagam Djakarta, 22 Djoeni 1945, kerap kali diidentikan dengan ide Negara Islam. Padahal sepanjang sejarah, belum pernah ada satu partai Islam pun yang mencantumkan tujuannya untuk membentuk Negara Islam.

Namun, praktik dari Strategi Kopkamtib Jenderal Benny Murdani dan Admiral Soedomo, menjadikan para Ulama, Santri Usrah, mantan aktivis KAPPI, KAMI, Dosen, Hakim, Menteri dan Jenderal yang dikebiri aktivitasnya atau ditangkap dengan berbagai tuduhan. Seperti penjelasan Jenderal Prn. TNI AD Dr. A.H. Nasution kepada penulis, sekitar 100 Perwira Tinggi dicekal oleh Ali Moertopo, dilarang masuk Kampus Universitas manapun, walaupun sebagai alumni. Misalnya Dr. A.H. Nasution sebagai alumni Unpad, dilarang memberikan Taushiyah Maulid Nabi 1400 H di Masjid Al-Jihad Universitas Padjadjaran.

Penangkapan Aktivis Islam

Menurut The Berne Convention, 1987 dalam Tapol, the Indonesia Human Rights Campaign, antara lain disebutkan nama-nama tokoh Islam yang ditangkap adalah:

Ir. H. M. Sanusi	Dr. Mursalin Dahlan
Andi Mohammad Fatwa	Ir. Syairul Alim M.Sc
Ir Ageng Sutisna	Drs. Nur Iman
Drs. Abdul Halim	Iwan Marwan Ashuri
Herliadi	Sujatmono
Barry	Mohammad Achwan
Abdul Qadir Djaelani	M. Djajadi
Mawardi Noor	

K.H. Abu Bakar Ba'asir dari Pesantren Ngruki Surakarta, dituduh sebagai penggerak Usrah. Di samping itu, ditangkap dan dipenjarakan pula, Jenderal Ton Dharsono mantan Pangdam Kodam VI Siliwangi dan Sekjen Asean.

Dampak tindakan ketiga jenderal tadi, menumbuhkan di hati rakyat rasa ketakutan dan ketertindasan, membangkitkan benih-benih sikap kurang simpati terhadap kepemimpinan TNI. Apalagi hasil Pembangunan Lima Tahun - Pelita, gagalnya sistem pemerataan, kelanjutannya tidak lagi dirasakan oleh rakyat kecil. Menurut Sutomo, 2008, dalam Bung Tomo Menggugat, Pelita berbalik semakin memperkaya golongan Cina jadi konglomerat.

Mereka ini walaupun semakin kaya dan makmur kehidupannya, selalu berteriak merasa didiskrimasikan. Presiden Soeharto tidak menghendaki adanya jurang ekonomi yang dalam antara rakyat dengan konglomerat, akan mengundang pengulangan sejarah terjadinya Peristiwa 10 Mei 1963 di Bandung.

Seperti yang dituturkan oleh Gubernur Jawa Barat, Mashudi, saat itu tiba-tiba terjadi gerakan demo yang didasariethnic prejudice - prasangka etnis, yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi Pribumi dan Non-Pribumi. Dampaknya melahirkan "revolusi jalan raya" dan main hakim sendiri. Gerakan demo pengrusakan, diawali dengan merusak kendaraan mahasiswa di kampus ITB. Kemudian, bergerak ke jalan raya tempat usaha, toko, milik etnis Cina. Gerakan demo ini murni, bukan garong atau perampok, tidak terlihat adanya pengambilan barang-barang dari toko yang dirusak.

Munas Alim Ulama NU Situbondo Memutuskan

Islam Adalah Akidah Pancasila Sebagai Azas

Jakarta, TERBIT

BAGI NU, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara republik Indonesia bukanlah agama. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara RI menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila2 yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. Sedangkan Islam bagi NU adalah akidah dan Syari'at yang meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan manusia.

Demikian tiga dari lima pasal deklarasi yang dihasilkan Musyawarah Nasional para Alim Ulama NU yang berakhir kemarin di Pondok Pesantren Salafiah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus Situbondo Jawa Timur. Dalam keputusan utamanya, Munas menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Kelima pasal deklarasi dimaksudkan untuk menunjang keputusan utama.

Dalam deklarasi keempat, Munas menegaskan penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk melaksanakan Syariah agamanya. Kelima, sebagai konsekwensi dari sikap diatas, NU berkewajiban menjaga pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak.

Dalam rumusan yang dihasilkan Komisi II Khittah yang kemudian disahkan Sidang Pleno Munas yang dipimpin Rois Aam H K.H Masykur disebutkan NU yang berhaluan pada akidah Islam ala Ahlussunnah Wal Jama'ah sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang terkandung didalam UUD 1945 (billafdzi wal Ma'nal marady) dengan rasa tanggung jawab dan tawakal kepada Allah.

"Karena itu jam'iyah (organisasi) NU berketetapan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi," demikian bunyi rumusan itu.

Sebelumnya Ketua Komisi II Khittah H.A.Chamid Widjaja (katib Aam) membacakan keputusan komisi yang terdiri dari empat masalah. Pertama hakekat NU dan kedudukan ulama didalamnya, makna Khittah dan beberapa rekomendasi.

Mengenai masalah konsekuensi pemulihan Khittah yang meliputi bidang organisasi, masalah NU dan Pancasila, hubungan NU dan politik serta program yang dikembangkan, pembahasan materi didasarkan pada makalah yang disajikan oleh Mustasyar/ Penasihat PB Syuriah H.Achmad Siddiq.

Konsep mukadimah

Konsep Mukadimah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU hasil keputusan Munas yang nantinya direkomendasikan dalam Muktamar XXVII NU tahun 1984, berbunyi sebagai berikut:

Bahwa agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, dan karena itu, ajarannya mendorong kegiatan pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat.

Bahwa para *Ulama Ahlu sunnah wal jama'ah* Indonesia terpanggil untuk mengorganisir kegiatan-kegiatannya dalam suatu wadah yang disebut Nahdlatul Ulama dengan tujuan mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam menurut paham *ahlu sunnah wal jama'ah*.

Bahwa kemaslahatan warga NU adalah bagian mutlak dari kemaslahatan masyarakat Indonesia, maka dalam perjuangan mencapai kemaslahatan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan, organisasi NU berasaskan:

Jawaban Munas Alim Ulama NU di Situbondo terhadap Pancasila sebagai asas Islam sebagai akidah dan syariah meliputi aspek hubungan dengan Allah dan hubungan manusia.

Sumber: *Harian Terbit*

Gubernur Jawa Barat Mashudi, bersyukur demo yang berangkat dari kampus ITB dan kampus lainnya, dapat diarahkan bergerak ke halaman Gubernuran Pakuan Jalan Otto Iskandardinata. Gerakan ini diisukan dipimpin oleh kelompok mantan pimpinan PSI.[4]

Sumber: Doc. Pribadi

Pertemuan Penulis dengan Jenderal A.H. Nasution

Penulis menyampaikan berita gagalnya rencana pemberian taushiyah Jenderal A.H. Nasution, dalam Peringatan Tahun Baru Islam 1400 H di Universitas Padjadjaran Bandung karena tidak diizinkan oleh Laksus. Jenderal A.H. Nasution memahaminya dan memperlihatkan kepada Penulis tentang sejumlah tokoh pimpinan Orde Baru yang dicekal oleh Jenderal Ali Moertopo tidak diizinkan masuk kampus walaupun sebagai alumni. Tampak kertas putih di kursi berisikan nama-nama tokoh yang dicekal dan peringatan kepada redaksi media massa agar tidak memuat pemberitaan pandangan atau konsep pemikiran dari tokoh yang dicekal.

Demi menghindari agar tidak terjadi lagi, digalakkan gerakan Pembauran Bangsa, agar golongan etnis Non-Pribumi membaur dalam aktivitas ekonomi, sosial budaya, olah raga, dan memahami sejarah Pribumi. Gerakan Pembauran Bangsa ini pun menemui kesulitan. Diisukan terjadi pemaksaan etnis Cina, untuk masuk ke agama Islam. Timbullah usaha yang merencanakan agar terjadi Huru Hara Anti Cina seperti

4 Periksa lebih lanjut. Dr. The Siauw Giap. 1986. *Cina Muslim Di Indonesia*. Yayasan Ukhuwah Islamiyah. Jakarta.

yang pernah terjadi di Surakarta, 1912 M. Targetnya agar Non-Pribumi menjauh dari Pribumi Islam. Dengan kata lain, bertujuan menggagalkan upaya Pembauran Bangsa.

Di sisi lain, timbul pula huru hara gerakan anti korupsi di Pertamina. Hal ini dipicu oleh adanya pengembangan dakwah Islam di Pertamina tampak sangat pesat. Namun, tujuan sebenarnya untuk menggoyahkan kepemimpinan Presiden Soeharto. Sekaligus dampaknya menghambat pengembangan dakwah Islam di Pertamina.

Padahal aktivitas dakwah Islam di Pertamina, bertujuan melumpuhkan pengaruh ajaran komunisme yang pernah dikembangkan oleh Serikat Buruh Minyak. Kedudukan Dr. Ibnu Sutowo yang dekat dengan Islam dijadikan sasaran utama untuk digoyahkan dengan tuduhan korupsi dan salah urus.

Apalagi dengan adanya kenaikan harga BBM. Presiden Soeharto dalam menjawab demo dan berbagai tuntutan yang diangkat oleh beberapa surat kabar, baru dilaksanakan setelah situasi mereda, air mendidih sudah mulai mendingin, menggantikannya Dr. Ibnu Sutowo dengan Piet Harjono sebagai Dirut baru.

Tidak luput dari sasaran dakwah Islam di Telkom. Diciptakan berbagai isu agar diadakan penggeseran kedudukan terhadap beberapa pimpinan yang sangat simpati pada pengembangan dakwah Islam dan pemberian fasilitas untuk naik haji pegawai Telkom.

Ali Moertopo Dalang Keonaran

Apakah targetnya akan menghambat dakwah Islam, dan menjauhkan Presiden Soeharto dengan realitas kekuatan umat Islam di seluruh eselon kerja dan jawatan serta instansi. Apakah untuk menciptakan kesan pemerintah Orde Baru menindas umat Islam. Berikutnya massa Islam dan remaja Islam - miris yang sedang ketakutan, ditargetkan akan dijadikan alat pendongkel Presiden Soeharto. Sebenarnya, siapa *author intellectualist* - dalang peristiwa kerusuhan. Apakah benar tujuannya akan menggulingkan Presiden Soeharto dan Sang Dalang ingin menjadi Presidennya?

Kholid O. Santosa, 2007, dalam *Jejak-Jejak Sang Pejuang Pemberontak, Pemikiran, Gerakan & Ekspresi Politik S.M. Kartosuwirjo dan Daud Beureueh,* menuturkan bangkitnya kembali gerakan NII, tidak luput dari rekayasa dari Ali Moertopo. Dengan memanfaatkan tenaga mantan NII, Ali Moertopo akan menggulingkan Presiden Soeharto. Apabila berhasil maka akan dibantu pembentukan NII dan Ali Murtopo sebagai Presidennya.

Ali Moertopo sebagai pimpinan Operasi Khusus - Opsus, dalam melaksanakan rekayasanya, dibantu oleh: Kolonel Ngairan dan Kolonel Gijanto pencari dana di dalam dan di luar negeri. Di bidang operasi dibantu oleh Kolonel Sumardan.

Demikianlah tingkah laku politik Ali Moertopo sebagai orang dekat Presiden Soeharto, akan merebut kursi kepresidenan Soeharto. Namun, segenap peristiwa hasil rekayasanya, selalu menuding mantan pimpinan Masyumi dan G.P.I.I sebagai dalang gerakan anti Pancasila dan mencoba menggulingkan Presiden Soeharto.

Ali Moertopo dengan rekayasanya, berupaya menjadikan mahasiswa dan umat Islam tidak simpati kepada Presiden Soeharto. Sebaliknya, agar Presiden Soeharto menjauh dari umat Islam dan tidak dekat dengan mantan pimpinan Masjumi sekalipun bersikap koperatif dan akomodatif. Dengan cara itu, Ali Moertopo akan tampil sebagai juru selamatnya. Dia berusaha menjadi Wakil Presiden dan kemudian menjadi Presiden. Alhamdulillah, para Ulama dan umat Islam umumnya, justru sebaliknya bersikap antipati terhadap Ali Moertopo.

Problem Kerudung Jilbab Siswa SMA

Upaya memadam cahaya ajaran Islam yang dilakukan oleh Ali Moertopo dan didukung oleh Benny Moerdani, dijawab oleh Masjid Salman yang dipimpin oleh Prof. Sadeli, Dr. Ir. Immaduddin, Enang Saifuddin Anshary M.A., Prof. Dr. Syarif. Prof. Dr. Miftah Farid, dengan membangkitkan gerakan dakwah di kalangan remaja dan pemuda. Terutama dakwah ke mahasiswa, dengan mengadakan semacam kursus. Untuk menanganinya diserahkan kepada Karisma - Keluarga Remaja Islam Salman.

Selain mengadakan pembelajaran baca Al-Qur'an untuk remaja, juga mengadakan Latihan Mujahid Dakwah - LMD. Kemudian, diadakan pula Studi Islam Intensif - SII. Dalam hal ini ditangani oleh Dr. Ir. Yan Orgianus. Dengan bergabungnya Anne Rufaidah dari Seni Rupa ITB ke Karisma, lahirlah rancangan busana Muslimah. Dengan menjadikan putri-putri atau akhwat Karisma sebagai pemakai hasil rancangan busana Muslimah, mulailah kaum Ibu dan remaja putri Masjid Salman dan mahasiswi ITB mengenakan busana Muslimah berkerudung jilbab.

Akibat Karisma juga mengadakan Bimbingan Belajar untuk siswa-siswa SMA Negeri atau Swasta, mulailah kerudung jilbab masuk ke SMA Negeri di kota Bandung. Kemudian, cepat menjalar ke seluruh SMA di Jawa Barat. Pengaruhnya bagi SMA Swasta tidak bermasalah busana seragam SMA dengan berkerudung jilbab.

Pengembangan selanjutnya digerakkan Mbak Rina dari Teknik Informatika ITB, meluas hingga melahirkan "Samodra Jilbab" di kalangan para siswi dan mahasiswi di Bandung.
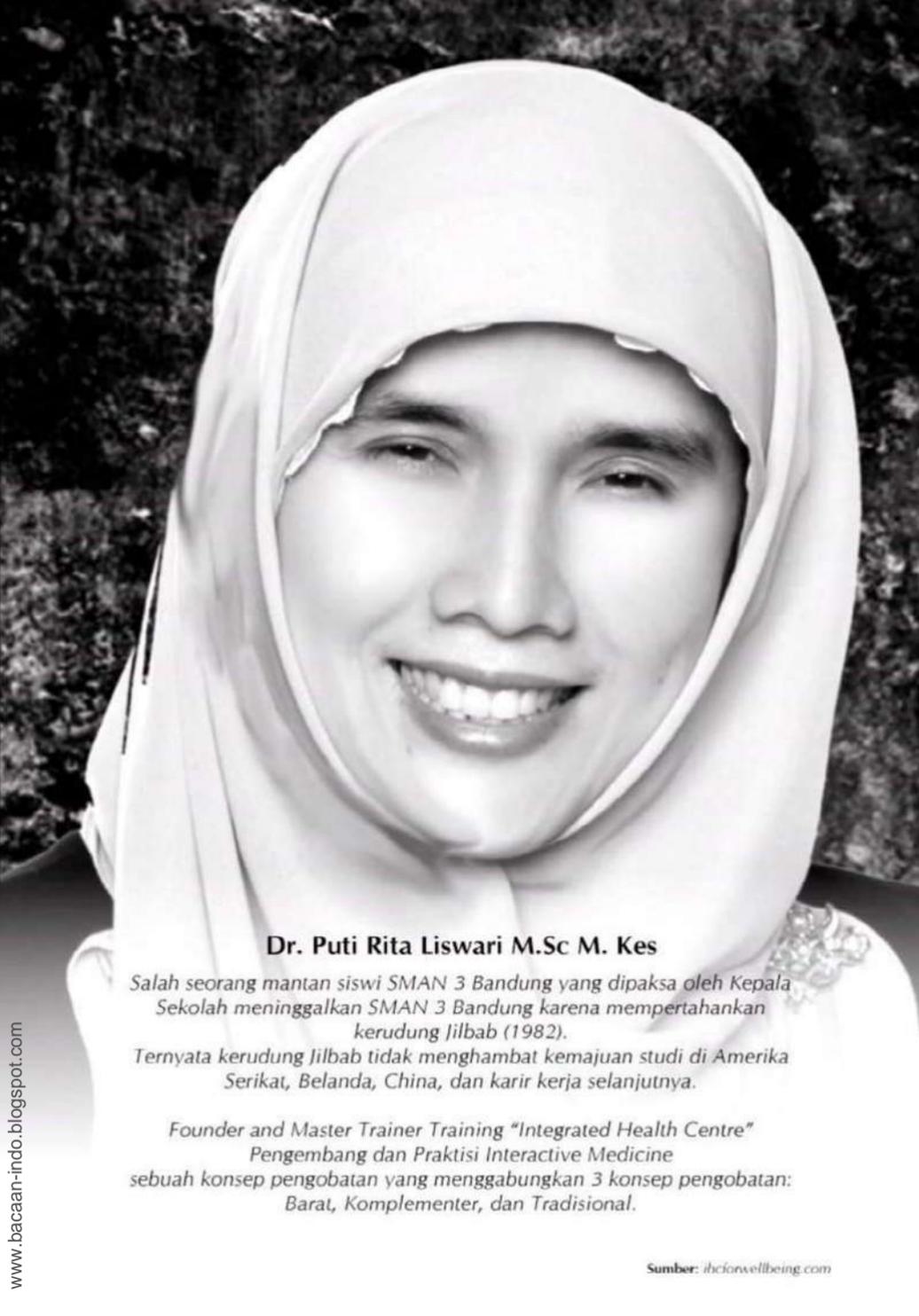
Dr. Puti Rita Liswari M.Sc M. Kes
Salah seorang mantan siswi SMAN 3 Bandung yang dipaksa oleh Kepala Sekolah meninggalkan SMAN 3 Bandung karena mempertahankan kerudung Jilbab (1982).
Ternyata kerudung Jilbab tidak menghambat kemajuan studi di Amerika Serikat, Belanda, China, dan karir kerja selanjutnya.
Founder and Master Trainer Training "Integrated Health Centre"
Pengembang dan Praktisi Interactive Medicine
sebuah konsep pengobatan yang menggabungkan 3 konsep pengobatan: Barat, Komplementer, dan Tradisional.
Sumber: ihcforwellbeing.com

Tidaklah demikian halnya dengan SMA Negeri 3 Bandung. Kepala Sekolahnya, menilai siswa yang berkerudung jilbab, melanggar janji taat terhadap tata aturan disiplin sekolah dan seragam sekolah. Termasuk masalah kesediaan mengenakan busana olah raga. Pelanggaran ini diperingatkan dengan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran di dalam kelas, masih diizinkan berada di luar kelas. Namun, karena para siswa yang berkerudung jilbab tetap tidak bersedia membukanya, dikenakan hukuman dikeluarkan dari SMA Negeri 3. Tindakan yang sama dilakukan oleh kepala sekolah SMA Negeri di Jakarta

Adapun siswi-siswi SMAN yang tetap mempertahankan berkerudung jilbab dan terkena hukuman dikeluarkan karena mempertahankan busana penutup aurat secara Islami adalah:

SMA Negeri 68 Jakarta: Ratu

SMA Negeri 3 Bandung:

Erlin Marlina	Ellin Hendari	Yanti Rufaidah
Atty Martina	L. Rahayuningtyas	Diah Agustina
Suhartini	Puti R. Liswari	Jaziar Radianti
Nina Surtiretna	Umi Kulsum	Wati
Emma	Kiki Nurruzakiah	

SMA Negeri 5 Bandung: Nina Manarosma

Seluruh yang jadi korban tindakan Kepala Sekolah yang tidak membenarkan siswi di sekolahnya mengenakan kerudung jilbab, pada 1982, se-Jawa Barat berjumlah sekitar 300 siswi. Mengapa Kepala Sekolah harus menindaknya? Menteri Pendidkan dan Kebudayaan, Daud Yusuf dalam menegakkan disiplin sekolah sama pola strateginya dengan Ali Moertopo dan Benny Moerdani. Apabila di sekolah atau di kampus Perguruan Tinggi berkembang kehidupan Islamnya, Kepala Sekolah atau Rektor harus bertanggung jawab. Pembusanaan jilbab harus dikenakan wajib foto untuk ijazahnya atau keterangan yang diperlukan adanya foto, harus tampak telinga pada foto setengah badannya.

Selain itu di aktivitas di Masjid Salman ITB, pada masa Orde Lama tidak mendapatkan tekanan seperti masa Orde Baru yang dilancarkan oleh sebagian pimpinan militer Ali Moertopo, Benny Moerdani, dan Soedomo. Tekanan terhadap aktivitas dakwah Islam di Masjid Salman, menjadikan Prof. Dr. Miftah Farid berlangganan mendekam di Laksus untuk diinterogasi.

Kerudung Jilbab Keluarga Cendana

Sumber: www.tempo.co

Di tengah para siswi yang dikeluarkan dari sekolahnya karena mengenakan kerudung jilbab, di tengah keluarga Presiden Soeharto, putrinya, Mbak Tutut atau Siti Hardiyanti Rukmana, selalu tampil berjilbab. Tidakkah hal ini memberikan gambaran bahwa antara Ali Moertopo dan Benny Moerdani serta Daud Yusuf mempunyai kebijakan Islam yang berbeda, Benny Moerdani terlihat menekan Islam, setelah pembebasan Timor Timur dari penjajahan Portugis (1976 M). Pada awalnya di wilayah ini hanya berlaku pengembangan agama Katolik. Namun, setelah dibebaskan dari penjajahan Portugis dan menjadi salah satu Provinsi NKRI, masuk dan berkembanglah agama Islam. Sebagai akibat banyak pasukan TNI Darat, Laut dan Udara serta Kepolisian yang beragama Islam, berdirilah Masjid yang menyebar di seluruh wilayah Timor Timur. Demikian pula di sektor pertanian, banyaknya transmigrasi petani, di kalangan petani berkembang agama Islam. Apalagi dengan semakin meningkatkan hubungan Timor Timur dengan wilayah Nusantara Indonesia lainnya, menjadi pasarnya wiraniagawan Islam.

Kebijakan Presiden Soeharto yang sangat dekat dengan pimpinan agama Islam dalam membendung ajaran komunisme, banyak mendirikan masjid. Dibangunnya Masjid di perbatasan Irian Jaya dengan Papua New Guinea, dan juga di Bosnia, sangat meresahkan jenderal penganut Katolik, Benny Moerdani. Walapun Presiden Soeharto juga membangun Patung Jesus di Dili yang memiliki kesamaan dengan di Brazilia.

Sukar untuk dipahami tindakan Presiden Soeharto tidak melakukan *reshuffle cabinet*, terhadap menterinya yang tidak sejalan dengan kebijakannya. Pada satu pihak, membiarkan Benny Moerdani beraksi dengan aksi penindasannya terhadap umat Islam. Di lain pihak, Presiden Soeharto memberikan angin perkembangan Islam.

ELIDAWATI
Direksi
Produksi dan Pemasaran PT Shafira

Sumber: Doc. Shafira

Bangkitnya Shafira

Kerudung jilbab Mbak Tutut, memungkinkan meluasnya pemakaian kerudung jilbab di masyarakat. Dengan kata lain, tidak terhalang lagi kerudung jilbab dikenakan oleh para siswi atau akhwat. Namun, menjadi busana Islami yang dikenakan oleh para Ibu sebagai peserta Pengajian Ibu-Ibu atau Majelis Ta'lim yang diselenggarakan oleh Masjid Salman ITB, Masjid Al-Jihad Unpad, Masjid Al-Furqon IKIP, Masjid Al-Asy'ari Unisba, Masjid Libasut Taqwa ITT, Masjid Istiqomah, Masjid Al-Azhar, Masjid Baiturrahman Patrakomala, Masjid Mujahidin Muhammadiyah, Masjid Pajagalan Persis, Darut Tauhid di Bandung. Dari sini, berkembang ke Masjid Al -Azhar Kebayoran Baru Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia Jogyakarta.

ANNE RUFAIDAH

Pelopor Pembangkit Gerakan Pembusanaan Islami Wanita.

Penentang Pengaruh *Nympho Maniac Fashion* - Mode Pembusanaan Indah dan Cantik jika lebih berani keterbukaannya. *Nympho* – Telanjang, *Maniac* – Gila.

Sumber: *www.annerufaidah.blogspot.com*

FENNY MUSTAFA BERSAMA BINTANG KCB
(Ketika Cinta Bertasbih)

Sumber: Doc. Shafira

Dampak ramainya Pengajian Ibu-Ibu atau Majelis Ta'lim, menjadikan tuntutan busana Muslimah dan kerudung jilbab meningkat. Di Bandung, muncullah dari aktivis Karisma Masjid Salman ITB, Toko Sandang Busana Muslimah dengan nama Shafira. Dipelopori oleh perancang busana, investor, dan manager serta peragawati:

Anne Rufaidah	Fenny Mustafa	Elidawati
Gilarsi W. Setijono	Memed Mursjid	

Seorang peragawati yang terjun dalam upaya meragakan busana Muslimah adalah Ratih Sanggarwati. Tentu, masih banyak lagi nama-nama perancang busana Muslimah dan peragawati yang bermunculan di kota-kota besar lainnya. Namun, bagaimana pun, Bandung sebagai kota barometer perubahan kehidupan Islam (1982 M) yang berkembang ke seantero Nusantara.

Suatu pertanyaan yang sangat menggoda penulis yang ikut aktif dalam Studi Islam Intensif dengan Sejarah Islam Indonesia, mengapa pada saat penekanan sebagian pimpinan militer ketiga pelaku tadi, justru yang berani memberi jawaban adalah Masjid Salman ITB, Masjid Al-Jihad Unpad, Masjid Al-Furqon IKIP, Masjid Libasut Taqwa ITT. Apakah hal ini karena aktivis dari masjid tadi, terdiri dari HMI, IMM, SEMMI. Demikian pula para da'inya dari Dewan Dakwah Islam Indonesia - DDII yang dipimpin oleh mantan pimpinan Partai Islam Indonesia Masyumi. Jawabannya masih diperlukan penelitian yang panjang.

Namun, saat itu yang memberikan format dakwah yang dapat diterima ajarannya oleh kalangan mahasiswa antara lain adalah:

Prof. Dr. Buya Hamka, Yunan Helmi Nasution	Jakarta
Prof. Muhsin S.H., Prof. Rusyad Nurdin	Bandung
Ismail Ghifari, Prof. Kahar Muzakkir	Jateng
Bey Arifin	Surabaya

Ternyata, suatu tantangan yang diterima oleh umat Islam, pasti ada jawabannya. Semakin besar dan tindakan lawan semakin meluaslah ajaran Islam yang dicoba dibendung oleh para menteri sekalipun. Baik dari kalangan sipil atau pun militer.
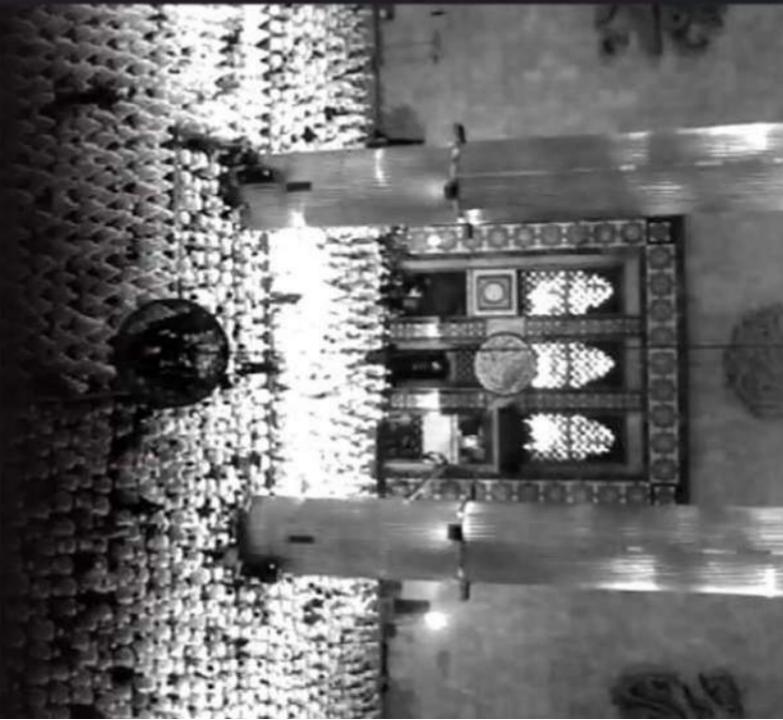
Batik Busana Nasional

Di tengah hiruk pikuk kegiatan para lawan Islam yang mencoba memadamkan cahaya Islam, baik dalam bidang orpol atau budaya, muncullah jawaban yang tidak diperhitungkan sebelumnya, munculnya gerakan pembusanaan batik sebagai busana resmi atau busana nasional.

Diawali oleh Haji Samanhoedi sebagai pelopor terdepan dalam mempertahankan batik sebagai sandang pribumi, dengan melancarkan sistem pemasarannya. Dibentukllah Syarikat Dagang Islam - SDI pada 16 Oktober 1905 di Surakarta. Berikutnya, batik kurang mendapat perhatian kalangan atas, hanya terlihat di kalangan masyarakat bawah, dikenakan oleh kaum ibu atau pedangang pria di pasar.

Kemudian muncul gagasan dari Iwan Tirta dengan menjadikan Gubernur DKI Ali Sadikin dan Presiden Soeharto mengenakan busana batik, menjadikan batik diputuskan sebagai busana resmi dalam pertemuan formal pemerintahan atau swasta.

Sejarah mencatat perubahan busana suatu bangsa akan terabadikan masyarakat jika mendapatkan dukungan para elit politik. Mode atau *fashion* berkembang sebagian karena perencanaannya tidak menyentuh ajaran agama dan lebih bertumpu pada perubahan ornamental luar.

Busana Muslimah yang menjamur ke seluruh pelosok nusantara dan semaraknya aktivitas dakwah Islam, menjadikan Islam Indonesia diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Walaupun cenderung budaya busana Barat mulai diterima oleh mayoritas bangsa Indonesia. Namun, busana Islami baik pria ataupun wanita masih dominan memberikan bentuk ciri pribadi Islam dari penyandangnya. Perkembangan Islam yang semarak itu akibat kebijakan politik dari Presidennya.

Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno diangkat menjadi *The Champion of Freedom and Islam* - Pendekar Kemerdekaan dan Islam oleh Konferensi Islam Afrika Asia di Bandung. Demikian pula perkembangan Islam walaupun ditekan keras oleh Benny Moerdani, bahkan menjadikan Soedomo, mantan Pangkopkamtip melakukan konversi agama masuk Islam. Sedangkan pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto dan keluarganya lebih mendekatkan pada kekuatan Islam dalam menjawab bahaya komunisme.

Dengan memerhatikan situasi Indonesia yang semakin berkembang ajaran Islam, tentu menjadikan Amerika Serikat merasa perlu menciptakan keseimbangan politik dengan mendekati para penguasa Indonesia untuk melakukan intervensi meminimalisasikan kemajuan Islam Indonesia.

Walaupun Indonesia dapat memperlihatkan ke dunia luar, tanpa adanya Pakta Pertahanan Militer seperti Barat, berhasil menumbangkan PKI dan segenap upaya kudetanya. Demikian pula Indonesia berhasil mematahkan gerakan komunis Fretelin di Timor Timur dan membebaskan dari penjajahan Portugis, 1976 M. Sedangkan Amerika Serikat, meskipun memiliki pangkalan militer di Filipina, tetapi gerakan komunis Huk Balahab tidak berhasil dipatahkannya.

> Prestasi pemerintah Orde Baru ini, tidak dihargai oleh Amerika Serikat. Nasib Presiden Soeharto mirip dengan Saddam Hussein di Irak, setelah membantu Amerikat Serikat menumbangkan Reza Pahlevi dengan proyek Nuclear Weapon-nya, dan Imam Khomeini Iran dengan gerakan Syi'ah-nya yang mengancam Israel, diciptakan gerakan memakzulkan Saddam Husein. Demikian pula nasib Zia ul Haq Pakistan, setelah berhasil menumbangkan Ali Bhutto dengan Chasma Nuclear Weapon Project dengan bantuan dana dari Muamar Khadafi dari Libya, dirontokkan dengan dibazoka pesawat terbang yang ditumpangi Zia ul Haq bersama Duta Amerika Serikat untuk Pakistan. Secara historis sukar ditemukan faktanya, namun dari tinjauan politik dapat diperkirakan kebenarannya.
>
> Lalu, apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat terhadap Presiden Soeharto setelah PKI hancur, disusul dengan keberhasilannya dalam penguasaan dirgantara dengan membangun IPTN di Bandung dan penguasaan maritim di Surabaya dengan membangun PT PAL, dan penguasan komunikasi dengan Tiga Satelitnya, serta rencana Pusat Listrik Tenaga Nuklir - PLTN di Rembang, pabrik senjata PINDAD di Bandung, memakzulkan Presiden Soeharto dari singgasana kepresidenannya. Mengapa?

Sebenarnya, sejak masa Orde Lama, ketika Amerika Serikat di bawah Presiden Eisenhouwer, 1953-1961 M, tidak menghendaki Indonesia kuat. Apalagi Indonesia setelah berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung, 1955 M, berdampak pakta pertahanan Amerika Serikat, *South East Asia Treaty Organization - Seato*, bubar. Filipina, Thailand, dan Pakistan, tidak mau menjadi pendukung Seato lagi. Program Amerika Serikat memecah belah Indonesia sejak masa Presiden Soekarno yang dituduh PKI, berlanjut hingga masa Presiden Soeharto yang berhasil melumpuhkan PKI.

Presiden pada Peringatan Maulid Nabi di Istana

Pancasila Bukan untuk Kurangi Peranan Agama

JAKARTA, Minggu

Usaha memantapkan Pancasila sebagai ideologi nasional samasekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi peranan agama dalam kehidupan bangsa, bahkan justru untuk lebih memberinya landasan yang kuat dan kukuh, Presiden Soeharto mengatakan dalam pidatonya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara Jumat malam.

Pancasila sebagai ideologi nasional mestilah benar-benar menjadi asas kehidupan bangsa, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam hidup bernegara, tegas Presiden.

Menurut Presiden, dia perlu menegaskan masalah Pancasila, sebab masih ada anggapan bahwa usaha untuk memantapkan Pancasila sebagai ideologi nasional adalah usaha untuk menggeserkan kedudukan agama.

"Saya ingin menegaskan bahwa anggapan ini sama sekali tidak benar. Hal itu tidak pernah terbayangkan dalam pikiran kita," katanya.

Tidak Beralasan

Menurut Presiden sungguh tidak beralasan apabila masih ada di antara kita yang menganggap Pancasila sebagai suatu ancaman terhadap agama.

Pemikiran seperti ini, katanya lagi, sama salahnya dengan anggapan bahwa agama adalah ancaman terhadap Pancasila. Hal ini harus dijawab bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan nyata. Kita harus memantapkan usaha-usaha pengalaman dan penghayatan Pancasila di samping lebih menyemarakkan kehidupan beragama.

Dalam usaha menyemarakkan kehidupan beragama, masing-masing umat beragama hendaknya menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk. Berbagai agama hidup dan berkembang dalam masyarakat kita, oleh karena itu Pancasila juga berfungsi sebagai landasan bersama bagi berbagai umat beragama dalam usaha mewujudkan dan mengembangkan kerukunan hidup beragama dan dalam usaha membangun kehidupan bersama, kata Presiden.

Presiden Soeharto mengatakan lebih jauh, kegiatan berbagai organisasi sosial keagamaan dalam pembangunan masyarakat kita benar-benar memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi perkembangan bangsa. Namun adalah suatu keharusan bagi kita bersama untuk mengikat berbagai bentuk kegiatan itu dalam pangkal tolak dan arah yang sama, yaitu membangun masyarakat Pancasila yang sosialistis religius yakni masyarakat adil dan makmur yang bersifat kekeluargaan dan disemangati oleh nilai nilai Ketuhanan.

"Itulah sebabnya kita memandang perlu lebih memantapkan Pancasila sebagai asas politik dan asas kemasyarakatan bangsa kita," kata Presiden.

"Rahmatan lil-Alamin"

Kepala Negara mengatakan, dia sengaja mengemukakan masalah Pancasila dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebab bagaimanapun, peranan umat Islam yang jumlahnya mayoritas di negeri kita sangat besar dan menentukan. Untuk ini kita dapat belajar banyak dari junjungan dan panutan kita itu. Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh bagaimana membangun masyarakat bersama di mana anggota masyarakatnya bukan hanya pemeluk agama Islam.

"Beliau telah memberi ... teladan bagaimana menghormati hak-hak umat beragama lain untuk menjalankan agama mereka. Beliau mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong tanpa memperdulikan keyakinan agama masing-masing. Beliau benar benar merupakan rahmatan lil"alamin," kata Presiden.

Karena itu, ucap Kepala Negara lagi, umat Islam Indonesiapun harus berusaha membangun citra-dirinya sebagai pembawa rahmat bagi bangsa dan negaranya. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan menunjukkan rasa tanggungjawab yang sebesar-besarnya dalam bersama-sama membangun Masyarakat Pancasila.

Hampir lupa

Menteri Agama, H. Munawir Sjadzali dalam pidatonya mengatakan, umat Islam sekarang ini, khususnya yang hidup - di kota-kota besar, sudah hampir lupa atau tidak menaruh perhatian lagi kepada pola hidup Muhammad pada masa masa persiapan menerima kenabian.

Rahmat Tuhan yang berupa rizki yang berlebih justru sering membawa kita kepada pola hidup yang tidak sehat dan tidak wajar dan kita menjadi terlampau sibuk untuk sekali-kali tafakur, taamul (merenungkan) dan munajah.

Bahkan kadang-kadang ada anggapan bahwa berkhalwat (meditasi) di tempat sepi jauh dari keramaian kota itu adalah budaya bukan Islam.

Dalam acara peringatan Maulid Nabi di Istana Negara itu, ceramah hikmah Maulid disampaikan oleh Prof. Baroroh Baried dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Hadir dalam acara tersebut selain Presiden dan Nyonya Tien Soeharto juga para Menteri Kabinet Pembangunan IV, pimpinan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, para Duta Besar Negara sahabat khususnya negara-negara Islam, para peserta Kongres Cendekiawan Muslim se-dunia yang tengah berlangsung di Jakarta serta masyarakat ibukota.- [Y/HJ]

Merdeka **Senin, 19 Desember 1983**

Sumber: Merdeka, 19 Desember 1983

Prof. Dr. H. M. AMIEN RAIS, M.A

Lahir di Solo, Jawa Tengah, 26 April 1944

Ketua MPR RI, 1999-2004
Dewan Pembina Partai Amanat Nasional
Cendekiawan Muslim

Sumber: Doc. Pribadi
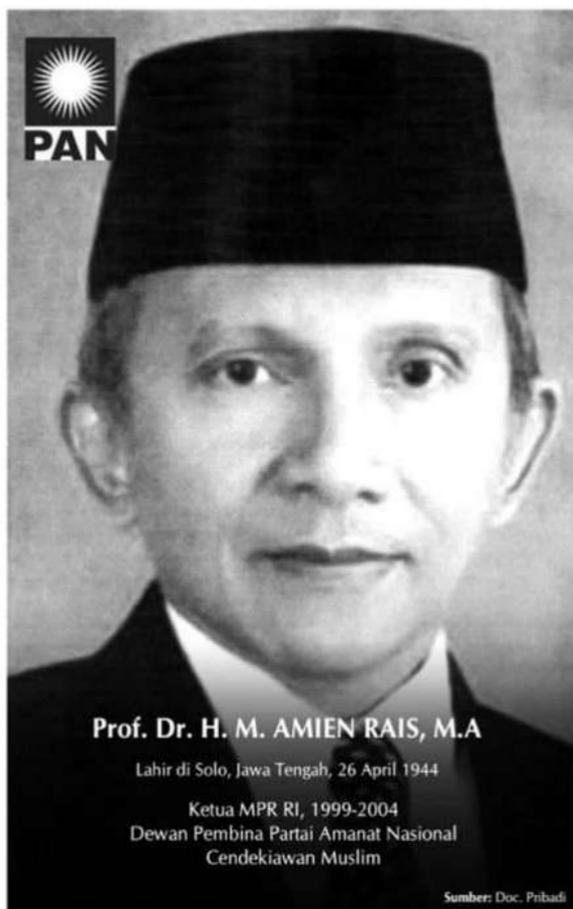
Apalagi setelah berhasil melumpuhkan komunis di Timor Timur, 1976 M, Presiden Soeharto memperlihatkan sikapnya mendekatkan diri pada massa Islam dan remaja Islam - miris. Tidak hanya di Indonesia, Presiden Soeharto juga memperlihatkan simpati dengan perkembangan Islam di Bosnia, 1996 M. Tidak ada seorang pun Kepala Negara yang berusaha membangun Masjid di Bosnia, kecuali Presiden Soeharto. Hal ini tentu bertolak belakang dengan kepentingan Barat, menghendaki hancurnya Islam di wilayah Balkan, dan di Chechnya Rusia, setelah adanya Perestroika di Rusia.

TRIO PEMBANGKIT GERAKAN DAKWAH
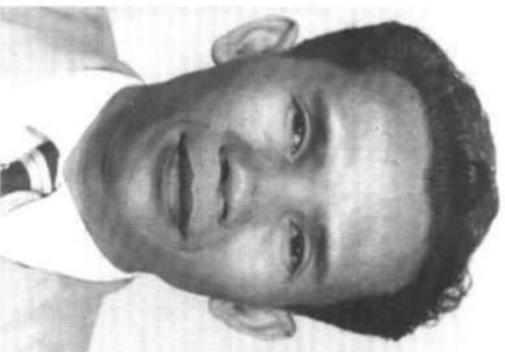
BEY ARIFIN

GHOFAR ISMAIL

RUSYAD NURDIN

Sumber: Mizan, Doc. Pribadi, Multipro

Apalagi Presiden Soeharto bersama keluarganya dan beberapa orang staf menterinya, menampakkan sikap kecenderungan Islaminya, masuk ke dalam Ka'bah dan memperlihatkan pula memotong rambut - *tahalul,* Wakil Presiden Tri Soetrisno di Jabal Marwah disiarkan melalui TV. Hal ini dinilai Barat, Presiden Soeharto terlalu tampak kedekatan Islamnya.

Tambahan lagi, ledakan jumlah calon haji, hingga diadakan *waiting list* - daftar tunggu, pertanda ekonomi umat Islam di garis bawah pun sangat maju. Berarti pemerataan pembangunan, dirasakan benar-benar oleh rakyat. Hal ini pertanda pengembangan ajaran Islam sebagai agama di masa Presiden Soeharto, maju pesat.

Namun sebaliknya, Islam sebagai "kekuatan partai politik", dibonzaikan. Dapat dibaca berkembangnya slogan, *ekonomi yes, parpol Islam no.* Dapat dirasakan adanya upaya deislamisasi politik, dan depolitisasi Islam, serta deparpolisasi Ulama.[5]

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia - DDII

Sebenarnya perkembangan Islam Indonesia menjadi sangat pesat, dampak dari aktivitas mantan pimpinan Masyumi alih profesi dari partai politik, menjadi lebih aktif dalam organisasi dakwah di berbagai sektor. Dr. Anwar Harjono S.H. menuturkan sekitar 1386 H /1967, tidak menyebutkan kapan tanggal berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia - DDII.

Adapun para pendiri Dewan Dahwah Islam Indonesia - DDII adalah:

Mohammad Natsir	Dr. H. M Rasjidi
H. M. Daud Dt. Panglimo Kajo	K.H. Taufiqurrahman
H. Hasan Basri	Prawoto Mangkusasmito
Nawawi Duski	Abdu Hamid
Abdul Malik Ahmad	Buchari Tamam

5 Upaya menghambat kemajuan PPP agar tetap memenangkan Golkar, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Amir Mahmud mendesak K.H. Bisri agar PPP tidak menggunakan lambang Ka'bah dalam Pemilu. Dengan alasan bila gambar Ka'bah dicoblos dalam Pemilu, berarti tidak menghormati Ka'bah. Dijawab oleh K.H. Bisri, bagaimana bila pegawai Pos yang memukuli prangko bergambar Presiden Soeharto, apakah hal itu berarti tidak menghormati Presiden Soeharto? Ditegaskan bahwa lambang Ka'bah adalah hasil ijtihad K.H. Bisri bersama Ulama lainnya.

Sumber: Doc. Pribadi

LAMBANG KA'BAH DDII DIAPIT SALIB

Arsitektur Gedung Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

di tengah tampak depan terdapat Ka'bah yang diapit kanan kiri oleh Salib

Kanan Kiri depan, 2 + 2 = 4 buah

Kanan Kiri samping 6 + 6 = 12 buah

Kanan Kiri belakang 1 + 1 = 2 buah

Perlukah filosofi arsitektur Gedung DDII bersalib seperti filosofi bangunan modern Barat?

Program meningkatkan kualitas dakwah Islamiyah dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, membangkitkan kalangan cendekiawan Muslim berpartisiasi aktif mendakwahkan Islam. Kalangan medis, pakar ekonomi, budayawan, sejarawan, arsitek, pakar busana, dosen dari berbagai cabang ilmu, terpanggil untuk ikut serta mendakwahkan ajaran Islam sejalan dengan ilmunya, di wilayah kerjanya. Tidak lupa di kalangan militer dan polisi, serta di setiap departemen, mendirikan seksi dakwah,

membangkitkan semangat Islam dalam warganya. Demikian pula di masyarakat, timbul kesadaran kaum ibu membangun Majelis Taklim, di samping adanya Dharma Wanita di setiap instansi, aktif pula mengadakan dakwah rutin.

Di Bandung, meneruskan aktivitas DDII, atas inisiatif Kang Joseph didirikan *Corp Muballigh Bandung - CMB*, dengan media cetaknya *Majalah Tadkirah*. Adapun media cetak yang diterbitkan oleh DDII adalah *Majalah Media Dakwah*, *Suara Masjid*, *Serial Khutban Jumat*, untuk anak-anak *Sahabat*, dan setiap Jumat diterbitkan Buletin *Da'wah*. Di Masjid Salman ITB, menerbitkan *KAU Salman*, dan Masjid Al Jihad Unpad, menerbitkan Majalah *Al-Jihad*. Masjid Istiqamah dengan bulletin *Suara Istiqamah*. Tentu di seluruh masjid di Nusantara Indonesia, saling menerbitkan buletin.

Tentu Indonesia dengan kebangkitan masyarakat Islam ini, tidak akan dibiarkan oleh Amerika Serikat. Maksudnya, Amerika Serikat tidak ingin Indonesia menjadi negara yang masyarakat Islamnya semakin maju dan kuat di Asia Tenggara.

Indonesia digoyahkan dengan bantuan George Soros hingga terjadi inflasi drastis, Rp.20.000,00 sama dengan US$ 1. Indonesia dikondisikan agar bergantung pada IMF. PM Malaysia, Mahathir Muhammad, mengingatkan Presiden Soeharto, jangan mencari solusi melalui IMF bila ekonomi Indonesia tidak ingin sehancur-hancurnya.

Benarkah di Indonesia masyarakat Islam semakin kuat? Kalau benar umat Islam kuat, mengapa Dr. Anwar Harjono SH, mencari keadilan dan persatuan? Kebanyakan umat Islam, merasakan betapa beratnya represi yang diberlakukan oleh Kopkamtip dan Bakin. Umat Islam sudah lama merindukan adanya kebebasan dan pembaharuan.

Apalagi adanya tandingan DDII didirikan LDII di bawah pimpinan Hasan Lubis - Hasan Luar Biasa, dari Kediri yang ajarannya mengkafirkan umat Islam yang tidak bergabung dalam Darul Hadis, Islam Murni, Lemkari, nama terakhirnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia - LDII. Dengan bernaung pada Golkar, LDII dapat meneruskan keberadaannya hingga sekarang.

Di samping itu, dihidupkan pula Aliran Kebatinan sebagai balance of religion. Dengan nama baru Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, ditempatkan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aliran Kepercayaan menurut Presiden Soeharto, memang bukan agama. Sebaiknya para penganutnya, menjadi penganut salah satu agama yang diakui: Islam, Hindu, Buddha, Katolik dan Protestan.
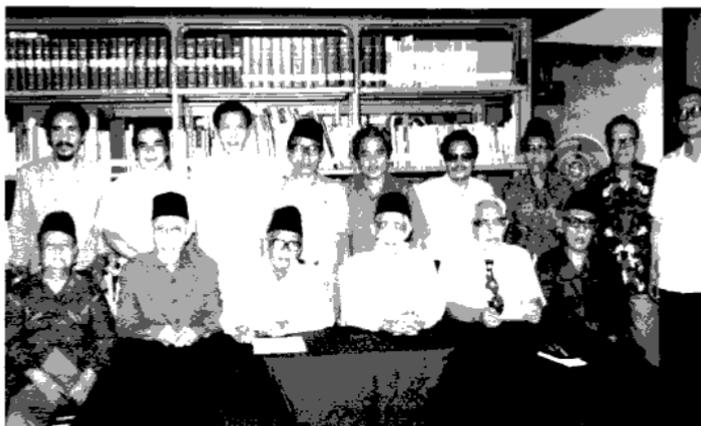
Sumber: Majalah Mujtama'

MOHAMMAD NATSIR
BERSAMA PIMPINAN DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA

Tidaklah heran, di bawah kondisi ketertekanan, setelah 32 tahun lamanya masa pembangunan Indonesia, memudahkan gerakan Perestroika - Reformasi Rusia, 1987 oleh Amerika Serikat ditularkan ke Indonesia 1997 M. Apa dan bagaimana Perestroika atau Reformasi di Rusia? Di bawah ini, penulis sedikit mengutip problem yang nantinya mengundang timbulnya gerakan Perestroika di Rusia.

Teori Konflik dan Dekomunisasi

Ternyata, tidak hanya terjadi di Indonesia, ideologi komunisme menemui kebangkrutan setelah melancarkan gerakan terorisme dalam aksi Kudeta 30 September. Namun juga, di Rusia sendiri, komunisme mengalami nasib yang sama. Baik di bidang politik atau dalam bidang sosio ekonominya. Teori Konflik diterapkan pula antar pimpinan komunis sendiri. Trotski ditumbangkan oleh Lenin. Dilanjutkan oleh Stalin yang ditumbangkan oleh Krushchev. Kemudian, terjadi konflik antarnegara komunis Rusia, Vietnam kontra RRC, Korut. Tidaklah heran bila pasca Mao Ze Dong, pengaruh Perestroika di Rusia menjadikan RRC terjadi proses dekomunisisasi walaupun baru di bidang ekonomi dan pertanian. Ada apa dengan ajaran komunisme?

Seperti yang diungkap oleh Vaclav Havel dari Cekosloakia, sistem komunis terkait erat dengan terorisme yang dijalankan secara sistemik dan dibarengi dengan kekejaman. Sistem ini dijalankan dengan tersembunyi. Tidak tampak dari luar

segenap kekejaman yang sedang berlangsung. Tidak mungkin turis mengetahuinya. Apalagi tamu negara. Setiap aktivitas warga, terjerat sistem birokrasi sangat ketat. Dampaknya, mematikan semangat kemanusiaan, hancurlah martabat asasi manusia. Hidup menjadi hina secara permanen.

> Di Uni Soviet dengan sistemik upaya mencabut akar ajaran agama. Tempat peribadahan Gereja dan Masjid direndahkan. Setiap orang diyakinkan untuk mencapai tujuan dan sukses, menurut Marxisme hanya dengan cara kekerasan, kekejaman, kecurangan, dan konflik.
>
> Teori konflik ini tidak dapat diterapkan dalam hubungan niaga dan politik luar negeri. Apakah mungkin di zaman keterbukaan, untuk dagang sukses harus dengan kekerasan? Demikian pula dalam hubungan diplomatik tidak mungkin keberhasilannya diperoleh dengan jalan konflik.
>
> Dampak tidak adanya pengganti ajaran kasih sayang dari ajaran agama, menjadikan manusia komunis sebagai manusia brutal. Demikian penuturan Daniel Granin dalam Literatur naia Gazeta, 1988 M.
>
> Ditambahkan, rakyat dipaksa harus memuji vonis yang kejam yang dilaksanakan di depan umum. Menolong tetangga, keluarga yang teraniaya, dilarang. Komunisme Soviet Rusia melahirkan tanah tandus spiritual dan kultural.

Di bawah kondisi ini, Gorbachev mengisyaratkan kegagalan sistem atheisme dan mengajak perlunya memberikan penghormatan kepada ajaran agama yang sejati. Diingatkan pula bahwa sistem politik hasil Revolusi Oktober 1917, telah mengalami deformasi yang serius.

Setiap suksesi kepemimpinan dalam ajaran komunisme, tidak dapat menghindarkan dari diberlakukannya sistem konflik. Terjadilah pertarungan kejam yang mendatangkan korban bagi pimpinan yang terkalahkan bersama pendukungnya. Konflik untuk memperoleh kekuasaan sebagai karakter politik yang mendatangkan maut dalam sistem komunis karena menjadikan ideologi sebagai hukum rimba.

Gorbachev menghadapi kenyataan ini, menginginkan adanya *perestroika* - reformasi komprehensif dari atas. Dilihatnya praktik kepemimpinan Partai Komunis setelah memegang kekuasaan bertindak korup dan menindas. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, selain perlu *perestroika* yang mencakup restrukturisasi, juga sangat diperlukan *glasnost*. Maksudnya tidak hanya dikembangkannya liberalisasi, melainkan juga *demokratisasi*.[6]

---

6 Zbigniew Brzezinski, 1990. *Kegagalan Besar, Muncul dan Rumntuhnya Komunisme Dalam Abad Kedua Puluh.* Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm. 52.

Realitas perubahan sejarah adanya reformasi ajaran komunis oleh Gorbachev, di pusat kelahiran negara komunis yang pertama di dunia, yakni Rusia, ternyata ajaran komunis hanya bertahan selama 70 tahun, Revolusi Oktober 1917-1987. Ajaran komunis tidak lagi menjadi satu-satunya ideologi yang mampu menyeberangkan kaum Proletar bebas dari penindasan. Marxisme dengan cita-citanya membuat classless society - masyarakat tanpa kelas, sama rata sama rasa, tidak sesuai dengan realitas kemasyarakatan yang selalu adanya stratifikasi sosialnya.

Perlu diperhatikan, Keputusan Komite Sentral Partai Komunis Cina tentang Reformasi Struktur Ekonomi, 20 Oktober 1984, intinya adalah deideologi sistem ekonomi Cina. Demikian pula di bidang pertanian terjadi deideologi pertanian. Dengan kata lain, sedang terjadi dekomunisisasi sistem pertaniannya. Ditiadakannya sistem pertanian kolektif menurut ajaran komunis.

Keputusan Comite Central Partai Komunis Cina tadi, mengingatkan adanya upaya penghapusan komunisme atau dekomunisisasi dilakukan oleh RRC, walaupun baru di bidang niaga dan pertanian. Adanya upaya deideologi sistem ekonomi Cina. Tidakkah hal ini berarti bahwa ideologi komunis tidak dikehendaki lagi di Rusia dan di Cina? Sepintas terlihat terlambat bila dibandingkan dengan Indonesia telah terjadi pada 1966 M. Sedangkan upaya dekomunisisasi di Rusia dan Cina, baru terjadi pada 1987-1988.

> Mengapa Perestroika atau Reformasi ditularkan ke Indonesia? Padahal, pemerintahan Orde Baru berhasil mematahkan dominasi PKI di Indonesia, 1966 M. Dan berhasil pula meruntuhkan komunis Fretelin di Timor Timur, 1976 M. Walaupun Indonesia tidak menjadi anggota Pakta Pertahanan Militer Barat, namun eksistensi organisasi komunis dapat dipatahkan dengan memanfaatkan potensi mayoritas umat Islam dan membesarkan gerakan dakwah Islam.

Untuk menumbangkan pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto yang mulai dekat dengan masyarakat Islam dan remaja Islam - miris, tidaklah mungkin bila diserang dari luar. Teori W.F. Wertheim berulang kembali, realitas Islam Indonesia hanya dapat dipatahkan dengan menggunakan kekuatan Islam lagi. Pemerintahan Orde Baru dapat dilengserkan hanya dengan menggunakan Student Power yang mayoritasnya mahasiswa Islam. Sebelumnya dibentuk pola wawasannya melalui berbagai media informasi.

Dilengkapi dengan ditampilkan Prof. Dr. Amien Rais di TV bukan sebagai Dosen UGM, melainkan lebih banyak ditampakkan sebagai Ketua Pusat Persyarikatan Muhammadiyah maka bangkitlah demo mahasiswa yang sangat berani, menduduki MPR. Kemudian, lengserlah Presiden Soeharto, 21 Mei 1998, Kamis Legi, 24 Muharam 1419. Hal ini sebagai

bukti sejarah bahwa perubahan tatanan politik di Indonesia, tidak mungkin terjadi bila tanpa peran serta Ulama atau pimpinan organisasi Islam.

Selain itu, Anthony Smith dalam *Geopolitics of Information*, menjelaskan pula bahwa Barat dengan melalui informasi teknologinya, internet, tv, dan media lainnya, diciptakanlah *news imperialism* - berita penjajah. Beritanya selalu melancarkan *scapegoating* - pengkambing hitaman bangsa dan negara-negara Asia Afrika dengan berita negatif: korupsi, bencana, penyakit dan evaluasi negatif yang menjelekkan pemimpin-pemimpinnya. Dengan pemberitaan ini, akan menumbuhkan rasa ketidak percayaan kalangan intelektual dan rakyat terhadap pemimpinnya.

Indonesia diberitakan oleh media Barat, sebagai negara yang terpuruk ekonominya, pemimpinnya korup dan sedang berkembang berbagai penyakit menular serta sarang teroris. Untuk yang terakhir ini, Barat sangat yakin karena sejak Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA akan menyerang Bandung, menjelang Bandung Lautan Api, menilai bahwa TNI dan Lasjkar Hizboellah, Sabilillah pejuang kemerdekaan dicap sebagai teroris.

Apalagi setelah Indonesia memperlihatkan kemajuan Islam, dari jumlah Haji dan Umrah yang terbesar di seluruh dunia, hal ini merupakan ancaman baru bagi Barat setelah komunis tumbang. Tambahan lagi dengan adanya berita ekonomi dikuasai oleh konglomerat Cina. Dua realitas fakta sejarah ini: *Pertama,* membesarnya masyarakat Islam. *Kedua,* kuatnya konglomerat Cina menguasai ekonomi Indonesia maka keduanya mendekati pembenaran teori benturan peradaban, sesudah komunis rontok, musuh Barat adalah Islam dan Kong Fu Tsu atau Cina.[7]

> Pada awalnya, Barat hanya melihat adanya perkembangan tiga kekuatan di Asia Tenggara: Indianisasi, Kristenisasi, dan Sinonisasi. Sedangkan Islam tidak diperhitungkan akan memengaruhi perubahan sosial politik di Asia Tenggara. Namun, realitasnya setelah komunis tumbang, di Malaysia dan Indonesia, semakin menampakkan meluasnya pengaruh Islam. Demikian pula, Cina makin meluas penguasaan pasar dan ekonominya. Walaupun sebelumnya, PP 10/1959 Non-Pribumi terutama WNA Cina dilarang berusaha dan tinggal di desa-desa, hanya diizinkan di ibukota provinsi atau DKI Jakarta.

---

7 Siswono Yudo Husodo, 1985. *Warga Baru, Kasus Cina Di Indonesia.* Lembaga Penerbitan Padamu Negeri. Jakarta, hlm. 57 menjelaskan Kong Fu Tsu atau Khong Fu Cu, a.l. mengajarkan tentang asas *Famili-isme* seluruh dunia. Berbakti kepada keluarga merupakan cermin kesetiaan kepada negara Cina. Sedang Cina diyakini sebagai Negara Pusat, pusat peradaban. Di luar negara Cina, diyakini lebih rendah peradabannya. Kecuali menganut Kong Fu Tsu. Di Cina, terdapat tiga ajaran: Tao mengajarkan manusia sebagai individu hubungannya dengan alam raya. Kong Fu Tsu mengajarkan tentang status individu, masyarakat, dan negara. Buddha mengajarkan manusia dengan masa depan Nirwana atau *Kik Lok Kok.*

Dengan adanya pengaruh Islam dan Cina yang semakin meluas, setelah komunis runtuh, dan adanya rencana Presiden Eisenhower, 1953-1961 M, yang akan memecah belah NKRI sebagai negara federasi, apakah rencana tersebut masih tetap akan dilanjutkan? Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu penulis ingin sedikit membicarakan pengaruh news imperialism terhadap pecahnya pergolakan di negara negara Asia Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.

> Dampak dari news imperialism yang dilancarkan melalui TV dan media cetak, serta mengalirnya ideologi politik Barat, menurut Anthony Smith dalam Geopolitic of Information, dan Ted Robert Gurr dalam Why Men Rebel, pecahlah perang saudara, protes sosial, pemberontakan, demonstrasi rakyat selalu menggoncang beberapa pemerintahan negara-negara Timur Tengah dan Asia Afrika.
>
> Kemudian, di tengah kekeruhan suasana politik, Timur Tengah dijadikan ladang yang subur pasar penjualan senjata hasil Industri Militer Amerika Serikat. Sekaligus Amerika Serikat melancarkan intervensi militernya. Dengan cara itu, Amerika Serikat menggeser pengaruh mantan negara-negara penjajah dari Eropa: Inggris, Perancis, Italia, atas wilayah bekas jajahannya yang digoncangnya.
>
> Timur Tengah selain dijadikan tempat melaksanakan ujicoba temuan baru senjatanya, juga dijadikan arena latihan tentara-tentara negara negara Barat. Pemindahan arena latihan ini, akibat negara-negara Barat aman. Tentaranya yang sudah terlatih, tidak mempunyai lawan dan lahan di dalam negerinya. Untuk mengaplikasikan hasil latihannya, diciptakanlah perang saudara di wilayah Bulan Bintang.
>
> Diharapkan perang akan berdampak lanjut terjadinya devide and rule. Dengan target, berkembangannya gerakan anti Arab dan timbulnya keinginan memisahkan diri Iran, Irak, Afghanistan, dan Pakistan serta wilayah Islam di Afrika Utara dari Saudi Arabia sebagai pusat Islam. Tentunya, Islam Asia Tenggara dan Indonesia diharapkan ingin pula pisah dari Saudi Arabia.

Di Indonesia, pada masa Orde Baru sistem kebijakan komunikasi, hanya satu arah dan dikuasai oleh pemerintah. Akibatnya, tidak dapat melawan pemberitaan negatif tentang Indonesia dari news imperialism. Dampaknya, pemerintah Orde Baru tidak mampu bertahan menghadapi perubahan sikap politik kalangan intelektual dan rakyat yang dibentuk oleh arus berita penjajah - news imperialism dari Barat.

Apalagi setelah adanya penolakan pembelian pesawat F-16 Amerika Serikat, akibat pemerintah Orde Baru lebih cenderung merencanakan pembelian pesawat buatan Rusia. Walaupun saat itu, B.J. Habibie sebagai pakar pesawat terbang, melalui TVRI menjelaskan tentang kelemahan dan kekurangan pesawat Rusia, Sukhoi. Namun,

penjelasannya tidak dapat membatalkan pembelian pesawat produk Rusia. Dampak pembatalan pembelian pesawat F-16 mempercepat proses keruntuhan pemerintahan Orde Baru melalui gerakan Reformasi. Mengapa melalui Reformasi?

Keberhasilan gerakan Reformasi - *Perestroika* dan Demokrasi - *Demokratizatsiia* serta Liberalisasi - *Glasnout,* oleh Gorbachev di Rusia, ditularkan ke Indonesia. Padahal, kepada Presiden James Carter, 1977-1981 M, melihat Indonesia berhasil melumpuhkan komunis Fretelin di Timor Timur, 1976 M. Apakah terjadi kekeliruan pembangunan agama di Timor Timur, menjadikan Katolik semakin kuat. Ditandai dengan pembangunan Patung Jesus di Dili yang besarnya sama dengan di Brazilia. Apakah karena Australia dan Amerika Serikat mayoritas rakyatnya Protestan dan dikenal sikapnya *No Catholic.*[8] Sulit ditemukan faktanya, Indonesia hanya dituduh dengan masalah HAM. Walaupun korbannya hanya sepersekian dari bom atom AS di Hirosima, 140.000 orang, dan Nagasaki, 80.000 orang pada 6 dan 9 Agustus 1945.

Gerakan Reformasi berhasil menjadikan Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, Kamis Legi, 24 Muharram 1419. Hanya bedanya dengan Rusia, Reformasi di Indonesia tidak berhasil mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Federasi seperti di Rusia. Walaupun saat itu, suara dari Yogyakarta terdengar keras menginginkan Federasi seperti yang pernah terjadi pada 1950 M, menjelang terbentuknya NKRI. Sejarah berulang kembali.

Para Ulama dan Santri serta politisi Islam, tetap memperta hankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pembukaan dan UUD 1945. Hanya membenarkan realisasi pemekaran provinsi dan kabupaten serta otonomi daerah. Amandemen UUD 1945, yang dilakukan oleh MPR, tidak sampai menyentuh Pembukaan UUD 1945. Apabila terjadi amandemen masalah Pembukaan UUD 1945, besar kemungkinan akan terjadi kegoncangan politik yang lebih parah.

Reformasi itu berkelanjutan dengan aman dan damai karena ada dukungan dari 3 ulama, yaitu Abdullah Abbas dari Pesantren Buntet Cirebon, Abdullah Salam dari Pesantren Kajen Jepara, dan Abdullah Faqih dari Pesantren Langitan, Tuban.

Situasi Reformasi dimanfaatkan oleh kelompok separatis di wilayah pinggir-*rimland* Nusantara Indonesia: Gerakan Aceh Merdeka - GAM, Republik Maluku Selatan - RMS, Poso, Organisasi Papua Merdeka - OPM, muncul kembali. Menghadapi kenyataan ini, Ulama dan Santri serta para politisi Islam, tidak pernah ada yang menjadi pendukungnya.

8 OS Guinness, 1995. *The American Hour*. The Free Press. New York, hlm. 111 menuturkan Amerika Serikat sebagai negara *superliberal, superseculer*, dikomandokan oleh Jimmy Carter, 1977-1981, untuk masa pemerintahannya sebagai *The Year of Evangelical* - Tahun Kristenisasi.

Presiden Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie

Di bawah Presiden Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie, 21 Mei 1998, Kamis Legi, 24 Muharram 1419, hingga 20 Oktober 1999, Rabu Pon, 10 Rajab 1420, Indonesia harus melepaskan Timor Timur. Pada sisi lain, Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie, dalam waktu relatif singkat masa pemerintahannya, menunjukkan prestasi kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis moneter dan melengkapi lahirnya Bank Mu'amalah pada masa Presiden Soeharto, dengan ditambahkan Bank Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie, tidak dapat diragukan pula kedekatannya dengan Ulama dan Santri, apalagi sebagai pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia - ICMI yang pertama di Malang.

Keberhasilannya menciptakan pesawat CN 35 yang mampu melakukan short take off and landing, hanya 400 meter, merupakan prestasi tanpa tanding, di kelasnya di dunia. Diikuti dengan penciptaan Air Bus 600 yang tercepat di dunia. Selain itu juga, telah merancang pesawat terbang yang tercepat di dunia, diumumkan oleh B.J. Habibie sejak awal pembentukan ICMI di Malang, suatu pesawat sipil dengan kecepatan jarak Jakarta - NewYork hanya empat jam. Tentu, prestasi ini sangat mencemaskan eksistensi negara industri pesawat terbang, terutama dari negara adikuasa Barat. Sampai kini, pesawat produk dari Barat sekalipun, jarak Jakarta - Jeddah ditempuh selama delapan jam.

Tambahan lagi, di bidang persenjataan, PINDAD yang dipimpin oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, mampu menciptakan senjata yang mempunyai jarak tembak 1.000 meter dan sangat akurat. Senjata produk Barat, hanya mampu 750 meter jarak tembaknya. Senjata produk PINDAD melampaui produk pabrik senjata dari Barat.

Pribadi Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie dengan kemampuan teknologinya yang tinggi prestasinya, belum pernah dimiliki oleh seorang pun dari Presiden Amerika Serikat walaupun telah merdeka sejak 1775 hingga 2008 M dan terjadi pergantian 86 Presiden. Demikian pula negara Barat lainnya, tidak mempunyai seorang pun Kepala Negara yang memiliki kemampuan menciptakan teknologi pesawat terbang baru. Andaikata rancangan pesawatnya dapat terwujud maka Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kekuatan dirgantara yang luar biasa.

Barangkali kenyataan Indonesia ini, ditambah dengan karakter pribadi Prof. Dr. B.J. Habibie yang selalu dekat dengan Ulama, menjadikan masa pemerintahan Prof. Dr. B.J. Habibie sangat pendek karena Barat setelah berhasil menumbangkan Uni Soviet Rusia, sedang beralih menggoncangkan negara Islam dan negara yang memiliki mayoritas umat Islamnya serta Kepala Negara dan Perdana Menteri Islam: Chechnyna, Bosnia, Pakistan, dan negara-negara lain yang umat Islamnya sebagai mayoritas populasinya.

PROF. DR. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Presiden Ke-3 Negara Kesatuan Republik Indonesia

21 Mei 1998, Kamis Legi, 24 Muharram 1419
20 Oktober 1999, Rabu Pon, 10 Rajab 1420

Walaupun masa jabatan kepresidenannya sangat pendek bila dibanding dengan Presiden Dr. Ir. H. Soekarno, 25 Tahun, Jenderal TNI H. A. Soeharto, 32 Tahun. Namun, Prof. Dr. B.J. Habibie, adalah satu-satu presiden di dunia yang memiliki kemampuan menciptakan pesawat terbang.

Amerika Serikat sebagai negara adikuasa, dan penguasa ruang angkasa jagat raya. Namun, tidak ada seorang pun, Presiden Amerika Serikat yang memiliki kemampuan sebagai perancang dan pencipta pesawat terbang.

Sumber: *www.calenger.blogs*

K.H. Abdurrahman Wahid

Apalagi di bawah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, 23 Oktober 1999, Sabtu Legi, 13 Rajab 1420, hingga 22 Juli 2001, Ahad Wage, 1 Jumadil Awaal 1422, terjadi goncangan situasi nasional di berbagai bidang, tak dapat dielakkan. Dampaknya, masa pemerintahan Presiden K.H. Abdurahman Wahid sangat pendek.

Perlu dicatat di sini, sebenarnya, kesediaan K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden karena desakan Prof. Dr. Amin Rais, Ketua MPR dan Partai Amanat Nasional yang menyatakan, perlu adanya pergantian Presiden jangan hanya dari Persyarikatan Muhammadiyah saja. Sekarang waktunya, Presiden dari Nahdlatul Ulama.

Pada saat menjelang pemilihan oleh MPR, calon Presiden Prof. Dr. Yusril Mahendra dari Partai Bulan Bintang mengundurkan diri. Dengan tujuan agar suara Islam hanya untuk K.H. Abdurrahman Wahid. Latar belakang proses pengangkatan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4 itu menjadikan alumnus Pesantren untuk pertama kalinya, terpilih oleh MPR sebagai Presiden RI.

Dalam memanfaatkan masa kepresidenannya, K.H. Abdurrahman Wahid, banyak melakukan kunjungan di berbagai negara. Presiden Abdurrahman Wahid membangun hubungan diplomatik dan menumbuhkan kesan Indonesia tetap eksis pasca Reformasi. Berita-berita dari Barat merupakan *news imperialism* - penjajahan berita, bernuansa menegatifkan Indonesia. Digambarkan sebagai negara dan bangsa dengan mayoritas komunitas Islamnya sedang terpuruk. Untuk melawannya, Presiden K.H.Abdurrahman Wahid dengan rombongan muhibahnya memperlihatkan Indonesia tidak sebagaimana yang diberitakan oleh sumber berita Barat yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, di bawah Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dalam upayanya menarik kembali wiraniagawan Cina yang eksodus dari Indonesia, dengan cara menghidupkan kembali Kong Fu Tsu. Dengan cara ini, diharapkan proses Pembauran Bangsa atau hubungan etnis Cina - Non-Pribumi dengan etnis Indonesia - Pribumi lainnya, akan semakin akrab.

Secara tidak langsung dengan cara itu, Islam Indonesia mempunyai teman Kong Fu Tsu, dalam menghadapi ancaman teori benturan peradaban dari Samuel P. Huntington dalam *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order* yang memprediksikan sesudah Komunisme runtuh, kebangkitan Islam dan agama-agama lainnya dari Timur termasuk Kong Fu Tsu sebagai lawan peradaban Barat.

Tidaklah benar bila ada anggapan K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan digelari Bapak Pluralisme. Gus Dur dalam keimanan Islamnya tidak membenarkan ajaran agama-agama non-Islam serta aliran kepercayaan atau kebatinan. Gus Dur menampakkan

Dr. K.H. ABDURRAHMAN WAHID

Presiden Ke-4 Negara Kesatuan Republik Indonesia

23 Oktober 1999, Sabtu Legi, 13 Rajab 1420
22 Juli 2001, Ahad Wage, 1 Jumadil Awwal 1422

Pada awal pertama berdirinya Nahdlatoel Oelama, 1926 M, di Surabaya, Ketua Umum Tanfidijah disebut Presiden

Dr. K.H. Abdurrahman Wahid
Pelopor pertama Presiden NKRI dari Nahdliyin dan Partai Kebangkitan Bangsa - PKB,
Menghidupkan kembali istilah Tionghoa pengganti Cina yang universal dan menghidupkan kembali ajaran Kong Fu Tsu dalam menghadapi teori benturan budaya dari Amerika Serikat, bahwa sesudah komunis lemah, musuh Barat adalah Islam dan Kong Fu Tsu.

Walaupun sangat pendek waktu kepresidenannya, namun dimanfaatkan untuk menunjukkan ke dunia luar bahwa sesudah reformasi, NKRI masih tetap eksis, dengan mengadakan muhibah lawatan ke negara-negara Asean, Eropa, dan Amerika Serikat.

Sumber: www.aghofur.com

sikap toleransi yang sangat tinggi. Sepengetahuan penulis, saat ceramahnya di Yayasan Al-Ma'soem, Gus Dur menunjukkan sikap Islamnya yang sangat kuat dan istiqamah sebagaimana yang diajarkan oleh orangtuanya, K.H. Wahid Hasjim dan kakeknya Khudrotus Syeikh Rois Akbar, Hasjim Asj'ari.

Gus Dur kepada penulis secara pribadi menjelaskan amalan wirid dan doanya yang diajarkan oleh Mbah Hasjim Asj'ari. Gus Dur juga mengingatkan kepada penulis, adanya sebagian wartawan yang suka memelintir atau mendistorsikan apa yang diucapkan atau apa yang dipikirkannya.

Gus Dur tidak sedikitpun memberikan gambaran dirinya sebagai penganut Pluralisme dengan pengertian pembenaran seluruh agama atau aliran kepercayaan lainnya dinilai sama derajat keimanannya. Gus Dur memberikan rasa hormatnya pada setiap ajaran agama atau kepercayaan yang diimani oleh penganutnya. Terlihat ketika Gus Dur menuturkan kepada penulis dalam waktu yang cukup lama, ketika di pembaringan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Bicara tentang pesan-pesan nenek moyangnya dari Soeltan Adiwidjaja agar Gus Dur dalam memanfaatkan waktunya untuk lebih memerhatikan pembinaan pesantren daripada aktivitas politiknya.

Baru Kali Ini, Presiden Ulama

BAGI KH Dudung Abdul Halim, MA, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya, terpilihnya KH Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal Gus Dur sebagai Presiden RI keempat, merupakan anugerah dan pertolongan Allah SWT pada saat bangsa tengah dilanda krisis yang berkepanjangan.

"Kondisi fisiknya memang kurang memadai, namun bukan menjadi hambatan bagi Gus Dur untuk mengatasi gejolak yang sekarang masih melanda bangsa," kata Kiai Dudung yang juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Cipasung.

Menurut dia, keluasan serta ketajaman wawasan dan pemikiran-pemikirannya justru bisa menjadi pembuka jalan demi membaiknya kondisi compang-camping negeri ini. "Baru kali ini, seorang presiden dijabat seorang ulama. Kita harapkan sosok keulamaan Gus Dur bisa menjadi jalan bagi kemaslahatan bangsa di masa mendatang," ucapnya.

Seorang ulama, kata Dudung, tentu akan bertindak sesuai ketentuan yang telah digariskan. "Saya sungguh mengucapkan syukur dengan terpilihnya beliau. Kita ingat kejayaan Islam selama pemerintahan *Khulafaurrasyidin* juga karena yang memerintah lebih menonjolkan sisi keulamaan dibandingkan keumaraannya," tegas Kiai Dudung.

Menyinggung persoalan kesehatan Gus Dur yang banyak disebut bakal menjadi kendala signifikan bagi presiden yang juga masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, ia yakin proses kesembuhannya akan segera datang. "Saya yakin kesehatan mata Gus Dur akan sembuh setelah menjalani operasi pertama di Amerika," jelasnya.

Bagi para kiai, tindakan kontroversial Gus Dur memang bisa diterima, namun bagi sementara pihak seringkali seperti membingungkan. "Jadi jika Gus Dur terkesan *plin-plan* atau *mencla-mencle* seyogianya dilihat sebagai upaya dan strateginya untuk menjadi perekat semua komponen bangsa," jelasnya.

Terbukti, ia bisa diterima semua kelompok yang ada dalam bangsa ini. "Kita memang harus menyadari kondisi plural serta serba kemajemukan yang ada di negara kita. Mulai sekarang, kita harus menata kembali persatuan dan kesatuan yang dulu seringkali hanya sebatas ucapan di mulut. **(Erwin K./"PR")*****

Sumber: *Time Magazine*

Sumber: *Pikiran Rakyat*

Antara Imam Khomeini dan Gus Dur

Perhatikanlah bagaimana kaum Syi'ah di Iran memperlakukan jenazah pemimpinnya dengan kaum Muslim Indonesia, khususnya warga Nahdliyin saat memperlakukan jenazah pemimpinnya.

Demikian pula penuturan Gus Dur kepada penulis ketika sama-sama dalam satu mobil, 19 Safar 1423, Kamis Pon, 2 Mei 2002, saat menjelang ziarah makam Pangeran Papak di Wanaraja Garut. Antara lain bicara tentang wirid yang diterima dari Khudrotus Syeikh Rois Akbar, K.H. Hasjim Asj'ari dan sudah diamalkan selama 40 tahun. Terutama sekali, Gus Dur menegaskan sikap toleransinya terhadap segenap agama non-Islam atau aliran kepercayaan.

Sikap Gus Dur menghormati keyakinan yang berbeda tidaklah berarti Gus Dur adalah penganut Pluralisme yang membenarkan dan mensejajarkan ajaran agama sama dengan aliran sekularisme. Sebagai Guru Bangsa, Gus Dur berpartisipasi aktif melindungi pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 butir dua. Sayangnya, gelar Bapak Pluralisme dikumandangkan pada saat Gus Dur dan Presiden Ke-4 RI pulang ke Rahmatullah.

Pada saat sebagai Presiden ke-4 RI, di bidang pendidikan melahirkan keputusan persamaan status dan penghargaannya terhadap segenap upaya pendidikan dan abiturien atau alumninya yang diselenggarakan oleh departemen manapun: Departemen Agama, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, Departemen Kelautan, kecuali pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan. Misalnya, alumnus IAIN dapat diterima di departemen mana pun yang memerlukannya. Siswa Madrasah Aliyah Negeri atau Swasta dizinkan mengikuti ujian ke fakultas atau departemen mana pun yang diplihnya sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

IAIN diubah menjadi UIN dengan membuka fakultas dan jurusan yang sama dengan fakultas dan jurusan yang dikelola oleh Perguruan Tinggi dari Diknas. Dengan demikian, alumni pendidikan yang diselenggarakan Departemen Agama, dapat bekerja ke departemen manapun, dan dapat meneruskan studi ke jenjang berikutnya dari Lembaga Pendidikan manapun. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan - IKIP berubah menjadi Universitas Negeri dibedakan dengan nama kotanya. Kecuali Bandung IKIP berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia - UPI.

Selain itu, Kepolisian tidak lagi menjadi satu kesatuan dengan ABRI. Kepolisian bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri Indonesia. Kementerian Penerangan dan Kementerian Sosial diitiadakan. Sedangkan Departemen Agama yang pernah diusulkan oleh Rasuna Said dari kelompok komunis Tan Malaka, agar dibubarkan, tetap dipertahankan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Barangkali karena eksistensi Departemen Agama secara historis dirintis awalnya oleh ayahnya, Wachid Hasjim.

Presiden Megawati Soekarnopoetri

Pembaharuan yang dilaksanakan secara drastis, menimbulkan kesulitan yang besar. Berakhirlah masa kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Akhirnya, Sidang DPR-MPR memutuskan, mengangkat Wakil Presiden Megawati menjadi Presiden, 23 Juli 1901 Rabu Kliwon, 19 Safar 1365 hingga 20 Oktober 2004, Rabu Kliwon, 6 Ramadhan 1425.

> Presiden Megawati Soekarnopoetri, menerima tamu utusan Presiden Amerika Serikat, Menteri Negara Urusan Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Tom Ridge, 10 Maret 2004, menyampaikan pesan kepada Presiden Megawati Soekarnopoetri,[9] agar Abu Bakar Ba'asyir ditangkap dan dipenjarakan dengan diadili ulang.

Pesantren Ngruki Surakarta sebenarnya kampusnya relatif kecil, tidak sehebat kantor CIA, dan organisasi tata kerjanya pun tidak secanggih CIA Amerika Serikat. Sementara K.H. Abu Bakar Ba'asyir sudah berusia lanjut, tetapi sangat diperhitungkan dan ditakuti keberadaannya oleh Amerika Serikat sebagai negara *superpower*.

Padahal K.H. Abu Bakar Ba'asyir meninggalkan Indonesia ke Malaysia karena tidak menyetujui asas tunggal Pancasila. Dibaca oleh K.H. Abu Bakar Ba'asyir, pembicaraan dan pelaksanaan Pancasila sebagai pelajaran PMP di sekolah, seminar, lokakarya, penataran, bertujuan mendiskreditkan Islam secara terselubung.

> Menurut Z.A. Maulani, 2004, dalam Jama'ah Islamiyyah *dan China Policy*, menjelaskan bahwa Jama'ah Islamiyyah sebenarnya semula direstui oleh CIA. Namun, mengapa sejak 11 September, Jamaa'ah Islamiyyah oleh Presiden Bush, dinilai sebagai organisasi berbahaya? Kemudian, dikomandokan perang membasmi terorisme dengan tujuan agar Amerika Serikat benar-benar menjadi *super power* tunggal.
>
> Oleh karena itu, digoncangnya Timur Tengah agar terkuasai karena Timur Tengah disebutnya sebagai *the largest fuel station in the world* - stasiun bahan bakar terbesar di dunia.
>
> Di Asia Tenggara, Amerika Serikat ingin menanamkan kekuasaannya. Bertujuan menghentikan perkembangan Islam dan Kong Fu Tsu atau RRC.

---

9 Z.A. Maulani, 2004. *Jama'ah Islamiyyah dan China Policy*. Daseta. Jakarta, hlm.52.

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Lahir Yogyakarta, 23 Januari 1947

Perjalanan karier:
Ketua Umum PDI versi
Munas Kemang (1993-sekarang) PDI yang dipimpinnya berganti nama menjadi PDI Perjuangan
pada 1999-sekarang
Wakil Presiden Republik Indonesia ke-8, (Oktober 1999-23 Juli 2001)
Presiden Republik Indonesia ke-5, (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)

Sumber: profesorindonesia.blogspot.com; id.wikipedia.org

Sebaiknya Amerika Serikat belajar dari pengalaman sejarahnya, Keradjaan Protestan Anglikan Inggris dan Keradjaan Protestan Belanda, mengapa keduanya mengakhiri penjajahan di Asia Tenggara. Demikian pula mengapa Testamen Politik Lenin yang akan mengkomuniskan Asia Tenggara, semuanya menemui kegagalan karena berhadapan dengan Islam. Pengalaman Amerika Serikat sendiri di Filipina tidak berhasil menguasai Filipina Selatan yang dikuasai Islam. Hal ini mengingatkan Pondok Pesantren di Asia Tenggara bila ditinjau fisiknya sangat sederhana. Namun, memiliki daya tahan yang luar biasa dari para Santrinya.

Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia, bagaimana pun sederhananya sistem pengorganisasiannya, ketika umat Islam mulai sadar tertindas, akan lahir para Ulama dan Santri pejuang penegak kebenaran Islam. Anehnya, sekalipun Kampus Pesantren hanya seluas dan sesederhana Gua Hira Rasulullah saw saat menerima wahyu pertama, namun tidak pernah terdengar di Negara Kesatuan Republik Indonesia adanya Pengangguran Alumni Pesantren.

Lebih sulit dipahami lagi, bila Wali atau Kiai sekalipun sudah wafat, di sekitar makam, tumbuh kehidupan ekonomi umat. Dengan kata lain, walaupun Wali dan Kiai sudah wafat, pengaruh ajaran Islamnya masih bisa menciptakan lapangan kerja bagi yang masih hidup. Tetap menghidupkan serta mendinamiskan kehidupan kota yang dibangunnya. Tidak hanya sebatas lingkar lingkungan wilayah yang dekat, namun juga yang jauh. Dengan dana pribadi, umat Islam terpanggil untuk memberikan penghormatan jasa Ulama sekalipun sudah tiada secara fisik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Demikian pula kehidupan lingkungan pesantren, melahirkan putra-putra terhormat bagi nusa dan bangsa. Lingkungan keluarga Pondok Pesantren Termas Pacitan Karesidenan Madiun, melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil Presiden Jusuf Kalla terlahir dari lingkungan kehidupan Pesantren di Makasar sebagai daerah pengaruh Waliullah Syech Yusuf.

Dengan adanya pergantian sistem pemilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan Megawati - Hasyim Muzadi, PDIP - NU gugur karena hanya memperoleh 42.833.652 suara atau 39.09%. Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, Partai Demokrat dan Partai Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944 suara atau 60.91%.

Jend. TNI (Purn.) Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Lahir Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949

Perjalanan Karier:
Menteri Pertambangan dan Energi (sejak 26 Oktober 1999)
Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan (sejak 26 Oktober 1999)
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
(sejak 10 Agustus 2001 dan mengundurkan diri 11 Maret 2004)
Presiden Republik Indonesia (2004-2009)
Presiden Republik Indonesia (2009-2014)

Sumber: arsipardava.blogspot.com; id.wikipedia.org

PROF. DR. RYAAS RASYID

Lahir 19 Desember 1949 di Gowa, Sulawesi Selatan

Alumnus dari:
University Hawaii, Amerika Serikat (1994)
Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia
(26 Oktober 1999–23 Agustus 2000)
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
(23 Agustus 2000–7 Februari 2001)
Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
(25 Januari 2010)

Ketua Umum
Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Besar Alumni PPI (Pelajar Islam Indonesia)
(2005–2008)

Sumber: www.merdeka.com

Susilo Bambang Yudhoyono - SBY diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Mohammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2004, Rabu Kliwon, 6 Ramadhan 1425, untuk periode kepresidenan 2004 - 2009 M. Untuk kedua kalinya, Presiden dari TNI AD. Susilo Bambang Yudhoyono terlahir 9 September 1949, Jumat Kliwon, 16 Dzulqaidah 1368 di Pacitan Keresidenan Madiun, Jawa Timur.

Pacitan memiliki pondok pesantren yang terkenal, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Pondok Pesantren Termas. Juga sebagai daerah gerilya Panglima Besar Soedirman. Dengan latar belakang wilayah kelahirannya dan kedekatannya dengan Ulama, memungkinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menyempatkan untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, sebagai kelanjutan dari pondok pesantren yang dirintis oleh Kandjeng Kiai Hasan Besari. Dan dikenal pula sebagai moyangnya, H.O.S. Tjokroaminoto.

Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden, terlahir di Watampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942, Jumat Legi, 28 Rabiul Akhir 1361. Berlatar belakang aktif dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia - PII, dan Himpunan Mahasiswa Islam - HMI. Menjadi anggota MPR dari Golkar sejak 1988 M. Sebagai wirausahawan yang berhasil ditekuninya selama 42 tahun. Panggilan bakti kepada nusa dan bangsa, menjadikan pimpinan perusahaannya diserahkan kepada putranya: Kalla Lines, Nusantara Air Charter, Kalla Sarana Utama, Bumi Sarana Beton.

Di samping jabatan eksekutif dipegang oleh kedua pimpinan di atas, sejak Reformasi, MPR dipimpin oleh Prof. Dr. H. M. Amin Rais, Persyarikatan Muhamadiyah dan Partai Amanat Nasional - PAN. Kemudian digantikan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera - PKS.

Reformasi menghantarkan pimpinan umat Islam berhasil menduduki posisi strategis seperti di atas melalui partai politik yang dipilih oleh rakyat. Namun, dengan menjamurnya pertumbuhan partai politik, umat Islam dihadapkan kekembaran partai politiknya. Suara umat akan terbagi menjadi sekecil-kecilnya, dan memungkinkan akan menghadapi kekalahan yang menyedihkan.

Benarkah ucapan Prof. Dr. Snouck Hurgronje, biarkan umat Islam jika akan mengadakan ekspansi keorganisasiannya, akhirnya akan menemui kelemahan. Namun, awasilah jika umat Islam telah melakukan intensifikasi pengelolaan keorganisasiannya, dapat dipastikan akan menemukan kemenangan. Di bawah ini, penulis angkat sebagai contoh, sebagian dari partai politik yang dipimpin oleh pe muka Islam. Baik yang berasas Islam ataupun berasas Pancasila.

Ir. H. JOKO WIDODO
Lahir Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 21 Juni 1961
Walikota Surakarta (2005-2012)
Gubernur Jakarta (2012-2014)
Presiden Republik Indonesia (2014-Sekarang)
Pengusaha mebel dan pertamanan
Sumber: profilpedia

Joko Widodo Presiden ke-7 RI

JOKO WIDODO atau dikenal dengan JOKOWI, dapat memenangkan kampanye Kepresidenannya, karena menampilkan dirinya yang sangat merakyat. Di samping itu, sebelumnya telah menduduki lembaga pemerintahan sebagai Walikota di Surakarta dua periode (1905-2015). Kemudian mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dari etnis Cina. Pencalonan ini berhasil karena penduduk Jakarta yang mempunyai latar belakang dari Surakarta cukup besar. Dan lagi Ahok memungkinkan pula dari etnis Cina, pemilik pabrik yang memiliki buruh yang sangat besar, memungkinkan terpilihnya jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kemenangan diperoleh di saat kedudukannya sebagai Walikota Surakarta belum berakhir. Oleh karena itu, kelanjutan jabatannya sebagai Walikota diserahkan kepada Wakilnya FX Hadi Rudiyatno.

Keberhasilan Joko Widodo sebagai Walikota yang dipilih dua kali masa jabatannya, ditambah dengan kemenangan dalam pemilihan Gubernur DKI, menjadikan PDIP mencalonkan Jokowi sebagai Presiden dengan pasangan Jusuf Kala. Dengan modal penampilan sederhana, rakyat pemilih dari kalangan *grass root*, mudah tertarik dengan gaya merakyatnya. Selain itu dengan menampilkan sikap religionitasnya, dengan Umroh memungkinkan mendapat simpati dari umat Islam.

Dukungan dari Partai Hanura, dari kalangan keluarga militer, pendukung Wiranto, menaruh simpati kepada Jokowi. Partai Nasdem, yang memiliki pengaruh besar dari masyarakat Luar Jawa, dan PKB partainya kaum Nahdiyin, menambah jumlah pendukung dalam pelaksanaan Pemilu Presiden.

Karier Jokowi dengan loncatan jenjang ke atasnya, dalam relatif pendek, sangat mengagumkan. Latar belakang sekolah SD,SMP,SMA di Surakarta. Kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tidak pernah studi masalah kepemerintahan dan politik, secara studi formal. Okupasinya hanya sebagai penjual meubel termasuk menjual kursi. Dari menjual kursi Jokowi berhasil menduduki kursi Walikota,Gubernur dan puncaknya kursi Kepresidenan.

Dari awal pemerintahan, 23 Oktober 1914, didesak oleh masyarkat agar dapat sesegera mungkin merealisasikan janji kampanyenya. Seperti orang baru menancapkan tanamannya, sudah dituntut untuk dapat dipetik buahnya. Dengan Kabinet Kerjanya, guna merealisasikan Janji Kampanye, Presiden Jokowi mengadakan lawatan ke Saudi Arabia. Kehadirannya disambut langsung oleh Raja Salman bin Abdul Azis. Di Uni Emirat Arab diterima oleh Putra Mahkota UEA Mohammad bin Zayed al Nahyan. Di Qatar diterima oleh Emir Qatar Sheik Tamim Hamad Al Thani. Kehadiran

Presiden di Timur Tengah tidak lain meningkatkan jalinan kerja ekonomi, menarik investor agar bersedia berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan pimpinan Bank Internasional yang berkantor di Timur Tengah: Bank Pembangunan Islam (IDB). Organisasi Kerjasama Islam (OKI).Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Di UEA dicapai kesepakatan menerima alusista produk Indonesia. Selain itu, Presiden Jokowi minta perlindungan 80.000 TKI yang bekerja di UEA. Pilihan lawatan ke Timur Tengah untuk lebih meyakinkan masyarakat Presiden Jokowi sangat memperhatikan kepentingan mayoritas rakyat Indonesia, umat Islam.

Tidak mungkin tidak, mengadakan lawatan ke Amerika Serikat diterima oleh Presiden Obama. Di samping bertemu dengan para inverstor, Presiden Jokowi menyempatkan pula untuk Sholat Ashar di Masjid Diaspora Indonesia, Silver Spring Maryland. Lebih berkesan hadirnya ribuan WNI yang tinggal di AS, rame-rame menyambut Presiden Jokowi.

Perlu pula diperhatikan, Muktamar Persatuan Islam di Jakarta, Muktamar Ke 33 Nahdlatul Ulama di Jombang, dan Muktamar Ke 47 Perserikatan Muhammadiyah di Makasar, serta Kongres Syarikat Islam di Bandung kesemuanya dapat berjalan lancar. Ketua yang terpilih dalam Muktamar atau Kongres, tidak ada intervensi dari pihak pemerintah seperti zamannya Menteri Penerangan Ali Murtopo. Saat itu Ali Murtopo bisa menolak atau menerima pimpinan yang terpilih oleh Muktamar atau Kongres.

Presiden Jokowi dapat menghadiri pembukaan Muktamar atau Kongres tersebut. Sampai dengan API SEJARAH 1 dan 2, dicetak, 19 Jumadil Akhir 1437 H, atau 28 Maret 2015, Presiden Jokowi, tetap eksis tidak tergoyahkan oleh serbuan kritik yang dilancarkan oleh oposannya melalui media sosial. Sikap Presiden Jokowi justru menyatakan tidak marah karena adanya kritik.

Suatu prestasi yang sangat menakjubkan di awal waktu kerja *Presiden Jokowi* adalah menga gendakan *HUT Ke 60 Konferensi Asia Afrika – KAA* di Jakarta dan di Bandung. Dengan merancang mengundang 109 negara. Terdiri atas 55 negara Asia dan 54 Afrika. Suatu prestasi kerja yang sangat menakjubkan karena 23 Oktober 2014, para Menteri dilantik di halaman Istana. Di bulan 24 April 2015 mengadakan perhelatan HUT Ke 60 KAA. Tentu hal ini melibatkan tidak hanya *Retno Lestari Priansari Marsudi* Menteri Luar Negeri dan *Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan* adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, tetapi juga Gubernur Jawa Barat *Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc.* Terutama *Mochamad Ridwan Kamil, S.T, M.U.D* WaliKota Bandung yang berhasil mengubah *kota Bandung* menjadi berwajah baru. Di setiap simpang jalan dibangun Tugu Bambu yang artistik unik. Di samping itu dihidupkan Taman Bunga dan Air Mancur yang memperindah kota Bandung dan menyejukkan sekali. Hasil tatanan tata kota Bandung sangat membanggakan masyarakat Jawa Barat. Sampai Api Sejarah 2 diterbitkan Jalan Asia Afrika terutama sentra Gedung Merdeka dan sekitarnya, dijadikan Generasi Muda untuk mengabadikan diri dengan kamera atau handphone milik pribadinya.

Upaya HUT ke 10 di Alzajair gagal. Tetapi kali ini HUT Ke 60 KAA berhasil sukses. Presiden Joko Widodo memperlihatkan kembali ke dunia bahwa Indonesia tetap bertekad merealisasikan Pembukaan UUD 1945, bersama seluruh bangsa bangsa yang pernah dijajah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan harus dihapuskan di atas dunia. Karena bertentangan dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.

Melalui KAA 24 April 1955 dilahirkan *Dasa Sila Bandung* atau *Bandung Spirit*. Melalui KIAA 15 Maret 1965 umat Islam Afrika Asia mengangkat Presiden Soekarno sebagai *The Champion of Freedom and Islam* – Pendekar Kemerdekaan dan Islam. *Presiden Joko Widodo* mengingatkan kembali peran NKRI melalui kemanusiaan berjuang meniadakan penjajahan yang selalu akan hidup kembali. Dan menghidup kan *jiwa kesadaran bersejarah* bagi Generasi Muda yang sedang dihinggapi rasa tidak memiliki pahlawan lagi - *herolessness*.

Presiden Jokowi Bersarung Membuka
Muktamar Ke 33 Nu Di Jombang Jawa Timur

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2015-2020

Duduk dari kiri ke kanan

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum. • Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si. • Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. • Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
Dra. Hj. Noordjannah Djohantini, MM., M.Si. • Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni • Dr. H.M. Busyro Muqoddas, SH., M.Hum. • Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.

Berdiri dari kiri ke kanan

dr. H. Agus Taufiqurrohman, Sp.S., M.Kes. • Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A. • Drs. H. M. Goodwill Zubir • Prof. Dr. Bahtiar Effendy
Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed. • Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd. • Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP. • Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. • Drs. H. Marpuji Ali, M.SI.

MUKTAMAR KE XV PERSATUAN ISLAM
Jakarta, 20-23 November 2015 M / 8 - 11 Shafar 1437 H

Suasana Kongres Nasional Ke-40 SYARIKAT ISLAM
Bandung, 12-15 Shaffar 1437 H / 24-27 November 2015 M

DR. H.M. SYAFII ANTONIO
(NIO CWAN KUNG)

Lahir 12 Mei 1955 di Sukabumi, Jawa Barat

Alumnus dari:
University of Jordan (1990)
International Islamic University of Malaysia (1992)
University of Melbourne (2004)
Sakah seorang Pendiri Bank Muamalat,
Asuransi Takaful Reksa Dana Syariah,
Tazkia Group,
Ketua STIE Tazkia

Sumber: www.syafiiantonio.com
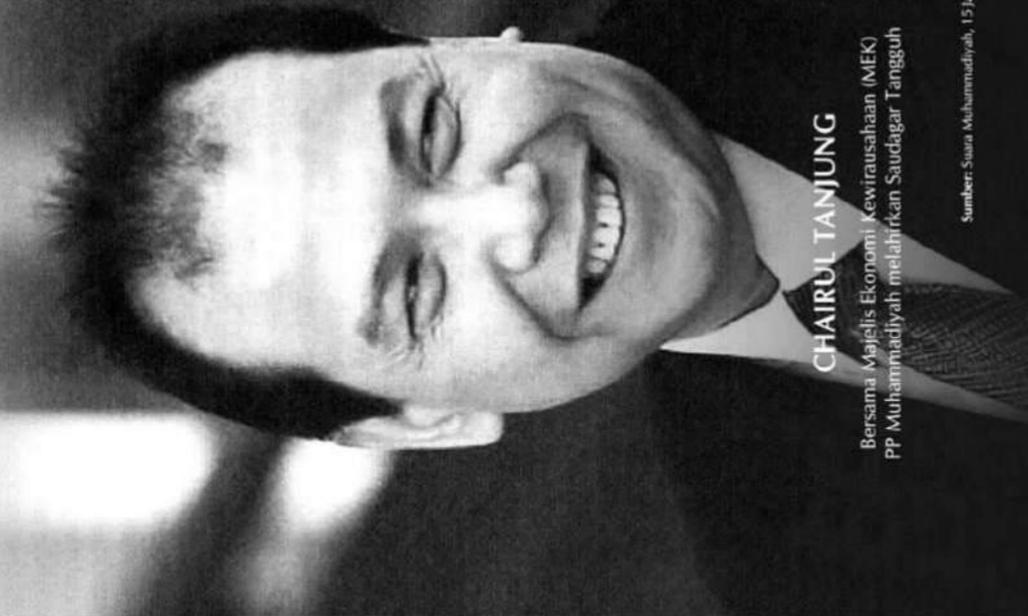
CHAIRUL TANJUNG

Bersama Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK)
PP Muhammadiyah melahirkan Saudagar Tangguh

Sumber: Suara Muhammadiyah, 15 Januari 2016

Reformasi dan Timbulnya Sistem Multi Parpol

Reformasi disertai dengan amandemen UUD 1945, melahirkan perubahan sistem kepartaian. Diubahnya dari sistem Satu Golongan dan Dua Partai pada masa Orde Baru, menjadi Multi Partai Politik. Pada awalnya, Golkar bukan partai, pengaruh Akbar Tanjung dalam menyesuaikan tuntutan Reformasi, berubah menjadi Partai Golongan Karya - PGK. Demokrasi di Orde Reformasi, hasil amandemen UUD 1945 memungkinkan partai politik tumbuh berlibat ganda jumlahnya.

Rakyat sukar memahami mana partai politik Islam dan mana yang bukan partai politik Islam. Mana partai pimpinan orang Islam, mana partai pimpinan bukan orang Islam. Sejarah berulang Pemilu 1955 rakyat berhadapan dengan sejumlah partai politik.

Nama-nama partai politik Islam tidak lagi menggunakan bahasa Arab dan tidak pula dituliskan dengan huruf Arab. Ada pula yang masih mempertahankan dengan nama partai politik Islam yang lama, juga gambar lambangnya. Ada pula yang dikenal oleh masyarakat luas pemimpinnya sebagai mantan pemimpin organisasi Islam, walaupun partai politik yang dipimpinnya tidak berasas Islam. Menurut Vincent Wangge SH, 1999, dalam *Direktori Partai Politik Indonesia*, antara lain terdapat:

Partai Syarikat Islam Indonesia - PSII
Didirikan, 16 Oktober 1905, Senin Legi, 16 Sya'ban 1323. Solo. Deklarasi Ulang 29 Mei 1998.
Asas, Dinul Islam.[10]
Dewan Partai
Ketua : K.H. Mulyana S. Muslim, SH.
Sekretaris : Chalid Djamarini
Lajnah Tanfidiyah/Pimpinan Pusat
Ketua : H. Taufiq R. Tjokroaminoto
Sekretaris Jenderal : Ir. H. Amaruddin Djajasubita

Partai Syarikat Islam Indonesia - PSII
Didirikan, 16 Oktober 1905, Senin Legi, 16 Sya'ban 1323. Solo.
Asas Dinul Islam.
Dewan Partai
Presiden : Dr. H. Bastaman, SH
Sekretaris Jenderal : Muhammad Mufti, BA

10 Hari dan Pasarannya, serta tanggal Komariyah dan tahun Hijrah, penulis tambahkan.

Prof. Dr. H. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.

Lahir Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956

Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama (2003–2006 dan 2006–2008)
Peletak dasar gagasan modernisasi peradilan di Indonesia
Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani
Ketua Panitia Seleksi Penasihat KPK (2009)
Ketua Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (2009–2010)
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum
Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Pendiri Jimly School of Law and Government

Sumber: *www.komhukum.com; id.wikipedia.org*

SI

HAMDAN ZOELVA

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
Terpilih Ketua PP Syarikat Islam
Dalam Kongres Nasional Ke-40 Syarikat Islam di Bandung
Program: Menyatukan Kepemimpinan Syarikat Islam dan Mengangkat Ekonomi Umat

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

Lahir Belitung, 5 Februari 1956

Perjalanan Karier

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (periode 2000-2001)

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong (periode 2001-2004)

Menteri Sekretaris Negara Indonesia (periode 2004-2007)

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (periode 1998-2005)

Sumber: *www.antaranews.com; capresindonesia.wordpress.com*

Drs. H. SURYADHARMA ALI, Msi.

Lahir Jakarta, 19 September 1956

Perjalanan Karier:

Menteri Agama Indonesia (sejak 22 Oktober 2009)
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu
Ketua Umum PPP (2007)

Sumber: kemenag.go.id

Dr. H.HIDAYAT NUR WAHID, M.A.

Lahir di Klaten, Jawa Tengah, 8 April 1960
Ketua MPR RI, 2004-2009
Dewan Pembina Partai Keadilan Sejahtera
Cendekiawan Muslim

Sumber: republika.co.id

Partai Kebangkitan Bangsa - PKB
Deklarasi, 23 Juli 1998 , Kamis Wage, 28 Rabiul Awal 1419, Jakarta.
Asas, Pancasila.
Dewan Syuro

Ketua	:	K.H. Dr. Ma'ruf Amin
Sekretaris	:	K.H. Drs. Dawam Anwar

Dewan Tanfid

Ketua	:	H. Matori Abdul Djalil
Sekretaris Jenderal	:	Drs. A. Muhaimin Iskandar

Partai Keadilan Sejahtera - PKS
Deklarasi, 9 Agustus 1998, Ahad Legi, 16 Rabiul Akhir 1419, Jakarta.
Asas, Islam.
Majelis Pertimbangan Partai

Ketua	:	Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA
Sekretaris	:	H. Luthfi Hasan Ishaaq, MA

Dewan Syariah

Ketua	:	Dr. H. Salim Segaf Aljufri, MA.
Sekretaris	:	Imam Santoso, Lc.

Dewan Pimpinan Pusat

Presiden	:	Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, MSc.
Sekretaris Jenderal	:	H.M. Anis Matta, Lc.

Partai Amanat Nasional - PAN
Deklarasi, 23 Agustus 1998, Ahad Kliwon, 30 Rabiul Akhir 1419. Jakarta.
Asas, Pancasila.

Ketua Umum	:	Prof. Dr. Amien Rais
Sekretaris Jenderal	:	Faisal Basri, SE., MA.

Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
Didirikan di Djogjakarta 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhijjah 1364.
Deklarasi Ulang, 28 Agustus 1998, Jumat Kliwon, 5 Jumadil Akhir 1419.
Asas, Islam.

Majelis Syuro	:	Ketua K.H. Mawardi Noer, SH
Sekretaris	:	Izam Hamka

Pimpinan Harian:

Ketua Umum	:	Ir. Abdullah Hehamahua, MSc.
Sekretaris Umum	:	Drs. Sayuti Rahawarin

AKBAR TANJUNG
Lahir Sibolga, Sumatera Utara, 14 Agustus 1945
Pendiri Partai Golkar
Perjalanan Karier:
Wakil Sekretaris FKP DPR (1982-1983) - Sekretaris FKP MPR (1987-1992)
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (periode 1988-1993)
Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998)
Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman (1998)
Wakil Ketua FKP MPR (1997-1998) - Menteri Sekretaris Negara (1998-1999)
Wakil Ketua FKP MPR dan Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR (1997-1999)
Ketua DPR-RI (1999-2004)
Sumber: www.komhukum.com; id.wikipedia.org
PROF. DR. K.H. MIFTAH FARIDL
Pembina Masjid Salman ITB

Partai Ummat Islam, PUI

Deklarasi, 26Juli 1998, Ahad Pahing, 2 Rabiul Akhir1419. Jakarta.

Asas, Islam.

Majelis Pertimbangan Partai	:	K.H. Isya Syahrul, MA,
	:	Ir. Syahrul Alim, MSc,
	:	Ir. H. M. Sanusi
Dewan Pimpinan Pusat		
Ketua Umum	:	Prof. Dr. Deliar Noer
Wakil KetuaUmum	:	Prof. Dr. Harun Al-Rasid S.,
Ketua	:	Dr. Muchtar Effendi SE.,
	:	Dr. Mursalin Dahlan,
	:	Drs. Abdurrahman Gunadirdja,
	:	Ir. Imam Rahardjo,
	:	H. Juzahar Sirie,
	:	Usman Sembiring, SH,
	:	Drs. Ali Murthado.
Sekretaris Jenderal	:	dr. Judilherry Justam, MM.

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, pimpinan pendiri partai politik tadi, mengalami proses seleksi. Ada yang mengundurkan diri. Misalnya Faisal Basri dari PAN, atau seperti Matori Abdul Jalil diberhentikan dari PKB. Untuk memahami siapa sebenarnya Matori Abdul Djalil, dapat dibaca Drs. Markonina Hartisekar dan Drs. Akrin Isjani Abadi, dalam mewaspadai Kuda Troya Komunisme Di Era Reformasi Jilid 1-5. Pustaka Sarana Kajian. Jakarta.

Pergantian pimpinan partai politik, seperti masalah biasa. Semuanya mempunyai dasar tujuan untuk konsolidasi. Namun, bagi partai politik yang sudah mapan, justru sebaliknya. Pimpinan lama selalu dipertahankan. Disebutnya sebagai Iron Law of Oligarchy - Hukum Baja Kelompok.

Rakyat menghadapi kesulitan besar dalam memilih nama partai politik karena adanya partai kembar seperti di atas. Misalnya PSII dan Masyumi. Tidak beda dialami pula partai non-Islam. Memiliki kekembaran lambang dan hampir sama namanya pula.

Demikian pula di kalangan Perwira Tinggi TNI, saling mendirikan partai politik. Saling bersaing dengan dana yang besar dalam kampanye memperoleh dukungan suara rakyat dalam Pilkada, Pemilu atau Pemilihan Langsung. Rakyat pemilih yang cinta Indonesia, bingung kepada siapa menitipkan kedaulatannya.

Problem Amandemen UUD 1945

MPR Reformasi tidak hanya mengamandemen kewenangan MPR, tetapi juga mengamandemen proses pemilihan dan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden. MPR tidak lagi memiliki kewenangan memilih Presiden. MPR hanya melantik Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden menurut UU. Presiden memegang jabatan selama 5 tahun. Dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan. Dalam praktik Pilkada dan Pemilu untuk Kepala Daerah dan Presiden, lewat parpol dan mereka yang punya uang.

Selain itu, amandemen Pasal 33, dengan landasan Demokrasi Ekonomi, tetapi dalam praktik jadi ekonomi liberal dengan sistem kapitalistik. Pasar bebas - free trade untung-rugi jadi acuan. Kemudian terjadi ketidakpedulian terhadap rakyat kecil yang miskin dan masih banyak lagi amandemen yang akan membahayakan nasionalisme.

Situasi ini, amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR dituduh dibiayai asing, membangkitkan adanya Apel Kesetiaan NKRI, Pancasila, UUD 1945, di Tugu Prokla masi 11 Agustus 2005 dipimpin oleh Try Sutrisno, Saleh Basarah, M. Kharis Suhud, Sutardjo Surjoguritno, Ali Sadikin, Prof. Kusnadi, Sofian Effendi, dan Machmud Subarkah. Delapan tokoh ini melihat adanya kerancuan amandemen yang mengikis jiwa nasionalisme dan dibacanya ada upaya deideologi Pancasila. Ternyata, sebagian generasi muda sampai merasa malu menyebut Pancasila.

Perubahan Gaya Kehidupan

Sikap partai politik Orde Reformasi, sepertinya kurang memerhatikan dampak menjamurnya Supermarket-Hypermarket, Mall, Department Store, Factory Outlet, mematikan Pasar Tradisional, Toko, dan Warung Rakyat. Umat Islam setiap hari terpaksa setor uang ke berbagai Supermarket, Hypermarket-Mall dan Factory Outlet, serta Gerbang Tol, seperti zaman kolonial setor berbagai pajak, termasuk pajak jalan.

Sekarang, melalui bahasa dan aktivitas niaga, umat Islam setor uang ke investor asing atau pemilik modal asing atau ke bank asing. Terlihat dalam usahanya memperkuat posisi imperialisme ekonomi modern yang mencengkeram market - pasar dan raw material - bahan mentah serta karyawan sebagai tenaga kerja kontrak. Penjajah gaya baru dengan membangkitkan gaya hidup mewah - hedonisme. Posisi bahasa Indonesia pun dalam language war - perang bahasa, tergusur dengan bahasa niaga asing atau bahasa Inggris.

Sumber: www.majelisadzdzikra.com

USTADZ K.H. ARIFIN ILHAM

Pembangkit Kesadaran Berdzikir Bersama Nusantara Indonesia Berdzikir

Menggoncang jiwa umat agar dekat dengan hukum Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta
dan pembangkit kesadaran umat, nikmatnya menjalankan Hukum Allah, menyadarkan terhadap kesebentaran nilai waktu hidup di dunia, dan makna rezeki Allah agar digunakan untuk membangun jalan pulang dengan jalan menciptakan kesejahteraan umat melalui Syari'ah Islam

Sumber: *Doc. Pribadi*

DRS. K.H. HUSNI THAMRIN

Ketua Yayasan Pesantren Al-Ihya, Bogor

Sumber: *Doc. Pribadi*

H. ZAINI AZHAR MAULANI

USTADZ K.H. ARIFIN ILHAM, DRS. K.H. HUSNI THAMRIN, dan H. ZAINI AZHAR MAULANI merupakan keturunan Syeh Ahmad Al-Banjari.

Pola tanam berganti dengan tanaman hias. Sawah mulai menghilang. Irigasi untuk sawah hancur, terhadang kompleks perumahan dan peruntukan perindustrian. Petani terbebani, Pajak Bumi dan Bangunan, lahan sawahnya dijual. Berubah menjadi buruh tani yang tidak memiliki sawah dan lahan pertanian. Sawahnya berubah menjadi lapangan golf atau sarana olahraga lainnya. Apa jadinya jika food as weapon - makanan sebagai senjata, sedangkan isi perut bangsa, beras, buah, sayuran bergantung dari luar negeri. Sembako pun dikuasai modal asing.

Dzikir Bersama

Ulama pun merasa prihatin terhadap perubahan tatanan kehidupan nasional yang berdampak menimbulkan keresahan jiwa. Arifin Ilham mengajak umat memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah dengan dzikir bersama. Hanya dengan mengingat Allah akan menumbuhkan kedamaian batiniah. Secara politis, dzikir bersama sebagai bentuk gerakan keagamaan yang positif dalam menciptakan situasi damai dan tenteram.

Demikian pula Ida Farida secara rutin setiap Selasa dengan ribuan Jamaah Ibu di Masjid Raya Bandung, istighosah menangiskan situasi bangsa dan negara yang tergoncang berbagai musibah politik, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam, serta munculnya aliran agama yang tiada henti-hentinya. Karena dampak musibah dapat menggoyahkan kehidupan rumah tangga.

Modernisasi melahirkan defamilialization - defamilialisasi, dengan pengertian keluarga yang tidak lagi hidup di bawah satu atap. Ayah, ibu dan anak hidup berbeda kota. Terpisah dengan kepentingan kerja dan sekolah. Budaya kota - urban culturemelahirkan rasa saling keterasingan. Walaupun nama pada dada baju seragam orang dijumpainya dapat dibaca, tetapi saling tidak kenal. Budaya kota menjadikan manusia kota terbelah fragmentasi. Budaya gotong royong di desa pun mulai melemah, akibat Ulama dan Santri dihadapkan pada tantangan yang semakin rumit. Tidak hanya semakin terpecahnya kepemimpinan umat dalam keragaman wadah partai politik. Namun muncul juga berbagai aliran agama (Islam), tetapi ajarannya mengkafirkan sesama Muslim jika tidak mau bergabung dengan kelompoknya. Misalnya Ahmadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia - LDII, dan Syi'ah. MUI dan Departemen Agama tidak akan menilai sebagai aliran sesat jika tidak memakai nama yang sama dengan nama agama yang sah: Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Berbagai aliran agama tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan membelah kerukunan umat beragama oleh mereka yang tidak menghendaki keutuhan NKRI.

Di lain pihak, timbul gerakan liberalisme yang mensejajarkan semua agama sama benarnya. Walaupun beda syariah dan keyakinannya karena semuanya dinilai berasal dari Tuhan.

Demikian pula penilaiannya terhadap aliran pluralisme, sekulerisme, atheisme dipandang sama benarnya dan sama-sama memiliki hak hidup di alam demokrasi dengan agama lainnya. Kelompok JIL dalam upaya pembenaran pandangannya, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, As-Sunnah, Kitab Islam Klasik, tetapi dibaca dengan tafsir yang disimpangkan.

Dewasa ini sedang berjangkit kegoncangan politik di Timur Tengah yang melahirkan "Perang Bintang" dengan senjata dan amunisi dari produk industri senjata Barat. Timur Tengah dijadikan pasar penjualan senjata dan sekaligus dijadikan alat merontokkan antar negara Islam Timur Tengah. Perlu Indonesia mewaspadai dan ikut serta dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Dampaknya berbahaya sekali bila yang dipecahkan kesatuan umat Islam dengan meningkatkan rasa perbedaan penafsiran dan keyakinan dengan diperangkan antar Penganut Syi'ah kontra Wahabi kontra Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Semoga Bandung Spirit hasil Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Islam Afrika Asia dapat menghentikan silang sengketa yang terjadi di Timur Tengah sebagai ciptaan lawan-lawan Islam.

Bagaimana pun tingginya kedudukan lawan Islam, sama seperti buih di atas air. Bagaimana pun rendahnya air di bawah buih atau kedudukan Ulama dan Santri, tetapi yang menyuburkan tanah atau kehidupan rakyat adalah air atau Ulama. Betapapun besarnya buih saat menyepuh permata,dan betapapun kecilnya permata walau pun lebih kecil daripada buih, yang dibutuhkan dalam kehidupan manusianya adalah permata atau Ulama (QS 13: 17).

Di bawah masa Presiden Joko Widodo terjadi percobaan teroris menduduki Gedung Sarinah. Tetapi akibat kesiap siagaan aparat Kepolisian dan TNI, serta kesertaan dan keberanian Rakyat menghadapi teroris tanpa rasa takut sambil nonton operasi kepolisian, terjadilah kebalikan sikap teroris yang menjadi kebingungan. Dampaknya mudah digagalkan dan dilumpuhkan.

Sumber: Google

Pamungkas

Semoga Allah Yang Maha Kuasa membangkitkan semangat juang para Ulama dan Santri mempertahankan dan menyelamatkan bangsa dan NKRI dari bencana sekulerisme, atheisme, pluralisme dan liberalisme. Semoga Allah Maha Rahman Maha Rahim melimpahkan hikmah, ilmu,dan petunjuk-Nya kepada Ulama dan segenap umat Islam Indonesia agar tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam yang benar, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah saw. Demi disumbangkan dalam membangun kehidupan bersama dengan seluruh bangsa dalam membangun kehidupan yang adil makmur dan sejahtera, yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa dalam NKRI.

Sekalipun tulisan Api Sejarah (jilid 2) ini penulis akhiri sampai di sini, tetapi perjalanan sejarah Ulama dan Santri tidak pernah berhenti. Berjalan terus di sepanjang jalan juang jihad di tengah perkembangan zaman yang dilaluinya. Bagaimana pun besarnya tantangan yang dihadapi oleh Ulama dan Santri, sejarah membuktikan Persyarikatan Muhammadiyah tetap eksis sampai hari ini mencapai usia satu abad, 8 Dzulhijjah 1330 - 1430, kemampuan bertahan hingga melewati jarak waktu satu abad namun tetap dan semakin berjaya karena langkah juang jihad Persyarikatan Muhammadiyah bertumpu kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Demikian pula Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Persatuan Umat Islam, Tarbiyah Islamiyah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathan, Assalam, masih menampakkan daya juang tinggi dalam pembinaan umat bersyariah Islam untuk membela negara dan bangsa.

Alhamdulillah situasi kerukukan beragama khas Indonesia, Hari-hari Besar Agama dinasionalkan dan dihormati bersama sebagai hari libur nasional, misalnya Hari Nyepi Hindu Bali, Hari Natal, Hari Waisak, walaupun mayoritas adalah umat Islam dijadikan Hari Libur Nasional. Demikian pula kalender mengutamakan Masehi dapat dilihat dari penampilan kalender-kalender membesarkan tanggal, bulan, tahun Masehi. Sebaliknya dengan penuh toleransi umat Islam menerima penampilan kalender yang mengecilkan tanggal, bulan Komariah, tahun Hijriyah dalam pencetakkannya.

Sampai dengan memasuki Januari 2016, di bawah Presiden Joko Widodo kehidupan kerukunan beragama tetap aman. Umrah dan Haji dapat berlangsung dengan baik. Demikian pula acara da'wah secara nasional melalui media sosial televisi ataupun media cetak, buku, majalah, koran tidak pernah terjadi pembredelan. Pemerintah tidak menghalangi atau intervensi dalam proses penyelenggaraan Muktamar dan Kongres yang diadakan oleh Parpol atau Organisasi Sosial Islam.

SEKOLAH SEJARAH & PERADABAN ISLAM

Di Jakarta Pusat

Damailah Majidku dan Indonesiaku

SEKOLAH SEJARAH & PERADABAN ISLAM

Di Jakarta Pusat

Damailah Majidku dan Indonesiaku

"MEMOHON" Karya ROSA
Dipamerkan di Gedung Sate dalam rangka HUT ke 60 Asia Afrika
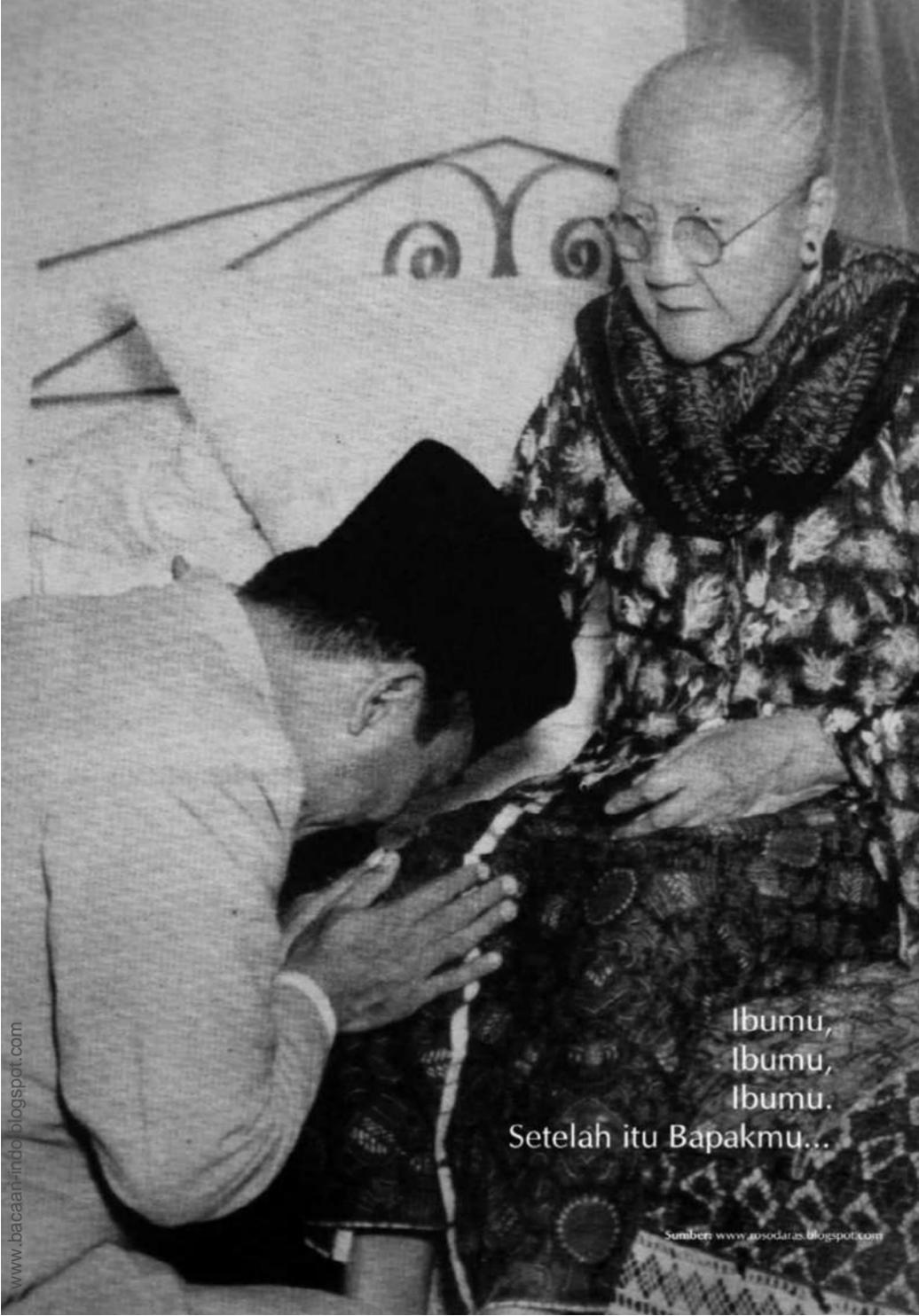
Ibumu,
Ibumu,
Ibumu.
Setelah itu Bapakmu...
Sumber: www.rosodaras.blogspot.com
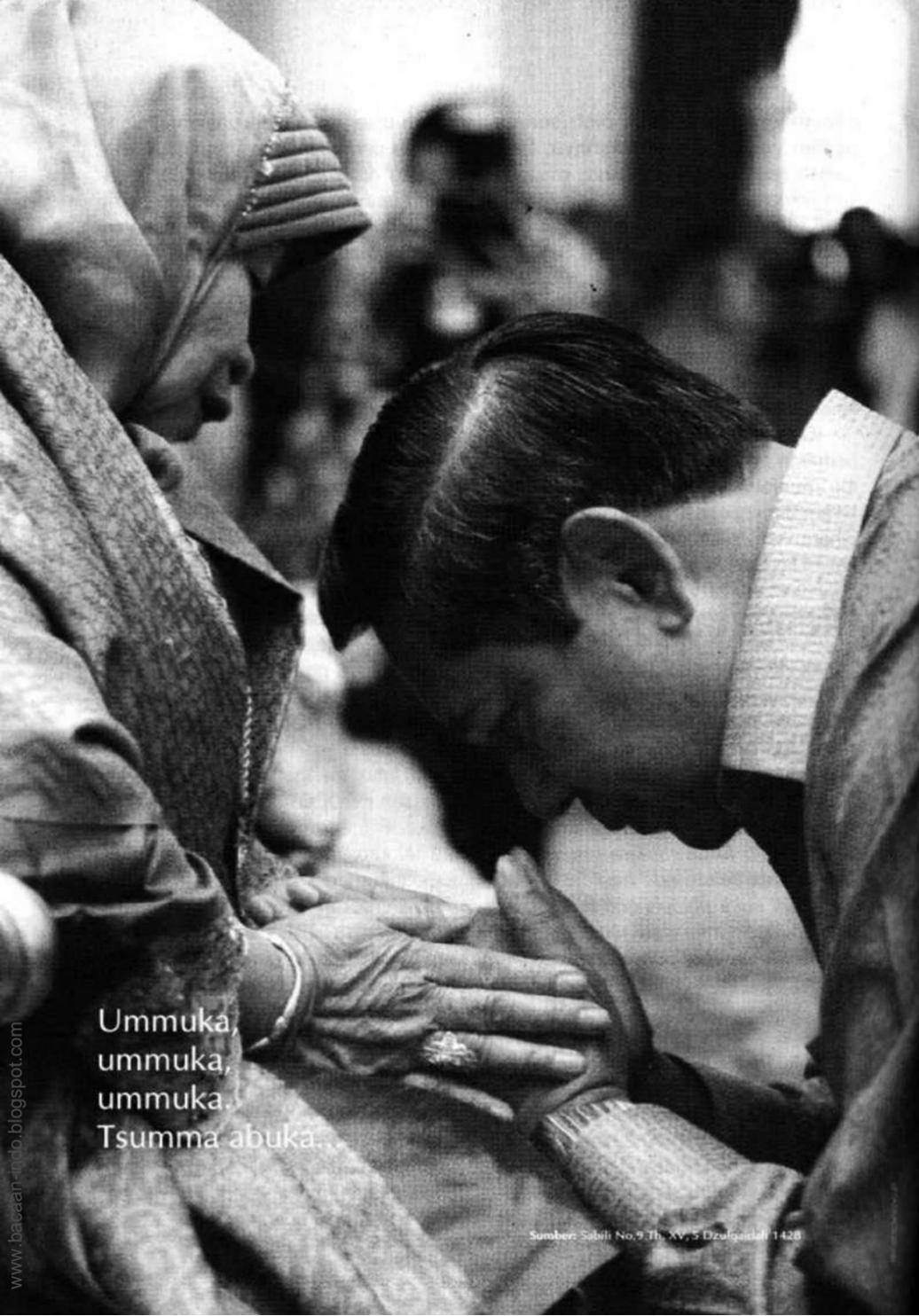
Ummuka,
ummuka,
ummuka.
Tsumma abuka...

Sumber: Sabili No.9 Th. XV, 5 Dzulqaidah 1428

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqi, Mohammad Fuad. 1417/1996. *Al Mu'jam Al Mufahras Li Al Faadzil Quranil Karim*. Kairo: Darul Hadis.

Abdullah, Taufik (ed). 1974. *Islam Di Indonesia Sepintas Lalu Tentang Beberapa Segi.* Jakarta: Tintamas.

__________________. 1991. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

__________________. 1997. *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.

__________________. 2003. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Faktaneka dan Indeks.* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Abu Khalil, Shauqi. 2003. *Atlas of The Qur'an Places, Nations, Landmarks.* Riyard: Darussalam.

Adams, Cindy .1966. *Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia.* Alih Bahasa: Major Abdul Bar Salim. Jakarta: Gunung Agung.

Affandi, Bisri. 1999. *Syaikh Ahmad Syurkati 1874-1943: Pembaharu & Pemurni Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ahmad, Mufassir Mohammad. 1979. *The Koran.* London: The First Tafsir In English Emere.

Ahmad, Z.A. 1956. *Membentuk Negara Islam*. Jakarta: Widjaja.

Ahmed, Akbar S. 1992. *Citra MuslimTinjauan Sejarah dan Sosiologi.* Jakarta: Erlangga.

Al-Buruswi, Ismail Haqqi. 1995. *Tafsir Ruhul Bayan.* Disunting oleh H.M.D. Dahlan. Bandung: Diponegoro.

Alfian, Ibrahim. 1987. *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Al-Faruqi, Ismail R. 1986. *The Cultural Atlas of Islam*.

Al-Faruqi. *Lois Lamya'*. New York: Macmillan Publishing Company.

Al-Haromain, Al-Imam A. Ma'ali. 1994. *Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.* Penerjemah: Drs.Hafizh Utsman. Jakarta: Gandewa.

Al-Musawi, Syarafuddin. 1983. *Dialog Sunnah Syi'ah*. Bandung: Mizan.

Ali, A.Yusuf. 1983. *The Holy Qur'an*. Maryland: Amana Corp.

Ali, R. Mohammad. 1963. Pengantar Ilmu Sedjarah Indonesia. Jakarta: Bhatara.
_______________. 1963. Peranan Bangsa Indonesia Dalam Sedjarah Asia Tenggara. Jakarta: Bhatara.
Ali Nashif, Syekh Manshur. 1993. Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw. Penerjemah: Bahrun Abu Bakar Lc. Bandung: Sinar Baru.
Anwar, Tamar. 1984. K.H. Noer Alie 71 TahunBekasi: Attaqwa-Ujung Harapan Bahagia.
Amelz. 1952. H.O.S. TjokroaminotoHidup dan Perdjuangannya. Jakarta: Bulan Bintang.
Anam, Choirul. 1985. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama. Solo: Jatayu.
___________. 1990. Gerak Langkah Pemuda Ansor Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran. Surabaya: Penerbit Majalah Nahdlatul Ulama Aula.
Ananta Toer, Pramoedya. 1985. Sang Pemula. Jakarta: Hasta Mitra.
Anderson, Benedict R.O'.G. 1972. Java In A Time Of Revolution Occupation and Resistance, 1944 -1946. Ithaca: Cornell University Press.
Aqamuz, Erli (Siti Maesaroh). 2007. Profil Abdul Qahhar Mudzakkar Patriot Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Syahid NII/TII. Tangerang: Yayasan Al-Abrar.
Arnold, Sir Thomas W. (ed). 1965. The Legacy of Islam. London: Oxford University Press.
___________________.1979. Sejarah Da'wah Islam. Penterjemah Drs.H.A.Nawawi Rambe. Jakarta: Widjaja.
Armstrong, Amatullah.1996. Kunci Memasuki Dunia Tasawuf: Khasanah Istilah Sufi. Bandung: Mizan.
Atjeh, Aboebakar. 1957. Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar. Jakarta: Panitia Buku Peringatan.
_____________.1977. Aliran Sji'ah Di Nusantara. Jakarta: Islamic Research Institute.
_____________.1988. Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian Tentang Mistik. Solo: Ramadhani.
Aziz. 1955. Japan's Colonialism and Indonesia. (M.Nijhoff). The Hague.
Azra, Azyumardi. 1994. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Bandung: Mizan.
Badri, Muhammad Nasihuddin. 2001. Meniti Tapak Sejarah 69 Tahun Pondok Pesantren Darunnahdlatin Nahdlatul Wathan Pancor. Lombok Timur: Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pancor.
Baharuddin. 2007. Nahdlatul Wathan & Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Press.
Bahsan, Oemar. 1955. Tjatatan ringkas tentang: PETA - Pembela Tanah Air dan Peristiwa Rengasdengklok. Bandung: Melati Bandung.
Bain Chester A. 1962. The Far East. Littlefield, Adams & Co. New Jersey.

Bajasut, S.U. 1972. *Alam Pikiran Djedjak Perdjuangan Prawoto Mangkusasmito.* Surabaya: Documenta.

Ballack, Luger. 2007. *7 Tokoh Kunci Nazi Penentu Sejarah Jerman & Penyebab Perang Dunia II.* Jakarta: Visimedia.

Balfas, M. 1957. *Dr.Tjipto Mangoenkoesoemo Demokrat Sedjati.* Jakarta: Djambatan.

Baloch, N.A. 1980. *The Advent of Islam In Indonesia.* Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research.

Banks, Arthur S. (ed). 1981. *Political Handbookof The World: 1981.* New York: McGraw Hill Book Co.

Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada MasaPendudukan Jepang 1942-1945.* Terjemahan oleh Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya.

Nuh, R.H. Abdullah bin. 1978. *Sejarah Islam Di Jawa Barat Hingga Zaman Keemasan.* Bogor: Majlis Ta'lim Al-Ihya.

Brackman, Arnold C. 1963. *Indonesian Communism A History.* New York: Frederick A.Praeger.

Bruinessen, Martin van. 1994. *Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia: Survei Historis, Geografis, dan Sosiologis.* Bandung: Mizan.

Burckhardt, Titus. 1984. *Mengenal Ajaran Kaum Sufi.* Diterjemahkan oleh Azyumardi Azra, B. Effendi Jakarta: Pustaka Jaya.

Burger dan Prajudi. 1960. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia.* Djilid Pertama. Tjetakan Kedua. Jakarta: P.N.Pradnja Paramita.

________________.1970. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia.* Djilid Kedua. Jakarta: P.N.Pradnja Paramita.

Carrie, Rene Albrecht. 1961. *Europe 1500 – 1848.* New Jersey: Litlefield, Adams &Co.

Carlyle, Thomas. 1968. *On HeroesHero Worship and The Heroic In History.* London: Oxford University Press.

Chaidar, Al. 1999. *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo.* Jakarta: Darul Falah.

Chalil, K.H. Moenawar. 2001. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad,* Jilid, 1, 2, 3. Jakarta: Gema Insani.

Clausewitz, Carl Von. 1976. *On War.* Edited and Translated by Michael Howard and Peter Paret. New Jersey: Princeton University Press.

Colijn, H. 1928. *Koloniale Vraagstukken van Heden En Morgen* N.V.Dagblad En Drukkerij De Standaard.

Cotterell, Arthur. 1995. *China A History.* London: Pimlico.

Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik Di Indonesia.* Penerjemah: Sumarthana. Jakarta: Sinar Harapan.

De Graaf, H.J. dan Pigeaud Th.G.Th. 1985. *Kerajaan-Islam Pertama Di Jawa Kajian Sejarah Politik Abad Ke-15 dan Ke-16.* Jakarta: Grafiti Pers.

Dengel, Holk H. 1995. Darul Islam Dan KartosuwirjoLangkah Perwujudan Angan-Angan yang Gagal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dhofier, Zamaksyari. 1984. Tradisi Pesantren. Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Jakarta: LP3ES.

Dienaputra, Reiza D. 2004. Cianjur Antara Priangan dan Buitenzorg Sejarah Cikal Bakal Cianjur dan Perkembangan hingga 1942. LPM UNPAD & Pemda Cianjur.

Djaja, Tamar. 1966. Pustaka Indonesia. Djakarta: Bulan Bintang.

Djojoprajitno, Sudyono. 1962. P.K.I. – Sibar Contra Tan Malaka. Tjetakan Ke I. Jakarta: Jajasan Massa.

Drewes, G.W.J.1978. An Early Javanese Code Of Muslim Ethics. The Hague: Martinus. Nijhoff.

El Hafidy, M. Asad, 1977, Aliran-Aliran Kepercayaan dan Kebatinan Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

El Ibrahimy, M.Nur. 1986. Teungku Muhammad Daud Beureueh Peranannya dalam pergolakan di Aceh. Jakarta: Gunung Agung.

Esposito, John L. (ed). 1999. The Oxford History of Islam. New York: Oxford University Press.

__________________. 2001. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. Penerjemah: Eva YN, Femmy Syahrani, Jarot W. Poerwanto. Rofik S. Bandung: Mizan.

Eugene Smith, Donald. 1971. Religion, Politics, and Social Change in the Third World. New York: The Free Press.

Departemen Penerangan. 1951. Kepartaian di Indonesia, Pepora 8. Jakarta: Departemen Penerangan.

__________________.1962. Makin Lama Makin Tjinta Muhammadijah Setengah Abad 1912-1962. Jakarta: Departemen Penerangan.

Gde Agung, Ide Anak Agung. 1980. Renville.

A.W. Sijhoff. Alphen Aan Den Rijn Geertz, Clifford. 1960. The Religion of Java. Illinois:The Free Press of Glencoe.

Dirks, Jerald F. 2006. Ibrahim Sang Sahabat Tuhan. Penerjemah: Satria Wahana. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Gerth and Mills. 1958. From Max Weber Essays in Sociology. New York: Oxford University Press.

Ghazali, Abd. Rohim (ed). 2000. Dua yang Satu Muhammadiyah NU dalam Sorotan Cendekiawan. Bandung: Mizan.

Giap, The Siauw. 1986. Cina Muslim Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah

Gibb, H.A.R. 1961. Islam Dalam Lintasan Sedjarah. Jakarta: Bhratara.

Gonggong, Anhar. 1992. Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak. Jakarta: Grasindo.

Hadisutjipto, S.Z. 1996. *Gedung STOVIA Sebagai Cagar Sejarah*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.

Hadjar Dewantara, Ki. 1952. *Taman Siswa 30 Tahun 1922-1952*. Jogyakarta: Tanpa Nama Penerbit.

Haidar, M. Ali. 1994. *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia.

Hakiem, Lukman. 1993. *Perjalanan Mencari Keadilan dan Persatuan Biografi Dr. Anwar Harjono S.H.* Jakarta: Media Da'wah.

Hall, D.G.E. 1976. *A History of South - East Asia*. Third Edition. London: The Macmillan Press Ltd.

Hall, John Whitney. 1984. *Japan From Prehistory To Modern Times*. Tokyo: Charles E. Tuttle Co.

Hamka, Buya. 1960. *Tasawuf Modern*. Tjetakan Kesepuluh. Jakarta: Djajabakti.

__________.1978. *Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka*Jakarta: Yayasan Nurul Iman.

Hartisekar, Markonia, dkk. 1999. *Mewaspadai KudaTroya Komunisme Di Era Reformasi,* Jilid 1-5. Jakarta: Pustaka Sarana Kajian.

Hartono, Chris, tt. *Ketionghoaan dan Kekristenan Latar belakang dan panggilan Gereja2 yang berasal Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Hasan, Erwin M. 2002. *Gerakan Pemuda Pelajar Berjuang Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPPI*. Jakarta: Gerakan Nasional Patriot Indonesia.

Hassan, A. 1956. *Al Furqan Tafsir Qur'an*. Surabaya: Al-Ikhwan.

_________. 1972. *Islam dan Kebangsaan*. Bangil: Persatuan Islam.

_________. 1981. *An Nubuwwah Mengenal Muhammad Bukti-Bukti Kebenaran Nabi Muhammad saw*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hasymy, A. 1993. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam Di Indonesia Kumpulan Prasaran Seminar di Aceh*. Bandung: Al-Maarif.

Hatta, Mohammad. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara

________________. 1970. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas.

________________. 1982. *Mohammad Hatta Memoir*. Jakarta: Tintamas.

Hegel, Georg W.F. 1991. *The Philosophy of History*. New York: Prometheus Books, Buffalo. Heilbroner

Robert L. 1962. *The Making of Economic Society*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Herkusumo, A. P. 1984. *Chuo Sangi-In, Dewan Pertimbangan Pusat Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Rosda Jayaputra.

Hillenbrand, Carole. 2005. *Perang Salib Sudut Pandang Islam*. Penerjemah: Heryadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Hitti Phillip K. 2008. *History of the Arabs*. Penerjemah: R.Cecep Lukman Yasin, Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Hitler, Adolf. 1992. *Mein Kampf* Translated by Ralph Manheim. London: Pimlico.

Hurip, Mutakat. 1990. Penjelasan Perihal Panji-Panji Pataka Vandel–Daidanki, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Majalah Peta.

Hurley, Andrew. 1999. One Nation Under Israel. Scottsdale:Truth Press.

Husaian Haekal, Muhammad. 1972. Sedjarah Hidup Muhammad. Terdjemahan: Ali Audah. Jakarta: Tintamas.

Husaini, Adian. 2009. Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam. Jakarta: Gema Insani.

Ichimura S. & Koentjaraningrat. 1976. Indonesia Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai. Jakarta: Gramedia.

Jam'ah, Ahmad Khalil dan Syaikh Muhammad. 1427 H/2007 M. Istri Istri Para Nabi. Jakarta: Darul Falah.

Janowitz, Morris. 1971. The Military in the Political Development of New Nations, An Essay In Comparative Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.

Jassin H.B. 1982. Bacaan Mulia. Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942.

Kahin, McTurnan. 1970. Natiomalism and Revolution Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

_______________. 2008. PRRI: Pergolakan Daerah Atau Pemberontakan. Jakarta: Panitia Peringatan dan Media Dakwah.

Kartodirdjo, Sartono. 1978. Protest Movement in Rural Java A Study of Agrarian Unrest in The Ninetieth and Early Twentieth Centuries. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

________________. 1982. Pemikiran Dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif. Jakarta: Gramedia.

________________.1984. Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, Dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya.

Kasdi, Aminuddin. 2009. Kaum Merah Menjarah. Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur. Surabaya: Penerbit YKCB dan CICS.

Khalil, Shauqi Abu. 2003. Atlas of The Quran Places, Nations, Landmarks. Riyadh: Darussalam.

Khoo, Gilbert. 1970. A History of South East Asia Since 1500. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Kohn, Hans. 1961. Nasionalisme Arti dan Sedjarahnja. Tjetakan Kedua. Terdjemahan Sumantri. Jakarta: Pembangunan.

Kroef, Jusus M. van der. 1971. Indonesia Since Sukarno. Singapore: Asia Pasific Press.

Kunto, Haryoto. 1984. Wajah Bandoeng Tempo Doeloe. Bandung: Granesia.

Kuntowijoyo. 1991. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan.

__________. 1997. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan dan Ummat.

Kuzman, dan Lebra, Joyce. 1986. Day of the Bomb. New York: Mc Graw Hill Book Co.

____________________.1988. *Tentara Gemblengan Jepang*. Penerjemah Pamudji. Pustaka Sinar Harapan.

Lehman, Jean Piere. 1982. *The Roots of Modern Japan*. Hongkong: The Macmillan Press Ltd.

Lenczowski, George. 1960. *The Middle East in World Affairs*. Cornell University Press.

Leur, J.C. van. 1955. *Indonesian Trade and Society*. W.van Hoeve Ltd. The Hague.

Lubis, Nabilah. 1996. *Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makasari: Menyingkap Intisasri Segala Rahasia*. Bandung: Mizan.

Maddox, Robert James. 1992. *The United States and World War II*. San Francisco: Westview Press.

Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Dokrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Mahpudi dkk. 2011. *Pak Harto. The Untold Stories*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Majid, Dien & Darmiati. 1999. *Jakarta, Krawang, Bekasi dalam Gejolak Revolusi Perjuangan Moeffreni Moe'min*. Jakarta: Penerbit Keluarga Moeffreni Moe'min.

Malik, Adam. 1970. *Riwajat dan Perdjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Tjetakan Kelima. Jakarta: Widjaja.

Mangkusasmito, Prawoto. 1970. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Projeksi*. Jakarta: Hudaja.

Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*. Jakarta: Airlangga.

Martha, Ahmaddani G, dkk. 1985. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Dikbud RI.

Marx, K. 1955. *K.Marx and F.Engels On Religion*. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Masnun, H. 2007. *Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Al-Madjid*. Tanpa Kota Penerbit: Pustaka Al-Miqdad.

Ma'shum, Saifullah. 1998. *Kharisma Ulama Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung: Mizan.

Maulani, Z.A. 2002. *Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia*. Jakarta: Penerbit Daseta.

__________. 2002. *Mengapa? Barat Menfitnah Islam*. Jakarta: Penerbit Daseta.

__________. 2003. *Jama'ah Islamiyyah dan China Policy*. Jakarta: Penerbit Daseta.

Mestoko, Sumarsono, dkk, 1986. *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.

Millard, E. Willard. 1963. *Global Geography*. New York: Thomas Y.Corwell.

Muchtarom, Zaini. 1988. *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: INIS.

Muhammad, Abdul Mun'im. 2007. *Khadijah The True Love Story of Muhammad*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Muhammad, Yusuf. 2003. *Muzakarah Jami'iyah Dentuman Kritisme Ideologi*. Bandung:

Media Cendekia.

Musaddad, Anwar. 1999. Pemikiran dan Pengabdian Prof. K.H.Anwar Musaddad Memori Ulang Tahun Ke–90. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati Press.

Mustofa, Baihaqi. 2005. K.H.M. Rusyad Nurdin Ulama, Pejuang, Politikus, Pemimpin Demokrat, Pendidik, dan Pendakwah. Jakarta: Multipro.

Muzakkar, Kahar. 2008. Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia Kritik atas Pemikiran Politik Pemerintahan Presiden Soekarno. Bandung: Sega Arsy.

Nakamura, Mitsuo. 1983. Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah Di Kota Gede Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Napitupulu O.L.1972. Perang Batak Perang Sisingamangaradja. Djilid I. Jakarta: Yayasan Pahlawan Nasional Sisingamaradja.

Nasution, Harun. 1990. Thoriqot Qoditiyyah Naqsabandiyyah Sejarah, Asal Usul, dan Perkembangannya Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah. Tasikmalaya.

Natsir, M. 1954. Capita Selecta 1. Bandung: W.Van Hoeve.

______. 1957. Capita Selecta 2. Jakarta: Pustaka Pendis.

______. 2008. Mosi Integral Natsir dari RIS ke NKRI. Panitia Peringatan dan Media Dakwah.

______. 2008. Politik Melalui Jalur Dakwah. Panitia Peringatan dan Media Dakwah.

Noer, Deliar. 1991. Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES.

_________. 2000. Partai Islam Di Pentas Nasional. Bandung: Mizan.

Notosusanto, Nugroho. 1971. Naskah Proklamasi Jang Otentik dan Rumusan Pantjasila Jang Otentik. Jakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sedjarah ABRI.

__________________.1971. The Peta Army In Indonesia 1943-1945. Jakarta: Department of Defence and Security Centre for Armed Forces History.

__________________.1979. Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Novak, Michael. 1973. The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism. New York: The Free Press.

Nu'mani, Syibli. 1981. Umar Yang Agung Sejarah Dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II. Bandung: Pustaka ITB.

Peng Koen, Auwjong. 1962. Perang Pasifik 1941-1945. Jakarta: Kinta.

Pinardi. 1964. Sekarmadji MaridjanKartosuwirjoKisah Lahir dan Djatuhnya Seorang Petualang Politik. Jakarta: Aryaguna.

Poespowardojo, Soerjanto. 1991. Filsafat Pancasila. Sebuah Pendekatan Sosial Budaya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Poeze, Harry A. 2011. Madiun 1948 PKI Bergerak. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV.

Potter, E.B. (ed) et. al. 1960. The Great Sea War. New Jersey: Prentice Hall.

Pringgodigdo, A.K. Mr.1960. Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia. Tjetakan Keempat.

Jakarta: Pustaka Rakjat.

Prodjokusumo, H.S. 1987. *Muhammadiyah, Pendidikan Pesantren dan Pembangunan.* Jakarta: Penerbit A.B.M.

Purcell, Victor. 1952. *The Chinese In Southeast Asia.* London: Oxford University Press.

Pye, Lucian W. 1967. *Southeast Asia's Political Systems.* New Jersey: Prentice - Hall, Inc.

Ramadhan Al-Buthy, M. Said. 1999. *Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Manhajiah Terhadap Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah saw.* Jakarta: Robbani Press.

Rasjidi, H.M. tt. *Islam dan Kebatinan.* Ramadhan.

Al-Buthy, M. Said. 1999. *Sirah Nabawiyah.* Jakarta: Jajasan Islam Studi Club Indonesia.

Reid, Anthony. 1969. *The Contest For North Sumatra Atjeh, the Nederlands and Britain 1858-1898.* New York: Oxford University Press.

__________.1987. *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern.* Terjemahan Dharmono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Roem, Mohamad. 1969. *Karena Benar Dan Adil.* Jakarta: Hudaya.

__________.1970. *Pentjulikan, Proklamasi dan Penilaian Sedjarah.* Semarang: Hudaya dan Ramadhani.

__________. 1972. *Bunga Rampai Dari Sedjarah.* Jakarta: Bulan Bintang.

__________. 1978. *Mohamad Roem 70 Tahun Pejuang Perunding.* Jakarta: Panitia Buku Peringatan, Bulan Bintang.

__________.tt. *Setahun Sesudah Muktamar.* Jakarta: Kramat Empat Lima.

Sagimun M.D. 1965. *Pahlawan Dipanegara Berdjuang Bara Api Kemerdekaan Nan Tak Kundjung Padam.* Jakarta: Gunung Agung.

Saidi, Ridwan H. 1984. *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984.* Jakarta: CV Rajawali.

__________.1995. *Islam dan Nasionalisme Indonesia Mengungkap dokumen sangat eksklusif 1920 s/d 1950-an tentang pemikiran pemimpin Islam mengenai masalah kebangsaan.* Jakarta: LSIP.

__________. 2006. *Fakta & Data Yahudi Di Indonesia Dulu dan Kini.* Jakarta: Khalifa.

Salam, Solihin. 1961. *Hadji Agus Salim. Hidup dan Perdjuangannya.* Jakarta: Djaja Murni.

__________. 1982. *Bung Karno Putera Fajar.* Jakarta: Gunung Agung.

Salamah, Ummu. 2001. *Tradisi dan Akhlak Pengamal Tarekat.* Garut: Yayasan Musaddadiyah.

Sanit, Arbi. 1997. *Partai, Pemilu, dan Demokrasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Santosa, Khalid O. 2006. Jejak-jejak Sang Pejuang Pemberontak Pemikiran, Gerakan & Ekspresi Politik S.M. Kartosuwirjo dan Daud Beureuh. Bandung: Sega Arsy.

______________. 2007. Manusia di Panggung Sejarah Pemikiran dan Gerakan Tokoh-tokoh Islam. Bandung; Sega Arsy.

Sato, Shigeru. 1994. War, Nationalism and Peasants Java under the Japanese Occupation 1942-1945. New York: M.E. Sharpe.

Scherer, S. Prastiti. 1985. Keselarasan dan Kejanggalan Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX. Jakarta: Sinar Harapan.

Schimmel, Annemarie. 1992. Dan Muhammad Adalah Utusan Allah. Bandung: Mizan.

Setyo, Bambang. 2011. Tela'ah Kritis Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Aqidah Islam. Jakarta: Masyarakat Peduli Syariah.

Siauw Giap, The. 1986. Cina Muslim Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah.

Siddiq, Achmad. 1985. Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah. Jakarta: PBNU.

Siddiqi, Mazheruddin. 1975. The Quranic Concept of History. Pakistan: Islamic Research Institute Islamabad.

Shihab, Muhammad Quraish. 1996. Wawasan Al-Quran. Bandung: Mizan.

__________________________.1997.Tasir Al-Qur'an Al-Karim. Bandung: Pustaka Hidayah.

Simuh, 1988, Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Jati, Universitas Indonesia Press. Djakarta

Sinansari Ecip, S. (Ed) 1415 H/1994 M, NU Khittah dan Godaan Politik, Mizan, Bandung.

Singodimedjo, Kasman, 1982, Hidup Itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Bulan Bintang. Jakarta

Slametmuljana, 1968, Nasionalisme Sebagai Modal Perdjuangan Bangsa Indonesia. Djilid I. Jakarta: P.N.Balai Pustaka.

___________.1969. Nasionalisme Sebagai Modal Perdjuangan Bangsa Indonesia. Djilid II. Jakarta: P.N.Balai Pustaka.

Smith, Anthony. 1980. The Geopolitics of InformationNew York: Oxford University Press.

Smith, W.C. 1964. Islam Dalam Sedjarah Modern. Diterdjemahkan: Abu Salamah. Jakarta: Bhatara.

Sosrodihardjo, Soedjito. 1972. Perubahan Struktur Masjarakat di Djawa. Yogya karta: Penerbit Karya.

Soebardjo, Ahmad. 1977. Lahirnya Republik Indonesia. Jakarta: Kinta.

Soeharto, R. Dr. 1982. Saksi Sejarah Mengikuti Perjuangan Dwitunggal. Jakarta: Gunung Agung.

Soeharto, 1989. Soeharto Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Jakarta: Lamtoro Gung Persada.

Soegondo, R.M.G. tt. *Ilmu Bumi Militer Indonesia*. Djilid I. Jakarta: Pembimbing.

Soerojo, Soegiarso. 1988. *Siapa Manabur Angin Akan Menuai Badai* (G30S/PKI dan Apa Peran Bung Karno). Jakarta: CV Sri Murni.

Soetanto, Himawan. 1994. *Perintah Presiden Soekarno: "Rebut Kembali Madiun"* Siliwangi Menumpas PKI/Moeso 1948. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

________________.2006. *Madiun dari Republik ke Republik Aspek Militer Pemberontakan PKI Madiun 1948*. Jakarta: Kata Hasta.

________________. 2006. *Yogyakarta 19 Desember 1948*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soewargana, Oejeng. 1974. *Driemaal Gefaald De Mislukte Communistische Coup van 1965*. Jakarta: Yayasan Paritrana.

Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam Di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.

________________.1995. *Kawan Dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Stoddard, Lothrop. 1966. *Dunia Baru Islam*. Diterjemahkan: Gazali Dunia, Gazalba, Amrin Thaib. Jakarta: Panitia Penerbit.

______________. 1966. *Pasang Naik Kulit Berwarna*. Penerdjemah: Dra. Kistijah, Nj. Rochmuljati. Jakarta: Panitia Penerbit.

Sudiro, 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah.

Subandi, Hidayat. 2009. *44 Tahun Tragedi G-30-S/PKI*. Jakarta: Maju Jaya.

Suhelmi, Ahmad. 1999. *Soekarno Versus Natsir*. Jakarta: Darul Falah.

Sukarno, 1947. *Sarinah Kewadjiban Wanita dalam Perdjoangan Republik Indonesia*. Jakarta: Panitya Penerbit.

______. 1951. *Indonesia Menggugat*. Jakarta: Penerbitan S.K. Seno.

______. 1964. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitya Penerbit.

Sularman. 1428 H/2007 M. *K.H. Ahmad Sanusi Berjuang dari Pesantren Hingga Parlemen*. Bandung: MUI.

Sumarsono, Tatang (ed). 1998. *Mashudi Memandu Sepanjang Masa*. Bandung: Yayasan Universitas Siliwangi.

Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.

Suryanegara, Mansur A. 1980. *Fragmenta Islamica*. Bandung: Suara Istiqamah.

__________________. 1986, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Sejarah*. Jakarta: Departemen Agama RI.

__________________. 1995. *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.

__________________. 1996. *Pemberontakan Tentara Peta Di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan*. Jakarta: Yayasan Wira Patria Mandiiri.

__________________. 1999. Amerika Serikat Menolak Presiden Wanita. Jakarta: Darul Falah.

__________________. 2002. Al Quran dan Kelautan Sejarah Maritim yang Terlupakan. Jakarta: Swarna Bhumi.

Suswadi, 2003. Sumpah Pemuda Latar Sejarah dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional. Jakarta: Museum Sumpah Pemuda.

Sutomo, Bung Tomo. 2008. Menembus Kabut GelapBung Tomo Menggugat. Pikiran Surat dan Artkel Politik 1955 -1980. Jakarta: Visimedia.

Suwangsa, Aat dkk. 1995. Ir. R.H. Ukar Bratakusumah Dari Jaman Penjajahan Hingga Jaman Pembangunan. Bandung: Yayasan Kudjang.

Tabah, Anton. 2009. Jenderal Besar Nasution Bicara Tentang G-30-S/PKI. Klaten: Penerbit CV Sahabat.

Thoha, Ahmadie. 1986. Muqaddimah Ibn Khaldun. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Thohir, Ajid. 2002. Gerakan Politik Kaum Tarekat. Bandung: Pustaka Hidayah.

__________. 2004. Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjokroaminoto, H.O.S. 1963. Islam dan Sosialisme. Jakarta: Lembaga Penggali dan Penghimpun Sedjarah Revolusi Indonesia.

Toynbee, Arnold J. 1947. A Study Of History Abrigement of Volumes I-VI, Abrigement of Volumes VII – X, By D.C. Somervell. New York: Oxford University.

__________________.1951. War and Civilization. London: Oxford Unibersity Press.

Vlekke, Bernard H.M. 1961. Nusantara A History of Indonesia. Bruxelles: A. Manteau.

Wallerstein, Immanuel. 1991. Geopolitics and Geoculture Essays on the changing world-system. Cambridge University Press.

Wange, Vincent. 1999, Direktori Partai Politik Indonesia. Jakarta: Permata Media Komunika.

Weigert, Hans W. 1957. Principles of Political Geography. New York: Appleton Century-Crofts.Inc.

Wildan, Dadan. 1995. Sejarah PerjuanganPersis 1923-1983. Bandung: Gema Syahida.

______________. 2000. Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam Di Indonesia. Bandung: Persis Press.

______________. 2003. Sunan Gunung Jati Antara Fiksi dan Fakta. Bandung: Humaniora Utama Press.

Wilis, Abdul Hamid. 2011. Aku Jadi Komandan Banser Barisan Ansor Serbaguna Surodakan, Sumberingin. Trenggalek.

Williams, T. Harry. 1963. A History of The United States. New York: Alfred A. Knopf.

Wiranatakoesoema, R.A.A. 1941. Riwayat Kandjeng Nabi Moehammad S.A.W. Bandung: Regent Bandoeng-Islam Studieclub.

Wirjosukarto, A.H.1968. Rangkaian Mutu Manikam. Kumpulan Buah Pikiran Kjahi

Hadji Mas Mansur 1896-1946. Surabaya: Penjebar Ilmu & Al-Ichsan.

Yahya, Iip D. 2008. *Oto Iskandar Di Nata. The Untold Stories.* Bandung: FDWB Publishing.

Yuanzhi, Kong. 2007. *Muslim Tionghoa Cheng Ho.* Jakarta: Pustaka Populer Obor.

Yunus, H. Anas M. 2009. *Gerak Kebangkitan Aceh Kumpulan Karya Sejarah M. Junus Djamiel.* Bandung: Bina Biladi Press.

Yudo Husodo, Siswono. 1985. *Warga Baru Kasus Cina Di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.

Yusufpati, Miftah. 2007. *HM Soeharto Membangun Citra Islam.* Jakarta: AsiaMark.

Zahri, Mustafa. 1976. *Kunci Memahami Ilmu Tasawwuf.* Surabaya: Bina Ilmu.

Zakaria, Rafiq. 1989. *The Struggle Within Islam.* Australia: Penguin Books.

Zara, M. Yuanda.. 2007. *Sakura di Tengah Prahara: Biografi Ratnasari Dewi Sukarno.* Yogyakarta: Ombak.

Zbigniew, Brzezinski. 1990. *Kegagalan Besar Muncul Dan Runtuhnya KomunismeDalam Abad Kedua Puluh.* Terjemahan: Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zuhri, Saifuddin. 1965. *Agama Unsur Mutlak Dalam Nation Building.* Jakarta: Lembaga Penggali dan Penyebar Al-Islam.

Indeks

A

B

C

D

N

O

P

R

S

PROFIL PENULIS

Nama : **Ahmad Mansur Suryanegara** (22 Dzulhijjah 1353)
Istri : Nia Kurniawati
Ayah : Hasan Moekmin
Ibu : Siti Aminah
Alamat : Jalan Saturnus Raya 27 Bandung 40286 Tlp. (022) 7562194

Pengalaman Mengajar

SMP Muslimin 1, 2, 4, Bandung
SMP Yayasan Pendidikan Islam Bandung
SMP - SGA Darul Hikam Bandung
Ketua Seksi Sejarah SMP Muslimin 1 - 11 Bandung
Universitas Padjadjaran - UNPAD Bandung
Universitas Pasundan - UNPAS Bandung
Universitas Islam Bandung - UNISBA Bandung - Purwakarta
Universitas Islam Nusantara - UNINUS Bandung
Universitas Wydiatama - UTAMA Bandung
Institut Keguruan Ilmu Pendididkan, IKIP, Bandung - Tasikmalaya
Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati, IAIN - SGD, Bandung
Akademi Pendidikan Agama Islam, Major Makmun - APAI, Bandung
Akademi Managemen, Informasi, Komputer Al Ma'soem - AMIK, Bandung
Akademi Sekretaris dan Managemen Taruna Bakti - ASMTB, Bandung

Anggota Organisasi

Pelajar Islam Indonesia - PII
Ikatan Pelajar Muhammadiyah - IPM
Pemuda Muhammadiyah
Pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Jawa Barat
Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Jawa Barat
Pendiri Himpunan Mahasiswa Sejarah, UNPAD
Himpunan Mahasiswa Islam, Bandung

Ikatan Keluarga Alumi Universitas Padjadjaran, UNPAD
Ikatan Sarjana Sastra Indonesia, UNPAD
Korp Pegawai Republik Indonesia, UNPAD
Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Jawa Barat
Pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jawa Barat

Anggota Pembina Pesantren - Masjid
Pesantren Daruut Tauhid Bandung
Pesantren Modern Baiturrahman Bandung
Pesantren Al-Qur'an Babussalam Bandung
Pesantren Al-Qur'an Ash-Shoffah Bandung
Pendiri Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia - BKPMI Bandung
Pendiri Badan Komunikasi Masjid Margahayu Raya dan Sekitarnya - BAKOMAS
Masjid Istiqomah Taman Citarum Bandung
Masjid Al-Jihad, UNPAD, Bandung
Masjid Ibnu Sina, UNPAD, Sumedang
Masjid Al-Asy'ari, UNISBA, Bandung
Masjid Libasut Taqwa, STTT, Bandung
Masjid Al-Makmur, STIEB, Bandung
Masjid Al-Ikhlas, Margahayu Raya, Bandung
Masjid At-Taqwa, Margahayu Raya, Bandung
Masjid Ash-Shoffah, Bandung
Masjid Muhajirin dan Madrasah Nurul Bardan, Sumedang

Pembina Yayasan
Yayasan Dana Al-Falaah Bandung
Yayasan Al-Ma'soem Bandung
Yayasan Al-Ukhuwwah Bandung
Yayasan Suryanegara Bandung

Karya Tulis
Artikel
Benarkah 20 Mei Sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Harian ABADI. Senen, 19 Mei 1969 M, 2 Rabiul Awwal 1389 H
Ummat Islam dan Sumpah Pemuda. Harian ABADI. Senin, 27 Oktober 1969 M, 16 Sja'ban 1389 H
Renungan Hari Pahlawan. I-III. Harian ABADI. Senin - Kamis, 10 - 13 Nopember 1969 M, 30 Sya'ban - 3 Ramadhan 1389 H

"Small China" Di Kalimantan Barat. I - III. Harian ABADI. Rabu – Djum'at, 22-24 April 1970 M, 16 - 18 Shafar 1390 H

Aksi Kebangkitan Rakjat Suku Daja. I - II. Harian ABADI. Senin - Selasa, 8 – 9 Djuni 1970 M, 3 - 4 Rabiul Awwal 1390 H

22 Djuni Hari Fakku Raqabah. I - VII. Surat Kabar Umum GALA. 2 - 23 Djuli 1970 M, No. 139 - 145, Tahun Ke II

Ulama dan Penguasa. I-II. Harian ABADI. Rabu - Kamis, 7 - 8 Oktober 1970 M, 7 - 8 Sja'ban1390 H

Korupsi dan Pemilu. I-II. Harian ABADI. Senin - Selasa, 12 - 13 Oktober 1970 M, 12 - 13 Sja' ban 1390 H

Gerombolan Tjina Komunis Kalimantan Barat. I-II. Harian ABADI. Senin - Selasa, 19 - 20 Oktober 1970 M, 20 - 21Sja'ban 1390 H

Buruh Tani Islam Indonesia Abad Ke-19. I-II. Harian ABADI. 21 - 22 Oktober 1970 M, 21 - 22 Sja'ban 1390 H

Sumpah Pemuda, Umat Islam, dan Bahasa Indonesia. Harian ABADI. Sabtu, 24 Oktober 1970 M, 24 Sja'ban 1390 H

Tanggung Djawab Ummat Islam Terhadap Penulisan Sejarah, Harian ABADI. Sabtu, 15 Agustus 1970 M, 13 Djumadil Achir 1390 H

Aku Titipkan Muhammadijah ini Kepadamu. Harian ABADI. Djum'at, 20 Nopember 1970 M, 21 Ramadhan 1390

Wali Sanga Dan Media Dakwahnya. I-II. Surat Kabar Umum KALA. Minggu Ke-I, 1970, No.11 Th. I dan Minggu Ke-V, 1971, No.12 Th.II

Geopolitik. I - III. Harian ABADI. Senin - Rabu, 22 - 24 Februari 1971 M, 26 - 28 Dzulhijjah 1390 H

Snouck Hurgronje dan Ulama. Harian ABADI. Selasa, 22 Djuni 1971 M, 28 Rabiul Akhir 1391 H

Fasisme Jepang dan Ummat Islam. I-II. Harian ABADI. Jumat - Sabtu, 9 - 10 Juli 1971, 16 - 17 Rabiul Awwal 1391 H.

HOS Tjokroaminoto dan Ratu Adil. Harian ABADI. Selasa, 13 Nopember 1971 M, 17 Rabiul Awwal 1391 H.

Pemikiran HOS Tjokroaminoto tentang Kemauan, Kekuatan, Kemenangan, Kekuasaan, Kemerdekaan. I - II. Harian ABADI. Senin - Selasa, 13 - 14 Maret 1972 M

Bolshevisme dan India Bagaimana Membendung Pengaruh Komunis. Harian ABADI. Senen, 27 Maret 1972 M, 11 Shafar 1392 H.

Peristiwa Banten 12 Nopember 1926 Benarkah Sebagai Pemberontakan Komunis Indonesia. PANJI MASYARAKAT. No. 118. Tahun XIV. 1 Januari 1973 M, 26 Dzulhijjah 1392 H

Perlawanan Pessantren Tehadap Ekspansi Politik Imperialis Belanda. PANJI MASYARAKAT. No. 127. Tahun XIV. 15 Mei 1973 M.

Ummat Islam dan Kebangkitan Nasional. I - II. Harian ABADI. 21 - 22 Mei 1973 M, 19 - 20 Rabiul Akhir 1393 H

Fatahillah dan Dakwahnya. PANJI MASYARAKAT. No. 132 Th.XV. 1 Agustus 1973 M

Undang Undang Perkawinan Dan Reaksi Ummat Islam, Tunduk Dibawah Ordonanntie Perkawinan Hukumnya Haram, Ungkapan Sejarah Tahun 1937. PANJI MASYARAKAT. No 136. Tahun XV.1 Oktober 1973 M, 4 Ramadhan 1393 H

Pemilu dan Perkawinan. PANJI MASYARAKAT. No. 141.Tahun XV, 15 Desember 1973 M, 20 Dzulhijjah 1393H.

Pendudukan dan Politik Jepang Di Indonesia. Panji Masyarakat. No.145. Tahun XV. 15 Februari 1974 M, 22 Muharram 1394 H.

Gerombolan Cina Komunis PGRS dan PARAKU. PANJI MASYARAKAT. No. 156 dan 157, Tahun XVI. 1 dan 15 Agustus 1974 M, 12 dan 26 Rajab 1394 H.

Jawaban Ummat Islam Filipina Terhadap Tantangan Kristenisasi. PANJI MASYARAKAT. No.164. Tahun XVI. 1 Desember 1974 M, 17 Dzulhijjah 1394 H.

Pengaruh Tehnologi Terhadap Perkembangan Agama. PANJI MASYARAKAT. No.172. Tahun XVII. 1 April 1975 M, 19 Rabiul Awwal 1395 H.

Bencana Wabah Alkoholisme. PANJI MASYARAKAT. No. 173. Tahun XVII. 15 April 1975 M, 3 Rabiul Akhir 1395 H

Mentuna Politikan Ummat Islam Indonesia. I – III. PANJI MASYARAKAT. No. 180, 181, dan 183. Tahun XVII. 1, 15, Agustus dan 15 September 1975 M, 23 Rajab, 7 Sya'ban dan 9 Ramadhan 1395 H.

Maksud dan Kegunaan Studi serta Penelitian Sejarah Ekonomi Indonesia. I - II. PANJI MASYARAKAT. No. 189 dan 190. Tahun XVII. 15 Desember 1975 M dan 1 Januari 1976 M, 12 dan 28 Dzulhijjah 1395 H.

Si Singamangaraja XII Gugur Sebagai Pahlawan Islam. PANJI MASYARAKAT. No.207. Tahun XVIII. 15 September 1976 M, 20 Ramadhan 1396 H

Propaganda Senjata Utama Perang Urat Syaraf Dan Pembentuk Opini Publik. PANJI MASYARAKAT. No. 213. Tahun XVIII. 15 Desember 1976 M, 13 Dzulhijjah 1396 H.

Gerakan Protes Pesantren Sukamanah, Perlawanan Petani Muslim Sukamanah Singaparna, Terhadap Balatentara Jepang. I-II. PANJI MASYARAKAT. No.221 dan 222. Tahun XVIII. 15 April - 3 Mei 1977 M, 26 Rabiul Akhir – 16 Jumadil Awwal 1397 H.

Menghadapi Problem Politik Aliran Kepercayaan. PANJI MASYARAKAT. No. 236. Tahun XIX. 1 Desember 1977 M, 19 Dzulhijjah 1397 H

Proses Perubahan Tingkah Laku Dalam Operasi Revolusi. PANJI MASYARAKAT. No. 244. Tahun XIX. 1 April 1978 M. 22 Rabiul Awwal 1398 H

Peranan Ulama Dalam Pendidilan. I-II. PANJI MASYARAKAT. No. 248 - 249. Tahun XIX, 1 – 15 Juni 1978 M, 24 Jumadil Akhir – 9 Rajab 1398 H

Pengaruh Busana Terhadap Pemakainya. PANJI MASYARAKAT. No. 250. Tahun XX. 1 Oktober 1978, 28 Syawwal 1398.

Makna Media Suara Istiqamah. SUARA ISTIQAMAH. No. 41/Th.XV/78. Jumat 13 Oktober 1978 M, 18 Hapit 1398 H

Mengenang 10 Nopember 1945. Pahala dari Allah Bagi Para Pahlawan. SUARA ISTIQAMAH . No. 45/ Th. XV/ 78. Jumat. 10 Nopember 1978 M, 9 Dzulhijah 1398 H

Bencana Hidup Mewah. Mabuk Kemenangan Awal Kehancuran. SUARA ISTIQAMAH. No. 48/ Th.XV/78. Jumat. 17 Nopember 1978 M, 16 Rayagung 1398 H

Mengamati Tingkah Laku Politik. PANJI MASYARAKAT. No.260. Tahun XX. 1 Desember 1978, 30 Dzulhijjah 1398 H

Mengikuti Agama Nabi Ibrahim. SUARA ISTIQAMAH. No. 50 / Th. XV/ 78. Jumat. 8Desember 1978 M, 8 Muharram 1399 H

Tugas Kerasulan Isa Dalam Al Quran. SUARA ISTIQAMAH. No. 52 / Th. XV / 78. Jumat. 15 Desember 1978 M, 15 Muharram 1399 H

Alkoholisme dan Kejahatan. SUARA ISTIQAMAH. No.1 /Th. XV/ 79. Jumat. 5 Januari 1979 M, 6 Shafar 1399 H.

Tugas Kerasulan Musa Menghadapi Firaun. SUARA ISTIQAMAH. No. 3/Th. XV/79. Jumat 19 Januari 1979 M, 20 Shafar 1399 H.

Orang Yahudi Menyalakan Api Peperangan. SUARA ISTIQAMAH. No. 14/Th.XV/ 79. Jumat 6 April 1979 M, 9 Jumadil Awwal 1399 H.

R.A. Kartini Seorang Muslimat Yang Melawan Adat. SUARA ISTIQAMAH. No. 15 / Th XV / 79. Jumat. 20 April 1979 M, 23 Jumadil Awwal 1399 H.

Peranan Ulama dalam Reformasi Pendidikan di Indonesia. SUARA ISTIQAMAH. No. 18 / Th XV / 79. Jumat. 11 Mei 1979 m. 15 Jumadil Akhir 1399 H.

Peranan Ulama dalam Perang Kemerdekaan. PANJI MASYARAKAT. No. 277. Th XXI. 15 Agustus 1979 M, 22 Ramadhan 1399 H.

Peranan Ulama dalam Gerakan Nasional. SUARA ISTIQAMAH. No. 20 Th XV/ 79. Jumat. 18 Mei 1979 M, 21 Jumadil Akhir 1399 H.

Perlawanan Santri Jawa Tengah 1825-1830. Bulletin KULLIYATUL MUJAHIDIN. N0.18. Juni 1979 M, Rajab 1399 H.

Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan. SUARA ISTIQAMAH. No. 33/Th XV/79. Jumat.17 Agustus 1979 M, 24 Ramadhan 1399 H

Kerjasama Mempercepat Proses Kemenangan. SUARA ISTIQAMAH. No. 1 /Th XVI/ 80. Jumat. 4 Januari 1980 M, 16 Shafar 1400 H

Ummat Islam Indonesia dalam Perspektif Sejarah. PANJI MASYARAKAT, No. 284.

Peranan Lasykar Hizbullah dalam Perang Sabil Ambarawa. PANJI MASYARAKAT, No. 304.

Kembali Ke Al Quran. SUARA ISTIQAMAH. No. 4/Th XVI/ 80. Jumat. 25 Januari 1980 M, 7 Rabiul Awwal 1400 H

Menjaga Kehidupan yang Jauh dari Kemiskinan. SUARA ISTIQAMAH. No. 7/ Th. XVI/80. Jumat. 15 Februari 1980 M, 28 Rabiul Awwal 1400 H

Politik Seberang Lautan Amerika Serikat. MERDEKA, Jum'at, 21 Oktober 1983.

Tanda-Tanda Keruntuhan Peradaban Barat. MERDEKA, Jum'at, 4 Nopember 1983

Batas Pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah. PANJI MASYARAKAT. Tahun XXXII. 21 - 30 September 1990 M, 2 - 11 Rabiul Awwal 1411H.

Konsep Wisata Ziarah dalam Perkembangan Islam di Jawa Barat. I - II. MEDIA PEMBINAAN. No. 1 dan 2/XXI, 1994

Proklamasi Terjadi pada Bulan Ramadhan. HIKMAH. Minggu IV. Pebruari 1994 M, Ramadhan 1414 H.

Langkah Persis dalam Pengindonesiaan Islam. HIKMAH. Minggu I. 1 September 1995 M, 5 - 11 Rabiul Tsani 1416 H.

Bila Umat Islam Terjebak Provokasi Etnis dan Religi. HIKMAH. Minggu Ke-3, Januari 1995 M, 16 - 22 Sya'ban 1415 H

Bila Revolusi Telah Berlalu. HIKMAH. Minggu I. Agustus 1995 M, 7 - 13 Rabiul Awwal 1416

Pembelokkan Sejarah Itu Disengaja. HIKMAH. Minggu IV. September 1995, 26 Rabiul Tsani – 3 Jumadil Awwal 1416 H.

Periode Madinah Awal Menta Kehiupan. HIKMAH. Minggu IV. Juli 1996 M.

Kriminalitas Sebagai Media Kudeta. HIKMAH. 11 - 17 Ramadhan 1418 H

Perang Agama Di Indonesia. HIKMAH. 8 - 14 Dzulqaidah 1418 H

Oemar Said Tjokroaminoto, Pembangkit Gerakan Nasional. HIKMAH. Minggu IV. Mei 1997, 16 - 22 Muharram 1418 H.

Sekulerisasi Tata Pikir dan Perilaku Umat. HIKMAH. Minggu IV. Agustus 1997, 18 - 24 Rabiul Akhir 1418 H.

Peran Ulama dalam Kemiliteran Indonesia. HIKMAH. 1 Nopember 1997 M, 6 Rajab 1418 H

Pemasaran "Produk" dengan Label Agama. HIKMAH, Minggu I, Desember 1997 M, 4 - 10 Sya'ban 1418 H

Pusat Dakwah Islam Selamat Datang dan Masjid Raya Balai Kota Bandung. PIKIRAN RAKYAT, Senin, 15 Desember 1997, Nomor 84 Tahun XXXII.

Mengembalikan Budaya Lebaran Jadi Idul Fitri. HIKMAH. Minggu IV. Januari 1998, 24 - 29 Ramadhan 1418 H.

Menyambut Hari Lahir NU Ke-76, Gus Dur Berlari Kencang Bagaikan Kijang. PIKIRAN RAKYAT. Bandung. Selasa (Wage), 26 Oktober 1999, 15 Rajab 1420 H.

Berkat Rahmat Allah. PIKIRAN RAKYAT. Bandung. Selasa (Manis) 11 Desember 2001 M, 25 Ramadhan 1422 H.

Puasa & Kemerdekaan. PIKIRAN RAKYAT. Bandung. Senin (Manis), 11 November 2002 M, 6 Ramadhan 1423 H.

Keluarga Muslim Perlu Pahami Sejarah. PIKIRAN RAKYAT. Bandung. Jumat (Pahing) 16 Januari 2004 M, 23 Dzulqaidah 1424 H.

Problematika Penentuan Hari Jadi Cimahi. PIKIRAN RAKYAT. Bandung. Kamis (Pon), 26 Juni 2003, 25 Rabiul Akhir 1424 H.

Tol Sakti Alamsyah dan Atang Ruswita. PIKIRAN RAKYAT. Bandung. Selasa (Pahing), 19 Agustus 2003, 20 Jumadil Akhir 1424 H.

Peran Kiai "2005" Tetap Diperhitungkan. PIKIRAN RAKYAT. Bandung. Kamis (Manis), 15 Desember 2005, 13 Dzulqaidah 1426 H.

Tangis Rahim di Lembah Bakkah. PIKIRAN RAKYAT. Bandung. Jumat (Wage), 23 Desember 2005, 21 Zulqaidah 1426 H.

Kebangkitan Islam dalam Perspektif Historis. PIKIRAN RAKYAT. Bandung. Senin (Pahing), 30 Januari 2006, 30 Zulhijjah 1426 H.

Buku

Islam Untuk Disiplin Ilmu Sejarah. Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 1986.

Menemukan Sejarah. Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia. Mizan. Bandung, Muharam 1416 H/Juni 1995 M.

Pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air - Peta di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan. Yayasan Wira Patria Mandiri. Jakarta. 1996.

Amerika Serikat Menolak Presiden Wanita. Darul Falah. Jakarta. Jumadil Tsani 1420 H/Oktober 1999 M.

Al-Qur'an dan Kelautan. Sejarah Maritim yang Terlupakan. Yayasan Swarna Bhumi. Jakarta, 2000 M.

Api Sejarah (Jilid 1 dan 2): Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan NKRI. Bandung: Salamadani, 2009 dan 2010 M.

AHMAD MANSUR SURYANEGARA
&
NURUL NURHAETY
1968

PRASASTI

PERNIKAHAN PERJUANGAN

NURUL NURHAETY

AHMAD MANSUR SURYANEGARA

TERAWALI DENGAN KESEDERHANAAN DI MASJID AGUNG BANDUNG
2 Dzulqaidah 1387 – Kamis 1 Februari 1968
DALAM MENGARUNGI PERJALANAN KERUMAHTANGGAAN
DIPENUHKAN COBAAN DAN TANTANGAN DIHADAPI DENGAN KETABAHAN
DAN KESABARAN TIADA HINGGA
DITERIMA DENGAN KEIKHALASAN DAN KETAKWAAN
DALAM CURAHAN RAHMAT DAN KARUNIA ALLAH MAHA KASIH
MAHA SAYANG
MENYEBERANGKAN KELIMA PUTRA PUTRI AMANAH-NYA
DARI MASA KECIL HINGGA BERUMAH TANGGA

Yulia Damayanti & Zulkifli Azir — Milly Ariyanti & Wawan Purnawan
Ade Dian Maulidianti & Saeful Hidayat — Deece Dewiyanti & Agus Denni
Mohammad Yudi Yustiawan & Anna Dianawati

Mamih, Nenek mengarungi takdir perjuangan kebersamaan berlangsung selama

43 TAHUN HIJRAH		41 TAHUN MASEHI
2 Dzulqaidah 1387	Kamis	1 Februari 1968
30 Muharam 1430	Selasa	27 Januari 2009

Hadirlah Keluarga Besar Dinasti Suryanegara
Aa Ince Muhammad Arya Hakim, Ade Ince Siti Gina Aulia, Aa Andika Januar, Aa Mohammad Irfan Hidayat, Ade Adina Sophie Andini, Aa Mohammad Fadhil Adnanhasan, Ade Hanna Naufal Fadhila, Aa Gusman Mohammad Abiyasa, Ade Bisma Mohammad El Rumi dan seorang yang masih dalam penantian kelahiran sekitar lima bulan lagi Divana Arumi Putri
Selamat Jalan Mamih Tersayang dan Nenek Tercinta
Semoga Allah Maha Kasih Maha Sayang
Selalu Melimpahkan Magfirah, Rahmat, dan Karunia-Nya.

27 Rajab 1366	Kamis	19 Juni 1947
30 Muharram 1430	Selasa	27 Januari 2009

Mahakarya Fenomenal dari Ahmad Mansur Suryanegara

MENEMUKAN SEJARAH

WACANA PERGERAKAN ISLAM DI INDONESIA

EDISI REVISI

api sejarah 2

MAHAKARYA PERJUANGAN ULAMA DAN SANTRI DALAM MENEGAKKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

RASULULLAH SAW dengan mendasarkan *Wahyu Allah* mengadakan *Koreksi dan Membenarkan Kembali kesalahan Sejarah Kenabian dan Kerasulan.* Kekeliruan menerima petunjuk Sejarah Kenabian dan Kerasulan berdampak sangat fatal, *tersesat* dan jadi *Jahiliyah*. Bertingkah laku jauh dari kebenaran. Oleh karenanya *Rasulullah saw* mengadakan *rekonstruksi* Sejarah Kenabian dan Kerasulan yang benar dihimpun dalam *Al Quran*. Diingatkan, Kitab Suci *Taurat, Zabur, Injil* dan *Suhuf* para Nabi dan Rasul yang *benar sejarahnya, hanya ada di Al Quran.* Rekonstruksi dan reinterpretasi Sejarah Kenabian dan Kerasulan dalam Al Quran, *menjadi bukti dan fakta agama Allah sejak Nabi Adam as hingga Rasulullah saw, hanya satu agama Allah* yakni *Islam*. Agama Tauhid menolak dan menyangkal ajaran Trinitas.

Agama Islam yag dibawakan oleh 25 Nabi dan Rasul ajarannya yang dituliskan dalam Al Quran, tidak terlalu lama dalam perhitungan tahun sejarah, 674 M sampai ke nusantara Indonesia di abad 7 pula, dengan jalan *damai*. Terbukti telah adanya koloni niagawan Arab Islam di Pantai Barat Sumatera. Melalui *penguasaan pasar*, Islam membuat orang pasar punya *Bahasa Melayu Pasar* dan punya Huruf Arab Melayu. Keduanya menjadikan lahirnya *peradaban Islam* dari *Pesantren* hingga timbulnya 63 kekuasaan politik Islam atau *kesultanan* di seluruh nusantara. Memiliki bahasa persatuan *Bahasa Indonesia* dan Bendera Rasulullah saw, *Al Ahmar wal Abyad* - Merah Putih sebagai identitas Islam di seluruh nusantara Indonesia.

Islam menyelamatkan *Pribumi Muslim* dari malapetaka penjajah Barat. Ketika *Paus Alexander VI* dengan *Perjanjian Tordesilas* (1494) memberikan kewenangan kepada *Keradjaan Katolik Portugis* dan *Katolik Spanyol* menjajah dunia bagian barat dan timur. Menjajah menurut *Katolikisme* sebagai *Mission Sacre – Misi Suci* sekalipun dengan cara *genocide* – pemusnahan bangsa yang dijajah. Dirampok kekayaannya – *gold*. Dipaksakan alih agama jadi Nasrani – *gospel*. *Bangsa Indian musnah, Aborijin* jadi terbelakang kehidupannya. Tetapi penjajah terhadap Islam di Indonesia tidak berhasil memusnahkan Pribumi Islam.

Walaupun *Keradjaan Protestan Belanda* menyusul berupaya dalam ratusan tahun, tidak mampu menghancur kan Pribumi Islam. Bahkan terbalik, *Keradjaan Protestan Belanda* yang tumbang tersingkirkan. Demikian pula *Kekaisaran Shinto Jepang*, tidak mampu membinasakan Umat Islam Indonesia walaupun dengan berbagai cara. Antara lain *Romusha* – Kerja Paksa. Justru sebaliknya Ulama dan Santri memanfaatkan situasi Perang Asia Timur Raya, untuk memiliki organisasi militer modern, *Tentara Pembela Tanah Air – Tentara Peta* sekitar 68 Batalyon. Dan keseluruhan *Komandan Batalyonnya* adalah *Ulama*. Ketika Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, lahirlah dari *rahim* Tentara Peta, *Tentara Nasional Indonesia - TNI* sebagai *Anak Kandung Rakyat* (5 Oktober 1945). Tekad bangsa Indonesia, *penjajahan harus dihapuskan di atas dunia. Karena bertentangan dengan prikemanusiaan dan prikeadilan*, terumuskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda, TNI melancarkan *Gerilya*. Pemerintah Kabinet Parlementer mengadakan *Diplomasi*. Di bawah Perdana Menteri *Sutan Sjahrir* (Partai sosialis Indonesia) diadakan *Perundingan Linggajati* (1946). Hasilnya gagal. Diikuti dengan *Renville Agreement* (1948) dipimpin oleh Perdana Menteri *Amir Sjarifoeddin* (PKI) hasilnya gagal. Disusul dengan *KMB* dipimpin oleh Perdana Menteri *Mohammad Hatta* (PNI) hasil gagal.

Tetapi setelah adanya *Kudeta Westerling* dengan APRA, 23 Januari 1950, atas inisiatif *Mohammad Natsir* dari Partai Politik Islam *Masyumi*, dengan *Mosi Integral*, terbentuklah untuk pertama kalinya, *Negara Kesatuan Republik Indonesia* – NKRI (17 Agustus 1950) dengan *Presiden Soekarno* (PNI), *Wk. Presiden Mohammad Hatta* (PNI), dan *Perdana Menteri Mohammad Natsir* (Masyumi).

Berkat Rahmat Allah Maha Kuasa, Indonesia Merdeka. Dan terbentuknya NKRI sebagai *Maha Karya Mohammad Natsir* dari Partai Politik Islam *Masyumi*, partainya seluruh umat Islam Indonesia. Demikian pula *Lambang Negara Garuda Pancasila*, disahkan oleh Perdana Menteri *Dr. Soekiman Wirjosandjojo* dari Partai Politik Islam *Masyumi* (1950). Hanya dengan API SEJARAH 1 dan 2 akan menemukan fakta Maha Karya Ulama dan Santri dalam menegakkan NKRI dan Juang Jihad para Presiden Republik Indonesia (Soekarno - Joko Widodo).

Penerbit triA pratama

office : jl. saturnus raya no. 27 margahayu raya bandung, 40286
studio : komplek GBA 2 blok b1 no. 15 cipagalo, bojongsoang, bandung.
telp./fax : +62 22 7533328, 0812 2001 9797
email: aching.triapratama@yahoo.com

Penerbit Tria Pratama
@PenerbitTriaPra